LAPORAN TAHUNAN 2022

KOLABORASI UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN

Silakan memindai Kode QR berikut untuk mengunduh Laporan Tahunan ini

www.bankbsi.co.id
BSI Call 14040

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930

Bank Syariah Indonesia @banksyariahindonesia Bank Syariah Indonesia bankbsi_id

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

KOLABORASI UNTUK AKSELERASI PERTUMBUHAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

LAPORAN TAHUNAN 2022

Kolaborasi untuk Akselerasi Pertumbuhan

Tahun 2022 merupakan tahun penuh pertama operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") dapat dilakukan secara komprehensif dan integratif, setelah ditetapkannya "Operational Day 1" pada tanggal 1 November 2021. Sepanjang tahun tersebut, BSI konsisten membangun sinergi antara kekuatan-kekuatan tiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi, infrastruktur layanan maupun ragam produk dan jasa. BSI juga bergerak cepat menggalang kolaborasi dengan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Langkah-langkah sinergi dan kolaborasi tersebut terbukti mampu mendorong kinerja BSI ke tingkat yang memuaskan, sebagai ujung tombak perbankan syariah dalam lanskap perbankan nasional.

Kesinambungan Tema

2018

Menapak Esok dengan Digitalisasi

BRIsyariah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah antara lain dengan pengembangan produk digital eksisting melalui integrasi dari iBank dan Mobile Banking, BRIS Online. Sejalan dengan hal itu, praktik tata kelola terbaik terus diimplementasikan untuk lebih memperkuat branding Solusi Keuangan yang Amanah. Selanjutnya, sebagai salah satu bank pelopor green banking, Perseroan terus memperkokoh landasan keberlanjutan antara lain melalui persyaratan pembiayaan yang pro lingkungan maupun penggunaan sumber daya yang efisien dalam operasional Bank.

Seluruh strategi tersebut adalah kekuatan BRIsyariah untuk dapat mencapai visi menjadi bank syariah dan bank ritel modern yang terkemuka di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah, dimana BRIsyariah memiliki fokus meningkatkan pembiayaan syariah untuk pembangunan Negeri.

2019

Berinovasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Pada tahun 2019, BRIsyariah yang telah mencapai usia ke-11 tahun tak pernah henti bermuhasabah demi kemajuan dan berkembang bersama seluruh masyarakat Indonesia. Pertumbuhan yang berkelanjutan senantiasa menjadi goal BRIsyariah dalam beraktivitas dan menapaki bisnis ke depan. Di balik pertumbuhan yang berkelanjutan tersebut tentu ada banyak sekali elemen bisnis yang semuanya saling berkaitan dan bersinergi baik dalam hal operasional, kepatuhan, maupun segmen yang menjadi fokus bisnis BRIsyariah.

Inovasi dalam hal ini sangat berperan besar dan berlaku universal di tiap lini struktur organisasi BRIsyariah. Inovasi dalam hal operasional, misalnya. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, BRIsyariah berkomitmen memperkaya dan melengkapi fitur-fitur electronic banking (e-banking) dengan terus melakukan inovasi yang dilandasi pengalaman dan atau kebutuhan nasabah. Di tahun 2019 BRIsyariah meluncurkan i-Kurma, Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani. i-Kurma, yang merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro diluncurkan di milad BRIsyariah ke-11. i-Kurma akan mempercepat proses pencairan pembiayaan mikro.

Tak hanya fitur, BRIsyariah juga selalu berupaya menghadirkan produk dan layanan baru yang dapat menggugah nasabah akan Solusi Keuangan yang Amanah. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, aktivitas yang dilakukan BRIsyariah senafas dengan yang diinginkan Pemerintah dan Otoritas Keuangan terkait, yakni adanya peningkatan inklusi keuangan dan merata di seluruh khalayak.

2020

Menyebarkan Layanan untuk UMKM Di Pelosok Negeri

BRIsyariah berkomitmen untuk terus memberikan layanan perbankan syariah yang amanah, melalui pengembangan teknologi dan inovasi digital guna kemudahan bagi para nasabah, utamanya untuk mencapai aspirasi dan visi misi menjadi bank ritel melalui digitalisasi, sebagai satu kesatuan dalam integrasi inklusi finansial Grup BRI yang dapat diandalkan.

Di tengah pandemi COVID-19, BRIsyariah melakukan sejumlah langkah agar pertumbuhan bisnis Bank tetap sehat. Yang utama dilakukan adalah optimalisasi layanan perbankan digital sebagai langkah adaptive operations, selektif dalam menyalurkan pembiayaan serta melakukan restrukturisasi sebagai pre-emptive strategies for sustainable financing portfolio.

Selain itu, Bank juga meningkatkan dana murah yang sehat serta buffer likuiditas sebagai penerapan healthy liquidity management. Hasilnya di tahun 2020, selain kenaikan laba, BRIsyariah juga tumbuh di sisi aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga.

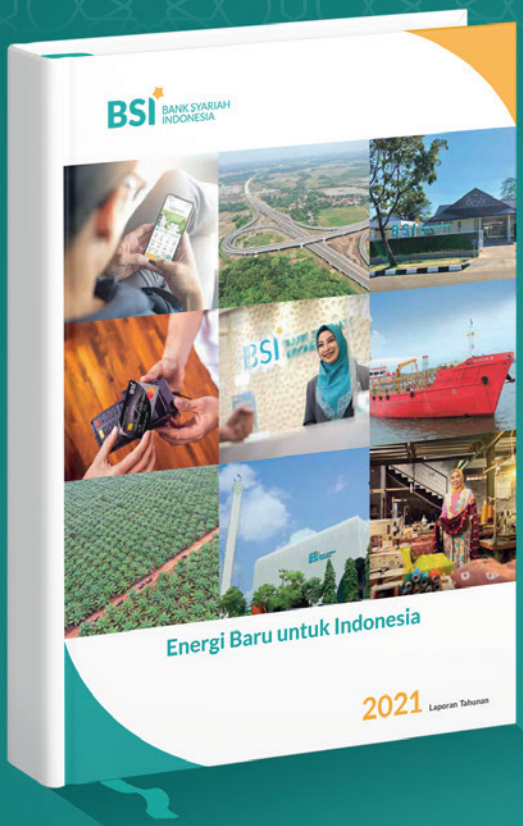

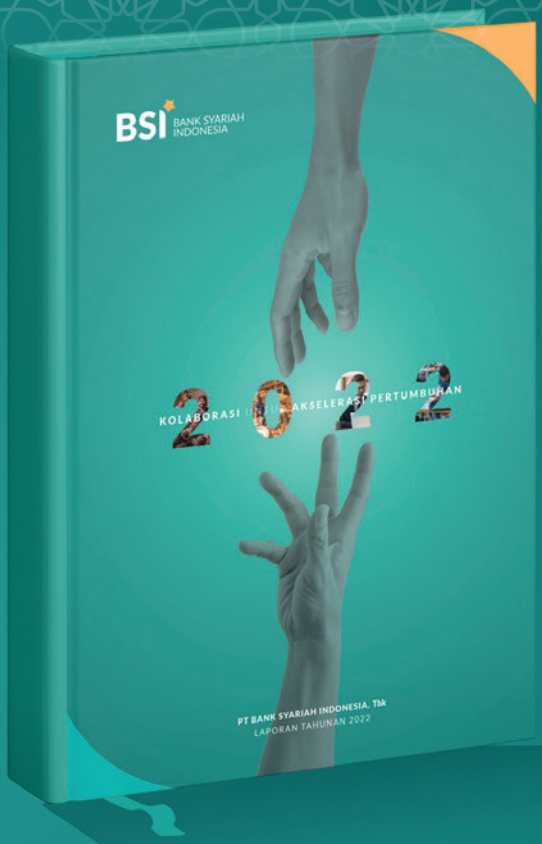

2021

Energi Baru untuk **Indonesia**

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang lahir dari merger 3 (tiga) bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) baru berusia 1 (satu) tahun. Kelahirannya pada 1 Februari 2021 langsung diresmikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.

Di usia yang masih belia, BSI telah menorehkan pencapaian yang menakjubkan. Rata-rata kinerja keuangan tumbuh tinggi. Integrasi kegiatan operasional dari bank legacy pun berjalan lancar. Bahkan BSI telah resmi membuka representative office di Dubai, yang merupakan pusat keuangan dunia.

Semua itu berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seluruh Insan BSI serta dukungan para pemangku kepentingan, sehingga Bank mampu memberikan manfaat besar. Atas dasar inilah, kami semua meneguhkan tekad, mengobarkan semangat, untuk membesarkan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih kuat agar mampu menjadi Energi Baru Untuk Indonesia.

2022

Kolaborasi untuk Akselerasi Pertumbuhan

Tahun 2022 merupakan tahun penuh pertama operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”) dapat dilakukan secara komprehensif dan integratif, setelah ditetapkannya “Operational Day 1” pada tanggal 1 November 2021. Sepanjang tahun tersebut, BSI konsisten membangun sinergi antara kekuatan-kekuatan tiga bank syariah besar menjadi satu, baik dari sisi permodalan, teknologi informasi, infrastruktur layanan maupun ragam produk dan jasa. BSI juga bergerak cepat menggalang kolaborasi dengan berbagai elemen dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Langkah-langkah sinergi dan kolaborasi tersebut terbukti mampu mendorong kinerja BSI ke tingkat yang memuaskan, sebagai ujung tombak perbankan syariah dalam lanskap perbankan nasional.

Kinerja Keuangan

Penetrasi ke Luar Negeri: Masuk Dalam Ekosistem Keuangan Syariah Global

Untuk memperkuat bisnis global dan menjadi bagian dalam ekosistem syariah di tingkat internasional, BSI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Riyad Bank. Riyad Bank akan menjadi mitra BSI dalam ekspansi bisnis di Arab Saudi, seperti *treasury*, haji & umrah, *trade finance*, *remittance* dan bisnis antarbank lainnya.

1.112
Kantor Cabang dan
Kantor Cabang Pembantu

18.581
Jumlah karyawan

Rp207,7 triliun
Pembiayaan yang disalurkan
BSI tumbuh 21,3%

Peringkat BSI naik, dari sebelumnya di posisi 7, kini ada di urutan 6 Bank Umum di Indonesia Berdasarkan Aset.

BSI memiliki komitmen tinggi terhadap aspek keberlanjutan. Pada tahun 2022, total pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp51,15 triliun.

Fundamental Makin Kuat

Fundamental BSI pada tahun 2022 semakin kuat, seperti ditunjukan melalui sejumlah indikator di bawah ini:

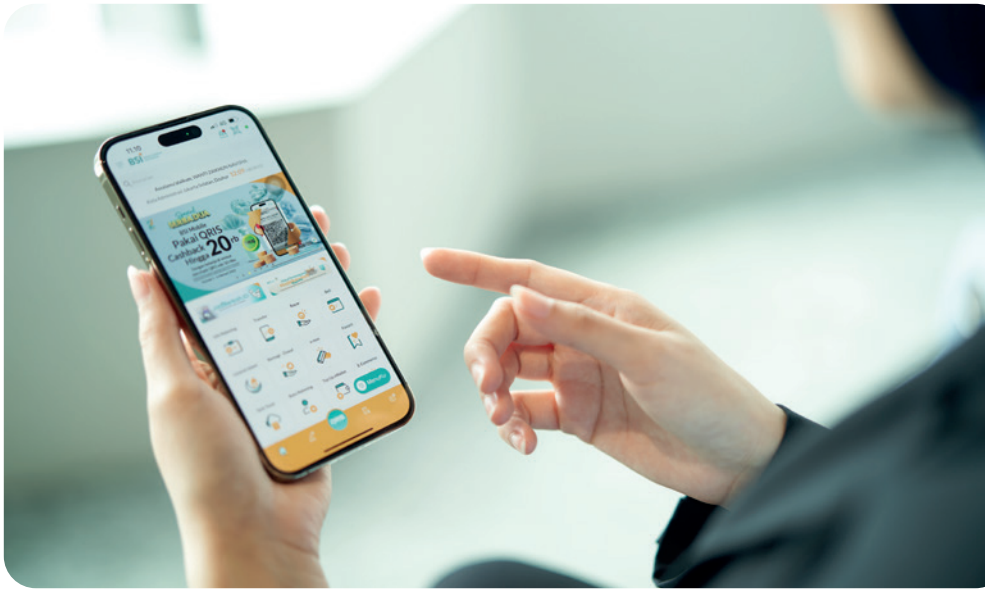

40,7%

Laba bersih Bank tumbuh 40,7%, sehingga menjadi Rp4,3 triliun.

Rp305.7 triliun

Aset BSI tumbuh 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp265,3 triliun menjadi Rp305,7 triliun

33,9%

Ekuitas Bank terus tumbuh, hingga menjadi Rp33,5 triliun di tahun 2022, dari Rp25,0 triliun di tahun sebelumnya.

0,57%

NPF-Neto Bank sebesar 0,57%, membaik dari tahun sebelumnya sebesar 0,87%.

2,42%

Kualitas pembiayaan membaik, dengan NPF-Gross menjadi 2,42% dari tahun sebelumnya 2,93%

Rp19,6 triliun

Total pendapatan Bank sebagai mudharib meningkat 10,2%, dari tahun sebelumnya sebesar Rp17,8 triliun.

75,9%

Kinerja Bank makin efisien, dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 75,9%, sementara tahun sebelumnya 80,5%.

33.684.253 rekening

Jumlah Rekening DPK

17.797.506

Jumlah Nasabah

Memperkuat Modal dengan *Right Issue*

Pada akhir tahun 2022, BSI melakukan aksi korporasi berupa rights issue. Saham baru yang diterbitkan mencapai 4.999.952.795 lembar saham Seri B atau sekitar 10,8% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Bank. Harga pelaksanaan *rights issue* sebanyak-banyaknya Rp1.000 per lembar saham. Jumlah dana yang akan diterima Bank sekitar Rp5 triliun dari aksi korporasi tersebut.

Rp261,5 triliun

Realisasi akumulasi Dana Pihak Ketiga mencapai Rp261,5 triliun, 100,8% dari target yang telah ditetapkan.

Rp264,6 triliun

Realisasi sumber pendanaan BSI mencapai Rp264,6 triliun, tumbuh 12,3% dari tahun sebelumnya.

Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor

Rp16,46 triliun
Konstruksi

Rp5,09 triliun
Kesehatan

Rp3,90 triliun
Pendidikan

Rp41,91 triliun
UMKM

Rp12,22 triliun
Kredit
Usaha Rakyat

Daftar Isi

Halaman 1

Kolaborasi untuk Akselerasi Pertumbuhan 1
Kesinambungan Tema 2
Kinerja Keuangan 4

Halaman 10

Ikhtisar Kinerja

Ikhtisar Keuangan 12
Ikhtisar Saham 16
Aksi Korporasi 18
Informasi Penghentian Saham Sementara 18
Ikhtisar Obligasi, Sukuk, atau Lainnya 19
Penghargaan dan Sertifikasi 20
Peristiwa Penting 26

Halaman 38

Laporan Manajemen

Laporan Dewan Komisaris 40
Laporan Direksi 52
Laporan Dewan Pengawas Syariah 64
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk 70

Halaman 72

Profil Perusahaan

Identitas Perusahaan 74
Sekilas Perusahaan 76
Jejak Langkah 78
Visi, Misi dan Budaya/Nilai-Nilai Perusahaan 80
Bidang Usaha 82
Produk dan Layanan 84
Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi 93
Struktur Organisasi 102
Daftar Keanggotaan Asosiasi 104
Profil Dewan Komisaris 105
Profil Dewan Pengawas Syariah 114
Profil Direksi 118
Profil Pejabat SEVP 128
Profil Pejabat Eksekutif 131
Profil Regional CEO 135
Demografi Karyawan 136
Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi 138
Komposisi Pemegang Saham 173
Pemegang Saham Utama dan Pengendali 177
Struktur Korporasi 177
Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi 178
Kronologi Pencatatan Saham 178
Kronologi Pencatatan Efek Lainnya 179
Kantor Akuntan Publik 179
Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal 180
Website Perusahaan 182

Halaman 184

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tinjauan Ekonomi dan Industri 186
- Ekonomi Global 187
- Ekonomi Nasional 188
- Tinjauan Industri Perbankan Nasional Dan Syariah 189
- Tinjauan Posisi Bank Syariah Indonesia di Industri Perbankan Syariah 190

Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha 192
- Corporate Banking 193
- Commercial Banking 194
- Hubungan Kelembagaan 195
- Segmen Ritel 197
- Segmen Treasury Banking & Kantor Pusat 200

Tinjauan Keuangan 204
Aset 205
Liabilitas 207
Dana Syirkah Temporer 208
Analisis Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan 211
Informasi Kinerja Keuangan Lainnya 211
Kemampuan Membayar Utang 213
Struktur Modal 217
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal 218
Investasi Barang Modal 218
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntansi 218
Prospek Usaha 219
Perbandingan antara Target dan Realisasi serta Proyeksi 1 (Satu) Tahun Mendatang 220

Aspek Pemasaran 221
Kepatuhan Pembayaran Pajak 225
Program Kepemilikan Saham Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) 225
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 225
Informasi Material terkait dengan Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi 226
Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi/ Berelasi 227
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh terhadap Perusahaan 237
Perubahan Kebijakan Akuntansi 239

Halaman 240

Pendukung Bisnis

Sumber Daya Manusia 242
Teknologi Informasi 250
Manajemen Risiko 256

Halaman 314

Tata Kelola Perusahaan

Dasar Penerapan GCG 317
Struktur Tata Kelola 319
Pemegang Saham 319
Rapat Umum Pemegang Saham 320
Pelaksanaan RUPS Tahun 2022 322
RUPS Tahun Sebelumnya 335
Dewan Komisaris 342
Komisaris Independen 350
Dewan Pengawas Syariah 358
Direksi 364
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 379
Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi 384
Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi 384
Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris 386
Organ dan Komite Di Bawah Direksi 416
Internal Audit 427
Sistem Pengendalian Internal 435
Manajemen Risiko 436
Akuntan Publik 436
Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorsime (APU & PPT) 438
Fungsi Kepatuhan 450
Pemberian Dana Kegiatan Sosial Dan/ Atau Politik 455
Perkara Penting 455
Hubungan Investor 464
Akses Informasi dan Data Perusahaan 465
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi 474
Kode Etik 478
Pengelolaan *Whistleblowing System* 480
Tata Kelola Terintegrasi 486
Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya 485
Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Kepada Karyawan dan/atau Manajemen 485
Buyback Saham dan *Buyback* Obligasi 486
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 486
Transaksi Mengandung Benturan Kepentingan 486
Penilaian Penerapan GCG 486
Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 496

Halaman 498

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 500

Halaman 504

Laporan Keuangan

553

01
Ikhtisar Kinerja

"Bank berhasil mencapai peringkat #6 dalam daftar bank umum di Indonesia dari sisi aset."

Ikhtisar Keuangan

Posisi Keuangan

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Kas	4.951.469	4.119.903	3.180.739
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	31.778.458	20.563.580	21.527.933
Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto	2.475.917	1.841.551	8.695.805
Investasi pada Surat Berharga-Neto	57.841.271	67.579.070	49.105.637
Tagihan Akseptasi	476.589	159.880	292.789
Piutang Murabahah	124.873.356	101.685.560	89.844.090
Piutang Istishna	132	359	637
Piutang Sewa Ijarah	13.278	101.570	39.167
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian Piutang	(4.184.787)	(3.450.506)	(3.294.706)
Jumlah Piutang-Neto	**120.701.979**	**98.336.983**	**86.589.188**
Pinjaman Qardh- Neto	8.867.013	9.081.400	9.054.373
Pembiayaan Mudharabah-Neto	1.001.957	1.592.314	2.598.787
Pembiayaan Musyarakah-Neto	66.450.946	53.903.123	50.896.175
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto	1.484.573	901.565	1.509.461
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	5.654.698	4.055.953	3.397.075
Aset Pajak Tangguhan	1.675.103	1.445.324	1.109.281
Aset Lain-lain-Neto	2.367.465	1.708.435	1.624.281
JUMLAH ASET	**305.727.438**	**265.289.081**	**239.581.524**
Liabilitas Segera	1.009.502	608.554	1.018.562
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	192.775	158.478	170.010
Giro Wadiah	21.797.852	21.090.695	29.775.354
Tabungan Wadiah	44.214.405	36.157.195	30.628.229
Jumlah Simpanan Wadiah	**66.012.257**	**57.247.890**	**60.403.583**
Simpanan dari Bank Lain	2.218.697	115.938	806.560
Kewajiban Akseptasi	481.403	161.495	295.337
Utang Pajak	667.485	504.078	537.514
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	689.018	836.491	908.751
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	28.873	17.194	20.323
Liabilitas Lain-lain	2.355.781	2.236.358	1.879.721
JUMLAH LIABILITAS	**73.655.791**	**61.886.476**	**66.040.361**

* Disajikan kembali

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Giro Mudharabah	22.754.968	13.318.627	5.370.452
Tabungan Mudharabah	72.897.352	65.102.491	59.008.934
Deposito Mudharabah	100.760.342	98.592.553	86.043.632
Sukuk Mudharabah Subordinasi	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Pembiayaan yang Diterima	778.375	-	-
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**198.566.037**	**178.388.671**	**151.798.018**
Modal disetor	23.064.630	20.564.654	3.142.019
Tambahan Modal Disetor	(3.929.100)	(6.366.776)	-
Ekuitas *Merging Entities*	-	-	10.903.586
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	444.530	444.530	395.725
Pengukuran Kembali Program Imbalan Kerja Pasti	268.904	140.271	53.998
(Kerugian)/Keuntungan Surat Berharga - bersih	(55.477)	22.263	-
Cadangan Umum	1.384.677	779.036	597.804
Saldo Laba	12.327.446	9.429.956	6.650.013
· Tahun lalu	8.067.264	6.468.781	5.215.525
· Tahun berjalan	4.260.182	2.961.175	1.434.488
JUMLAH EKUITAS	**33.505.610**	**25.013.934**	**21.743.145**
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	**305.727.438**	**265.289.081**	**239.581.524**

* Disajikan kembali

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	**19.622.865**	**17.808.432**	**16.929.592**
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(4.032.169)	(4.378.807)	(5.006.667)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	15.590.696	13.429.625	11.922.925
Pendapatan Usaha Lainnya	3.701.111	3.012.246	2.776.701
Beban Usaha	(9.895.336)	(8.782.773)	7.952.814
Beban CKPN Aset Produktif dan Non Produktif - Neto	(3.748.797)	(3.551.249)	3.620.446
Laba Usaha	**5.647.674**	**4.107.849**	**3.126.366**
Pendapatan (Beban) Non Operasional- Neto	8.534	(45.641)	(46.967)
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	5.656.208	4.062.208	3.079.399
Zakat	(141.405)	(101.684)	(74.202)
Beban Pajak Penghasilan	(1.254.621)	(932.319)	(817.548)
Laba Bersih	**4.260.182**	**3.028.205**	**2.187.649**
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	50.893	189.591	(36.503)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	4.311.075	3.217.796	2.151.146
Laba Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	102.54	73.69	53.52
Laba per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh)	102.54	73.66	53.51

* Disajikan kembali

Arus Kas

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Operasi	1.885.530	16.696.794	13.444.647
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Investasi	5.994.708	(16.591.024)	(12.927.114)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Kas Bersih Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan	4.798.909	(77.929)	(268.516)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	12.679.147	27.841	249.017
Kas & Setara Kas Awal Tahun	26.542.272	26.514.431	26.265.414
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	39.221.419	26.542.272	26.514.431

* Disajikan kembali

Rasio Keuangan

(%)

Uraian	2022	2021	2020*
Capital Adequacy Ratio (CAR)	20,29	22,09	18,24
Non Performing Financing (NPF) *gross*	2,42	2,93	2,88
Non Performing Financing (NPF) *net*	0,57	0,87	1,12
Return On Assets (ROA)	1,98	1,61	1,38
Return On Equity (ROE)	16,84	13,71	11,18
Net Imbalan (NI)	6,31	6,04	6,04
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,88	80,46	84,61
Cost to Income Ratio (CIR)	51,01	52,57	53,74
Financing to Deposit Ratio (FDR)	79,37	73,39	74,52
Persentase Pelampauan BMPD	0,00	0,51	0,00
GWM Rupiah	8,30	5,05	3,12
GWM Valas	1,18	1,03	1,16
Posisi Devisa Neto	0,57	0,27	4,47

* Disajikan kembali

Ikhtisar Saham

Informasi Harga Saham

Tahun	Harga Per Saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (Lembar Saham)	Volume Transaksi (Lembar Saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2022							
Triwulan I	1.620	1.625	1.605	1.605	41.129.307.343	1.190.638.400	66,01
Triwulan II	1.350	1.355	1.340	1.340	41.129.307.343	560.250.900	55,11
Triwulan III	1.495	1.500	1.400	1.470	41.129.307.343	1.289.347.000	60,46
Triwulan IV	1.295	1.310	1.270	1.290	46.129.260.138	980.433.400	59,51
2021							
Triwulan I	2.350	2.350	2.210	2.290	41.031.208.943	10.061.997.400	93,96
Triwulan II	2.180	2.370	2.150	2.300	41.128.868.743	3.808.326.000	94,60
Triwulan III	2.050	2.080	2.010	2.040	41.128.868.743	4.356.091.600	83,90
Triwulan IV	1.790	1.805	1.780	1.780	41.129.307.343	1.880.546.500	73,21
2020 *							
Triwulan I	190	210	190	196	9.716.113.498	732.856.900	1,90
Triwulan II	310	312	306	308	9.716.113.498	3.986.666.700	2,99
Triwulan III	750	760	725	750	9.716.113.498	15.807.047.400	7,29
Triwulan IV	2.290	2.370	2.200	2.250	9.900.508.698	15.875.453.300	22,28

* PT Bank BRIsyariah Tbk

Harga Penutupan

(Rp/lembar)

	2022	2021	2020*
Triwulan I	1.605	2.290	196
Triwulan II	1.340	2.300	308
Triwulan III	1.470	2.040	750
Triwulan IV	1.290	1.780	2.250

* PT Bank BRIsyariah Tbk

Volume Perdagangan (Lembar)

	2022	2021	2020*
Triwulan I	1.190.638.400	10.061.997.400	732.856.900
Triwulan II	560.250.900	3.808.326.000	3.986.666.700
Triwulan III	1.289.347.000	4.356.091.600	15.807.047.400
Triwulan IV	980.433.400	1.880.546.500	15.875.453.300

* PT Bank BRIsyariah Tbk

Kinerja Saham

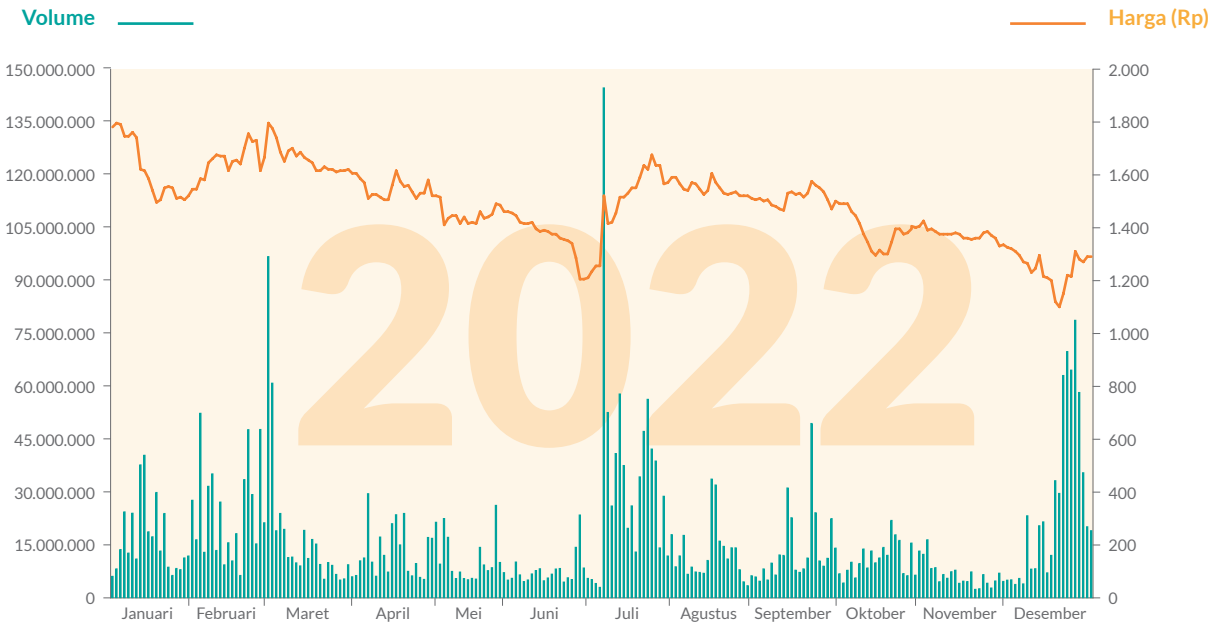

Aksi Korporasi

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, di tahun 2022 melaksanakan *right issue* dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebesar Rp5 triliun yang bertujuan untuk menambah modal inti Perseroan. Adapun pelaksanaan periode perdagangan HMETD dilaksanakan pada tanggal 19-23 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan Perdagangan HMETD	Rasio	Jumlah Saham		Harga Saham	
		Sebelum *Right Issue*	Setelah *Right Issue*	Sebelum *Right Issue*	Setelah *Right Issue*
19-23 Desember 2022	9:1	41.129.307.343	46.129.260.138	1.200	1.310

Informasi Penghentian Saham Sementara

Sepanjang tahun 2022, saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak mengalami atau mendapat penghentian perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Aksi Obligasi, Sukuk, atau Lainnya

Penerbitan	Nama Sukuk	Nilai Sukuk	Jatuh Tempo	Bagi Hasil	Peringkat dan Lembaga Pemeringkat	
					2022	2021
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi 1 Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h PT Bank BRIsyariah Tbk)	Rp1 Triliun	16 November 2023	9,5%	A+ (PT Fitch Ratings Indonesia)	A+ (PT Fitch Ratings Indonesia)
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h PT Bank Syariah Mandiri)	Rp375 Miliar	22 Desember 2023	10%	AA (PEFINDO)	AA (PEFINDO)

Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN

BAZNAS AWARD 2022

Mitra Pengumpulan Zakat Perbankan Terbaik

BAZNAS

17 Januari 2022

5th INFOBANK SLE AWARD 2022

SLE Index 2022 Kategori Bank Umum Syariah

Infobank

17 Februari 2022

16th Annual Indonesia Property & Bank Award 2022

The Most Innovative Sharia Housing Finance Program-BSI Griya Mabrur

Property and Bank

24 Februari 2022

Public Relations Indonesia Awards 2022

Terpopuler di Media Cetak 2021 Kategori Anak Usaha BUMN

PR Indonesia

25 Maret 2022

TOP CSR Awards 2022

Top CSR 2022 #Star 4

Top Business

30 Maret 2022

11TH INFOBANK DIGITAL BRAND AWARD 2022

Best Over All Kategori Bank Umum Syariah

Infobank

7 April 2022

The World Best Bank

Top 5 The World Best Bank in Indonesia

Forbes

15 April 2022

The 13th IICD GCG Conference and Award 2022

Top 50 Emiten dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar (Big Cap PLCs)

Berita Satu & Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

27 Mei 2022

Digital Banking Awards 2021

1. Best Digital Banking Dimensi Customer
2. Best Digital Banking Dimensi Tatanan Institusi

Kategori Bank Umum Syariah

Majalah Investor

28 Juni 2022

Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) 2022

The Most Consistent Sharia Bank in Empowering Rural Communities Through CSR Programs Kategori Special Awards

Bisnis Indonesia

29 Juni 2022

Infobank Best Service Excellence Awards 2022

Best All Performances
Kategori Bank Umum Syariah

Infobank

30 Juni 2022

iNews Maker Awards 2022

Progressive International Market Expansion
Kategori Innovation of Marketing, Product and Services

iNews

30 Juni 2022

Bisnis Indonesia Awards 2022

Bank Terbaik
Sektor Perbankan Syariah

Bisnis Indonesia

15 Agustus 2022

IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022

Promoting Solar Electricity in Religious Community
Kategori Special Awards

IDX Channel

25 Agustus 2022

Indonesia Property Award 2022

The Commended
Mortgage Sharia Bank

Majalah Property

7 September 2022

Best Islamic Finance Award 2022 Alpha South East Asia

1. Best Islamic Finance in Indonesia
2. Best Islamic Finance Retail in Indonesia

Alpha South East Asia

8 September 2022

Best Syariah 2022 Majalah Investor

Bank Syariah Terbaik
Kategori Aset diatas Rp20 Triliun

Majalah Investor

15 September 2022

12th Global Islamic Finance Awards 2022

GIFA Market Leadership
Award 2022
Kategori Islamic Banking

GIFA

16 September 2022

11th Infobank Sharia Award 2022

Sharia Institution with Predicate
Excellent
Kategori Kelompok KBMI 3

Infobank

22 September 2022

Asiamoney Awards 2022

Best Islamic Bank in Indonesia

Asiamoney

22 September 2022

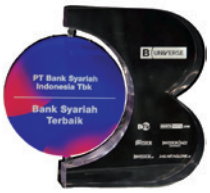

Investor Daily Summit 2022

Bank Syariah Terbaik

Investor Daily

12 Oktober 2022

ESG Disclosure Awards 2022

Rating Commitment CCC

Berita Satu

26 Oktober 2022

iNews Indonesia Award 2022

Outstanding
Acceleration of Digital
Customer Acquisition

iNews

26 Oktober 2022

Award UPZ BAZNAS 2022

1. UPZ BUMN dengan Pengumpulan Zakat Terbaik
2. UPZ BUMN dengan Penyaluran Zakat Terbaik
3. UPZ The Rising Star

BAZNAS

27 Oktober 2022

Indonesia Original Brand 2022

Excellent
Kategori Sharia Banking

Majalah SWA

22 November 2022

Anugerah Syariah Republika 2022

1. Tabungan Syariah Terbaik
2. Tabungan Syariah Terbaik (Mobile Banking Terbaik)
3. Bank Syariah Terbaik (Mobile Banking Terbaik)

Republika

29 November 2022

Bank Indonesia Award 2022

Bank Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah & Valas Terbaik

Bank Indonesia

30 November 2022

LPS Banking Award 2022

1. Bank Teraktif Dalam Kegiatan CSR
2. Bank Teraktif Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat
3. Bank Teraktif Dalam Praktik Green Banking

LPS

29 November 2022

Bank Indonesia Award 2022

Bank Pendukung UMKM Terbaik

Bank Indonesia

30 November 2022

Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2022

Financial Services Institutions - Bank

Kementerian Perindustrian

9 Desember 2022

Islamic Retail Banking Awards 2022

The Strongest Islamic Retail Bank in Indonesia 2022

Cambridge IFA

12 Desember 2022

BPKH Banking Award 2022

1. BPS BPIH Pendaftar Haji Terbaik 2022
2. BPS BPIH Pendaftar Haji Millenial Terbaik 2022
3. BPS BPIH Green Financial Sustainability Institution 2022

Kategori Bank Umum Syariah-Unit Usaha Syariah

BPKH

19 Desember 2022

Good Corporate Gorvernance Award (CGPI) 2022

Indonesia Most Trusted Companies

IICG & SWA

20 Desember 2022

Penghargaan Kementerian Keuangan

1. Penghargaan Dealer Utama SBSN Terbaik Tahun 2021
2. Mitra Distribusi CWLS Ritel Terbaik Tahun 2022

Kategori Bank Syariah

Kemenkeu

21 Desember 2022

SERTIFIKASI

	Tanggal Perolehan	Sertifikasi	Pemberi/Lembaga Sertifikasi	Masa Berlaku
	18 Mei 2021	ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu	British standards institution	2023
	20 Mei 2021	ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi	British standards institution	2023
	17 Desember 2021	ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP)	Tuvnord	2024
	22 Desember 2022	ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan	Chesna Certification	2025

Peristiwa Penting

3 Januari

Penandatanganan PKS
Pengelolaan Dana APBN Non Gaji dan Penyediaan Layanan Gaji Antara TNI Angkatan Laut dan Mitra Bank TA 2022

01

03

19 Januari

BSI Dukung UMKM
Melalui Talenta Wirausaha BSI

11 Januari

Grand Launching Bank Syariah Indonesia sebagai Bank Penyalur Gaji, **Bank Persepsi dan Mitra Pengelola Rekening Khusus Surat Berharga Syariah Negara**

02

04

1 Februari

Milad ke-1 Bank Syariah Indonesia

2 Februari

Press Conference
Kinerja Triwulan IV 2021

05

06

9 Februari

Peresmian BSI Call Site Semarang
sebagai upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas layanan serta peningkatan *accessibility call* bagi nasabah

16 Februari

Bank Syariah Indonesia Menggelar **Virtual Charity Concert #BSINation** dalam rangka Milad Ke-1 BSI

07

08

7 Maret

Penandatanganan PKS Pembiayaan KUR untuk *Reseller* serta UMKM antara Telkomsel dan BSI

10 Maret

BSI Perkuat Bisnis Griya dan Otomotif di Wilayah Timur Indonesia

09

11

27 Maret

Go Global, BSI Berkolaborasi dengan Bank-Bank di Uni Emirat Arab

22 Maret

BSI Siapkan Pembiayaan KUR Syariah agar Petani Go Digital

10

12

13 April

Fokus Kembangkan Islamic Ecosystem: Pembayaran Zakat Perusahaan BSI Mencapai Lebih dari Rp122,5 Miliar

15 April

Forbes Tempatkan BSI Kedalam Jajaran 5 Bank Terbaik Indonesia

13

15

22 April

Bank Syariah Indonesia Bangun 15 Solar Panel Untuk Desa Tertinggal di NTT

21 April

BSI Bersama Yayasan BSMU Resmi **Launching Beasiswa Inkubator Bisnis ISDP 2022**

14

16

28 April

Menorehkan capaian positif pada triwulan I/2022 dengan membukukan laba bersih mencapai Rp987,68 miliar atau naik 33,18% secara *year on year* (YoY)

1 Mei

Bank Syariah Indonesia bersama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan didukung Laznas BSMU menyediakan Mobil Mushola di empat Pelabuhan selama masa Idul Fitri 1443 H

17

19

9 Juni

Bank Syariah Indonesia meluncurkan BSI UMKM Center di Yogyakarta sebagai dukungan nyata bank syariah terbesar di Tanah Air dalam mengembangkan usaha rakyat yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional

27 Mei

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Syariah Indonesia membagikan dividen tunai sebesar 25% dari laba bersih perseroan kepada pemegang saham dan menyetujui Negara Republik Indonesia miliki saham Seri A Dwiwarna di Perseroan

18

22 Juni

PT Bank Syariah Indonesia Tbk bersama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) **menggelar akad massal bagi 2.500 nasabah program BSI KPR Sejahtera FLPP secara serentak**

20

22

1 Juli

BSI berhasil mendapatkan dua penghargaan untuk tatanan institusi dan *customer* dalam kategori bank syariah dalam acara Digital Banking Awards 2022.

24 Juni

Bank Syariah Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan lainnya **melakukan penanaman 20.000 pohon bakau di Daerah Kedonganan, Kabupaten Badung Bali.**

21

23

10 Juli

Bank Syariah Indonesia bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSMU) bersama 23 lembaga zakat **menyalurkan 3.691 hewan kurban** bagi masyarakat duafa ke berbagai wilayah Indonesia melalui Program Inspirasi Kebaikan Idul Adha 1443 H.

21 Juli

Bank Syariah Indonesia meluncurkan BSI UMKM Center di Surabaya, Jawa Timur, sebagai dukungan nyata bank syariah terbesar di Tanah Air dalam memperkuat usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

24

26

28 Juli

Bank Syariah Indonesia menargetkan pembiayaan tumbuh *double digit* dalam gelaran Life With BSI Expo Jakarta

22 Juli

Bank Syariah Indonesia meresmikan Masjid BSI Pananjakan Bromo bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

25

27

7 Agustus

BSI terus melakukan literasi untuk mengenalkan layanan keuangan syariah. Salah satunya dengan mengenalkan tabungan Wadiah yang membebaskan biaya administrasi bulanan pada gelaran Islamic Book Fair 2022 Life With BSI.

10 Agustus

BSI melakukan kerja sama dengan PP Muhammadiyah guna meningkatkan inklusifitas dan penetrasi keuangan syariah di Indonesia

28

30

1 September

BSI menjadi satu dari delapan penyelenggaraan jasa pembayaran (PJP) QRIS antara Indonesia-Thailand. Lewat kerjasama itu, nasabah BSI dan masyarakat Indonesia sudah bisa menggunakan QRIS via BSI Mobile untuk bertransaksi di Thailand.

25 Agustus

BSI berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang signifikan dan berkualitas sepanjang pertengahan tahun ini. Di tengah kondisi perekonomian yang menantang akibat gejolak ekonomi global, pada kuartal II/2022, BSI mampu membukukan laba bersih mencapai Rp2,13 triliun, tumbuh 41,31% *year on year* (yoy)

29

31

5 September

Dalam **memperingati Hari Pelanggan Nasional,** jajaran direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) turut hadir langsung untuk melayani nasabah di BSI Kantor Cabang The Tower dan di BSI Kantor Cabang Depok Margonda 2.

6 September

BSI terus memperkuat layanan dan mendukung upaya peningkatan ekonomi Aceh. Melalui pembangunan Gedung landmark dengan konsep Green Building di Aceh dan pada saat yang sama Desa Binaan BSI Meunasah Asan Aceh melakukan Ekspor Perdana 60 Ton Bandeng ke Korsel dan Jepang.

32

34

22 September

BSI dinobatkan sebagai Best Islamic Bank di Indonesia pada ajang Asiamoney Best Banks Awards 2022 serta mendapatkan dua penghargaan pada acara Islamic Finance Summit 2022.

21 September

BSI dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melakukan kerjasama untuk kerjasama untuk menjajaki terciptanya Islamic Ecosystem di Indonesia

33

35

23 September

BSI mendapat persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan aksi korporasi melalui penambahan modal dengan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu I (*Rights Issue*) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 6 Miliar saham seri B Perseroan.

5 Oktober

BSI menjalin kerja sama strategis dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerjasama ini untuk mendukung dan memperkuat peranan ditengah masyarakat dalam mengakselerasi pembangunan *Islamic ecosystem* dalam negeri.

36

38

18 Oktober

BSI memiliki komitmen dalam transformasi digital di State-Owned Enterprises (SOE) International Conference 2022

9 Oktober

BSI berkomitmen mendukung penuh inisiatif-inisiatif **penguatan ekosistem Global Halal Hub**

37

39

27 Oktober

Kinerja positif PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada kuartal III/2022 tercermin dari laba bersih yang meningkat 42% secara *year on year* (YoY) mencapai Rp 3,21 triliun

2 November

BSI terus memperkuat bisnis global untuk meningkatkan kontribusi dalam pengembangan perdagangan dan investasi serta layanan keuangan syariah demi mendorong memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan menggandeng Riyad Bank untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan bisnis di Arab Saudi.

40

42

8 Desember

BSI dan Universitas Indonesia (UI) berkomitmen kuat untuk meningkatkan literasi perbankan syariah di atas 10%, melalui kerja sama penandatanganan nota kesepahaman kedua pihak.

4 November

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memberikan dukungan untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) agar bisa tumbuh lebih cepat dan menjadi Top Ten Global Islamic Bank. Hal itu disampaikan Wapres dalam kunjungan kerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) dan melakukan peninjauan ke kantor perwakilan BSI di Gate District 3, DIFC, Sheikh Zayed Road

41

13 Desember

BSI terus mencatatkan prestasi meski belum genap 2 tahun beroperasi. Torehan prestasi tersebut merupakan buah transformasi dan kolaborasi seluruh elemen perseroan dibawah komando yang tepat dari Direktur Utama, Hery Gunardi

43

44

26 Desember

***Right Issue* BSI *Over Subscribed* 1,4 kali.** Aksi korporasi *right issue* PT Bank Syariah Indonesia Tbk Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) mengalami *over subscribed* 1,4 kali.

02

Laporan Manajemen

"BSI telah menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah internasional sejalan dengan "Corporate Plan PT Bank Syariah Indonesia Tbk" tahun 2022-2025, yaitu menjadi "Top 10 Global Syariah Bank".

Laporan Dewan Komisaris

> Beragam pertimbangan Dewan Komisaris telah menjadi bagian dari analisis prospek usaha yang disusun Direksi. Karena itu, Dewan Komisaris akan memberikan dukungan penuh untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Atas berkah dan rahmat-Nya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") yang akan memasuki usia 2 (dua) tahun, hadir memberikan kontribusi pada industri perbankan nasional sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Melalui merger 3 (tiga) bank syariah milik BUMN (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRIsyariah), pada tahun buku 2022 BSI mampu memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan, sebagaimana tergambar dalam pencapaian dan kinerja keuangan Bank.

Pengawasan dan beragam masukan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022 difokuskan pada arahan untuk memperkuat strategi Bank dalam meraih pertumbuhan ditengah tantangan makroekonomi dan industri perbankan.

Dewan Komisaris berharap, kehadiran BSI tidak hanya sebagai pelengkap pilihan atas kebutuhan pelayanan jasa keuangan perbankan nasional, tetapi dapat menjadi lembaga penggerak dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam, serta mencapai visi Bank menjadi Top 10 Global Islamic Bank. Dengan demikian, Bank menjadi inspirasi bagi semua pihak.

Adiwarman Azwar Karim
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Melalui laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas dan tanggung jawab pengawasan Bank sejalan dengan amanah RUPS dan Anggaran Dasar, yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Atas segala pencapaian penting BSI pada tahun 2022, Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajaran di bawahnya atas kerja keras yang telah dipersembahkan. Kerja sama Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi juga berjalan padu, sehingga mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, memberikan manfaat bagi perekonomian nasional serta menjadi katalisator bagi ekosistem syariah.

PANDANGAN TERHADAP KONDISI EKONOMI DAN INDUSTRI

Dewan Komisaris menyadari bahwa situasi perekonomian yang harus dihadapi BSI pada tahun 2022 penuh dengan tantangan. Di saat pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 sedang berlangsung, dunia global dihadapkan oleh dinamika geopolitik, yaitu perang Rusia dan Ukraina.

Dalam catatan Bank Indonesia (BI), perkembangan geopolitik itu berdampak pada meningkatnya risiko resesi dan inflasi yang tinggi. Perang telah mengakibatkan terganggunya rantai pasok di tingkat global. Lonjakan harga komoditas tak terhindarkan, sehingga menimbulkan inflasi tinggi, termasuk di Indonesia.

Dalam kondisi seperti itu, bank sentral di banyak negara merespons dengan kenaikan suku bunga acuan, termasuk Indonesia. Bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed termasuk yang paling agresif, dengan menaikkan suku bunga acuan hingga mencapai 425 *basis points* (bps) selama tahun 2022, dari di kisaran 0,25-0,50%, menjadi 4,25-4,50 di akhir Desember 2022. Pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju menyebabkan perlambatan perekonomian dari sisi permintaan. Bahkan dalam analisisnya, BI berpandangan bahwa kondisi pasar keuangan global juga mengalami ketidakpastian.

Perkembangan di tingkat global tersebut berdampak kepada penguatan kurs dolar dan pelemahan rupiah. Sekaligus untuk menekan inflasi, BI pun menaikkan suku bunga acuan hingga 200 bps, dari 3,50% menjadi 5,50% selama tahun 2022.

Bagi perbankan, termasuk BSI, kenaikan suku bunga acuan tersebut menimbulkan tambahan pada biaya perolehan dana (*cost of fund*) perbankan serta mengetatnya likuiditas di pasar. Namun, pulihnya konsumsi domestik masih menjadi pendorong pertumbuhan bisnis perbankan, sehingga ekspansi pembiayaan tetap tumbuh positif.

Kendati demikian, industri perbankan baik secara nasional maupun syariah, telah menunjukan ketangguhannya dalam menghadapi dinamika yang terjadi. Hal ini tercermin pada pertumbuhan indikator keuangan antara lain total aset perbankan nasional menyentuh Rp11.073 triliun pada November 2022, atau tumbuh 9,68% (yoy). Total Dana Pihak Ketiga (DPK) naik Rp662 triliun atau tumbuh 8,89% (yoy). Penyaluran kredit juga meningkat Rp657 triliun atau 11,27% (yoy).

Begitu juga dengan industri perbankan syariah. Total asetnya naik Rp94 triliun dan menyentuh level Rp756,3 triliun pada November 2022, atau tumbuh 14,2% (yoy). Sedangkan DPK yang berhasil dihimpun naik Rp71 triliun ke level Rp594,5 triliun, tumbuh 13,5% (yoy), sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang didukung peningkatan infrastruktur dan layanan akses digitalisasi. Dari aspek pembiayaan, tercatat pada November 2022 pembiayaan bank syariah melesat 23,5% YoY. Kualitas pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan kinerja positif. Tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) gross membaik dari 2,70% di akhir 2021 menjadi 2,55% di November 2022 dan lebih rendah dari industri perbankan nasional.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dasar Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) Direksi baik secara individu maupun kolegial dan berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2022. Selain itu, Dewan Komisaris juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang dihadapi terutama kondisi perekonomian dan industri keuangan termasuk perbankan syariah.

Harus diakui bahwa kondisi tahun 2022 dilalui dengan penuh tantangan. Dalam menghadapi situasi tersebut, setidaknya ada 5 (lima) fokus Direksi yang menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam merespon perkembangan yang terjadi.

Pertama, pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sehat dan berkelanjutan.

Kedua, mendorong profitabilitas melalui pertumbuhan dana murah (*Currrent Account Saving Account*/CASA), peningkatan *Fee Based Income* (FBI), dan pertumbuhan produktivitas cabang.

Ketiga, meningkatkan kapabilitas digital melalui *Superapps Mobile Banking* dan mendorong pertumbuhan *Islamic Ecosystem*.

Keempat, melakukan penguatan fundamental seperti teknologi informasi dan digital, manajemen risiko, Sumber Daya Manusia (SDM) serta *operational excellence*.

Kelima, peningkatan kapabilitas *Wholesale Transaction* dan kolaborasi dengan Ritel.

Inisiatif-inisiatif tersebut telah memberikan dampak positif bagi BSI.

Hasil Penilaian

Dengan mempertimbangkan dasar penilaian tersebut, Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik sepanjang tahun 2022. Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka pencapaian target keuangan yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian target ekspansi bisnis ini memberikan imbas positif terhadap target profitabilitas. Di antaranya, Bank berhasil mencatatkan laba bersih mencapai Rp4,3 triliun, tumbuh 40,68% dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator profitabilitas lainnya yang bergerak positif, misalnya *Return on Asset* (RoA) yang meningkat dari 1,61% tahun 2021 menjadi 1,98% di tahun 2022. Begitu juga dengan *Return on Equity* (RoE) yang tercatat sebesar 16,84% mampu melebihi target yang telah ditetapkan, serta meningkat dari posisi tahun lalu sebesar 13,71%.

Peningkatan rasio profitabilitas didukung kemampuan BSI meningkatkan pertumbuhan pembiayaan secara *year on year* (yoy) sebesar 21,26%. Pencapaian tersebut di atas kinerja perbankan sebesar 11,35% (yoy).

Pertumbuhan pembiayaan juga tercermin dengan peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menjadi 79,37% dari tahun 2021 sebesar 73,39%. Selain itu, Direksi juga selektif dalam mengarahkan fokus pembiayaan yang memberi imbal hasil tinggi dan kualitas pembiayaan yang baik. Hal ini tercermin dengan Rasio NI (Net Imbalan) optimal di angka 6,31%, meningkat dari posisi tahun 2021 yang sebesar 6,04%.

Ekspansi pertumbuhan pembiayaan diimbangi dengan terjaganya kualitas yang baik, seperti ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang tercatat sebesar 2,42% di tahun 2022 ini membaik dari posisi tahun 2021 sebesar 2,93%. Sedangkan NPF Nett berada di angka 0,57%, lebih baik dari posisi tahun 2021 yang sebesar 0,87%. Penurunan NPF yang signifikan tersebut menunjukkan keberhasilan manajemen dalam menjaga kualitas pembiayaan, termasuk keberhasilan melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai akibat pandemi COVID-19 yang lalu.

Begitu juga dengan *Cash Coverage Ratio* (NPF Coverage) dengan rasio yang tergolong cukup memadai, yaitu sebesar 183,12% pada akhir tahun 2022. Hal ini ditempuh dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas pembiayaan serta upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik.

Rasio kualitas dan efisiensi pembiayaan tercermin juga pada rasio *Financing at Risk* (FaR). Pada tahun 2022, posisinya di angka 12,45%, menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 17,69% dan *Cost of Financing* (CoC) menurun menjadi 1,97%, dari 2,36% pada tahun 2021.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank berhasil mencatatkan Rp261 triliun, tumbuh Rp28 triliun atau 12,11% dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan DPK ini dikelola dengan peningkatan pertumbuhan rasio komposisi dana murah (*Current Account-Saving Account* /CASA) di angka 61,57%, meningkat dari posisi tahun 2021 di angka 57,91%.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi terhadap upaya Direksi dalam mengembangkan layanan *e-channel*, peningkatan layanan digital yang sangat diperlukan dalam mengakomodasi perubahan *trend* perilaku transaksi masyarakat ke arah digital. Pengembangan layanan ini dapat mendukung peningkatan perolehan *Fee Based Income* (FBI) yang lebih optimal. Pada tahun 2022, FBI dari e-channel tumbuh 23,8% (yoy) dan FBI dari *mobile banking* tumbuh 67,3% (yoy). Dengan demikian, secara keseluruhan FBI meningkat 21,2% (yoy).

Dari sisi tingkat efisiensi, Bank berhasil menjaga rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) sebesar 75,88%, lebih efisien dari posisi tahun 2021 yang sebesar 80,46%. Penurunan tersebut merupakan hasil dari upaya Bank dalam melakukan efisiensi pada beberapa aspek operasional Bank sepanjang tahun 2022.

Kondisi permodalan Bank juga semakin kuat pasca *rights issue* pada bulan Desember tahun 2022, sehingga rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) mencapai 20,29%. Namun masih belum mencapai target yang ditetapkan, karena pertumbuhan pembiayaan yang cukup ekspansif sehingga meningkatkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direksi atas pencapaian kinerja BSI yang sangat baik di tahun 2022. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi mampu menghadapi tantangan perekonomian dan industri dengan meraih peluang yang ada serta dapat memberikan kerberkahan dan manfaat kepada seluruh pihak.

PENGAWASAN TERHADAP PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di bidang pengawasan terhadap penerapan strategi yang dijalankan oleh Direksi atau manajemen, antara lain mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), yang antara lain mencakup kebijakan dan strategi manajemen.

Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan RBB yang disampaikan kepada OJK setiap semester. Penilaian Dewan Komisaris terhadap RBB ini berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasinya, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Realisasi RBB sebagai berikut:

1. Penilaian Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Bisnis berupa Penilaian Aspek Kuantitatif maupun Kualitatif terhadap realisasi rencana bisnis, termasuk penerapan prinsip syariah, terdiri dari:
   a. Laporan Kinerja BSI
   b. Teknologi Informasi (TI)
   c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
   d. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
   e. Laporan Kinerja Kepatuhan
   f. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)
   g. *Sustainable Finance* (SF)
   h. Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan OJK dan Auditor Ekstern Lainnya
2. Penilaian Dewan Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank secara umum, khususnya faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), tata kelola yang baik, profil risiko, terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
3. Penilaian Dewan Komisaris mengenai Upaya Perbaikan Kinerja Bank.

Merujuk pada hasil pengawasan tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah merumuskan rencana bisnis BSI dengan baik dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Begitu juga dari sisi implementasi, Direksi telah menjalankannya dengan sangat baik, dari pemantauan hingga keterlibatannya yang maksimal, mengingat BSI merupakan entitas yang baru beroperasi hampir 2 (dua) tahun.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris telah mempelajari tinjauan prospek usaha BSI ke depan yang telah disusun oleh Direksi. Dalam pandangan Dewan Komisaris, analisis tersebut telah mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan nasional yang berpotensi terjadi pada tahun depan.

Dalam memberikan penilaian atas prospek usaha yang disusun Direksi, Dewan Komisaris juga mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian dan industri perbankan ke depan. Perkembangan kondisi eksternal itu, kemudian menjadi pertimbangan untuk menyusun prospek usaha, dengan juga melihat keunggulan-keunggulan yang dimiliki Bank serta tren pertumbuhan kinerja Bank.

Atas dasar semua itu, Dewan Komisaris meyakini bahwa potensi pertumbuhan pasar perbankan syariah sangat besar, khususnya pada segmen ritel sebagaimana fokus pertumbuhan BSI ke depan. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah berkisar 7,09%. Secara garis besar, Dewan Komisaris melihat bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi yang disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank 2023-2025 dan Rencana Jangka Panjang BSI (*Corporate Planning*) 2021-2025 sudah baik.

Dewan Komisaris menilai masih banyak peluang yang harus dioptimalkan oleh Bank. Di antaranya adalah transaksi digital yang terus mengalami peningkatan, pengembangan *islamic ecosystem* dan keuangan berkelanjutan yang kuat dan inklusif. Ketiga hal tersebut merupakan paduan peluang yang saling terkait.

Transformasi digital merupakan peluang bagi BSI untuk melakukan percepatan pembangunan keuangan berkelanjutan yang kuat. Melalui kolaborasi dengan elemen masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat, sinergi dengan pemerintah, pelaku industri halal serta pelaku ekonomi kreatif dan hal lainnya yang telah dijalankan BSI sepanjang tahun 2022 merupakan landasan awal BSI untuk terus meningkatkan pertumbuhan *islamic ecosystem* di Indonesia. Hal tersebut ditujukan agar BSI dapat menyebarkan kebaikan, manfaat, kemaslahatan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan memberikan nilai positif bagi *stakeholder* pada khususnya.

Dari sisi global, Dewan Komisaris meyakini Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi perbankan syariah dunia, yang ditandai dengan berdirinya BSI. Hal ini juga sejalan dengan optimisime pemerintah ke depan, Indonesia akan tumbuh sebagai pusat industri halal dunia.

Beragam pertimbangan Dewan Komisaris ini telah menjadi bagian dari analisis prospek usaha yang disusun Direksi. Karena itu, Dewan Komisaris akan memberikan dukungan penuh untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) telah terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank. Tidak hanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga praktik terbaik (*best practice*) di lingkungan industri.

Untuk tahun 2022, Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip GCG di lingkungan BSI sudah baik, seperti tercermin pada hasil evaluasi efektivitas penerapan GCG yang telah dilaksanakan oleh BSI secara periodik (semesteran). Penilaian dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pelaksanaan *self-assessment* tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Bank telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasilnya, pada semester I-2022 dan semester II-2022, *self-assessment* terhadap GCG BSI mendapatkan skor 2 atau masuk ke dalam kategori "Baik".

Selain melaksanakan *self-assessment* untuk memenuhi ketentuan BI/OJK yang mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (internal self-assessment) terhadap pelaksanaan GCG, BSI juga melaksanakan pengukuran kualitas penerapan GCG oleh pihak eksternal yang independen. Pada tahun 2022, penilaian dalam bentuk *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh lembaga The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan tema "Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam Kerangka GCG". Hasil Penilaian CGPI menetapkan bahwa BSI mendapatkan skor sebesar 90,00 dengan predikat "Sangat Terpercaya" atau "The Most Trusted Company".

BSI juga menerapkan POJK No.18/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BSI telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi

dengan entitas utama (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) yang meliputi Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Internal Audit Terintegrasi.

Dalam meningkatkan pelaksanaan GCG Bank, Dewan Komisaris turut berperan aktif dalam melakukan beberapa perbaikan yang telah dijalankan Direksi pada tahun 2022 baik mengenai kebijakan, penerapan aspek syariah, maupun penunjang operasional Bank, diantaranya memberikan masukan dan persetujuan dalam revisi Standar Prosedur Pengendalian (SPP) Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) BSI, serta selalu mengingatkan mengenai:

1. Pengembangan *next practice* yaitu *sharia combine assurance* dalam mengantisipasi dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah;
2. Keandalan dan keamanan IT dan digital BSI dari cyber fraud; phising, virus dll.

Dari sisi Tingkat Kesehatan Bank, terdiri dari empat faktor penilaian yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan. Peringkat Tingkat Kesehatan BSI pada semester II tahun 2022 berada pada peringkat komposit 2 ("Sehat") yang artinya kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan semester I tahun 2022. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap semesteran pada periode Juni dan Desember.

Selain itu BSI juga memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip GCG antara lain sebagai berikut:

1. Amanah: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. Kompeten (Mukhtash): Cakap, Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. Harmonis (Mutanagim): Keserasian, Saling Peduli dan Menghargai Perbedaan
4. Loyal (Mukhalas): Berdedikasi dan mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
5. Adaptif (Takiifiyah): Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan
6. Kolaboratif (Ta'awiniyyah): Membangun kerja sama yang sinergis.

Pelaksanaan GCG yang sudah sangat baik ini, dalam pandangan Dewan Komisaris, akan memberikan manfaat besar bagi BSI, di antaranya :

1. Bank akan memiliki fondasi dan mekanisme tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas, sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik, berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip GCG juga dalam rangka mewujudkan Bank yang *sustainable*.
2. Meningkatnya nilai perusahaan (*corporate values*) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan, sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis, sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BSI ke depan.
3. Membentuk citra yang baik bagi BSI sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor, dan mitra bisnis untuk mengikatkan kerja sama dengan BSI. Selain itu secara tidak langsung BSI akan berkontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah di Indonesia.
4. Penerapan bisnis secara islami yang mendorong:
   a. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat, dan keberkahan dalam berbisnis.
   b. Pengambilan keputusan bisnis yang didasarkan pada nilai akhlak Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan prinsip syariah.
   c. Kesinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW.

d. Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan umat manusia dan kelestarian lingkungan.
e. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.
f. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.

5. Sebagai arahan strategis bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi BSI.
6. Sebagai bentuk tanggung jawab umat dan masyarakat Indonesia secara luas sehingga pelaksanaan tata kelola di Bank menjadi cerminan tata kelola terbaik Bank syariah di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

Whistleblowing System (WBS): Penerapan di Bank dan Peran Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari penerapan prinsip GCG, BSI juga telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Penerapan WBS bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan transparan, yaitu dengan menindaklanjuti pengaduan atau pengungkapan atas berbagai hal yang dapat mengakibatkan kerugian baik yang terkait keuangan maupun non keuangan, termasuk penurunan citra Bank.

WBS telah dirancang untuk memastikan setiap pelanggaran di lingkungan Bank dapat segera ditindaklanjuti tanpa mengganggu proses bisnis yang sedang berlangsung. Upaya ini merupakan bagian penting dalam menjaga reputasi Bank.

Dewan Komisaris mencermati bahwa penerapan WBS berjalan dengan cukup baik. Pengaduan terhadap masalah dan pelanggaran dapat ditindaklanjuti, dan pengelola WBS dapat memastikan bahwa pihak pengadu (*whistleblower*) menyampaikan informasi pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai sistem WBS yang diterapkan Bank, setiap Insan BSI ataupun pihak eksternal yang menjadi penyampai informasi akan mendapatkan perlindungan, sejalan dengan komitmen Bank untuk menegakkan etika, moral dan hukum.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Pengawasan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Komisaris memastikan berbagai rencana dan strategi yang tertuang dalam RBB telah dilaksanakan oleh Direksi. Hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting mengingat pelaksanaan rencana dan strategi tersebut akan sangat menentukan tercapainya target yang dituangkan dalam RBB.

Terkait dengan mekanisme pengawasan, Dewan Komisaris telah melaksanakannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke tempat-tempat aktivitas Bank maupun ke unit-unit dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi. Sedangkan mekanisme secara tidak langsung dilakukan melalui rapat dengan mengundang Direksi.

Pada tahun 2022, Dewan Komisaris beserta organ di bawahnya dalam rangka pengawasan melakukan kunjungan kerja ke beberapa Region, Area dan Cabang di bawahnya antara lain Region Aceh, Region Medan, dan Region Surabaya.

Pemberian Nasihat

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi telah terjalin dengan sangat baik dengan mengedepankan prinsip saling menghormati pada tugas dan wewenang masing-masing pihak. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi terkait operasional dan finansial Bank.

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi, yaitu dalam rapat gabungan, untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Bank yang dijalankan oleh Direksi. Dalam forum itu, Dewan Komisaris telah meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Bank dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris juga telah menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat terkait hal tersebut.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 33 kali rapat, yang terdiri dari 17 kali rapat internal Dewan Komisaris, 15 kali rapat Komisaris-Direksi dan 1 (satu) kali rapat gabungan Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.

Selain forum rapat gabungan, Dewan Komisaris juga melakukan rapat dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Rapat-rapat komite telah dilakukan dengan mengundang Direksi atau grup terkait, untuk rapat Komite Audit telah dilakukan sebanyak 25 kali, Komite Pemantau Risiko sebanyak 29 kali, serta Komite Nominasi dan Remunerasi 3 (tiga) kali.

Di luar mekanisme rapat, Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung melalui surat menyurat. Hal ini dilakukan agar terdapat dokumentasi yang jelas dan baku serta lebih sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PENILAIAN TERHADAP KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris menilai ketiga komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris dengan baik.

Komite Audit secara berkala telah melakukan pertemuan baik dengan Satuan Pengawas Internal maupun dengan Eksternal Audit (KAP) untuk membahas rencana, realisasi, dan temuan audit serta *monitoring* tindak lanjutnya. Hasil pertemuan tersebut secara periodik telah dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko secara rutin melakukan pengawasan dari laporan yang disajikan oleh manajemen, khususnya yang terkait dengan eksposur risiko yang dihadapi oleh BSI. Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Komite Pemantau Risiko juga telah mengadakan pertemuan dengan grup terkait dan melakukan pemantauan secara langsung di lapangan.

Begitu pula dengan Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah melakukan penilaian terhadap kesesuaian organisasi BSI dengan tantangan yang akan dihadapi ke depan. Komite Nominasi dan Remunerasi juga telah melakukan penjaringan dan seleksi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk direkomendasikan kepada RUPS.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2022 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, yang disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 27 Mei 2022. RUPS telah menetapkan akhir tugas Bangun S. Kusmuljono sebagai Komisaris Independen, sekaligus menetapkan pengangkatan Mohamad Nasir dan Nizar Ali, masing-masing sebagai Komisaris Independen dan Komisaris BSI.

Pengangkatan tersebut terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Selanjutnya, pada RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada 23 September 2022, Rapat menyetujui pengunduran diri Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang dari posisi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen BSI.

Perubahan tersebut merupakan usulan Pemegang Saham Pengendali Utama (PSPU) yang disampaikan kepada RUPS Luar Biasa dalam surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor CMB/2197/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang kemudian diputuskan oleh RUPS Luar Biasa BSI tanggal 23 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPSLB Nomor 139, dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.140 tanggal 23 September 2022, yang keduanya dibuat dihadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris BSI per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Suyanto	Komisaris
Masduki Baidlowi	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Komisaris
Sutanto	Komisaris
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen
Mohamad Nasir	Komisaris Independen
Nizar Ali*	Komisaris

* Dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Bank menyampaikan terima kasih kepada Komisaris yang telah berakhir masa tugasnya, atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjadi anggota Dewan Komisaris. Kepada Komisaris baru, Bank menyampaikan selamat bergabung untuk bersama-sama memberikan dukungan bagi pencapaian usaha Bank, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

PENUTUP DAN APRESIASI

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemegang Saham, Nasabah, serta Pemangku Kepentingan lainnya. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Direksi dan segenap Insan BSI atas kerja keras dan dedikasinya, sehingga dapat memberikan manfaat dan keberkahan atas jalannya usaha Bank di tahun 2022.

Kami berharap ke depan, BSI menjadi lembaga penggerak dan dapat menyebarkan nilai- nilai Islam yang memberikan rahmat serta manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, BSI mampu menjadi inspirasi bagi semua pihak serta mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi seluruh *stakeholders*.

Jakarta, 28 April 2023
Atas Nama Dewan Komisaris

Adiwarman Azwar Karim
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Dewan Komisaris

Berdiri dari kiri ke kanan:

1. **Imam Budi Sarjito**
   Komisaris
2. **Masduki Baidlowi**
   Komisaris
3. **Suyanto**
   Komisaris
4. **M. Arief Rosyid Hasan**
   Komisaris Independen
5. **Sutanto**
   Komisaris
6. **Komaruddin Hidayat**
   Komisaris Independen
7. **Nizar Ali**
   Komisaris

Duduk dari kiri ke kanan:

1. **Mohamad Nasir**
   Komisaris Independen
2. **Adiwarman Azwar Karim**
   Komisaris Utama Merangkap
   Komisaris Independen

Laporan Direksi

> Dalam rangka mendukung ekspansi bisnis ekosistem Syariah di tingkat global, BSI memiliki kantor perwakilan yang terletak di Dubai International Financial Center (DIFC). Selain itu, BSI juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Riyad Bank untuk menjadi mitra BSI dalam ekspansi Bisnis di Arab Saudi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") sepanjang tahun 2022 mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik yang ditandai dengan pertumbuhan bisnis sehat dan *sustain* dengan kualitas yang terjaga, sehingga menghasilkan profitabilitas yang baik. Di akhir tahun 2022, BSI juga telah merampungkan proses *Right Issue* untuk meningkatkan permodalan Bank.

Saat ini, BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Kehadiran Bank telah menjadi warna tersendiri bagi industri perbankan nasional, sekaligus memberikan energi baru bagi Indonesia, terutama melalui fungsi intermediasi yang dijalankan.

Hery Gunardi
Direktur Utama

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Sampai dengan tahun 2022, *market share* perbankan syariah masih mencapai kurang dari 7% dibandingkan industri perbankan Indonesia. Kehadiran BSI diharapkan dapat menjadi katalisator dan lokomotif pengembangan industri perbankan syariah Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekaligus memberikan energi baru bagi Indonesia, terutama melalui fungsi intermediasi yang dijalankan.

BSI memiliki fokus untuk tumbuh pada segmen yang sehat dan sustain dengan menggarap potensi dari ekosistem syariah, pendalaman *relationship* dengan nasabah *wholesale* untuk menjadi *entry gate* bisnis ritel konsumer, peningkatan kapabilitas digital, data *analytics*, produktivitas pegawai dan jaringan, serta penguatan *risk management*. Kedepannya BSI akan terus menghadirkan solusi keuangan syariah yang modern, lengkap dan universal kepada nasabah dengan melakukan *positioning* untuk menjadi mitra finansial, mitra sosial, dan mitra spiritual.

Sebagai bentuk dukungan dan kontribusi BSI dalam menanggapi *concern* pemerintah yaitu *net zero carbon*, BSI memberikan dukungan maksimal melalui fungsi intermediasi yang telah mendapatkan apresiasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), regulator di bidang penjaminan dana simpanan nasabah. Pada tahun 2022, lembaga tersebut menobatkan BSI sebagai "Bank Teraktif dalam Praktik *Green Banking*" dalam ajang LPS *Banking Awards* 2022. Penghargaan ini menjadi pengakuan dari inovasi dan komitmen Bank dalam mendukung Indonesia bebas karbon pada 2060 serta mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.

BSI terus berkomitmen dalam penerapan prinsip Environmental, Social dan Governance (ESG) yang selaras dengan aspek keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Hingga Desember 2022, Bank telah merealisasikan pembiayaan keuangan berkelanjutan sekitar Rp51,15 triliun atau 24,6% dari total pembiayaan BSI. Sedangkan dari sisi sosial, per Desember 2022 telah terhimpun dana zakat yang terdiri dari zakat korporasi (internal) sebesar Rp141,4 miliar, zakat pegawai Rp31,6 miliar, zakat nasabah & umum sebesar Rp 38,6 miliar sehingga total zakat terkumpul sebesar Rp211,7 miliar.

Dalam rangka mendukung ekspansi bisnis ekosistem syariah di tingkat global, BSI memiliki kantor perwakilan yang terletak di Dubai International Financial Center (DIFC). Selain itu, BSI juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Riyad Bank untuk menjadi mitra BSI dalam ekspansi Bisnis di Arab Saudi, di antaranya *treasury*, haji dan umrah, *trade finance*, *remittance*, dan lainnya. Hal ini merupakan kekuatan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia untuk menggarap potensi pasar global serta jendela alternatif bagi investor global untuk masuk ke Indonesia, sesuai dengan visi BSI menjadi *Top 10 Global Islamic Bank*.

Perubahan Penting pada Bank

Pada akhir tahun 2022, BSI telah melakukan aksi korporasi *Right Issue* dengan menerbitkan 4.999.952.795 lembar saham seri B atau sekitar 10,8% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh bank. Dengan harga pelaksanaan *Right Issue* sebesar Rp1.000 per lembar saham, maka *fresh fund* yang diterima Bank sekitar Rp5 Triliun dari aksi korporasi tersebut.

Aksi korporasi ini mengalami kelebihan permintaan atau *oversubscribed* sebanyak 1,4 kali. Respon yang positif dari para investor, baik domestik maupun asing menunjukkan bahwa kepercayaan *stakeholders* cukup tinggi terhadap Bank. Dana yang diperoleh dari hasil *Right Issue* ini akan semakin memperkuat struktur permodalan Bank serta ekspansi pembiayaan dan layanan keuangan syariah bagi nasabah.

KONDISI PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Sepanjang tahun 2022, perkembangan kasus COVID-19 semakin melandai dengan tingkat kematian yang menurun dan meningkatnya pemerataan vaksinasi. Hal ini menunjukkan situasi perekonomian terus bergerak ke arah pemulihan. Namun di tahun 2022 ekonomi global mendapatkan tantangan baru sebagai akibat perang Rusia-Ukraina. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan lonjakan harga komoditas di sektor energi dan pangan, namun juga memicu lonjakan inflasi di tingkat global dan domestik.

Salah satu yang paling agresif adalah Bank Sentral Amerika Serikat (AS) yang menaikkan suku bunga acuan hingga 425 *basis points* (bps) selama tahun 2022. Kebijakan ini berdampak kepada penguatan kurs dolar dan pelemahan rupiah.

Di dalam negeri, naiknya harga minyak global juga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga mendorong lonjakan inflasi yang mencapai level tertinggi 5,95% (yoy) pada September 2022. Tekanan tersebut mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya hingga 200 bps selama tahun 2022.

Dengan berbagai dinamika perekonomian tersebut, industri perbankan sepanjang tahun 2022 tetap tangguh. Fungsi intermediasi tetap baik dan risiko kredit terkendali.

Total aset perbankan nasional menyentuh Rp11.513 triliun pada Desember 2022, tumbuh 9,89% secara tahunan (year on year/yoy). Dana Pihak Ketiga (DPK) naik Rp686 triliun menjadi Rp8.294 triliun, meningkat 9,02% (yoy). Penyaluran kredit secara nasional tumbuh 11,36% (yoy) atau naik Rp670 triliun, sehingga menjadi Rp6.567 triliun. Hal ini didukung pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas yang disertai pemberian insentif oleh pemerintah dan regulator dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Tingkat kesehatan perbankan juga tetap terjaga dengan baik. Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 25,7% pada Desember 2022, atau di atas ketentuan minimum BASEL III, yaitu 10%. Rasio likuiditas yang ditunjukkan oleh rasio Likuiditas terhadap DPK (AL/DPK) tetap stabil, yakni sebesar 31,2%.

Perbankan juga beroperasi secara efisien, seperti tercermin dari rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) yang sebesar 78,64% atau lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2021 yang mencapai 83,42%. Rasio kualitas pembiayaan tetap terjaga didukung dengan insentif restrukturisasi pembiayaan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa pandemi COVID-19. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tercatat sebesar 2,4% (gross) atau 0,7% (net).

Industri perbankan syariah juga mencatat pertumbuhan positif. Total asetnya pada Desember 2022 naik Rp108 triliun atau tumbuh 15,6% (yoy), menjadi Rp802,3 triliun. Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah bertambah Rp71 triliun atau tumbuh 12,9% (yoy) ke level Rp619,5 triliun pada Desember 2022. Hal ini terjadi sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah yang didukung peningkatan infrastruktur dan layanan akses digitalisasi.

Tingkat kesehatan perbankan syariah terjaga dengan baik di masa pandemi COVID-19. Rasio CAR sebesar 26,28% pada Desember 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri nasional. Namun demikian, rasio efisiensi perbankan syariah lebih baik dibandingkan nasional. Rasio BOPO tercatat 77,48% pada Desember 2022, lebih rendah dibandingkan rasio BOPO industri perbankan nasional.

Sementara kualitas pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan kinerja positif. Tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) gross membaik dari 2,70% di akhir 2021 menjadi 2,41% di Desember 2022 dan lebih rendah dari industri perbankan nasional.

KINERJA USAHA TAHUN 2022

Kebijakan dan Strategi 2022

Sepanjang tahun 2022 yang dinamis dan penuh tantangan, BSI mampu menunjukkan kinerja yang baik, pertumbuhan bisnis sehat dan *sustain*, profitabilitas yang baik, serta kualitas kinerja yang terjaga. Fokus strategi BSI di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan segmen usaha *Wholesale* dan *Transactional Banking*, dengan fokus meningkatkan *customer based* dan *deepening relationship* dengan nasabah melalui pengembangan kapabilitas *transactional banking*, organisasi, dan *human capital*.
2. Penguatan Ritel Banking, melalui fokus pengembangan kerja sama bisnis, penajaman *business model*, digitalisasi, dan perbaikan *business process*.
3. Akselerasi kapabilitas digital, melalui peningkatan *mobile capability*, penguatan *data analytic*, peningkatan stabilitas sistem, dan fokus pada *user experience*.

4. Menggarap potensi *Islamic Ecosystem*, melalui pengembangan *platform* dan *solution* yang inovatif serta *acquisition* dan *implementator* yang efektif.
5. Penataan jaringan kantor, dengan melakukan relokasi outlet yang berdekatan dan peningkatan *contribution margin* outlet, serta *shifting* transaksi cabang kea rah transaksi digital.

Peran Direksi dalam Perumusan Strategi dan Implementasi Kebijakan

Direksi sebagai *Top Management* memiliki peranan penting dalam menentukan strategi yang akan dijalankan oleh Bank serta mewujudkan visi dan misi BSI kedepannya. Direksi berperan dalam merumuskan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, membuat kerangka rencana dan kebijakan, mengatur sumber daya organisasi, serta merumuskan strategi khusus untuk mencapai target yang ditetapkan.

Selain itu, Direksi juga melaksanakan agenda rapat bersama direktorat dan grup terkait untuk melakukan *monitoring* implementasi strategi Bank. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala itu untuk mengevaluasi pencapaian target dan kendala yang dihadapi serta strategi lanjutan dalam mengatasi kendala tersebut. Pembuatan laporan berkala, baik harian maupun bulanan, menjadi salah satu alat bantu bagi Direksi untuk me-*monitoring* kondisi bisnis Bank terkini.

Perbandingan Target dan Realisasi

Di tahun 2022, BSI mampu menunjukkan kinerja yang baik, pertumbuhan bisnis sehat dan *sustain*, serta profitabilitas yang baik. Per Desember 2022, BSI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,3 triliun dengan pencapaian 108,75% dari target yang telah ditetapkan atau tumbuh 40,68% yoy.

Akumulasi laba disumbang dari penurunan beban bagi hasil dengan realisasi di Desember 2022 sebesar Rp4,0 triliun atau pencapaian 106,70% dari target. Selain itu, pendapatan dari *fee based income* di Desember 2022 sebesar Rp3,7 triliun dengan pencapaian 108,72% dari target atau tumbuh 21,20% yoy. Untuk penyaluran dana, per Desember 2022 sebesar Rp207,7 triliun dengan pencapaian 108,95% dari target atau tumbuh 21,26% yoy. Sementara penghimpunan dana di Desember 2022 sebesar Rp261,5 triliun dengan pencapaian 100,81% dari target atau tumbuh 12,11% yoy. Adapun komposisi dana murah (CASA) tercatat sebesar 61,57% dari total penghimpunan dana. Sehingga di Desember 2022, BSI membukukan aset sebesar Rp305,7 triliun dengan pencapaian 101,81% dari target atau tumbuh 15,24% yoy.

Persentase Imbalan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

Untuk mendukung kinerja Bank, BSI menerapkan beberapa kebijakan diantaranya melakukan pembatasan nisbah spesial dan fokus pertumbuhan dana murah, Sehingga Bank dapat menurunkan *cost of fund* sebesar 41 bps secara yoy dari 2,03% di Desember 2021 menjadi 1,62% pada Desember 2022.

Selain itu, untuk meningkatkan ekspansi pembiayaan, Bank melakukan pengembangan kerjasama bisnis, perbaikan proses bisnis, dan penajaman model bisnis. Bank juga memberikan *special pricing* untuk beberapa segmen yang menjadi fokus pertumbuhan. Secara *blended yield*, pembiayaan BSI per Desember 2022 mencapai 9,15%.

Komitmen terhadap UMKM

BSI senantiasa berupaya memberikan dukungan pada kebijakan pemerintah, seperti komitmen dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Inisiatif tersebut dijalankan melalui fasilitas penyaluran pembiayaan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Per Desember 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebesar Rp41,8 triliun atau sebesar 20,19% dari total pembiayaan Bank, meningkat dibandingkan Desember 2021 sebesar Rp 39,4 triliun.

Penyaluran pembiayaan UMKM terbesar pada sektor usaha kecil yang mencapai Rp20,6 triliun, meningkat dibandingkan Desember 2021 sebesar Rp18,8 triliun atau tumbuh 9,9% yoy.

Kendala dan Tantangan

Pada tahun 2022, Bank menghadapi kendala sebagai dampak dari dinamika ekonomi di global maupun domestik. Proses pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 memiliki tantangan tersendiri imbas dari perang antara Rusia dan Ukraina.

Perang tersebut menimbulkan gangguan pada rantai pasok global, sehingga melambungkan harga komoditas. Kondisi ini meningkatkan risiko di perbankan, terutama terhadap nasabah yang memiliki bisnis di sektor yang memiliki *exposure* terhadap aktivitas ekspor-impor.

Lonjakan inflasi akibat tekanan kondisi geopolitik global itu membuat terjadinya perubahan pada kebijakan moneter di beberapa negara. Di Indonesia misalnya, sebagai respons terhadap situasi yang berkembang, Bank Indonesia menetapkan kebijakan menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya di Agustus 2022, yaitu sebesar 25 bps, sehingga menjadi 3,75%. Keputusan ini dianggap sebagai langkah *pre-emptive* serta *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi dan ekspansi inflasi. Kenaikan suku bunga acuan ini terus berlanjut hingga Desember 2022 menjadi 5,50%.

Tren kenaikan suku bunga acuan menimbulkan tambahan pada biaya perolehan dana (*cost of fund*) perbankan serta mengetatnya likuiditas di pasar. Namun, pulihnya konsumsi domestik masih menjadi pendorong pertumbuhan bisnis perbankan, sehingga ekspansi pembiayaan tetap tumbuh positif.

Dengan kondisi tersebut, Bank melakukan evaluasi dan penguatan perangkat manajemen risiko untuk menjaga kualitas bisnis serta tingkat kesehatan bank. Bank cenderung lebih selektif dan menetapkan sektor fokus untuk penyaluran pembiayaan serta mengoptimalkan ekosistem dan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya. Di sisi lain, Bank juga berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan efisiensi di tengah tren kenaikan *cost of fund*.

Dalam memitigasi kebijakan regulator dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan, khususnya mengoptimalkan profitabilitas *Net Imbalan* (NI), Bank melakukan beberapa strategi. Di antaranya, *yield enhancement* melalui peningkatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *shifting portfolio to high yield and prudent financing*, *adjust financing price*, dan *re-invest treasury asset to high yield*. Selain itu, Bank juga melakukan strategi *manage cost of fund* melalui fokus pertumbuhan dana murah khususnya tabungan, optimalisasi *transactional banking*, *shifting* deposito dari *wholesale* ke ritel, dan mengurangi konsentrasi deposan inti.

PROSPEK USAHA 2023

Pada tahun 2023, indikator makroekonomi diprediksi cukup menantang dengan adanya potensi resesi global yang memicu kenaikan suku bunga. Potensi adanya resesi tersebut, antara lain disampaikan oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/ IMF) serta Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Potensi krisis tersebut merupakan tantangan bagi BSI untuk tetap tumbuh positif dan mampu memberikan solusi kepada nasabah/masyarakat dengan menjadi mitra finansial, sosial, dan spiritual. Dengan potensi pasar yang luas dan kapabilitas dimiliki, BSI senantiasa berusaha untuk menghadirkan solusi keuangan syariah yang modern, lengkap dan universal kepada nasabah.

BSI telah memiliki performa yang teruji di tahun 2022 dengan tercapainya berbagai indikator keuangan dan aksi korporasi. Karena itu, Bank memiliki peluang untuk terus tumbuh dengan melihat berbagai peluang, antara lain:

1. Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industri halal.
2. Optimalisasi potensi dan peluang pengembangan industri pada ekosistem Syariah baik di tingkat global maupun nasional terus dilakukan seiring meningkatnya halal *awareness*.
3. *Positioning* BSI di industri perbankan Syariah yang kuat.
4. Dengan posisi sebagai Bank syariah terbesar, BSI berpotensi untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah di industri perbankan nasional.
5. Dalam rangka mewujudkan misi BSI untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia dan melayani lebih dari 40 juta nasabah, maka BSI akan menjadi *Sharia Integrated Financial Services*.
6. 6. BSI memiliki likuiditas yang relatif baik dan longgar. Hal ini tercermin dari posisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada level 79,37% pada bulan Desember 2022.
7. BSI senantiasa memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk, dimana hal tersebut telah berjalan saat ini dan akan tetap dilanjutkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional BSI.

Berdasarkan asumsi tersebut dan adanya berbagai peluang, BSI optimis untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Bank memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki, yaitu:

1. Jaringan kantor dan unit kerja yang luas.
2. Merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset.
3. Produk dan jasa layanan keuangan berbasis syariah untuk mendukung peningkatan halal *awareness*.
4. Kualitas *booking* pembiayaan yang baik, dengan disiplin pada *Risk Acceptance Criteria* serta proses *underwriting* yang baik dan *monitoring* intensif.
5. Struktur permodalan yang kokoh dengan biaya dana yang murah.
6. Likuiditas yang terjaga dengan baik.
7. Mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam memperkuat industri keuangan syariah.
8. Dukungan kuat dari pemegang saham dan sinergi dengan Bank Induk.
9. Jaringan di pasar global.
10. Reputasi yang baik, seperti dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri.
11. Komitmen organisasi untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
12. Komitmen untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme seluruh pegawai.
13. Struktur demografi kepegawaian yang didominasi pegawai berusia muda dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
14. Berpengalaman di bidang ekosistem halal, antara lain haji, umroh, pesantren, pendidikan Islam, masjid, dan zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf).

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah melekat dalam kegiatan usaha BSI. Bank mengimplementasikannya dengan berasaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran, serta mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan usaha Bank.

Di antaranya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait GCG bagi Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait GCG bagi perbankan syariah, transparansi dan publikasi laporan bank umum, ketentuan bagi perusahaan publik, hingga Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021 yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Hingga tahun buku 2022, seluruh penerapan GCG di setiap aspek kegiatan usaha Bank telah berjalan dengan baik. Evaluasi efektivitas penerapan GCG juga telah dilaksanakan secara periodik (semesteran) melalui mekanisme *self-assessment* terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Hasil penilaian *self assessment* GCG pada semester 1 dan semester 2 tahun 2022 adalah "2" (Baik). Selain itu, pada tahun 2022 BSI juga mengikuti program riset dan pemeringkatan "Corporate Governance Perception Index" oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Bank mendapatkan skor 90,00 dengan predikat "Indonesia Most Trusted Company".

Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, BSI melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS)

Pencapaian yang baik di bidang CGG akan memicu Bank untuk terus mengembangkannya seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kondisi industri. Bank meyakini, penerapan prinsip GCG yang konsisten akan mendukung pertumbuhan kinerja Bank secara berkelanjutan.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam pengembangan teknologi informasi di tahun 2022, BSI berfokus untuk memperkuat stabilitas sistem dan menyiapkan landasan digital. Bank melakukan transformasi dengan menyiapkan teknologi terkini yang siap untuk pengembangan masa depan dalam rangka mewujudkan pencapaian target usaha Bank.

Di bidang layanan, Bank meningkatkan proses digitalisasi melalui jaringan kantor. Pada sisi layanan digital itu dilakukan pengembangan dengan metode *agile* yang cepat merespons kebutuhan pasar.

Untuk pengelolaan operasional di bidang teknologi informasi, Bank menggunakan teknologi automasi yang terintegrasi guna memantau performa sistem secara *realtime*. Bank juga meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk mendukung stabilitas sistem. Selain itu, dilakukan peningkatan perangkat keamanan digital dan penguatan organisasi *Chief Information Security Office* dalam rangka memperkuat keamanan digital bank.

Bank meyakini, teknologi masa depan dengan metode pengembangan *agile* yang didukung oleh pengembangan integrasi data dan *data analytic*, menjadi penggerak bisnis Bank ke depan. Pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung digitalisasi proses *end to end* dikembangkan melalui kanal digital dan jaringan cabang, sehingga proses bisnis menjadi *seamless* dan terintegrasi. Digitalisasi *end to end* dilakukan untuk kesiapan pengembangan bisnis di ekosistem digital di masa depan.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), BSI telah menetapkan "Human Capital Roadmap" untuk mendukung transformasi organisasi serta SDM Bank yang inovatif dan proaktif dalam menjawab tantangan maupun perubahan di masa datang. Fokus strategi Human Capital pada tahun 2022 adalah peningkatan produktivitas pegawai, perbaikan proses bisnis, penyelarasan kinerja dengan *reward*, akselerasi pengembangan kapabilitas pegawai, serta penguatan integrasi budaya perusahaan. Fokus tersebut bertujuan untuk memperkuat kebijakan fundamental pasca merger.

Bank telah merealisasikan beberapa program untuk mendukung implementasi fokus strategi Human Capital. Di antaranya, penyelenggaraan program Middle Manager Development Program (MMDP), Senior Manager Development Program (SMDP), seleksi penerima beasiswa S2 bagi pegawai talent BSI. Selain itu dilakukan pemutakhiran *Human Capital Information System* (HCIS) sebagai realisasi *Business Process Re-Engineering*, serta pelaksanaan *Culture Integration Activation* (CIA) dengan hasil survey AKHLAK *Culture Health Index* rata-rata Total *Corporate Culture* BSI (85,8%) pada kategori A Tinggi.

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen terhadap kesejahteraan pegawai, manajemen melanjutkan pemberian token bonus di tengah tahun, melakukan harmonisasi fasilitas kesehatan, memberikan apresiasi umroh. Selain itu, Bank juga meluncurkan produk Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) untuk memberikan kemudahan pegawai dalam memenuhi kebutuhan akan rumah dan kendaraan.

Pengembangan organisasi ini selaras dengan "*Corporate Plan* PT Bank Syariah Indonesia Tbk" tahun 2022-2025, yaitu menjadi "Top 10 Global Syariah Bank". Untuk mencapai aspirasi tersebut, BSI melakukan penyesuaian struktur organisasi yang fokus pada:

1. Memperkuat BSI untuk menjadi *the best payroll bank* di Indonesia;
2. Mengembangkan Islamic Ecosystem Solution dengan menjadi mitra keuangan nomor 1 (satu) untuk umat muslim Indonesia melalui 7 (tujuh) ekosistem kemitraan, yaitu masjid, haji & umrah, ziswaf, pesantren, sekolah Islam, mode halal, makanan & minuman halal, dan layanan Kesehatan halal;
3. Mengembangkan *alternative channel* jaringan baru dengan menggunakan branchless banking (laku pandai) yang bertujuan memperluas penetrasi pasar serta meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah dengan biaya yang lebih efisien dan jangkauan yang lebih luas dan *agile*; dan
4. Pengembangan bisnis Wholesale dan pengembangan *Representative Office* Dubai menjadi *Full Branch Office*.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) komite di bawahnya, atau disebut juga Komite Eksekutif:

1. Komite Manajemen Risiko
2. IT Steering Committee
3. Komite Policy and Procedure
4. Komite Bisnis
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
6. Komite Human Capital
7. Komite Asset dan Liabilities/Asset and Liability Committee (ALCO)

Selama tahun 2022, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Rekomendasi yang dihasilkan dari komite-komite telah menjadi pertimbangan penting bagi Direksi dalam mengambil keputusan strategis, sehingga mampu menghasilkan kinerja Bank yang positif.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2022 telah terjadi perubahan komposisi Direksi, yang disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada 27 Mei 2022. RUPS menetapkan pengangkatan Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama, Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking, dan Moh. Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking serta pengalihan tugas Ngatari yang semula Wakil Direktur Utama 1 menjadi Direktur Retail Banking.

Pengangkatan dan pengalihan tugas tersebut berlaku terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021. Untuk pengangkatan 3 (tiga) Direktur baru BSI tersebut akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya yang diselenggarakan pada tahun 2025, sedangkan untuk pengalihan tugas menjadi Direktur Retail Banking meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan. Penetapan pengangkatan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Perubahan tersebut merupakan usulan Pemegang Saham Pengendali Utama (PSPU) yang disampaikan kepada RUPS dalam surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk nomor CMB/1023/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang kemudian diputuskan oleh RUPS Tahunan BSI tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah RUPST Nomor 155, dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.156 tanggal 27 Mei 2022, yang keduanya dibuat dihadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Dengan demikian, komposisi Direksi hingga akhir tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

Hery Gunardi	Direktur Utama
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama
Ngatari	Direktur Retail Banking
Achmad Syafii	Direktur Information Technology
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking

Manajemen menyampaikan terima kasih kepada anggota Direksi yang tidak lagi menjabat atas kontribusinya selama bergabung dengan BSI, dan kepada anggota Direksi yang baru, manajemen mengucapkan selamat bergabung untuk sama-sama mewujudkan cita-cita Bank, sekaligus memberikan kontribusi kepada negara.

PENUTUP DAN APRESIASI

BSI telah berhasil melalui tahun buku 2022 dengan hasil yang baik. Pencapaian ini tidak dapat dipisahkan dari peran penting Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Dewan Pengawas Syariah atas arahan dan nasihatnya. Karena itu, Direksi menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut. Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan untuk seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank Syariah Indonesia atas kerja keras dan dedikasi yang diberikan kepada Bank.

Direksi juga berterima kasih kepada para pemangku kepentingan lain, seperti regulator, mitra kerja, serta nasabah. Kerja sama yang telah terjalin dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG diharapkan terus meningkat dan semakin baik.

Semoga ke depannya BSI senantiasa mampu meningkatkan kinerja dan mampu menjadi sebuah entitas global kebanggaan negeri serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.

Jakarta, 28 April 2023
Atas Nama Direksi

Hery Gunardi
Direktur Utama

Direksi

Berdiri dari kiri ke kanan:

1. **Ade Cahyo Nugroho**
   Direktur Finance & Strategy
2. **Anton Sukarna**
   Direktur Sales & Distribution
3. **Achmad Syafii**
   Direktur Information Technology
4. **Moh Adib**
   Direktur Treasury & International Banking
5. **Ngatari**
   Direktur Retail Banking
6. **Zaidan Novari**
   Direktur Wholesale Transaction Banking

Duduk dari kiri ke kanan:

1. **Tiwul Widyastuti**
   Direktur Risk Management
2. **Bob Tyasika Ananta**
   Wakil Direktur Utama
3. **Hery Gunardi**
   Direktur Utama
4. **Tribuana Tunggadewi**
   Direktur Compliance & Human Capital

Laporan Dewan Pengawas Syariah

> Dewan Pengawas Syariah akan terus berupaya mendorong dan mengawasi manajemen dalam mengimplementasikan aspek syariah di seluruh kegiatan bisnis Bank agar dapat memberikan layanan terbaik dan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Kami menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, semoga taufiq dan hidayah-Nya senantiasa tercurah bagi kita semua. Tidak lupa, salawat serta salam kami bagi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, perkenankan kami selaku Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha selama tahun buku 2022.

Situasi yang dilalui manajemen dalam tahun 2022 tentu tidak mudah. Namun semuanya berjalan dengan baik dengan dukungan strategi dan kebijakan strategis serta respons yang tepat oleh Direksi serta jajaran di bawahnya. Pada akhir tahun buku, BSI mempersembahkan kinerja yang positif, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Hasanudin
Ketua Dewan
Pengawas Syariah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional telah dilaksanakan di Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dengan demikian, laporan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas DPS, sekaligus keterbukaan informasi Bank.

Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah akan terus berupaya mendorong dan mengawasi manajemen dalam mengimplementasikan aspek syariah di seluruh kegiatan bisnis Bank agar dapat memberikan layanan terbaik dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kami mengharapkan segala masukan yang dapat membangun sehingga Bank Syariah Indonesia dapat menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Fokus Tahun 2022

Berikut Fokus DPS Pada Tahun 2022

1. Update *concern* DPS secara berkala (triwulan) pada setiap pelaksanaan Rapat Gabungan (dihadiri Dewan Komisaris, Direksi, DPS).
2. Literasi dan Pelatihan Syariah untuk Tim Audit/RBC
3. Frontliner & Marketing Jaringan oleh DPS, KS & SCOM
4. Pembuatan Modul Digital
5. Sertifikasi *Fiqh* Muamalah Untuk semua Level Jabatan (Semua level AM).
6. Pembuatan *tools assessment* Kepatuhan Syariah:
   a. *Sharia Checklist*
   b. *Sharia* Audit
   untuk pembiayaan (semua Skema Akad Pembiayaan) dan dana.
7. Melakukan Aktivitas Uji Petik di setiap kantor Area & Regional
8. Malakukan *Sharia Combined Assurance* secara tematik (Segmen Mikro, SME, Konsume) Bersama Sharia Compliance & Internal Audit

Pelaksaan Kegiatan Pengawasan Tahun 2022

Selama tahun 2022 Dewan Pengawasan Syariah melakukan Pengawasan Syariah (Uji Petik) pada 37 kantor cabang. DPS secara umum menetapkan standar dokumen sampling baik pembiayaan maupun pendanaan, yang terdiri dari:

A. Dokumen Pembiayaan

1. Surat permohonan nasabah;
2. NAP/NAR;
3. Putusan Komite Pembiayaan (PKP);
4. SP3 yang sudah ditanda tangani oleh para pihak;
5. Akad pembiayaan dan addendum akad beserta lampiran (seperti dokumen pembelian barang dll);
6. Deklarasi Bagi hasil (khusus untuk pembiayaan Musyarakah/mudharabah)

B. Jenis – jenis Akad Pembiayaan

1. Murabahah
2. Ijarah
3. Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik
4. Muysrakah/ Mudharabah
5. Musyarakah Mutanaqishshah
6. Rahn
7. Qardh
8. Wakalah

C. Dokumen Pendanaan pada masing – masing Kantor Cabang, sbb:

1. Tabungan:
   a) 5 sample berbasis Akad Mudharabah
   b) 5 sample berbasis akad Wadiah;
2. Giro:
   a) 2 sample berbasis Akad Mudharabah
   b) 2 sample berbasis Akad Wadiah;

3. Deposito: 2 sample

Perubahan Komposisi

Pada tahun buku 2022, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia. Berikut adalah komposisi DPS BSI per 31 Desember 2022.

Ketua : Hasanudin
Anggota : Mohamad Hidayat
Anggota : Oni Sahroni
Anggota : Didin Hafidhuddin

Apresiasi

Dewan Pengawas Syariah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen BSI yang telah berhasil melalui tahun buku 2022 dengan kinerja Bank yang sangat baik. Terutama, tentu saja, kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perkembangan yang terjadi pada tahun 2022 diharapkan mampu menjadi fondasi bagi BSI untuk melayani dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara. Semoga manajemen selalu memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya, termasuk dalam mengejar target kinerja.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 28 April 2023

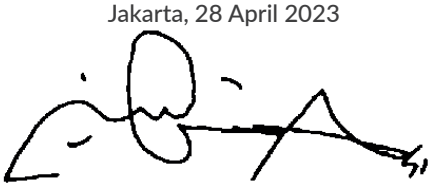

Hasanudin
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah

Dari kiri ke kanan:

1. **Dr. H. Oni Sahroni, MA**
   Anggota Dewan
   Pengawas Syariah
2. **Dr. K.H Hasanudin, M.Ag**
   Ketua Dewan
   Pengawas Syariah
3. **Dr. H. Mohamad Hidayat**
   Anggota Dewan
   Pengawas Syariah
4. **Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc**
   Anggota Dewan
   Pengawas Syariah

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi atas Laporan Tahunan 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2022 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2023

DEWAN KOMISARIS

Adiwarman Azwar Karim
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen

Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen

Mohamad Nasir
Komisaris Independen

Suyanto
Komisaris

Masduki Baidlowi
Komisaris

Imam Budi Sarjito
Komisaris

Sutanto
Komisaris

Nizar Ali*
Komisaris

*Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian *fit and proper test*

DIREKSI

Hery Gunardi
Direktur Utama

Bob Tyasika Ananta
Wakil Direktur Utama

Ngatari
Direktur Retail Banking

Achmad Syafii
Direktur Information Technology

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Finance & Strategy

Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

Tribuana Tunggadewi
Direktur Compliance & Human Capital

Tiwul Widyastuti
Direktur Risk Management

Zaidan Novari
Direktur Wholesale Transaction Banking

Moh. Adib
Direktur Treasury & International Banking

03
Profil Perusahaan

"BSI semakin mengukuhkan posisi masuk dalam ekosistem keuangan syariah global demi mewujudkan visi untk menjadi "Top 10 Global Islamic Bank".

Identitas Perusahaan

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Nama Perusahaan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Dasar Hukum Pendirian
- Berita Negara RI No.43 – 28 Mei 1971-Tambahan No. 242
- Berita Negara RI No. 85 -23 Oktober 2009 - Tambahan No. 26142
- Berita Negara RI No. 96 - 1 Desember 2009 Tambahan No. 27908

Bidang Usaha
Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Izin Usaha
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008
- Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009

Modal Dasar
Rp40.000.000.000.000

Informasi Perubahan Nama
Efektif berubah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada 1 Februari 2021 dari sebelumnya bernama PT Bank BRIsyariah Tbk karena adanya penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Rp23.064.630.069.000

Kode Saham
BRIS

Bursa Efek
Saham Perseroan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018

Call Center
14040
1500789
(khusus melayani nasabah perusahaan dan institusi)

Jumlah Karyawan
18.581

Media Sosial
Facebook : Bank Syariah Indonesia
Instagram : @banksyariahindonesia
@lifewithbsi
@BSIMobile
Youtube : Bank Syariah Indonesia
Twitter : @bsihelp
@bankbsi_id

Akses terhadap Perusahaan
Alamat Kantor Pusat:
Gedung The Tower,
Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan 12930

Telepon
(62-21) 30405999

Website
https://www.bankbsi.co.id/

Faksimili
(62-21) 30421888

Sekilas Perusahaan

> Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka, antara lain didukung oleh kinerja yang positif serta harapan pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat.

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

Jejak Langkah

2007

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengakuisisi Bank Jasa Arta.

2008

- Bank Indonesia mengeluarkan izin usaha melalui suratnya No.10/67/Kep.GBI/DpG/2008.
- Pada 16 Oktober 2008 PT Bank BRIsyariah secara resmi beroperasi dengan mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.
- Pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan unit usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT Bank BRIsyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

2009

Grand launching BRIsyariah oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil pada 1 Juli 2009.

2010

- Peluncuran 7 nilai budaya kerja BRIsyariah: PASTI OKE, yaitu Profesional, Antusias, Penghargaan SDM, Tawakal, Integritas, Orientasi bisnis dan Kepuasan pelanggan.
- *Live Core Banking System* SyIAR (*Syariah Integrated & Automated Realtime*) yang dilengkapi dengan aplikasi *electronic Financing Originating System* (efoS) dan *Management Information System* (MIS).

2019

- Pada milad ke-11, BRIsyariah mengembangkan inovasi teknologi untuk internal *business process* guna mempercepat layanan kepada nasabah, yaitu Kemaslahatan Untuk Rakyat Madani (i-Kurma). i-Kurma merupakan aplikasi digital untuk memproses pembiayaan mikro.
- Dimulainya implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang dilakukan oleh BRI dan BRIsyariah.

2020

BRIsyariah melakukan pengembangan i-Kurma. Gen 2 untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. i-Kurma Gen 2 ini merupakan pengembangan dari produk sebelumnya untuk mempercepat proses permohonan pencairan pembiayaan mikro.

2021

Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah bergabung dengan BRIsyariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H.

2022

BSI mampu menyelesaikan proses *right issue* pertama melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Proses ini tercatat *over subscribe* (kelebihan permintaan) sebanyak 1,4 kali dan menghasilkan tambahan modal sekitar Rp5 trilun.

2011

Implementasi layanan syariah Bank BRIsyariah di 18 kantor cabang BRI.

2012

- BRIsyariah mengukuhkan diri sebagai bank syariah pertama di dunia yang memiliki layanan *mobile banking* di 4 (empat) *market online*, yaitu *Blackberry App World, Google Play, Apple Store* dan *Nokia Store*.
- Peluncuran tabungan Impian BRIsyariah.

2013

- BRIsyariah mengembangkan program *Sharia Officer Development Program* (SODP) untuk menciptakan bankir-bankir yang memiliki kompetensi besar dalam perbankan syariah serta kesamaan pemahaman terhadap bisnis BRIsyariah.
- *Rebranding* Tabungan BRIsyariah iB menjadi Tabungan Faedah BRIsyariah iB.
- BRIsyariah disetujui oleh Bank Indonesia sebagai bank devisa.

2014

- Peluncuran *internet banking* BRIsyariah.
- Implementasi aplikasi penunjang pembiayaan elektronik (Appel) untuk mendukung proses penyaluran pembiayaan secara cepat dan akurat.

2015

- BRIsyariah ditunjuk oleh OJK sebagai Indonesia *First Movers on Sustainable Banking*.
- BRIsyariah sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang meluncurkan laku pandai Syariah BRISSMART.
- BRIsyariah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peserta lelang Surat Berharga Syariah negara (SBSN).

2016

BRIsyariah menerbitkan Sukuk Mudharabah Subordinasi I BRIsyariah tahun 2016 untuk memperkuat permodalan.

2017

- Bank syariah pertama yang menyalurkan KUR syariah sebesar Rp58,1 miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah.
- Bekerja sama dalam penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk ASN dan swasta untuk pembiayaan KPR FLPP pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp950 miliar.
- Ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI sebagai bank penerima pajak negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua bagi nasabah korporasi maupun perorangan.

2018

BRIsyariah *go public* pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia, melakukan penawaran saham perdana (*initial public offering*) sebesar 2.623.350.600 kepada investor domestik maupun asing, dengan nilai nominal Rp500 per saham.

Visi

TOP 10
GLOBAL ISLAMIC BANK

Misi

Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
Top 5 bank yang paling *profitable* di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Pada tahun buku 2022, manajemen tidak melakukan *review* terhadap Visi dan Misi BSI, karena menilai masih relevan dengan perkembangan Bank.

Budaya/Nilai-Nilai Perusahaan

Bank Syariah Indonesia didirikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang saat ini menjadi pemegang saham mayoritas Bank. Sejalan dengan hal itu, BSI menjadikan "AKHLAK" sebagai nilai perusahaan, selaras dengan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 yang mewajibkan setiap BUMN mengimplementasikan nilai-nilai utama (*core values*) tersebut sebagai dasar pembentukan karakter SDM.

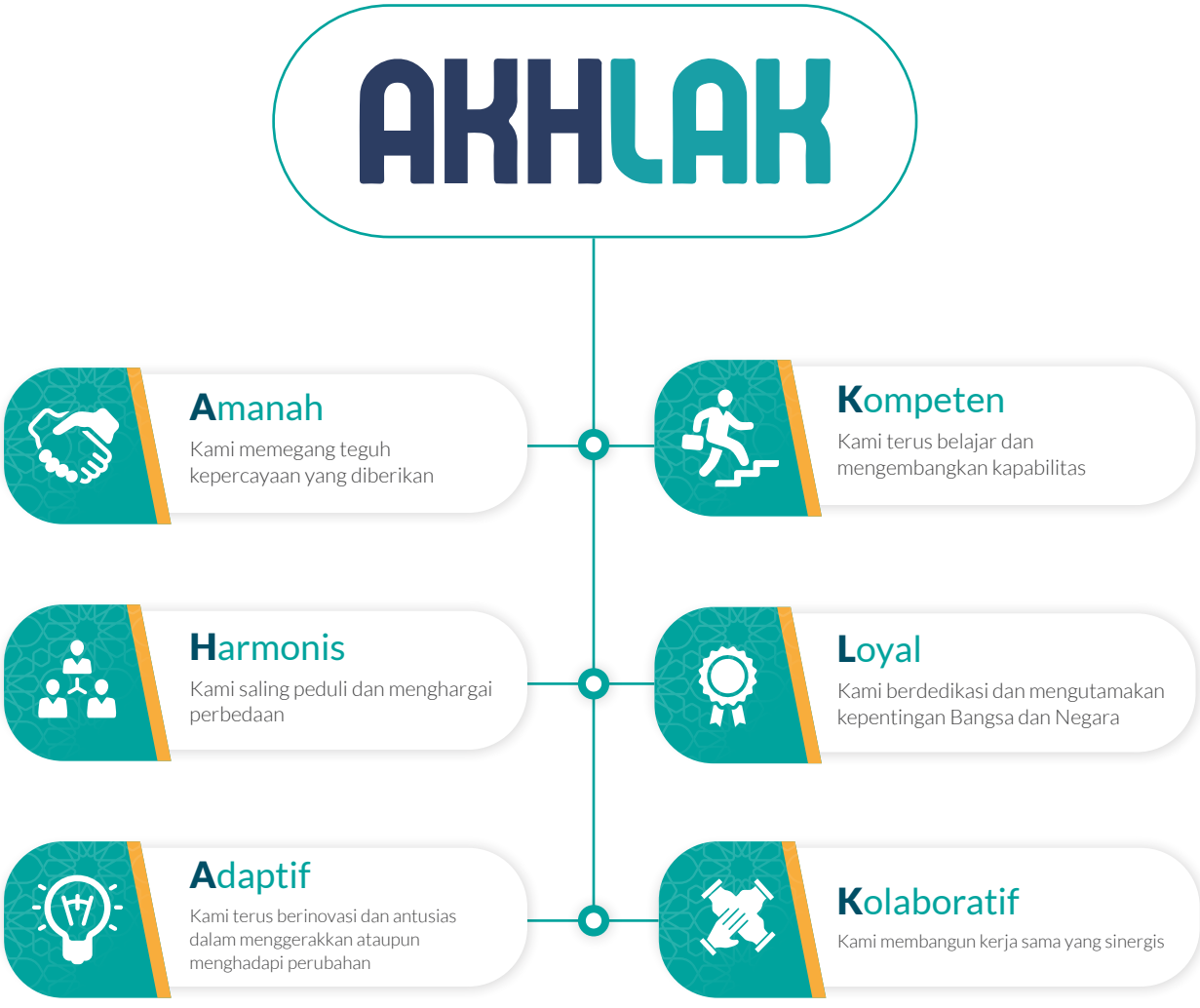

Bidang Usaha

Sesuai Anggaran Dasar

A. Kegiatan usaha utama

1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan - barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau - sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
9. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain :
   i. Wakalah
   ii. Hawalah
   iii. Kafalah
   iv. Rahn
10. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip - syariah
11. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan - oleh Pemerintah dan/ atau Bank Indonesia
12. Menerima pembayaran dari tagihan - atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk - kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah
14. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah
16. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah
17. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah
18. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah
19. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan Akad Wakalah
20. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

B. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan utama :

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik
7. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang
8. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai Dijalankan pada Tahun Buku

Kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku 2022 telah sejalan dengan yang berada di Anggaran Dasar Bank.

Produk dan Layanan

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, Bank Syariah Indonesia menyediakan beragam produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan profil masing-masing nasabah. Produk dan layanan tersebut terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu individu, perusahaan, *digital banking* dan kartu.

Individu

BISNIS	
Bank Guarantee Under Counter Guarantee	Instrumen penjaminan perbankan yang diterbitkan atas dasar permintaan dan kontra jaminan (*counter guarantee*) yang diterima baik dari bank ataupun non bank.
BSI Bank Garansi	Bank garansi yang dikhususkan kepada vendor/kontraktor dari PT PLN (PLN) dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN.
BSI Cash Management	Saluran distribusi elektronik berupa layanan *internet banking* bagi nasabah perusahaan atau institusi untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan *monitoring* arus kas dengan aman, cepat dan mudah.
BSI Deposito Ekspor SDA	Bersama membangun negeri dengan devisa ekspor.
BSI Giro Ekspor SDA	Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah atau properti berhadiah porsi haji.
BSI Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering.
BSI Giro Pemerintah	Dana berkah untuk negeri.
BSI Pembiayaan Investasi	Fasilitas Pembiayaan Jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Giro Vostro	Layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan (*financial institutions*) Bank dan bukan Bank, koresponden domestik maupun internasional pada BSI.
Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank	Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek *under* LC/SKBDN yang dimiliki oleh *Nominated Bank* kepada BSI yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (*issuing Bank*) sesuai prinsip syariah. BSI dapat memberikan dana talangan kepada *Nominated Bank* berdasarkan berita akseptasi dari *Issuing Bank* ke *Nominated Bank*.
Pembiayaan Yang Diterima (PYD)	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima Bank Syariah Indonesia dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (domestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Bank Syariah Indonesia memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang merujuk pada pada *underlying* aset PYD yang disepakati.
SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan	Layanan pembiayaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Klinik Utama, Klinik Pratama, Dokter Praktik Perorangan, dan Praktik Dokter Gigi.
EMAS	
BSI Cicil Emas	Pembelian emas dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau dengan harga emas kemudian.
BSI Gadai Emas	Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
HAJI DAN UMROH	
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan Ibadah Haji dan Umrah bagi anak.

INVESTASI	
Bancassurance	Kerja sama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
BSI Deposito Valas	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
BSI Reksa Dana Syariah	Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.
Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)	Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakaf dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Deposito Rupiah	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
Referral Retail Brokerage	Merupakan layanan *referral* produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerja sama dengan perusahaan sekuritas.
SBSN Ritel	• SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan • Sukuk Negara Ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. • Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
PEMBIAYAAN	
Bilateral Financing	Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/*financing* dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.
BSI Cash Collateral	Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk deposito, giro, atau tabungan.
BSI Distributor Financing	Pembiayaan modal kerja dengan skema *value chain* adalah pembiayaan *post financing* (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan supplier khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan *bouwheer*, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.
BSI Griya Hasanah	Layanan pembiayaaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut: 1. Pembelian rumah baru/ rumah *second* /ruko/rukan/apartemen 2. Pembelian kavling siap bangun 3. Pembangunan/renovasi rumah 4. Ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*) 5. *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah
BSI Griya Mabrur	Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.
BSI Griya Simuda	Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.
BSI Griya Take Over	Layanan *take over* dari KPR Bank lain.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.
BSI KUR Kecil	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp50 juta s.d Rp500 juta.
BSI KUR Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon di atas Rp10 juta s.d Rp50 juta.
BSI KUR Super Mikro	Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon s.d Rp10 juta.

BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)	Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad murabahah/ musyarakah mutanaqishah/ ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.
BSI Mitraguna Berkah	Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.
BSI Multiguna Hasanah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk: • Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/ furniture rumah, dll. • Pembelian manfaat jasa seperti *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa *travel agent*, dll. • Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki *underlying asset*.
BSI OTO	Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.
BSI Pensiun Berkah	Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, di antaranya sebagai berikut: 1. Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN. 2. Pensiunan BUMN/BUMD. 3. Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.
BSI Umrah	Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui Bank yang telah bekerja sama dengan *travel agent* sesuai dengan prinsip syariah.
Mitraguna Online	Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.
PRIORITAS	
BSI Prioritas	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia kepada nasabah perorangan terpilih.
BSI Private	Layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari Bank Syariah Indonesia yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo akumulatif minimal sebesar Rp5 miliar.
Safe Deposite Box (SDB)	Merupakan suatu wadah harta atau surat berharga, yang ditempatkan pada suatu ruang khazanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunanya.
TABUNGAN	
BSI Tabungan Bisnis	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui teller dan net banking.
BSI Tabungan Easy Mudharabah	Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Easy Wadiah	Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.
BSI Tabungan Efek Syariah	Tabungan efek syariah dengan akad mudharabah muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di pasar modal.
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan perencanaan haji dan umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).
BSI Tabungan Junior	Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
BSI Tabungan Mahasiswa	Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota perusahaan/lembaga/assosiasi/organisasi profesi yang bekerja sama dengan Bank.
BSI Tabungan Payroll	Produk turunan dari Tab wadiah/mudharabah reguler yang dikhususkan untuk nasabah payroll dan nasabah migran.

BSI Tabungan Pendidikan	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebit dan mendapat perlindungan asuransi.
BSI Tabungan Pensiun	Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerja sama dengan bank.
BSI Tabungan Prima	Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah *high networth individuals* berakad mudharabah dan wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.
BSI Tabungan Rencana	Tabungan dengan akad mudharabah muthlaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebit dan gratis perlindungan asuransi.
BSI Tabungan Simpanan Pelajar	Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dlam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
BSI Tabungan Smart	*Basic saving account* dengan akad wadiah yad dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BSI Tabungan Valas	Tabungan dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah dalam mata uang dolar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.
BSI TabunganKu	Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BSI Tapenas Kolektif	Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.
TRANSAKSI	
BSI Giro Rupiah	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.
BSI Giro Valas	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang valas.

Perusahaan

CASH MANAGEMENT	
CMS	Layanan transaksi meliputi transfer kepada rekanan atau pihak ketiga di bank BSI maupun bank lain (online, SKN, RTGS), transfer kepada pegawai (payroll), pembayaran kewajiban pajak, pembayaran dan pembelian produk pertamina, pembayaran tagihan utiltas serta tagihan lainnya.
OPBS (SO/DO) Pertamina	BSI Pembayaran Pertamina adalah layanan pembayaran dan penerimaan atas produk Pertamina. Bersama dengan Pertamina, BSI hadir dengan layanan *host to host* untuk memudahkan mitra/pelanggan Pertamina dalam melakukan pemesanan dan atau pembayaran produk Pertamina melalui BSI Cash Management System dan Cabang BSI.
TRESURI	
Transaksi Sukuk	Melayani kebutuhan transaksi surat berharga syariah (sukuk): • Sukuk Negara • Sukuk Korporat
Deposito On Call (DOC)	Produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. Akad yang digunakan mudharabah mutlaqah.
BSI Lindung Nilai Syariah	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi penjualan/pembelian valuta asing yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Akad yang digunakan aqd' al-tahaww al-basith dan al sharf.
Transaksi Valuta Asing - Devisa Umum/Telegraphic Transfer	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tenor waktu tertentu. Transaksi today untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi *tomorrow* (Tom) untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi spot untuk penyerahan setelah dua hari kerja. Mata uang yang ditransaksikan adalah USD, SAR, EUR, SGD, JPY, AUD, HKD, CHF, CAD, CNY dan GBP.
Transaksi Valuta Asing - Uang Kertas Asing (Banknotes)	Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing (banknotes) baik untuk penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah, dengan akad al sharf.
SERVICE	
Wali Amanat	Mewakili pemegang sukuk, serta dapat bertindak selaku agen pemantau, agen jaminan, dan agen escrow terkait dengan transaksi di pasar modal syariah. • Wali Amanat Memantau kewajiban emiten sesuai perjanjian perwaliamanatan penerbitan sukuk. • Agency Memantau kewajiban para pihak terkait layanan agen pemantau, agen jaminan, agen escrow pasar modal.
Kustodian	Tata kelola sesuai prinsip syariah dengan sistem kustodian yang modern dan terpercaya. **Core Custody** • *Safekeeping* Konsep dari penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. • *Transaction Handling Service* Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. • *Corporate Action* Fungsi kustodian sebagai *corporate action* antara lain yaitu jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain *(corporate action)* serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya *(proxy).* • *Sub Registry (Government Bond)* Layanan pembukuan, pencatatan dan pengadministrasian untuk transaksi obligasi pemerintah baik perusahaan maupun individu, baik secara langsung dengan nasabah dan/atau melalui *selling agent* lain. • *Income Collection* Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak-hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. • *Portofolio Accouting* Jasa atas pembukuan atau pencatatan portofolio aset milik nasabah.

	Fund Services And Unit Link • *Fund Accounting* Pembukuan transaksi efek atau surat berharga dalam suatu portofolio dan melaporkannya ke nasabah. • *Fund Administration* Pencatatan atas kepemilikan unit penyertaan nasabah reksa dana dan atau unit link dan melaporkannya kepada investor dari pada produk tersebut. • *Safekeeping* Konsep penyimpanan efek adalah penyimpanan fisik efek, pencatatan efek dan rekonsiliasi. • *Transaction Handling Service* Penyelesaian transaksi efek yang telah terjadi pada tanggal transaksi, yang akan diselesaikan pada tanggal penyelesaian. • *Income Collection* Jasa untuk pengurusan atau penagihan hak nasabah sehubungan dengan efek dan surat berharga yang disimpan di Bank Kustodian. • *Reporting / Tax* Hasil akhir atau jasa pelaporan yang dilakukan Bank Kustodian atas aset Reksa Dana yang dikirim kepada manager investasi dan/atau *unit holder.*
Pembiayaan Investasi	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Penyelesaian Wesel Ekspor	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada Nasabah (Eksportir) dalam rangka membantu pengurusan dokumen, penagihan piutang, serta membantu pemenuhan modal kerja nasabah. Termasuk penyelesaian wesel ekspor *single bank*, *documentary*, *non documentary*, dan *open account* baik dilakukan secara *collection* (*services*) maupun negosiasi/ diskonto (*financing*).
LC Issuance/SKDBN	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Buyer Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Distributor Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi),
Supplier Financing	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia dimana pihak yang berpiutang (*supplier*) mewakilkan kepada Bank untuk melakukan penagihan piutang. Bank kemudian melakukan penagihan piutang kepada pihak yang berutang (*buyer),* atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
Bank Garansi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (wanprestasi).
PEMBIAYAAN	
Investasi Terikat Syariah Mandiri	Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad mudharabah muqayyadah.
Pembiayaan Investasi	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
Refinancing	Fasilitas pembiayaan untuk mendapatkan dana *fresh money* atas aset/objek eksisting calon nasabah untuk kebutuhan: • Akuisisi aset • *Take over* • Kebutuhan investasi lainnya
Multifinance	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa pembiayaan kepada multifinance dengan pola channeling atau executing.
Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja seasonal.

Agency, Sindikasi dan Clubdeal	Seiring berkembangnya usaha nasabah, sering kali diperlukan lebih dari satu bank dan/atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional kami di bidang sindikasi syariah, nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan/atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Indonesia yang sekaligus akan membantu nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.
Pembiayaan Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).
SIMPANAN	
Giro SBSN	Simpanan *non saving account* yang dikelola dengan akad mudharabah diperuntukkan kepada institusi yang memerlukan imbal hasil maksimal.
Deposito DHE SDA	Simpanan *saving account* yang bersumber dari dana DHE SDA milik nasabah di Bank atau bank lain.
Giro DHE SDA	Simpanan *non saving account* yang dikelola dengan akad mudharabah dan wadiah diperuntukkan kepada eksportir dalam rangka kegiatan perdagangan ekspor DHE SDA.
Giro Optima	Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil spesial berdasarkan tiering.

Digital Banking

BSI Mobile	Solusi untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi, beribadah dan berbagi melalui beragam fitur dalam satu aplikasi. BSI Mobile menemani nasabah 24 jam dan membuat segalanya menjadi lebih seimbang secara finansial, spiritual dan sosial.
Buka Rekening Online	Layanan pembukaan rekening online melalui BSI Mobile adalah solusi untuk nasabah yang ingin membuka rekening dengan mudah tanpa harus datang ke cabang.
Solusi Emas	Layanan kepemilikan emas melalui BSI Mobile dengan pembelian emas mulai dari Rp50.000. Nasabah bisa beli, jual, transfer, serta tarik fisik emas dan gadai emas online dengan mudah dan aman tanpa perlu datang ke cabang.
BSI QRIS	Layanan transaksi dengan scan kode QR Code yang menggunakan QR Code Indonesia Standard (QRIS) Bank Indonesia
BSI Cardless Withdrawal	Solusi praktis bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang tunai tanpa kartu. Melalui BSI Mobile, tarik tunai tanpa kartu bisa dilakukan di seluruh ATM Bank Syariah Indonesia, Indomaret dan Alfamart.

BSI Debit Card	BSI Kartu Debit merupakan kartu ATM dari Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ATM dan EDC di jaringan GPN dan International (Visa).
BSI Debit OTP	BSI Debit OTP merupakan layanan transaksi berbasis kartu debit yang menggunakan kode OTP sebagai PIN dalam setiap penggunaan transaksinya.
BSI ATM CRM	BSI ATM CRM (*Cash Recycle Machine*) atau ATM Setor Tarik merupakan jenis ATM untuk melayani transaksi setor tunai, tarik tunai, transfer antar bank serta transaksi pembayaran atau pembelian bagi semua Nasabah Bank Syariah Indonesia.
BSI Aisyah	Aisyah adalah Asisten Interaktif Bank Syariah Indonesia yang akan membantu memberikan informasi produk, layanan, dan promo terbaru dari Bank Syariah Indonesia.
BSI Net	Transaksi bisnis kini lebih mudah melalui layanan BSI Net kapan pun dan di mana pun. Berbagai kemudahan bertransaksi seperti melakukan transfer secara massal dan monitoring transaksi bisa anda lakukan di BSI Net.
BSI JadiBerkah.id	Jadiberkah.id adalah *platform crowdfunding* untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf. Berbagai pilihan program ziswaf dapat anda temukan di platform Jadiberkah.id.
BSI Merchant Business	EDC Bank Syariah Indonesia merupakan layanan yang disediakan Bank Syariah Indonesia kepada nasabah yang memiliki usaha untuk memberikan kemudahan transaksi pembayaran kartu ATM Debit kepada pelanggannya.
BSI API Platform	BSI API Platform adalah sebuah portal yang menyediakan layanan *open banking* untuk memudahkan proses integrasi antara layanan Bank Syariah Indonesia dengan aplikasi nasabah.
BSI Smart Agent	BSI Smart Agent merupakan Layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) BSI untuk menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dengan didukung sarana teknologi informasi.
BSI Payment Point	Layanan transaksi Payment Point di Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet Bank Syariah Indonesia atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debit rekening maupun tunai (*cash*).
Deposito Mobile	Mudahnya investasi dengan deposito di BSI Mobile, kapanpun dan dimanapun, tanpa perlu datang ke cabang.
Griya Hasanah Online Top Up Melalui BSI Mobile	Pembiayaan BSI Griya Hasanah *Online Top Up* merupakan Pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia dalam bentuk penambahan pembiayaan dari pembiayaan eksisting Bank Syariah Indonesia untuk tujuan konsumtif nasabah. Pembiayaan Griya Hasanah *Online Top Up* menggunakan akad *refinancing* syariah dengan skema al-bai' dalam rangka musyarakah mutanaqishah (MMQ).

Kartu

KARTU PEMBIAYAAN	
BSI Hasanah Card Classic	BSI Hasanah Card Classic merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Classic dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Classic Rp4 juta hingga Rp6 juta.
BSI Hasanah Card Gold	BSI Hasanah Card Gold merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Gold dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Gold Rp8 juta hingga Rp30 juta.

BSI Hasanah Card Platinum	BSI Hasanah Card Platinum merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. BSI Hasanah Card Platinum dibuat berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dan berbasis 3 (tiga) akad syariah antara lain: • Kafalah • Qardh • Ijarah Limit BSI Hasanah Card Platinum Rp40 juta hingga Rp 900 juta.
KARTU DEBIT	
BSI Debit GPN	BSI Debit GPN, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
BSI Debit OTP	Kartu ATM debit dimana sistem PIN menggunakan One Time Password (OTP) yang diregister melalui mobile banking.
BSI Debit Visa	BSI Debit Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Visa Worldwide yang dapat dipergunakan oleh nasabah di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh dunia (Internasional).
Kartu BSI Debit Sabi	BSI Debit SaBi, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik tabungan anak yang terafiliasi dengan orang tua. Kartu BSI Debit SaBi mendukung edukasi literasi keuangan bagi anak dengan limitasi khusus untuk menjaga keamanan anak dalam bertransaksi.
Kartu Debit BSI SimPel	BSI Debit SimPel, merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan fasilitas bagi pemilik Tabungan Sim panan Pelajar. Kartu BSI Debit SimPel memiliki limit khusus agar para pelajar dapat bertransaksi dengan aman dan mudah. Kartu dapat dipergunakan oleh pelajar di seluruh jaringan mesin EDC dan ATM manapun di seluruh Indonesia (nasional).
Kartu Haji BSI Visa	Kartu Haji BSI Visa merupakan produk kartu debit/ATM yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia yang diperuntukkan khusus bagi nasabah Tabungan Haji Indonesia untuk memberikan kemudahan bertransaksi saat nasabah melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Jaringan Bisnis dan Wilayah Operasi

Jaringan bisnis dan wilayah operasi BSI didukung oleh kantor wilayah hingga kantor fungsional operasi, yang rinciannya dijelaskan di bawah ini.

No.	Jenis Kantor	Jumlah
1	Kantor Wilayah	10
2	Kantor Cabang (KC)	153
3	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	959
4	KCP Mobile (dhi: MKK)	60
5	Kantor Fungsional (KF)	96
6	Kantor Kas (KK)	0
7	Payment Point (PP)	0
8	Konter Layanan Priority	16
9	Konter Layanan Gadai	734
10	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	2.548

Keterangan:
- PP tahun 2022 Reformat menjadi KFO (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)
- KK tahun 2022 Reformat menjadi KCP (cfm. POJK No.16 Tahun 2022)

Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Barat
Bengkulu
Sumatera Selatan
Lampung
Banten
Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan

Kehadiran 1.112 Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu BSI di banyak provinsi sejalan dengan visi BSI untuk memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

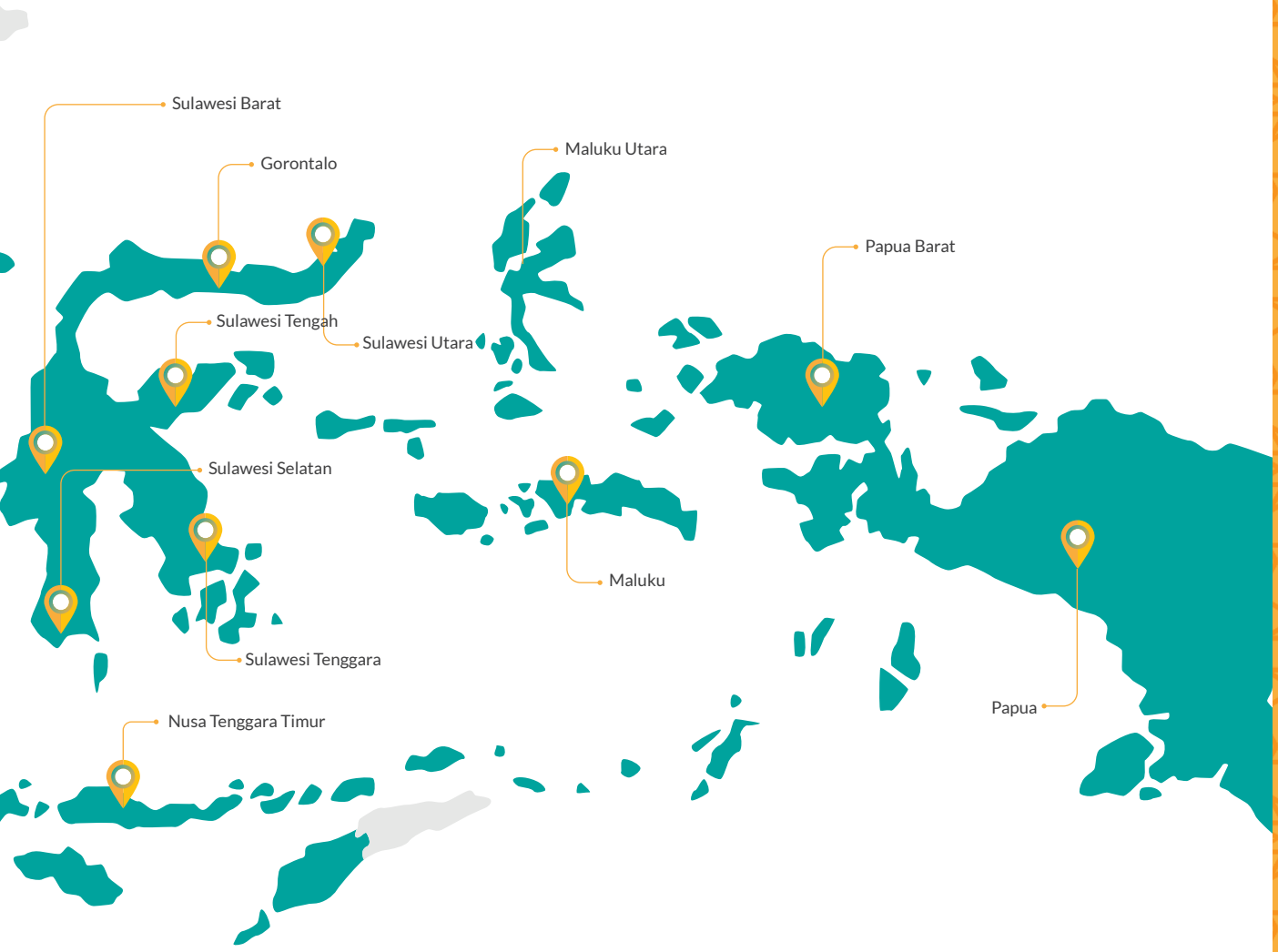

Kantor Cabang

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, BSI memiliki 153 kantor cabang dengan sebaran sebagai berikut.

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp	Faks
1	KC Banda Aceh Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 6	(0655) 7551109, 7551558	(0651) 33945
2	KC Banda Aceh Ahmad Dahlan	Jl. Ahmad Dahlan No. 111	0651 - 32313, 32314, 32301	0651 - 32317
3	KC Banda Aceh T. Panglima Nyak Makam	Jl. T. Panglima Nyak Makam No. 100 A - 100 D	(0651) 22900 (hunting), 7410714, 32929, 33869, 23577, 32587	31190
4	KC Sigli 2	Jalan Merdeka No.6	(0653) 22450	21306
5	KC Sigli 1	Jl. Prof. A Majid Ibrahim No. 6	-	-
6	KC Lhokseumawe 1	Jl. Muhammad Malikul Zahir No.135C	(0645) 631146, 631147, 631148	(0645) 41555
7	KC Bireuen Simpang IV	JL. Medan - Banda Aceh, Simpang IV	(0644) 21126, 22044	22040
8	KC Kuala Simpang	Jl. Tengku Panglima Polem No. 23 - 24	(0641) 333366	333367
9	KC Langsa Darussalam	Jl. Darussalam No.1	(0641) 21033	21170
10	KC Lhokseumawe Merdeka 3	Jl. Merdeka No.1	(0645) 41906	21306
11	KC Takengon	Jl. Yos Sudarso No.164, Takengon	(0643) 21294	21119
12	KC Meulaboh Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol	(0655) 7551961	7551010
13	KC Simeulue	Pertokoan Suak Tungkul Kavling 1 No. 5/6, Jl. Tgk. Diujung Sinabang	(0650) 21547	(0650) 21556
14	KC Blangpidie	Jl. Persada No. 99A	(0659) 91008, 91127	91070
15	KC Kutacane	Jl. Iskandar Muda No.14	(0629) 21031	21170
16	KC Tapaktuan	Jl. Nyak Adam Kamil No. 42	(0656) 21456	21088
17	KC Batam Windsor Central	Komplek Windsor Central Blok A No. 3-4, Jl. Pembangunan	(0778) 431331	(0778) 432727
18	KC Tanjung Pinang	Jl. Basuki Rahmat No. 1-3	(0771) 313788	(0771) 313995
19	KC Medan A Yani	Jl. Jenderal Achmad Yani No. 100	(061) 4153866, 4151466	(061) 4511867
20	KC Lubuk Pakam	Jl. Dr. Sutomo No.12A-12B	(061) 7952555	(061) 7950419
21	KC Medan S Parman	Jl. S. Parman No. 250 E/8	(061) 455 6870/451 5683	451 5671
22	KC Medan Gajah Mada	Jl. Gajah Mada No. 7	(061) 4550755	(061) 4550766, 4537627
23	KC Binjai	Jl. Sukarno Hatta No. 22-23	(061) 8826396	(061) 8826138
24	KC Pekanbaru Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 450	(0761) 849191, 849192, 849193, 849194	(0761) 849190, 31668
25	KC Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No. 162	(0765) 33555	(0765) 32379
26	KC Pekanbaru Harapan Raya	Jl. Haji Imam Munandar No. 8	(0761) 862222	(0761) 849799
27	KC Duri	Jl. Hangtuah	(0765) 598990	(0765) 598993
28	KC Pematangsiantar Perintis	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1	(0622) 435858, 435857, 435861	(0622) 435848
29	KC Rantau Prapat	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 4	(0624) 24880, 24205, 25186	(0624) 24653
30	KC Padangsidempuan	Jl. Sudirman No. 130 A	(0634) 28200	(0634) 28103

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp	Faks
31	KC Sibolga	Jl. Sutoyo Siswomiharjo No. 22	(0631) 24555	(0631) 26722
32	KC Bandar Lampung Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 189	(0721) 258952, 258960	(0721) 263588
33	KC Bandar Jaya	Komp. Pertokoan Central Niaga Bandar Jaya No. 1-3, Jl. Proklamator Raya	(0725) 529825, 529826	(0725) 529831
34	KC Metro A Yani	Jalan Ahmad Yani No. 9	(0725) 7851606	(0725) 7851605
35	KC Baturaja Rahman Hamidi	Jl. Let. R Hamidi No. 30 A-B RT 03 RW 01	0735 324888/0735 323333/0735 325522/0735 325554	0735-324888
36	KC Bengkulu S Parman 1	Jl. S. Parman No. 15	(0736) 342007	(0736) 346707
37	KC Bengkulu S Parman 2	Jl. S. Parman, No. 51 A & B	(0736) 276 88 / 209 38	264 48
38	KC Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso RT 03 No. 89	0733-7329623 / 14 / 16 / 082881131705 / 082881131704	-
39	KC Jambi Gatot Subroto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 127 A-B	(0741) 27730, 27726	(0741) 27733
40	KC Jambi Pattimura	Jl. Kapt. Pattimura No. 29-30 RT 21	0741 - 7552571, 7552572, 7552573	0741 - 7552574
41	KC Padang Imam Bonjol	Jl. Imam Bonjol No.17	(0751) 21113, 20765	(0751) 24768
42	KC Bukittinggi Sudirman 1	Jl. Jenderal Sudirman No. 73	(0752) 627633	(0752) 627637
43	KC Padang Belakang Olo	Jl. Belakang Olo No. 45	0751 - 841818, 841819	0751 - 841808
44	KC Palembang Demang	Jl. Demang Lebar Daun No. 2311	(0711) 421919	(0711) 419952
45	KC Pangkal Pinang	Jl. Masjid Jamik No. 123	(0717) 432229	(0717) 431445
46	KC Prabumulih Sudirman 1	JL. Jend. Sudirman No. 7-8 RT 01/10	(0713) 322888	(0713) 322565
47	KC Palembang Sudirman	Jl. Jendral Sudirman KM 3,5	0711 - 315999, 310751	0711 - 310752
48	KC Bekasi Summarecon	Komplek Ruko Summarecon Bekasi, Rukan Sapphire Commercial Blok SF 11 12, Jl. Bulevar Selatan	(021) 8853990, 8856368, 8840355, 8853991, 88855418	(021) 8856406
49	KC Bekasi Cikarang	Ruko Cikarang Central City, Blok G No. 1-2	(021) 89902076, 89902077	(021) 89906765
50	KC Karawang	Jl. Panatayuda I No 68	0267 - 8490449 (hunting), 0828-17096715 / 16 / 17 / 18 / 29 / 30 / 31 / 32	0267 401505
51	KC Jakarta Kebon Jeruk 1	Jl. Panjang Arteri Kelapa Dua No. 54 D (Jl. Raya Kelapa Dua No. 1) RT. 004 RW. 003	(021) 53662464, 53662465, 53662467	(021) 53662471, 53662472
52	KC Tangerang Ciledug	Jl. HOS Cokroaminoto No. 69	(021) 73458147, 73458148, 73458149	(021) 73458150
53	KC Jakarta Kelapa Gading 1	Komplek Graha Bulevar Blok KGC No. A-02 dan A-03, Jl. Boulevard Kelapa Gading	(021) 29375262, 29375261	(021) 29375197, 29375198
54	KC Jakarta Tanjung Priok 1	Jl. Enggano No. 42B - 42	(021) 43906060, 43906055	(021) 43906058, 43906059
55	KC Jakarta Pemuda	Komplek Graha Mas Pemuda, Blok AB1 dan AB2 Jl. Pemuda, Rawamangun	021 - 47882680 / 81 / 82 / 83	021 - 47882684 / 85
56	KC Jakarta Pondok Kelapa	Ruko Komplek Billy & Moon Blok E No. 5A-5B, Jl. Raya Kalimalang	(021) 86903501	(021) 86903502

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp	Faks
57	KC Jakarta Jatinegara	Perkantoran Mitra Matraman Blok A1 No. 8-9, Jl. Matraman Raya No. 148	(021) 85904866	(021) 85905634
58	KC Jakarta Thamrin	Jl. M. H. Thamrin No. 5	(021) 2300509, 39839000	(021) 39832939
59	KC Jakarta Bendungan Hilir	Jl. Bendungan Hilir Raya No. 84 A - B	021 - 57851054 - 56	021 - 57851038
60	KC Jakarta The Tower	Jl. Gatot Subroto No. 27	-	-
61	KC Tangerang Hasyim Ashari	Jl. KH. Hasyim Ashari 8 A-C	(021) 55781230, 55781231, 55781232	(021) 55781233
62	KC Cilegon Tirtayasa 1	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 115 A	(0254) 399444, 375648	(0254) 375645
63	KC Serang	Jl. Ahmad Yani No. 175 C-D	(0254) 222984, 210191	(0254) 222985
64	KC Bogor Pajajaran Sukasari	Jl. Pajajaran No. 8	(0251) 8350562, 8350563, 8350564	(0251) 8350565
65	KC Bogor Cibinong	Ruko Graha Cibinong Blok D No. 2, Jl. Raya Bogor KM 43	(021) 87915703, 87915704	(021) 87919008
66	KC Bogor Pajajaran Bantarjati	Jl. Pajajaran Raya No. 63	0251 - 8337306, 8337620, 8337828	0251 - 8384968
67	KC Depok Margonda 2	Jl. Margonda Raya No. 209	021 - 77210117 (hunting)	021 - 77210027
68	KC Depok Margonda 1	Ruko Depok Mas Blok A1-2, Jl. Margonda Raya No. 42	(021) 7765231, 7765251, 7765289, 77213804	(021) 77202905, 77203598
69	KC Jakarta Cibubur Citra Gran	Ruko Citra Gran Blok R-2 No. 8-9	(021) 84300107, 84300108, 8449778	(021) 84590918
70	KC Jakarta Fatmawati 2	Jl. RS Fatmawati No. 12	021-7696807/7696808/ 75902925/ 75902930/ 75902934	021 -75902899/75902983
71	KC Jakarta Hasanudin	Jl. S. Hasanudin No. 57	(021) 2701515, 2701505	(021) 7220362
72	KC Jakarta Mayestik	Jl. Kyai Maja Blok D/1 Persil No. 6-6A	(021) 7202451, 7202728, 7202509, 7394952	(021) 7220822
73	KC Jakarta Pondok Indah	Komp. Ruko Pondok Indah Kav. II No.11 Blok UA, Jl.Taman Duta I Sektor II	(021) 7662029, 7662030	(021) 7662028, 7665391
74	KC Tangerang Ciputat	Jl. Ir. H. Juanda No. 111, RT 006/001	(021) 7425267	(021) 7423018
75	KC Jakarta Saharjo	Jalan Saharjo No.204A RT. 04/05	(021) 8308768, 8292824, 8357309	(021) 8308769, 8357310
76	KC Jakarta Kalibata	Jl. Raya Pasar Minggu No. 75	(021) 7940323, 7940341, 7940353	(021) 7940420
77	KC Tangerang Bintaro	Bintaro Trade Center, Jl. Jend. Sudirman Blok A1 No. 7 - 8, Bintaro Sektor 7	(021) 7450120, 7453301, 7450296, 7450297	(021) 7450116
78	KC Tangerang BSD ITC	Jl. Pahlawan Seribu ITC BSD No. 21-23A	021 - 53153155, 53153144-46	021 - 53161611
79	KC Bandung Juanda	Jl. Ir. H. Juanda No. 24	(022) 84469443	(022) 4200011
80	KC Garut	Jl. Ciledug No. 148-149	(0262) 243689, 243692	(0262) 233137
81	KC Bandung Asia Afrika	Jalan Asia Afrika No. 174 RT 009 RW 004	022 - 7314546, 7323142, 7323143	022 - 7323141
82	KC Bandung Suniaraja	Jl. Suniaraja No.82	(022) 423 2584, 423 1185, 423 6614, 423 2585, 423 2586, 423 2587 423 86 / 423 89	-

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp	Faks
83	KC Sukabumi A Yani	Jl. A.Yani No. 29	0266 - 6247300	0266 - 6247400
84	KC Bandung Ahmad Yani	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 252	(022) 7202688, 7231090, 082819030694	(022) 7271334
85	KC Purwakarta Re Martadinata	Jl. R.E Martadinata No. 5, RT 25 RW 05	(0264) 231760	(0264) 231761
86	KC Cimahi	Jl. Jend. Amir Machmud No. 118	(022) 6632228	(022) 6632212
87	KC Cianjur Siliwangi	Jl. Siliwangi No. 6	(0263) 284648	(0263) 284677
88	KC Cirebon Dr Cipto	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 79	(0231) 202760, 202092, 202093, 200423	(0231) 202067
89	KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 74-78	(0265) 312995, 312999	(0265) 311199
90	KC Purwokerto Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 433	(0281) 641108, 641685	(0281) 625955
91	KC Cilacap A Yani	Jl. A. Yani No. 97	(0282) 531015, 531038	(0282) 535870
92	KC Semarang A Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No.152	024 - 8313247, 8315027	024 - 8313217
93	KC Semarang Pandanaran	Jl. Pandanaran No. 90	(024) 3568891, 3568894	(024) 3568890
94	KC Kudus A Yani 1	Ruko Ahmad Yani No. 9, Jl. Ahmad Yani	(0291) 439272	(0291) 439274
95	KC Pati Sudirman	Jl. P. Sudirman No. 207, Plaza Pati Blok A1-A2	(0295) 386699	(0295) 387799
96	KC Salatiga	Jl. Diponegoro Ruko Salatiga Square No. 77-A6 dan 77-A7	(0298) 328558, 328885	(0298) 314407
97	KC Tegal Kh Mansyur	Jl. KH. Mansyur No.4	(0283) 325300, 325301	(0283) 351460
98	KC Kendal Soetta	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 325	(0294) 388173, 388175	(0294) 388172
99	KC Pekalongan Pemuda	Masjid Syuhada, Jl.Pemuda No.52-54	0285 - 434918, 434919	0285 - 434920
100	KC Solo Slamet Riyadi 1	Jl. Slamet Riyadi No. 388	(0271) 710820	(0271) 742085, 742086
101	KC Solo Slamet Riyadi 2	Jl. Slamet Riyadi No. 318	0271 - 742555, 725222	0271 - 736718
102	KC Yogyakarta Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 42	(0274) 555022	(0274) 555021
103	KC Mataram Hasanudin	Jl. Hasanudin No. 40	(0370) 644888, 622300, 622700	(0370) 634999
104	KC Kupang	Jl. Mohammad Hatta No.56	(0380) 834100, 823466, 828617	(0380) 826150
105	KC Bima Soetta 2	Jl. Soekarno Hatta No. 329 RT.01 RW.01	(0374) 444 03/ 444 04	444 86
106	KC Denpasar	Jl. Raya Puputan No.114	(0361) 432595	(0361) 434045
107	KC Jember Sudirman	Jl. P. B. Sudirman No. 41-43	(0331) 411522	(0331) 411525
108	KC Banyuwangi Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rakhmat No. 30	(0333) 418624, 418625, 418626, 418627	(0333) 418628
109	KC Kediri Hassanudin	Ruko Hassanuddin Bussines Center Jl. Hasanuddin No. 21	(0354) 672 114-5	672 685
110	KC Madiun Agus Salim	JL. Agus Salim No. 120	(0351) 454000	(0351) 458300
111	KC Blitar	Jl. Cokroaminoto No. 10 RT.01 RW. 02	(0342) 816999	(0342) 816777
112	KC Malang Suprapto	Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 48	0341 - 359129, 359130	0341 - 359128
113	KC Pasuruan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No.77	(0343) 418 955	418 956
114	KC Surabaya Darmo	Jl. Raya Darmo No. 17	(031) 5674848, 5679842, 5677062	(031) 5679841

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp	Faks
115	KC Sidoarjo Jenggolo	Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jl. Jenggolo No. 9	(031) 8946449, 8947231, 8921033, 8922129	(031) 8957429
116	KC Surabaya Basuki Rahmat	Jl. Basuki Rachmat No. 17-19	031-99254882, 031-99254883, 031-99254885, 031-99254887	031 - 7385678
117	KC Surabaya Dharmawangsa	Jl. Dharmawangsa No. 115 A	031 - 5045082, 5045085, 5030222	031 - 5037222
118	KC Pamekasan	Jl. KH. Agus Salim No. 3A	(0324) 331223, 331224, 331225	(0324) 331218
119	KC Gresik Kartini	JL. RA. Kartini No. 180	(031) 3972053	(031) 3972065, 3979791
120	KC Bojonegoro	Jl. Panglima Sudirman No. 99A	(0353) 892124, 892125	(0353) 892123
121	KC Surabaya Jemur Handayani	Jl. Jemur Handayani No. 3	(031) 8411230, 8411250	(031) 8411260
122	KC Jombang	Ruko Cempaka Mas Blok A/9, Jl. Soekarno-Hatta No. 1	(0321) 855527, 855528	(0321) 855526
123	KC Balikpapan Sudirman 1	Jl. Jend. Sudirman No. 330	(0542) 413382, 414630	(0542) 412109
124	KC Samarinda Antasari	Jl. Antasari No. 33 RT 02	(0541) 7271271, 7271272, 7271273, 7271274	(0541) 7271276, 7271277, 7271278
125	KC Kutai Kartanegara	Jl. KH. Akhmad Muksin RT. 01	(0541) 665362, 665365	(0541) 665017
126	KC Bontang	Jl. MT. Haryono No. 53	(0548) 20007	(0548) 25005
127	KC Tarakan	Jl. Yos Sudarso No. 64	(0551) 35050	(0551) 35051
128	KC Banjarmasin Lambung Mangkurat	Jl. Lambung Mangkurat No. 16	(0511) 3366408, 3366409	(0511) 3366426
129	KC Martapura	Jl. A. Yani No. 20 Km. 37,4	(0511) 4722713, 4722755	(0511) 4722714
130	KC Pangkalan Bun	Jl. Sukma Arianingrat No. 14	(0532) 25624, 25625	(0532) 25636
131	KC Tanjung	Jl. Ir. Pangeran Haji Muhammad Noor No. 12	(0526) 2024484	(0526) 2024494
132	KC Sampit	Jl. M. T. Haryono No. 6	(0531) 24222	(0531) 24400
133	KC Palangkaraya Diponegoro	Jl. Diponegoro No.10	0536 - 3224862, 3224863, 3224864	0536 - 3224870
134	KC Banjarbaru	Jl. A.Yani Km 35,5	0511 - 4774939, 0511 - 6749031	0511 - 4774939
135	KC Pontianak Abdurrachman	Jl. Sultan Abdurrachman No. 23	(0561) 745004	(0561) 744774
136	KC Ketapang	Jl. R. Soeprapto No. 88	(0534) 34600	(0534) 34395
137	KC Sambas	Jl. Gusti Hamzah No. 41	(0562) 391900	(0562) 392200
138	KC Singkawang	Jl. Alianyang No. 16 C-D	(0562) 639866	(0562) 639865
139	KC Makassar 1	Jl. Dr. Ratulangi No.79	(0411) 833070	(0411) 833069
140	KC Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No. 44	(0426) 22651, 2703380	(0426) 21922
141	KC Bone	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 48	(0481) 28774	(0481) 28775

No.	Kantor Cabang	Alamat	No. Tlp	Faks
142	KC Makassar 2	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140	0411 - 8914670, 8914610, 8914130	0411 - 8914275
143	KC Palopo	Jl. Andi Jemma No.150	(0471) 327432, (0471) 327225, (0471) 327360	-
144	KC Parepare	JL. Lahalede No.15	(0421) 22456, 26534, 24624	-
145	KC Jayapura	Komplek Perniagaan Kelapa Dua - Entrop Jl. Raya Kelapa Dua No. 1-2	(0967) 550965, 550966	(0967) 550968
146	KC Ternate Jatiland	Ruko Jatiland Business Center No. 19-20	(0921) 3127220	(0921) 3127336
147	KC Sorong	Jl. Ahmad Yani No. 21	(0951) 323366	(0951) 323360
148	KC Ambon	Jl. Pala No. 2	(0911) 344572, 344337	(0911) 344582
149	KC Manado Mantos	Jl. Tendean (Boulevard) Ruko Mantos No.11-12	(0431) 876 166	888 1502
150	KC Palu Gajah Mada	Jl. Wolter Monginsidi No. 77	(0451) 426222	(0451) 452108
151	KC Gorontalo	Jl. Ahmad Yani No. 127	(0435) 828666	(0435) 830056
152	KC Luwuk	Jl. Urip Sumoharjo No. 18C dan 18D	(0461) 21214, 22779, 08118671544	(0461) 325456
153	KC Kendari A Silondae 1	Jl. Abdullah Silondae No. 137	(0401) 3128822, 3128245, 3128897	(0401) 3127478

Struktur Organisasi

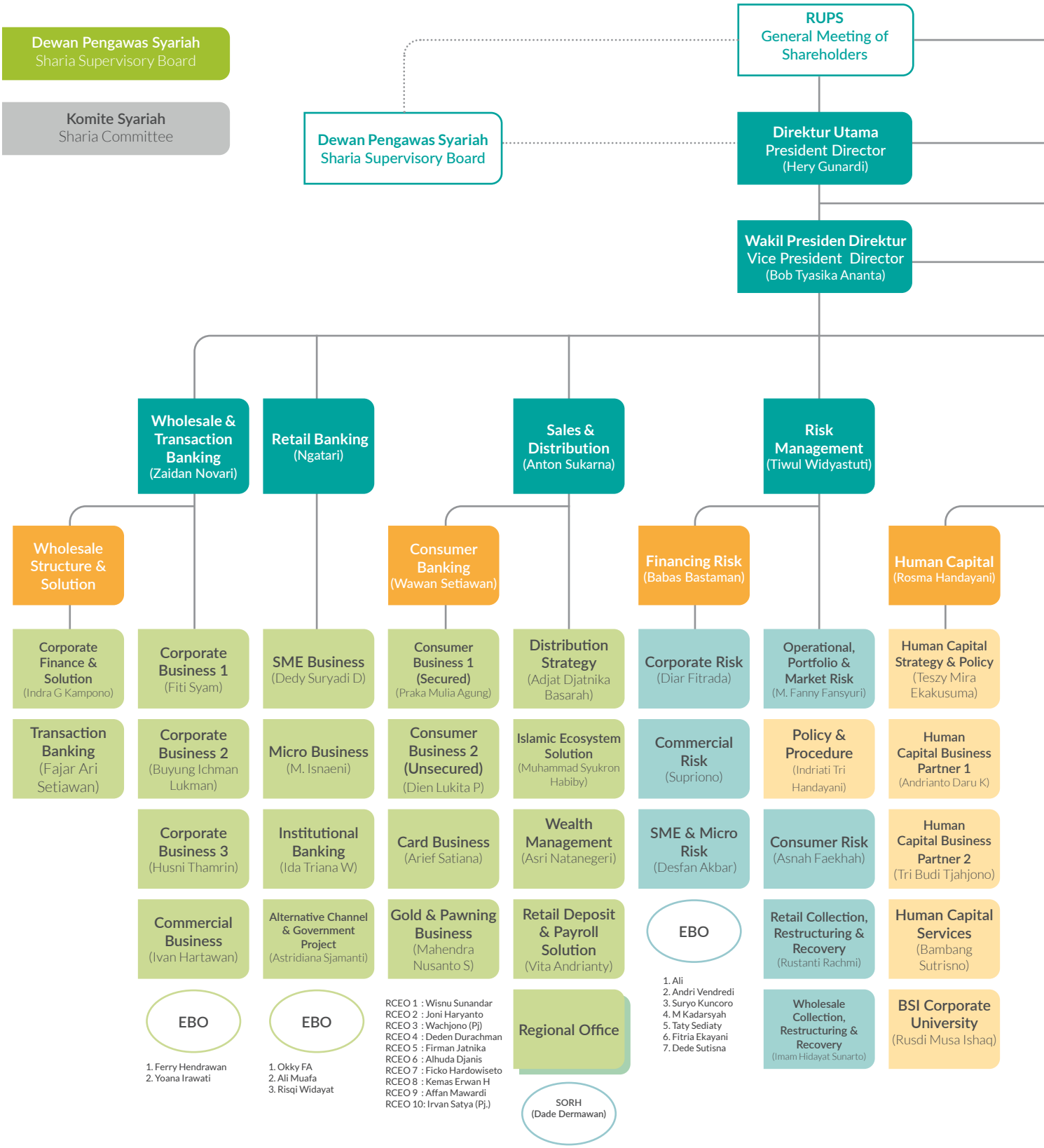

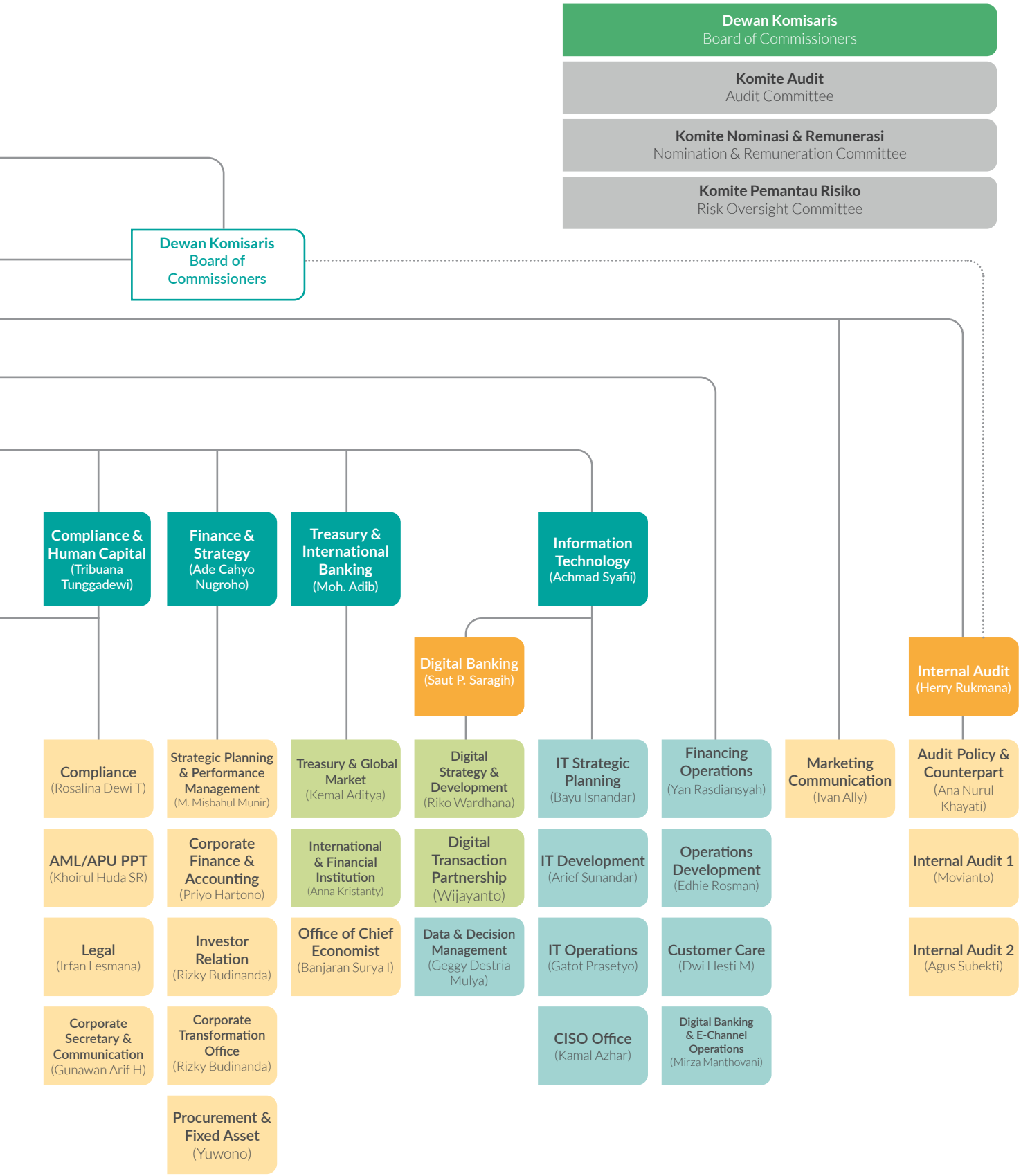

Catatan:

Direksi | SEVP | N2 Business | N2 Support | N2 Enabler

Daftar Keanggotaan Asosiasi

No.	Asosiasi	Posisi
1	Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas)	Anggota
2	Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)	Anggota
3	Pekumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)	Anggota
4	Islamic Financial Services Board (IFSB)	Anggota
5	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Anggota
6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Wakil Bendahara
7	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
8	Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia (ABAPERDI)	Anggota
9	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota
10	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	Anggota
11	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Anggota
12	Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)	Anggota

Profil
Dewan Komisaris

Adiwarman Azwar Karim

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Pusat
Usia : 59 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen melalui RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 31 Januari 2022
Riwayat Pendidikan	• Master of Arts in Economics and Economics Policy, Boston University, United State of America (1992) • Master of Business Administration in General Management, European University, Belgium (1990) • Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1989) • Insinyur Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1986)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Dewan Penasihat Muslim Excellent Centre Unilever Indonesia (2020-2022) • Ketua Dewan Pengawas SyariahPT Manulife Aset Manajemen Indonesia (2020 – 2022) • Founder KARIM Consulting Indonesia (2013 - 2022) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multi Infrastruktur (2018 – 2020) • Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna (2012 – 2020) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Prudential Life Assurance (2007 – 2012) • Anggota Dewan Pengawas Syariah BNP Paribas Investment Partners (2007 – 2012) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Great Eastern Lifes (2002 – 2012) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Danamon Syariah (2002 – 2010) • Anggota Dewan Pengawas Syariah HSBC Amanah Syariah Indonesia (2003 – 2008)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Masduki Baidlowi

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 64 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Taruna Surabaya (2004) • Sarjana Muda Sastra Arab IAIN Sunan Ampel Surabaya (1983)
Rangkap Jabatan	• Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi • Ketua Harian MUI Bidang Pusat • Ketua Yayasan MMD Initiative (*Justice* & *Democracy*)
Pengalaman Kerja	• Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden) (2019-sekarang) • Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Anggota DPR RI anggota Komisi IV Bidang Pertanian dan Kelautan (2007-2009) • Anggota Komisi I Bidang politik Luar Negeri (2007-2007) • Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan (2004-2007)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Imam Budi Sarjito

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang
Usia : 63 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doctor Economy Claremont Graduate School USA (1995) • Master Economy University of Illinois USA (1990) • Sarjana Ekonomi Universitas Dipenogero (1982)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Komisaris PT Bank BNI Syariah (2018-2021) • Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018) • Komisaris PT Bank BNI Syariah (2012-2015) • Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015) • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2005-2011)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

Sutanto

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Pusat
Usia : 59 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	Sarjana Administrasi Niaga Universitas Diponegoro (1989)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Komisaris PT Bank BRIsyariah Tbk (2019-2021) • Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019) • Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018) • Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016) • Wakil Inspektur Bidang Audit KP, KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2011-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

Suyanto

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Timur
Usia : 60 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doctor Ekonomi-Manajemen Strategi Universitas Trisakti (2020) • Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta Universitas Pertahanan (2011) • Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Balikpapan (1994)
Rangkap Jabatan	Staf Khusus Kepala BIN
Pengalaman Kerja	• Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelijen Negara (2020-sekarang) • Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Agen Madya pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara (2019-2020) • Staf Ahli Kepala BIN bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup (2019) • Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara (2018)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

M. Arief Rosyid Hasan

Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Pusat
Usia : 36 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Magister Kesehatan Universitas Indonesia (2014) • Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin (2010)
Rangkap Jabatan	• Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah • Ketua Komite Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah • Wakil Sekretaris Jenderal BPP HIPMI
Pengalaman Kerja	• Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri (2021) • Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 (2020) • Kelompok Kerja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI (2019) • Komisaris Merial Health (2018) • Chairman/Co-founder MilenialFest (2020)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Komaruddin Hidayat

Komisaris Independen

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan
Usia : 69 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Filsafat Middle East Technical University, Ankara, Turki (1990) • Magister Filsafat Middle East Technical University, Ankara, Turki (1986) • Sarjana Ushuluddin IAIN Jakarta(1981)
Rangkap Jabatan	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia
Pengalaman Kerja	• Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (2019-sekarang) • Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah (2019-2020) • Pengawas Yayasan Pendidikan Madania (2018-sekarang) • Anggota Timsel dan Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI (2017-2020) • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta (2015-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Mohamad Nasir

Komisaris Independen

Warga Negara	: Indonesia
Domisili	: Semarang
Usia	: 62 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris Independen melalui RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022 dan efektif menjabat pada 6 Januari 2023.
Riwayat Pendidikan	• Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting University of Science Malaysia (1998-2004) • Magister Sains (M.Si) in Accounting Universitas Gadjah Mada (1992-1994) • Sarjana Accounting (Drs) Universitas Diponegoro (1982-1988)
Rangkap Jabatan	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Pengalaman Kerja	• Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi (2019-sekarang) • Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022) • Menteri Kemenristekdikti (2014-2019) • Rektor Universitas Diponegoro (2014) • Dekan Universitas Diponegoto (2010-2014)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama baik langsung maupun tidak langsung.

Nizar Ali*

Komisaris

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 58 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Komisaris melalui RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Studi Islam (Ilmu Hadis) UIN Sunan Kalijaga (1995-2007) • Magister Pemikiran Pendidikan Islam IAIN Sunan Kalijaga (1992-1995) • Sarjanan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga (1984-1989)
Rangkap Jabatan	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
Pengalaman Kerja	• Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (2020-sekarang) • Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI (2017-2020) • Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (2020) • Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (2017) • Penguji Ujian Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta (2016-2017)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama baik langsung maupun tidak langsung. Namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

* Efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Profil
Dewan Pengawas Syariah

Hasanudin

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang
Usia : 61 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021.
Riwayat Pendidikan/ Sertifikasi	• Doktor Syariah UIN Syarif Hidayatullah (2008) • Magister Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1997) • Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah (1989)
Rangkap Jabatan	• Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) • Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Pengalaman Kerja	• Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2020- sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management (2015-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services (2014-sekarang) • Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia (2012-2016) • Ketua dan Anggota DPS PT Bank BNI Syariah (2010-2021) • Anggota DPS UUS Bank Danamon (2002- sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Mohamad Hidayat

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Timur
Usia : 55 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah melalui RUPS LB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 01 Februari 2021. Selanjutnya, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021.
Riwayat Pendidikan/ Sertifikasi	• Doktor Islamic Economics and Finance Universitas Trisakti (2014) • Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum: Institute of Business Law and Legal Management (2004) • Magister Bussiness Administration IPWI Jakarta (1999) • Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992)
Rangkap Jabatan	• Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Pengalaman Kerja	• Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (2020- sekarang) • Ketua Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia (2020-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2019-2021) • Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah BRI Life Syariah (2017-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (2018-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Oni Sahroni

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 47 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan/ Sertifikasi	• Doktor bidang Fiqh Muqaran Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2009) • Magister bidang Fiqh Muqaran Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2005) • Sarjana bidang Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir (2000)
Rangkap Jabatan	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners
Pengalaman Kerja	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Maybank Islamic Berhard Syariah (2018-2020) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2017-2020) • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners (2016-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (2012-2020)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Didin Hafidhuddin

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bogor
Usia : 70 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah melalui RUPS Luar Biasa tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan/ Sertifikasi	• Doktor Ilmu Agama/Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah (2001) • Diploma Bidang Bahasa Arab Universitas Madinah Saudi Arabia (1994) • Magister Penyuluhan Pembangunan Institut Pertanian Bogor (1987) • Sarjana Syariah IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1978)
Rangkap Jabatan	• Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah Bogor • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
Pengalaman Kerja	• Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah (2014-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2010-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2020-sekarang) • Direktur Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor (September 2009-sekarang) • Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah Bogor (1992-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Profil Direksi

Hery Gunardi

Direktur Utama

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 60 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021
Riwayat Pendidikan	• Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran (2021) • Master Finance and Accounting, University of Oregon USA (1991) • Sarjana Administrasi Niaga, Universitas 17 Agustus (1987)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN (2020-2021) • Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020) • Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020) • Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019) • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2019) • Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2018) • Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015) • Presiden Komisaris PT AXA Mandiri Financial Services (2013-2015) • Direktur Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Bob Tyasika Ananta

Wakil Direktur Utama

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 59 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Wakil Direktur Utama melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 22 September 2022
Riwayat Pendidikan	• Magister Business Administration, University of Oregon USA, Finance (1989) • Sarjana Akuntansi, Universitas Gadjah Mada (1986)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Direktur Human Capital & Kepatuhan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2022) • Direktur Treasuri & Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020) • Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019) • Direktur Perencanaan & Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018) • Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Ngatari

Direktur Retail Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 57 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Wakil Direktur Utama 1 melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021. Menerima pengalihan tugas menjadi Direktur Retail Banking melalui RUPST tanggal tanggal 27 Mei 2022.
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/Pengolahan Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya (1990)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Wakil Direktur Utama I PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-2022) • Direktur Utama PT Bank BRIsyariah Tbk (2019-2021) • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung (2018-2019) • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1 (2017-2018) • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar (2016-2017)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Moh. Adib

Direktur Treasury & International Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan
Usia : 57 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 22 September 2022
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Agrobisnis, Universitas Padjajaran (2000) • Sarjana Ilmu Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1989)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Direktur Keuangan, IT dan Operasional PT BRI Danareksa Sekuritas (2021-2022) • SEVP Retail Capital Market, PT BRI Danareksa Sekuritas (2019-2021) • Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019) • Wakil Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2018) • Kepala Bagian Credit Line Management Divisi Bisnis Internasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Zaidan Novari

Direktur Wholesale Transaction Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan
Usia : 55 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur melalui RUPST tanggal 27 Mei 2022 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 31 Januari 2023.
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Keuangan, Universitas Gadjah Mada (1999) • Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Universitas Sriwijaya (1991)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Group Head Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2022) • Pj. Group Head Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017-2018) • Dept. Head Sector Automotive & Heavy Equipment, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017) • Regional Wholesale Head III/Jakarta 1, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017) • Pj. Regional Wholesale Head III/Jakarta 1, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Anton Sukarna

Direktur Sales & Distribution

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 52 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Sales & Distribution melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ilmu Produksi Ternak, Institut Pertanian Bogor (1994)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Direktur Sales & Distribution, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • SEVP Distribution & Service, PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020) • Regional Head-Region III/Jakarta, PT Bank Syariah Mandiri (2018-2019) • Regional Head-Region VII/Indonesia Timur, PT Bank Syariah Mandiri (2016-2018) • Group Head Commercial Banking Group, PT Bank Syariah Mandiri (2015-2016)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Achmad Syafii

Direktur Information Technology

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang
Usia : 55 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Information Technology melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Informatika, STMIK Budi Luhur (2013) • Sarjana Teknik Informatika & Komputer, STMIK Budi Luhur (2009)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Direktur IT, Operation & Digital Banking, PT Bank Syariah Mandiri (2020-2021) • Direktur IT & Operation, PT Bank Syariah Mandiri (2017-2020) • Group Head IT Application Support, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2017) • Vice President, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • Departement Head Integration HUB & Commond Application Service, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Tiwul Widyastuti

Direktur Risk Management

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bekasi
Usia : 56 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Risk Management melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen International, STIM Prasetya Mulya (2001) • Sarjana Pertanian, Institut Pertanian Stiper (1989)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Direktur Risk Management, PT Bank Syariah Mandiri (2020–2021) • Group Head Commercial Risk 2 Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2020) • Komisaris, PT Usaha Gedung Mandiri (2017-2020) • Group Head Corporate Risk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2018) • Executive Credit Officer-PKMK Risk Management, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Tribuana Tunggadewi

Direktur Compliance & Human Capital

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Timur
Usia : 55 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Compliance & Human Capital melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK tanggal 1 Februari 2021
Riwayat Pendidikan	• Magister Hukum Bisnis, Universitas Indonesia (2002) • Spesialis Kenotariatan, Universitas Airlangga (1993) • Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1990)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Direktur Kepatuhan & Risiko, PT Bank BNI Syariah (2017–2021) • Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko & Komunikasi, PT Bank BNI Syariah (2017) • Senior Executive Vice President (SEVP) Risk & Compliance PT Bank BNI Syariah (2015-2017) • Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011–2015) • Vice President (VP) Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi Corporate Secretary, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009 –2011)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Ade Cahyo Nugroho

Direktur Finance & Strategy

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 44 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan	Pertama kali diangkat sebagai Direktur Finance & Strategy melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat diganti dengan dan mendapatkan keputusan efektif dari OJK pada 01 Februari 2021.
Riwayat Pendidikan	• Master in Business Administration, Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland (2011) • Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (2003)
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Pengalaman Kerja	• Direktur Finance, Strategy & Treasury, PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021) • Direktur Finance & Strategy, PT Bank Syariah Mandiri (2017-2018) • SEVP Finance & Strategy, PT Bank Syariah Mandiri (2016-2017) • Direktur Finance & Strategy, PT Mandiri Tunas Finance (2015-2016) • SEVP/Deputy Director, PT Mandiri Tunas Finance (2014-2015)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Informasi Perubahan Anggota Manajemen Setelah Tahun Buku 2022

Dewan Komisaris yaitu Mohamad Nasir efektif menjabat per 6 Januari 2023 dan Direksi yaitu Zaidan Novari efektif menjabat per 31 Januari 2023.

Profil Pejabat SEVP

Babas Bastaman

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Financing Risk

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Bekasi
Usia : 55 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64315-SK/HC-BSI 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- Magister Profesional Industri Kecil Menengah Institut Pertanian Bogor (2009)
- Sarjana Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (1992)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- SEVP Bisnis SME dan Komersial PT Bank BNI Syariah (2020 - 2021)
- Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2020)
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit Menengah dan Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017 – 2019)
- Pemimpin Divisi Kredit Komersial PT Bank BNI Syariah (2016)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Rosma Handayani

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Human Capital

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Selatan
Usia : 53 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64312-SK/HC-BSI 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- S2 Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada (2005)
- S1 Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (1993)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- SEVP Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2020 - 2021)
- Direktur Compliance & Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2020)
- Direktur Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2019 - 2020)
- SEVP Human Capital PT Bank Syariah Mandiri (2018 - 2019)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Wawan Setiawan

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Consumer Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Tangerang Selatan
Usia : 48 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 2021/64317-SK/HC-BSI 1 Februari 2021

Riwayat Pendidikan
- S2 Jurusan Manajemen PPM School of Management
- S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia (1997)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- SEVP Retail Banking PT Bank Syariah Mandiri (2019 - 2021)
- Senior Vice President, Micro Banking Group Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 - 2019)
- Vice President, Regional Retail Head Kantor Wilayah Sumatera II, Palembang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2016)
- Vice President, Deputy Regional Manager Kantor Wilayah Jateng – DIY, Semarang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014 - 2015)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Herry Rukmana

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Internal Audit

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Jakarta Barat
Usia : 55 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 02/096-2/KEP-DIR 1 April 2022

Riwayat Pendidikan
- S2 Jurusan Business Administration, Jakarta Institute of Management (1999)
- S1 Jurusan Ekonomi Akutansi, Institut Keguruaan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) (1989)

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Chief Audit Executive PT PLN Persero (2020 - 2022)
- Senior Investigator Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 - 2020)
- Regional CEO X Sulawesi & Maluku PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 - 2018)
- Group Head Credit Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012 - 2016)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Saut Parulian Saragih

Senior Executive Vice President Internal (SEVP) Digital Banking

Warga Negara : Indonesia
Domisili : Depok
Usia : 48 Tahun

Dasar Hukum Pengangkatan
SK No. 01/244-KUA/DIR 6 Agustus 2021

Riwayat Pendidikan
- S2 Jurusan Bisnis Administrasi dari London Business School
- S1 Jurusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung

Rangkap Jabatan
Tidak Ada

Pengalaman Kerja
- Executive Vice President - Head of Strategy, Investor Relations and Partnerships Bank CIMB Niaga (2020 - 2021)
- Executive Vice President - Head of Strategy Bank CIMB Niaga (2019 - 2020)
- Direktur - Strategy and Business Development OVO PT Visionet International (2017 - 2019)
- Head of Business Development Sampoerna AGRO (2014 - 2017)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal hubungan keuangan maupun keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali baik langsung maupun tidak langsung.

Profil
Pejabat Eksekutif

1. **M. FANNY FANSYURI**
   TEMPAT LAHIR
   Bandung
   TANGGAL LAHIR
   14/04/1967
   JABATAN
   Operational, Portfolio & Market Risk Group Head
   AWAL BERGABUNG
   01/06/1991
   PENDIDIKAN AKHIR
   Bachelor Degree

2. **RUSTANTI RACHMI**
   TEMPAT LAHIR
   Gombong
   TANGGAL LAHIR
   20/01/1967
   JABATAN
   Retail Collection, Restructuring & Recovery Group Head
   AWAL BERGABUNG
   31/03/1991
   PENDIDIKAN AKHIR
   Bachelor Degree

3. **GUNAWAN ARIEF HARTOYO**
   TEMPAT LAHIR
   Sukoharjo
   TANGGAL LAHIR
   26/03/1971
   JABATAN
   Corporate Secretary & Communication Group Head
   AWAL BERGABUNG
   27/12/1999
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

4. **ANA NURUL KHAYATI**
   TEMPAT LAHIR
   Madiun
   TANGGAL LAHIR
   26/03/1972
   JABATAN
   Audit Policy & Counterpart Group Head
   AWAL BERGABUNG
   13/01/2000
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

5. **DIEN LUKITA PURNAMASARI**
   TEMPAT LAHIR
   Jayapura
   TANGGAL LAHIR
   10/05/1974
   JABATAN
   Consumer Business 2 (Unsecured) Group Head
   AWAL BERGABUNG
   21/03/2001
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

6. **MAHENDRA NUSANTO S**
   TEMPAT LAHIR
   Serang
   TANGGAL LAHIR
   07/07/1971
   JABATAN
   Gold & Pawning Business Group Head
   AWAL BERGABUNG
   15/07/2002
   PENDIDIKAN AKHIR
   Bachelor Degree

7. **FITI SYAM**
   TEMPAT LAHIR
   Jakarta
   TANGGAL LAHIR
   16/09/1976
   JABATAN
   Corporate Business 1 Group Head
   AWAL BERGABUNG
   03/09/2002
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

8. **DEDY SURYADI DHARMAWAN**
   TEMPAT LAHIR
   Jakarta
   TANGGAL LAHIR
   07/03/1979
   JABATAN
   SME Business Group Head
   AWAL BERGABUNG
   03/09/2002
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

9. **YUWONO**
   TEMPAT LAHIR
   Cianjur
   TANGGAL LAHIR
   05/07/1980
   JABATAN
   Procurement & Fixed Asset Group Head
   AWAL BERGABUNG
   04/03/2003
   PENDIDIKAN AKHIR
   Bachelor Degree

10. **KHOIRUL HUDA S RIYADI**
    TEMPAT LAHIR
    Jakarta
    TANGGAL LAHIR
    06/10/1975
    JABATAN
    AML/APU-PPT Group Head
    AWAL BERGABUNG
    01/09/2003
    PENDIDIKAN AKHIR
    Master Degree

11. **VITA ANDRIANTY**
    TEMPAT LAHIR
    Tangerang
    TANGGAL LAHIR
    18/08/1981
    JABATAN
    Retail Deposit & Payroll Solution Group Head
    AWAL BERGABUNG
    01/09/2003
    PENDIDIKAN AKHIR
    Bachelor Degree

12. **WIJAYANTO**
    TEMPAT LAHIR
    Bantul
    TANGGAL LAHIR
    03/10/1970
    JABATAN
    Digital Strategic Partnership Group Head
    AWAL BERGABUNG
    15/12/2008
    PENDIDIKAN AKHIR
    Master Degree

13. ROSALINA DEWI T

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
23/07/1979

JABATAN
Compliance Group Head

AWAL BERGABUNG
01/12/2008

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

14. MOHAMMAD ISNAENI

TEMPAT LAHIR
Tangerang

TANGGAL LAHIR
20/10/1969

JABATAN
Micro Business Group Head

AWAL BERGABUNG
01/02/2010

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

15. ANDRIANTO DARU KURNIAWAN

TEMPAT LAHIR
Surakarta

TANGGAL LAHIR
31/03/1970

JABATAN
Corporate Business 1 Group Head

AWAL BERGABUNG
30/01/1995

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

16. MIRZA MANTHOVANI

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
09/01/1969

JABATAN
Digital Banking & E-Channel Operations Group Head

AWAL BERGABUNG
01/10/1994

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

17. ADJAT DJATNIKA BASARAH

TEMPAT LAHIR
Bandung

TANGGAL LAHIR
12/04/1971

JABATAN
Distribution Strategy Group Head

AWAL BERGABUNG
05/06/1995

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

18. DADE DERMAWAN

TEMPAT LAHIR
Cilegon

TANGGAL LAHIR
22/01/1969

JABATAN
Senior Operational Risk Head

AWAL BERGABUNG
31/07/1995

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

19. BAMBANG SUTRISNO

TEMPAT LAHIR
Blora

TANGGAL LAHIR
17/05/1970

JABATAN
Human Capital Services Group Head

AWAL BERGABUNG
15/11/1995

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

20. IDA TRIANA WIDOWATI

TEMPAT LAHIR
Magelang

TANGGAL LAHIR
10/05/1970

JABATAN
Institutional Banking Group Head

AWAL BERGABUNG
22/04/1998

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

21. DIAR FITRADA

TEMPAT LAHIR
Sumedang

TANGGAL LAHIR
07/06/1986

JABATAN
Corporate Risk Group Head

AWAL BERGABUNG
15/12/2010

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

22. RUSDI MUSA ISHAK

TEMPAT LAHIR
Kediri

TANGGAL LAHIR
03/03/1982

JABATAN
BSI Corporate University Group Head

AWAL BERGABUNG
01/07/2014

PENDIDIKAN AKHIR
Doctor

23. INDRIATI TRI HANDAYANI

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
03/05/1972

JABATAN
Policy & Procedure Group Head

AWAL BERGABUNG
04/08/2014

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

24. PRIYO HARTONO

TEMPAT LAHIR
Kediri

TANGGAL LAHIR
16/11/1977

JABATAN
Corporate Finance & Accounting Group Head

AWAL BERGABUNG
08/06/2015

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

25. ASNAH FAEKHAH

TEMPAT LAHIR
Lampung Tengah

TANGGAL LAHIR
26/02/1969

JABATAN
Consumer Risk Group Head

AWAL BERGABUNG
01/04/2016

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

26. MUHAMMAD SYUKRON HABIBY

TEMPAT LAHIR
Blora

TANGGAL LAHIR
16/04/1978

JABATAN
Islamic Ecosystem Solution Group Head

AWAL BERGABUNG
15/05/2016

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

27. IRFAN LESMANA

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
24/02/1971

JABATAN
Legal Group Head

AWAL BERGABUNG
15/07/2016

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

28. BUYUNG ICHMAN LUKMAN

TEMPAT LAHIR
Yogyakarta

TANGGAL LAHIR
21/07/1967

JABATAN
Corporate Business 2 Group Head

AWAL BERGABUNG
06/04/2017

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

29. ASTRIDIANA SJAMANTI

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
14/02/1970

JABATAN
Alternative Channel & Government Project Group Head

AWAL BERGABUNG
01/09/2017

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

30. IR SUPRIONO

TEMPAT LAHIR
Magetan

TANGGAL LAHIR
27/07/1969

JABATAN
Commercial Risk Group Head

AWAL BERGABUNG
12/02/2018

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

31. BAYU ISNANDAR

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
09/07/1985

JABATAN
IT Strategic Planning Group Head

AWAL BERGABUNG
15/04/2018

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

32. IVAN HARTAWAN

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
07/12/1968

JABATAN
Commercial Business Group Head

AWAL BERGABUNG
01/07/2018

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

33. RIKO WARDHANA

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
30/10/1973

JABATAN
Digital Strategy & Development Group Head

AWAL BERGABUNG
01/07/2018

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

34. GEGGY DESTRIA MULYA

TEMPAT LAHIR
Bandung

TANGGAL LAHIR
18/12/1980

JABATAN
Data & Decision Management Group Head

AWAL BERGABUNG
01/08/2018

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

35. TRI BUDI TJAHJONO

TEMPAT LAHIR
Madiun

TANGGAL LAHIR
01/06/1967

JABATAN
Head Of Human Capital Business Partner 2

AWAL BERGABUNG
01/10/2018

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

36. M. MISBAHUL MUNIR

TEMPAT LAHIR
Semarang

TANGGAL LAHIR
06/05/1971

JABATAN
Strategic Planning & Performance Management Group Head

AWAL BERGABUNG
01/12/2018

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

37. AHMAD SAFRIZAL

TEMPAT LAHIR
Bandung

TANGGAL LAHIR
23/05/1967

JABATAN
Treasury & Global Market Group Head

AWAL BERGABUNG
07/01/2019

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

38. YAN RASDIANSYAH

TEMPAT LAHIR
Palembang

TANGGAL LAHIR
13/01/1976

JABATAN
Financing Operations Group Head

AWAL BERGABUNG
07/01/19

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

39. PRAKA MULIA AGUNG

TEMPAT LAHIR
Surabaya

TANGGAL LAHIR
02/12/1978

JABATAN
Consumer Business 1 (Secured) Group Head

AWAL BERGABUNG
01/03/2019

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

40. MOVIANTO

TEMPAT LAHIR
Semarang

TANGGAL LAHIR
19/06/1971

JABATAN
Internal Audit 1 Group Head

AWAL BERGABUNG
25/03/2019

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

41. DWI HESTI MULYANINGRUM

TEMPAT LAHIR
Boyolali

TANGGAL LAHIR
15/05/1974

JABATAN
Customer Care Group Head

AWAL BERGABUNG
01/08/2019

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

42. ARIEF SUNANDAR

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
08/04/1973

JABATAN
IT Development Group Head

AWAL BERGABUNG
15/10/2019

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

43. IR ANNA KRISTANTY

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
14/10/1974

JABATAN
International & Financial Institution Group Head

AWAL BERGABUNG
11/11/2019

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

44. IVAN

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
26/10/1978

JABATAN
Marketing Communication Group Head

AWAL BERGABUNG
01/03/2020

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

45. AGUS SUBEKTI

TEMPAT LAHIR
Banyumas

TANGGAL LAHIR
19/11/1971

JABATAN
Internal Audit 2 Group Head

AWAL BERGABUNG
02/07/2020

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

46. ARIEF SATIANA

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
22/07/1972

JABATAN
Card Business Group Head

AWAL BERGABUNG
01/03/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

47. FAJAR ARI SETIAWAN

TEMPAT LAHIR
Tulungagung

TANGGAL LAHIR
18/05/1977

JABATAN
Transaction Banking Group Head

AWAL BERGABUNG
01/03/22

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

48. DESFAN AKBAR

TEMPAT LAHIR
Langsa

TANGGAL LAHIR
18/12/1981

JABATAN
SME & Micro Risk Group Head

AWAL BERGABUNG
01/03/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

49. TESZY MIRA EKA KUSUMA

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
07/08/1979

JABATAN
Human Capital Strategy & Policy Group Head

AWAL BERGABUNG
01/03/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

50. INDRA G KAMPONO

TEMPAT LAHIR
Jakarta

TANGGAL LAHIR
10/10/1970

JABATAN
Corporate Finance & Solution Group Head

AWAL BERGABUNG
01/03/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

51. RIZKY BUDINANDA

TEMPAT LAHIR
Cirebon

TANGGAL LAHIR
29/12/1977

JABATAN
Investor Relation Group Head

AWAL BERGABUNG
20/04/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

52. ASRI NATANEGERI

TEMPAT LAHIR
Surabaya

TANGGAL LAHIR
02/03/1984

JABATAN
Wealth Management Group Head

AWAL BERGABUNG
17/06/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

53. GATOT PRASETYO

TEMPAT LAHIR
Purbolinggo

TANGGAL LAHIR
23/03/1975

JABATAN
IT Operations Group Head

AWAL BERGABUNG
01/08/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

54. JON SUJANI PASARIBU

TEMPAT LAHIR
Padang Sidempuan

TANGGAL LAHIR
24/07/1966

JABATAN
Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head

AWAL BERGABUNG
01/08/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Bachelor Degree

55. HUSNI THAMRIN

TEMPAT LAHIR
Kuningan

TANGGAL LAHIR
28/10/1966

JABATAN
Corporate Business 3 Group Head

AWAL BERGABUNG
01/11/2022

PENDIDIKAN AKHIR
Master Degree

Profil Regional CEO

1. **WISNU SUNANDAR**
   TEMPAT LAHIR
   Jakarta
   TANGGAL LAHIR
   01/10/1978
   JABATAN
   Regional CEO RO I Banda Aceh
   AWAL BERGABUNG
   01/09/2003
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

2. **JONI HARYANTO**
   TEMPAT LAHIR
   Jakarta
   TANGGAL LAHIR
   04/06/1970
   JABATAN
   Regional CEO RO II Medan
   AWAL BERGABUNG
   07/04/2022
   PENDIDIKAN AKHIR
   Bachelor Degree

3. **WACHJONO**
   TEMPAT LAHIR
   Tanjung Pandan
   TANGGAL LAHIR
   20/05/1969
   JABATAN
   Regional CEO RO III Palembang
   AWAL BERGABUNG
   15/03/2016
   PENDIDIKAN AKHIR
   Bachelor Degree

4. **DEDEN DURACHMAN**
   TEMPAT LAHIR
   Bandung
   TANGGAL LAHIR
   17/09/1972
   JABATAN
   Regional CEO RO IV Jakarta 1
   AWAL BERGABUNG
   02/06/2000
   PENDIDIKAN AKHIR
   Bachelor Degree

5. **FIRMAN JATNIKA**
   TEMPAT LAHIR
   Jakarta
   TANGGAL LAHIR
   26/02/1970
   JABATAN
   Regional CEO RO V Jakarta 2
   AWAL BERGABUNG
   01/11/1999
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

6. **ALHUDA DJ**
   TEMPAT LAHIR
   Bukit Tinggi
   TANGGAL LAHIR
   16/05/1972
   JABATAN
   Regional CEO RO VI Bandung
   AWAL BERGABUNG
   15/05/2000
   PENDIDIKAN AKHIR
   Bachelor Degree

7. **IMAM HIDAYAT SUNARTO**
   TEMPAT LAHIR
   Purworejo
   TANGGAL LAHIR
   21/01/1970
   JABATAN
   Regional CEO RO VII Semarang
   AWAL BERGABUNG
   11/03/1996
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

8. **KEMAS ERWAN HUSAINY**
   TEMPAT LAHIR
   Palembang
   TANGGAL LAHIR
   29/10/1975
   JABATAN
   Regional CEO RO VIII Surabaya
   AWAL BERGABUNG
   21/02/2001
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

9. **AFFAN MAWARDI**
   TEMPAT LAHIR
   Bogor
   TANGGAL LAHIR
   20/08/1980
   JABATAN
   Regional CEO RO IX Banjarmasin
   AWAL BERGABUNG
   01/10/2009
   PENDIDIKAN AKHIR
   Master Degree

10. **FICKO HARDOWISETO**
    TEMPAT LAHIR
    Bandung
    TANGGAL LAHIR
    03/10/1978
    JABATAN
    Regional CEO RO X Makassar
    AWAL BERGABUNG
    16/03/2005
    PENDIDIKAN AKHIR
    Bachelor Degree

Demografi Karyawan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Pegawai	2022		2021	
	Total	%	Total	%
Pegawai Tetap	17.636	66,24	17.462	62,482
Pegawai Kontrak	945	3,55	1.987	7,11
Alih Daya	8.045	30,21	8.501	30,42
Grand Total	**26.626**	**100,00**	**27.950**	**100,00**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan*

Pendidikan Pegawai	2022		2021	
	Total	%	Total	%
SMU	57	0,31	50	0,26
Diploma	1.898	10,21	2.026	10,42
S1	15.715	84,58	16.515	84,91
S2	900	4,84	848	4,36
S3	11	0,06	10	0,05
Grand Total	**18.581**	**100,00**	**19.449**	**100,00**

*Tidak termasuk alih daya

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia*

Usia Pegawai	2022		2021	
	Total	%	Total	%
18-25 Tahun	808	4,35	1.822	9,37
26-35 Tahun	9.988	53,75	10.736	55,20
36-45 Tahun	6.441	34,66	5.654	29,07
Di atas 45 Tahun	1.344	7,23	1.237	6,36
Grand Total	**18.581**	**100,00**	**19.449**	**100,00**

*Tidak termasuk alih daya

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan*

Level Jabatan	Posisi Jabatan	2022		2021	
		Total	%	Total	%
N2	Group Head, Regional Head, Project Manager	88	0,47	84	0,43
N3	Dean, Area Manager, Dept Head, Manager	429	2,31	429	2,21
N4	Manager, Team Leader & Branch Manager, Sec, Head	2.218	11,94	2.320	11,93
N5	Relationship Officer, Branch Manager (Cash Outlet Manager), Officer, ODP	6.088	32,76	6.386	32,85
N6	Staf/Pelaksana/Pegawai Dasar	9.758	52,52	10.228	52,59
Grand Total		**18.581**	**100,00**	**19.449**	**100,00**

*Tidak termasuk alih daya

Jumlah Karyawan Berdasarkan Gender*

Gender Pegawai	2022		2021	
	Total	%	Total	%
Pria	11.008	59,24	11.522	41,34
Wanita	7.573	40,76	7.927	28,44
Grand Total	**18.581**	**100.00**	**19.449**	**100,00**

*Tidak termasuk alih daya

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Biaya Pengembangan Kompetensi

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, BSI telah merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp97,217 miliar. Adapun untuk tahun buku 2023, Bank mengalokasikan biaya sebanyak Rp120 miliar. Rincian pengembangan kompetensi disampaikan dalam tabel di bawah ini.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

No.	Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
1	**Senior Manager**	102	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		2.076	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		354	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		79	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University
		183	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		53	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		109	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**2.956**			
2	**Middle Manager**	536	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		11.332	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		1.230	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		497	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University

No.	Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
		988	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		492	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		402	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**15.477**			
3	**Manager**	2.117	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		69.630	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		2.761	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		3.707	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University
		7.839	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		1.808	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		1.234	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**89.096**			
4	**Officer**	2.229	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		189.124	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		436	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		10.411	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University

No.	Level Jabatan	Jumlah Peserta	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Penyelenggara
		17.028	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		4.363	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		1.282	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**224.873**			**BSI Corporate University**
5	**Staff**	116	Certification & Socialization	Untuk memastikan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi kinerja pada jabatannya & untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai terkait ketentuan/ peraturan baru terkait regulasi yang ada	BSI Corporate University
		263.767	Change & Culture Development	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi Pegawai pada implementasi budaya perusahaan sesuai dengan nilai-nilai dalam AKHLAK	BSI Corporate University
		35	General & Leadership	Untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan keahlian pemimpin Bank	BSI Corporate University
		13.338	Teknikal Skill - Operations	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai segmen Marketing and Sales, Services, Branch Operation, Wholesale and Transaction Banking, dan Banking Operation	BSI Corporate University
		18.325	Teknikal Skill - Retail Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Small Medium Enterprise, Pawning, Consumer, dan Mikro	BSI Corporate University
		4.525	Teknikal Skill - Support	Untuk mengembangan kompetensi segmen Finance and Accounting, Procurement, Fixed Asset, Change Management Office, IT, Wholesale and Retail Risk, Risk Management (Enterprise), Audit, Compliance dan Legal serta bidang Teknologi Informasi dan Support	BSI Corporate University
		545	Teknikal Skill - Wholesale Banking	Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai terkait segmen Wholesale Banking (corporate dan commercial), Government, Special Asset Management, Treasury, & International Banking	BSI Corporate University
	Total	**300.651**			
Grand Total		**633.053**			

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1	**Adiwarman Azwar Karim**	Board Forum Q4 - 2021 Mandiri Group : Unlocking Growth Momentum Through Transformation	Rabu, 23 Februari 2022	Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat - Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Board Forum Q1 - 2022 Mandiri Group: Winning Market, Advancing Digital	Jumat, 27 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Group Narasumber: – Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo – Wilson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Narasumber : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		One Day Workshop Dekom dan Perangkat Dekom BSI Tahun 2022	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont Jakarta - Emerald Room Lantai 3	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Narasumber: – Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum UI, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani) – Ir. Zulkifli Zaini, MBA (Komisaris Utama PT. Perkebunan Nusantara III) – Pradjoto S.H., M.A., (Wakil Komisaris Utama Bank BNI) – Rico Usthavia Frans (Chairman iCIO Community)

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Sharing Session dengan Tema Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges	Jumat, 26 Agustus 2022	Virtual	Bank Mandiri Narasumber: – Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Department Pengendalian Kualitas Perbankan OJK – Michael T Tjoajadi, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
		Board Forum Q3 - 2022 Mandiri Group Tema: "Navigate Strong Growth on Tackling Global Uncertainties"	Jumat, 18 November 2022	Offline Plaza Mandiri	Bank Mandiri Sharing Session Narasumber: – Patrick Sugito Walujo, Co-Founder, Managing Partner & Member of the Investment Committee, Northstar – Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode 2014–2019
2	**Masduki Baidlowi**	Board Forum Q4 - 2021 Mandiri Group : Unlocking Growth Momentum Through Transformation	Rabu, 23 Februari 2022	Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Board Forum Q1 - 2022 Mandiri Group: Winning Market, Advancing Digital	Jumat, 27 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Group Narasumber: – Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo – Wilson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Narasumber : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA - Ketua Badan Pengurus IICG

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		One Day Workshop Dekom dan Perangkat Dekom BSI Tahun 2022	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont Jakarta - Emerald Room Lantai 3	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Narasumber: – Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum UI, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani) – Ir. Zulkifli Zaini, MBA (Komisaris Utama PT. Perkebunan Nusantara III) – Pradjoto S.H., M.A., (Wakil Komisaris Utama Bank BNI) – Rico Usthavia Frans (Chairman iCIO Community)
		Sharing Session dengan Tema Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges	Jumat, 26 Agustus 2022	Virtual	Bank Mandiri Narasumber: – Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Department Pengendalian Kualitas Perbankan OJK – Michael T Tjoajadi, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Bpk Y.M Husin Bagis - Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
3	**Imam Budi Sarjito**	Board Forum Q4 - 2021 Mandiri Group : Unlocking Growth Momentum Through Transformation	Rabu, 23 Februari 2022	Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Board Forum Q1 - 2022 Mandiri Group: Winning Market, Advancing Digital	Jumat, 27 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Group Narasumber: – Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo – Wilson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 07 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
4	**Sutanto**	Board Forum Q4 - 2021 Mandiri Group : Unlocking Growth Momentum Through Transformation	Rabu, 23 Februari 2022	Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Board Forum Q1 - 2022 Mandiri Group: Winning Market, Advancing Digital	Jumat, 27 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Group Narasumber: – Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo – Wilson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
5	**Suyanto**	Board Forum Q4 - 2021 Mandiri Group : Unlocking Growth Momentum Through Transformation	Rabu, 23 Februari 2022	Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Board Forum Q1 - 2022 Mandiri Group: Winning Market, Advancing Digital	Jumat, 27 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Group Narasumber: – Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo – Wilson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber :. Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
6	**M. Arief Rosyid Hasan**	Board Forum Q4 - 2021 Mandiri Group : Unlocking Growth Momentum Through Transformation	Rabu, 23 Februari 2022	Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3	Mandiri Group
		Pelatihan Bahasa Inggris Direksi dan SEVP (Bahasa Inggris Bagi Komisaris BSI Tahap II)	8 Februari- 24 Mei 2022	via Online: Zoom Webinar	BSU English Today
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Prof. Andreas Pazi Raharso - Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Talkshow Metaverse	Selasa, 26 April 2022	Online: Zoom Webinar	DBS
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Ibu Nurhayati Subakat - Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Board Forum Q1 - 2022 Mandiri Group: Winning Market, Advancing Digital	Jumat, 27 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Group Narasumber: – Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo – Wilson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Bpk. Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA - Ketua Badan Pengurus IICG
		One Day Workshop Dekom dan Perangkat Dekom BSI Tahun 2022	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont, Jakarta	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Narasumber: – Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum UI, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani) – Ir. Zulkifli Zaini, MBA (Komisaris Utama PT. Perkebunan Nusantara III) – Pradjoto S.H., M.A., (Wakil Komisaris Utama Bank BNI) – Rico Usthavia Frans (Chairman iCIO Community)
		Sharing Session dengan Tema Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges	Jumat, 26 Agustus 2022	Online: Zoom Webinar	Bank Mandiri Narasumber: – Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Department Pengendalian Kualitas Perbankan OJK – Michael T Tjoajadi, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Board Forum Q3 - 2022 Mandiri Group Tema: "Navigate Strong Growth on Tackling Global Uncertainties"	Jumat, 18 November 2022	Offline Plaza Mandiri	Bank Mandiri Sharing Session Narasumber: – Patrick Sugito Walujo, Co-Founder, Managing Partner & Member of the Investment Committee, Northstar – Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode 2014–2019
7	**Komaruddin Hidayat**	Board Forum Q4 - 2021 Mandiri Group : Unlocking Growth Momentum Through Transformation	Rabu, 23 Februari 2022	Auditorium Plaza Mandiri Lantai 3	Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 01 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Board Forum Q1 - 2022 Mandiri Group: Winning Market, Advancing Digital	Jumat, 27 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Group Narasumber: – Catherine Hindra Sutjahyo, Direktur/Head of Food and Indonesia Sales & Ops GoTo – Wilson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		One Day Workshop Dekom dan Perangkat Dekom BSI Tahun 2022	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont, Jakarta	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Narasumber: – Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum UI, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani) – Ir. Zulkifli Zaini, MBA (Komisaris Utama PT. Perkebunan Nusantara III) – Pradjoto S.H., M.A., (Wakil Komisaris Utama Bank BNI) – Rico Usthavia Frans (Chairman iCIO Community)
		Sharing Session dengan Tema Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges	Jumat, 26 Agustus 2022	Online: Zoom Webinar	Bank Mandiri Narasumber: – Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Department Pengendalian Kualitas Perbankan OJK – Michael T Tjoajadi, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
8	**Nizar Ali**	Induction Class : Good Corporate Governance (GCG) (CPG)	Selasa, 14 Juni 2022	The Tower Lantai 5	Corporate Secretary Narasumber: Rosalina Dewi
		Induction Class : Pengenalan Syariah dan Akad Syariah (BSU)	Kamis, 16 Juni 2022	Virtual	Corporate Secretary Narasumber: Rusdi Saptono Budi S
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Jumat-Sabtu, 17-18 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	BSU LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Induction Class : Rencana Bisnis Bank (SPM)	Senin, 20 Juni 2022	Virtual	Corporate Secretary Narasumber: Misbahul Munir
		Induction Class : Risk Profile BSI (OPM CRG)	Senin, 20 Juni 2022	Virtual	Corporate Secretary Narasumber: Fanny Fansyuri
		Induction Class : One Culture (BSU)	Senin, 20 Juni 2022	Virtual	Corporate Secretary Narasumber: Rusdi Ibu Nurdiana Habibie
		Induction Class : Pengenalan Syariah dan Akad Syariah (BSU)	Senin, 20 Juni 2022	Virtual	Corporate Secretary Narasumber: Rusdi Saptono Budi S

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Induction Class: Corporate Plan (CTO)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	Corporate Secretary Narasumber: Suhendar dan Mc Kinsey
		One Day Workshop Dekom dan Perangkat Dekom BSI Tahun 2022	Jumat, 8 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	Penyelenggara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Narasumber: – Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum UI, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani) – Ir. Zulkifli Zaini, MBA (Komisaris Utama PT. Perkebunan Nusantara III) – Pradjoto S.H., M.A., (Wakil Komisaris Utama Bank BNI) – Rico Usthavia Frans (Chairman iCIO Community)
		One Day Workshop Dekom dan Perangkat Dekom BSI Tahun 2022	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont Jakarta - Emerald Room Lantai 3	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Narasumber: – Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum UI, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani) – Ir. Zulkifli Zaini, MBA (Komisaris Utama PT. Perkebunan Nusantara III) – Pradjoto S.H., M.A., (Wakil Komisaris Utama Bank BNI) – Rico Usthavia Frans (Chairman iCIO Community)

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Sharing Session dengan Tema Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges	Jumat, 26 Agustus 2022	Virtual	Bank Mandiri Narasumber: – Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Department Pengendalian Kualitas Perbankan OJK – Michael T Tjoajadi, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia
		Pembekalan Fit & Proper Test Materi Manajemen Risiko	Kamis, 1 September 2022	Virtual	Bank Mandiri x The Risk Forum School of Finance
		Pembekalan Fit & Proper Test Materi Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 2 September 2022	Virtual	Bank Mandiri x IICG
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Bpk Y.M Husin Bagis - Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab Moderator : Dian Faqihdien Suzabar - Project Leader - Overseas Branches - Dubai Presence, PT Bank Syariah Indonesia Tbk
9	M. Nasir	Induction Class : Good Corporate Governance (GCG) (CPG)	Selasa, 14 Juni 2022	The Tower Lantai 5	Corporate Secretary Narasumber: Rosalina Dewi
		Induction Class : Pengenalan Syariah dan Akad Syariah (BSU)	Rabu-Kamis, 15-16 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	Corporate Secretary Narasumber: Rusdi Saptono Budi S
		Pelatihan Dasar Perbankan Syariah (PDPS)	Jumat-Sabtu, 17-18 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	BSU LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Induction Class : Rencana Bisnis Bank (SPM)	Senin, 20 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	Corporate Secretary Narasumber: Misbahul Munir
		Induction Class : Risk Profile BSI (OPM CRG)	Senin, 20 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	Corporate Secretary Narasumber: Fanny Fansyuri
		Induction Class : One Culture (BSU)	Senin, 20 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	Corporate Secretary Narasumber: Rusdi Nurdiana Habibie
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Senin, 20 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Bpk. Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA - Ketua Badan Pengurus IICG
		Induction Class: Corporate Plan (CTO)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	Corporate Secretary Narasumber: Suhendar dan Mc Kinsey

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		One Day Workshop Dekom dan Perangkat Dekom BSI Tahun 2022	Jumat, 8 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Narasumber: – Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar Fakultas Hukum UI, Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani) – Ir. Zulkifli Zaini, MBA (Komisaris Utama PT. Perkebunan Nusantara III) – Pradjoto S.H., M.A., (Wakil Komisaris Utama Bank BNI) – Rico Usthavia Frans (Chairman iCIO Community)
		Sharing Session dengan Tema Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont, Jakarta	Bank Mandiri Narasumber: – Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Department Pengendalian Kualitas Perbankan OJK – Michael T Tjoajadi, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia
		Sharing Session: Sustaining Growth Momentum Amid Global Uncertainties and Challenges	Jumat, 26 Agustus 2022	Online: Zoom Webinar	Bank Mandiri Narasumber: – Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Department Pengendalian Kualitas Perbankan OJK – Michael T Tjoajadi, Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia
		Pembekalan Fit & Proper Test Materi Manajemen Risiko	Kamis, 1 September 2022	Online: Zoom Webinar	Bank Mandiri x The Risk Forum School of Finance
		Pembekalan Fit & Proper Test Materi Good Corporate Governance (GCG)	Jumat, 2 September 2022	Online: Zoom Webinar	Bank Mandiri x IICG

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Narasumber : Bpk Y.M Husin Bagis - Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab Moderator : Dian Faqihdien Suzabar - Project Leader - Overseas Branches - Dubai Presence, PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Board Forum Q3 - 2022 Mandiri Group Tema: "Navigate Strong Growth on Tackling Global Uncertainties"	Jumat, 18 November 2022	Offline Plaza Mandiri	Bank Mandiri Sharing Session Narasumber: – Patrick Sugito Walujo, Co-Founder, Managing Partner & Member of the Investment Committee, Northstar – Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode 2014–2019

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1	**Hasanudin**	Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumát, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Prof. Andreas Pazi Raharso - Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan"	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VII th 2022 Bidang Perbankan Syariah	Rabu, 21 September 2022	Hotel Balairung	DSN-MUI

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab Moderator : Dian Faqihdien Suzabar, Project Leader - Overseas Branches Dubai Presence PT Bank Syariah Indonesia Tbk
2	**Mohamad Hidayat**	Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 “Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan"	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Professional Certificate in Islamic Finance	7 Juni-31 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	INCEIF
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VII th 2022 Bidang Perbankan Syariah	Rabu, 21 September 2022	Online: Zoom Webinar	DSN-MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Bpk Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab Moderator : Dian Faqihdien Suzabar, Project Leader Overseas Branches Dubai Presence PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Seminar Digital & Risk Management	Minggu-Selasa, 16-18 Oktober 22	Nusa Dua Bali	AAJI
		Workshop Manajemen Risiko bagi DPS Perusahaan Anggota AASI	Senin-Selasa, 21-22 November 22	Hotel Grand Mercure Bandung	AASI

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
3	**Oni Sahroni**	Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumát, 1 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan"	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Bpk. Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA - Ketua Badan Pengurus IICG
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VII th 2022 Bidang Perbankan Syariah	Rabu, 21 September 2022	Hotel Balairung	DSN-MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab Moderator : Dian Faqihdien Suzabar - Project Leader - Overseas Branches - Dubai Presence, PT Bank Syariah Indonesia Tbk

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
4	**Didin Hafidhuddin**	Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumát, 1 April 2022	via Online: Zoom Webinar	BSU Pembicar : Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		TELP (Top Executive Learning Program) Series 2 "Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetitif Perusahaan"	Rabu, 27 April 2022	via Online: Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS VII th 2022 Bidang Perbankan Syariah	Rabu, 21 September 2022	Hotel Balairung	DSN-MUI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab Moderator : Dian Faqihdien Suzabar, Project Leader - Overseas Branches - Dubai Presence, PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pengembangan Kompetensi Direksi

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1	**Hery Gunardi**	Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara: Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
		Exploiting Disruption in a Digital World	Minggu, 06 November 2022 sd Jumat, 11 November 2022	Offline: London Business School, London, UK	London Business School Pembicara 1. Costas Markides (Academic Director) 2. Peter Hinssen (Chairman of nexxworks) 3. Nicos Savva (Professor of Management Science and Operations) 4. Keyvan Vakili (Associate Professor of Strategy and Entrepreneurship)
2	**Bob Tyasika Ananta**	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - PDPS	Jum'at - Sabtu, 17 - 18 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Refreshment Level 5 - Manajemen Risiko Perbankan	Rabu, 6 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BNSP
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Webinar Penangkalan Paham Radikalisme	Selasa, 6 September 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Workshop Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	Rabu, 7 September 2022	Online: Zoom Webinar	BSU dan IICG
		BSMR Level Advance / Refrehment - Sertifikasi Kompetensi Bidang Treasury Dealer	Jum'at, 16 September 2022	Online: Zoom Webinar	Muamalat Institute dengan IIGMA

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Bpk Y.M Husin Bagis - Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab Moderator : Dian Faqihdien Suzabar - Project Leader - Overseas Branches - Dubai Presence, PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Webinar Nasional Kuliah Umum IBS Series ke-51 The Rise of Digital Bank in Indonesia	Jumat, 21 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	Indonesia Banking School - IBS Pembicara : Dr. Ir. Indra Utoyo, MSc
		Webinar Ekonomi Indonesia 2023 Respon Kebijakan & Prospek Ekonomi Syariah	Rabu, 23 November 2022	Online: Zoom Webinar	Ikatan Alumni FEUI Angkatan 83 Pembicara: Destry Damayanti; Mohamad Ikhsan; Bambang W. Budiawan; Adiwarman Karim
3	**Ngatari**	Pelatihan "People Transformation Dialogue Risk Management Directorate"	Jumat, 14 Januari 2022	Offline: The Tower 6th Floor	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumát, 01 April 2022	via Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	via Online: Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Bpk Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
		Continuous Professional Education, Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VIII - 2022	1 - 2 Desember 2022	SOON	LSPMR
4	**Anton Sukarna**	BSMR Level 5 *Refreshment* Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	Kamis, 27 Januari 2022	Online: Zoom Webinar	BSU IBI – Ikatan Bankir Indonesia LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Mandiri Investment Forum 2022 " The Largest Investment Forum in Indonesia"	Rabu, 9 Februari 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Sekuritas - Mandiri
		Worksop Industry Rating & Loan Portofolio Guideline Bank Mandiri 2022	Selasa, 1 Maret 2022	Online: Zoom Webinar	Bank Mandiri
		Workshop Corporate Plan PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Selasa, 15 Maret 2022	The Tower Lt.6	CTO- BSI
		Leadership Forum KBUMN	Sabtu, 19 Maret 2022	Merusaka Nusa Dua, Bali	KBUMN
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Virtual	BSU Pembicara: Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Virtual	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		FGD III Side Event G20 Indonesia " Digital Economy to Suppoert SDGs	Senin, 8 Agustus 2022	Hilton Hotel & Resort Bali	Kementerian Koperasi dan UMKM RI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	via Online : Zoom Webinar	BSU Pembicara : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
5	**Achmad Syafii**	BSMR Level 5 *Refreshment* Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	Kamis, 27 Januari 2022	via Online: Zoom Webinar	BSU IBI – Ikatan Bankir Indonesia LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Mandiri Investment Forum 2022	Jumát, 11 Februari 2022	via Online: Zoom Webinar	Bank Mandiri
		Pelatihan "People Transformation Dialogue Direktorat IT & Operations"	Kamis, 31 Maret 2022	Offline: The Tower 6th Floor	DDI Consulting
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Virtual	BSU Pembicara : Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Economic Challenge Syariah "Keuangan Syariah, Digitalisasi dan Inklusi Keuangan"	Sabtu, 9 April 2022	Metro TV	IAEI dan Metro TV
		Talkshow BI "Ngabuburit Asyik Pake QRIS"	Rabu, 13 April 2022	via Online: Zoom Webinar	Bank Indonesia
		Seminar LPPI "Inovasi Keuangan Syariah dalam rangka Penguatan Halal Value Chain"	Kamis, 14 April 2022	via Online: Zoom Webinar	LPPI
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Virtual	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Bpk. Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA - Ketua Badan Pengurus IICG
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
		Executive Development: Direktur IT BSI menggantikan Direktur Strategy & Finance BSI	Sabtu, 5 November 2022 sd Minggu, 13 November 2022	Online: Zoom Webinar	MBA, IBI, LSPP & BARA
6	**Tribuana Tunggadewi**	BSMR Level 5 *Refreshment* Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	Kamis, 27 Januari 2022	Online: Zoom Webinar	BSU IBI – Ikatan Bankir Indonesia LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Mandiri Investment Forum 2022 "The Largest Investment Forum in Indonesia"	Rabu, 9 Februari 2022	Online: Zoom Webinar	Mandiri Sekuritas - Mandiri
		Workshop Corporate Plan PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Selasa, 15 Maret 2022	The Tower Lt.6	CTO- BSI
		Konsinyering OJK dengan Tema “Peluang dan Tantangan Transformasi Digital Sektor Keuangan dan Pembiayaan Hijau (Green Financing) sebagai Penggerak Ekonomi Baru dalam rangka Mempercepat Pemulihan Ekonomi”	Rabu-Kamis, 23-24 Maret 2022	The Ritz-Carlton Bali	Otoritas Jasa Keuangan
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Webinar Sustainability Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, serta Keterkaitannya dengan Taksonomi Hijau Indonesia	Kamis, 12 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Griya Perbanas

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		People Transformation Dialogue untuk Direktorat Compliance	Jumat, 20 Mei 2022		DDI
		Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang APUPPT	Selasa, 28 Juni 2022	The Trans Luxury Hotel Bandung	OJK Institute
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara: Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Workshop Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	Rabu, 13 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Executive Talk Universitas Airlangga dengan Tema Post Merger Integration: A Challenge to Collaboration	Kamis, 25 Agustus 2022	Online: Zoom Webinar	Universitas Airlangga
		Webinar FKDKP "Perlindungan Konsumen dalam Era Digitalisasi, Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya bagi Perbankan" Moderator	Rabu, 31 Agustus 2022	Online: Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Griya Perbanas
		Webinar OJK dengan tema Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang	Kamis, 1 September 2022	Online: Zoom Webinar	OJK Institute
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
		Workshop Forum Group Develpoment Legal Group	Sabtu, 29 Oktober 2022	Royal Safari Garden	Legal Group dan Bank Syariah Indonesia University Group PT Bank Syariah Indonesia
		Talkshow Penerima Beasiswa Karya Salemba Empat	Sabtu, 19 November 2022	Universitas Syiah Kuala Aceh	Karya Salemba Empat

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
7	**Tiwul Widyastuti**	Pelatihan "People Transformation Dialogue Risk Management Directorate"	Jumat, 14 Januari 2022	Offline: The Tower 6th Floor	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Webinar Sustainability Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, serta Keterkaitannya dengan Taksonomi Hijau Indonesia	Kamis, 12 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Griya Perbanas
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Bpk. Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA - Ketua Badan Pengurus IICG
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
8	**Ade Cahyo Nugroho**	BSMR Level 5 *Refreshment* Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	Kamis, 27 Januari 2022	Online: Zoom Webinar	BSU IBI – Ikatan Bankir Indonesia LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		People Transformation Dialogue untuk Direktorat Finance & Strategy	Senin, 18 April 2022	Online: Zoom Webinar	Kubik
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Virtual	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
9	**Zaidan Novari**	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Sertifikasi PDPS (Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Executive Overview of Islamic Bank)	Jumat-Sabtu, 17-18 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	BSU LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Executive Overview of Islamic Bank	21 June 2022	Virtual Class	LPPI
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Bpk. Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA - Ketua Badan Pengurus IICG
		Pelatihan Workshop Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	Rabu, 13 Juli 2022	Virtual	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 6 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
10	**Moh. Adib**	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Sertifikasi PDPS (Pelatihan Dasar Perbankan Syariah - Executive Overview of Islamic Bank)	Jumat-Sabtu, 17-18 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	BSU LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Pembekalan Setifikasi Manajemen Risiko Level 5	Rabu, 22 Juni 2022	Virtual	BSU & DPP Asbisindo
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Minggu, 27 Juni 2022	Kantor LSPKS	BSU & LSPKS, LPPI
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Rabu, 29 Juni 2022	LSPKS	BSU LSPKS LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicar : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA - Ketua Badan Pengurus IICG

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Pelatihan Workshop Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)	Rabu, 13 Juli 2022	Virtual	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	via Online : Zoom Webinar	BSU Pembicara: Y.M Husin Bagis - Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab

Pengembangan Kompetensi SEVP

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1	**Wawan Setiawan**	Pelatihan "People Transformation Dialogue Risk Management Directorate"	Jumat, 14 Januari 2022	Offline: The Tower 6th Floor	BSU
		Pelatihan Bahasa Inggris Direksi dan SEVP	Tanggal Mulai: Kamis, 17 Januari 2022 Tanggal Selesai: Senin, 09 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	BSU English Today
		BSMR Level 5 Refreshment Program: "Trend Kriminal Perbankan di Era Transaksi Digital dan Bagaimana Investigasinya"	Jumat, 18 Maret 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Ikatan Banking Indonesia, Bankir Competency Center
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II: Kepemimpinan dalam Menciptakan Keunggulan Kompetititf Perusahaan	Rabu, 27 April 2022	Virtual	BSU Narasumber: Nurhayati Subakat, Komisaris Utama PT Paragon Technology dan Innovation
		Pelatihan Bahasa Inggris Direksi dan SEVP	Tanggal Mulai: Mei 2022 Tanggal Selesai: 30 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	BSU English Today
		Sharing Session Good Corporate Governance (GCG) Pejabat Executive PT Bank Syariah Indonesia	Rabu, 6 Juli 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Webinar Consumer Finance in The Digital Age	15 Juli 2022 Pukul 13.30	Online: Zoom Webinar	Mckinsey Asian Banking Webinar

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Ujian BSMR Level 5	Jumat, 12 Agustus 2022	Kantor LSPKS, Jalan Tebet Timur 3A, No. 14	LSPKS
		Sharing Session Awareness dan Overview ACGS bagi Executive Management PT Bank Syariah Indonesia	Wednesday, 7 September 2022	Online: Zoom Webinar	CPG
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
		Workshop Client Forum: Accelerating Recovery Synergies in Payment and Money Movement	12-13 Oktober 2022	Hotel Ritz Carlton Nusa Dua Bali	Visa
		Top Executive Leaders Session (TELS) Vol 06	24 October 2022	Online: Zoom Webinar	Bank Mandiri
		Workshop Mastercard Coustomer Forum	26-28 Oktober 2022	Hotel Mulia Resort Nusa Dua Bali	Mastercard
2	**Rosma Handayani**	BSMR Level 5 Refreshment Program: Menghindari dan Mengantisipasi Trend Kejahatan Siber Perbankan di Era Digital yang Semakin Marak	Kamis, 27 Januari 2022	Online: Zoom Webinar	BSU IBI – Ikatan Bankir Indonesia LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Pelatihan Bahasa Inggris Direksi dan SEVP	Tanggal Mulai: Kamis, 17 Januari 2022 Tanggal Selesai: Senin, 09 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	BSU English Today
		Webinar "Digital Disruption in Indonesia: Building an Agile and Resilient Business"	Selasa, 22 Februari 2022	Online: Zoom Webinar	INSEAD
		Webinar "IMD's High Impact Learning Day "	Selasa, 8 Maret 2022	Online: Zoom Webinar	IMD
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I : Next Practice Leadership : Framework to Create a Next Practice to Win the ASEAN Banking Battle for BSI	Jumat, 1 April 2022	Virtual	BSU Pembicara : Prof. Andreas Pazi Raharso, Adjunct Associate Professor Strategy & Policy NUS Bussiness School
		Webinar "Digitalisasi Perbankan untuk Pengembangan Layanan"	Sabtu, 16 April 2022	Online: Zoom Webinar	LPPI - BSI

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Learning Academy to Innovate HR (AIHR)	Kamis, 23 Juni 2022 sd Sabtu, 31 Desember 2022	Online: Zoom Webinar	AIHR
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Forum Co-creating Future Mandirian 2022 "Cultivating New Ways of Development"	Rabu, 05 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara : Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
3	**Babas Bastaman**	Pelatihan "People Transformation Dialogue Risk Management Directorate"	Jumat, 14 Januari 2022	Offline: The Tower 6th Floor	BSU
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Webinar	BSU
		Webinar Sustainability Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan, serta Keterkaitannya dengan Taksonomi Hijau Indonesia	Kamis, 12 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Griya Perbanas
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara : Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		IBI - BCC Refreshment	Jumat, 23 September 2022	Virtual	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
		Observasi CGPI	Jumat, 28 Oktober 2022	The Tower Ruang Auditorium Lantai 6	CPG PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4	**Herry Rukmana**	Pelatihan Bahasa Inggris Direksi dan SEVP	Tanggal Mulai bergabung: April 2022 Tanggal Selesai: Senin, 09 Mei 2022	Online: Zoom Webinar	BSU English Today
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II	Rabu, 27 April 2022	via Online: Zoom Webinar	BSU

No.	Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		Seminar Nasional Internal Audit dan Munas FKSPI BUMN "Anticipating The Future The New Roles Of Internal Audit" - "Foresight-Elevate-Transform"	Tanggal Mulai : Rabu, 29 Juni 2022, Tanggal Selesai : Jumat, 1 Juli 2022	Marriot Hotel Yogyakarta	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
		Ujian BSMR Level 5	Rabu, 6 Juli 2022	Kantor LSPKS, Jalan Tebet Timur 3A, No. 14	LSPKS
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara: Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
5	**Saut Parulian Saragih**	PDPS untuk Pejabat Executive BSI 2022	Jum'at - Sabtu 17 - 18 Juni 2022	Online: Zoom Webinar	LPPI
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Senin, 27 Juni 2022	LSPKS	BSU & LSPKS, LPPI
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Rabu, 29 Juni 2022	LSPKS	BSU LSPKS LPPI - Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara: Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
		Digital Lending Workshop	Senin, 26 September 2022	Zoom, Hybrid (tbc)	McKinsey
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Webinar	BSU Pembicara: Pembicara: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab
		OJK Virtual Innovation Day	Senin, 10 Oktober	Online: Zoom Webinar	OJK
		VISA Forum	12-13 Oktober	Ritz Carlton, Nusa Dua Bali	VISA
		Mastercard Forum	26-27 Oktober	Nusa Dua Bali	Mastercard

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

No.	Nama	Jenis Pelatihan		Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1	**M. Zacky Thayib**	a	When Security Becomes A High Priority	12 Januari 2022	Online via zoom meeting	Dell Technologies
		b	One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris Bank Syariah Indonesia Materi 1. Aspek Pengelolaan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka & GCG 2. Etika Perbankan dalam Perusahaan Terbuka 3. Peran Komisaris dalam Perusahaan Terbuka 4. Digitalisasi Perbankan	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont Jakarta - Emerald Room Lantai 3	Penyelenggara Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
		c	Pelatihan Certification in Audit Committee Practice (CACP)	Selasa-Rabu, 6-7 Desember 2022 Ujian Senin, 12 Desember 2022	Online: Zoom Meeting	Indonesian Institute of Audit Committee (IKAI)
		d	Peran Industri Jasa Keuangan dalam Mendukung Inklusi dan Digitalisasi UMKM	8 November 2022	Online:	OJK Institute
2	**M. Gunawan Yasni**	a	Refreshment Publik "Integrrating GRC dan Strategic Planning"	Rabu, 18 Mei 2022	Zoom Meeting	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
		b	Attended the Cambridge Islamic Finance Leadership Programme	7-12 Agustus 2022	Clare Collage, Cambridge	Cambridge Islamic Finance Leadership Award 2022
		c	One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris Bank Syariah Indonesia Materi 1. Aspek Pengelolaan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka & GCG 2. Etika Perbankan dalam Perusahaan Terbuka 3. Peran Komisaris dalam Perusahaan Terbuka 4. Digitalisasi Perbankan	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont Jakarta - Emerald Room Lantai 3	Penyelenggara Ikatan Bankir Indonesia (IBI)

No.	Nama	Jenis Pelatihan		Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
		d	Workshop Pra-Ijtima' Snawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII Tahun 2022 Bidang Pasar Modal Syariah	21 September 2022	Offline di Jakarta	Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
		e	Workshop Pra-Ijtima' Snawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII Tahun 2022 Bidang Bank Pembiayaan Syariah	22 September 2022	Offline di Jakarta	Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
		f	Workshop Pra-Ijtima' Snawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII Tahun 2022 Bidang Peasuransian dan Dana Pensiun Syariah	23 September 2022	Offline di Jakarta	Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
		g	Workshop Pra-Ijtima' Snawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII Tahun 2022 Bidang Bank Pembiayaan Syariah	27 September 2022	Offline di Jakarta	Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
		h	Workshop Pra-Ijtima' Snawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah VII Tahun 2022 Bidang Koperasi Syariah	28 September 2022	Offline di Jakarta	Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
		i	Non Bank Financial Institution (NBFI) Assessor Summit 2022 Building Public Trust Throught Quality Improvement of NBFI fit and Proper Test	11 Oktober 2022	Offline di Jakarta	OJK ASESOR IKNB
		j	Webinar Sosialisasi Fatwa DSN - MUI Terbaru Tahun 2022	27 Oktober 2022	Offline di Jakarta	Badan Pelaksana Harian DSN-MUI
		k	Sustainable Governance: A Strategic Perspective to Maintain Trust and Enhance Performance	13-14 Desember 2022	Jakarta Convention Center	Konggres Ikatan Akuntan Indonesia

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

No.	Nama	Jenis Pelatihan		Waktu Penyelenggaraan	Tempat Penyelenggaraan	Penyelenggara
1	**Bowo Setiyono**	a	One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris Bank Syariah Indonesia Materi 1. Aspek Pengelolaan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka & GCG 2. Etika Perbankan dalam Perusahaan Terbuka 3. Peran Komisaris dalam Perusahaan Terbuka 4. Digitalisasi Perbankan	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont Jakarta - Emerald Room Lantai 3	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
		b	Certificate-International Risk Management & Wealth Management Refreshment Program for Executives	November 2022	Netherlands, Belgium, France	IBI, BaRa, LSPP, MMUGM
		c	Training Certificate-Chartered Financial Analyst	November 2022	Jakarta	PT MfW
		d	Certificate of Appreciation-Economic and Capital Market Outlook 2023	Desember 2022	Balai Sudirman, Jakarta	AAEI-LSPPM
2	**Saifuddin Latief**	a	One Day Workshop Komisaris & Perangkat Komisaris Bank Syariah Indonesia Materi 1. Aspek Pengelolaan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka & GCG 2. Etika Perbankan dalam Perusahaan Terbuka 3. Peran Komisaris dalam Perusahaan Terbuka 4. Digitalisasi Perbankan	Selasa, 16 Agustus 2022	Hotel Fairmont Jakarta - Emerald Room Lantai 3	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
		b	Akad Pembiayaan Syariah dalam Corporate Finance	2022	Online: Zoom Meeting	BSI

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama Peserta	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Lokasi Penyelenggaraan	Penyelenggara
Gunawan Arief Hartoyo	Executive English Program	Mei 2022- April 2023	Online: Zoom Meeting	Cakap
	People Transformation Dialogue Forum	20 Mei 2022	Jakarta	DDI
	Webinar Market Outlook 2023: Resesi	22 November 2022	Online: Zoom Meeting	BSU
	Senior Management Development Program (Smdp)	17-21 Oktober 2022	Singapura	IMD
	Talent Forum	25 April 2022	Jakarta	BSI Corpu
	Transformational Leadership Workshop (Batch 1)	7-14 Juni 2022	Online: Zoom Meeting	ACT Consulting
	Webinar It Security Awareness Ro Vii Semarang Batch 2	29-30 November 2022	Online: Zoom Meeting	BSU
	Webinar Membangun Loyalitas Brand Melalui Pelayanan Prima 5.0 Batch 2	29-30 November 2022	Online: Zoom Meeting	BSU
	Workshop Gcg Untuk Pejabat Executive Bsi	7 Juli 2022	Online: Zoom Meeting	IICG
	Workshop Pemaparan Hasil Asean Corporate Governance Scorecard Bank Syariah Indonesia	23 November 2022	Online: Zoom Meeting	RSM

Pengembangan Kompetensi Audit Internal

Nama	Jenis Pelatihan	Waktu Penyelenggaraan	Lokasi Penyelenggaraan	Penyelenggara
Herry Rukmana	Pelatihan Bahasa Inggris Direksi dan SEVP	April- 09 Mei 2022	Online: Zoom Meeting	BSU PT Bank Syariah Indonesia English Today
	Top Executive Learning Program (TELP) - Series II	Rabu, 27 April 2022	Online: Zoom Meeting	BSU PT Bank Syariah Indonesia
	Seminar Nasional Internal Audit dan Munas FKSPI BUMN "Anticipating the future the new roles of internal audit" - "Foresight-elevate-transform"	Tanggal Mulai : Rabu, 29 Juni 2022, Tanggal Selesai : Jumat, 1 Juli 2022	Marriot Hotal Yogyakarta	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
	Ujian BSMR Level 5	Rabu, 6 Juli 2022	Kantor LSPKS, Jalan Tebet Timur 3A, No. 14	LSPKS
	Pelatihan Workshop Good Corporate Governance (GCG)	Kamis, 7 Juli 2022	Virtual	BSU Pembicara: Dr. Ir. G. Suprayitno, MM, IPU, QCRO, QCGP, CIPA, Ketua Badan Pengurus IICG
	Top Executive Learning Program (TELP) - Series III: Islam, Negara & Bisnis	Kamis, 06 Oktober 2022	Online: Zoom Meeting	BSU Pembicara: Y.M Husin Bagis, Duta Besar RI untuk Uni Emirate Arab

Komposisi Pemegang Saham

Daftar Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	
MODAL DASAR	**80.000.000.000**	**40.000.000.000.000**	
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
Saham Seri B			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	**46.129.260.138**	**23.064.630.069.000**	**100,00**
SAHAM DALAM PORTEPEL	**33.870.739.862**	**16.935.369.931.000**	

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih

Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
Total	**41.553.600.509**	**90,08%**

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status Kepemilikan

Kepemilikan Saham Berdasarkan Klasifikasi

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan terbatas	115	30.916.475.780	67,02140
Dana Pensiun	63	478.498.091	1,03730
Yayasan	21	278.474.275	0,60368
Reksa dana	169	406.283.741	0,88075
Asuransi	116	463.943.000	1,00575
Koperasi	7	119.900	0,00026
Perorangan Indonesia	163.417	1.825.180.416	3,95667
Bank	3	10.725.230.507	23,25038
Lembaga Pemerintah	1	2.396.800	0,00520
Sub Total	163.913	45.096.602.511	97,76139
Asing			

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase kepemilikan (%)
Badan Usaha Asing	129	1.029.604.896	2,23200
Perorangan Asing	87	3.052.731	0,00662
Sub Total	216	1.032.657.627	2,23862
TOTAL	**164.129**	**46.129.260.138**	**100,00%**

20 Pemegang Saham Terbesar

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,4654004
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,2395455
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,3758409
4	DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah	358.727.300	0,7776567
5	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	267.065.142	0,5789495
6	BBH Luxembourg S/A Fidelity Fd Sicav-Fid	120.173.500	0,2605147
7	JPMCB Na Re-Emerging Markets Growth Fund	112.175.500	0,2431765
8	JPMCB Na Re-Emerging Markets Equity Fund	105.107.500	0,2278543
9	PT Prudential Life Assurance - REF	87.546.446	0,1897851
10	Dana Pensiun BRI - Swakelola	76.154.800	0,1650900
11	Citibank New York S/A Government of Norw	68.100.995	0,1476308
12	BBH Luxembourg S/A Fidelity Funds Sicav	61.900.800	0,1341899
13	BBH LUXEMBOURG S/A FID FDS - Emerging AS	59.552.600	0,1290994
14	Allianz Life Ind - Smartlink Rupiah Equi	58.634.800	0,1271098
15	JPMCB NA RE - Vanguard Emerging Markets	44.878.690	0,0972890
16	JPMCB NA RE-Vanguard Total International	41.359.023	0,0896590
17	PT Prudential Sharia Life Assurance - SE	38.958.072	0,0844541
18	JPMCB NA Re-Capital Group Emerging Marke	35.875.900	0,0777725
19	BNYMSANV RE Sanvdub RE Magna Umbr Ella F	34.669.408	0,0751571
20	Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund	34.000.200	0,0737064
	Total	**43.158.481.185**	**93,56**

Kepemilikan Saham (Secara Langsung) Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1 Januari 2022			
DIREKSI			
Hery Gunardi	Direktur Utama	0	0
Ngatari	Wakil Direktur Utama 1	15.000.000	0,0364703
Abdullah Firman Wibowo	Wakil Direktur Utama 2	0	0
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	0	0
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	0	0
Kusman Yandi	Direktur Wholesale Transaction Banking	0	0
Kokok Alun Akbar	Direktur Retail Banking	19.294.400	0,0469116

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	0	0
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	0	0
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	0	0
Dewan Komisaris			
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama / Komisaris Independen	0	0
Muhammad Zainul Majdi	Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen	0	0
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
Bangun S. Kusmulyono	Komisaris Independen	0	0
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
Suyanto	Komisaris	0	0
Masduki Baidlowi	Komisaris	0	0
Imam Budi Sarjito	Komisaris	0	0
Sutanto	Komisaris	1.500.000	0,0036470
31 Desember 2022			
DIREKSI			
Hery Gunardi	Direktur Utama	0	0
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	0	0
Ngatari	Direktur Retail Banking	16.823.500	0,0364703
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	0	0
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	0	0
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	0	0
Tribuana Tunggadewi	Direktur Sales & Distribution	0	0
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	0	0
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	0	0
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	9.500	0,0000206
DEWAN KOMISARIS			
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama / Komisaris Independen	0	0
Suyanto	Komisaris	0	0
Masduki Baidlowi	Komisaris	0	0
Imam Budi Sarjito	Komisaris	0	0
Sutanto	Komisaris	1.687.400	0,003658
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	0	0
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	0	0
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	0	0
Nizar Ali*	Komisaris	0	0

* Penetapan pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas fit and proper test

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Hassanudin	Ketua	0	0
Mohamad Hidayat	Anggota	0	0
Oni Sahroni	Anggota	0	0
Didin Hafidhuddin	Anggota	0	0

Kepemilikan Saham Berdasarkan Klasifikasi

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase kepemilikan (%)
Nasional			
Negara Republik Indonesia	1	1	0,00000
Perseroan terbatas	115	30.916.475.780	67,02140
Dana Pensiun	63	478.498.091	1,03730
Yayasan	21	278.474.275	0,60368
Reksa dana	169	406.283.741	0,88075
Asuransi	116	463.943.000	1,00575
Koperasi	7	119.900	0,00026
Perorangan Indonesia	163.417	1.825.180.416	3,95667
Bank	3	10.725.230.507	23,25038
Lembaga Pemerintah	1	2.396.800	0,00520
Sub Total	**163.913**	**45.096.602.511**	**97,76139**
Asing			
Badan Usaha Asing	129	1.029.604.896	2,23200
Perorangan Asing	87	3.052.731	0,00662
Sub Total	216	1.032.657.627	2,23862
TOTAL	**164.129**	**46.129.260.138**	**100,00%**

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SAHAM SERI A DWIWARNA	SAHAM SERI B		
NEGARA REPUBLIK INDONESIA **1 Lembar**	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk **51,47%**	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk **23,24%**	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk **15,38%**

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Struktur Korporasi

Bank Syariah Indonesia tidak memiliki perusahaan anak sehingga informasi mengenai struktur korporasi tidak dapat disajikan.

Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi

Bank Syariah Indonesia tidak memiliki entitas anak dan perusahaan asosiasi sehingga rincian mengenai hal tersebut tidak dapat disajikan.

Kronologi Pencatatan Saham

Tanggal Pelaksanaan Aksi Korporasi	Perubahan Nilai Nominal Saham	Jumlah Saham Beredar		Harga Saham	
		Sebelum Aksi Korporasi	Sesudah Aksi Korporasi	Sebelum Aksi Korporasi	Sesudah Aksi Korporasi
9 Mei 2018 (Penawaran Umum Perdana Saham)	-	7.092.762.898	9.716.113.498	500	545
2 November 2020 s/d 8 Desember 2020 (*Exercise* MSOP)	-	9.716.113.498	9.900.508.698	1.235	1.460
1 Februari 2021 (*Merger* BRIS, BSM, dan BNIS)	-	9.900.508.698	41.031.208.943	2.440	2.800
10 Mei 2021 s/d 18 Juni 2021 (*Exercise* MSOP)	-	41.031.208.943	41.128.868.743	2.310	1.765
1 November 2021 - 9 Desember 2021 (*Exercise* MSOP)	-	41.128.868.743	41.129.307.343	2.110	1.900
19 Desember 2022 – 23 Desember 2022 (*Right Issue*)	-	41.129.307.343	46.129.260.138	1.200	1.310

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Tahun Penerbitan	Nama Sukuk	Nilai Sukuk	Bagi Hasil	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat dan Lembaga Pemeringkat	
					2022	2021
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi 1 Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank BRIsyariah Tbk)	Rp1 miliar	9,5%	16 November 2023	A+ (PT Fitch Ratings Indonesia	A+ (PT Fitch Ratings Indonesia
2016	Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2016 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d.h. PT Bank Syariah Mandiri)	Rp375 Miliar	10%	22 Desember 2023	AA (PEFINDO)	AA (PEFINDO)

Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan
Jl. Jend. Sudirman No.5, RW.4, Kuningan,
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920
No Telp: (021) 50992901/31192901
Faks: (021) 52905555/52905050
Website: www.pwc.com

Periode Penugasan: 31 Desember 2022
Jasa yang diberikan: Audit atas laporan keuangan dan penerapan prosedur yang disepakati mengenai laporan hasil evaluasi kinerja dan audit PSA 62

Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal

INSTITUSI PASAR MODAL

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Indonesia

Telp. : (021) 5150515
Faks. : (021) 5254153
Website: www.idx.co.id
Jasa yang Diberikan: Jasa Pencatatan Tahunan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa efek Indonesia Tower 1 lt.5
Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia
No. Telp.: (021)5152855
Faks: (021)52991199
Website: www.ksei.co.id
Jasa yang Diberikan: Pengelolaan Administrasi Efek (Saham dan Sukuk)

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120
Telp. : (021)3508077
Faks. : (021)3508078
Website: www.datindo.com

Jasa yang Diberikan: Jasa Administrasi Saham

NOTARIS

Jose Dima Satria
Komplek Taman Gandaria No. 11 A,
Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12420
Telp: (021) 29125500

LEMBAGA PEMERINGKAT PERUSAHAAN

PT Fitch Ratings Indonesia
Prudential Tower 20th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910
Telp. : (021) 57957755
Faks. : (021) 57957750
Website: www.fitchratings.co.id

Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Panin Tower - Senayan City, 17th Floor,
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270
Indonesia
Telp. : (021) 72782380
Faks. : (021) 72782370
Website: www.pefindo.com
Jasa yang Diberikan: Pemeringkat Perusahaan

WALI AMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Gedung Grha BNI,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220
Telp. : (021) 2511946
Faks. : (021) 2511214

KONSULTAN HUKUM

Dewan Syam & Partners Law Firm
Gedung Permata Kuningan Lantai 6,
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp. : (021) 39838679
Jasa yang Diberikan:
Pada tahun 2022, Bank tidak memiliki perjanjian atau kontrak bersifat tetap yang mengacu pada periode penugasan tertentu/ berkala (retainer) dalam rangka penggunaan/pemakaian jasa Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar modal.

SSF Law Firm & Partners
Gedung Arva Lantai 3,
Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat 10330
Telp. : (021) 3905930

Suhendra & Partners
Up. Yandi Suhendra
Taman Dutamas,
Jl. Kusuma 1 Blok B1/18 Kelurahan Wijaya Kusuma,
Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat 11460
Telp. : 081901133888

James Purba & Partners
Up. James Purba
Wisma Nugraha Santosa, 8 Floor, Suit 807,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav, 7-8 Jakarta 10220
Telp. : (021) 570 3844

Website Perusahaan

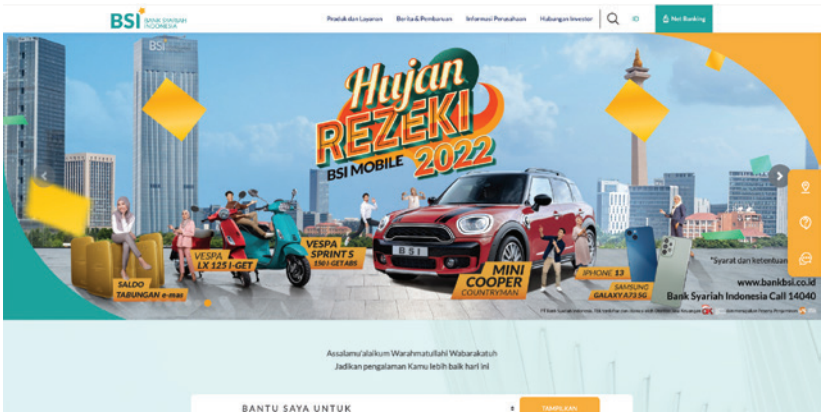

Informasi yang termuat dalam *website* PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, di antaranya ialah mengenai:

1. Informasi Umum Mengenai Emiten atau Perusahaan Publik
2. Informasi bagi pemodal atau investor
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Penyediaan informasi tersebut juga sebagai implementasi prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh informasi tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs www.bankbsi.co.id.

Informasi	Link
INFORMASI UMUM	www.bankbsi.co.id
Nama, alamat dan kontak kantor pusat/perwakilan	www.bankbsi.co.id
Riwayat singkat perusahaan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Struktur organisasi	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami
Struktur kepemilikan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/struktur-kepemilikan
Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, dan ventura bersama	PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak memiliki perusahaan anak
Struktur Grup	PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak memiliki perusahaan anak
Profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Sekretaris Perusahaan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/direksi-dewan?corporateType=Dewan%20Direksi
Nama dan alamat: Akuntan publik, pemeringkat efek, wali amanat, biro administrasi efek, dokumen Anggaran Dasar	https://www.bankbsi.co.id/company-information/profil-penunjang
INFORMASI BAGI INVESTOR	https://ir.bankbsi.co.id/
Prospektus penawaran umum	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Prospektus/Prospektus-Hijrah.pdf
Laporan Tahunan (5 tahun)	https://ir.bankbsi.co.id/annual_reports.html

Informasi	Link
Laporan Keuangan	https://ir.bankbsi.co.id/financial_reports.html
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan	https://ir.bankbsi.co.id/general_meeting.html
Ikhtisar Saham	https://ir.bankbsi.co.id/stock_chart_interactive.html
Informasi Obligasi	https://ir.bankbsi.co.id/bond_info.html
Informasi Dividen	https://ir.bankbsi.co.id/dividend.html
Informasi Aksi Korporasi	https://ir.bankbsi.co.id/corporate_action.html
Informasi Fakta Material	https://ir.bankbsi.co.id/regulatory_filings.html
INFORMASI TATA KELOLA PERUSAHAAN	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/nominasi&remunerasi https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/audit
Pengangkatan/Pemberhentian atau kekosongan Sekretaris Perusahaan serta informasi pendukungnya	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/sekretaris_perusahaan
Piagam Unit Audit Internal	https://ir.bankbsi.co.id/misc/Piagam-Audit-Intern.pdf
Isi Kode Etik	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kode_etik
Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/audit
Uraian Prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/nominasi&remunerasi
Kebijakan Manajemen Risiko	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kebijakan_management_resiko
Kebijakan Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/whistle_blowing_system
Kebijakan Anti Korupsi	https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/dokumen/kebijakan_anti_fraud
INFORMASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Lingkungan Hidup	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr
Tanggung Jawab Produk dan/atau Layanan serta Informasi Pendukungnya	https://www.bankbsi.co.id/company-information/csr

04

Analisis dan Pembahasan Manajemen

"Kinerja BSI, baik dari sisi keuangan maupun operasional terus tumbuh dengan baik, sehingga semakin memperkuat posisi Bank dalam ekosistem perbankan di Indonesia"

Tinjauan Ekonomi dan Industri

> Pertumbuhan pembiayaan BSI mencapai 22,25%, di atas pertumbuhan perbankan syariah dan nasional masing-masing sebesar 18,56% dan 10,62%.

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Kondisi perekonomian tahun 2022 terus bergerak ke arah pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Perkembangan kasus Covid-19 semakin melandai, dengan tingkat kematian yang menurun seiring dengan meningkatnya vaksinasi. Indonesia mencapai tingkat vaksinasi 160,86 dosis secara kumulatif hingga 20 Desember (per 100 orang). Sedangkan Amerika Serikat mencatatkan angka 199,44, China 243,66, dan Filipina 146,74.

Situasi Covid-19 yang semakin terkendali disusul dengan kebijakan pelonggaran mobilitas di berbagai negara. Per Desember 2022, beberapa negara sudah mencabut kewajiban *stay at home* dan membuka restriksi mobilitas internasional. Mayoritas negara, termasuk Indonesia, hanya menerapkan *screening* status vaksinasi untuk perjalanan internasional. Tiongkok menjadi negara yang paling terakhir dalam melonggarkan pembatasan mobilitasnya.

Namun di saat yang sama, konflik Rusia-Ukraina menyebabkan *supply chain disruption* yang menyebabkan meningkatnya harga komoditas, terutama di sektor energi. Ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 belum menemui kesepakatan damai setelah konflik yang telah berlangsung 10 bulan. Menurut laporan PBB, terdapat korban 6.826 jiwa dan 10.769 terluka per 18 Desember 2022.

Menyikapi konflik tersebut, Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. AS dan Uni Eropa membekukan aset keuangan Rusia di negara-negara tersebut, melarang transaksi dengan dolar AS, membekukan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan Rusia, serta membekukan kerja sama perdagangan yang meliputi larangan ekspor teknologi dan impor energi.

Rusia membalas sanksi tersebut dengan menutup jalur pipa gas Nordstream 1 yang selama ini memasok gas ke Eropa. Aksi tersebut menyebabkan negara-negara Eropa mengalami krisis energi, sehingga mendorong mereka untuk mencari sumber energi alternatif, yaitu batu bara. Permintaan yang tinggi menyebabkan harga batu bara melonjak dan mencatat rekor *all time high* di level US$457,8 per ton pada 5 September 2022.

Selain komoditas energi, dampak dari konflik Rusia-Ukraina juga menyebabkan terganggunya distribusi dan rantai pasok perdagangan dunia. Akibatnya, pasokan barang tak mampu memenuhi permintaan di pasar yang sedang dalam proses pemulihan. Kondisi tersebut mendorong lonjakan inflasi sepanjang tahun 2022.

Untuk menekan laju inflasi akibat disrupsi rantai pasok komoditas, berbagai Bank Sentral menyesuaikan kebijakan moneter suku bunga acuannya dengan kenaikan *reference rate* yang lebih agresif. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, merupakan salah satu yang paling agresif dengan meningkatkan suku bunga acuan sebesar 425 bps sepanjang tahun 2022. Kebijakan The Fed yang *hawkish* tersebut memicu *outflows* dari pasar negara berkembang akibat menguatnya nilai tukar dolar AS.

Selain itu, langkah The Fed menaikkan suku bunga acuan guna meredam lonjakan inflasi di AS dikhawatirkan memperlambat pertumbuhan ekonomi AS dan berpotensi menyebabkan resesi. Namun demikian, dampak terhadap ekonomi Indonesia diperkirakan relatif *mild* seiring fundamental ekonomi yang solid.

Potensi resesi ekonomi akibat agresivitas kenaikan suku bunga acuan di negara maju mendorong potensi gejolak di pasar keuangan global tahun 2022. Namun demikian, memasuki penghujung tahun 2022 volatilitas mulai mereda seiring turunnya inflasi di sejumlah negara. Hal tersebut juga tercermin dari nilai VIX Index yang semakin turun, sebagai isyarat pasar mulai mengarah stabil.

ANALISIS PEREKONOMIAN NASIONAL

Pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut di tengah dinamika pasar global dan domestik. Beberapa indikator ekonomi dan keuangan menunjukkan tren positif setelah kondisi pandemi Covid-19 membaik, seiring dengan tingkat vaksinasi Covid-19 selama 2022 yang memberikan hasil baik, dengan melandainya kasus harian Covid-19.

Cakupan vaksinasi di Indonesia per Desember 2022 berada pada angka 86,93% (dosis pertama), 74,46% (dosis kedua), 29,17% (dosis ketiga), dan 5,04% (dosis keempat). Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia semakin menurun sejak April 2022, dengan lonjakan tertinggi terakhir di Februari 2022. Pada penghujung tahun, yaitu di 30 Desember 2022, pemerintah pun mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Peningkatan tingkat vaksinasi yang telah mencapai target pemerintah (>70%) membolehkan mudik setelah 2 (dua) tahun dilarang. Pelonggaran tersebut meningkatkan indeks mobilitas masyarakat dengan estimasi jumlah pemudik sebanyak 30% dari total populasi Indonesia. Kebijakan itu sejalan dengan terkendalinya kondisi pandemi Covid-19 serta cakupan vaksinasi dua dosis yang telah mencapai target.

Antusiasme mudik memberikan dampak positif terhadap perputaran roda ekonomi nasional dan daerah. Bank Indonesia mencatat realisasi penarikan uang tunai sepanjang momentum Ramadhan dan libur Idul Fitri meningkat 16,6% dibandingkan realisasi tahun 2021 (YoY), dari sebesar Rp154,5 triliun menjadi Rp180,2 triliun. Pertumbuhan tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebelum pandemi, yaitu Mei 2019 yang sebesar 9,21% (YoY).

Selain itu, nominal transaksi tertinggi yang dilakukan melalui BI-FAST terjadi pada 7 (tujuh) hari sebelum Idul Fitri sebesar Rp5,93 triliun dengan volume sebanyak 1,28 juta transaksi. Aktivitas mudik mendorong perputaran uang meningkat sejalan dengan adanya pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang berdampak terhadap peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat, seperti kunjungan destinasi wisata.

Aktivitas mudik juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah khususnya dari sektor akomodasi. Tingkat keterisian hotel juga mengalami peningkatan signifikan di tahun 2022, dari 43% di tahun 2021 menjadi 82% di masa lebaran tahun 2022.

Tahun 2022 juga diwarnai dengan penyesuaian tarif PPN menjadi 11% pada awal April 2022. Namun demikian, ada beberapa daftar barang dan jasa yang bebas dari aturan tersebut guna menjaga stabilitas pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Gangguan *supply chain* global menyebabkan *windfall profit* dari kenaikan harga komoditas ekspor utama Indonesia yaitu minyak sawit dan batu bara. Hal ini mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia, sehingga neraca perdagangan mencapai surplus US$50,6 miliar dari Januari hingga November 2022. Tetapi, di saat yang sama, sektor usaha yang memiliki orientasi ekspor serta penggunaan bahan baku impor tinggi (seperti industri tekstil, alas kaki, pengolahan) berpotensi terdampak signifikan oleh perlambatan perekonomian dunia.

Tahun 2022 ikut memberikan tantangan pada nilai tukar rupiah yang melemah 9,23% terhadap dolar AS, sehingga menjadi Rp15.568 per dolar AS pada akhir tahun 2022, dari Rp14.253 di akhir 2021. Sedangkan Indeks Harga Sahan Gabungan (IHSG) pada posisi akhir tahun menguat 4,1%, dari 6.581 ke level 6.851. Fluktuasi terbesar IHSG terjadi pada triwulan dua dan tiga, dengan harga tertinggi di level 7.318 pada 13 September 2022, yang saat itu didorong oleh kenaikan sektor transportasi (2,24%).

Tekanan perekonomian juga datang dari 2 (dua) kali kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yaitu pada April dan September 2022. Penyesuaian harga tersebut dilakukan untuk menjaga anggaran subsidi BBM di dalam keseimbangan APBN. Pemerintah menyiapkan 3 (tiga) Bantuan Sosial (Bansos) untuk pengalihan subsidi BBM pada September 2022.

Kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan inflasi domestik, bersamaan dengan gangguan eksternal akibat *supply chain disruption* dan normalisasi kebijakan moneter. Inflasi yang sebesar 2,18% di Januari 2022, menjadi 5,51% pada Desember 2022. Dunia usaha juga terimbas. Sektor yang langsung merasakan dampaknya adalah transportasi, kemudian dilanjutkan dengan industri lainnya yang mengalami kenaikan biaya bahan baku.

Untuk meredam inflasi dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global, Bank Indonesia selama 2022 telah menaikkan suku bunga acuan BI Rate sebanyak 6 (enam) kali sejak Agustus 2022 dengan total kenaikan 200 bps hingga Desember 2022. Per Desember 2022, suku bunga acuan berada pada level 5,50% dengan inflasi sebesar 5,51%.

Di tengah tekanan inflasi maupun rantai pasok global, lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings kembali mempertahankan peringkat (*rating*) kredit Indonesia pada posisi BBB, dengan *outlook stable*. Afirmasi ini merupakan salah satu bentuk pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, di tengah situasi global yang mengalami peningkatan risiko dan ketidakpastian.

Selain itu, ekonomi Indonesia juga terus melanjutkan kinerja pertumbuhan positif dengan kisaran di atas 5% setiap triwulan. Hingga akhir tahun, perekonomian Indonesia tumbuh positif 5,31% (YoY).

ANALISIS INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL DAN SYARIAH

Kinerja industri perbankan sepanjang tahun 2022 menunjukkan resiliensi, yang ditunjukkan oleh fungsi intermediasi yang tetap baik dan risiko kredit yang terkendali di masa pandemi Covid-19. Total Aset perbankan menyentuh Rp11.316 triliun pada Desember 2022, atau tumbuh 9,89% YoY. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) naik Rp686 triliun, atau tumbuh 9,02% YoY sejalan dengan preferensi masyarakat yang menyimpan asetnya pada produk perbankan akibat ketidakpastian kondisi pandemi di Indonesia. Penyaluran kredit tetap tumbuh, tercermin dari kenaikan penyaluran kredit nasional sebesar Rp670 triliun atau tumbuh 11,36% YoY. Kembali meningkatnya penyaluran kredit tersebut didukung pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas yang disertai pemberian insentif oleh pemerintah dan regulator lain seperti Bank Indonesia dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sampai dengan Desember 2022, pemerintah telah menyalurkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp396,7 triliun atau 87,1% dari alokasi Rp455,62 triliun, yang sebagian di antaranya disalurkan melalui perbankan melalui skema subsidi margin serta penjaminan pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di sisi lain, tingkat kesehatan perbankan tetap terjaga sejalan dengan efisiensi dalam mendukung keberlanjutan bisnis di masa pandemi. Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada di level 25,6% pada Desember 2022, atau di atas ketentuan minimum BASEL III yaitu 10%. Di sisi lain, rasio likuiditas (AL/DPK) tetap stabil, yakni sebesar 31,2%. Sementara itu, rasio efisiensi perbankan tetap baik tercermin dari rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) sebesar 78,64% atau lebih rendah dibandingkan posisi akhir tahun 2021 yang mencapai 83,42%. Rasio kualitas pembiayaan tetap terjaga didukung dengan insentif restrukturisasi pembiayaan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa pandemi Covid-19. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) tercatat sebesar 2,4% (*gross*) atau 0,7% (*net*).

Kinerja industri perbankan yang positif di tahun 2021, tidak lepas dari dukungan perkembangan industri perbankan syariah nasional. Merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada Februari 2021 menjadi salah satu pendorong kinerja industri perbankan Syariah. Konsolidasi ketiga bank syariah anak usaha BUMN tersebut menghasilkan bank syariah yang masuk ke jajaran 10 besar bank nasional. Merger tersebut juga mengubah *landscape* industri perbankan syariah, di mana BSI menguasai 38% *marketshare* perbankan syariah nasional dengan aset sebesar Rp305,73 triliun sampai dengan akhir Desember 2022.

Total Aset perbankan syariah menyentuh level Rp802,2 triliun pada Desember 2022, atau tumbuh 15,6% YoY. Penghimpunan dana juga mencatat kinerja positif. DPK perbankan syariah naik Rp71 triliun ke level Rp619,5 triliun pada Desember 2022, atau tumbuh 12,9% YoY sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah didukung peningkatan infrastruktur dan layanan akses digitalisasi. Pangsa pasar DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan nasional tercatat menyentuh level 7,5%. Sementara dari sisi pembiayaan, penyaluran pembiayaan naik Rp84 triliun dan menyentuh level Rp505,9 triliun pada Desember 2022, atau tumbuh 19,9% YoY. Pangsa pasar pembiayaan perbankan syariah terhadap perbankan nasional tercatat sebesar 7,7%.

Tingkat kesehatan perbankan syariah terjaga dengan baik di masa pandemi Covid-19. Rasio CAR tercatat sebesar 26,28% pada Desember 2022 melebihi rata-rata industri nasional. Begitu pula halnya dengan rasio efisiensi perbankan syariah lebih baik dibandingkan nasional. Rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) tercatat sebesar 77,48% pada Desember 2022, atau lebih baik dibandingkan rasio BOPO industri perbankan nasional. Sementara itu, kualitas pembiayaan perbankan syariah juga menunjukkan kinerja yang positif. Tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross* membaik dari 2,70% di akhir 2021 menjadi 2,41% di Desember 2022 atau lebih baik dibandingkan industri perbankan nasional.

Selain itu, dukungan pemerintah melalui himbauan Kementerian BUMN serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* juga berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perbankan Syariah di tahun 2022.

ANALISIS POSISI BANK SYARIAH INDONESIA DALAM INDUSTRI PERBANKAN

Berikut rincian perbandingan kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terhadap industri perbankan syariah dan perbankan nasional per Desember 2022:

(dalam %)

Indikator	Bank Syariah Indonesia	Perbankan Syariah	Perbankan Nasional
Aset	15,24	35,72	9,89
Pembiayaan	21,26	19,93	11,36
Dana Pihak Ketiga	12,11	12,93	9,02
Ekuitas	33,95	35,72	9,35
Laba Bersih	40,68	46,43	42,89

Sumber: SPI dan SPS - Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Desember 2022

Pertumbuhan aset BSI mencapai 15,24%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan aset perbankan syariah yang sebesar 35,72%. Di sisi lain, pertumbuhan pembiayaan BSI mencapai 21,26%, di atas pertumbuhan perbankan syariah dan nasional masing-masing sebesar 19,93% dan 11,36%.

Demikian halnya dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Kinerja BSI mencapai 12,11%, di bawah pertumbuhan perbankan syariah sebesar 12,93%, namun di atas pertumbuhan perbankan nasional sebesar 9,02%. Pertumbuhan laba bersih BSI melonjak yang mencapai 40,68%, namun lebih rendah dibandingkan perbankan syariah sebesar 46,43%, dan perbankan nasional sebesar 42,89%.

Grafik Pertumbuhan Kinerja Perbankan Nasional, Perbankan Syariah dan Bank Syariah Indonesia

(dalam %)

Aset

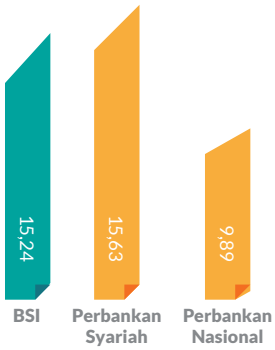

Pembiayaan

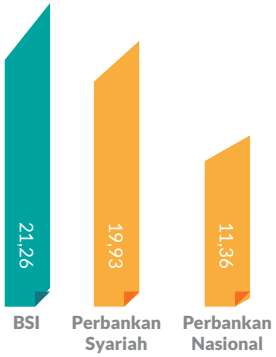

Dana Pihak Ketiga

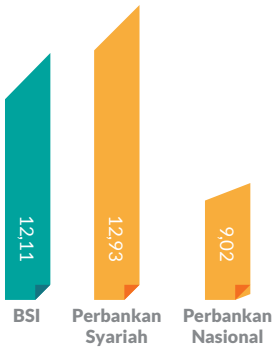

Ekuitas

Laba Bersih

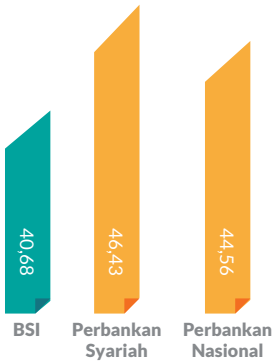

Tinjauan Kinerja per Segmen Usaha

Kinerja segmen usaha Bank pada tahun 2022 secara umum tumbuh sangat baik. Segmen usaha konsumer menjadi lini bisnis BSI dengan kenaikan laba tahun berjalan paling tinggi, yakni 52,23% YoY.

Pada tahun 2021 segmen operasi Bank disajikan ke dalam beberapa segmen yaitu segmen *Wholesale*, *Small and Medium Enterprise* (SME), Konsumer, Mikro dan Lainnya. Pada tahun 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif. Segmen operasi Bank dibagi berdasarkan beberapa segmen operasi sebagai berikut: *Wholesale Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat. Perubahan pada penyajian segmen operasi antara lain yaitu Pengelolaan dana nasabah Kementerian, Lembaga Pemerintah, Yayasan dan universitas dipindahkan ke segmen Hubungan Kelembagaan yang sebelumnya tercatat di segmen lainnya.

Penjelasan kinerja masing-masing segmen usaha tersebut dijelaskan secara rinci di bawah ini.

WHOLESALE BANKING

Segmen usaha *wholesale* melayani badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya, lembaga negara, multinational company, bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal *ventura non linkage*). Selain itu, termasuk dalam segmen ini adalah pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, pemerintah daerah, rumah sakit, perguruan tinggi negeri dan swasta, serta surat berharga.

Produk	Layanan
Pembiayaan Investasi	Pembiayaan untuk tujuan investasi tempat usaha, modal usaha atau sarana produksi lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
Pembiayaan Modal Kerja	Pembiayaan untuk keperluan modal kerja usaha dengan skema sesuai prinsip syariah.
Pembiayaan *Supply Chain*	Pembiayaan yang diberikan kepada Mitra Usaha (*supplier/buyer*/kontraktor) dari nasabah-nasabah utama BSI.
Pembiayaan Trade	Pembiayaan yang diberikan untuk keperluan Ekspor/Impor baik melalui penerbitan LC dan jaminan (Garansi Bank/SBLC).
Kustodi	Layanan penitipan efek, transaksi dan pengadministrasian berbagai efek syariah di pasar modal.
Wali Amanat	Wali Amanat adalah Layanan untuk mewakili kepentingan pemegang sukuk dalam suatu penerbitan sukuk di pasar modal syariah.

STRATEGI TAHUN 2022

1. Melakukan sinergi bisnis dengan induk melalui pemanfaatan *customer base*, *join-marketing*, dan sindikasi atau *club-deal*.
2. Pengembangan dan peningkatan value chain dengan BUMN
3. Berperan sebagai pintu masuk produk BSI kepada perusahaan BUMN dan swasta dengan sektor terpilih
4. Meningkatkan kolaborasi dengan segenap unit bisnis untuk memasarkan produk BSI dan penerapan *Customer Profitability Analysis* (CPA)
5. Meningkatkan peran sindikasi baik sebagai *arranger*, *agent*, maupun *participant*.

KINERJA

Pada tahun 2022 posisi pembiayaan segmen *wholesale* sebesar Rp57,18 triliun, meningkat 15,80% dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar Rp49,38 triliun. Rasio NPF mengalami perbaikan dari 4,83% di tahun 2021 menjadi 3,68% di tahun 2022.

Laba tahun berjalan segmen *wholesale* pada tahun 2022 mencatatkan kinerja yang positif yaitu sebesar Rp500,31 miliar. Peningkatan pembiayaan dan perbaikan kualitas pembiayaan menjadi faktor penggerak peningkatan perolehan laba. Pendapatan penyaluran dana bersih meningkat Rp577,90 miliar dari Rp941,76 miliar di tahun 2021 menjadi Rp1,52 triliun di tahun 2022.

Kinerja Segmen *Wholesale Banking*

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total Pembiayaan	57.184.185	49.380.250	7.803.935	15,80%
NPF %	3,68%	4,83%	-	-1,15%
Total DPK	14.740.953	12.807.174	1.933.780	15,10%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*	1.519.665	941.761	577.904	61,36%
Pendapatan Usaha Lainnya	260.548	170.947	89.601	52,41%
Beban Usaha	(202.283)	(134.907)	(67.376)	49,94%
Beban CKPN	(908.036)	(981.789)	(73.354)	-7,51%
Laba setelah Zakat dan Pajak	500.309	(46.806)	547.145	1168,96%

* Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Segmen usaha Hubungan Kelembagaan saat ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah Kementerian, Lembaga Pemerintah, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Rumah Sakit dan Swasta Bonafide.

Pada tahun 2022 total dana yang berhasil dihimpun yaitu sebesar 77,60 triliun. Perolehan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6,94 triliun dibandingkan perolehan tahun 2021 yang sebesar 70,66 triliun.

Produk dan layanan yang disediakan oleh segmen usaha Hubungan Kelembagaan hingga akhir tahun buku 2022, dijabarkan melalui tabel berikut.

Produk	Uraian
Giro, Deposito dan Tabungan Institusi	Produk dana pihak ketiga yang yang dapat membantu nasabah dalam melakukan transaksi *financial* perusahaan.
Giro Pemerintah	Giro untuk memenuhi kebutuhan kementerian Lembaga negara/Lembaga negara/Satuan Kerja.
Cash Management System (CMS)	Layanan *Cash Management System* yang terdiri atas *Account Payble Management*, *Account Payable Management*, *Account Receivable Management*, *Account Liquidity Management* dan *Account Administration and Information*, dimana Nasabah pengguna dapat melakukan sendiri akses secara langsung atas rekening Nasabah dan melakukan transaksi perbankan sesuai fitur BSI *Cash Management* yang tersedia melalui jaringan internet.
BSI e-Health	Aplikasi kesehatan milik vendor SIMRS yang mengkombinasikan solusi sistem rumah sakit dengan transaksi *cashless* di Rumah Sakit/ Klinik dengan dalam satu *platform*.
BSI Pembayaran Institusi (BPI)	Sistem pembayaran BSI untuk nasabah institusi dalam menerima pembayaran dari konsumen/ pelanggan/pasien melalui channel Bank

STRATEGI TAHUN 2022

1. Strategi penghimpunan dana tahun 2022 tetap mengutamakan pertumbuhan DPK organik dengan komposisi yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*) melalui pertumbuhan dana murah (CASA)
2. Fokus utama pada 2022 yaitu menurunkan *Cost of Fund* melalui ekspansi pada dana murah yakni giro dan tabungan dan mengurangi dana mahal dengan tetap menjaga likuiditas Bank agar tetap sehat sesuai ketentuan regulator
3. Meningkatkan dana nasabah institusi eksisting, dan mengurangi porsi dari dana mahal atau Deposito yang dilakukan secara bertahap, baik pada nasabah Institusi regular maupun nasabah baru sehingga akan menurunkan beban bagi hasil
4. Melakukan sinergi bisnis dengan induk melalui pemanfaatan *customer base*, *join-marketing*, dan pengembangan dan peningkatan *value chain* dengan BUMN.
5. Berperan sebagai pintu masuk produk BSI kepada perusahaan Kementerian, Lembaga Negara, BUMN dan Swasta dengan sektor terpilih.

KINERJA

Dana yang berhasil dihimpun dari segmen Hubungan Kelembagaan sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp77,37 triliun meningkat sebesar Rp6,71 triliun atau 9,49% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp70,66 triliun.

Pada tahun 2022 segmen Hubungan Kelembagaan mencatatkan pendapatan pengelolaan dana bersih sebesar Rp498,03 miliar. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp26,94 miliar. Sementara itu, beban usaha tercatat turun sebesar Rp8,4 miliar dibandingkan dengan tahun 2021.

Kinerja Segmen Hubungan Kelembagaan

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total DPK	77.370.904	70.662.382	6.708.521	9,49%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*	498.031	471.087	26.943	5,72%
Beban Usaha	(67.091)	(75.559)	(8.468)	-11,21%
Laba setelah Zakat dan Pajak	331.959	289.230	42.729	14,77%

* Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

SEGMEN RITEL

Segmen Ritel merupakan lini bisnis Bank Syariah Indonesia yang paling dominan dimana mencakup 72% *outstanding* pembiayaan yang disalurkan. Saat ini segmen ritel meliputi *Small Medium Enterprise* (SME), Mikro dan Konsumer

A. SEGMEN SME

Segmen SME melayani badan usaha swasta berbentuk badan hukum dan non badan hukum untuk tujuan produktif, pendidikan dasar dan menengah, klinik, koperasi, pola *linkage*, inti plasma, dan perorangan.

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha ini diuraikan dalam tabel berikut.

Produk	Uraian
Investasi	Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BSI untuk pemenuhan kebutuhan investasi calon nasabah, baik investasi tempat usaha, kendaraan usaha atau alat-alat kebutuhan usaha. Termasuk investasi untuk pembangunan tempat usaha dan pembangunan kebun.
Modal Kerja	Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BSI untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah, baik modal kerja rekening koran, modal kerja usaha atau modal kerja berdasarkan kontrak. Termasuk modal kerja kepada lembaga keuangan seperti koperasi dan BMT.

STRATEGI TAHUN 2022

1. Optimalisasi pembiayaan *linkage* ke sektor Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT, KSPPS, dan koperasi syariah.
2. Mengembangkan kerangka ekosistem bisnis ritel dengan model bisnis kemitraan dengan perusahaan mitra yang berfungsi sebagai *avalist* dan *off taker*.
3. Membuka Kerjasama dengan instansi pemerintah dan Laznas yang berfungsi untuk inkubator nasabah-nasabah ritel atau UMKM baru.

KINERJA

Pada tahun 2022 pembiayaan segmen SME sebesar Rp18,90 triliun meningkat 3,13% atau Rp574,02 miliar dibandingkan tahun 2021. Rasio NPF mengalami perbaikan dari 4,78% di tahun 2021 menjadi 4,57% di tahun 2022.

Laba bersih yang diperoleh dari segmen SME di tahun 2022 yaitu sebesar Rp77,63 miliar. Kinerja positif segmen usaha SME didorong oleh peningkatan pendapatan pengelolaan dana bersih sebesar Rp175,31 miliar. Pendapatan usaha lainnya juga mengalami kenaikan sebesar Rp30,69 miliar yaitu dari Rp27,87 miliar di tahun 2021 menjadi Rp58,56 miliar di tahun 2022. Sementara itu beban usaha dan beban CKPN sama-sama mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yaitu masing-masing turun sebesar Rp41.35 miliar dan Rp25,25 miliar.

Kinerja Segmen SME

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total Pembiayaan	18.904.947	18.330.923	574.024	3,13%
NPF %	4,57%	4,78%	-	-0,21%
Total DPK	5.389.831	5.243.328	146.504	2,79%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*	905.068	729.759	175.309	24,02%
Pendapatan Usaha Lainnya	58.555	27.866	30.689	110,13%
Beban Usaha	(336.414)	(377.762)	(41.349)	-10,95%
Beban CKPN	(526.431)	(551.679)	(25.249)	-4,58%
Laba setelah Zakat dan Pajak	77.631	(125.641)	203.272	161,79%

* Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

B. SEGMEN MIKRO

Segmen usaha mikro BSI hadir untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya penyaluran pembiayaan bersubsidi guna mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat. Kemudian, produk simpanan dan layanan perbankan lainnya bagi kebutuhan masing-masing nasabah.

Per 31 Desember 2022, produk-produk dan layanan yang ditawarkan oleh segmen usaha Mikro dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Produk	Uraian
BSI Usaha Mikro	Pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada nasabah individu atau badan usaha atau kelompok yang produktif dengan atau tanpa agunan dengan margin komersial (tanpa subsidi).
KUR	Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah Pembiayaan Modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yang terdiri dari KUR. (Program Subsidi Margin dari Pemerintah).
KUR Super mikro	Penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah sampai dengan Rp10 juta.
KUR Mikro	Penyaluran KUR yang diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah di atas Rp10 juta dan paling banyak Rp50 juta.

STRATEGI TAHUN 2022

1. Peningkatan kuota KUR BSI selaku penyalur program KUR.
2. Perluasan *target market* untuk *fixed income*.
3. Membina dan mengedukasi nasabah KUR dalam meningkatkan kapasitas usaha.
4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan tenaga pemasaran, seperti penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi pembiayaan.
5. Mengembangkan kerjasama pembiayaan dengan skema *trickle down*.
6. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga dan *strategic partners*.

KINERJA

Pembiayaan segmen mikro di tahun 2022 mengalami kenaikan 15,15% dari posisi tahun 2021 yang sebesar Rp16,28 triliun menjadi Rp18,74 triliun. DPK juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,63% atau meningkat Rp38,54 miliar dari posisi tahun 2021.

Laba bersih yang diperoleh segmen mikro pada tahun 2022 sebesar Rp112,06 miliar. Peningkatan beban CKPN sebesar Rp237,37 miliar pada tahun 2022 dalam rangka membentuk cadangan yang cukup untuk mengcover risiko di kemudian hari.

Kinerja Segmen Mikro

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total Pembiayaan	18.740.411	16.275.013	2.465.398	15,15%
NPF %	2,84%	3,41%	-	-0,56%
Total DPK	1.506.242	1.467.701	38.541	2,63%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*	1.091.279	1.215.937	(124.658)	-10,25%
Pendapatan Usaha Lainnya	7.247	1	7.246	-
Beban Usaha	(572.157)	(512.126)	60.031	11,72%
Beban CKPN	(380.900)	(143.533)	237.367	165,37%
Laba setelah Zakat dan Pajak	112.057	409.704	(297.647)	-72,65%

* Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

C. SEGMEN KONSUMER

Segmen usaha konsumer fokus pada tujuan konsumtif/multiguna antara lain melayani produk griya, multiguna, kendaraan, pensiunan, kartu pembiayaan, cicil emas dan gadai emas, pembiayaan program pemerintah.

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, produk dan layanan yang diberikan oleh segmen usaha konsumer seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Produk	Uraian
BSI Griya	Fasilitas pembiayaan untuk tujuan pembelian rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor, maupun pembangunan rumah dengan kondisi rumah baru, rumah *second*, atau kavling siap bangun.
BSI Oto	Fasilitas pembiayaan untuk tujuan pemilikan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.
BSI KPR Sejahtera	Fasilitas pembiayaan yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan dukungan FLPP dan disalurkan kepada MBR dalam rangka pemilikan rumah sejahtera susun.
BSI Mitraguna Berkah	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan/Lembaga negara/ Yayasan/ badan usaha lainnya baik dilakukan dalam pengajuan massal maupun perorangan.
BSI Pensiun/Pra Pensiun Berkah	Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan melalui BSI sebagai kantor bayar, atau pun pegawai ASN yang akan memasuki masa pensiun.

STRATEGI TAHUN 2022

1. Fokus target nasabah pada pegawai, PNS/ASN, BUMN terpilih, Rumah Sakit terpilih, Swasta terpilih, pensiun TASPEN dan pensiun ASABRI.
2. Memperluas *channel* pemasaran konsumer melalui *platform* digital, *developer*, maupun mitra pihak ketiga.
3. Mempercepat proses bisnis dan meningkatkan *customer solution* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
4. Memperkuat kolaborasi dengan *wholesale* dan *funding* untuk menggarap pegawai dari perusahaan atau instansi.

KINERJA

Segmen konsumer mencatatkan pertumbuhan pembiayaan tertinggi, pada tahun 2022 pembiayaan segmen konsumer mencapai Rp112,88 triliun, naik 29,29% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp87,30 triliun. Perolehan DPK juga mengalami peningkatan dari Rp144,20 triliun di tahun 2021 menjadi Rp163,56 triliun di tahun 2022.

Profitabilitas segmen konsumer juga mencatatkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 laba bersih segmen konsumer mencapai Rp3,59 triliun, naik Rp1,56 triliun dari tahun 2021 yang sebesar Rp2,04 triliun. Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi berdampak pada meningkatnya pendapatan pengelolaan dana bersih yang naik sebesar Rp1,72 triliun. Pendapatan usaha lainnya juga tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yaitu dari Rp395,36 miliar menjadi Rp620,92 miliar di tahun 2022.

Kinerja Segmen Konsumer

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total Pembiayaan	112.875.313	87.304.971	25.570.342	29,29%
NPF %	1,35%	1,38%	-	-0,03%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*	5.437.836	4.195.962	1.241.874	29,60%
Pendapatan Usaha Lainnya	325.219	26.765	298.454	1115.09%
Beban Usaha	(1.815.069)	(1.310.244)	(504.825)	38,53%
Beban CKPN	(1.205.641)	(1.014.815)	190.826	18,80%
Laba setelah Zakat dan Pajak	2.112.467	1.387.670	724.798	52.23%

* Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

D. SEGMEN DANA RITEL

Salah satu target segmen dana ritel saat ini dibagi menjadi dua fokus bisnis utama, yakni segmen *payroll* dan segmen non *payroll*. Segmen *payroll* melayani pembayaran *payroll* karyawan Kementerian atau ASN, BUMN, rumah sakit, dan swasta *targeted*. Sedangkan untuk segmen non *payroll* melayani jenis nasabah seperti himpunan pengusaha, komunitas, klinik dan koperasi.

Produk dan layanan yang disediakan oleh segmen usaha ritel deposit & *payroll solution* hingga akhir tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

Produk	Layanan
BSI Tabungan Easy Wadiah	Tabungan Rupiah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, menggunakan skema titipan tanpa bagi hasil.
BSI Tabungan Easy Mudharabah	Tabungan berakad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu "Nasabah sebagai pemilik dana memberikan keleluasaan kepada Bank sebagai pengelola Dana untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha sesuai syariah dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil"
BSI Tabungan Bisnis	Tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat memberikan kemudahan transaksi nasabah segmen wiraswasta
BSI Tabungan Payroll	BSI Tabungan *Payroll* merupakan tabungan yang dikhususkan untuk Nasabah *Payroll* dengan 4 (empat) variasi biaya pengelolaan rekening yang berbeda berdasarkan PKS BSI dengan institusi.
BSI Tabungan Valas	Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank
BSI Tabungan Haji Indonesia	Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan ibadah haji dan umrah.
BSI Tabungan Haji Muda Indonesia	Tabungan dalam bentuk Rupiah atau USD untuk perencanaan ibadah haji dan umrah bagi anak (kurang dari 17 tahun)
BSI Giro Rupiah & Valas	Sarana penyimpanan dana untuk kemudahan transaksi berakad *Wadiah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*
BSI Deposito	Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

STRATEGI TAHUN 2022:

1. Melakukan kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga dalam penyaluran *payroll* pegawai.
2. Melakukan kerja sama dengan BUMN dan Swasta *targeted* dalam penyaluran *payroll* pegawai.
3. Memberikan program khusus bagi pegawai yang berpayroll melalui BSI berupa layanan gratis transaksi.
4. Bekerja sama dengan himpunan pengusaha dalam memberikan layanan berupa tabungan bisnis.
5. Memberikan produk khusus bagi pengusaha yakni tabungan bisnis dengan keunggulan gratis transaksi BI Fast dan limit transaksi yang besar sesuai kebutuhan nasabah.
6. Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan group terkait untuk memasarkan produk dan layanan BSI sesuai target segmen payroll dan non payroll dengan memberikan total *solution* kepada nasabah.

KINERJA

Pada tahun 2022 total pendanaan segmen ritel mencapai Rp163,56 triliun. Pencapaian tersebut meningkat Rp19,36 triliun atau 13,43% dari posisi tahun 2021 yang sebesar Rp144,20 triliun. Pendapatan pengelolaan dana bersih segmen Pendanaan Ritel tercatat sebesar Rp3,51 triliun, naik Rp481,68 miliar dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp3,03 triliun.

Kinerja Segmen Dana Ritel

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Total DPK	163.560.687	144.196.915	19.363.772	13,43%
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*	3.507.775	3.026.098	481.677	15,92%
Pendapatan Usaha Lainnya	295.702	368.599	(72.897)	-19,78%
Beban Usaha	(1.883.238)	(2.509.109)	(625.871)	-24,94%
Laba setelah Zakat dan Pajak	1.479.187	647.586	831.601	128,42%

* Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

SEGMEN TREASURY BANKING & KANTOR PUSAT

Segmen Treasury Banking & Kantor Pusat melayani produk-produk di luar pembiayaan, produk simpanan dan non simpanan. Segmen Treasury terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market*, *fixed income*, dan pasar modal. Sementara Segmen Kantor Pusat terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa *service* secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

Sepanjang tahun 2022, Bank memiliki produk dan layanan dalam segmen usaha Lainnya yang mencakup:

Produk	Uraian
Transaksi Valuta Asing	1. Devisa Umum (DU)/*Telegraphic Transfer* (TT) **Akad yang digunakan *Al Sharf*** Bank Syariah Indonesia melayani transaksi pembelian/penjualan valuta asing sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tenor waktu tertentu. Transaksi *Today* untuk penyerahan pada hari yang sama, transaksi *Tomorrow (Tom)* untuk penyerahan setelah satu hari kerja dan transaksi *Spot* untuk penyerahan setelah dua hari kerja. 2. BSI Lindung Nilai Syariah **Akad yang digunakan *aqd' al-Tahaww al-basith* dan *Al sharf*** Bank Syariah Indonesia melayani transaksi penjualan/pembelian valuta asing yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. 3. Uang Kertas Asing **Akad yang digunakan *Al Sharf*** Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing (*banknotes)* baik penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah.
Transaksi Surat Berharga Syariah	Transaksi Surat Berharga Syariah (Sukuk) Melayani kebutuhan transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Transaksi Pasar Uang Syariah	1. BSI Deposito on Call (DOC) **Akad yang digunakan *Mudharabah Mutlaqah*** DOC Merupakan produk simpanan dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu minimal 1 (satu) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari kalender, dengan tingkat imbal hasil yang mengacu kepada penempatan harian di Bank Indonesia. 2. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA) 3. Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) 4. REPO Syariah 5. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) 6. Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) 7. Reksadana Syariah

STRATEGI TAHUN 2022

Pada tahun 2022, strategi yang diterapkan untuk Segmen Treasury & Kantor Pusat, antara lain:

1. Menciptakan produk alternatif yang baru agar Bank dapat menjadi "*Market Maker*" (SIPA, Ritelisasi SUKUK, DOC).
2. Inisiatif peningkatan imbal hasil (*revamping* RDPUS *underlying*, dan RDPT).
3. Pengembangan strategi pemasaran melalui sinergi dengan Segmen Wealth Management & Wholesale.
4. Pembenahan struktur organisasi.
5. Membangun kompetensi sumber daya manusia berbasis kebutuhan industri.

KINERJA

Pada tahun 2022, pendapatan pengelolaan dana bersih segmen Treasury Banking & Kantor Pusat tercatat sebesar Rp2,05 triliun. Pendapatan yang terdiri dari surat berharga dan penempatan pada Bank tersebut meningkat sebesar Rp260,85 miliar dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,79 triliun. Pendapatan usaha lainnya yang berhasil tercatat di tahun 2022 yaitu sebesar Rp2,75 triliun, meningkat 13,89% dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp2,42 triliun.

Beban usaha meningkat 29,92% dari akhir tahun buku 2021 yang sebesar Rp3,86 triliun, menjadi Rp5,02 triliun pada tahun 2022. Sementara itu Beban CKPN mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp859,43 miliar menjadi Rp727,79 miliar di tahun 2022.

Kinerja Segmen Treasury Banking dan Kantor Pusat

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Pengelolaan Dana Bersih*	2.046.055	1.785.207	260.848	14,61%
Pendapatan Usaha Lainnya	2.753.840	2.418.069	335.772	13,89%
Beban Usaha	(5.019.085)	(3.863.066)	1.156.019	29,92%
Beban CKPN	(727.789)	(859.433)	(131.644)	-15,32%
Laba setelah Zakat dan Pajak	938.445	564.864	373.581	-66,14%

* Termasuk komponen internal *transfer pricing* antar segmen operasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Tinjauan Kinerja Keuangan

BSI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,3 triliun, tumbuh 40,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank Syariah Indonesia", "BSI", "Bank") yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan Keuangan diaudit oleh KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

KINERJA ASET

Pada tahun 2022, total aset yang dibukukan oleh BSI mencapai Rp305,73 triliun, meningkat 15,24% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp265,29 triliun. Peningkatan aset tersebut, terutama didorong oleh pertumbuhan piutang dan pembiayaan bersih yang sebesar 22,31% atau Rp34,32 triliun.

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Kas	4.951.469	4.119.903	3.180.739
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	31.778.458	20.563.580	21.527.933
Giro dan penempatan pada Bank Lain-Neto	2.475.917	1.841.551	8.695.805
Investasi pada Surat Berharga-Neto	57.841.271	67.579.070	49.105.637
Tagihan Akseptasi-Neto	476.589	159.880	292.789
Piutang-Neto	120.701.979	98.336.983	86.589.188
Pinjaman *Qardh*- Neto	8.867.013	9.081.400	9.054.373
Pembiayaan *Mudharabah*-Neto	1.001.957	1.592.314	2.598.787
Pembiayaan *Musyarakah*-Neto	66.450.946	53.903.123	50.896.175
Aset yang Diperoleh Untuk *Ijarah* - Neto	1.484.573	901.565	1.509.461
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	5.654.698	4.055.953	3.397.075
Aset Pajak Tangguhan	1.675.103	1.445.324	1.109.281
Aset Lain-lain-Neto	2.367.465	1.708.435	1.624.281
JUMLAH ASET	**305.727.438**	**265.289.081**	**239.581.524**

* Disajikan kembali

Kas
Posisi kas Bank pada tahun 2022 mencapai Rp4,95 triliun. Dibandingkan dengan posisi tahun 2021, terdapat kenaikan sebesar Rp831,57 miliar. Peningkatan kas terbesar terdapat pada mata uang rupiah dengan peningkatan sebesar Rp777,19 miliar. Kas dalam valuta asing juga mengalami peningkatan sebesar Rp54,37 miliar.

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia
Jumlah giro dan penempatan pada Bank Indonesia pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp31,78 triliun, naik Rp11,21 triliun dari posisi tahun 2021 sebesar Rp20,56 triliun. Peningkatan itu terjadi pada Giro Bank Indonesia sebesar Rp8,50 triliun dan deposito berjangka dalam valuta asing sebesar Rp3,32 triliun.

Giro dan Penempatan pada Bank Lain-Neto
Pada tahun 2022, giro dan penempatan pada bank lain bersih tercatat sebesar Rp2,48 triliun, meningkat 34,82% atau Rp641 miliar dari posisi tahun 2021 sebesar Rp1,84 triliun. Peningkatan terutama pada penempatan SiPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank) sebesar Rp934 miliar dan SIMA (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank) sebesar Rp555 miliar. Sedangkan untuk penempatan pada giro bank lain turun sebesar Rp856 miliar.

Investasi pada Surat Berharga-Neto
BSI membukukan investasi surat berharga-neto pada tahun 2022 sebesar Rp57,84 triliun, turun 14,41% atau Rp9,74 triliun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp67,58 triliun. Penurunan terutama berasal dari Sukuk BI yang jatuh tempo sebesar Rp18,33 triliun. Di sisi lain, investasi pada sukuk negara dan korporasi mengalami peningkatan sebesar Rp8,59 triliun.

Tagihan Akseptasi-Neto
Tagihan akseptasi-neto yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp476,59 miliar, naik Rp316,71 miliar atau 198,09% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp159,88 miliar. Peningkatan terutama pada LC Impor SKBDN sebesar Rp312,5 miliar.

Piutang-Neto
Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat nilai piutang-neto mencapai Rp120,70 triliun, meningkat 22,74% atau Rp22,36 triliun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu senilai Rp98,34 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada penyaluran piutang pada sektor ekonomi konsumer sebesar Rp19,93 triliun dan sektor ekonomi perdagangan sebesar Rp2,30 triliun.

Pinjaman *Qardh*-Neto
Pada tahun 2022, pinjaman *qardh*-neto mengalami penurunan sebesar 2,36% atau Rp214,39 miliar, dari Rp9,08 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp8,87 triliun.

Pembiayaan *Mudharabah*-Neto
Pembiayaan *mudharabah*-neto Bank pada 2022 tercatat sebesar Rp1 triliun, turun 37,08% atau Rp590,36 miliar dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,59 triliun. Penurunan terutama pada sektor ekonomi perdagangan sebesar Rp346,14 miliar, sektor jasa usaha dan lainnya Rp245,82 miliar.

Pembiayaan *Musyarakah*-Neto
Total pembiayaan *musyarakah*-neto hingga akhir 2022 mencapai Rp66,45 triliun, meningkat 23,28% atau Rp12,55 triliun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp53,9 triliun. Adapun peningkatan penyaluran pembiayaan *musyarakah* dari sektor ekonomi konsumer sebesar Rp3,95 triliun, konstruksi Rp1,87 triliun, pertanian Rp1,63 triliun, jasa usaha Rp1,5 triliun dan sektor lainnya Rp1,34 triliun.

Aset yang Diperoleh untuk *Ijarah*-Neto
Aset Bank yang diperoleh untuk *ijarah*-neto tercatat Rp1,48 triliun. Dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp901,57 miliar, terjadi peningkatan sebesar Rp583 miliar atau 64,67%. Peningkatan aset *ijarah* terutama dari sektor mesin dan instalasi sebesar Rp397,71 miliar.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna-Neto
Total aset tetap dan aset hak guna-neto pada tahun 2022 sebesar Rp5,65 triliun, meningkat 39,42% atau Rp1,60 triliun dibandingkan tahun 2021 yang sebesarRp4,06 triliun. Peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp1,67 triliun menjadi faktor utama peningkatan aset tetap dan aset hak guna.

Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan pada tahun 2022 tercatat Rp1,68 triliun, lebih tinggi Rp229,78 miliar atau 15,90% dibandingkan tahun 2021 yang Rp1,45 triliun. Peningkatan aset pajak tangguhan terutama dari penambahan CKPN aset produktif yang terjadi selama 2022.

Aset Lain-lain-Neto
Secara kumulatif, jumlah aset lain-lain-neto pada tahun 2022 sebesar Rp2,37 triliun, lebih tinggi Rp659,03 miliar atau 38,58% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp1,71 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada biaya dibayar di muka Rp276,07 miliar dan piutang pendapatan surat berharga Rp245,42 miliar.

LIABILITAS

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, total liabilitas yang dicatat oleh Bank Syariah Indonesia sebesar Rp73,66 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp61,89 triliun, terdapat peningkatan 19,02% atau Rp11,77 triliun. Peningkatan simpanan *wadiah* sebesar Rp8,77 triliun dan simpanan dari Bank lain sebesar Rp2,10 triliun menjadi pendorong utama atas peningkatan Liabilitas yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia.

Rincian Liabilitas

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Liabilitas Segera	1.009.502	608.554	1.018.562
Bagi Hasil yang Masih Harus Dibayar	192.775	158.478	170.010
Simpanan *Wadiah*	66.012.257	57.247.890	60.403.583
Simpanan dari Bank Lain	2.218.697	115.938	806.560
Kewajiban Akseptasi	481.403	161.495	295.337
Utang Pajak	667.485	504.078	537.514
Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja	689.018	836.491	908.751
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	28.873	17.194	20.323
Liabilitas Lain-lain	2.355.781	2.236.358	1.879.721
JUMLAH LIABILITAS	**73.655.791**	**61.886.476**	**66.040.361**

* Disajikan kembali

Liabilitas Segera

Posisi liabilitas segera pada tahun 2022 sebesar Rp1,01 triliun, naik Rp400,95 miliar dari tahun sebelumnya. Peningkatan liabilitas segera antara lain terdapat pada kewajiban transaksi ATM sebesar Rp150,61 miliar, kewajiban klaim asuransi Rp107,74 miliar, kewajiban *online channel* Rp75,70 miliar dan zakat bank Rp39,85 miliar.

Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Jumlah bagi hasil yang belum dibagikan pada tahun 2022 sebesar Rp192,78 miliar, lebih tinggi Rp34,3 miliar atau 21,64% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp158,48 miliar. Peningkatan terjadi pada bagi hasil deposito sebesar Rp14,64 miliar, bagi hasil atas pinjaman yang diterima Rp12,65 miliar dan bagi hasil giro Rp7,27 miliar.

Simpanan Wadiah

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat nilai simpanan wadiah sebesar Rp66,01 triliun meningkat 15,31% atau Rp8,76 triliun dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp57,25 triliun. Peningkatan terdapat pada tabungan wadiah sebesar Rp7,57 triliun, giro escrow Rp657,73 miliar dan tabungan *payroll* Rp375,92 miliar.

Simpanan dari Bank Lain

SImpanan pada Bank lain pada tahun 2022 tercatat Rp2,22 triliun meningkat Rp2,10 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp115,94 miliar. Peningkatan terutama pada Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) sebesar Rp2,08 triliun.

Kewajiban Akseptasi

Kewajiban akseptasi pada tahun 2022 tercatat Rp481,40 miliar, lebih tinggi Rp319,91 miliar atau 198,09% dibandingkan tahun 2021 yang Rp161,49 miliar. Peningkatan terutama dari kewajiban akseptasi LC Usance Impor sebesar Rp312,49 miliar.

Utang Pajak

Pada tahun 2022 utang pajak tercatat sebesar Rp667,48 miliar atau lebih tinggi Rp163,41 miliar dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp504,01 miliar. Peningkatan terjadi pada kewajiban PPh 21 sebesar Rp79,94 miliar dan PPh 25/29 sebesar Rp73,96 miliar.

Estimasi Libilitas Imbalan Kerja

Ditahun 2022, estimasi liabilitas imbalan kerja sebesar Rp689,02 miliar turun Rp147,47 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp836,49 miliar. Penurunan estimasi liabilitas imbalan kerja antara lain dikarenakan perubahan asumsi aktuaria terkait tingkat diskonto, kenaikan gaji dan tingkat hasil investasi DPLK.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tahun 2022 sebesar Rp28,87 miliar naik Rp11,68 miliar dari posisi tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp17,19 miliar. Peningkatan terdapat pada penyisihan garansi bank sebesar Rp10,50 miliar dan penyisihan LC sebesar Rp1,18 mliar.

Liabilitas Lain-Lain

Jumlah liabilitas lain-lain pada tahun 2022 sebesar Rp2,36 triliun meningkat Rp119,42 miliar dibandingkan dengan liabilitas lain-lain pada tahun 2021 yang sebesar Rp2,24 triliun. Peningkatan terutama dari cadangan kepegawaian dan akrual biaya operasional.

DANA *SYIRKAH* TEMPORER

Dana *syirkah* temporer Bank Syariah Indonesia yang berhasil dihimpun oleh Bank ditahun 2022 mencapai Rp198,57 triliun. Perolehan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp20,18 triliun atau 11,31% dari pencapaian tahun 2021 yang sebesar Rp178,39 triliun.

Rincian Dana *Syirkah* Temporer

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Giro *Mudharabah*	22.723.088	13.281.319	5.370.452
Tabungan *Mudharabah*	72.269.706	64.538.367	59.008.934
Deposito *Mudharabah*	100.485.930	98.183.782	88.043.632
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer Bukan Bank	**195.478.724**	**176.003.468**	**152.423.018**
Dana *Syirkah* Temporer Bank	933.938	1.010.203	920.443
Surat Berharga yang Diterbitkan	1.375.000	1.375.000	1.375.000
Pembiayaan Berjangka *Mudharabah*	778.375	-	-
Jumlah Dana *Syirkah* Temporer	**198.566.037**	**178.388.671**	**151.798.018**

* Disajikan kembali

Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* tahun 2022 sebesar Rp22,72 triliun naik Rp9,44 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp13,28 triliun. Peningkatan terutama dari giro mudharabah pada pihak berelasi yang meningkat sebesar Rp12,17 triliun.

Tabungan *Mudharabah*

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat tabungan *mudharabah* sebesar Rp72,27 triliun, meningkat 11,98% atau Rp7,73 triliun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu senilai Rp64,54 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada tabungan *mudharabah* BSI Rp3,27 tirliun, peningkatan tabungan bisnis Rp2,68 triliun dan peningkatan tabungan investasi terikat Rp1,19 triliun.

Deposito *Mudharabah*

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat deposito *mudharabah* sebesar Rp100,49 triliun, meningkat 2,34% atau Rp2,30 triliun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu senilai Rp98,18 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada deposito *on call* sebesar Rp1,69 triliun dan BSI deposito ekspor Rp358,92 miliar.

Dana *Syirkah* Temporer Bank

Jumlah dana *syirkah* temporer bank pada tahun 2022 sebesar Rp933,94 miliar turun sebesar Rp76,27 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp1,01 triliun. Penurunan terutama dari deposito *mudharabah* Bank sebesar Rp134,36 miliar.

Pembiayaan Berjangka *Mudharabah*

Pada tahun 2022 Bank Syariah Indonesia mendapatkan fasilitas *line* pembiayaan sebesar Rp778,38 miliar dari PT Maybank Indonesia Tbk.

EKUITAS

Ekuitas Bank Syariah Indonesia meningkat sebesar Rp8,49 triliun dari Rp25,01 triliun di tahun 2021 menjadi Rp33,51 triliun di tahun 2022. Peningkatan terutama dari penerbitan *right issue* sebesar Rp4,94 triliun dan peningkatan saldo laba Rp2,9 triliun.

Rincian Ekuitas

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Modal Disetor	23.064.630	20.564.654	3.142.019
Tambahan Modal Disetor	(3.929.100)	(6.366.776)	-
Ekuitas *merging entities*	-	-	10.903.586
Keuntungan revaluasi aset tetap	444.530	444.530	395.725
Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	268.904	140.271	53.998
(Kerugian)/keuntungan Surat Berharga - bersih	(55.477)	22.263	-
Cadangan Umum	1.384.677	779.036	597.804
Saldo Laba	12.327.446	9.429.956	6.650.013
Tahun Lalu	8.067.264	6.468.781	5.215.525
Tahun Berjalan	4.260.182	2.961.175	1.434.488
Jumlah Ekuitas	**33.505.610**	**25.013.934**	**21.743.145**

* Disajikan kembali

KINERJA LABA-RUGI

Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Total pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* yang berhasil diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia ditahun 2022 sebesar Rp19,62 triliun, meningkat 10,19% atau Rp1,81 triliun dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp17,81 triliun. Perolehan tersebut dicapai terutama atas peningkatan pada pendapatan dari jual beli sebesar Rp1,17 triliun dan pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp408,58 miliar.

Perkembangan Laba Rugi

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank Sebagai *Mudharib*	19.622.865	17.808.432	16.929.592
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer	(4.032.169)	(4.378.807)	(5.006.667)
Hak Bagi Hasil Milik Bank	**15.590.696**	**13.429.625**	**11.922.925**
Pendapatan Usaha Lainnya	3.701.111	3.012.246	2.776.701
Beban Usaha	(9,895,336)	(8.782.773)	(7.952.814)
Beban CKPN Aset Produktif and Non Produktif-Neto	(3,748,797)	(3.551.249)	(3.620.446)
Laba Usaha	**5.647.674**	**4.107.849**	**3.126.366**
Pendapatan (Beban) Non-Operasional-Neto	8.534	(45.641)	(46.967)
Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak	**5.656.208**	**4.062.208**	**3.079.399**
Zakat	(141.405)	(101.684)	(74.202)
Beban Pajak Penghasilan	(1.254.621)	(932.319)	(817.548)
Laba Bersih	**4.260.182**	**3.028.205**	**2.187.649**
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Bersih Setelah Pajak	50.893	189.591	(36.503)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	**4.311.075**	**3.217.796**	**2.151.146**
Laba per Saham Dilusian	102.54	73,66	53,51

* Disajikan kembali

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Pada tahun 2022 Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer mengalami penurunan sebesar Rp346,64 miliar atau 7,92% dari Rp4,38 triliun di tahun 2021 menjadi Rp4,03 triliun di tahun 2022. Penurunan tersebut terutama dari penurunan atas bagi hasil Deposito *Mudharabah* sebesar Rp598,44 miliar yaitu dari Rp3,47 triliun di tahun 2021 menjadi Rp2,87 triliun di tahun 2022.

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan operasional lainnya yg berhasil diperoleh oleh Bank Syariah Indonesia di tahun 2022 sebesar Rp3,7 triliun atau meningkat Rp688,87 miliar dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya yang diperoleh di tahun 2021 sebesar Rp3,01 triliun. Peningkatan terutama pada pendapatan atas transaksi *e-channel* sebesar Rp125,1 miliar, *fee* administrasi Rp113,5 miliar dan PPOB Rp28,6 miliar.

Beban Usaha

Beban Usaha di tahun 2022 tercatat sebesar Rp9,90 triliun, meningkat 12,67% atau Rp1,11 triliun dari beban usaha di tahun 2021 sebesar Rp8,78 triliun. Peningkatan antara lain dari kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp457,17 miliar serta beban umum & administrasi sebesar Rp886,23 miliar.

Laba Bersih

Bank Syariah Indonesia tahun 2022 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,26 triliun. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 40,68% atau Rp1,23 triliun dibandingkan dengan laba bersih tahun 2021 yang sebesar Rp3,03 triliun.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan meningkat sebesar Rp1,09 triliun atau 33,98% dari Rp3,22 triliun di tahun 2021 menjadi Rp4,31 triliun di tahun 2022. Peningkatan terutama dari peningkatan laba bersih yang dicapai tahun 2022 yaitu sebesar Rp1,23 triliun.

ARUS KAS

Bank membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun buku 2022 sebesar Rp39,22 triliun, meningkat 47,77% dibandingkan tahun buku 2021 yang sebesar Rp26.54 triliun. Perubahan tersebut, antara lain didorong oleh peningkatan pada arus kas aktivitas investasi sebesar 22.59 triliun (136,13%) dan penurunan atas arus kas aktivitas operasi sebesar Rp14,81 triliun (88,71%).

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Arus Kas Aktivitas Operasi	1.885.530	16.696.794	13.444.647
Arus Kas Aktivitas Investasi	5.994.708	(16.591.024)	(12.927.114)
Arus Kas Aktivitas Pendanaan	4.798.909	(77.929)	(268.516)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**12.679.147**	**27.841**	**249.017**
Kas & Setara Kas Awal Tahun	26.542.272	26.514.431	26.265.414
Kas & Setara Kas Akhir Tahun	39.221.419	26.542.272	26.514.431

* Disajikan kembali

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun buku 2022 tercatat Rp1,89 triliun, mengalami penurunan signifikan sebesar 88,71% dibandingkan tahun buku 2021 yang sebesar Rp16,70 triliun. Peningkatan penyaluran pembiayaan yang lebih tinggi di 2022 menjadi faktor penurunan kas bersih dari aktivitas operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi hingga 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5,99 triliun meningkat sebesar 136,13% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh aktivitas perolehan Surat Berharga yang lebih kecil di bandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp26,63 triliun.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sepanjang tahun 2022 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp4,80 triliun meningkat signifikan sebesar Rp4,88 triliun dibandingkan dengan periode tahun 2021. Peningkatan ditopang dari penerbitan saham baru atau *right issue* yang terjadi di tahun 2022.

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN

Analisis Kualitas Aset Produktif

Jumlah aset produktif Bank pada tahun 2022 berhasil tercatat sebesar Rp270,83 triliun, meningkat 11,85% atau Rp28,70 triliun dari jumlah aset produktif tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp242,13 triliun. Peningkatan aset produktif terutama pada meningkatnya Pembiayaan berbasis piutang dan sewa sebesar Rp23,88 triliun dan peningkatan Pembiayaan bagi hasil sebesar Rp12,45 tiliun.

Kualitas aset produktif di tahun 2022 cukup baik, hal ini tercermin dari rasio NPF *Gross* yang mengalami perbaikan atau penurunan yaitu dari 2,93% di tahun 2021 menjadi 2,42% di tahun 2022.

Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan Bank Syariah Indonesia secara umum mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2022. Perbandingan rasio Bank Syariah Indonesia tahun 2022, 2021, dan 2020 disajikan sebagai berikut.

Perkembangan Rasio Keuangan Utama

Uraian	2022	2021	2020*
Capital Adequacy Ratio (CAR)	20,29%	22,09%	18,24%
Non Performing Financing (NPF) *gross*	2,42%	2,93%	2,88%
Non Performing Financing (NPF) *net*	0,57%	0,87%	1,12%
Return On Assets (ROA)	1,98%	1,61%	1,38%
Return On Equity (ROE)	16,84%	13,71%	11,18%
Net Imbalan (NI)	6,31%	6,04%	6,04%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,88%	80,46%	84,61%
Cost to Income Ratio (CIR)	51,01%	52,57%	53,74%
Financing to Deposit Ratio (FDR)	79,37%	73,39%	74,52%
Persentase Pelampauan BMPD	0,00%	0,51%	0,00%
Giro Wajib Minimum (GWM)			
- GWM Rupiah	8,30%	5,05%	3,12%
- GWM Valas	1,18%	1,03%	1,16%
Posisi Devisa Netto	0,57%	0,27%	4,47%

* Disajikan kembali

INFORMASI KINERJA KEUANGAN LAINNYA

Distribusi Bagi Hasil

Berikut adalah laporan distribusi bagi hasil BSI dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Laporan Distribusi Bagi Hasil

(Rp Juta)

No.	Jenis Penghimpunan Dana	2022		2021	
		Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan
		A	B	A	B
1	Liabilitas Kepada Bank Lain	505.342	3.923	710.370	5.565
2	Giro *Mudharabah*	21.156.445	164.251	12.656.974	99.152
3	Tabungan *Mudharabah*	67.774.706	526.180	61.423.876	481.183

(Rp Juta)

No.	Jenis Penghimpunan Dana	2022		2021	
		Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan dibagihasilkan
		A	B	A	B
4	Deposito *Mudharabah*	95.227.878	739.316	96.431.076	755.423
5	Surat Berharga yang diterbitkan	1.375.000	25.046	1.375.000	23.496
6	Pembiayaan yang Diterima	778.375	6.043	-	-
	Total	**186.817.746**	**1.464.759**	**172.597.296**	**1.364.819**

(Rp Juta)

No.	Jenis Penghimpunan Dana	2022		2021	
		Saldo Rata-rata	Pendapatan Diterima	Saldo Rata-rata	Pendapatan Diterima
		A	B	A	B
1	Penempatan pada Bank Lain	197.851	37	316.296	45
2	Surat Berharga yang dimiliki	58.176.123	232.171	61.252.124	89.445
3	Piutang *Murabahah*	117.533.174	1.021.453	96.680.261	892.759
4	Piutang *Istishna*	145	136	383	19
5	Piutang *Multijasa*	-	-	-	-
6	Pembiayaan Gadai	-	-	-	-
7	Pembiayaan *Mudharabah*	1.100.513	8.360	1.920.441	14.461
8	Pembiayaan *Musyarakah*	69.055.621	425.908	53.251.122	374.234
9	Pembiayaan Sewa	1.396.011	12.138	1.139.043	13.163
10	Pembiayaan Lainnya	-	-	-	-
	Total	**247.459.438**	**1.700.203**	**214.559.670**	**1.384.126**

Sumber dan Penyaluran Zakat

Pada tahun 2022 total penerimaaan zakat yang berhasil di himpun oleh Bank sebesar Rp211,72 miliar, meningkat Rp52,82 miliar dibandingkan dengan total penerimaan zakat di tahun 2021 yaitu sebesar Rp158,90 miliar. Peningkatan penerimaan perolehan Laba Bank mendorong peningkatan penerimaan zakat internal Bank.

Penyaluran zakat Bank mengalami peningkatan sebesar Rp43,16 miliar, dari total penyaluran zakat tahun 2021 sebesar Rp127,61 miliar menjadi Rp170,77 miliar di tahun 2022.

Perkembangan Sumber dan Penyaluran Zakat

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Sumber dana zakat			
Internal bank	141.405	101.684	74.202
Eksternal bank	70.317	57.218	36.491
Total Penerimaan Zakat	**211.722**	**158.902**	**110.693**
Penyaluran dana zakat			
Disalurkan ke lembaga lain	(170.771)	(127.611)	(104.962)
Kenaikan dana zakat	40.951	31.291	5.731
Saldo awal dana zakat	104.202	72.911	67.180
Saldo Akhir Dana Zakat	**145.153**	**104.202**	**72.911**

* Disajikan kembali

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Sumber dana kebajikan Bank terdiri dari infak dan sedekah, denda, pendapatan non-halal dan sumbangan atau hibah. Hingga 31 Desember 2022, sumber dana kebajikan tercatat sebesar Rp89,90 miliar, naik 23,82% dari posisi yang sama tahun 2021 yakni sebesar Rp72,61 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya penerimaan atas infak dan sedekah sebesar Rp23,57 miliar.

Per 31 Desember 2022, Bank menggunakan dana kebajikan yang direalisasikan dalam bentuk sumbangan sebesar Rp108,83 miliar, meningkat 82,82% dari realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp59,53 miliar.

Sementara itu, saldo awal dana kebajikan tahun 2022 sebesar Rp25,98 miliar. Dengan demikian, saldo akhir dana kebajikan Bank pada 2022 yaitu sebesar Rp7,05 miliar, turun sebesar 72,87% dari posisi tahun sebelumnya yaitu Rp25,98 miliar.

Perkembangan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021	2020*
Saldo awal dana kebajikan	25.977	12.900	35.739
Penerimaan dana kebajikan			
Infak dan sedekah	73.857	50.280	35.816
Denda	12.877	14.329	10.838
Penerimaan non halal	3.168	7.898	6.798
Lainnya	-	99	516
Total Penerimaan	**89.902**	**72.606**	**53.968**
Penggunaan dana kebajikan			
Dana kebajikan produktif			
Sumbangan	(108.831)	(59.529)	(76.807)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	-
Total Penggunaan	**(108.831)**	**(59.529)**	**76.807**
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan	(18.929)	13.077	(22.839)
Saldo akhir dana kebajikan	7.048	25.977	12.900

* Disajikan kembali

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Bank Syariah Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor dengan melakukan pembayaran pokok pinjaman secara tepat waktu. Kemampuan Bank Syariah Indonesia dalam memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, diukur melalui beberapa rasio, antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Berikut ini adalah rasio keuangan perbankan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas Bank.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Likuiditas Bank dipengaruhi oleh struktur pembiayaan, likuiditas aset, kewajiban dengan pihak ketiga, dan komitmen pembiayaan kepada debitur. Rasio Pembiayaan terhadap Pendanaan (*Financing to Deposit Ratio* - FDR) Bank tahun 2021 mencapai 79,37% mengalami peningkatan 5,98% jika dibandingkan dengan rasio FDR tahun 2021 yang mencapai 73,39%. Peningkatan FDR ini sejalan dengan peningkatan Laba Operasional Bank sebesar 22,68% yang juga menambah kemampuan likuiditas Bank.

Perkembangan Likuiditas Bank

Rasio	2022	2021	2020*
Financing to Deposit Ratio (FDR)	79,37%	73,39%	74,52%

* Disajikan kembali

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Bank mengukur solvabilitas melalui rasio kecukupan permodalan bank. Bank memastikan kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* - CAR).

Perkembangan Solvabilitas Bank

Rasio	2022	2021	2020*
Capital Adequacy Ratio (CAR)	20,29%	22,09%	18,24%

* Disajikan kembali

Pada tahun 2022, Rasio Kecukupan Modal Bank mencapai 20,29%, menurun 1,8% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 22,09%. Penerbitan saham baru atau *right issue* dan peningkatan perolehan laba mendorong peningkatan modal bank. Namun disisi lain perhitungan KPMM di tahun 2022 telah memperhitungkan ATMR operasional sebesar Rp33,12 triliun sedangkan perhitungan KPMM ditahun 2021 belum memperhitungkan ATMR operasional. Hal tersebut sesuai dengan SEOJK/13/SEOJK.03/2015, sebagai bank hasil penggabungan tidak di wajibkan untuk menghitung ATMR Operasional sampai dengan akhir bulan Desember tahun penggabungan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014, Rasio Kecukupan Modal Minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank yang ditetapkan OJK adalah sebesar 9,95%. Dengan rasio kecukupan modal Bank Syariah Indonesia berada pada tingkat 20,29%, struktur permodalan Bank memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum OJK dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan OJK. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah mengelola dengan baik modal Bank dan memiliki kecukupan modal untuk melindungi dari risiko solvabilitas.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek yang diterbitkan Bank Syariah Indonesia yaitu Sukuk Subordinated *Mudharabah* 2016. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut. Sukuk Subordinated *Mudharabah* yang diterbitkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, Bank Syariah Indonesia menggunakan Fitch Ratings Indonesia (Fitch) dan Pefindo sebagai lembaga pemeringkat.

Perkembangan Kemampuan Membayar Utang dari Efek-efek yang Diterbitkan

Keterangan	Peringkat		Pemeringkat	
	2022	2021	2022	2021
Sukuk Subordinated Mudharabah BRIS 2016	A+(idn)	A+(idn)	Fitch	Fitch
Sukuk Subordinated Mudharabah BSM 2016	idAA(sy)	idAA(sy)	Pefindo	Pefindo

Rentabilitas Bank

Rentabilitas Bank Syariah Indonesia diukur melalui rasio-rasio berikut:

Perkembangan Rasio Rentabilitas Bank

Rasio	2022	2021	2020*
Return on Assets (ROA)	1,98%	1,61%	1,38%
Return on Equity (ROE)	16,84%	13,71%	11,18%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,88%	80,46%	84,61%

* Disajikan kembali

Pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mencatat rasio *Return on Asset* sebesar 1,98%, naik 0,37% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,61%. Rasio *Return on Equity* juga mengalami kenaikan sebesar 3,13% dari 13,71% di tahun 2021 menjadi 16,84% di tahun 2022. Selain itu rasio BOPO mengalami perbaikan yaitu turun sebesar 4,58% dari 80,46% di tahun 2021 menjadi 75,88% di tahun 2022.

Perkembangan Tingkat Kolektibilitas

Perhitungan rasio pembiayaan bermasalah Bank pada tahun 2022 dan 2021 mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio	2022	2021	Perubahan
NPF-*Gross*	2,42%	2,93%	-0,51%
NPF-*Net*	0,57%	0,87%	-0,30%

Rasio pembiayaan bermasalah Bank secara *gross* (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2022 sebesar 2,42%, mengalami perbaikan sebesar 0,51% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 2,93%, sedangkan rasio pembiayaan bermasalah secara *net* pada tahun 2022 sebesar 0,57%, turun 0,3% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 0,87%. Kolektibilitas pembiayaan dapat dilihat dari kelancaran pembayaran pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang telah disalurkan beserta klasifikasi kolektibilitasnya disajikan sebagai berikut.

Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas Tahun 2022

(Rp Juta)

2022						
Uraian	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
RUPIAH						
Piutang *Murabahah*	119.929.638	1.998.740	826.383	536.273	1.458.670	124.749.704
Piutang *Istishna*	129	3	-	-	-	132
Piutang *Qardh*	7.686.668	61.296	13.450	26.367	269.866	8.057.647
Pembiayaan *Mudharabah*	1.011.721	10.208	685	1.363	17.420	1.041.397
Pembiayaan *Musyarakah*	66.067.971	996.149	493.174	128.723	795.146	68.481.163
Ijarah	1.413.813	15.196	7.357	3.769	57.716	1.497.851
VALAS						
Piutang *Murabahah*	-	123.652	-	-	-	123.652
Piutang *Istishna*	-	-	-	-	-	-
Piutang *Qardh*	1.643.962	-	-	-	-	1.643.962
Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan *Musyarakah*	1.720.815	-	388.533	-	-	2.109.348
Ijarah	-	-	-	-	-	-
TOTAL PEMBIAYAAN	**199.474.717**	**3.205.244**	**1.729.582**	**696.495**	**2.598.818**	**207.704.856**
CKPN	4.361.431	1.000.834	1.034.974	336.701	2.464.448	9.198.387
PEMBIAYAAN BERSIH	**195.113.286**	**2.204.410**	**694.608**	**359.794**	**134.369**	**198.506.467**

Tingkat Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas Tahun 2021

(Rp Juta)

2021						
Uraian	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
RUPIAH						
Piutang *Murabahah*	97.075.510	1.859.833	934.838	516.328	1.167.904	101.554.413
Piutang *Istishna*	321	38	-	-	-	359
Piutang *Qardh*	7.605.773	33.933	20.848	252.583	37.980	7.951.117
Pembiayaan *Mudharabah*	1.606.868	234	3.864	71	17.400	1.628.437
Pembiayaan *Musyarakah*	51.938.945	999.572	514.631	176.177	747.751	54.377.076
Ijarah	741.483	24.361	192.959	7.227	35.537	1.001.567
VALAS						
Piutang *Murabahah*	-	131.147	-	-	-	131.147
Piutang *Istishna*	-	-	-	-	-	-
Piutang *Qardh*	1.468.114	-	-	-	-	1.468.114
Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan *Musyarakah*	2.781.861	-	164.192	231.307	-	3.177.360
Ijarah	1.568	-	-	-	-	1.568
TOTAL PEMBIAYAAN	**163.220.443**	**3.049.118**	**1.831.332**	**1.183.693**	**2.006.572**	**171.291.157**
CKPN	3.352.529	587.401	949.719	748.371	1.837,754	7.475.774
PEMBIAYAAN BERSIH	**159.867.914**	**2.461.717**	**881.613**	**435.322**	**168.818**	**163.815.383**

Pertumbuhan Kolektabilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas

(Rp Juta)

Pertumbuhan						
Uraian	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
RUPIAH						
Piutang *Murabahah*	22.854.128	138.907	(108.455)	19.945	290.766	23.195.291
Piutang *Istishna*	(192)	(35)	-	-	-	(227)
Piutang *Qardh*	80.895	27.363	(7.398)	(226.216)	231.886	106.530
Pembiayaan *Mudharabah*	(595.147)	9.974	(3.179)	1.292	20	(587.040)
Pembiayaan *Musyarakah*	14.125.026	(3.423)	(21.456)	(47.454)	47.395	14.104.087
Ijarah	672.330	(9.165)	(185.602)	(3.458)	22.179	496.284
VALAS						
Piutang *Murabahah*	-	(7.495)	-	-	-	(7.495)
Piutang *Istishna*	-	-	-	-	-	-
Piutang *Qardh*	175.848	-	-	-	-	175.848
Pembiayaan *Mudharabah*	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan *Musyarakah*	(1.061.046)	-	224.341	(231.307)	-	(1.068.012)
Ijarah	(1.568)	-	-	-	-	(1.568)
TOTAL PEMBIAYAAN	**36.254.274**	**156.126**	**(101.750)**	**(487.198)**	**592.246**	**36.413.699**
CKPN	3.352.529	587.401	949.719	748.371	1.837.754	7.475.774
PEMBIAYAAN BERSIH	**32.901.745**	**(431.275)**	**(1.051.468)**	**(1.235.569)**	**(1.245.508)**	**28.937.925**

PERMODALAN

Kebijakan dan Alasan Pemilikan Kebijakan

Pengelolaan permodalan yang dilakukan Bank bertujuan untuk melindungi kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan demikian, Bank dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Rasio kecukupan modal – risiko kredit, operasional dan pasar mencapai 20,29%, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 22,09%. Rasio kecukupan modal Bank pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 9,95% sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 dengan Rasio Kecukupan Modal Minimum dikaitkan dengan profil risiko Bank.

Perkembangan Struktur Modal

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

	Uraian	2022	2021
I	Komponen Modal		
	A. Modal Inti *(Tier 1)*	31.232.293	23.173.019
	1.1 Modal disetor	22.923.383	20.423.407
	1.2 Cadangan Tambahan Modal:	10.242.699	4.379.632
	1.2.1 Faktor Penambah	17.608.767	11.690.223
	Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuanganyang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	22.263
	Saldo surplus revaluasi aset tetap	444.530	444.530
	Agio saham biasa	3.381.491	943.815
	Cadangan Umum	1.384.677	779.036
	Laba ditahan awal tahun setelah pajak	8.067.264	6.401.751
	Laba tahun berjalan setelah pajak (100%)	4.260.182	3.028.205
	Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham	70.623	70.623
	1.2.2 Faktor Pengurang	7.366.068	7.310.591
	Cadangan Tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)	7.310.591	7.310.591
	1.3 Pendapatan Komprehensif lainnya: potensi kerugian	55.477	-
	1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	1.933.789	1.630.020
	B. Modal Pelengkap (*Tier* 2)	1.877.656	1.949.750
	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier* 2	252.083	527.083
	Agio/Disagio	-	-
	Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1.625.573	1.422.667
	Cadangan tujuan	-	-
II	Jumlah Modal Inti, Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan	33.109.949	25.122.769
III	Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	129.730.824	113.643.146
IV	Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	33.120.795	-
V	Aset Tertimbang Menurut Risiko Pasar	306.184	103.913
VI	Jumlah Risiko - Aset Tertimbang	163.157.803	113.747.059
VII	Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit	25,52%	22,11%
VIII	Rasio Kecukupan Modal - Risiko Kredit dan Pasar	25,46%	22,09%
IX	Rasio Kecukupan Modal Minimum	20,29%	22,09%

Rincian Struktur Modal

Total modal Bank Syariah Indonesia pada 2022 meningkat Rp7,99 triliun (31,79%) dibandingkan dengan total modal pada 2021 sebesar Rp25,12 triliun menjadi Rp33,11 triliun di 2022. Peningkatan terbesar terdapat pada peningkatan modal inti sebesar Rp8,06 triliun. Peningkatan modal inti ditopang oleh penerbitan *right issue* sebesar Rp4,9 triliun dan peningkatan saldo laba sebesar Rp2,9 triliun.

Selain itu pada perhitungan KPMM di tahun 2022 telah memperhitungkan ATMR operasional sebesar Rp33,12 triliun. Sedangkan perhitungan KPMM ditahun 2021 belum memperhitungkan ATMR operasional. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015, sebagai bank hasil penggabungan tidak di wajibkan untuk menghitung ATMR Operasional sampai dengan akhir bulan Desember tahun penggabungan. Bank Syariah Indonesia memperhitungkan ATMR Operasional dimulai per Maret 2022.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan akhir tahun 2022, BSI tidak memiliki ikatan yang material terkait investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2022, realisasi investasi barang modal Bank sebesar Rp2,04 triliun. Dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar Rp787,5 miliar, realisasi tersebut lebih tinggi 159,27%.

Tujuan Investasi

Untuk mendukung dan menunjang aktivitas operasional kegiatan Bank secara menyeluruh.

Realisasi Investasi Barang Modal

(Rp Juta)

Jenis Investasi	2022	2021
Tanah	724.673	-
Bangunan	327.544	17.577
Instalasi	22.062	23.883
Kendaraan Bermotor	5.304	2.799
Investasi Kantor	260.487	334.699
Renovasi atas Aset Sewa	27.861	11.268
Aset dalam Penyelesaian	673.866	397.278
Total	**2.041.797**	**787.504**

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

Bank Syariah Indonesia tidak memiliki informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank dan risiko usaha di masa yang akan datang.

PROSPEK USAHA

Sepanjang tahun 2022, Bank Syariah Indonesia mampu menunjukkan perkembangan kinerja yang baik, seperti ditandai dengan pertumbuhan bisnis yang sehat dan *sustain* dengan kualitas yang terjaga. Dengan demikian, BSI mampu menghasilkan profitabilitas yang baik. Di akhir tahun 2022, BSI juga telah merampungkan proses *right issue* untuk meningkatkan permodalan.

Sedangkan untuk tahun 2023, indikator makroekonomi diprediksikan cukup *challenging* dengan adanya potensi resesi global yang memicu kenaikan suku bunga. Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi BSI agar tetap tumbuh positif dan mampu memberikan solusi kepada nasabah/masyarakat dengan menjadi mitra finansial, mitra sosial, dan mitra spiritual. Dengan potensi pasar yang luas dan kapabilitas yang dimiliki, BSI senantiasa berusaha untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang modern, lengkap dan universal kepada nasabah.

BSI telah memiliki performa yang teruji di tahun 2022 dengan tercapainya berbagai indikator keuangan dan aksi korporasi. Karena itu, Bank memiliki peluang untuk terus tumbuh dengan melihat berbagai peluang antara lain:

1. Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industri halal.
2. Optimalisasi potensi dan peluang pengembangan industri pada ekosistem Syariah baik di tingkat global maupun nasional terus dilakukan seiring meningkatnya halal *awareness*.
3. *Positioning* BSI di industri perbankan Syariah yang kuat.
4. Dengan posisi sebagai Bank Syariah terbesar, BSI berpotensi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Industri perbankan nasional.
5. Dalam rangka mewujudkan misi BSI untuk memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia dan melayani lebih dari 40 juta nasabah, maka BSI akan menjadi *Sharia Integrated Financial Services*.
6. BSI memiliki likuiditas yang relatif baik dan longgar. Hal ini tercermin dari posisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada level 81,45% pada bulan September 2022.
7. BSI senantiasa untuk memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk yang telah berlaku saat ini dan akan tetap dilanjutkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional BSI.

Berdasarkan asumsi tersebut dan adanya berbagai peluang, Bank Syariah Indonesia optimis untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, BSI memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini didasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Bank, yaitu:

1. Memiliki jaringan kantor dan unit kerja yang luas
2. Merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset
3. Memiliki produk dan jasa layanan keuangan yang berbasis Syariah untuk mendukung peningkatan halal awareness.
4. Kualitas *booking* pembiayaan yang baik, dengan disiplin pada *Risk Acceptance Criteria* serta proses *underwriting* yang baik dan *monitoring* yang intensif.
5. Struktur permodalan yang kokoh dengan biaya dana yang murah.
6. Memiliki likuiditas yang terjaga dengan baik.
7. Mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam memperkuat industri keuangan syariah.
8. Memiliki dukungan kuat dari pemegang saham dan sinergi dengan Bank Induk.
9. Memiliki jaringan di pasar global.
10. Memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima baik dari dalam dan luar negeri.
11. Mempunyai komitmen organisasi untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
12. Memiliki komitmen untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme seluruh pegawai.
13. Memiliki struktur demografi kepegawaian yang didominasi pegawai berusia muda dan memiliki potensi untuk dikembangkan.
14. Berpengalaman di bidang ekosistem halal antara lain haji, umroh, pesantren, pendidikan Islam, masjid, dan zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf).

Berdasarkan peluang-peluang tersebut, BSI telah menyusun target jangka pendek tahun 2023 dan target jangka menengah tahun 2024-2025, yang diurai sebagai berikut:

STRATEGI BSI 2023-2025

5 Fokus strategi Bank BSI 2023-2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan *Sustain*
   BSI akan terus menjalankan strategi yang terbukti memberikan nilai tambah kepada kinerja perusahaan di tahun 2022 yaitu mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan *sustain*. BSI juga memperkuat pendanaan dengan meningkatkan *customer base*. Selain itu, BSI akan meningkatkan *Fee Based Income* melalui peningkatan bisnis pada *e-channel*.
2. Peningkatan Produktivitas
   Untuk meningkatkan produktivitas, BSI akan melakukan perbaikan proses bisnis, penataan jaringan khususnya jaringan kantor yang masih berdekatan (*overlapping*), pemerataan sebaran lokasi (*coverage*), dan evaluasi kantor berkinerja rendah.

3. Peningkatan *Product Holding Ratio*
   BSI akan memberikan solusi *financial* syariah yang menyeluruh melalui berbagai produk dan jasa dengan meningkatkan jumlah kepemilikan produk (*penetration rate*) terhadap nasabah eksisting untuk memperkuat *engagement* nasabah terhadap BSI melalui data *analytic*.
4. Digitalisasi Bisnis
   BSI akan meningkatkan layanan bisnis secara digital dengan melakukan digitalisasi *business process*, melakukan *shifting* transaksi cabang ke digital, dan peningkatan *user* aktif *mobile banking*.
5. Peningkatan Penetrasi *Islamic Ecosystem*
   BSI akan mempercepat pertumbuhan bisnis *Islamic Ecosystem* yang mencakup ZISWAF, ekonomi Masjid, Rumah Sakit, Pesantren dan Pendidikan Islam, serta bisnis Haji dan Umrah melalui pengembangan *platform* dan *solution* yang inovatif serta strategi akuisisi yang efektif.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI SERTA PROYEKSI 1 (SATU) TAHUN MENDATANG

Target dan Realisasi

Secara keseluruhan, kinerja Bank melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Total aset BSI pada tahun 2022 sebesar Rp305,7 triliun, atau sebesar 101,81% dari target sebesar Rp300,3 triliun.

Kemudian, realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) tahun 2022 sebesar Rp261,5 triliun atau mencapai 100,81% dari target yang ditentukan sebesar Rp259,4 triliun. Begitu juga dengan pencapaian pembiayaan yang terealisasi 108,95% atau sebesar Rp207,7 triliun terhadap target 2022 yang sebesar Rp190,6 triliun.

BSI membukukan pendapatan operasional tahun 2022 sebesar Rp19,3 triliun, atau sebesar 104,32% terhadap target 2022 yang sebesar Rp18,5 triliun. Sedangkan laba usaha Bank pada tahun 2022 Rp4,3 triliun, atau sebesar 108,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp3,9 triliun.

Untuk modal, BSI menargetkan pada tahun 2022 sebesar Rp33,3 triliun. Adapun realisasinya Rp33,5 triliun atau 100,61% dari target.

Tabel Perbandingan Target & Realisasi 2022

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	Pencapaian (%)
Total Aset	300.306.730	305.727.438	101,81%
Dana Pihak Ketiga	259.400.000	261.490.981	100,81%
Pembiayaan	190.647.058	207.704.856	108,95%
Pendapatan	18.481.380	19.280.083	104,32%
Laba Usaha	3.917.444	4.260.182	108,75%
Modal	33.304.107	33.505.611	100,61%

Proyeksi Tahun Buku 2023

Mengacu pada realisasi kinerja tahun 2022 serta mempertimbangkan kondisi yang akan berkembang pada tahun 2023, Bank memproyeksikan target usaha seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Proyeksi 2023 & Realisasi 2022

Uraian	Proyeksi 2023	Realisasi 2022
NIM	6,03% - 6,06%	6,31%
NPF *Gross*	2,25% - 2,35%	2,42%
Cash Coverage	185% - 190%	183,12%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	19,50% - 20,50%	20,29%

Kebijakan Dividen
Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Perbankan, serta peraturan Bursa Efek. Pembayaran dividen tunai bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah kinerja keuangan Perseroan, seperti laba ditahan, kinerja operasi, arus kas, prospek usaha dan faktor lainnya.

Di masa yang akan datang, Perseroan terus berupaya untuk dapat memberikan kinerja yang memuaskan sesuai target dan visi Perseroan, agar dapat memberikan nilai tambah kepada Pemegang Saham berupa peningkatan dividen.

ASPEK PEMASARAN

Strategi Pemasaran

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pasca *merger* dari tiga bank syariah terbesar di Tanah Air, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRIsyariah, menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Di tahun ini, Bank memperkuat kehadirannya untuk menjadi bank syariah pilihan utama masyarakat Indonesia, berdampingan dengan bank umum lainnya.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia mudah ditemui masyarakat, baik kantor cabang, *event offline* dan *online*, materi promosi dan iklan, aplikasi digital serta kegiatan lain. Melalui upaya ini, diharapkan dapat mendekatkan Bank dengan masyarakat dan sekaligus menjadi bagian sebagai nasabah.

Dalam strategi pemasaran tahun 2022, Bank Syariah Indonesia melanjutkan pemantapan *awareness* terhadap produk dan layanannya. Untuk maksud tersebut, Bank melakukan sejumlah strategi pemasaran dengan objektif mendukung pertumbuhan bisnis, yaitu:
1. Meningkatkan edukasi literasi perbankan syariah
2. Meningkatkan *awareness* terhadap produk BSI
3. Meningkatkan *interest* terhadap produk BSI

Fokus strategi di tahun 2022 juga tetap dilaksanakan sebagai bentuk keberlanjutan dari strategi tahun 2021, yaitu melalui 5 (lima) pilar berikut:
1. *Mapping Consumer*
   Mapping Consumer dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *Target Business* dan *Target Audience*.
   - Target Business merupakan segmen nasabah yang diharapkan bisa menghasilkan kontribusi *margin* lebih tinggi seperti: ASN, Pegawai BUMN, Pensiunan, Ekosistem Rumah Sakit, Pelaku UMKM, dan Professional.
   - *Target audience* merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama komunikasi, yaitu milenial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebutkan, penduduk Indonesia pada generasi milenial (usia 24–39 tahun) berjumlah sekitar 68,9 juta orang. Sementara generasi Z (8–23 tahun) mencapai 75,4 juta orang. Hal ini menjadikan generasi milenial sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan.

   Pemetaan nasabah di atas diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi konten dan saluran komunikasi yang tepat.

2. *Mapping Product Champion*
   Bank Syariah Indonesia melakukan strategi pemasaran dengan membuat pemetaan produk unggulan (*champion*), yaitu memilih beberapa produk yang dijadikan '*hero product*'.

   Pemilihan '*hero product*' menyesuaikan dengan target pertumbuhan bisnis. Di tahun kedua, Bank Syariah Indonesia memiliki target untuk peningkatan *Fee Based Income* (FBI) dan juga peningkatan pembiayaan Syariah. Berikut adalah '*hero product*' yang menjadi bagian fokus strategi pemasaran di tahun 2022:
   - BSI Mobile
   - BSI Gadai Emas
   - BSI Griya
   - BSI OTO
   - BSI Mitraguna Berkah
   - BSI Hasanah Card

3. *Integrated Marketing Communications*
   Integrated Marketing Communications dilakukan berdasarkan strategi pemetaan nasabah dan pemetaan produk unggulan (*champion*). Kampanye '*hero product*' dilakukan sesuai dengan *target audience* maupun target bisnis yang sudah ditetapkan.

   Sebagai contoh, untuk produk BSI Mobile dan BSI Griya Simuda dengan *target audience* milenial, dilakukan serangkaian aktivitas promosi, mulai dari *Above The Line* (ATL) melalui media televisi, koran/majalah, *cinema*/bioskop, videotron/OOH, kemudian *Below The Line* (BTL) melalui *online event* (webinar, IG *Live*) dan *offline event* (*open booth* di *mall* dan *sponsorship event*), serta didukung dengan kegiatan *digital marketing* (*digital ads*, kerja sama dengan KOL dan *publisher*).

Sementara produk BSI Mitraguna Berkah yang memiliki target bisnis lebih ke ASN/Pegawai BUMN, Bank melakukan aktivitas promosi dengan kunjungan langsung ke nasabah ataupun ke satuan kerja (satker) perusahaan terkait, pelaksanaan event mini expo, webinar dengan tema yang berguna bagi pegawai.

4. *Tactical Program*
   Selain meningkatkan *awareness* dan *interest* terhadap produk BSI, salah satu tujuan pemasaran adalah ikut meningkatkan literasi perbankan syariah. Selama tahun 2022, penerapan strateginya melalui berbagai jenis kegiatan. Selain itu, kampanye produk dan program dilaksanakan secara masif melalui berbagai jenis kegiatan.

   Adapun *tactical program* yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu program *talkshow* HarMoney Life Ramadhan Season, BSI Mobile – Kebaikan Dalam Genggaman, Variety Show – Menabung Pahala Kebaikan, Lapor, Tadz, *Sponsorhip* Piala Dunia, Sponsorship AFF Cup, Sponsorship SUCI Grand Final X, BSI UMKM Center, Promo MIlad Serba Satu, Bulan Inklusi Keuangan, Campaign program Gadai Emas dan Hujan Emas,

5. *Event* untuk Akusisi Nasabah Baru
   Dalam rangka memaksimalkan akuisisi nasabah baru, Bank Syariah Indonesia melaksanakan serangkaian event yang terbagi dalam beberapa kategori:
   a. *Signature Event*
      Merupakan event besar yang dilaksanakan selain untuk meningkatkan awareness Bank Syariah Indonesia secara luas, juga untuk akuisisi nasabah baru melalui berbagai event besar. Contoh signature event yang dilaksnakan BSI di tahun 2022 adalah Live With BSI Expo di Palembang, Jakarta dan Surabaya serta Talenta Wirausaha BSI.
   b. *Reguler Event*
      Merupakan event kategori menengah yang dilaksanakan di lebih banyak tempat untuk memperbesar akuisisi nasabah baru. Contoh reguler event adalah: Life With BSI Expo di Lhokseumawe, Makassar dan Jember, keikutsertaan BSI dalam GIIAS, Otoshow dan REI Expo.
   c. *Mini Event*
      Merupakan event kategori kecil yang dilakukan di instansi-instansi yang teleh bekerja sama dengan BSI. Contoh event ini adalah open table di kantor KPK.

Pangsa Pasar

Bank Syariah Indonesia secara khusus menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan syariah dan perbankan nasional di Indonesia dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut, antara lain dapat dilihat berdasarkan aset, pembiayaan, pendanaan/Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia terhadap Perbankan Syariah

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Pangsa Pasar Perbankan Syariah	Uraian	2022	2021	Pertumbuhan
Aset	Bank Syariah Indonesia	265.289	305.727	15,24%
	Perbankan Syariah	693.795	802.256	15,63%
	Pangsa Pasar	**38,24%**	**38,11%**	
Pembiayaan	Bank Syariah Indonesia	171.291	207.705	21,26%
	Perbankan Syariah	421.862	505.938	19,93%
	Pangsa Pasar	**40,60%**	**41,05%**	
Pendanaan/DPK	Bank Syariah Indonesia	233.251	261.491	12,11%
	Perbankan Syariah	548.584	619.509	12,93%
	Pangsa Pasar	**42,52%**	**42,21%**	

Sumber: SPI dan SPS - Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Desember 2022

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki penguasaan pangsa pasar Bank Syariah Indonesia Desember 2022 mencapai 37,77% sedikit mengalami penurunan sebesar 13bps dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 38,24%. Meskipun sedikit mengalami penurunan namun total aset Bank Syariah Indonesia berhasil tumbuh sebesar Rp40,44 triliun. Dari sisi pembiayaan pangsa pasar Bank Syariah Indonesia Desember 2022 meningkat dari 40,60% di Desember 2021 ke 41,05% di Desember 2022. Sedangkan untuk pangsa pasar pendanaan/dana pihak ketiga pada Desember 2022 mencapai 42,21% turun dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 42,52%. Pangsa pasar yang besar merupakan penerapan dari strategi yang efektif yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia khususnya setelah merger.

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah • Desember 2022

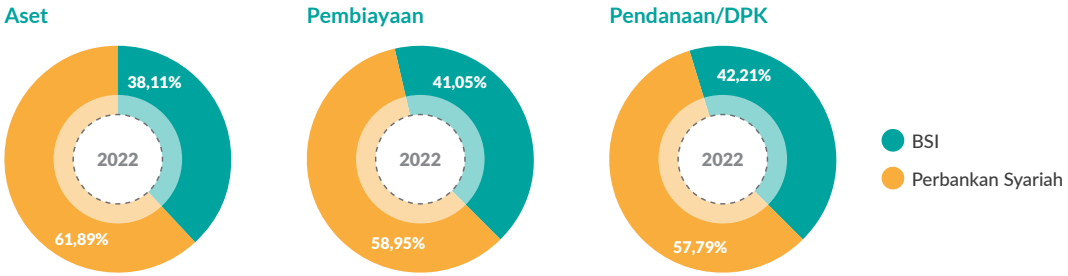

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah • Desember 2021

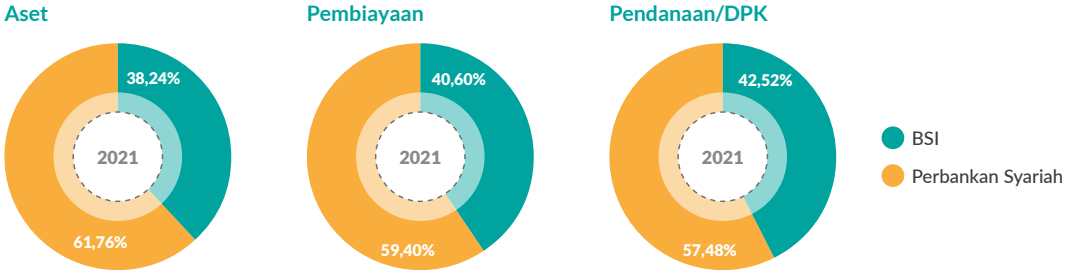

Tabel Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Perbankan Nasional

(Rp Juta, kecuali dinyatakan lain)

Pangsa Pasar Perbankan Nasional	Uraian	2022	2021	Pertumbuhan
Aset	Bank Syariah Indonesia	265.289	305.727	15,24%
	Perbankan Nasional	10.297.807	11.315.780	9,89%
	Pangsa Pasar	**2,58%**	**2,70%**	
Pembiayaan	Bank Syariah Indonesia	171.291	207.705	21,26%
	Perbankan Nasional	5.897.149	6.567.307	11,36%
	Pangsa Pasar	**2,90%**	**3,16%**	
Pendanaan/DPK	Bank Syariah Indonesia	233.251	261.491	12,11%
	Perbankan Nasional	7.608.060	8.293.980	9,02%
	Pangsa Pasar	**3,07%**	**3,15%**	

Sumber: SPI dan SPS - Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK), Desember 2022

Di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan, Bank Syariah Indonesia juga menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan nasional di Indonesia. Berdasarkan jumlah aset, pembiayaan, dan jumlah pendanaan/dana pihak ketiga, pangsa pasar pada Desember 2022 masing-masing sebesar 2,70%, 3,16% dan 3,15%, meningkat dari periode sebelumnya. Pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan Bank Syariah Indonesia dalam menjaga kinerja operasional.

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional • Desember 2022

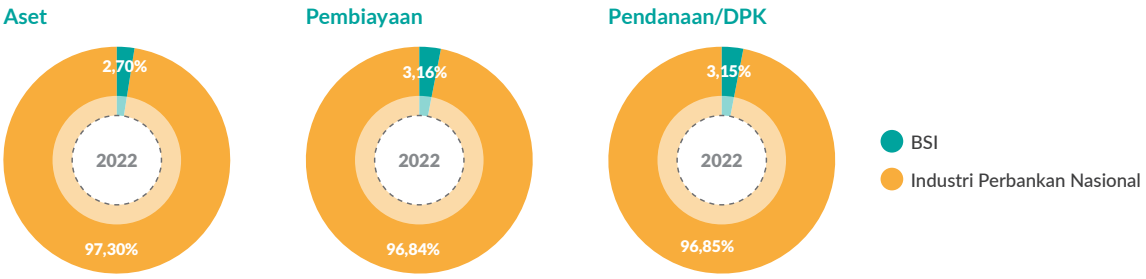

Diagram Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional • Desember 2022

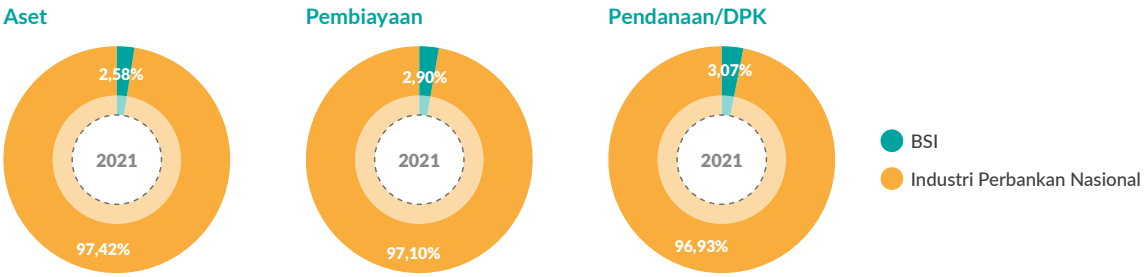

Grafik Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Nasional

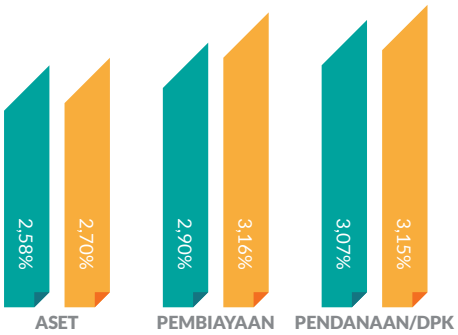

Grafik Pangsa Pasar BSI dibandingkan dengan Industri Perbankan Syariah

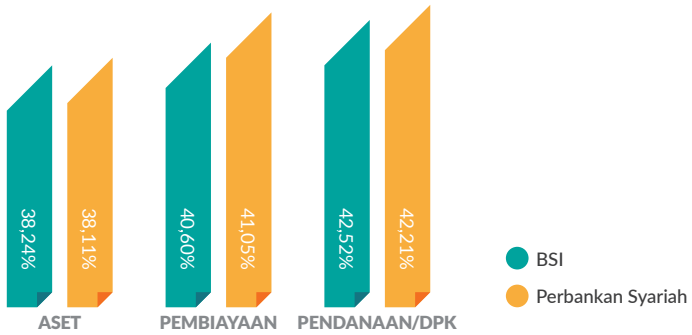

KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Bank Syariah Indonesia dapat mengumumkan dividen setiap tahun (dalam rupiah) apabila BSI memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Bank yang ditentukan oleh RUPS dan setelah dikurangi pemotongan pajak perusahaan, harus dialokasikan sebagai dana cadangan wajib sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai minimal 20% dari jumlah modal disetor Bank, walaupun tidak terdapat jangka waktu yang ditentukan untuk pencapaian tingkat dana cadangan wajib tersebut.

Sisa bagian dari laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen final, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan juga dapat membagikan dividen khusus secara ad-hoc berdasarkan persetujuan dalam RUPS.

Dividen yang Dibagikan

Relisasi Pembayaran Dividen

Keterangan	Tahun Buku 2021	Tahun Buku 2020
Tanggal Pengumuman	27 Mei 2022	-
Tanggal Pembayaran	30 Juni 2022	-
Laba (Rp)	3.028.204.859.899	-
Dividen (Rp)	757.051.214.975	-
Dividen per saham (Rp)	18	-
Payout Ratio	25%	-

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

Tabel berikut menyajikan rincian setoran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir sebagai satu wujud kontribusi kepada Negara:

Tabel Kepatuhan Pembayaran Pajak

(Rp Juta)

Uraian	2022	2021
PPh Pasal 4 ayat 2	575.467	757.207
PPh Pasal 21	456.816	344.891
PPh Pasal 22	5.048	6.137
PPh Pasal 23	28.821	16.618
PPh Pasal 25	1.228.568	937.370
PPh Pasal 26	6.128	1.674
PPh Pasal 29	291.570	398.449
PPN	18.654	15.260
Jumlah	2.611.072	2.477.606

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Employee Stock Option Program (ESOP) adalah program pemberian saham Bank kepada pegawai terpilih sebagai salah satu bentuk apresiasi serta program retensi kepada pegawai.

Sementara untuk tahun 2022, tidak terdapat realisasi dari program ESOP/MSOP.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Penyampaian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia mengacu pada Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Sesuai mandat regulasi tersebut, BSI telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 13 Januari 2022 bahwa realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tahun 2018 telah selesai pada tahun 2021.

Seluruh informasi tersebut juga telah dipublikasikan pada Laporan Tahunan 2021. Dengan demikian, pada tahun buku 2022 ini tidak ada lagi yang dapat disampaikan.

Tabel Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

No.	Nilai (Rp juta)	Peruntukan
1	1.049.754	Penyaluran pembiayaan
2	164.024	Pengembangan sistem teknologi informasi berupa IT *ready for* IPO, IT *for business enabler* dan *digital banking solution.*
3	98.414	Pengembangan jaringan kantor dengan jumlah 11 KC, 45 KCP dan 10 KK yang telah mendapatkan izin OJK dan telah beroperasi.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT DENGAN INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

Investasi

Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) memiliki investasi pada surat berharga yg mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nilai investasi pada surat berharga disajikan sebagai berikut:

(Rp juta)

	2022		2021	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	909.966	921.324	108.984	111.415
Sukuk Bank Indonesia	-	-	2.000.000	2.000.000
Surat Perbendaharaan Negara Syariah ("SPNS")	-	-	474.000	473.115
Total nilai wajar melalui laba rugi	**909.966**	**921.324**	**2.582.984**	**2.584.530**
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	3.173.558	3.051.045	2.992.032	3.007.756
Total Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	**3.173.558**	**3.051.045**	**2.992.032**	**3.007.756**
Biaya perolehan diamortisasi				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	43.362.582	43.717.378	32.230.617	32.820.250
Sukuk Bank Indonesia	8.602.984	8.602.984	26.935.010	26.935.010
Sukuk korporasi	902.800	902.800	1.271.600	1.271.600
Wesel ekspor	160.571	160.571	204.786	204.786
	53.028.937	**53.383.733**	**60.642.013**	**61.231.646**
Mata Uang Asing				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	483.371	495.803	753.245	771.899
Wesel ekspor	-	-	1.314	1.314
	483.371	**495.803**	**754.559**	**773.213**
Total Biaya perolehan diamortisasi	**53.512.308**	**53.879.536**	**61.396.572**	**62.004.859**

(Rp juta)

	2022		2021	
	Nilai Nominal	Nilai Tercatat	Nilai Nominal	Nilai Tercatat
TOTAL INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	**57.851.905**		**67.597.145**	
Cadangan kerugian penurunan Nilai	-10.634		-18.075	
Bersih	**57.841.271**		**67.579.070**	

Ekspansi
Selama tahun 2022 BSI tidak melakukan kegiatan ekspansi.

Divestasi
Selama tahun 2022 BSI tidak melakukan kegiatan divestasi.

Akuisisi
Selama tahun 2022 BSI tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi
Selama tahun 2022 BSI tidak melakukan kegiatan restrukturisasi.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

Transaksi material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (POJK No. 17/POJK.04/2020).

Transaksi Afiliasi
Bank mendefinisikan afiliasi, sebagai berikut:
1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Transaksi afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan (POJK No. 42/POJK.04/2020). Sampai dengan akhir tahun 2022, Bank tidak memiliki transaksi yang memenuhi kategori transaksi dengan pihak terafiliasi.

Transaksi Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud (POJK No. 42/POJK.04/2020). Sampai dengan akhir tahun 2022, Bank Syariah Indonesia tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

a. Perusahaan di bawah pengendalian Bank;
b. Perusahaan asosiasi;
c. Investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan;
d. Perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam butir c di atas;
e. Karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan;
f. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Nama dan sifat hubungan berelasi disajikan sebagai berikut.

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham pengendali
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT BNI Life Insurance	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT Mandiri Sekuritas	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah	Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
BPJS Kesehatan	Entitas dan lembaga pemerintah
BPJS Ketenagakerjaan	Entitas dan lembaga pemerintah
DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum BULOG	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum DAMRI	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Jasa Tirta II	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum LPPNPI	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Perhutani	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Perumnas	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Peruri	Entitas dan lembaga pemerintah
Perum Produksi Film Negara	Entitas dan lembaga pemerintah
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Commuter Properti Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Persada Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Persada Gedung	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Adhi Persada Properti	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Aero Globe Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Aerofood Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Agro Sinergi Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Amarta Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Aneka Tambang Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Angkasa Pura Hotel	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura I (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura II (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Kargo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Solusi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Angkasa Pura Supports	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Antam Resourcindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT ASABRI (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Asei Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi BRI Life	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jiwa Taspen	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Kredit Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bahana Artha Ventura	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bahana TCW Investment Management	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bakti Timah Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Barata Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Baturaja Multi Usaha	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Berdikari Logistik Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Berlian Manyar Sejahtera	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bina Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bio Farma (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT BNI Asset Management	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT BNI Sekuritas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT BRI Asuransi Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT BRI Danareksa Sekuritas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bukit Asam Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Bukit Prima Bahari	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Celebes Railway Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Cimanggis Cibitung Tollways	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Citilink Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Citra Lautan Teduh	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Cut Meutia Medika Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Danareksa (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Danareksa Investment Management	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Elnusa Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Equiport Inti Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Finnet Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Fintek Karya Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Graha Niaga Tata Utama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Griyaton Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Hakaaston	Entitas dan lembaga pemerintah
PT HK Realtindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Hutama Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indofarma Global Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indonesia Comnets Plus	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indonesia Power	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indopelita Aircraft Services	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Indra Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Industri Kereta Api (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inhutani IV	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inka Multi Solusi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inka Multi Solusi Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inka Multi Solusi Trading	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Inti Konten Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Istaka Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jaminan Kredit Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jamsostek (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Prima Logistik Bulog	Entitas dan lembaga pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Gempol Pasuruan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Pandaan Malang	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Jasa Tirta Energi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT KA Properti Manajemen	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kaltim Daya Mandiri	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Industri Gresik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT KBN Graha Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kereta Api Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kereta Commuter Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kilang Pertamina Balikpapan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kimia Farma Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kimia Farma Apotek	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kimia Farma Trading & Distribution	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Kodja Terramarin	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Bandar Samudera	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Daya Listrik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Jasa Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau National Resources	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Pipe Industries	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Sarana Infrastruktur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Tirta Industri	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Krakatau Wajatama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Laras Astra Kartika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri AXA General Insurance	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri Capital Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri Tunas Finance	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mandiri Utama Finance	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mega Eltra	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Mitra Transaksi Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Mitra Utama Madani	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Multi Sentana Baja	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Multi Terminal Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Medika Utama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Regas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Sebelas Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Terminal Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PAL Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PAL Marine Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Badak Arun Solusi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Drilling Contractor	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Nusa Data	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Patra Trading	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pegadaian	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelabuhan Tanjung Priok	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Daya Sejahtera	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Husada Citra	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelindo Properti Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pelita Air Service	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pemalang Batang Tol Road	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pembangunan PP Tirta Riau	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara I	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara IV	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara V	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara VII	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara VIII	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara X	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perkebunan Nusantara XII	Entitas dan lembaga pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Perkebunan Nusantara XIII	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perta Arun Gas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertagas Niaga	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Bina Medika IHC	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Drilling Services Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina EP	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina EP Cepu	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Gas	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Hulu Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Hulu Mahakam	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina International Shipping	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Lubricants	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Patra Niaga	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Power Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Ritel	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertamina Trans Kontinental	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pertani (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Peruri Digital Security	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Peruri Properti	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pesonna Indonesia Jaya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pesonna Optima Jasa	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Peteka Karya Tirta	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Petrosida Gresik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Phapros Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PIM Prima Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pindad (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pindad Enjiniring Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PNM Investment Management	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PNM Venture Capital	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PNM Ventura Syariah	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pos Logistik Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP Presisi Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP Properti Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT PP Semarang Demak	Entitas dan lembaga pemerintah
PT PP Urban	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Prima Armada Raya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Prima Husada Cipta Medan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Prima Indonesia Logistik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Iskandar Muda	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Kalimantan Timur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Kujang Cikampek	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Pupuk Sriwidjaja	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rajawali Citramass	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rajawali Nusindo	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Reasuransi Syariah Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rekaindo Global Jasa	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Reska Multi Usaha	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Riset Perkebunan Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rolas Nusantara Medika	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rumah Sakit Pelabuhan	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Rumah Sakit Pelni	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sahung Brantas Energi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sarana Bandar Nasional	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sarana Kaltim Ventura	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Semen Indonesia Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Semen Padang (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sigma Cipta Caraka	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sigma Cipta Utama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sinergi Mitra Investama	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sinkona Indonesia Lestari	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Solusi Bangun Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sri Pamela Medika Nusantara	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Sucofindo Episi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Surveyor Indonesia (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Taspen (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah

Tabel Pihak Berelasi

Pihak Berelasi	Sifat dan Hubungan
PT Taspen Abadi Sentosa	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telekomunikasi Selular	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkom Akses	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Telkomsel Ekosistem Digital	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Terminal Petikemas Indonesia	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Terminal Petikemas Surabaya	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Terminal Teluk Lamong	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Timah Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Tirta Tangsel Mandiri	Entitas dan lembaga pemerintah
PT United Tractors Semen Gresik	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Varia Usaha Bahari	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Varia Usaha Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Waskita Karya Infrastruktur	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Widya Tirta Selaras	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Beton Tbk	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Bitumen	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Komponen Beton	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Realty	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi	Entitas dan lembaga pemerintah
PT Wijaya Karya Serang Panimbang	Entitas dan lembaga pemerintah
Karyawan kunci	Pengendalian kegiatan Perusahaan

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Seluruh transaksi yang dilakukan pada tahun 2022 dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal dan sesuai peraturan perundang-undangan. Transaksi dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Bank Syariah Indonesia dan bebas dari konflik kepentingan. Saldo aset, liabilitas, investasi tidak terikat, pendapatan usaha lainnya, beban administrasi, beban usaha lain, dan beban kepegawaian dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Pihak Berelasi

Uraian	2022	2021
Aset	72.799.804	61.624.782
Persentase terhadap jumlah aset	23,81%	23,23%
Liabilitas	3.250.467	1.513.482
Persentase terhadap jumlah Liabilitas	4,41%	2,45%
Dana *Syirkah* Temporer	32.564.853	11.970.487
Persentase terhadap jumlah Dana *Syirkah* Temporer	16,40%	6,71%

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Sifat dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi entitas pemerintah antara lain adalah giro pada bank lain, liabilitas segera, simpanan dari bank lain, investasi pada surat berharga, surat berharga subordinasi yang diterbitkan, penempatan pada bank lain, simpanan nasabah, surat berharga, serta piutang dan pembiayaan.

Kebijakan Mekanisme Review Atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Bank Syariah Indonesia memiliki kebijakan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi material diputuskan oleh Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Selain itu, transaksi material juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara Independen. Selama tahun 2022, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pernyataan Direksi bahwa Transaksi telah Memenuhi Prosedur Memadai dan Sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku Umum

Dalam melakukan transaksi, khususnya dengan pihak berelasi, Bank telah memiliki prosedur sesuai dengan yang ditentukan oleh regulator. Dalam prosedur tersebut, Direksi menjadi bagian dari organisasi yang melakukan *review* terhadap rencana, realisasi dan evaluasi terhadap transaksi Bank. Dengan pertimbangan tersebut, Direksi memandang bahwa seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah melalui prosedur yang memadai dan selaras dengan praktik bisnis yang berlaku umum serta berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk Memastikan Transaksi Dilakukan sesuai Praktik Bisnis yang Berlaku umum, yang antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-lenght principle*)

Salah satu tugas penting Komite Audit adalah melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu, Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank untuk publik atau pemangku kepentingan lain serta menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, transaksi dengan pihak berelasi menjadi bagian dari telaah dan pantauan Komite Audit.

Sebagai organ di bawah Dewan Komisaris, Komite Audit menyampaikan laporan hasil kinerjanya kepada Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Karena itu, peran Komite Audit dan Dewan Komisaris menjadi bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Bank sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Rujukan di Laporan Keuangan

Pembahasan terkait dengan transaksi berelasi juga disampaikan dalam Laporan Keuangan yang terdapat di lampiran Laporan Tahunan ini pada halaman 110.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2022, Bank Syariah Indonesia menghadapi sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Bank, yang dirangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No.	Ketentuan	Dampak
1	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/5/PBI/2022 Tahun 2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.	1. Bank Indonesia memberikan insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Insentif bagi Bank sebagaimana dimaksud berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata. 2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2	POJK No. 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	1. Kewajiban mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud, Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik. 2. Kewajiban melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset. 3. Kewajiban menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal terjadi perbedaan penetapan kualitas Aset antara Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan, penyesuaian sebagaimana dimaksud yaitu : a. laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. laporan publikasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank, pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. 4. Kewajiban menetapkan dan melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap seluruh Aset Produktif yang diberikan oleh 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai: a. 1 (satu) nasabah; atau b. 1 (satu) proyek yang sama. 5. Kewajiban menetapkan dan melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai: a. 1 (satu) nasabah; atau b. 1 (satu) proyek yang sama. 6. Dalam hal Bank menetapkan kualitas yang tidak sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada nasabah sebagaimana sebagaimana diatur dalam butir 4 dan 5 di atas, maka wajib : a. menginformasikan daftar yang memuat nama nasabah beserta rincian masing-masing Aset Produktif kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. mendokumentasikan hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud. 7. Kewajiban menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif.
3	PADG Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif	1. Kewajiban melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Atas penilaian sendiri sebagaimana dimaksud Wajib disampaikan PUJK kepada kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 30 September tahun berjalan. 2. Kewajiban membentuk unit/fungsi perlindungan kosumen. 3. Penyesuaian Ketentuan Internal terkait perlindungan konsumen dan masyarakat.
4	POJK No. 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	1. Kewajiban melakukan pemenuhan RPIM. 2. Melakukan pengkinian ketentuan internal mengenai RPIM.
5	POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	1. Pemenuhan kewajiban GWM Rupiah dan GWM valas. 2. Melakukan pengkinian ketentuan internal BSI yang terkena dampak akibat terdapat perubahan pengaturan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BSI.
6	PADG Nomor 24/06/Padg/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah	1. Kewajiban menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan BSI SMART Laku Pandai. 2. Melakukan pengkinian ketentuan internal BSI yang mengatur mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif.

No.	Ketentuan	Dampak
7	Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/08/PADG/2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah	1. Kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan data dan/atau informasi transaksi yang dilakukan BSI di Pasar Valuta Asing kepada Bank Indonesia melalui sistem pelaporan bank umum terintegrasi. 2. Kewajiban memastikan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh BSI telah memenuhi ketentuan PBI ini. 3. Memenuhi kewajiban BSI terhadap jenis dan standardisasi transaksi di Pasar Valuta Asing serta penggunaan Infrastruktur Pasar Keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Melakukan pengkinian ketentuan internal BSI yang mengatur mengenai Transaksi di Pasar Valuta Asing.
8	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif	1. BSI wajib melaksanakan kegiatan usaha dan kegiatan operasionalnya dengan menerapkan prinsip syariah serta menerapkan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum syariah. 2. Kewajiban menyusun dan menyampaikan rencana strategis. 3. Penyesuaian ketentuan mengenain jaringan kantor. 4. Penyesuaian ketentuan internal BSI.
9	Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/07/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing	1. Kewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada OJK melalui form penyampaian Laporan Keuangan Berkala pada sistem pelaporan elektronik Emiten atau Perusahaan Publik dengan menggunakan teknologi *extensible business reporting language* (XBRL) dan melampirkan salinan dokumen elektronik laporan keuangan dimaksud. 2. Mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui web Bursa Efek dan situs web Bank BSI serta menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
10	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perintah Tertulis	1. Menindaklanjuti Perintah tertulis sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) di atas wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas pemenuhan Perintah Tertulis yang diberikan oleh OJK kepada BSI. 2. Membuat atau melakukan pengkinian ketentuan internal BSI yang berkaitan dengan terbitnya POJK ini.
11	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana	1. Menyusun ketentuan internal guna mengakomodir perlakuan khusus untuk debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana dengan memedomani ketentuan POJK ini serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. 2. Dalam hal BSI menerapkan perlakuan khusus berupa kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur pada daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana, maka BSI melaporkan pembiayaan yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam sistem layanan informasi keuangan dengan kode sifat pembiayaan berupa “kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus”.
12	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Melakukan pengkinian SPO Perlindungan dan Pengaduan Nasabah. 2. Memastikan kembali dalam memproses Data Pribadi, Bank BSI telah memiliki dasar unutk memproses data pribadi sebagaimana dimaksud.

No.	Ketentuan	Dampak
13	Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/16/PADG/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG Perubahan Keempat LTV/ FTV dan Uang Muka)	Pelaksanaan kelonggaran penetapan ketentuan dan batasan Rasio FTV untuk PP, dan Uang Muka PKB, sebagaimana terakhir diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/16/PADG/2022 diperpanjang menjadi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
14	Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/15/PADG/2022 tentang Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia.	1. Kewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan mengenai realisasi pembawaan UKA yang dilakukan oleh Pelapor, termasuk pembawaan UKA dengan jumlah di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Bank Indonesia, yang disusun dan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Kewajiban penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud termasuk juga kewajiban penyampaian koreksi Laporan dalam hal terdapat kesalahan pada Laporan yang telah disampaikan. 2. Melakukan pengkinian ketentuan internal BSI yang mengatur dan/atau berkaitan dengan Pelaporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia.
15	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum (selanjutnya cukup disebut POJK SDM Bank Umum)	1. Kewajiban menyusun rencana dan menyampaikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis bank. 2. Menyediakan dana untuk pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku paling sedikit 3,5% (tiga koma lima persen) dari total realisasi bebab gaji kotor tahun sebelumnya. 3. Memiliki sistem dan/atau prosedur internal untuk memantau realisasi pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022.

1. Amendemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
2. Amendemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak";
3. Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"; dan
4. Penyesuaian tahunan PSAK No. 73: "Sewa".

Dampak bagi Laporan Keuangan

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

05

Tinjauan Pendukung Bisnis

Sumber Daya Manusia

BSI telah menetapkan "Human Capital Roadmap" untuk mendukung transformasi organisasi serta SDM Bank yang inovatif dan proaktif dalam menjawab tantangan maupun perubahan di masa datang.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") berpandangan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan andal sangat penting, karena dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Bank. Terlebih lagi, Bank menargetkan "Menjadi Top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 (lima) tahun". Untuk mencapai target itu, SDM yang unggul menjadi salah satu keniscayaan yang harus dikelola dengan baik, sehingga pengelolaannya menjadi sangat penting.

Untuk itu, BSI memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan dan pengembangan kompetensi SDM melalui strategi yang komprehensif. Bank juga melakukan evaluasi dan *monitoring* kinerja karyawan untuk memperoleh talenta (*talent pool*) yang berkualitas. Selain itu, Bank senantiasa berupaya menciptakan *work life balance* dan suasana kerja yang kondusif, sehingga karyawan dapat memberikan kinerja terbaiknya.

Organisasi Human Capital

Pengelolaan SDM di lingkungan Bank dilaksanakan oleh Direktorat Human Capital. Direktorat tersebut memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab strategis untuk memimpin dan mengarahkan perumusan, pemutakhiran strategi dan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di Bank. Direktur juga memimpin dan mengarahkan penyusunan *business plan* serta *action plan* Direktorat Human Capital untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang agar sejalan dengan strategi dan rencana korporasi BSI.

Direktorat Human Capital memiliki tanggung jawab operasional meliputi:

1. Memimpin serta melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang di bidang *human capital* sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan sistem perekrutan, penempatan, mutasi dan pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara komprehensif.
3. Mengarahkan, mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi atas kebijakan hubungan kerja yang produktif antara Bank dengan pegawai, termasuk pegawai secara individu serta hubungan antarpegawai (*employee relations*) dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
4. Menyusun dan memastikan pelaksanaan fungsi operasional unit kerja yang efektif dan responsif, serta Pengembangan sistem informasi *human capital* yang mutakhir, terintegrasi dan mudah digunakan oleh seluruh unit kerja.
5. Menyusun, mengoordinasikan serta melakukan evaluasi pelaksanaan *incentive system*, *benefits* dan *compensation* sesuai dengan *reward philosophy*, strategi serta kemampuan Bank.
6. Pengembangan Pegawai:
   a. Menyusun, mengoordinasikan serta melakukan evaluasi penyusunan strategi pengembangan *human capital* yang efektif melalui implementasi sistem pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara efektif.
   b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan strategi pengembangan pegawai untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaan sistem *training* sesuai kebutuhan Bank.
   c. Mengoordinasikan pengembangan strategi operasional yang mendukung akademi.
   d. Mengoordinasikan dan melakukan evaluasi atas implementasi strategi *learning and development*.
   e. Mengarahkan, mengoordinasikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem *training* sesuai kebutuhan Bank disajikan dengan produktivitas dan kualitas yang tinggi.
7. Mengarahkan, mengoordinasikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan *corporate culture*, sehingga senantiasa dapat mendukung pencapaian tujuan Bank.
8. Memimpin, mengarahkan dan mengoordinasikan unit kerja bidang *human capital* yang berada di bawah supervisinya.
9. Memonitor pelaksanaan kepatuhan dan pengawasan melekat pada unit kerja di bawah supervisinya.
10. Menjaga citra Bank dan turut membina hubungan baik dengan regulator dan *stakeholder*.

Dengan tugas dan tanggung jawab di atas, manajemen *human capital* BSI memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas usulan:
   a. Pengembangan organisasi;
   b. Transaksi kepegawaian;
   c. Alokasi Biaya Tenaga Kerja (BTK) dan anggaran lain terkait biaya pegawai; dan
   d. Peraturan Perusahaan.
2. Menjadi *permanent member* untuk:
   a. Komite Human Capital (termasuk sebagai ketua);
   b. Komite Manajemen Risiko; dan
   c. Komite lainnya yang berada di bawah koordinasi Direksi yang dibentuk kemudian sesuai dengan kebutuhan Bank.
3. Memberikan persetujuan penggunaan biaya pelatihan dan pengembangan pegawai, biaya pengadaan barang dan jasa, penetapan beban kerugian operasional, pengelolaan aset Bank, serta biaya-biaya penunjang aktivitas di Direktorat Human Capital sesuai kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.

4. Mewakili Direksi dalam berhubungan dengan organisasi di luar Bank dalam lingkup tugas bidang Direktorat Human Capital dan di luar ruang lingkup tugasnya berdasarkan penugasan dari Direksi.
5. Memberikan penilaian atas kinerja Grup/Unit Kerja/pegawai yang berada di bawah koordinasinya serta mengarahkan kebijakan SDM termasuk promosi jabatan, rekrutmen dan rotasi/mutasi di lingkungan Direktorat Human Capital sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank yang berlaku.
6. Mengajukan permohonan persetujuan atas usulan yang terkait dengan pengelolaan aktivitas Direktorat Human Capital yang memerlukan keputusan Rapat Direksi atau Komite Bank yang berwenang sesuai kebijakan dan prosedur Bank.
7. Menetapkan dan/atau merekomendasikan kewenangan kepada pegawai yang berada di bawah koordinasi Direktorat Human Capital atau ruang lingkup fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank.

Sedangkan fungsi-fungsi di bawah Direktorat Human Capital mencakup:

a. Human Capital Strategy & Policy
   Mengelola dan mengarahkan penyusunan strategi dan produk kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia serta pengelolaan pengembangan pegawai dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi dan strategi perusahaan meliputi aktivitas *organization development*, *talent development & acquisition*, serta *performance & reward management*.
b. Human Capital Services
   Mengelola dan mengarahkan kegiatan administrasi operasional pengelolaan sumber daya manusia yang mengacu kepada peraturan pemerintah, peraturan perusahaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berlaku dengan tujuan untuk memastikan proses administratif dan layanan berjalan efektif dan efisien searah dengan visi, misi dan strategi perusahaan, meliputi proses pengelolaan *payroll*, menjaga hubungan industrial yang harmonis, pengelolaan Tenaga Alih Daya (TAD), serta pengelolaan *human capital information system*.
c. Human Capital Business Partner
   Mengelola dan mengarahkan implementasi dari strategi, kebijakan dan program terkait pengelolaan SDM berjalan sesuai dengan visi, misi dan strategi Bank.
d. BSI Syariah University
   Menyediakan dan mengelola layanan pembelajaran dalam rangka pengembangan dan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas pegawai (*offline* atau *online*), pengelolaan *knowledge management* serta penyusunan kebijakan dan program internalisasi budaya yang berkesinambungan guna mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis BSI.

Fokus 2022

Tahun 2022 merupakan tahun penguatan fundamental SDM (*strengthening the fundamental of Human Capital*). Pengelolaan SDM fokus pada penguatan budaya "BSI One Culture", akselerasi pengembangan kompetensi pegawai melalui metode 4E (*Educate*, *Engage*, *Expose* dan *Experience*), harmonisasi benefit dan pemberian *reward* kepada pegawai berkinerja baik (*performance link reward*) seperti apresiasi umroh, penyesuaian remunerasi, penyesuaian *grade* pegawai dan sebagainya. Selain itu, Bank tetap melakukan upaya-upaya meningkatkan produktivitas dengan melakukan *review* organisasi dan *redeployment* pegawai dalam rangka penguatan unit bisnis.

Pemenuhan Pegawai

Sistem rekrutmen sebagai upaya memenuhi kebutuhan pegawai yang andal merupakan salah satu proses kritikal. Bank memulai proses tersebut diawali oleh identifikasi kebutuhan, kualifikasi yang dibutuhkan, mencari hingga menarik minat talenta terbaik di industri. Perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan bersamaan dengan rencana strategis tahunan. Untuk mengisi kebutuhan tersebut, dilakukan melalui sumber internal maupun eksternal, dengan tetap mengutamakan sumber internal.

Adapun sumber pemenuhan pegawai melalui proses sebagai berikut:

1. **Seleksi Reguler**
   Jalur pemenuhan pegawai melalui kandidat dari:
   a. Baru lulus kuliah *(fresh graduate)*; atau
   b. Memiliki pengalaman kerja maksimal 2 (dua) tahun untuk menempati jabatan pelaksana/staf di kantor pusat, regional office serta unit kerja di bawah koordinasinya.
2. ***Profesional Hire***
   Jalur pemenuhan pegawai melalui kandidat dengan pengalaman kerja di bidang yang sesuai dengan kualifikasi seperti telah ditetapkan. Seleksi *professional hire* untuk menempati level jabatan *officer/manager/middle manager/senior manager* disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
3. **Seleksi *Officer Development Program* (ODP)**
   Jalur pemenuhan pegawai kelompok jabatan *officer* dari kandidat eksternal dengan pendidikan minimal Strata Satu (S1) untuk dikembangkan menjadi pemimpin Bank di masa depan. Pada tahun 2022 BSI telah merekrut sebanyak 27 orang melalui program ODP General.

Pengembangan Karier

Sebagai bagian dari perwujudan visi menjadi "Top 10 Bank Syariah Global", salah satu misi BSI adalah menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Upaya tersebut, antara lain direalisasikan melalui komitmen dalam pengembangan karier talenta terbaik di Bank.

BSI telah melakukan penyelarasan mekanisme dalam penerapan *talent development* dengan tujuan mengisi program pengembangan yang tepat dari setiap jenjang jabatan di Bank. Selain itu, BSI juga melakukan *talent identification* untuk menyaring pegawai berpotensi untuk disiapkan sebagai *successor* dalam menempati posisi-posisi kunci.

Pengembangan karier pegawai dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan kelompok jabatan, mulai dari kelompok jabatan pelaksana sampai dengan kelompok jabatan senior manager. Pelaksanaannya melalui 2 (dua) jenjang, yaitu pengembangan karier jalur pelaksana dan jalur pimpinan.

Pengembangan karier pegawai pelaksana untuk menjadi pegawai pimpinan dilakukan melalui proses seleksi *Staff Development Program* (SDP). Sementara pengembangan karier pegawai pimpinan dilakukan melalui mutasi/rotasi/promosi atau penugasan pegawai (*project assignment*), seperti penugasan ke Kementerian BUMN atau ke induk perusahaan.

Dalam rangka mendukung transformasi digital, Bank membuat *talent management system* yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan data talenta serta sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, pada tahap awal, Divisi Human Capital Bank telah membuat kebijakan penempatan dan penugasan pegawai, yang salah satunya diatur mengenai panel kepegawaian yang mengatur terkait kewenangan pemutusan proses transaksi kepegawaian.

Budaya Perusahaan

Sebagai bagian dari konglomerasi BUMN, dalam konteks *corporate culture*, Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan Surat Edaran Kementerian Negara BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini menjadi panduan dalam proses transformasi Sumber Daya Insani bagi Bank Syariah Indonesia agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen. Dengan demikian, upaya tersebut dapat melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja BSI yang selaras dengan nilai-nilai utama yang telah ditetapkan.

Core Values AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) yang diadopsi Bank Syariah Indonesia diharapkan dapat menciptakan budaya yang mampu mengakselerasi kinerja Bank menjadi lebih baik (*performance based culture*). Di tengah tantangan yang berat dan di usia yang masih sangat muda, Bank mampu bertahan dalam menghadapi krisis global. BSI mampu mencatatkan prestasi yang sangat baik dibandingkan periode tahun lalu serta kepercayaan masyarakat pun terus meningkat.

Pada tahun 2022, BSI fokus untuk terus mengajak semua Insan BSI agar memahami transformasi yang akan dituju. Semangat transformasi juga harus didukung dengan penguatan karakter Insan BSI. Pada tahun buku tersebut juga diluncurkan tema budaya (*culture theme*) untuk mendukung seluruh transformasi yang sedang dilakukan BSI. Ada 3 (tiga) *building block* dari *culture theme* BSI, yaitu:

1. *Agile*; gesit menangkap peluang, cepat beradaptasi dengan perubahan, dan inovatif dalam memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan pasar.
2. *Digital mindset*: memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan cara kerja yang sederhana (*lean*), efisien, dan berbasis *data-driven*.
3. Berwawasan global: terdepan (*up-to-date*) dalam hal wawasan bisnis, *networking*, dan memiliki *appearence* yang *business look* dan *modern*.

BSI juga berupaya untuk terus menghidupkan budaya inovasi menjadi poin penting untuk mendukung Bank agar terus berkembang dan mencapai visinya menjadi "Top 10 Global Islamic Bank," sehingga pada tahun ini juga diluncurkan kegiatan "Leap To Leap Innovation Challenge 2022". Seluruh unit kerja diwajibkan memiliki minimal 1 (satu) inovasi, baik masih dalam bentuk ide maupun inovasi yang sudah terimplementasi di unit kerjanya (*One Unit One Innovation*).

Hingga akhir tahun 2022 telah terkumpul 2.384 ide inovasi, baik yang telah terimplementasi maupun yang berupa gagasan (ide). Jumlah ini mencapai 189%, melebihi dari target *One Unit One Innovation* (1.256 proposal inovasi).

Core Values AKHLAK serta 18 Panduan Perilaku Insan BSI terus-menerus digaungkan ke seluruh Insan BSI, yang diharapkan menjadi panduan sekaligus karakter setiap Insan BSI. Manajemen juga secara konsisten terlibat dalam aneka kegiatan internalisasi BSI *One Culture* seperti CEO Menyapa, Taujih Pekanan, *Kick-Off BSI Transformation*, Forum BESTI (Bersama Sukseskan Transformasi BSI), dan aneka kegiatan lainnya.

Implementasi dan internalisasi budaya tersebut tentu perlu dilakukan pengukuran agar dapat diketahui efektivitasnya dalam memberi dampak terhadap lingkungan kerja, sekaligus sebagai evaluasi. Dengan demikian, dapat menjadi ruang pengembangan untuk perbaikan.

Untuk merealisasikannya, Bank bekerja sama dengan konsultan independen dalam mengukur "AKHLAK Culture Health Index" (ACHI) tahun 2022. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan dibanding tahun 2021, yakni meningkatkan skor AKHLAK Implementation Index sebesar 81.4% (dari skor 45,3 di tahun 2021 secara bankwide). Skor AKHLAK Implementation Index telah masuk ke dalam komponen "KPI People Development", sehingga setiap unit kerja ditargetkan untuk dapat meningkatkan skor AKHLAK Implementation Index sebesar 25% dibanding dengan skor tahun sebelumnya.

Segala ikhtiar yang dilakukan tersebut membawa BSI mendapatkan penghargaan AKHLAK Award di Klaster Jasa Keuangan (Anak Perusahaan) pada bulan Juli 2022 atas pengukuran budaya organisasi. Indikator tersebut diukut oleh ACT Consulting kepada hampir seluruh perusahaan BUMN dan/atau afiliasi BUMN.

Atas komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan internalisasi AKHLAK dalam mewujudkan BSI sebagai "Top Ten Global Islamic Bank" pada tahun 2025, hal ini akan menginspirasi dan menjadi motivasi untuk semakin mengimplementasikan "BSI One Culture" dalam mendorong performa. Sekaligus, menjadikan Insan BSI memiliki *high performance high engagement*.

Sistem Imbalan

Pengelolaan sistem imbalan adalah salah satu strategi Bank dalam memberikan imbalan kepada pegawai yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial yang kompetitif, namun tetap sesuai dengan kemampuan Bank. Bank memberikan *reward* dengan mengedepankan prinsip *competitiveness* dan *fairness* yang berbasis kinerja dan risiko dengan mempertimbangkan pelaksanaan *best practice* dalam industri perbankan. Untuk dapat mempertahankan posisi kompetitif di pasar, secara reguler, Bank berpartisipasi dalam Survei Gaji Tahunan (*Annual Salary Survey*) di industri perbankan di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga survei independen yang kompeten.

Tujuan pemberian *reward* adalah untuk mempertahankan posisi kompetitif di pasar, *retention* dan memotivasi pegawai terutama pegawai talenta. Selain itu, sebagai upaya menarik talenta terbaik di industri yang dibutuhkan Bank untuk mencapai tujuan bisnis dan menjaga kesinambungan usaha.

Salah satu *reward* dalam bentuk finansial yang diberikan BSI kepada pegawai adalah bonus tahunan yang ditetapkan berdasarkan kinerja Bank, unit kerja dan pegawai. Bank juga memberikan penyesuaian gaji tahunan yang berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku, Tunjangan Hari Raya (THR), uang pelaksanaan cuti tahunan, dan uang cuti besar yang diberikan setiap periode masa kerja 3 (tiga) tahunan.

Untuk terus dapat memotivasi pegawai dalam mencapai target bisnis, Bank juga dapat memberikan program insentif khusus. *Reward* tersebut mempertimbangkan nominal yang kompetitif serta menjaga internal *equity* dan risiko.

Reward yang bersifat non-finansial diberikan seperti distribusi program *Employee Stock Allocation* (ESA). BSI juga memberikan fasilitas bantuan yaitu beasiswa bagi anak pegawai yang meninggal dunia serta bantuan untuk pegawai yang mengalami musibah bencana alam dan kerusuhan.

Apresiasi lain yang berbentuk non-finansial juga diberikan kepada unit kerja dan individu berdasarkan inovasi terbaik yang berdampak kepada kinerja Bank. Termasuk di dalamnya, pencapaian khusus unit atau individu yang memberikan dampak signifikan terhadap bisnis, kinerja maupun reputasi BSI. Apresiasi tersebut diberikan pada acara "BSI Excellence Award" sebagai bentuk apresiasi tertinggi dari Bank.

Selain *reward* finansial dan non-finansial, Bank juga memberikan benefit lain kepada pegawai, yaitu berupa fasilitas kesehatan, hari cuti, pembiayaan pegawai, dan fasilitas lainnya sesuai lokasi kerja dan jabatan. Fasilitas kesehatan diberikan berupa asuransi kesehatan dengan cakupan yang luas dan benefit yang terus ditingkatkan hingga kebutuhan layanan khusus, termasuk penyakit kritis dan tindakan yang memerlukan alat canggih.

Kesejahteraan

BSI memiliki beberapa program kesejahteraan sebagai bagian dari komitmen Bank terhadap penciptaan SDM yang berkualitas dan produktif, sehingga mampu memberikan kinerja terbaiknya, di antaranya:

1. **Kesehatan**
   Kesehatan pegawai merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dinilai memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja pegawai sebagai individu maupun perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, Bank senantiasa berupaya menunjang kualitas kesehatan seluruh pegawai dengan memberikan fasilitas *general medical checkup* dan fasilitas jaminan kesehatan kepada seluruh pegawai serta dengan mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS Kesehatan.

Dalam masa pandemi, pegawai mendapatkan pembaharuan informasi untuk pencegahan penyebaran Covid-19 dari pakar kesehatan dalam forum "Taujih Pekanan Ber-AKHLAK", sehingga pegawai dapat lebih termotivasi dalam menjaga kesehatannya masing-masing. Selain terhadap pegawainya, Bank juga memberikan fasilitas kesehatan kepada keluarga pegawai. Setiap individu diharapkan dapat menjaga kesehatannya dengan melaksanakan pola hidup sehat sedini mungkin.

Di samping itu, Bank Syariah Indonesia juga memiliki BSI Club, yang salah satu kegiatannya adalah olah raga yang diselenggarakan secara berkala. BSI Club juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan pegawai sekaligus media bagi pegawai untuk dapat bertukar pikiran guna meningkatkan kinerja Bank.

2. **Promosi**
   Salah satu bentuk pengembangan karir pegawai adalah melalui mekanisme promosi. Bank mengklasifikasikan proses promosi menjadi sebagai berikut:
   a) Promosi Jabatan
      Promosi jabatan adalah proses penempatan pegawai dari kelompok jabatan yang lebih rendah ke kelompok jabatan yang lebih tinggi. Peningkatan jalur karir dimulai ketika pegawai memenuhi kualifikasi jabatan sesuai dengan persyaratan posisi jabatan yang dituju.
   b) Promosi *Grade*
      Promosi *grade* adalah proses penyesuaian *grade* ke *grade* yang lebih tinggi. Bank dapat mempertimbangkan memberikan promosi *grade* kepada pegawai yang memenuhi parameter yang telah ditetapkan dan sesuai kemampuan Bank.

3. **Pelatihan Pensiun**
   Bank telah menyusun kebijakan atas program pelatihan atau pembekalan untuk pegawai yang akan memasuki masa purnabakti agar pelatihan tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur dengan kriteria peserta dan waktu yang jelas dan lebih terencana. Pelaksanaan pelatihan tersebut diikuti pula oleh pasangan pegawai.

Penilaian Kinerja

BSI menerapkan sistem penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara transparan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian sasaran organisasi melalui pencapaian kinerja pegawai.
2. Mengembangkan budaya kerja perusahaan yang positif dan berorientasi kepada pencapaian kinerja.
3. Meningkatkan *engagement* pegawai.

Proses pengelolaan kinerja dilakukan secara berkesinambungan dengan memastikan adanya keselarasan, yaitu dari penetapan *Corporate Goals* diturunkan menjadi target dan sasaran unit kerja hingga level individu. Dengan demikian, keselarasan strategi dari korporat ke individu terjaga serta ada keterkaitan antara kinerja individu terhadap kinerja Bank.

Siklus pengelolaan kinerja secara tahunan dimulai dari perencanaan kinerja (*performance planning*) untuk menyusun KPI (*key performance indicator*) pegawai, dilanjutkan dengan evaluasi yang dilakukan pada pertengahan tahun (*mid year review*) untuk melihat progres pencapaian KPI pegawai di periode tersebut. Selanjutnya, diakhiri dengan evaluasi akhir tahun (*performance evaluation*) untuk menilai kinerja pegawai sejak awal hingga akhir tahun periode.

Dalam proses pengelolaan kinerja pegawai, Bank mengutamakan terciptanya komunikasi 2 (dua) arah antara pegawai dan manajer agar tercipta hubungan yang harmonis dengan pemberian saran perbaikan/ umpan balik yang dapat diberikan oleh manajer untuk peningkatan kinerja pegawai, apabila diperlukan. Seluruh proses pengelolaan kinerja dilakukan secara *online* melalui sistem kepegawaian (Sistem Informasi Pegawai/SIP), sehingga pegawai dapat dengan mudah mengakses maupun memudahkan penyimpanan seluruh informasi tentang kinerja pegawai. Umpan balik pada penilaian kinerja akhir tahun akan dijadikan rencana pengembangan pegawai di tahun berikutnya.

Remunerasi

Dalam pengelolaan remunerasi pegawai, Bank menerapkan prinsip 3P yaitu:

1. *Pay for Performance*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan kinerjanya.
2. *Pay for Position*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan posisi/jabatannya.
3. *Pay for Person*: pegawai diberikan kompensasi sesuai dengan keahlian individunya.

BSI senantiasa menaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar upah minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank. Bank senantiasa berupaya menjaga *gap* rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

Tingkat Turnover Karyawan

Pada tahun 2022, jumlah karyawan yang tidak bekerja lagi di Bank sebanyak 849 orang atau 4,6% dari total karyawan yang berjumlah 18.581 orang. Penyebabnya diantaranya karena pensiun, meninggal dunia, dan mengundurkan diri. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Alasan	2022	2021
Pensiun	61	60
Meninggal Dunia	26	35
Mengundurkan Diri	762	509
Jumlah	849	604

Pelatihan & Pengembangan Kompetensi

BSI secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Bank. Setiap pegawai dijamin oleh Bank memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Bank.

Biaya Pengembangan SDM

Pada Tahun 2022, Bank telah merealisasikan anggaran pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp97,2 miliar untuk 633.053 Peserta Pelatihan. Sedangkan untuk tahun 2023, alokasi anggaran pelatihan Rp120 miliar.

Demografi Karyawan

Informasi mengenai hal ini disajikan dalam bab "Profil Perusahaan".

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Dalam rangka menjadikan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai tempat kerja yang berhasanah bagi pegawainya, Bank telah menyusun aturan mengenai Keluh Kesah melalui Pasal 55 Peraturan Perusahaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-2023. Peraturan Keluh Kesah ini menjadi pedoman tata cara untuk menunjang penyampaian dan penyelesaian permasalahan keluh kesah dan/atau perselisihan hubungan industrial dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Hal ini sejalan dengan semangat BSI terkait penanganan keluh kesah. Setiap pegawai memiliki hak untuk menyampaikannya yang berkaitan dengan hubungan industrial selama memenuhi persyaratan kepada atasan langsungnya. Setiap keluh kesah yang disampaikan diupayakan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Mekanisme penyampaian dan penyelesaian Keluh Kesah adalah sebagai berikut:

Perencanaan Pengelolaan SDM Tahun 2023

Di tahun 2023 pengelolaan SDM fokus pada peningkatan produktivitas SDM, melakukan *review* kebijakan Human Capital yang telah ada. Hal itu dilakukan agar lebih dapat mendukung unit bisnis, penguatan hubungan kepegawaian yang lebih baik dan kondusif yang mampu mendukung peningkatan produktivitas organisasi, penguatan budaya kerja perusahaan (BSI One Culture AKHLAK), peningkatan *employee engagement* serta pengembangan kompetensi dan *career growth model*.

Teknologi Informasi

Dalam pengembangan teknologi informasi di tahun 2022, BSI berfokus untuk memperkuat stabilitas sistem dan menyiapkan landasan digital untuk ke depan.

Teknologi Informasi (TI) saat ini telah menjadi salah satu penggerak bisnis Bank, terutama dalam penyediaan teknologi dan infrastruktur yang modern untuk mendukung terobosan bisnis sesuai kebutuhan pasar. Teknologi informasi yang cepat, tepat, dan andal dihadirkan untuk mendukung Bank Syariah Indonesia mencapai visi menjadi "Top 10 Bank Syariah Global" berdasarkan kapitalisasi pasar pada tahun 2025.

Bank Syariah Indonesia telah berhasil melakukan penggabungan sistem (*single system*) dari 3 (tiga) bank *legacy* pada 1 November 2021. Pada tahun 2022, BSI fokus untuk memperkuat stabilitas sistem dan menyiapkan landasan digital untuk kedepannya. Bank melakukan transformasi dengan menyiapkan teknologi terkini yang siap untuk pengembangan di masa depan. Dilakukan digitalisasai proses untuk meningkatkan layanan bank melalui jaringan kantor. Pada sisi layanan digital dilakukan pengembangan dengan metode *agile* yang cepat merespon kebutuhan pasar.

Profil Kepala TI

Organisasi pengelolaan TI dipimpin oleh Direktur Teknologi Informasi, Achmad Syafii. Profil lengkapnya disajikan pada bab "Profil Perusahaan".

Organisasi Pengelola

Organisasi pengelolaan TI di lingkungan BSI berada di bawah Direktorat IT, yang didukung oleh struktur di bawahnya: IT Strategic Planning Group (ISG), IT Operation Group (IOG), IT Development Group (IDG), dan Chief Information Security Officer Group (CSO).

IOG menjalankan tugas operasional TI, sementara aktivitas perencanaan strategi dilakukan oleh ISG. Sedangkan pengembangan TI dilakukan oleh IDG dan pengamanan informasi dijalankan oleh CSO.

Unit kerja yang mencakup di dalamnya Senior Executive Vice President (SEVP) Digital Banking menjalankan pengembangan produk dan digital perbankan. Namun demikian, implementasi operasional TI yang dimulai dari perencanaan, pengembangan dan penanganan masalah, menjadi tanggung jawab dari unit kerja ISG, IDG, IOG dan CSO.

Rincian pembagian peran dan tanggung jawab organisasi TI diuraikan dalam tabel berikut.

Unit Kerja	Peran dan Tanggung Jawab
IT Strategic Planning Group	1. Memastikan perencanaan, Arsitektur TI dan pelaksanaan proyek inisiatif strategis TI yang sesuai dengan rencana Bank. 2. Memastikan terhadap pelaksanaan project sesuai dengan *scope*, *time line* dan *budget* yang tersedia. 3. Memastikan terlaksana tata kelola TI yang baik 4. Perencanaan *Capacity Planning* Infrastruktur TI
IT Operation Group	1. Memastikan ketersediaan infrastruktur TI dan kelangsungan operasional. 2. Melaksanakan *business continuity management - disaster recovery plan*. 3. Menjaga ketersediaan jaringan untuk mengelola operasional.
IT Development Group	1. Memastikan pelaksanaan aktivitas pengembangan TI sesuai dengan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis bank serta sesuai ketentuan Bank. 2. Memastikan pelaksanaan pengembangan TI mencakup mengelola spesifikasi fungsional dan teknis, mendefinisikan dan merancang solusi, mengelola *developers*, mengelola *development* dan *unit testing*, menyediakan *support* untuk *application deployment/releases* sesuai dengan kebijakan dan prosedur TI. 3. Memastikan pelaksanaan perencanaan (*design*), pengembangan (*development*), *system integration test* dan perbaikan/penyempurnaan *platform*.
Chief Information Security Officer Group	1. Bertanggung jawab terhadap keamanan informasi TI, termasuk di dalamnya berperan dalam proses perencanaan dan pengembangan TI dari sisi keamanan informasi. 2. Menangani insiden keamanan informasi (proteksi, *response*, dan *recovery cyber security*).

Roadmap di Bidang TI

Perencanaan dan pengembangan TI BSI dalam hal ini teknologi dan infrastruktur sesuai dengan visi Bank untuk mendukung strategi BSI 2023 yang salah satunya terkait dengan *core banking system* dan *digital bank*.

Dalam mendukung strategi BSI tersebut dengan menerapkan dan mengimplementasikan yang tercantum pada 7+ IT Stars (*Strategic Action dan Programs*) di antaranya:

1. Security, Risk and Fraud
   Menetapkan dan meningkatkan perimeter keamanan, manajemen risiko, penipuan & AML untuk melindungi transaksi dan proses nasabah dan perbankan.
2. Core system modernization
   Pelaksanaan inisiatif modernisasi *core banking* untuk menyederhanakan sistem *core banking*, meningkatkan fungsi *core*, dan memungkinkan *core banking* generasi berikutnya mendukung produk dan layanan perbankan yang kaya.
3. Infrastructure & Connectivity
   Pembentukan dan peningkatan infrastruktur dan alat konektivitas, aplikasi dan *hardware* yang menggabungkan berbagai teknologi untuk mendukung bisnis bank.
4. Integrated data management monitoring and reporting
   Pembentukan dan peningkatan *enterprise data warehouse* dan big data analisis untuk mengaktifkan *data-as-a-service* serta alat manajemen informasi yang digunakan karyawan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan secara mandiri.
5. Organization, Corporate Support & Internal Improvements
   Pembentukan dan peningkatan fungsi inti perusahaan untuk mendukung operasional bank dan proses internal serta perbaikan organisasi.
6. Unified Platform & Customer 360
   Penggunaan satu *platform* utama untuk menampung seluruh kapabilitas alur kerja yang dibantu oleh peningkatan pusat data dan layanan nasabah terpadu (*customer relationship*) pada area *sales*, *marketing*, dan *campaign management* untuk meningkatkan *engagement* pada nasabah.
7. Digital Expansion & Open Banking
   Peningkatan, dan perluasan jaringan distribusi digital, *sales*, layanan *omni-channel* termasuk dengan peningkatan kapabilitas integrasi dengan berbagai metode dan strategi untuk memungkinkan *open banking* dengan konektivitas tanpa batas dan aman secara internal dan eksternal.
8. Environment, Social & Governance (ESG)
   Pelaksanaan strategi berkelanjutan perusahaan dalam melakukan pengembangan (investasi) yang memberikan nilai tambah di aspek lingkungan, sosial, *governance* (tata kelola perusahaan) serta dapat menjadi pelopor (*agent of change*) ekonomi syariah di Indonesia.

Tata Kelola di Bidang TI

Proyek pengembangan TI dan *software* pada umumnya mempergunakan metode *waterfall*. Pada metode ini dilakukan pembagian fase yang pengerjaan proyeknya dimulai dari *requirement*, *design*, *development*, *testing*, *Release Control Board* (RCB), *deployment* ke *environment production*, hingga *Post Implementation Review* (PIR). Metode ini umumnya digunakan untuk proyek TI yang besar dengan perubahan yang relatif jarang.

Selain metode *waterfall*, juga diterapkan metode *agile* untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan *time to market*, seperti *mobile banking*, *internet banking* dan API. Metode ini dijalankan dengan menggunakan pembagian *sprint* dengan target di setiap *sprint*. *Framework* yang digunakan dalam *agile methodology* di BSI adalah Scrum.

Investasi di Bidang TI

Pada Tahun 2022, BSI telah melakukan investasi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp266 miliar yang diperuntukan untuk pemenuhan kapabilitas *Digital Banking*, *Enterprise & Surrounding Application*, *Digitalisasi & Office Automation*, *Enhancement* fitur pada aplikasi *existing* serta belanja infrastruktur TI dan perangkat *security*. Tujuannya adalah dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas TI.

Pengembangan dan Inovasi TI Tahun 2022

Pengembangan TI BSI dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun, yang diselaraskan dengan visi dan misi Bank. Berikut adalah daftar pengembangan dan inovasi yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2022.

No.	Uraian	Tujuan/Manfaat	Status
1	Aplikasi *Monitoring* ATM	Pengembangan Aplikasi *Monitoring* ATM dalam mendukung transaksi finansial dan peningkatan *Availability & Performance* ATM	*Live*
2	Aplikasi *Performance Monitoring*	Penambahan lisensi dan pengembangan *dashboard Application Performance Monitoring* (APM).	*Live*
3	*Automated Patch Management*	Implementasi *Automated Patch Management* server untuk peningkatan keamanan dan mempercepat proses *deployment patch server*.	*Live*
4	*Enhancement* WAIS	Pengembangan Aplikasi WAIS (*Single Dashboard*) dalam mendukung proses bisnis *wholesale* BSI	*Live*
5	*Cabling* DC-DRC & Cabang	Penyediaan infrastruktur *cabling*	*Live*
6	*Enhancement Branch Delivery System*	Pengembangan *features*/layanan *Branch Delivery System* untuk mewujudkan *single branch delivery system* dan *offloading features* layanan cabang di *Core Banking*	*Live*
7	*Digital Channel*	Pengembangan kapabilitas kanal digital *existing* BSI dalam menunjang kebutuhan bisnis dan transaksi	*Live*
8	*Digital Value Chain*	Mengembangkan kapabilitas *digital supply chain management system* dan mengintegrasikan *digital value chain* dengan *trade financing*	*Live*
9	*Enhancement Complaint Handling Management System*	Pengembangan sistem CHMS untuk peningkatan layanan pengaduan nasabah	*Live*
10	*Enhancement* Kustodian *System*	Pengembangan kustodian sistem dalam mengakomodir kebutuhan pada *Head Office*, Cabang/Kantor Luar Negeri dan Anak Perusahaan terkait fungsi Kustodian. Serta pengembangan *Sub Registry* di sistem BI-SSSS	*Live*
11	*Enhancement Middleware* SWIFT	Meningkatkan keamanan perangkat *user*	*Live*
12	*Regulatory & Governance Project*	Pengembangan sistem aplikasi terkait dengan regulator dan proyek pemerintah	*Live*
13	*Enhancement Enterprise Service Bus* (ESB)	Pengembangan Aplikasi ESB untuk mendukung kebutuhan bisnis serta dapat meningkatkan transaksi financial	*Live*
14	*Enhancement Wealth Management System*	Pengembangan menu dan fitur portofolio investor	*Live*
15	*Enhancement Otomasi Bisnis* RPA (*Robotic Process Automation*)	Penambahan lisensi dan implementasi RPA untuk mendukung pengembangan otomasi proses yang repetitif	*Live*
16	*Enhancement Origination System*	Pengembangan terhadap *originating system* BSI *existing* & *New Origination System* untuk bisnis proses baru BSI.	*Live*
17	*Enhancement Core Banking*	Pengembangan *core banking* untuk mendukung kebutuhan bisnis BSI	*Live*
18	*Enhancement Pembiayaan Digital*	Pengembangan produk pembiayaan digital yang diakses nasabah melalui kanal digital milik BSI	*Live*
19	Peningkatan *Security Operation Center*	Meningkatkan kapabilitas keamanan - *Refreshment* perangkat *Firewall* - *Refreshment* perangkat IPS - Pengadaan *dedicated* VPN - Penambahan perangkat anti APT untuk *visibility* lebih luas	*Live*
20	*Enhancement Digital Investigation and forensic*	Pengembangan perangkat atau aplikasi Untuk meningkatkan kemampuan proses investigasi atas nasabah serta pelaporan	*Live*
21	Penambahan Infrastruktur *Network* The Tower	Meningkatkan kapabilitas infrastruktur jaringan BSI	*Live*
22	Pengadaan *Tool* BSI *Architecture*	*Enterprise Architecture* (EA) *Tools* untuk *Digital Enterprise Architecture* (DEA) BSI dan *Tools Project Management*	*Live*
23	*Vulnerability & Penetration Testing*	Pengembangan *tools Vulnerability and Penetration Testing* (SAST & DAST)	*Live*
24	*Server DB Core Banking* (*High Spesification*) DC-DRC	Penambahan *Server* DB 8 *Socker* untuk *Corebanking* DC-DRC	*Live*

No.	Uraian	Tujuan/Manfaat	Status
25	*Enhancement Identity Governance*	Pengembangan aplikasi *identity Governance* yang berguna dalam melakukan manajemen *user* dan membantu dalam melakukan *review* akses *user*.	*Live*
26	*Penambahan License Identity Service Engine* (ISE)	Penambahan Lisensi *Identity Service Engine* (ISE) sesuai dengan penambahan jumlah pegawai BSI setelah dilakukannya merger.	*Live*
27	Penambahan *License Platform*	Penambahan *License Database* dan *virtual server*.	*Live*
28	*Enhancement* DDM *Dashboard*	Pengembangan DDM *Dashboard* sebagai *single source reporting* dan sharing data	*Live*

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM dibutuhkan untuk meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* pegawai serta penyelarasan strategi Teknologi Informasi dalam mensupport proses bisnis dan pengambilan keputusan IT Strategy di BSI.

Selain itu, program pelatihan dan pengembangan SDM untuk dapat membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, loyalitas kerja. Dalam hal ini peningkatan personel Direktorat IT yang dilakukan dengan melakukan *training* sertifikasi, BSMR, webinar dan taujih.

Berikut adalah daftar pengembangan SDM yang telah direalisasikan sepanjang tahun 2022.

No.	Nama Pelatihan
1	Pelatihan Agile Product Innovation
2	Pelatihan Agile Scrum Foundation Certified
3	Pelathan dan Certified Information Security for Manager (CISM)
4	Pelatihan Change & Release Management
5	Pelatihan COBIT 2019 Foundation & Certification
6	Pelatihan ISOIEC 27001 2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi
7	Pelatihan ITIL 4 Create Deliver And Support
8	Pelatihan Digital Transformation
9	Pelatihan Mastering Elastic Search
10	Pelatihan Microservices Architecture
11	Pelatihan ISO 9001:2015 Quality Management System Awareness
12	Pelatihan Robot Automation and Machine Learning
13	Pelatihan dan Sertifikasi COBIT 2019 Foundation
14	Pelatihan Data Protection and Privacy
15	Pelatihan Desktop Management Ivanti
16	Pelatihan Devops Practice
17	Pelatihan Encor
18	Pelatihan Full Stack Development Course Syllabus
19	Pelatihan Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)
20	Pelatihan Vmware Vsp : Install configure Manage v7.0
21	Pelatihan ISO/IEC 27001:2013 Implementing Information Security Management System
22	KSF Agile Mindset & Penerapannya di Dunia Kerja
23	Pelatihan Workshop Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)
24	Strategic Sourcing and Vendor Management
25	Pelatihan Aligning IT & Business Strategy
26	Pelatihan & Sertifikasi CAPM
27	Pelatihan Click Messenger & GTFrame
28	Pelatihan Portofolio Analysis

Penerapan Manajemen Risiko

Pengelolaan manajemen risiko di BSI melibatkan seluruh organ Bank, dari Dewan Komisaris dan Direksi hingga seluruh staf. Peninjauan ulang secara berkala menjamin efektivitas penerapan manajemen risiko berjalan dengan baik.

Penerapan manajemen risiko merupakan bagian dari implementasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Bagi PT Bank Syariah Indonesia ("BSI", "Bank"), kebijakan tersebut merupakan sangat penting untuk merespons dinamika eksternal, yaitu lingkungan usaha yang berkembang dengan pesat.

Komitmen ini diiringi oleh pengelolaan risiko dengan mekanisme yang sejalan dengan ketentuan dari regulator. Melalui penerapan manajemen risiko yang tepat, diharapkan dapat melindungi Bank secara individu maupun dengan entitas afiliasi dari dampak perubahan di lingkungan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga diharapkan dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Bank.

Sesuai dengan regulasi, penerapan manajemen risiko Bank merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Efektivitas kerangka manajemen risiko tersebut selalu dievaluasi secara berkala dan disosialisasikan di lingkungan organisasi agar tercipta budaya risiko yang baik di lingkungan Bank.

Landasan Penerapan Manajemen Risiko

1. Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
2. SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
6. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.
7. SEOJK No. 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.
8. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum.
9. POJK No.11/POJK.03/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
10. POJK No.57/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 / POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
12. SEOJK No.21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
13. SEOJK No.12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen dan Pengukuran Pendekatan Standar untuk IRRBB Bagi Bank Umum.
14. SEOJK No.6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan ATMR untuk Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

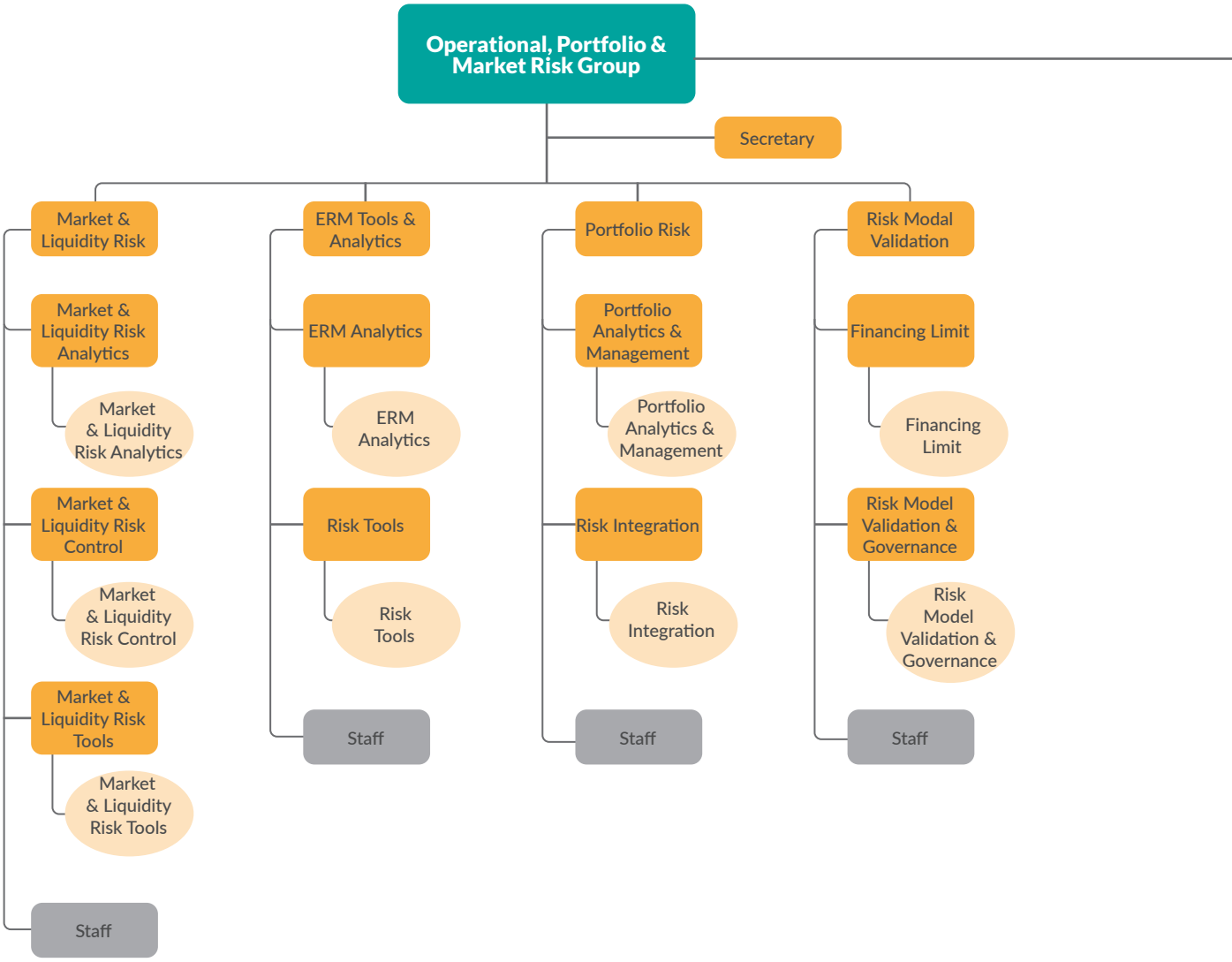

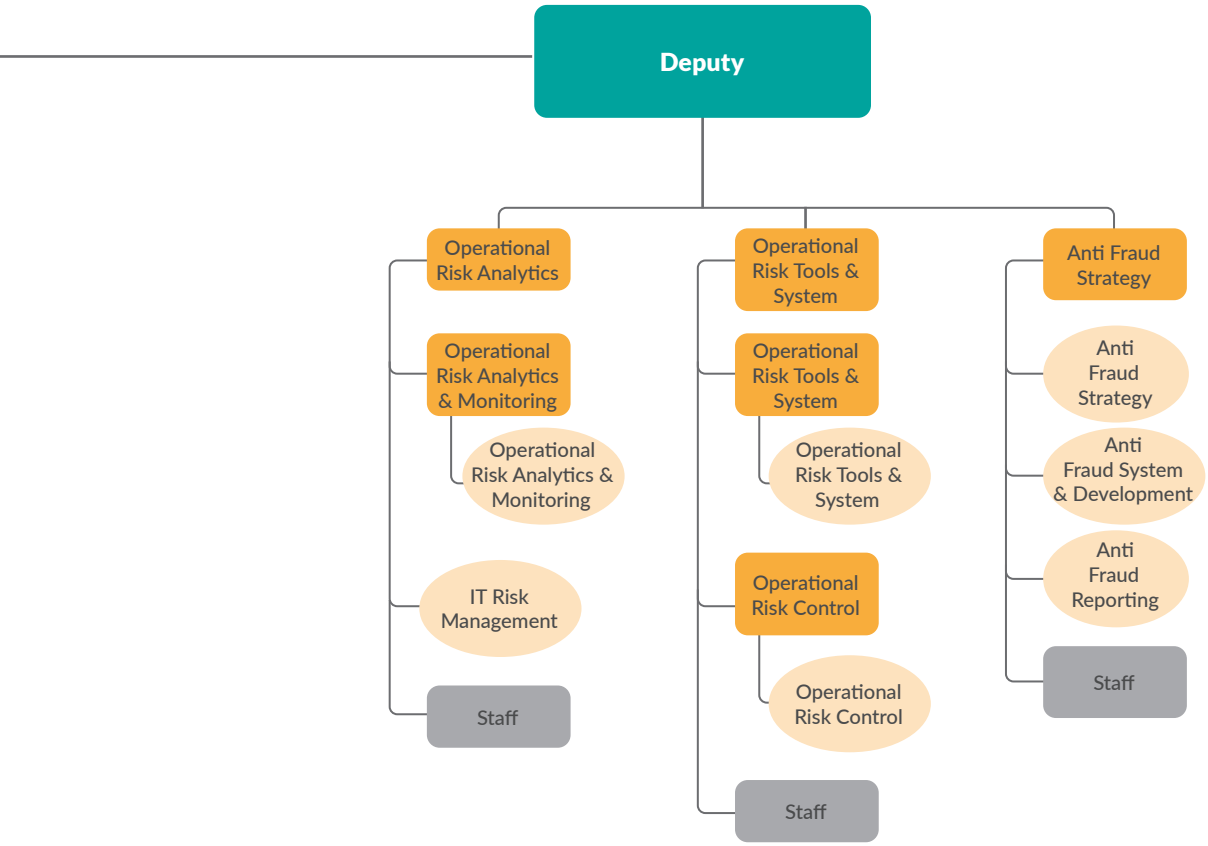

Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

M. Fanny Fansyuri

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	55 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 14 April 1967
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. No. 02/203-KEP/DIR tanggal 21 Juni 2022
Riwayat Pendidikan	Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran 1991
Riwayat Pekerjaan	• *Portfolio Risk & Risk Integration* PT Bank Syariah Indonesia • *Enterprise Risk Management Group Head* PT Bank Syariah Mandiri • *Strategic and Performance Management Group Head* PT Bank Syariah Mandiri
Hubungan Afiliasi	-

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian tersebut sesuai Standar Prosedur Operasional *Human Capital* PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan dan mengembangkan manajemen risiko operasional, pasar, likuiditas sesuai dengan regulasi dan *risk appetite* Bank, termasuk penerapan manajemen risiko di bidang teknologi informasi.
b. Mengembangkan dan memastikan penerapan strategi *anti fraud* yang efektif di BSI.
c. meminimalisasi terjadinya *Fraud*
d. Membuat, memutakhiran dan mensosialisasikan Kebijakan Manajemen Risiko dan ketentuan pelaksanaannya sesuai regulasi dan *best practices* manajemen risiko dan sosialisasi kebijakan tersebut.
e. Memastikan ketersediaan kajian risiko atas produk & aktivitas baru bank.
f. Melakukan pengukuran, pemantauan risiko, ketersediaan limit risiko dalam penerapan manajemen risiko serta pengembangan program *risk culture* dan *risk awareness*.
g. Membuat dan mengembangkan model, metodologi, analisa, serta validasi pengukuran risiko sesuai dengan *best practices* dan regulasi yang berlaku serta kajian efektivitas implementasi *risk management tools*.
h. Melakukan stress testing terhadap portfolio pembiayaan dan menyediakan rencana kontinjen yang menjadi acuan kondisi krisis.
i. Mengimplementasikan dan mengembangkan manajemen portofolio (*portfolio guideline*).
j. Mengimplementasikan dan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Bank.
k. Membuat, mengkaji, dan melaporkan profil risiko, Tingkat Kesehatan Bank dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
l. Menyediakan materi dan tindak lanjut keputusan Komite Manajemen Risiko.

Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko disampaikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Group Head	1 Orang
2	Deputy	1 Orang
3	Departement Head	6 Orang
4	Manager	12 Orang
5	Senior Officer	2 Orang
6	Officer	22 Orang
7	Staff	4 Orang
Total		**48 Orang**

Sertifikasi Manajemen Risiko

BSI terus mendorong peningkatan SDM di lingkungan Bank agar optimal dalam mendukung implementasi manajemen risiko. Upaya peningkatan kualitas tersebut antara lain dilakukan melalui pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko yang sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Jabatan	Jumlah	Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi
1	Group Head	1 Orang	Manajemen Risiko level 4	BNSP
2	Deputy	1 Orang	Manajemen Risiko level 3	BNSP
3	Departement Head	6 Orang	Manajemen Risiko level 3	BNSP
4	Manager	12 Orang	• Manajemen Risiko level 3 (3 orang) • Manajemen Risiko level 2 (9 orang)	BNSP
5	Senior Officer	2 Orang	Manajemen Risiko level 2 (2 orang)	BNSP
6	Officer	22 Orang	• Manajemen Risiko level 3 (5 orang) • Manajemen Risiko level 2 (3 orang) • Manajemen Risiko level 1 (14 orang)	BNSP

Risk Governance Structure

Bank Syariah Indonesia (BSI) Risk Governance Structure merupakan kerangka manjemen risiko yang mencakup tiga bagian utamam yaitu Risk Oversight, Risk Policy & Strategy, dan Risk Identification Measurement, Mitigation and Control. Unit Kerja Audit sebagai pendukung ketiga bagian utama tersebut dalam menjamin efektivitas pelaksanaannya.

BSI merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), satuan kerja operasional (Risk-taking unit), Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan satuan kerja pendukung lainnya. Satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (SKAI) dan SKMR independen terhadap satuan kerja bisnis bank.

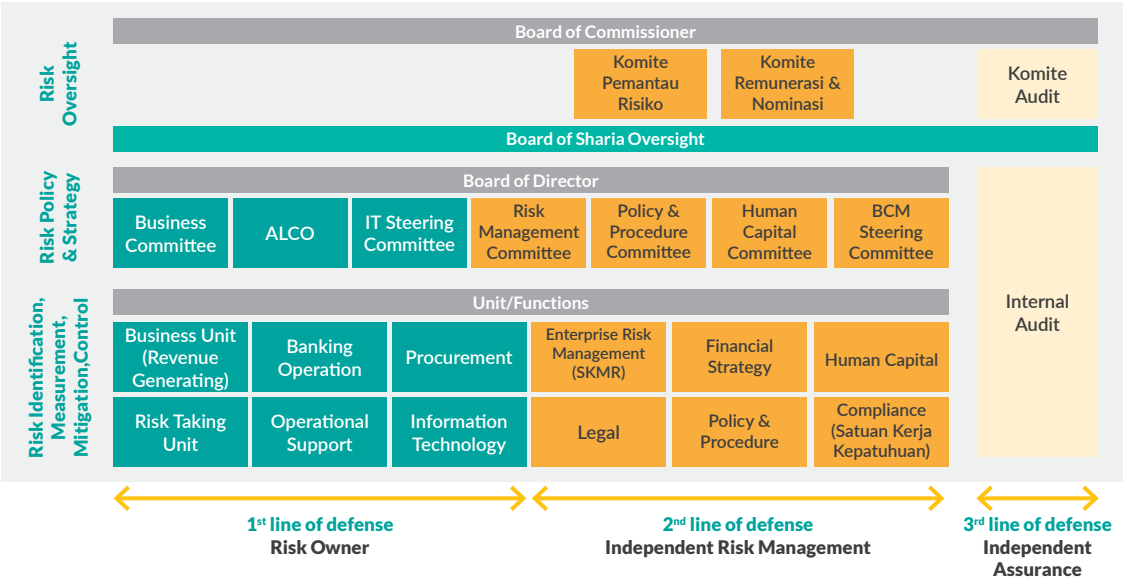

Pilar Penerapan Manajemen Risiko

Bank Syariah Indonesia menerapkan manajemen risiko yang mencakup 4 (empat) pilar sebagai berikut:

Penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI) senantiasa memastikan memiliki dan melaksanakan unsur-unsur penting yang terdapat pada penilaian kecukupan penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. **Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.**
   Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BSI. Peran pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan secara periodik melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Komisaris dengan jajaran Direksi dan eksekutif Bank (Rapat Komisaris dan Direksi).

   Peran pengawasan aktif oleh Direksi dilakukan secara intensif melalui Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, IT *Steering Committee*, Komite Bisnis, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Prosedur, Komite SDM, BCM Steering Committee, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Direksi (Rapat Dewan Direksi dan Rapat Direktur Bidang).

   Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah secara periodik dengan seluruh jajaran eksekutif Bank dan selalu menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

2. **Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit**
   Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan manajemen risiko.

   Struktur Kebijakan dan Prosedur di BSI secara leveling, meliputi:
   a. Kebijakan
   b. Standar Prosedur (Bisnis dan Operasional)
   c. Manual Produk
   d. Petunjuk Teknis Operasional

   BSI memastikan seluruh kegiatan yang memiliki eksposur risiko memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai acuan segenap unit kerja dalam melakukan kegiatan operasional sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk penetapan limit risiko untuk melindungi Bank dari risiko yang berlebihan (*excessive*) dan melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Kebijakan dan prosedur tersebut antara lain:

   a. Kebijakan dan Prosedur Bidang Operasional dan Jasa
      Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Sistem Pengendalian Internal, Kebijakan Dana dan Jasa, Kebijakan Operasional, Kebijakan Anti Fraud, SPB Penghimpunan Dana dan Jasa, SPO Transaksi Jasa, SPB Operasional Cabang, SPO Perlindungan dan Pengaduan Nasabah, SPO Human Capital, SPO Pengadaan Barang dan Jasa, SPO APU-PPT, SPO Teknologi Informasi, SPO *Business continuity Management* (BCM), SPP Manajemen Risiko Operasional.
   b. Kebijakan dan Prosedur Bidang Pembiayaan & Treasury
      Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Treasury, Kebijakan Sistem Pengendalian Internal, Kebijakan Pembiayaan BSI, SPB Pembiayaan Corporate, SPB Pembiayaan Commercial, SPB Pembiayaan SME, SPB Pembiayaan Micro, SPB Pembiayaan Konsumer, SPB Portfolio Guideline, SPB Treasury and International Banking.

3. **Kecukupan Proses Manajemen RIsiko & Sistem Informasi Manajemen Risiko**
   BSI menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta tersedianya sistem informasi yang memadai. Bank mengelola seluruh jenis risiko yang terkait dengan operasional bisnis Bank sesuai ketentuan regulator yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategik, risiko imbal hasil dan risiko investasi secara menyeluruh dan terintegrasi.
   a. Identifikasi Risiko
      - Pelaksanaan identifikasi, pengukuran & pemantauan risiko (profil risiko bulanan dan triwulanan)
      - Pelaksanaan Risk Assessment atas Produk & Aktivitas Baru.
      - Pelaksanaan identifikasi atas risiko pada penerapan manajemen risiko teknologi informasi
      - Pelaksanaan identifikasi atas penerapan *Business Continuity Management*
   b. Pengukuran Risiko
      - Penggunaan risk tools dalam pengukuran risiko antara lain *scoring, financing riskrating, Value at Risk, Liquidity Gap* dan *Repricing Gap*.
      - Pengembangan model/metodologi portfolio *guideline*
      - Pengukuran dan penetapan *risk appetite*
      - Pelaksanaan stress test risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas

- Pengembangan model CKPN
- Pengukuran risk premium
- Pengembangan model stress test hingga level *product*
- Pengembangan metodologi portfolio guideline segmen SME hingga level wilayah

c. Pemantauan Risiko
- Pemantauan utilisasi limit risiko
- Review atau pembuatan laporan risiko
- Implementasi *Risk Management Consolidation* dengan Bank Mandiri
- Evaluasi kewenangan memutus pembiayaan

d. Pengendalian Risiko
- Integrasi *policy & risk tools* ke dalam *financing origination*, *customer on boarding*, dan *collection system*
- Pembentukan *marketing asset & tracking asset* jaminan
- Penetapan limit risiko
- Pengembangan *advance and expert competencies*
- Peningkatan fungsi pengendalian/*risk control* yang diterapkan (*system*, organisasi, pengujian *control*)
- Penerapan program *Risk Awareness*
- Peningkatan kompetensi SDM (*risk based competencies*)
- Penerapan *Business Continuity Management* (BCM)
- Validasi *scoring model*
- Pembentukan fungsi strategi anti *fraud*

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko
- Pengembangan & Implementasi *Risk Management System*
- Pengembangan sistem *Liquidity Coverage Ratio*
- *E-Booklet Wholesale* Berbasis Digital

4. **Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh**
Bank Syariah Indonesia dalam menjaga efektifitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, berupaya untuk melakukan pengendalian internal berupa tindakan pencegahan (preventive action), deteksi dini (early detection), maupun tindakan perbaikan (corrective action) melalui pengawasan melekat yang menerapkan prinsip pengawasan ganda (dual control), pembagian tugas "check and balances"(segregation of duties), dan jejak audit (audit trail). Kualitas sistem pengendalian internal secara periodik dikaji oleh SKAI.

Tinjauan Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Bank Syariah Indonesia secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat pengelolaan sistem manajemen risiko Bank. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi, kebijakan manajemen risiko, kualitas penerapan manajeman risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Penilaian Profil Risiko BSI secara individu maupun terintegrasi sepanjang tahun 2022 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang di hadapi BSI dapat di kelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh BSI dengan baik dan memadai.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya untuk mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik.

Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efetivitas pelaksanaan manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan risiko antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
   a. Meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung aktivitas Bank melalui internal maupun eksternal *training* serta melakukan magang di perusahaan induk.
   b. Meningkatkan *risk awareness* pegawai antara lain melalui *e-learning* dan *refreshment* ketentuan.
   c. Meningkatkan *legal awareness* bagi seluruh jajaran Bank.
2. *Tools* dan Metodologi
   Memperkuat *internal control* melalui implementasi *control testing atas end to end business process*.
3. *System*
   Meningkatkan pengamanan IT system operasional.

Budaya Risiko

Dalam mewujudkan visi Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi "Top 10 Global Islamic Bank" BSI senantiasa menerapkan budaya sadar risiko dengan meningkatkan pengendalian intern, termasuk sistem pengendalian

risiko untuk memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh di semua lini bisnis/operasional Bank. Penerapan budaya risiko bertujuan untuk mengelola risiko agar mampu mengelola risiko sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian yang muncul dari setiap lini bisnis/operasional.

Setiap insan BSI harus profesional dalam menjalankan fungsi/tugas/pekerjaan, dengan fokus terhadap beberapa hal, yaitu:

a. Fokus terhadap target yang telah ditentukan
b. Bekerja dengan rasa penuh tanggungjawab
c. Memiliki budaya kerja yang diimplementasikan oleh setiap pegawai
d. Memiliki motivasi kerja yang tinggi
e. Bekerja sesuai ketentuan yang berlaku & menerapkan prinsip kehati-hatian.

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya untuk membangun budaya risiko yang kuat bagi seluruh lini bisnis/operasional Bank, antara lain melalui:

a. Sosialisasi *Risk Awareness* untuk meningkatkan awareness pegawai agar senantiasa mengelola risiko masing-masing, melalui Podcast Risk Management & pembuatan Infografis atas eksposur risiko signifikan.
b. Penerapan nilai *Core Value* AKHLAK di lingkungan kerja BSI yang meliputi Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, melalui program rutin mingguan yang disampaikan oleh Jajaran Top Manajemen secara langsung kepada seluruh pegawai.

Eksposur Permodalan dan Pengungkapan Risiko Permodalan

Bank Syariah Indonesia (BSI) secara prudent memenuhi permodalan sesuai regulatory capital requirement. BSI melakukan perhitungan dan pemantauan eksposur permodalan sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku. Capital Adequacy Rasio (CAR) BSI pada 31 Desember 2022 sebesar 20,36%. Hal ini menunjukkan bahwa BSI memiliki kemampuan permodalan yang cukup untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis/ operasionalnya.

BSI secara berkala melakukan review atas Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang mempengaruhi permodalan.

Profil Risiko Utama Dan Pengelolaan

1. **Risiko Kredit dan Risiko Investasi**
   Bank Syariah Indonesia (BSI) mengelola risiko kredit dan investasi secara menyeluruh, sejak pembiayaan dan investasi diberikan sampai dengan pembiayaan berakhir.

   a. **Organisasi**
   BSI memiliki perangkat organisasi manajemen risiko kredit dan investasi untuk menjaga aktifitas pembiayaan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank menetapkan 3 pilar organisasi dalam proses pembiayaan. Pilar pertama adalah unit bisnis yang melakukan inisiasi bisnis. Pilar kedua adalah unit risk assessment yang melakukan analisa risiko pembiayaan. Pilar ketiga adalah unit *financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen. Bank menetapkan unit *recovery* yang berfungsi menangani pembiayaan bermasalah. Unit tersebut independen terhadap unit bisnis dan unit risk assessment yang memberikan pembiayaan.

   b. **Kebijakan, Prosedur dan Limit**
   BSI membuat kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolan pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Portfolio *Guideline*, Manual Produk dan Petunjuk Teknis Operasional untuk masing-masing segmen pembiayaan.

   Bank menetapkan limit inhouse BMPD, *credit line*, kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada level transaksional, Bank menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan termasuk investasi surat berharga.

   c. **Proses Pengelolaan Risiko**
   BSI melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:
   1) Arah ekspansi pembiayaan mengacu pada Portfolio *Guideline*, yang mencakup:
      a) *Industry Class*
      Pengelolaan risiko pembiayaan Bank diawali dengan menetapkan klasifikasi sektor industri yang akan menjadi target market. Bank membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam empat kelompok, yaitu menarik, netral, selektif, dan waspada. Bank menetapkan *industry class* untuk 101 sektor industri. Pembiayaan diarahkan pada sektor/ bidang usaha dengan klasifikasi menarik dan netral.

b) *Industry Limit*
Dalam rangka mengelola risiko konsentrasi dari portfolio pembiayaan, Bank menetapkan limit portfolio pembiayaan untuk masing-masing industri. Limit sektor industri tersebut ditetapkan berdasarkan pada kriteria industry class masing-masing sektor.

c) *Industry Acceptance Criteria*
Bank menetapkan *Industry Acceptance Criteria* sebagai salah satu proses dalam menentukan *targeted customer* pada suatu sektor industry serta untuk menyaring calon nasabah. *Industry Acceptance Criteria* merupakan kriteria seleksi awal nasabah yang dirumuskan berdasarkan *critical factor* dari masing-masing sektor industri yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

2) Penetapan metode *acquisition* dan pengukuran risiko nasabah melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, *scoring* pembiayaan ritel dan *financing risk rating* pembiayaan *wholesale*.
3) Early warning system dengan menggunakan *watchlist tools* yang dapat memberikan indikasi/deteksi secara dini kondisi nasabah sehingga Bank dapat menetapkan *account strategy* yang antara lain mencakup aktivitas *collection*, *recovery* maupun restrukturisasi. Termasuk di dalam *early warning* sistem adalah portfolio alert yang bertujuan untuk memonitor kinerja portofolio pembiayaan dan kesesuaian terhadap limit risiko yang ditetapkan baik oleh internal Bank maupun regulator.
4) Pelaksanaan stress test terhadap kondisi ekstrim tetapi mungkin terjadi (plausible) baik secara berkala maupun insidentil yang bertujuan untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila terjadi perubahan kondisi eksternal seperti makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan Bank.
5) Penetapan jangka waktu pembiayaan dengan mempertimbangkan jenis pembiayaan, imbal hasil, likuiditas dan potensi risiko.
6) Kajian/ Evaluasi kecukupan limit wewenang memutus pembiayaan.
7) Penetapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pembiayaan.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko
BSI memiliki Sistem Informasi Manajemen yang menyediakan data pengelolaan risiko kredit. Bank melaporkan eksposur risiko kredit secara rutin baik untuk pihak internal maupun eksternal.

2. Risiko Pasar
Bank Syariah Indonesia (BSI) terekspose Risiko pasar dari aktivitas treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga, pasar uang, dan forex (foreign exchange) serta produk e-mas karena terdapat persediaan emas. Pengelolaan risiko pasar bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif pergerakan variabel pasar terhadap portofolio Bank.

a. Organisasi
BSI menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi antara *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan forex.

Unit bisnis atau unit treasury menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi treasury. Front office berfungsi sebagai *first line of defence* yang melakukan transaksi.

Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defence*, yang melakukan fungsi *review* limit risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar.

Unit kerja operasional yang menjalankan fungsi *back office* dengan melakukan *settlement* dan pembukuan transaksi.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit
BSI menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Treasury, Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking*, PTO *Asset and Liability* serta ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar.

Bank menetapkan limit risiko mencakup:

Surat Berharga
a. *Value at Risk*
b. *Open Position*
c. *Stop Loss*
d. *Cut Loss*
e. *Holding Period*
f. *Unrealized Loss Surat* Berharga AFS
g. Tenor Periode
h. Transaksi Sukuk

Nilai Tukar
a. *Value at Risk*
b. *Open Position*
c. *Stop Loss*
d. PDN
e. Transaksi Forex

Emas
Stock Emas

c. Proses Manajemen Risiko
1) Risiko *Benchmark* Suku Bunga
Terekspose Risiko Benchmark Suku

Bunga atas portofolio surat berharga. BSI mengelola Risiko *Benchmark* Suku Bunga melalui:

a. Identifikasi risiko pada produk dan aktivitas bank melalui analisa risiko dan memberikan rekomendasi kepada unit bisnis dan manajemen. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui adanya risiko benchmark suku bunga dan sumber risiko agar risiko dapat dikendalikan dan dimitigasi.
b. Pengukuran risiko menggunakan metode Standard dan metode internal yaitu *Value at Risk* (VaR). VaR menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan yield surat berharga dalam kondisi pasar yang normal.

   Bank melakukan stress test untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis.

   Bank melakukan 7 (tujuh) kali stress test risiko pasar sepanjang tahun 2022, untuk menilai kemampuan bank dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi.
c. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan. Pemantauan eksposur risiko dilakukan pada treasury system bank.
d. Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit trading surat berharga. Apabila terdapat *unrealized loss* akibat penurunan harga pasar surat berharga, bank dapat melakukan penjualan atau *cut loss* sesuai mekanisme yang ditetapkan, untuk menghindari kerugian lebih besar. Penetapan harga pasar surat berharga trading secara harian menggunakan harga pasar dari sumber yang independen.

2) Risiko Nilai Tukar

Mengelola Risiko Nilai Tukar melalui :

a. Identifikasi risiko pada produk dan aktivitas bank. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui adanya risiko nilai tukar dan sumber risiko agar risiko dapat dikendalikan dan dimitigasi.
b. Pengukuran risiko menggunakan tools *Value at Risk* (VaR). Bank menjaga Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai limit yang telah ditetapkan. PDN Keseluruhan per 31 Desember 2022 sebesar 0,57% atau masih dalam batas limit internal bank maksimal 15%.

   Bank melakukan stress test untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis.

   Bank melakukan 7 (tujuh) kali stress test risiko pasar sepanjang tahun 2022, untuk menilai kemampuan bank dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi.
c. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan. Pemantauan eksposur risiko dilakukan menggunakan treasury system bank.
d. Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit dan squaring posisi valas.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

BSI memiliki *Treasury core system* yang dapat menyediakan data untuk pengukuran risiko pasar. Bank melaporkan eksposur manajemen risiko pasar secara rutin kepada pihak internal maupun eksternal.

e. Pengelolaan Portofolio *Trading Book* dan *Banking Book* serta Metodologi Valuasi

Pengelolaan portofolio *trading book* dilakukan sesuai limit yang telah ditetapkan dan batasan regulasi. Bank melakukan *mark to market* atas surat berharga trading secara harian menggunakan harga pasar dari sumber yang independen antara lain Penilai Harga Efek Indonesia, Bloomberg atau Reuters.

Risiko pasar *banking book* adalah risiko penurunan profitabilitas dan nilai ekonomis modal karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil pasar dan nilai tukar. Pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan melalui *review price asset* dan liabilities sehingga mendapatkan imbal hasil yang maksimal.

3. Risiko Likuiditas

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengelola risiko likuiditas untuk menjaga kecukupan atau ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban Bank. Bank terekspose Risiko Likuiditas dari aktivitas fungsional pembiayaan, treasury dan investasi, serta pendanaan dan penerbitan surat

berharga. Risiko Likuiditas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu:

1) Risiko Likuiditas Pendanaan yang merupakan risiko yang timbul dikarenakan Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas, dapat disebabkan oleh
   a) Ketidakmampuan Bank untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
   b) Ketidakmampuan Bank menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.
2) Risiko Likuiditas Pasar merupakan risiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan close out posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar.

a. Organisasi

BSI melakukan pemisahan fungsi antara unit tresuri sebagai front office, unit manajemen risiko sebagai middle office, dan unit operation sebagai back office.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

BSI menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Treasury, Standar Prosedur Bisnis Treasury dan International Banking, PTO Asset and Liability. BSI telah menetapkan limit/indikator likuiditas.

a. Giro Wajib Minimum (GWM)
b. Safety Level
c. Deposan Inti
d. Net Stable Funding Ratio (NSFR)
e. Liquidity Coverage Ratio (LCR)
f. Aset Likuid terhadap Non Core Deposit
g. Aset Likuid terhadap DPK

c. Proses Pengelolaan Risiko

BSI dalam mengelola likuiditas :

1) Melakukan identifikasi risiko likuiditas pada produk dan aktivitas bank
2) Melakukan penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas
3) Melakukan pengukuran rasio-rasio likuiditas, proyeksi *cashflow*, *liquidity gap*, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)
4) Memelihara akses ke pasar uang antar Bank Syariah
5) Melakukan stress test risiko likuiditas secara berkala. Bank melakukan 8 (delapan) kali stress test risiko pasar sepanjang tahun 2022, untuk menilai kecukupan likuiditas dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi.termasuk dalam rangka penyusunan Recovery Plan.
6) Menetapkan limit-limit risiko likuiditas sesuai kondisi internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.
7) Memantau rasio likuiditas secara rutin
8) Menetapkan Indikator Peringatan Dini dan Rencana Pendanaan Darurat atau *Liquidity Contigency Plan* (LCP) antara lain melalui penggunaan instrumen money market, penjualan surat berharga, peningkatan nisbah imbal hasil dana dan penggunaan fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia.
9) Memonitor pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, yield, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan informasi pasar terkini.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

BSI memiliki Management Information System yang menyediakan data dan informasi untuk pengukuran risiko likuiditas. BSI menyampaikan laporan eksposur risiko likuiditas secara berkala baik kepada pihak internal maupun eksternal.

e. Mekanisme Pengukuran dan Stress Test serta Pengendalian Risiko Likuiditas

BSI melakukan pengukuran kecukupan likuiditas melalui proyeksi cashflow, liquidity gap, dan perhitungan core dana. Di samping itu bank melakukan penilaian profil risiko likuiditas dan pengukuran rasio-rasio likuiditas antara lain mencakup *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), rasio deposan terbesar, rasio aset likuid terhadap *non core deposit* (AL NCD), rasio aset likuid terhadap DPK (AL DPK).

Untuk mengukur kecukupan likuiditas saat terjadi kondisi krisis sesuai skenario yaitu kejadian eksternal yang ekstrim tetapi mungkin terjadi, Bank melakukan stress test likuiditas secara berkala dan menetapkan *contingency plan*.

f. Rasio Kecukupan Likuiditas

BSI memiliki kecukupan likuiditas yang memadai. Cadangan likuiditas Rupiah per 31 Desember 2022 mencapai Rp23,65 Triliun atau di atas *safety level* minimal Rp5,3 Triliun. Cadangan likuiditas valas per 31 Desember 2022 USD270,92 Juta atau di atas *safety level* minimal USD59,3 Juta.

Rasio kecukupan likuiditas atau LCR per 31 Desember 2022 mencapai 173,88% atau di atas limit minimal 130%. Rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR per 31 Desember 2022 mencapai 138,47% atau di atas limit minimal 110%.

4. Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk meminimalisasi eksposur risiko yang disebabkan faktor kesalahan manusia, ketidakcukupan prosedur internal, kegagalan sistem dan kejadian eksternal.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengelola risiko operasional di seluruh organisasi pada semua lini bisnis bank, baik di *firstline* unit, *secondline* unit, maupun *thirdline* unit. Bank menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) melalui pemisahan fungsi *maker*, *checker*, *approver*/ otorisator, dan mekanisme dual control dalam setiap transaksi.

BSI memiliki *framework* pengelolaan risiko operasional sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Organisasi

BSI memiliki fungsi pengelola manajemen risiko operasional yang terpisah dari satuan kerja operasional. Di samping itu, bank memiliki organ pengawasan yang bertugas untuk memastikan penerapan manajemen risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan cabang:

1) Senior Operational Risk (SOR)
   a) SOR merupakan organ pengawasan di Kantor Pusat yang menjalankan fungsi koordinator pelaksanaan *review*/ *examination*, *compliance assurance*, *services*, *operational risk*, dan investigasi sesuai dengan kewenangan.
   b) Secara organisasi SOR bertanggungjawab langsung (*solid line*) kepada Sales & Distribution Director dan berkoordinasi (*dotted line*) kepada Risk Management Director dan Compliance & Human Capital Director.
2) Regional Business Control (RBC)
   c) RBC merupakan organ pengawasan yang ditempatkan di *region office* untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional dan internal control di Kantor Wilayah, Area, dan Cabang.
   d) Secara organisasi RBC bertanggungjawab kepada Regional Head, namun memiliki fungsi koordinasi (*dotted line*) kepada SOR.
3) Desentralized Compliance & Operational Risk (DCOR)
   a) DCOR merupakan organ pengawasan yang ditempatkan di setiap Direktorat Kantor Pusat untuk memantau dan memastikan penerapan kepatuhan, pengelolaan risiko operasional dan internal control di unit kerja Kantor Pusat.
   b) Secara organisasi DCOR bertanggungjawab kepada SOR.

b. Kebijakan, Prosedur dan Limit

BSI memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja, meliputi:

1) Kebijakan Manajemen Risiko Operasional;
2) Standar Prosedur Pengendalian Manajemen Risiko Operasional;
3) Petunjuk Teknis Operasional Operational Risk Management Tools;
4) Petunjuk Teknis Operasional Regional Business Control (RBC);
5) Petunjuk Teknis Operasional Decentralized Compliance and Operational Risk (DCOR);
6) Petunjuk Teknis Operasional Kerugian Risiko Operasional.

BSI mengevaluasi Kebijakan, Standar Prosedur Manajemen Risiko Operasional dan Petunjuk Teknis Operasional secara berkala minimal satu tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi internal dan eksternal Bank.

BSI menetapkan limit transaksi operasional dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat kelancaran aktivitas operasional Bank. Bank mengevaluasi limit risiko operasional secara berkala, meliputi:

1) Limit Transaksi Operasional Kantor Pusat, Region, Area dan *Branch*;
2) Limit Transaksi *Electronic Channel* (Internet *Banking*, ATM, dan Mobile Banking);
3) Limit *Procurement*;
4) Limit Kustodian;
5) Limit *Bulk Transaction*.

c. *Business Continuity Management*

BSI menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) untuk menjamin keberlangsungan operasional Bank pada saat terjadi disaster. Dalam rangka penguatan penerapan BCM, pada tahun 2021 Bank melakukan:

1) Pemutakhiran ketentuan terkait BCM
2) Pemutakhiran *Business Impact Analysis* (BIA), *Risk Assessment* (RA) dan *Business Continuity Strategy* (BC Strategy) tahun 2022.
3) Pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan* (BCP) Kantor Pusat melalui *Business Recovery Center* (BRC).
4) Pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk *Information Technology* (IT) secara Periodik.
5) Penanganan dan pencegahan Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
6) Persiapan menuju sertifikasi ISO 22301 (*Business Continuity Management System*).
7) *Benchmark update* implementasi *Business Continuity Management* sebagai bagian dari *synergy* dengan bank Induk.
8) Relokasi *Business Recovery Center* (BRC) dari Rempoa ke KC Fatmawati 2 yang lebih representative.
9) Sosialisasi *Business Continuity Management* di Kantor Pusat, Region, Area dan Kantor Cabang.

d. Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan digitalisasi, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dengan memperhatikan identifikasi dan mitigasi risiko.

BSI menerapkan manajemen risiko teknologi informasi melalui:

1) Komite Pengarah Teknologi Informasi (IT *Streering Committee*)
2) Penetapan rencana strategis IT yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
3) Standardisasi perangkat jaringan komunikasi data dan *software*, pengelolaan kewenangan akses sistem, pengembangan layanan perbankan elektronik dari segi keamanan aksesibilitas dan DRP.
4) Penerapan pengembangan sistem aplikasi dengan model *Software Development Life Cycle* (SDLC)
5) Pelaksanaan *Penetration Test* (PenTest) untuk menguji keamanan dan kehandalan sistem aplikasi dari potensi serangan *cyber crime*.
6) Pelaksanaan *Release Control Board* (RCB) untuk memastikan sistem yang akan diimplementasikan telah memenuhi standar pengembangan IT yang memadai baik dari aspek kecukupan infrastruktur IT, keamanan IT, proses bisnis maupun prosedur.

e. *Tools* Pengelolaan Risiko

BSI menerapkan *Operational Risk Management Tools*, yaitu:

1) *Risk & Control Self Assessment* (RCSA)
   RCSA merupakan tools untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi risiko operasional. RCSA dilakukan secara mandiri oleh unit kerja dan di-review oleh DCOR/RBC.
   Bank menerapkan RCSA secara end to end process sehingga potensi risiko operasional dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan dapat dilakukan mitigasi secara dini untuk meminimalisasi potensi risiko operasional. RCSA dilakukan secara berkala.
2) *Key Risk Indicator* (KRI)
   KRI merupakan *tools* untuk mengidentifikasi secara dini indikator-indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan treshold tertentu.
3) *Loss Event Database* (LED)
   LED merupakan tools untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami oleh Bank. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat terjadi insiden.
4) *Control Testing* (CT)
   CT merupakan tools untuk menguji kecukupan kontrol operasional, dan menetapkan langkah perbaikan kontrol secara berkelanjutan. Bank telah menerapkan CT dalam proses bisnis pembiayaan gadai, pembiayaan mikro, operasional cabang, pembiayaan konsumer kendaraan, pembiayaan komersial, dan pembiayaan korporasi. CT dilakukan oleh RBC dan DCOR melalui *onsite review* di unit kerja dan cabang secara berkala.

Selain tools di atas, Bank mengembangkan metodologi lain sebagai berikut:

1) *Risk Maturity Level* (RML)
   RML merupakan suatu pendekatan / model pengukuran penerapan manajemen risiko di suatu organisasi. Dengan demikian Bank dapat mengetahui tingkat maturitas

penerapan manajemen risiko. Informasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan mapping dan menyusun strategi manajemen risiko yang efektif, guna mendukung pencapaian target Bank.

2) *Risk Appetite* (RA)
RA merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui tingkat risiko yang akan diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran bisnis. Penetapan *Risk Appetite* risiko operasional memperhitungkan berbagai macam aspek (indikator bisnis, data histori kerugian risiko operasional, rencana tipe produk, ekspansi bisnis, rencana penggantian sistem, dan aktivitas lain yang dapat meningkatkan eksposure risiko operasional).

f. Sistem Informasi Manajemen Risiko
BSI melaporkan hasil penerapan manajemen risiko operasional setiap bulan baik untuk pelaporan internal maupun eksternal kepada entitas utama dan kepada regulator.
1) Profil Risiko Operasional
2) Operational *Risk Loss Control Metrics*
3) Operational *Risk Loss Incident*
4) Laporan Penerapan Operational Risk tools unit Kerja meliputi:
   a. Laporan Profil Risiko Operasional Unit Kerja Kantor Pusat
   b. Laporan Profil Risiko Operasional Region office

5. Risiko Lainnya
Bank Syariah Indonesia (BSI) mengelola risiko lainnya yang mencakup risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko imbal hasil.
a. Organisasi
BSI memisahkan unit kerja yang berperan mengelola risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko stratejik dengan satuan kerja operasional lainnya.
b. Kebijakan, Prosedur dan Limit
BSI memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur Manajemen Risiko untuk mendukung pengelolaan risiko lainnya, antara lain Standar Prosedur Pengendalian Hukum, Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan, Standar Prosedur Prosedur Pengendalian *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengaduan Nasabah, Standar Prosedur Operasional *Corporate Secretary*, Standar Prosedur Operasional Rencana Korporasi (*Corporate Plan*), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan Standar Prosedur Operasional *Performance Management*.
c. Proses Pengelolaan Risiko Lainnya
BSI mengelola risiko-risiko lainnya melalui:
1) Penanganan dan pemantauan eksposur risiko hukum, baik perkara pidana maupun non pidana. Pengendalian risiko hukum dilakukan antara lain dengan membentuk cadangan kerugian untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, Bank menggunakan jasa *external lawyer* dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi
2) Penyelesaian pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management* dan pengukuran risiko reputasi melalui *Publicity Effectiveness Level* (PEL), serta pemantauan terhadap pemberitaan-pemberitaan di media
3) Evaluasi kinerja dan efektivitas strategi melalui *performance review* secara berkala dan berjenjang
4) Penerapan Sistem Informasi Kepatuhan (SIK)
5) Pelaksanaan fungsi internal sharia advisory untuk mengkaji dan menganalisas kesesuaian produk/aktivitas Bank dengan prinsip Syariah
6) Review imbal hasil pendanaan dan pembiayaan serta penerapan protokol penyesuaian nisbah spesial

Profil Risiko

Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan penilaian secara mandiri (*self assessment*) terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional BSI dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh stakeholder mengenai kondisi risiko usaha dan potensi kerugian yang dihadapi BSI di masa yang akan datang dalam periode tertentu.

Peringkat komposit profil risiko Bank per 31 Desember 2022 adalah 2 dengan predikat risiko inheren adalah Low to Moderate, dan predikat kualitas penerapan manajemen risiko adalah *Satisfactory*.

No.	Risiko	Inherent Risk	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Net Risk
1	Risiko Kredit	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
2	Risiko Pasar	*Low*	*Satisfactory*	1
3	Risiko Likuiditas	*Low*	*Satisfactory*	1
4	Risiko Operasional	*Moderate*	*Satisfactory*	2
5	Risiko Hukum	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
6	Risiko Reputasi	*Low*	*Satisfactory*	1
7	Risiko Strategy	*Low*	*Satisfactory*	1
8	Risiko Kepatuhan	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
9	Risiko Investasi	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
10	Risiko Imbal Hasil	*Low to Moderate*	*Satisfactory*	2
Peringkat Komposit		*Low to Moderate*	*Satisfactory*	**2**

Konsolidasi dan Integrasi Manajemen Risiko dengan Perusahaan Induk

Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan perusahaan induk yang menjadi entitas utama dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk (Bank Mandiri). Konsolidasi dan integrasi ditujukan untuk penguatan pengelolaan risiko secara internal dan memenuhi ketentuan regulator.

Konsolidasi dan integrasi penerapan manajemen risiko tersebut mencakup konsolidasi, antara lain:
1) Sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen risiko.
2) Sinkronisasi arsitektur kebijakan dan prosedur operasional BSI.
3) *Tools* dan metodologi manajemen risiko.

Secara berkala BSI bersama perusahaan induk menyelenggarakan *Integrated Risk Management* Forum dan Annual *Integrated Risk and Governance Conference*, serta forum konsultasi/sharing dan diskusi lainnya sesuai kebutuhan.

Pengungkapan Kuantitatif

a. Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank

(Rp juta)

Komponen Modal	2022	2021	2020
Modal:			
- Modal Inti	31.232.293	23.173.019	20.420.394
- Modal Pelengkap	1.877.656	1.949.750	2.076.847
Jumlah Modal Untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar	33.109.949	25.122.769	22.497.241
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	129.730.824	113.643.146	101.719.501
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	306.184	103.913	1.035.985
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	33.120.795	-	20.569.561
Jumlah ATMR Untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Pasar	163.157.803	113.747.059	123.325.047

b. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

1. Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO				
		SUMATERA	JAKARTA	JAWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	90.953.140	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	12.465.506	1.898.090	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	5.128	2.864.369	120.328	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	5.286.530	3.196.642	17.873.213	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	2.308	-	200	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	17.007.913	1.331.050	9.193.654	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	16.093.738	4.084.928	25.382.689	
9	Tagihan kepada Korporasi	10.955.582	16.940.903	22.601.160	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	370.788	119.896	589.980	
11	Aset Lainnya	116.855	9.223.547	2.239.776	
	TOTAL	**49.838.842**	**141.179.981**	**79.899.090**	

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO				
		SUMATERA	JAKARTA	JAWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	87.229.391	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	363	14.835.867	1.455.431	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	7.512	2.200.469	73.187	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	4.819.589	2.851.064	15.607.986	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	4.821	5.316	3.368	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	10.626.880	722.560	5.782.799	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	15.983.679	4.600.695	18.942.176	
9	Tagihan kepada Korporasi	9.278.924	15.881.043	17.967.644	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	361.901	176.709	721.922	
11	Aset Lainnya	89.367	7.887.906	883.543	
	TOTAL	**41.173.036**	**136.391.020**	**61.438.056**	

Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah:
1 Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2 Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3 Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian tagihan bersih dari masing-masing wilayah.
4 Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.

(Rp Juta)

31 DESEMBER 2022						
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH						
	KALIMANTAN	SULAWESI & MALUKU	BALI & NUSA TENGGARA	IRIAN JAYA & PAPUA	LUAR INDONESIA	TOTAL
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	-	-	-	-	-	90.953.140
	-	-	1.500.532	-	-	15.864.128
	-	-	-	-	-	-
	1	12.709	-	-	-	3.002.535
	1.966.067	1.607.183	723.219	19.571	-	30.672.425
	-	3.991	-	-	-	6.499
	3.439.850	5.887.307	1.861.709	306.733	-	39.028.216
	2.506.943	3.499.266	2.233.253	159.188	-	53.960.005
	11.208.760	1.758.202	650.711	72.380	-	64.187.698
	82.825	64.864	64.153	615	-	1.293.121
	25.922	49.825	9.516	2.112	-	11.667.553
	19.230.368	**12.883.347**	**7.043.093**	**560.599**	**-**	**310.635.320**

31 DESEMBER 2021						
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH						
	KALIMANTAN	SULAWESI & MALUKU	BALI & NUSA TENGGARA	IRIAN JAYA & PAPUA	LUAR INDONESIA	TOTAL
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	-	-	-	-	-	87.229.391
	-	-	-	-	-	16.291.661
	-	-	-	-	-	-
	9	8.929	-	-	-	2.290.106
	2.138.511	1.555.769	809.396	23.440	-	27.805.755
	1.670	18.580	1.492	-	-	35.247
	2.336.415	4.363.603	977.403	271.068	-	25.080.728
	2.189.482	2.955.375	2.078.908	132.909	-	46.883.224
	7.820.925	1.370.135	586.956	262.719	-	53.168.346
	76.581	97.879	29.966	1.449	-	1.466.407
	15.547	34.616	5.762	2.217	-	8.918.958
	14.579.140	**10.404.886**	**4.489.883**	**693.802**	**-**	**269.169.823**

c. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

2. Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022			
		TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH			
		< 1 TAHUN	> 1 TAHUN S.D. 3 TAHUN	> 3 TAHUN S.D. 5 TAHUN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	52.519.757	23.226.901	9.462.773	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7.481.218	1.454.649	2.220.611	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	2.824.387	87.964	72.561	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	212.825	1.487.646	2.543.589	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	2.508	3.991	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	182.125	1.857.428	4.047.923	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	6.692.864	11.962.829	12.733.026	
9	Tagihan kepada Korporasi	12.423.008	9.880.291	10.035.966	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	245.003	239.145	316.768	
11	Aset Lainnya	3.469.975	-	-	
	TOTAL	**86.053.670**	**50.200.844**	**41.433.217**	

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021			
		TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN WILAYAH			
		< 1 TAHUN	> 1 TAHUN S.D. 3 TAHUN	> 3 TAHUN S.D. 5 TAHUN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan kepada Pemerintah	53.095.613	22.913.022	8.235.149	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	7.292.916	1.160.309	1.452.584	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	2.190.383	45.114	43.060	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	170.640	1.486.011	2.605.810	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	34.347	900	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	100.942	977.321	2.321.392	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	6.311.049	10.940.868	8.816.359	
9	Tagihan kepada Korporasi	16.488.627	6.982.779	8.322.266	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	332.403	310.430	280.207	
11	Aset Lainnya	2.641.803	-	-	
	TOTAL	**88.658.723**	**44.816.754**	**32.076.827**	

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak:
1 Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2 Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3 Pemetaan ke dalam skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos Neraca, TRA dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang memiliki jatuh tempo kontraktual. Untuk pos Neraca, TRA dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non maturity items*) dimasukkan ke dalam kolom non-kontraktual.

(Rp Juta)

	> 5 TAHUN	NON KONTRAKTUAL	TOTAL
	(6)	(7)	(8)
	5.743.709	-	90.953.140
	4.707.650	-	15.864.128
	-	-	-
	17.623	-	3.002.535
	26.428.365	-	30.672.425
	-	-	6.499
	32.940.740	-	39.028.216
	22.571.286	-	53.960.005
	31.848.433	-	64.187.698
	492.205	-	1.293.121
	-	8.197.578	11.667.553
	124.750.011	**8.197.578**	**310.635.320**

	> 5 TAHUN	NON KONTRAKTUAL	TOTAL
	(6)	(7)	(8)
	2.985.607	-	87.229.391
	6.385.852	-	16.291.661
	-	-	-
	11.549	-	2.290.106
	23.543.294	-	27.805.755
	-	-	35.247
	21.681.073	-	25.080.728
	19.840.831	974.117	46.883.224
	21.374.674	-	53.168.346
	543.367	-	1.466.407
	-	6.277.155	8.918.958
	96.366.247	**7.251.272**	**269.169.823**

d. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

3. Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi

NO.	SEKTOR EKONOMI				
		TAGIHAN KEPADA PEMERINTAH	TAGIHAN KEPADA ENTITAS SEKTOR PUBLIK	TAGIHAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	208.603	-	
2	Perikanan	-	242	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	1.500.000	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.596.933	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	2.224.244	-	
6	Konstruksi	-	6.648.450	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	253.488	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	38.362	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	2.069.437	-	
10	Perantara Keuangan	1.492.500	1.063.029	-	
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	532	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	
20	Lainnya	89.460.640	260.808	-	
	Total	**90.953.140**	**15.864.128**	**-**	

(Rp Juta)

31 DESEMBER 2022								
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI								
	TAGIHAN KEPADA BANK	PEMBIAYAAN BERAGUN RUMAH TINGGAL	PEMBIAYAAN BERAGUN PROPERTI KOMERSIAL	PEMBIAYAAN PEGAWAI / PENSIUNAN	TAGIHAN KEPADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN PORTOFOLIO RITEL	TAGIHAN KEPADA KORPORASI	TAGIHAN YANG TELAH JATUH TEMPO	ASET LAINNYA
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	3.838	2.826.050	10.125.328	58.056	-
	-	-	-	52.864	454.338	331.942	19.786	-
	-	-	-	565	10.093	2.255.440	6.129	-
	-	-	-	40	1.335.835	6.233.294	146.312	-
	-	-	-	460	15.345	1.391.209	73.562	-
	-	-	5.779	-	235.439	8.918.436	78.570	-
	-	-	-	57.857	10.811.000	5.528.926	239.747	-
	-	-	-	-	1.448.890	648.812	16.054	-
	-	-	-	-	373.887	3.012.716	8.990	-
	160.487	-	-	-	11.832	2.319.757	57	-
	-	-	720	53	623.126	3.313.954	29.565	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.070	174.160	3.693.266	8.391	-
	-	-	-	122	386.957	4.705.248	2.063	-
	-	-	-	49.720	1.950.202	415.152	30.316	-
	-	-	-	3.571	77.866	97.394	2.450	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	30.672.425	-	38.858.056	32.919.727	8.683.001	573.073	-
	2.842.048	-	-	-	305.258	2.513.823	-	11.667.553
	3.002.535	**30.672.425**	**6.499**	**39.028.216**	**53.960.005**	**64.187.698**	**1.293.121**	**11.667.553**

NO.	SEKTOR EKONOMI				
		TAGIHAN KEPADA PEMERINTAH	TAGIHAN KEPADA ENTITAS SEKTOR PUBLIK	TAGIHAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	-	232.566	-	
2	Perikanan	-	522	-	
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	
4	Industri Pengolahan	-	1.176.341	-	
5	Listrik, Gas, dan Air	-	2.526.030	-	
6	Konstruksi	-	7.198.478	-	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	341.088	-	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	-	40.862	-	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	-	2.075.401	-	
10	Perantara Keuangan	-	1.672.732	-	
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	11.876	-	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	-	-	-	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	
20	Lainnya	87.229.391	1.015.765	-	
	Total	**87.229.391**	**16.291.661**	**-**	

Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi:
1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di Neraca, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK), dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.

(Rp Juta)

31 DESEMBER 2021								
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI								
	TAGIHAN KEPADA BANK	PEMBIAYAAN BERAGUN RUMAH TINGGAL	PEMBIAYAAN BERAGUN PROPERTI KOMERSIAL	PEMBIAYAAN PEGAWAI / PENSIUNAN	TAGIHAN KEPADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN PORTOFOLIO RITEL	TAGIHAN KEPADA KORPORASI	TAGIHAN YANG TELAH JATUH TEMPO	ASET LAINNYA
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	-	-	-	29.367	2.334.046	6.200.695	88.162	-
	-	-	-	1.429	913.286	632.324	30.428	-
	-	-	-	84	30.896	2.373.441	7.745	-
	-	-	-	805	1.225.062	5.776.422	229.024	-
	-	-	-	189	22.856	1.196.885	34.859	-
	-	-	22.218	555	266.451	6.919.097	184.087	-
	-	-	-	9.172	7.868.778	5.790.696	259.250	-
	-	-	-	1.452	968.721	520.495	19.818	-
	-	-	-	592	316.138	2.643.362	8.696	-
	110.282	-	-	-	17.160	3.018.493	6.691	-
	-	-	11.537	952	408.686	2.677.971	16.176	-
	-	-	-	-	-	3.948	-	-
	-	-	-	100	145.722	3.468.476	4.616	-
	-	-	-	13	258.741	4.285.003	1.931	-
	-	-	-	3.773	2.106.318	777.010	45.082	-
	-	-	-	1.719	162.125	66.386	3.243	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	27.805.755	1.492	25.030.526	28.569.196	5.554.283	526.599	-
	2.179.824	-	-	-	1.269.042	1.263.359	-	8.918.958
	2.290.106	**27.805.755**	**35.247**	**25.080.728**	**46.883.224**	**53.168.346**	**1.466.407**	**8.918.958**

e. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

4. Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO				
		SUMATERA	JAKARTA	JAWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan	50.831.615	144.226.483	82.395.742	
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)	3.803.116	6.709.565	7.539.376	
	a. Belum jatuh tempo	3.432.328	6.589.669	6.949.396	
	b. Telah jatuh tempo	370.788	119.896	589.980	
3	CKPN - Individual	100.361	222.383	1.056.270	
4	CKPN - Kolektif	1.439.318	2.271.654	3.062.889	
5	Tagihan yang dihapus buku	90.712	1.808.168	228.415	

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO				
		SUMATERA	JAKARTA	JAWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Tagihan	42.238.383	138.780.247	64.147.577	
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impaired*)	4.989.303	6.678.976	10.663.938	
	a. Belum jatuh tempo	4.627.402	6.502.267	9.942.016	
	b. Telah jatuh tempo	361.901	176.709	721.922	
3	CKPN - Individual	126.501	196.793	736.376	
4	CKPN - Kolektif	1.164.380	1.585.633	2.826.175	
5	Tagihan yang dihapus buku	130.443	2.186.576	56.151	

(Rp Juta)

31 DESEMBER 2022						
TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH						
	KALIMANTAN	SULAWESI & MALUKU	BALI & NUSA TENGGARA	IRIAN JAYA & PAPUA	LUAR INDONESIA	TOTAL
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	19.457.966	13.181.319	7.120.165	562.596	-	317.775.886
	1.285.821	848.147	824.274	21.456	-	21.031.755
	1.202.996	783.283	760.121	20.841	-	19.738.634
	82.825	64.864	64.153	615	-	1.293.121
	73.808	10.541	-	-	-	1.463.363
	443.618	404.227	167.191	6.023	-	7.794.920
	19.549	32.530	23.062	215	-	2.202.651

(Rp Juta)

31 DESEMBER 2021						
TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN WILAYAH						
	KALIMANTAN	SULAWESI & MALUKU	BALI & NUSA TENGGARA	IRIAN JAYA & PAPUA	LUAR INDONESIA	TOTAL
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	14.772.986	10.626.566	4.573.454	696.476	-	275.835.689
	1.573.610	1.225.078	1.008.594	31.541	-	26.171.040
	1.497.029	1.127.199	978.628	30.092	-	24.704.633
	76.581	97.879	29.966	1.449	-	1.466.407
	105.523	34.736	-	-	-	1.199.929
	308.314	274.361	134.260	36.843	-	6.329.966
	2.551	16.245	10.467	8.685	-	2.411.118

f. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

5. Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi

NO.	SEKTOR EKONOMI	31 DESEMBER 2022			
		TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI			
		TAGIHAN	TAGIHAN YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI		
			BELUM JATUH TEMPO	TELAH JATUH TEMPO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	13.402.466	1.234.255	58.056	
2	Perikanan	920.432	220.887	19.786	
3	Pertambangan dan Penggalian	3.795.318	123.134	6.129	
4	Industri Pengolahan	10.891.618	405.927	146.312	
5	Listrik, Gas, dan Air	4.035.107	57.001	73.562	
6	Konstruksi	16.519.583	3.289.765	78.570	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	17.146.301	2.411.690	239.747	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	2.195.828	557.685	16.054	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5.613.319	2.681.692	8.990	
10	Perantara Keuangan	5.304.479	85.501	57	
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4.098.095	743.489	29.565	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	
13	Jasa Pendidikan	3.914.185	760.767	8.391	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.183.481	453.920	2.063	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	2.526.658	376.081	30.316	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	188.846	63.176	2.450	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	112.841.924	6.273.664	573.073	
20	Lainnya	109.198.246	-	-	
	Total	**317.775.886**	**19.738.634**	**1.293.121**	

(Rp Juta)

	CKPN - INDIVIDUAL	CKPN - KOLEKTIF	TAGIHAN YANG DIHAPUS BUKU
	(6)	(7)	(8)
	100.382	466.223	114.741
	-	68.532	100.168
	2.359	59.545	12.509
	1.101.047	536.312	187.707
	4.744	366.158	10.089
	10.759	2.047.215	99.476
	56.629	891.573	676.794
	12.302	84.946	36.192
	85.559	369.656	14.385
	5.737	106.025	7.232
	21.399	160.382	35.774
	-	-	-
	29.750	63.172	8.197
	7.323	68.467	10.355
	-	132.764	81.739
	-	11.186	12.572
	-	-	-
	-	-	-
	25.373	2.302.868	11.468
	-	59.896	783.253
	1.463.363	**7.794.920**	**2.202.651**

NO.	SEKTOR EKONOMI	31 DESEMBER 2021			
		TAGIHAN DAN PENCADANGAN BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI			
		TAGIHAN	TAGIHAN YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI		
			BELUM JATUH TEMPO	TELAH JATUH TEMPO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	9.030.380	1.678.391	88.162	
2	Perikanan	1.661.239	419.502	30.428	
3	Pertambangan dan Penggalian	2.429.230	54.731	7.745	
4	Industri Pengolahan	9.987.078	678.950	229.024	
5	Listrik, Gas, dan Air	4.187.537	86.987	34.859	
6	Konstruksi	14.953.293	4.058.521	184.087	
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15.173.251	3.525.117	259.250	
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum	1.590.539	440.494	19.818	
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5.214.681	2.188.976	8.696	
10	Perantara Keuangan	5.094.126	229.189	6.691	
11	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.209.005	1.055.410	16.176	
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.948	-	-	
13	Jasa Pendidikan	3.648.374	987.910	4.616	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.642.567	623.970	1.931	
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.026.999	807.847	45.082	
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	241.303	98.332	3.243	
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	
19	Bukan Lapangan Usaha	88.314.260	7.770.306	526.599	
20	Lainnya	103.427.879	-	-	
	Total	**275.835.689**	**24.704.633**	**1.466.407**	

g. Pengungkapan Rincian Mutasi CKPN

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

6. Rincian Mutasi CKPN

(Rp Juta)

NO.	KETERANGAN	31 DESEMBER 2022	
		RINCIAN MUTASI CKPN	
		CKPN - INDIVIDUAL	CKPN - KOLEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	1.199.929	6.329.966
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (Net)		
	2.a Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan	462.617	3.227.061
	2.b Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan	13.717	350.261
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan	(212.900)	(2.171.123)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan	-	58.755
	Saldo akhir CKPN	**1.463.363**	**7.794.920**

	CKPN - INDIVIDUAL	CKPN - KOLEKTIF	TAGIHAN YANG DIHAPUS BUKU
	(6)	(7)	(8)
	141.210	336.936	138.944
	-	93.965	46.525
	4.784	51.398	55.149
	767.714	759.022	276.979
	6.644	436.800	1.503
	25.819	1.344.811	129.484
	67.190	811.348	416.739
	2.910	68.330	35.727
	107.190	319.974	68.873
	11.874	90.587	134.718
	17.124	121.425	80.241
	-	39	-
	17.877	53.390	15.611
	10.306	73.140	98.056
	903	143.033	176.356
	-	12.879	7.414
	-	-	-
	-	-	21.509
	18.384	1.558.768	20.658
	-	54.121	686.452
	1.199.929	**6.329.966**	**2.411.118**

(Rp Juta)

NO.	KETERANGAN	31 DESEMBER 2021	
		RINCIAN MUTASI CKPN	
		CKPN - INDIVIDUAL	CKPN - KOLEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo awal CKPN	1.229.723	4.932.154
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (Net)		
	2.a Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan	461.685	3.186.438
	2.b Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan	(505.024)	(2.011.041)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan	13.545	222.415
	Saldo akhir CKPN	**1.199.929**	**6.329.966**

h. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

7. Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	LEMBAGA PEMERINGKAT	PERINGKAT JANGKA PANJANG				
		STANDARD AND POOR'S	AAA	AA+S.DAA-	A+S.DA-	BBB+ S.D BBB-	
		FITCH RATING INTERNASIONAL	AAA	AA+S.DAA-	A+S.DA-	BBB+ S.D BBB-	
		MOODY'S INVESTOR SERVICE	AAA	AA1 S.D AA3	A1 S.D A3	BAA1 S.D BAA3	
		FITCH RATING INDONESIA	AAA (IDN)	AA+(IDN) S.D AA-(IDN)	A+(IDN) S.D A-(IDN)	BBB+(IDN) S.D BBB-(IDN)	
		PEMERINGKAT EFEK INDONESIA	IDAAA	IDAA+ S.D IDAA-	IDA+ S.D IDA-	IDBBB+ S.D IDBBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan kepada Pemerintah		1.492.500	-	-	49.064.882	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		4.621.033	5.599.317	2.531.527	3.008.410	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		596.492	48.628	35.794	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		412.599	-	4.425.911	2.261.561	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	TOTAL		**7.122.624**	**5.647.945**	**6.993.232**	**54.334.853**	

(Rp Juta)

31 DESEMBER 2022									
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT									
				PERINGKAT JANGKA PENDEK				TANPA PERINGKAT	TOTAL
	BB+ S.D BB-	B+ S.D B-	KURANG DARI B-	A-1	A-2	A-3	KURANG DARI A-3		
	BB+ S.D BB-	B+ S.D B-	KURANG DARI B-	F1+ S.D F1	F2	F3	KURANG DARI F3		
	BA1 S.D BA3	B1 S.D B3	KURANG DARI B3	P-1	P-2	P-3	KURANG DARI P-3		
	BB+(IDN) S.D BB-(IDN)	B+(IDN) S.D B-(IDN)	KURANG DARI B-(IDN)	F1+(IDN) S.D F1(IDN)	F2(IDN)	F3(IDN)	KURANG DARI F3(IDN)		
	ID BB+ S.D IDBB-	ID B+ S.D IDB-	KURANG DARI IDB-	IDA1	IDA2	IDA3 S.D IDA4	KURANG DARI IDA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	40.395.758	90.953.140
	-	-	-	-	-	-	-	103.841	15.864.128
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	2.321.621	3.002.535
	-	-	-	-	-	-	-	57.087.627	64.187.698
	-	-	-	-	-	-	-	99.908.847	174.007.501

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	LEMBAGA PEMERINGKAT	PERINGKAT JANGKA PANJANG				
		STANDARD AND POOR'S	AAA	AA+S.DAA-	A+S.DA-	BBB+ S.D BBB-	
		FITCH RATING INTERNASIONAL	AAA	AA+S.DAA-	A+S.DA-	BBB+ S.D BBB-	
		MOODY'S INVESTOR SERVICE	AAA	AA1 S.D AA3	A1 S.D A3	BAA1 S.D BAA3	
		FITCH RATING INDONESIA	AAA (IDN)	AA+(IDN) S.D AA-(IDN)	A+(IDN) S.D A-(IDN)	BBB+(IDN) S.D BBB-(IDN)	
		PEMERINGKAT EFEK INDONESIA	IDAAA	IDAA+ S.D IDAA-	IDA+ S.D IDA-	IDBBB+ S.D IDBBB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan kepada Pemerintah		90.000	-	-	37.599.151	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		4.458.796	2.040.000	3.285.725	1.875.693	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank		888.750	15.165	36.911	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9	Tagihan kepada Korporasi		-	-	2.242.465	4.340	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11	Aset Lainnya						
	TOTAL		**5.437.546**	**2.055.165**	**5.565.101**	**39.479.184**	

(Rp Juta)

31 DESEMBER 2021									
TAGIHAN BERSIH BERDASARKAN KATEGORI PORTOFOLIO DAN SKALA PERINGKAT									
				PERINGKAT JANGKA PENDEK				TANPA PERINGKAT	TOTAL
	BB+ S.D BB-	B+ S.D B-	KURANG DARI B-	A-1	A-2	A-3	KURANG DARI A-3		
	BB+ S.D BB-	B+ S.D B-	KURANG DARI B-	F1+ S.D F1	F2	F3	KURANG DARI F3		
	BA1 S.D BA3	B1 S.D B3	KURANG DARI B3	P-1	P-2	P-3	KURANG DARI P-3		
	BB+(IDN) S.D BB-(IDN)	B+(IDN) S.D B-(IDN)	KURANG DARI B-(IDN)	F1+(IDN) S.D F1(IDN)	F2(IDN)	F3(IDN)	KURANG DARI F3(IDN)		
	ID BB+ S.D IDBB-	ID B+ S.D IDB-	KURANG DARI IDB-	IDA1	IDA2	IDA3 S.D IDA4	KURANG DARI IDA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	49.540.240	87.229.391
	-	-	-	-	-	-	-	4.631.447	16.291.661
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1.349.280	2.290.106
	-	-	-	-	-	-	-	50.921.541	53.168.346
	-	-	-	-	-	-	-	106.442.508	158.979.504

i. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*): Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over The Counter*

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

8. Risiko Kredit Pihak Lawan

a. Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*

NO.	VARIABEL YANG MENDASARI	NILAI NOSIONAL			
		≤ 1 TAHUN	> 1 TAHUN - ≤ 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	*Sharia compliant profit rate swap*	-	-	-	
2	*Sharia compliant foreign currency swap*	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	
	TOTAL	-	-	-	

NO.	VARIABEL YANG MENDASARI	NILAI NOSIONAL			
		≤ 1 TAHUN	> 1 TAHUN - ≤ 5 TAHUN	> 5 TAHUN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	*Sharia compliant profit rate swap*	-	-	-	
2	*Sharia compliant foreign currency swap*	-	-	-	
3	Lainnya	-	-	-	
	TOTAL	-	-	-	

(Rp Juta)

31 DESEMBER 2022					
TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH OTC					
	TAGIHAN LINDUNG NILAI SYARIAH	KEWAJIBAN LINDUNG NILAI SYARIAH	TAGIHAN BERSIH SEBELUM MRK	MRK	TAGIHAN BERSIH SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

31 DESEMBER 2021					
TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH OTC					
	TAGIHAN LINDUNG NILAI SYARIAH	KEWAJIBAN LINDUNG NILAI SYARIAH	TAGIHAN BERSIH SEBELUM MRK	MRK	TAGIHAN BERSIH SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

j. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*): Transaksi Repo

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

8. Risiko Kredit Pihak Lawan

b. Transaksi *Repo*

(Rp Juta)

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022			
		TRANSAKSI REPO			
		NILAI WAJAR SSB REPO	KEWAJIBAN REPO	TAGIHAN BERSIH	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021			
		TRANSAKSI REPO			
		NILAI WAJAR SSB REPO	KEWAJIBAN REPO	TAGIHAN BERSIH	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

k. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*): Transaksi *Reverse Repo*

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

8. Risiko Kredit Pihak Lawan

c. Transaksi *Reverse Repo*

(Rp Juta)

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022			
		REVERSE REPO			
		TAGIHAN BERSIH	NILAI MRK	TAGIHAN BERSIH SETELAH MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2021			
		REVERSE REPO			
		TAGIHAN BERSIH	NILAI MRK	TAGIHAN BERSIH SETELAH MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-

I. Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

9. Tagihan Bersih berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022									ATMR
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT									
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	EKSPOSUR LAPORAN POSISI KEUANGAN										
1	Tagihan kepada Pemerintah	90.953.140	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	507.167	9.927.460	-	-	5.429.502	-	-	-		4.700.243
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Tagihan kepada Bank	28.081	2.723.273	-	-	211.700	-	-	-		650.505
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	619	7.269.526	7.985.262	15.417.018	-	-	-	-		8.846.177
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	6.499	-		6.499
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	970	-	-	-	39.027.246	-	-	-		19.513.623
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.023.228	10.858.090	-	-	-	36.203.575	-	-		29.324.299
9	Tagihan kepada Korporasi	3.257.942	445.298	-	-	4.260.278	-	54.689.556	-		56.908.755
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.971	85.091	-	-	-	-	1.205.058	-		1.222.076
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	6.716.084	-		6.716.084
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**100.774.118**	**31.308.738**	**7.985.262**	**15.417.018**	**48.928.726**	**36.203.575**	**62.617.197**	**-**		**127.888.261**

(Rp Juta)

	BEBAN MODAL	31 DESEMBER 2021									ATMR	BEBAN MODAL
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA		
	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	-	87.229.391	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	376.019	605.620	6.205.905	-	-	9.480.135	-	-	-		5.981.249	478.500
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	52.040	8.138	2.139.454	-	-	115.718	-	-	-		485.750	38.860
	707.694	620	7.677.574	7.385.463	12.742.096	-	-	-	-		7.841.614	627.329
	520	-	-	-	-	-	-	35.247	-		35.247	2.820
	1.561.090	391	-	-	-	25.080.338	-	-	-		12.540.169	1.003.214
	2.345.944	4.752.368	-	-	-	298.431	40.563.382	-	-		30.571.752	2.445.740
	4.552.700	2.912.176	-	-	-	2.232.432	-	47.198.271	-		48.314.487	3.865.159
	97.766	156	-	-	-	-	-	1.466.252	-		1.466.252	117.300
	537.287	-	-	-	-	-	-	4.799.055	-		4.799.055	383.924
	10.231.060	**95.508.860**	**16.022.933**	**7.385.463**	**12.742.096**	**37.207.054**	**40.563.382**	**53.498.825**	**-**		**112.035.575**	**8.962.846**

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022									ATMR	
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
B	EKSPOSUR LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI											
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4	Tagihan kepada Bank	-	39.481	-	-	-	-	-	-		7.896	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	4.227	-	-	-	-	870.886	-	-		653.165	
9	Tagihan kepada Korporasi	1.612	-	-	-	72.982	-	1.460.030	-		1.496.521	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**5.839**	**39.481**	**-**	**-**	**72.982**	**870.886**	**1.460.030**	**-**		**2.157.582**	

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022									ATMR	
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
C	EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*)											
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	

(Rp Juta)

	BEBAN MODAL	31 DESEMBER 2021									ATMR	BEBAN MODAL
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA		
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	632	-	429	-	-	26.367	-	-	-		13.269	1.062
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	52.253	2.615	-	-	-	-	1.266.427	-	-		949.820	75.986
	119.722	5.780	-	-	-	10.033	-	809.654	-		814.671	65.174
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	172.607	8.395	429	-	-	36.400	1.266.427	809.654	-		1.777.760	142.222

((Rp Juta))

	BEBAN MODAL	31 DESEMBER 2021									ATMR	BEBAN MODAL
		TAGIHAN BERSIH SETELAH MEMPERHITUNGKAN DAMPAK MITIGASI RISIKO KREDIT										
		0%	20%	25%	35%	50%	75%	100%	150%	LAINNYA		
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

m. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

A. RISIKO KREDIT

10. Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022				
		TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MRK				
		TAGIHAN BERSIH	BAGIAN YANG DIJAMIN DENGAN			
			AGUNAN	GARANSI	ASURANSI PEMBIAYAAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	**EKSPOSUR LAPORAN POSISI KEUANGAN**					
1	Tagihan kepada Pemerintah	90.953.140	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	15.864.128	507.167	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	2.963.054	28.081	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	30.672.425	619	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	6.499	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	39.028.216	970	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	53.084.893	6.023.228	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	62.653.073	3.257.942	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.293.121	2.971	-	-	
11	Aset Lainnya	11.667.553	6.716.084	-	-	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**308.186.102**	**16.537.062**	**-**	**-**	
B	**EKSPOSUR LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**					
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	39.481	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	875.112	4.227	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	1.534.625	1.612	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
	Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi	**2.449.218**	**5.839**	**-**	**-**	
C	**EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (*COUNTERPARTY CREDIT RISK*)**					
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	
	Total Eksposur *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Total (A+B+C)	**310.635.320**	**16.542.901**	**-**	**-**	

((Rp Juta))

			31 DESEMBER 2021					
			TAGIHAN BERSIH DAN TEKNIK MRK					
	LAINNYA	BAGIAN YANG TIDAK DIJAMIN	TAGIHAN BERSIH	BAGIAN YANG DIJAMIN DENGAN				BAGIAN YANG TIDAK DIJAMIN
				AGUNAN	GARANSI	ASURANSI PEMBIAYAAN	LAINNYA	
	(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-[(10)+(11)+(12)+(13)
		90.953.140	87.229.391	-	-	-		87.229.391
		15.356.961	16.291.661	605.620	-	-		15.686.041
		-	-	-	-	-		-
		2.934.973	2.263.310	8.138	-	-		2.255.172
		30.671.806	27.805.755	621	-	-		27.805.134
		6.499	35.247	-	-	-		35.247
		39.027.246	25.080.728	391	-	-		25.080.337
		47.061.665	45.614.182	5.050.799	-	-		40.563.383
		59.395.131	52.342.879	2.912.176	-	-		49.430.703
		1.290.150	1.466.407	156	-	-		1.466.251
		4.951.469	8.918.958	-	-	-		8.918.958
		291.649.040	**267.048.518**	**8.577.901**	**-**	**-**		**258.470.617**
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		39.481	26.796	-	-	-		26.796
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		-	-	-	-	-		-
		870.885	1.269.042	2.615	-	-		1.266.427
		1.533.013	825.467	5.780	-	-		819.687
		-	-	-	-	-		-
		2.443.379	**2.121.305**	**8.395**	**-**	**-**		**2.112.910**
		-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		
		294.092.419	**269.169.823**	**8.586.296**	**-**	**-**		**260.583.527**

n. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

11. Transaksi Sekuritisasi Aset

NO.	EKSPOSUR SEKURITISASI	31 DESEMBER 2022			
		TRANSAKSI SEKURITISASI ASET			
		NILAI ASET YANG DISEKURITISASI	NILAI ASET YANG DISEKURITISASI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI		
			TELAH JATUH TEMPO	BELUM JATUH TEMPO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung:	-	-	-	
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
6	Bank bertindak sebagai pemodal	-	-	-	
	a. *Senior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
	b. *Junior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	

NO.	EKSPOSUR SEKURITISASI	31 DESEMBER 2021			
		TRANSAKSI SEKURITISASI ASET			
		NILAI ASET YANG DISEKURITISASI	NILAI ASET YANG DISEKURITISASI YANG MENGALAMI PENURUNAN NILAI		
			TELAH JATUH TEMPO	BELUM JATUH TEMPO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Bank bertindak sebagai kreditur awal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
2	Bank bertindak sebagai penyedia kredit pendukung:	-	-	-	
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
3	Bank bertindak sebagai penyedia fasilitas likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
4	Bank bertindak sebagai penyedia jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
5	Bank bertindak sebagai bank kustodian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-			
6	Bank bertindak sebagai pemodal	-	-	-	
	a. *Senior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	
	b. *Junior trache* - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	

((Rp Juta))

	LABA/RUGI DARI AKTIVITAS SEKURITISASI	ATMR	PENGURANG MODAL
	(6)	(7)	(8)
	-		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	
	-	-	
	-	-	-
	-	-	-
	-		-

	LABA/RUGI DARI AKTIVITAS SEKURITISASI	ATMR	PENGURANG MODAL
	(6)	(7)	(8)
	-		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	
	-	-	
	-	-	-
	-	-	-
	-		-

o. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset Bertindak sebagai Kreditur Awal

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

12. Transaksi Sekuritisasi Aset dalam Hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal

NO.	UNDERLYING ASSET	31 DESEMBER 2022	
		TRANSAKSI SEKURITISASI ASET KREDITUR AWAL	
		NILAI ASET YANG DISEKURITISASI	KEUNTUNGAN/ KERUGIAN PENJUALAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-
10	Aset Lainnya	-	-
	TOTAL	-	-

p. Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

a. Laporan Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022		
		EKSPOSUR ASET NERACA		
		TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	90.953.140	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	15.864.128	4.865.959	4.700.243
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	2.963.054	664.545	650.505
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	30.672.425	8.846.312	8.846.177
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	6.499	6.499	6.499
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	39.028.216	19.514.108	19.513.623
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	53.084.893	39.813.670	29.324.299
9	Tagihan kepada Korporasi	62.653.073	60.142.855	56.908.755
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.293.121	1.293.121	1.222.076
11	Aset Lainnya	11.667.553	-	6.716.084
TOTAL		308.186.102	135.147.069	127.888.261

((Rp Juta))

	31 DESEMBER 2021	
	TRANSAKSI SEKURITISASI ASET KREDITUR AWAL	
	NILAI ASET YANG DISEKURITISASI	KEUNTUNGAN/ KERUGIAN PENJUALAN
	(5)	(6)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

(Rp Juta)

	31 DESEMBER 2021		
	EKSPOSUR ASET NERACA		
	TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)
	87.229.391	-	-
	16.291.661	6.196.192	5.981.249
	-	-	-
	2.263.310	489.819	485.750
	27.805.755	7.841.752	7.841.614
	35.247	35.247	35.247
	25.080.728	12.540.364	12.540.169
	45.614.182	34.210.636	30.571.752
	52.342.879	51.226.663	48.314.487
	1.466.407	1.466.408	1.466.252
	8.918.958	-	4.799.055
	267.048.518	**114.007.081**	**112.035.575**

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

b. Laporan Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022		
		EKSPOSUR KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
		TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	39.481	7.896	7.896
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	875.112	656.334	653.165
9	Tagihan kepada Korporasi	1.534.625	1.498.134	1.496.521
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
TOTAL		2.449.218	2.162.364	2.157.582

c. Laporan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022		
		EKSPOSURE RISIKO KREDIT CCR		
		TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
TOTAL		-	-	-

(Rp Juta)

	31 DESEMBER 2021		
	EKSPOSUR KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
	TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	26.796	13.269	13.269
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	1.269.042	951.782	949.820
	825.467	820.450	814.671
	-	-	-
	2.121.305	**1.785.501**	**1.777.760**

(Rp Juta)

	31 DESEMBER 2021		
	EKSPOSURE RISIKO KREDIT CCR		
	TAGIHAN BERSIH	ATMR SEBELUM MRK	ATMR SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

d. Laporan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Penyelesaian (*Settlement Risk*)

NO.	KATEGORI PORTOFOLIO	31 DESEMBER 2022		
		EKSPOSUR RISIKO KREDIT SETTLEMENT RISK		
		NILAI EKSPOSUR	FAKTOR PENGURANG MODAL	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	*Delivery versus payment*	-		-
	a. Beban modal 8% (5-15 hari)	-		-
	b. Beban modal 50% (16-30 hari)	-		-
	c. Beban modal 75% (31-45 hari)	-		-
	d. Beban modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-
2	*Non-delivery versus payment*	-	-	
TOTAL		-	-	-

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

e. Laporan Eksposur Sekuritisasi

(Rp Juta)

NO.	JENIS TRANSAKSI	31 DESEMBER 2022		31 DESEMBER 2021	
		EKSPOSUR SEKURITISASI		EKSPOSUR SEKURITISASI	
		FAKTOR PENGURANG MODAL	ATMR SETELAH MRK	FAKTOR PENGURANG MODAL	ATMR SETELAH MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan		-		-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum		-		-
TOTAL		-	-	-	-

(Rp Juta)

	31 DESEMBER 2021		
	EKSPOSUR RISIKO KREDIT SETTLEMENT RISK		
	NILAI EKSPOSUR	FAKTOR PENGURANG MODAL	ATMR SETELAH MRK
	(6)	(7)	(8)
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-	-	
	-	-	-

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

A. RISIKO KREDIT

13. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

f. Laporan Total Pengukuran Risiko Kredit

(Rp Juta)

	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	130.045.843	113.813.335
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

B. RISIKO PASAR

(Rp Juta)

NO.	JENIS RISIKO	31 DESEMBER 2022		31 DESEMBER 2021	
		BANK		BANK	
		BEBAN MODAL	ATMR	BEBAN MODAL	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko *Benchmark* Suku Bunga	9.386	117.330	2.985	37.312
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	9.386	117.330	2.985	37.312
2	Risiko Nilai Tukar	15.108	188.854	5.328	66.601
3	Risiko Ekuitas 1)				
4	Risiko Komoditas 1)				
TOTAL		24.494	306.184	8.313	103.913

Keterangan: 1) : Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

r. Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

C. RISIKO LIKUIDITAS

1. LAPORAN PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS RUPIAH

NO.	POS-POS	SALDO	31 DESEMBER 2022			
			JATUH TEMPO *)			
			≤ 1 BULAN	> 1 BULAN S.D. 3 BULAN	> 3 BULAN S.D. 6 BULAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I	**LAPORAN POSISI KEUANGAN**					
	A. Aset	**296.808.742**	**47.854.469**	**5.310.696**	**10.761.461**	
	1. Kas	4.809.426	4.809.426	-	-	
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	27.898.748	27.898.748	-	-	
	3. Penempatan pada bank lain	343.271	343.271	-	-	
	4. Surat berharga yang dimiliki	58.980.104	9.708.169	897.163	4.793.369	
	5. Piutang:					
	a. Piutang murabahah (*gross*)	124.161.198	234.210	251.752	568.277	
	b. Piutang *salam*	-	-	-	-	
	c. Piutang *istishna'*	132	3	-	23	
	d. Piutang *qardh*	8.057.646	47.247	1.832	282.165	
	6. Pembiayaan bagi hasil:					
	a. Pembiayaan *mudharabah*	1.041.397	9.878	101.083	144.598	
	b. Pembiayaan musyarakah	68.481.163	3.260.912	4.057.224	4.967.961	
	7. Pembiayaan sewa	1.497.851	4.799	1.642	5.068	
	8. Aset lainnya	1.537.806	1.537.806	-	-	
	B. Liabilitas	263.585.684	245.870.041	8.111.977	4.386.747	
	1. Dana pihak ketiga					
	a. Giro wadiah	20.844.301	20.844.301	-	-	
	b. Deposito *mudharabah*	98.032.769	80.520.114	8.025.549	4.306.389	
	c. Tabungan wadiah	42.816.735	42.816.735	-	-	
	d. Tabungan *mudharabah*	71.720.085	71.720.085	-	-	
	e. Lainnya	20.574.970	20.574.970	-	-	
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	
	3. Liabilitas kepada bank lain	1.203.252	1.130.894	28.087	8.069	
	4. Surat berharga yang diterbitkan	3.450.000	3.450.000	-	-	
	5. Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	
	6. Liabilitas lainnya	4.943.572	4.812.942	58.341	72.289	
II	**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**					
	1. Kewajiban komitmen	(346.889)	57.565	26.020	3.058	
	2. Kewajiban kontinjensi	1.890.866	369.870	176.995	561.154	
	Selisih (A-B)	**33.223.058**	**(198.015.572)**	**(2.801.281)**	**6.374.714**	

(Rp Juta)

			SALDO	31 DESEMBER 2021				
				JATUH TEMPO *)				
	> 6 BULAN S.D. 12 BULAN	>12 BULAN		≤ 1 BULAN	> 1 BULAN S.D. 3 BULAN	> 3 BULAN S.D. 6 BULAN	> 6 BULAN S.D. 12 BULAN	>12 BULAN
	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.925.479	**214.956.637**	**257.921.977**	**6.719.780**	**3.798.257**	**2.620.957**	**33.917.801**	**210.865.182**
-	-	4.032.230	4.032.230	-	-	-	-
-	-	19.997.470	-	-	-	19.997.470	-
-	-	561.799	-	-	-	549.605	12.194
7.029.156	36.552.247	66.958.932	-	-	-	10.526.635	56.432.297
2.048.387	121.058.572	101.050.824	393.279	269.410	604.968	1.815.544	97.967.623
-	-	-	-	-	-	-	-
63	43	359	-	-	-	-	359
5.838.768	1.887.634	7.951.117	1.894.804	3.375.280	1.534.569	144.797	1.001.667
41.270	744.568	1.628.437	32.298	149.239	405.855	329.414	711.631
2.952.763	53.242.303	54.377.076	-	-	44.363	528.055	53.804.658
15.072	1.471.270	1.001.567	5.003	4.328	31.202	26.281	934.753
-	-	362.166	362.166	-	-	-	-
5.216.132	787	233.467.740	138.798.892	95.220	81.040	13.701.540	80.791.048
-	-	18.738.120	18.738.120	-	-	-	-
5.179.930	787	94.363.263	360.403	89.793	79.919	13.516.526	80.316.622
-	-	36.145.696	36.145.696	-	-	-	-
-	-	64.284.010	64.284.010	-	-	-	-
-	-	12.942.306	12.942.306	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36.202	-	1.195.887	693.183	4.530	499	182.955	314.720
-	-	1.375.000	1.375.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.423.458	4.260.174	897	622	2.059	159.706
377.327	(810.859)	(896.898)	-	-	-	-	(896.898)
308.603	474.244	1.127.770	-	-	-	24.954	1.102.816
12.709.347	**214.955.850**	**24.454.237**	**(132.079.112)**	**3.703.037**	**2.539.917**	**20.216.261**	**130.074.134**

s. Pengungkapan Profil Maturitas Valuta Asing

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

C. RISIKO LIKUIDITAS

2. LAPORAN PENGUNGKAPAN PROFIL MATURITAS VALUTA ASING

NO.	POS-POS	SALDO	31 DESEMBER 2022			
			JATUH TEMPO *)			
			≤ 1 BULAN	> 1 BULAN S.D. 3 BULAN	> 3 BULAN S.D. 6 BULAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I	**LAPORAN POSISI KEUANGAN**					
	A. Aset	**8.918.696**	**3.845.436**	**1.028.614**	**236.187**	
	1. Kas	142.043	142.043	-	-	
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	3.879.710	3.179.172	700.538	-	
	3. Penempatan pada bank lain	524.221	524.221	-	-	
	4. Surat berharga yang dimiliki	495.802	-	35.135	-	
	5. Piutang:					
	a. Piutang murabahah (*gross*)	123.609	-	-	-	
	b. Piutang *salam*	-	-	-	-	
	c. Piutang *istishna'*	-	-	-	-	
	d. Piutang *qardh*	1.643.963	-	-	225.508	
	6. Pembiayaan bagi hasil:					
	a. Pembiayaan *mudharabah*	-	-	-	-	
	b. Pembiayaan musyarakah	2.109.348	-	292.941	10.679	
	7. Pembiayaan sewa	-	-	-	-	
	8. Aset lainnya	-	-	-	-	
	B. Liabilitas	8.636.144	7.080.834	393.768	280.478	
	1. Dana pihak ketiga					
	a. Giro wadiah	953.551	953.551	-	-	
	b. Deposito *mudharabah*	2.453.161	1.988.721	294.650	67.101	
	c. Tabungan wadiah	1.397.670	1.397.670	-	-	
	d. Tabungan *mudharabah*	549.621	549.621	-	-	
	e. Lainnya	2.148.118	2.148.118	-	-	
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	
	3. Liabilitas kepada bank lain	36	36	-	-	
	4. Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	
	5. Pembiayaan yang diterima	778.375	-	-	-	
	6. Liabilitas lainnya	355.612	43.117	99.118	213.377	
II	**LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI**					
	1. Kewajiban komitmen	109.382	-	104.614	4.768	
	2. Kewajiban kontinjensi	817.922	57.811	8.599	5.774	
	Selisih (A-B)	**282.552**	**(3.235.398)**	**634.846**	**(44.291)**	

(Rp Juta)

			SALDO	31 DESEMBER 2021				
				JATUH TEMPO *)				
	> 6 BULAN S.D. 12 BULAN	>12 BULAN		≤ 1 BULAN	> 1 BULAN S.D. 3 BULAN	> 3 BULAN S.D. 6 BULAN	> 6 BULAN S.D. 12 BULAN	>12 BULAN
	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.418.455	**2.390.004**	**7.367.104**	**264.667**	**545.806**	**746.882**	**1.514.312**	**4.295.437**
-	-	87.673	87.673	-	-	-	-
-	-	566.110	-	-	-	352.322	213.788
-	-	1.161.990	-	-	-	1.161.990	-
-	460.667	773.213	-	-	-	-	773.213
-	123.609	131.076	-	-	-	-	131.076
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.418.455	-	1.468.114	175.426	545.806	746.882	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.805.728	3.177.360	-	-	-	-	3.177.360
-	-	1.568	1.568	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
881.064	-	6.807.407	2.993.911	491	463	225.886	3.586.656
-	-	2.352.575	2.352.575	-	-	-	-
102.689	-	3.820.519	7.023	491	463	225.886	3.586.656
-	-	11.499	11.499	-	-	-	-
-	-	254.357	254.357	-	-	-	-
-	-	339.013	339.013	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
778.375	-	-	-	-	-	-	-
-	-	29.444	29.444	-	-	-	-
-	-	1.119.394	-	-	-	-	3.926
103.805	641.933	559.697	-	-	-	-	532.659
537.391	**2.390.004**	**559.697**	**(2.729.244)**	**545.315**	**746.419**	**1.288.426**	**708.781**

t. Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
POSISI 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

D. RISIKO OPERASIONAL

NO.	PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN	31 DESEMBER 2022		
		PENDAPATAN BRUTO (RATA-RATA 3 TAHUN TERAKHIR)	BEBAN MODAL	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan indikator standar	17.664.424	2.649.664	33.120.795
TOTAL		**17.664.424**	**2.649.664**	**33.120.795**

(Rp Juta)

	31 DESEMBER 2021		
	PENDAPATAN BRUTO (RATA-RATA 3 TAHUN TERAKHIR)	BEBAN MODAL	ATMR
	(6)	(7)	(8)
	-	-	-
	-	-	-

06

Tata Kelola Perusahaan

"BSI memastikan bahwa komitmen penerapan GCG dilaksanakan pada seluruh aspek kegiatan usaha demi menciptakan kinerja usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada para pemangku kepentingan."

Tata Kelola Perusahaan

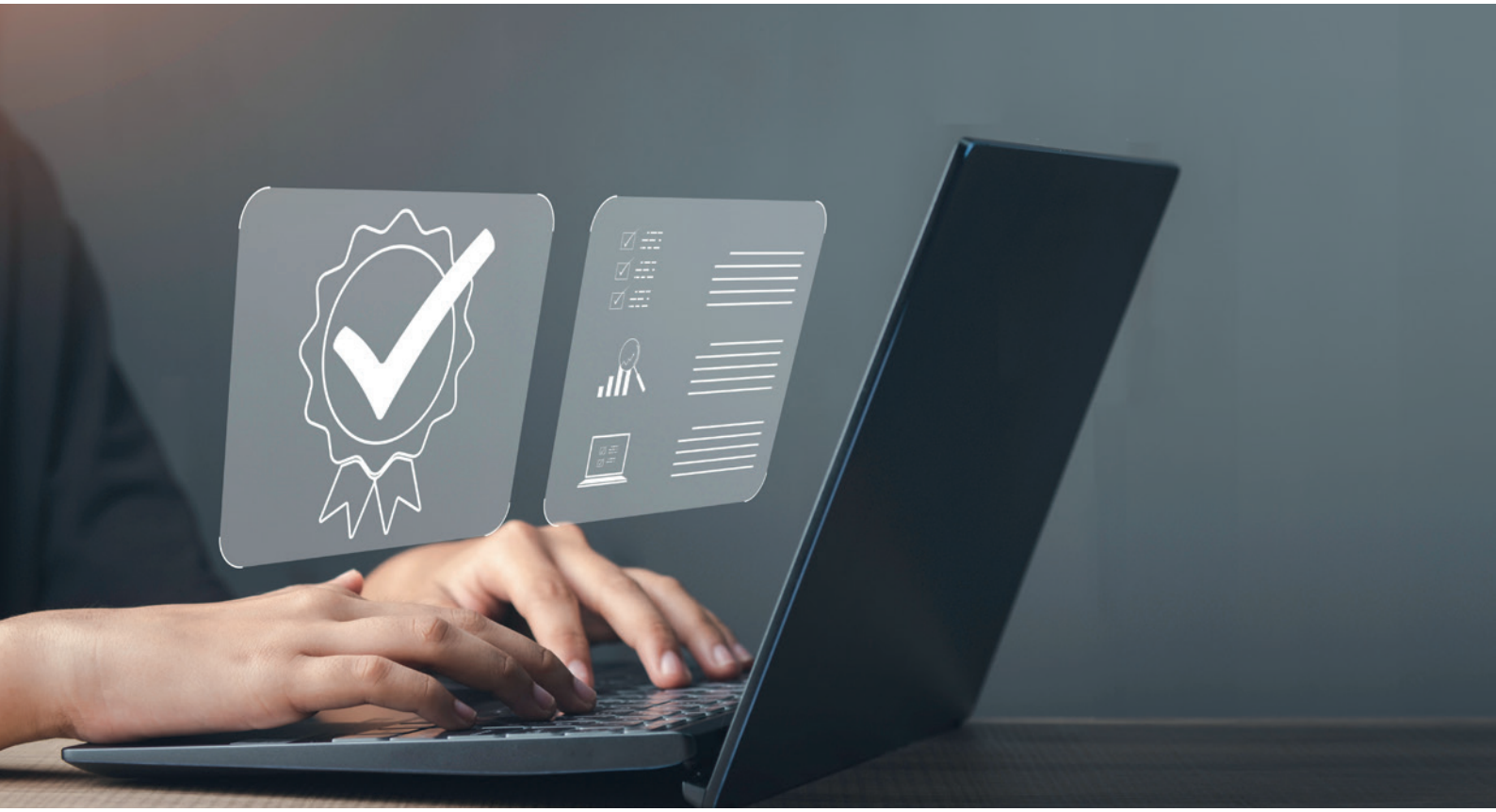

> BSI senantiasa memutakhirkan standar penerapan prinsip GCG seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kompleksitas bisnis Bank.

DASAR PENERAPAN GCG

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") meyakini bahwa melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), Bank akan menjalankan sistem perbankan yang sehat serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang syariah. Karena itu, BSI memiliki komitmen untuk menerapkan GCG secara berkelanjutan di lingkungan Bank.

Bank berpandangan bahwa penerapan GCG juga menciptakan keselarasan antara tujuan Bank dengan tujuan para pemangku kepentingan terjalin dengan baik. Hal itu akan menciptakan iklim bisnis yang kondusif, sehingga BSI mampu mencapai tujuan usaha yang ditargetkan secara berkesinambungan. Untuk itu, implementasi GCG harus dilakukan secara terarah dan terencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan BSI mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

A. Dasar

1. Al-Qur'an dan Al – Hadits.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya.
3. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya.
5. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan berikut segala perubahannya.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/ POJK.03/2019 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank berikut segala perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/ POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut segala perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 / POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum berikut segala perubahannya.
13. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
15. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/ SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
16. Himpunan Fatwa Dewan Syariah (DSN).
17. Anggaran Dasar.
18. Kebijakan Manajemen Risiko.
19. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern.
20. Pedoman Tata Kelola Teritegrasi Bank Mandiri dengan Perusahaan Anak.
21. BSI juga mendasarkan pada pedoman- pedoman implementasi Tata Kelola sebagai berikut:
    a. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
    b. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG);

B. Prinsip/Asas

1. Keterbukaan (*Transparency*)
    a. Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
    b. Memiliki Kebijakan Perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
    c. Menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan rahasia jabatan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)
   a. Sasaran usaha dan strategi dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
   b. Tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
   c. Masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
   d. *Check and balance system* dilaksanakan dalam pengelolaan perusahaan.
   e. Kinerja berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi serta *reward* and *punishment system*.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
   Dalam menjalankan operasionalnya, Bank wajib bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Profesional (*Professional*)
   a. Menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
   b. Mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)
   a. Memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
   b. Memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank.
   c. Memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Kelima prinsip tersebut di atas disingkat dengan TARProF. Atas kalimat prinsip tersebut, prinsip-prinsip Syariah diterapkan oleh Bank dijiwai oleh sifat-sifat luhur Rasulullah *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam bermuamalah, yaitu kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*).

Struktur *Good Corporate Governance*

"BSI menggunakan *Three Lines Model* dalam membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang efektif untuk memungkinkan pencapaian tujuan, dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat."

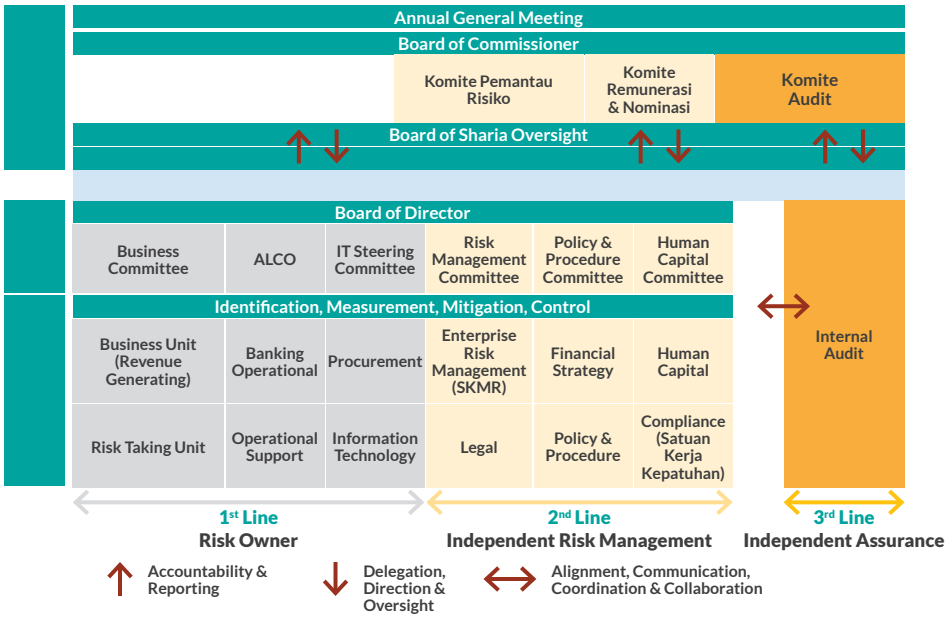

STRUKTUR TATA KELOLA

Penetapan struktur tata kelola di BSI, antara lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur GCG BSI secara garis besar terbagi atas Organ Utama dan Organ Pendukung, yang didukung dengan kebijakan dan prosedur. Struktur organisasi Tata Kelola Bank sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
b. Dewan Komisaris;
c. Dewan Pengawas Syariah;
d. Direksi;
e. Komite-Komite di bawah Koordinasi Dewan Komisaris; dan
f. Komite-Komite di bawah Koordinasi Direksi.

Organ Utama BSI adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan strategis dan penting, yang berkaitan dengan kepentingan usaha BSI dan didasarkan pada anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ yang secara kolektif bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan Perseroan serta memastikan terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah organ Bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Direksi

Direksi adalah organ yang secara kolektif bertugas dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan, serta bertindak atas nama Perseroan dalam urusan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pelaksanaan Tata Kelola Bank dan Tata Kelola Terintegrasi yang baik antara lain diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank; dan
6. Penerapan fungsi manajemen risiko.

PEMEGANG SAHAM

Hak Pemegang Saham

Seluruh Pemegang Saham memiliki hak yang sama dalam memperoleh informasi terkait Perseroan. BSI juga memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Pemegang Saham dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh investor atau Pemegang Saham agar tidak terdapat informasi pihak dalam (*inside information*) yang hanya diketahui oleh Pemegang Saham Mayoritas.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara umum, Pemegang Saham memiliki hak untuk:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS.
2. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-undang.
4. Pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pada tahun 2022, Negara Republik Indonesia memiliki 1 lembar saham Seri A Dwiwarna pada BSI yang merupakan saham dengan hak istimewa. Dengan masuknya Negara Republik Indonesia pada BSI, maka telah terjadi perubahan klasifikasi saham BSI yang sebelumnya seluruhnya merupakan saham biasa menjadi 2 (dua) klasifikasi saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (dhi. diwakili oleh Kementerian BUMN) dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

Dengan adanya klasifikasi saham tersebut, maka per 31 Desember 2022 BSI memiliki 4 (empat) Pemegang Saham Pengendali yaitu Negara Republik Indonesia (dhi. diwakili oleh Kementerian BUMN) melalui kepemilikan 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan kepemilikan 51,47% saham Seri B, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan 23,24% saham Seri B, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan kepemilikan 15,38% saham seri B.

Berdasarkan komposisi saham diatas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan pemegang saham Seri B terbanyak sehingga menjadikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pemegang Saham Utama (PSU) dan keuangan BSI terkonsolidasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut atau anggaran dasar. RUPS menjadi wadah bagi Pemegang Saham untuk menggunakan haknya, menjalankan wewenang, mengemukakan pendapat, memberikan suara serta meminta informasi tentang pengambilan keputusan strategis ataupun pengelolaan Perseroan.

Bank Syariah Indonesia membagi RUPS ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Tahun Buku Bank ditutup/berakhir. RUPSLB diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat.

Hak Pemegang Saham terkait RUPS

Mengacu pada Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, peraturan perundang-undangan serta best practice, Pemegang Saham memiliki hak sebagai berikut:

1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
5. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
6. Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dilaksanakan.
8. Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
9. Mendapatkan perlakuan yang sama dari BSI.
10. Menominasikan calon Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
11. Mengangkat seorang anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ada atau menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diberhentikan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir melalui RUPS.
13. Memperoleh pembayaran dividen sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
14. Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BSI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam otorisasi penambahan modal, perubahan anggaran dasar perusahaan, dan peralihan seluruh atau sebagian aset yang menyebabkan penjualan perusahaan.

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS, antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar BSI. Berpedoman pada Anggaran Dasar BSI, RUPS dapat dilakukan atas permintaan :

1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2) Seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
3) Dewan Komisaris,
   yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya, dan harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan perseroan, merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS, disertai dengan alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar BSI.

Adapun tata cara atau proses penyelenggaraan RUPS mencakup beberapa tahap antara lain sebagai berikut :

a. Pemberitahuan
   Direksi wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
b. Pengumuman
   Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
   Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud memuat paling sedikit:
   1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
   3. tanggal penyelenggaraan RUPS
c. Pemanggilan
   Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
   Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud harus memuat informasi paling sedikit:
   1. tanggal penyelenggaraan RUPS;
   2. waktu penyelenggaraan RUPS;
   3. tempat penyelenggaraan RUPS;
   4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
   7. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
d. Penyelenggaraan
   RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
e. Risalah & Ringkasan Risalah RUPS
   BSI wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Sedangkan untuk ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
   Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling sedikit:
   1. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;

2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
5. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
8. keputusan RUPS; dan
9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2022

Pada tahun 2022, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu, RUPS Tahunan pada tanggal 27 Mei 2022 dan dan RUPS Luar Biasa pada 23 September 2022.

RUPS Tahunan

Rangkaian Pelaksanaan RUPS

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Pemberitahuan	12 April 2022 & 28 April 2022	· Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 02/769-3/DIR-CSG tanggal 12 April 2022 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. · Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 02/860-3/DIR-CSG tanggal 28 April 2022 perihal Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pengumuman	20 April 2022	· Pengumuman RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. · Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/389-3/CSG tanggal 20 April 2022 perihal Pengumuman dan Bukti Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pemanggilan	05 Mei 2022	· Pemanggilan RUPST disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. · Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/427-3/CSG tanggal 5 Mei 2022 perihal Penyampaian Laporan Bukti Iklan Publikasi Pemanggilan RUPST PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Tanggal Pelaksanaan	27 Mei 2022	
Penyampaian Risalah	24 Juni 2022	Penyampaian Risalah disampaikan kepada OJK dalam bentuk surat No. 02/514-3/CSG tanggal 21 Juni 2022 perihal Penyampaian Berita Acara RUPST PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Ringkasan Risalah	31 Mei 2022	Ringkasan risalah disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada 31 Mei 2022 (Surat ke OJK DPBS No. 02/960-3/DIR-CSG perihal Penyampaian Laporan Ringkasan RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk)
Akta Risalah	27 Mei 2022	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor 155 tanggal 27 Mei 2022

Mata Acara/Agenda

Agenda bahasan pada RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.
4. Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau pengawas BSI.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Daftar Peserta RUPS

Pada RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022, peserta yang hadir adalah:

DIREKSI

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama I	: Ngatari
Wakil Direktur Utama II	: Abdullah Firman Wibowo
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Kusman Yandi
Direktur Retail Banking	: Kokok Alun Akbar
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Muhammad Zainul Majdi
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Bangun S. Kusmulyono
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi*)
Komisaris	: Sutanto
Komisaris	: Imam Budi Sarjito

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Dr.K.H. Mohamad Hidayat, MBA, MH.
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin MS.

*) hadir secara telekonferensi

Kehadiran Pemegang Saham

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 39.106.044.060 saham. Hak suara yang sah untuk jumlah saham tersebut setara dengan 95,0807261% dari seluruh hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu 41.129.307.343 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 April 2022 pukul 16.15 WIB.

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara secara Elektronik (*e-Voting*)

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Pemungutan suara dilakukan pada setiap Agenda RUPST. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet dan lain-lain) sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiaannya. Sedangkan, bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa dengan mekanisme *e-Proxy*, dianggap telah menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY. KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses *e-Voting* di tempat RUPST. Pengungkapan prosedur *e-Voting* di tempat RUPST pada RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs *web* Bank bersamaan dengan Pemanggilan RUPST dan dibacakan sebelum RUPST dimulai. Selain dituangkan dalam Tata Tertib RUPST, tata cara *e-Voting* di tempat RUPST juga diunggah melalui situs *web* dalam bentuk video ilustrasi.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Untuk mata acara 1,2,3,4 dan 5, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf a angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah kuorum keputusan yang lebih besar.

Untuk mata acara 6 Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili. Kecuali, Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Kesempatan Mengajukan Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Dalam RUPS, para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dan/atau usulan keputusannya namun tidak terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam rapat.

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang aktivitas tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of* PwC Global Network), dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00014/2.1025/Au.1/07/0222-1/1/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022.
2. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
   a. Bapak Mulya Siregar yang menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
   b. Bapak Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
   c. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris dari ketiga bank *legacy* yaitu PT Bank BRIsyariah,Tbk ("BRIS"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM"), dan PT Bank BNI Syariah ("BNIS") untuk masa kerja sebelum efektifnya penggabungan, terhitung sejak 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 74.600	= 0,0001908%
Suara Abstain	: 148.200	= 0,0003790%
Suara Setuju	: 39.105.821.260	= 99,9994303%

Realisasi:

Telah direalisasikan.

Agenda 2:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Keputusan:

1 Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sebesar Rp3.028.204.859.899,- (Tiga triliun dua puluh delapan miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:
   a Sejumlah 20% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp605.640.971.980,- (Enam ratus lima miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah), disisihkan sebagai Cadangan Wajib Perseroan.
   b Sejumlah 25% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp757.051.214.975,- (Tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai Dividen.
   c Sejumlah 55% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp1.665.512.672.944,- (Satu triliun enam ratus enam puluh lima miliar lima ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah), ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 11.335.800	= 0,0289873%
Suara Abstain	: 148.200	= 0,0003790%
Suara Setuju	: 39.094.560.060	= 99,9706337%

Realisasi:

Telah direalisasikan.

Agenda 3:

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan penetapan biaya/honorariumnya.

Keputusan:

1 Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of* PwC Global Network) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 18.174.770	= 0,0464756%
Suara Abstain	: 113.800	= 0,0002910%
Suara Setuju	: 39.087.755.490	= 99,9532334%

Realisasi:

Telah direalisasikan.

Agenda 4:

Penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dan penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, termasuk pemberian fasilitas, *benefit* dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.

Keputusan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

1. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus atas kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2022.
3. Honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2022.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 9.987.684	= 0,0255400 %
Suara Abstain	: 209.100	= 0,0005347%
Suara Setuju	: 39.095.847.276	= 99,9739253%

Realisasi:

Telah direalisasikan.

Agenda 5:

Persetujuan perubahan susunan pengurus dan/atau Pengawas BSI.

Keputusan:

1. Memberhentikan dengan hormat:
   a. Sdr. Abdullah Firman Wibowo sebagai Wakil Direktur Utama 2 Perseroan
   b. Sdr. Kusman Yandi sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan, dan
   c. Sdr. Kokok Alun Akbar sebagai Direktur Retail Banking Perseroan

   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Direksi Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bangun S. Kusmuljono sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
   a. Semula Wakil Direktur Utama 1 dan Wakil Direktur Utama 2 menjadi Wakil Direktur Utama.
   b. Menambah 1 nomenklatur jabatan anggota Direksi yakni Direktur Treasury & International Banking.
4. Mengalihkan penugasan Sdr. Ngatari semula sebagai Wakil Direktur Utama 1, yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2020, menjadi Direktur Retail Banking dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
5. Mengangkat :
   a. Sdr. Bob Tyasika Ananta sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan.
   b. Sdr. Zaidan Novari sebagai Direktur Wholesale Transaction Banking Perseroan, dan
   c. Sdr. Moh. Adib sebagai Direktur Treasury & International Banking Perseroan

   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

   Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

6. Mengangkat :
   a. Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan
   b. Sdr. Nizar Ali sebagai Komisaris Perseroan,
   terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2025, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
   Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
7. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Adiwarman Azwar Karim	: Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
Muhammad Zainul Majdi	: Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
Suyanto	: Komisaris
Masduki Baidlowi	: Komisaris
Imam Budi Sarjito	: Komisaris
Sutanto	: Komisaris
M. Arief Rosyid Hasan	: Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	: Komisaris Independen
Mohamad Nasir	: Komisaris Independen
Nizar Ali*	: Komisaris

DIREKSI

Hery Gunardi	: Direktur Utama
Bob Tyasika Ananta*	: Wakil Direktur Utama
Ngatari	: Direktur Retail Banking
Achmad Syafii	: Direktur Information Technology
Ade Cahyo Nugroho	: Direktur Finance & Strategy
Anton Sukarna	: Direktur Sales & Distribution
Tribuana Tunggadewi	: Direktur Compliance & Human Capital
Tiwul Widyastuti	: Direktur Risk Management
Zaidan Novari*	: Direktur Wholesale Transaction Banking
Moh. Adib*	: Direktur Treasury & International Banking

* Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 179.101.750	= 0,4579899 %
Suara Abstain	: 251.700	= 0,0006436%
Suara Setuju	: 39.926.690.610	= 99, 5413664%

Realisasi:
Telah direalisasikan.

Agenda 6:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan:
   a. penerapan klasifikasi saham pada Perseroan menjadi Saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan Saham Seri B yang merupakan saham biasa atas nama;
   b. reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Perseroan menjadi 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi Saham Seri B,

   dengan detail sebagaimana yang ditayangkan dalam Rapat. (Pasal 4 ayat 1, Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat (7) huruf i, Pasal 4 ayat (10), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) butir (a) (b) (c) (d) (e), Pasal 5 ayat (4) menjadi ayat (5), Pasal 10 ayat (8), Pasal 11 ayat (4) butir (a) (b), Pasal 14 ayat (8) butir (b), Pasal 16 ayat (2) butir (b) (c) (e) (f), Pasal 22 , ayat (2) butir (b)).
2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda 6 RUPS Tahunan Perseroan, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 177.420.636	= 0,4536911%
Suara Abstain	: 245.500	= 0,0006278%
Suara Setuju	: 38.928.377.924	= 99,5456811%

Realisasi:

Telah direalisasikan.

RUPS Luar Biasa

Rangkaian Pelaksanaan RUPS

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Pemberitahuan	09 Agustus 2022	Disampaikan kepada OJK melalui surat Nomor 02/1313-3/DIR-CSG tanggal 9 Agustus 2022 perihal Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pengumuman	16 Agustus 2022	· Pengumuman RUPSLB disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. · Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/719-3/CSG pada 15 Agustus 2022 perihal Pengumuman dan Bukti Pengumuman RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Pemanggilan	31 Agustus 2022	· Pemanggilan RUPSLB disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI. · Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia dalam bentuk surat nomor 02/798-3/CSG tanggal 31 Agustus 2022 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Tanggal Pelaksanaan	23 September 2022	
Penyampaian Risalah	3 Oktober 2022	Penyampaian Risalah disampaikan kepada OJK dalam bentuk surat nomor 02/862-3/CSG tanggal 29 September 2022 perihal Penyampaian Berita Acara RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Proses	Tanggal Realisasi	Keterangan
Ringkasan Risalah	26 September 2022	Ringkasan risalah disampaikan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website KSEI pada (Surat ke BEI No. 02/856-3/CSG perihal Penyampaian Laporan Ringkasan RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk)
Akta Risalah	23 September 2022	Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Syariah Indonesia Tbk nomor 139 tanggal 23 September 2022

Mata Acara/Agenda

1. Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Daftar Peserta RUPS

Peserta yang menghadiri RUPS Luar Biasa yang digelar pada 23 September 2022 adalah:

Hadir secara langsung

DIREKSI

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Ngatari
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari*
Direktur Treasury & International Banking	: Moh. Adib

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarman Azwar Karim
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua Dewan Pengawas Syariah	: Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc
Anggota Dewan Pengawas Syariah	: Dr. H. Oni Sahroni, MA

Hadir secara telekonferensi

Komisaris	: Nizar Ali*

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OtoritasJasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 39.108.442.820 saham atau merupakan 95,0865583% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 41.129.307.343 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Agustus 2022 yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan rapat diambil dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. Untuk mata acara 1, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK RUPS), dan Pasal 16 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau wakil-wakilnya yang sah dan bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, serta harus dihadiri Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Untuk mata acara 2, sesuai ketentuan Pasal 88 ayat 1 UUPT, Pasal 42 huruf a POJK RUPS, dan Pasal 16 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan harus dihadiri Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sedangkan mata acara 3, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 UUPT, Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK RUPS, dan Pasal 16 ayat 2 huruf f Anggaran Dasar Perseroan, dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan dan/atau wakil-wakil mereka yang sah, yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Kesempatan Mengajukan Tanggapan dan Hasil Pemungutan Suara Dalam Rapat

Dalam RUPS, para pemegang saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dan/atau usulan keputusannya. Setelah Notaris selesai melakukan validasi dalam mata acara, terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham.

Pihak Independen

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Jose Dima, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1:

Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") Perseroan

Keputusan:

1 Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (Enam miliar) saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,- (Lima ratus Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD I.

3 Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk:
   a Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
   b Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD I selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.

4 Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD I, untuk :
   a Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK.
   b Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan.
   c Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I.
   d Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD I dengan persetujuan Dewan Komisaris.
   e Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
   f Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD.
   g Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
   h Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I.
   i Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD I.
   j Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada.
   k Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif Indonesia Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI.
   l Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   m Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris.
   n Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keperluan-keperluan tersebut di atas, Direksi Perseroan berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Perhitungan Suara:		
Suara yang Tidak Setuju	: 19.000	= 0,0000486%
Suara Abstain	: 41.000	= 0,0001048%
Suara Setuju	: 39.108.382.820	= 99,9998466%

Realisasi:
Telah direalisasikan.

Agenda 2:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan:

1 Menyetujui perubahan, penghapusan dan penyesuaian atas beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:
   a Pasal 14 ayat (18); (tentang penyelenggaraan RUPS untuk Perseroan yang belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan)
   b Pasal 18 ayat (19) huruf e, f, g, i, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (19) pasal ini; (tentang pemberhentian anggota Direksi)
   c Pasal 18 ayat (20) huruf a dan b, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat (20) pasal ini; (tentang pengunduran diri anggota Direksi)
   d Pasal 19 ayat (2) huruf b angka 10); (tentang jangka waktu laporan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan)
   e Pasal 19 ayat (18) huruf e dan f, dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini; (tentang persetujuan dari RUPS setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris untuk melakukan *buyback* atas saham Perseroan)
   f Pasal 21 ayat (23), ayat (24), ayat (25), ayat (26), ayat (31), ayat (32) huruf a dan huruf b, dan penyesuaian urutan ayat pada pasal ini; (tentang pemberhentian, pengunduran diri, serta lowongnya seluruh anggota Dewan Komisaris)
   g Pasal 21 ayat (39) huruf b dan penyesuaian urutan huruf pada ayat ini dan urutan ayat pada pasal ini; (tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris)
   h Pasal 24 ayat (16), dan ayat (16) huruf a; (tentang pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah)
   i Pasal 26 ayat (5) dan ayat (8). (tentang jangka waktu laporan tahunan yang telah ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, disampaikan oleh Direksi kepada dan disetujui oleh RUPS Tahunan)
2 Menyetujui untuk menyatakan kembali perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan keputusan butir 1 di atas, dan oleh karenanya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3 Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan agenda ini, termasuk untuk:
   a menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu atau lebih Akta Notaris; dan
   b mengajukan permohonan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Perhitungan Suara:		
Suara yang Tidak Setuju	: 600	= 0,0000015%
Suara Abstain	: 67.800	= 0,0001734%
Suara Setuju	: 39.108.374.420	= 99,9998251%

Realisasi:
Telah direalisasikan.

Agenda 3:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Keputusan:

1 Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2 Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan RUPSLB terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: *Vacant*
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto
Komisaris Independen	: M. Arief Rosyid Hasan
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris	: Nizar Ali*

DIREKSI

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Ngatari
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari*
Direktur Treasury & International Banking	: Moh. Adib

*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 400	=	0,0000010%
Suara Abstain	: 19.866.700	=	0,0507990%
Suara Setuju	: 39.088.575.720	=	99,9492000%

Realisasi:

Telah direalisasikan.

RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2021, Bank menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali yaitu RUPST pada 6 Mei 2021 dan RUPSLB pada 24 Agustus 2021. Berikut adalah keputusan dan realisasinya.

RUPS Tahunan

6 Mei 2021

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara

BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui *system* eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari ketiga Bank Peserta Penggabungan, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRIsyariah, termasuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Keputusan:

1 Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas dan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, terhadap:
   - PT Bank BRIsyariah Tbk.;
   - PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan; dan
   - PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hokum pada Tanggal Efektif Penggabungan.

2 Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Bank BRIsyariah Tbk., yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3 Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh:
   - Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Global Ernst & Young), sebagaimana laporannya Nomor: 00019/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/I/2021 Tanggal 26 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", untuk PT Bank BRI Syariah Tbk.
   - Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC), sebagaimana laporannya Nomor: 00012/2.1025/AU.4/07/0229-3/1/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" untuk PT Bank Syariah Mandiri, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hokum pada tanggal efektifnya penggabungan.
   - Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja(firma anggota jaringan Global Ernst & Young), sebagaimana laporannya Nomor: 00013/2.1032/AU.1/07/1681/1/1/I/2021 Tanggal 20 Januari 2021, dengan opini "menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", untuk PT Bank BNI Syariah, selaku Bank Peserta Penggabungan yang telah berakhir demi hukum pada tanggal efektifnya penggabungan.

4 Atas disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap:
- Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk. yang telah diberhentikan dengan hormat dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank BRIsyariah Tbk., tanggal Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRIsyariah Tbk., Nomor 92 tanggal 15 Desember 2020 yang dinyatakan kembali terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021, yang keseluruhannya dibuat oleh dan dihadapan Jose Dima Satria, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 1 Februari 2021, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BRIsyariah Tbk. Yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank BRIsyariah Tbk.;
- Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan ke dalam Perseroan, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank Syariah Mandiri yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri; dan
- Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah yang telah berakhir demi hukum terhitung sejak efektifnya Penggabungan ke dalam Perseroan, sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan terhadap PT Bank BNI Syariah yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah.

5 Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) juga diberikan kepada:
- Putu Rahwidhiyasa yang menjabat sebagai Direktur PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
- Bambang Widianto yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020.
- Toni Eko Boy Subari yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0 %
Suara Abstain	: 2.300	= 0,0000058 %
Suara Setuju	: 39.711.462.110	= 99,9999942 %

Realisasi:

Telah direalisasikan.

Agenda 2:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Keputusan:

1 Terhadap laba bersih BRIS tahun buku 2020 sebesar Rp248.054.169.851,- (dua ratus empat puluh delapan miliar lima puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah), digunakan sebagai berikut:
   - Pembentukan Cadangan Wajib sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020 atau sebesar Rp49.610.833.970,- (empat puluh sembilan miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
   - Setelah dikurangi Cadangan Wajib atau sebesar Rp198.443.335.881,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

2 Terhadap laba bersih BSM tahun buku 2020 sebesar Rp1.434.487.932.284,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), digunakan sebagai berikut:
   a Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih BSM untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.434.487.932.284,- (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah), yaitu sebagai berikut:
      - Sejumlah 2,13% dari Laba Bersih BSM atau sebesar Rp30.599.349.000,- (tiga puluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) disisihkan sebagai cadangan wajib BSM;
      - Sejumlah 97,87% dari Laba Bersih BSM atau sebesar Rp1.403.888.583.284,- (satu triliun empat ratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan BSM.

   b Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara alokasi laba bersih BSM tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   c Terhadap laba bersih BNIS tahun buku 2020 sebesar Rp505.106.545.043,- (lima ratus lima miliar seratus enam juta lima ratus empat puluh lima ribu empat puluh tiga rupiah), diusulkan untuk digunakan sebagai berikut :
      - Pembentukan Cadangan Wajib sebesar Rp101.021.309.009,- (seratus satu miliar dua puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu sembilan Rupiah) juta atau sebesar 20% dari Laba Bersih Tahun Buku 2020. Dengan demikian total cadangan wajib setelah pencadangan ini adalah menjadi Rp555.037.030.380,- (lima ratus lima puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta tiga puluh ibu tiga ratus delapan puluh Rupiah) atau setara dengan 19,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor BNIS per tanggal 31 Desember 2020.
      - Tidak membagikan dividen kepada pemegang saham yang tercatat sebelum pelaksanaan penggabungan efektif.
      - Sisa Laba Bersih Perusahaan Setelah Pajak (*Earning After Tax*) Tahun Buku 2020 BNIS, sebesar Rp404.085.236.034,- (empat ratus empat miliar delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 0	= 0%
Suara Abstain	: 2.300	= 0,0000058%
Suara Setuju	: 39.711.462.110	= 99,9999942%

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 3:

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya) bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Tahun Buku 2021, sebagaimana telah diangkat berdasarkan Akta No.38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris Di Jakarta, dan penetapan Tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta Bonus bagi Dewan Pengawas Syariah dari ketiga Bank Peserta Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Keputusan:

1 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk:
   a Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
   b Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
2 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk:
   a Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
   b Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah, dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
3 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk:
   a Menetapkan tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus bagi anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk. untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
   b Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRIsyariah Tbk., dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal efektif penggabungan.
4 Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Mayoritas dan diketahui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, selaku Pemegang Saham Pengendali Lainnya untuk menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dan pemberian fasilitas, *benefit* dan/atau tunjangan lainnya untuk periode sejak tanggal efektif penggabungan sampai dengan akhir tahun buku 2021.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 32.845.400	= 0,0827101 %
Suara Abstain	: 4.100	= 0,0000103 %
Suara Setuju	: 39.678.614.910	= 99,9172796%

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 4:

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Keputusan:

1 Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dan Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2 Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PricewaterhouseCoopers) dan/atau Akuntan Publik M. Jusuf Wibisana, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham Pengendali.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 17.269.300	= 0,0434869 %
Suara Abstain	: 3.000	= 0,0000076 %
Suara Setuju	: 39.694.192.110	= 99,9565055 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 5:

Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah sesuai rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.

Keputusan:

1 Memberhentikan dengan hormat Mohamad Hidayat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

2 Memberhentikan dengan hormat Hasanudin dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

3 Menyetujui pengangkatan Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

4 Menyetujui pengangkatan Hasanudin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

5 Menyatakan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Ketua	: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota	: Dr. H. Mohamad Hidayat
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc

6 Perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 163.961.800	= 0,4128828%
Suara Abstain	: 3.400	= 0,0000086%
Suara Setuju	: 39.547.499.210	= 99,5871087%

Realisasi: Telah direalisasikan.

Agenda 6:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan:

1 Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pemindahan alamat Kantor Pusat Perseroan dari yang semula berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan dengan alamat Jalan Abdul Muis Nomor 2-4 menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dengan alamat Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Kavling 12, sebagai berikut :

Semula :
Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan."

Menjadi :
Perseroan Terbatas ini bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan."

2 Perubahan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan sebelumnya telah memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dari Otoritas Jasa Keuangan.

3 Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara ini, termasuk untuk:
- Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah, dan
- Mengajukan permohonan persetujuan dan/atau memberitahukannya kepada instansi berwenang.

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 163.961.800	= 0,4128828%
Suara Abstain	: 3.300	= 0,0000083%
Suara Setuju	: 39.547.499.310	= 99,5871089%

Realisasi: Telah direalisasikan.

RUPS Luar Biasa
24 Agustus 2021

Pihak Independen dalam Penghitungan Suara
BSI menggunakan pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara. Adapun pemberian suara secara elektronik dilakukan melalui system eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Agenda, Keputusan dan Realisasi

Agenda 1:

Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

1. Memberhentikan dengan hormat Mulya Effendi Siregar sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.

3. Mengangkat Adiwarman Azwar Karim sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
   Adiwarman Azwar Karim baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

4. Mengangkat Muhammad Zainul Majdi sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan Rapat dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2024, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktuwaktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
   Muhammad Zainul Majdi baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan Rapat, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	: Adiwarman Azwar Karim
Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen	: Muhammad Zainul Majdi
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Bangun S. Kusmulyono
Komisaris Independen	: Muhammad Arief Rosyid Hasan
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Imam Budi Sarjito
Komisaris	: Sutanto

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama I	: Ngatari
Wakil Direktur Utama II	: Abdullah Firman Wibowo
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Wholesale & Transaction Banking	: Kusman Yandi
Direktur Retail Banking	: Kokok Alun Akbar
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Information Technology	: Achmad Syafii
Direktur Risk Management	: Tiwul Widyastuti

Hasil Perhitungan Suara:

Suara yang Tidak Setuju	: 132.495.085	=	0,3402027 %
Suara Abstain	: 162.984.700	=	0,4184897 %
Suara Setuju	: 38.650.447.349	=	99,6597973 %

Realisasi: Telah direalisasikan.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk memastikan Bank Syariah Indonesia menerapkan GCG pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti proses *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah jelas seperti diamanatkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang dievaluasi dan dimutakhirkan secara berkala.

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pertanggungjawaban tersebut merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Dewan Komisaris memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, sehingga dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam kegiatan usaha Bank, membuat keputusan secara independen, mendorong peningkatan kinerja Bank, serta dapat secara efektif melakukan penelaahan dan memberikan masukan konstruktif terhadap kinerja Direksi.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Dewan Komisaris

BSI memiliki dan menjalankan kebijakan pemberian pinjaman bagi Dewan Komisaris yang dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Dewan Komisaris akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Dana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Tata Tertib Dewan Komisaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertugas, antara lain:

1. Dewan Komisaris bertugas:
   a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
   b. Meneliti dan menelaah serta menandatangani rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja Perseroan yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
   c. Memberikan pendapat dan saran mengenai rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
   d. Memberikan persetujuan atas rencana jangka panjang dan rencana kerja Perseroan;
   e. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
   f. Melaporkan kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
   g. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
   h. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
   i. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
   j. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris dan dimasukan dalam rencana kerja Perseroan;
   k. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
   l. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
   m. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
   n. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
   o. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham pengendali dengan memperhatikan;
   p. Peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal;
   q. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Agar supaya fungsi pengawasan dan fungsi pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam butir 1, huruf a dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:
   a. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank;

b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
c. Melakukan penilaian, memberikan pendapat dan nasihat atas sistem pengelolaan sumber daya insani. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
d. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian risiko. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit;
e. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan-keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang memenuhi perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan *(conflict of interest);*
g. Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada manajemen atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko;
i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas dan Pemegang Saham;
k. Melakukan pengawasan atas mutu pelayanan bank kepada nasabah dan memberikan nasihat yang diperlukan kepada manajemen;
l. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *fraud;*
m. Menyusun program kerja Dewan Komisaris yang di dalamnya termasuk program Komite-Komite penunjang Dewan Komisaris.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
   a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
   b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Peran dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Selama periode Tahun Buku 2022, Komisaris Utama telah melakukan hal - hal sebagai berikut :

a. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPST atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
b. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
d. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Pembidangan Tugas

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Pemantau Risiko
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Suyanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Masduki Baidlowi	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko
Sutanto	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko

Pembidangan Tugas

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko
		Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Ketua merangkap Anggota Komite Audit
		Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
		Anggota Komite Pemantau Risiko
Nizar Ali*	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

*yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Hak dan Wewenang

1. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk :
   a. Melihat dan memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain seperti surat berharga danmemeriksa kekayaan Perseroan;
   b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
   c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
   d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
   e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
   f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
   g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
   h. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
   i. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   j. Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
   k. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak -bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
   l. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern.
2. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
   a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan;
   b. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
   c. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal, termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perusahaan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan sektor perbankan;
   d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;
   e. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
      1) Piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian pembiayaan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan;
      2) Selisih antara nilai piutang/kewajiban pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak;
      3) Dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang

telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS;

f. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate dan Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Owned/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan yang material bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
g. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
h. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan;
i. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
j. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya yang melampaui pembatasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris Independen dan non Independen diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Kendati demikian, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.
2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris akan efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dimaksud terkait dengan Penilaian Kemampuandan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan otoritas lain yang terkait (jika ada), serta telah disetujui olehpemegang saham melalui RUPS.
3. Masa jabatan Komisaris Independen dan Non Independen sebanyak 2 (dua) periode berturut-turut, atau maksimum 6 (enam) tahun.
4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
   a. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank;
   b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
   d. Meninggal dunia;
   e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
   f. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
   g. Terlibat kejahatan keuangan.
5. Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
2. Cakap melakukan perbuatan hukum
3. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya
7. Memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Penggantian, dan/atau Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan dalam proses dan pemilihan Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta peraturan lain termasuk dari Bank Indonesia.
Proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar BSI dan Kebijakan Nominasi dan Remunerasi.

Dalam proses pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum dilakukan pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS telah disediakan informasi tentang profil calon anggota Dewan Komisaris yang baru maupun yang diangkat kembali.

Pedoman Tata Tertib Kerja (*Board Charter*) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman tersebut telah dimutakhirkan secara berkala. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nomor: KEP.KOM/001/2021.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pedoman tersebut mengatur berbagai aspek mengenai Dewan Komisaris antara lain mencakup ketentuan mengenai:

Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencakup:
1. Ketentuan Umum
2. Struktur Dewan Komisaris
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi Kerahasiaan Bank dan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
7. Komite-komite dan Lembaga penunjang lainnya
8. Jenis dan Kuorum Rapat
9. Peserta Tamu Rapat Dewan Komisaris
10. Pimpinan Rapat
11. Bahan Rapat
12. Keputusan Rapat
13. Risalah Rapat
14. Penyelenggaraan Rapat
15. Sekretaris Dewan Komisaris
16. Pembidangan Tugas Rutin
17. Waktu Kerja Komisaris
18. Penandatanganan Dokumen
19. Perjalanan Dinas
20. Pendidikan Berkelanjutan
21. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
22. Perubahan
23. Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dengan terlebih dahulu mengikuti tahap *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) sesuai perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dewan Komisaris memiliki keahlian untuk dapat melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan.

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, susunan Dewan Komisaris BSI adalah:

Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Akta Risalah RUPSLB No. 38 tanggal 24 Agustus 2021	7 Februari 2022	2022-2025
M. Zainul Majdi*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Akta Risalah RUPSLB No. 38 tanggal 24 Agustus 2021	7 Februari 2022	2022-2025
Suyanto	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	01 Februari 2021	2021-2024
Masduki Baidlowi	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	01 Februari 2021	2021-2022
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	01 Februari 2021	2021-2024
Sutanto	Komisaris	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	01 Februari 2021	2021-2024
Bangun Sarwito Kusmulyono**	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	01 Februari 2021	2021-2024
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	01 Februari 2021	2021-2024
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	01 Februari 2021	2021-2024
Mohamad Nasir**	Komisaris Independen	Akta Berita Acara RUPST No.155 tanggal 27 Mei 2022	06 Januari 2023	2023-2025
Nizar Ali	Komisaris	Akta Berita Acara RUPST No.155 tanggal 27 Mei 2022	yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK	-

* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022
** Sudah tidak efektif menjabat keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021pada tanggal 27 Mei 2022
*** Yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan OJK pada Januari 2023

Program Orientasi Dewan Komisaris Baru

Mengingat latar belakang anggota Dewan Komisaris beragam, BSI selalu mengadakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif dan efektif sebagai ajang memberikan pengenalan mengenai kondisi Bank Syariah Indonesia secara umum.

Sejalan dengan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi:

1. Pengenalan Korporasi terkait *Corporate Strategy*, dan visi misi
2. Pelatihan Perbankan Syariah
3. Pelatihan Manajemen Risiko
4. Pelatihan GCG Perusahaan Terbuka

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Syariah Indonesia, Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
6. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Kriteria hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan:			Hubungan Keluarga dengan:		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Pengendali
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Suyanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Masduki Baidlowi	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Zainul Majdi*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bangun Sarwito Kusmulyono**	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Nizar Ali***	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022
** Sudah tidak efektif menjabat keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021pada tanggal 27 Mei 2022
*** yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Kebijakan

Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
2. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rangkap jabatan. Rangkap Jabatan oleh anggota Dewan Komisaris saat ini masih diperbolehkan oleh ketentuan rangkap jabatan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Suyanto	Komisaris	Staf Khusus Kepala	BIN
Masduki Baidlowi	Komisaris	1. Staf Khusus 2. Ketua Harian 3. Ketua Yayasan	1. Wapres Bidang Komunikasi 2. MUI Bidang Pusat 3. MMD Initiative (*Justice & Democracy*)
Imam Budi Sarjito	Komisaris	Nihil	Nihil
Sutanto	Komisaris	Nihil	Nihil
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	1. Wakil Kepala 2. Ketua Komite 3. Wakil Sekretaris Jenderal	1. Badan Ekonomi Syariah 2. Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah 3. BPP HIPMI
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	Rektor	Universitas Islam International Indonesia
Muhammad Zainul Majdi*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Rektor	Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi
Bangun Sarwito Kusmulyono**	Komisaris Independen	Nihil	Nihil
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi	Sekretariat Wakil Presiden
Nizar Ali***	Komisaris	Sekretaris Jenderal	Kementerian Agama RI

* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022
** Sudah tidak efektif menjabat keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 27 Mei 2022
*** yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) adalah kondisi dimana anggota Jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain yang memungkinkan anggota Jajaran Bank tersebut kehilangan obyektivitasnya, dengan ruang lingkup bahwa Jajaran Bank :

a. Wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
b. Bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis dan/atau reputasi
c. Dilarang menyalahgunakan *corporate identity* Bank. *Corporate identity* hanya dapat digunakan untuk kepentingan Bank dan dengan seizin Bank

Bank wajib memiliki kebijakan pengelolaan benturan kepentingan, yang paling sedikit memuat :
a. identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi intra group;
b. larangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; dan
c. kewajiban mengungkapkan apabila terjadi benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kebijakan Pelaporan

Sesuai dengan POJK nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas Perusahaan. BSI dan/atau anggota Dewan Komisaris BSI senantiasa menyampaikan laporan terkait perubahan kepemilikan saham dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris BSI sebagaimana tercantum dalam tabel kepemilikan saham berikut:

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (Lembar)			
		Bank Syariah Indonesia	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-	-	-
Suyanto	Komisaris	-	-	-	-
Masduki Baidlowi	Komisaris	-	-	-	-
Imam Budi Sarjito	Komisaris	-	-	-	-
Sutanto	Komisaris	1.687.400	-	-	-
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	-	-	-	-
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	-	-	-	-
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	-	-	-	-
Nizar Ali*	Komisaris	-	-	-	-

* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali. Selain itu tidak memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Mengacu pada pasal 53 ayat 4 POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2022, jumlah Komisaris Independen BSI telah memenuhi ketentuan POJK tersebut yaitu sejumlah 4 (empat) orang atau sebanyak 50% dari total anggota Dewan Komisaris yang telah efektif menjabat sebanyak 8 (delapan) orang.

Kriteria Independensi Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan Bank adalah sebagai berikut:

Kriteria	Adiwarman Azwar Karim	Mohamad Nasir	M. Arief Rosyid Hasan	Komaruddin Hidayat
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab unt uk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupung tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.	Ya	Ya	Ya	Ya

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Seluruh anggota Komisaris Independen telah memenuhi aspek independensi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Sesuai dengan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk, kebijakan Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 huruf a adalah sah dan berhak mengambil keputusankeputusan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Komisaris, dengan catatan risalah rapat ditandatangani oleh seluruh Komisaris yang hadir dalam rapat dan yang menerima kuasa.
3. Seorang Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh seorang Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
4. Kuasa tertulis Komisaris yang tidak hadir kepada Komisaris lainnya diperhitungkan sebagai kehadiran
5. Seorang Komisaris hanya boleh menerima kuasa dari 1 (satu) orang Komisaris lainnya.
6. Ketidakhadiran secara fisik Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris sebagaimana disebut dalam ayat 1 sebanyak maksimal 3 (tiga) kali berturut-turut dalam setahun, kecuali telah terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai peran dan keterlibatannya dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk khusus oleh Komisaris Utama untuk maksud tersebut dan apabila Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka rapat dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk oleh para Komisaris lainnya.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah dan mufakat dari para peserta yang hadir. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Rincian tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022, baik rapat internal maupun rapat gabungan serta kehadiran pada RUPS disampaikan melalui tabel di bawah ini:

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Gabungan dengan Direksi			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	17	17	100	15	15	100	2	2	100
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	17	14	82	15	14	93	2	2	100
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	17	17	100	15	15	100	2	2	100
Masduki Baidlowi	Komisaris	17	15	88	15	13	87	2	2	100
Suyanto	Komisaris	17	17	100	15	14	93	2	2	100
Sutanto	Komisaris	17	17	100	15		100	2	2	100
Imam Budi Sarjito	Komisaris	17	17	100	15	15	100	2	2	100
Muhammad Zainul Majdi*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	11	17	100	10	10	100	2	1	50
Bangun Sarwito Kusmulyono**	Komisaris Independen	7	7	100	8	8	100	1	1	100
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	10	10	100	6	6	100	0	0	-
Nizar Ali***	Komisaris	10	8	80	6	6	100	0	0	-

* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022
** Sudah tidak efektif menjabat keputusan RUPS Tahunan Tahub Buku 2021 pada tanggal 27 Mei 2022
*** Yang bersangkutan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan OJK

Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda
1	Kamis, 27 Januari 2022	Evaluasi Kinerja BSI Desember 2021
2	Kamis, 27 Januari 2022	Usulan Penetapan Keanggotaan Komite Pihak Independen Penunjang Dewan Komisaris
3	Kamis, 24 Februari 2022	Usulan Penetapan Keanggotaan Komite-Komite Dewan Komisaris
4	Kamis, 24 Februari 2022	Evaluasi Kinerja BSI Januari 2022
5	Kamis, 24 Maret 2022	Evaluasi Kinerja BSI Februari 2022
6	Kamis, 21 April 2022	Diskusi Umum & Evaluasi Kinerja BSI Maret 2022
7	Rabu, 25 Mei 2022	Diskusi Umum & Evaluasi Kinerja BSI April 2022
8	Kamis, 9 Juni 2022	Pembahasan Susunan Anggota Komite
9	Kamis, 23 Juni 2022	Evaluasi Kinerja BSI Mei 2022
10	Kamis, 28 Juli 2022	Perubahan Pihak Independen penunjang Dewan Komisaris
11	Kamis, 28 Juli 2022	Evalusasi Kinerja BSI Juni 2022
12	Kamis, 25 Agustus 2022	Evalusasi Kinerja BSI Juli 2022
13	Kamis, 22 September 2022	Evalusasi Kinerja BSI Agustus 2022
14	Kamis, 6 Oktober 2022	Perubahan Komite Penunjang Dewan Komisaris
15	Kamis, 27 Oktober 2022	Evalusasi Kinerja BSI September 2022
16	Kamis, 17 November 2022	Evalusasi Kinerja BSI Oktober 2022 - Update PMO Aceh dan Isu-isu terkini - Persetujuan RAKB
17	Kamis, 29 Desember 2022	Evaluasi Kinerja BSI November 2022

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Tanggal	Agenda
1	Kamis, 27 Januari 2022	Evaluasi Kinerja BSI Desember 2021
2	Senin, 31 Januari 2022	Pembahasan Mengenai Corporate Action Al-Jumaerah
3	Senin, 14 Februari 2022	Pembahasan Terkait RBB 2022-2024 dan RAKB 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4	Selasa, 22 Februari 2022	Update Pembelian Aset di Aceh
5	Kamis, 24 Februari 2022	Evaluasi Kinerja BSI Januari 2022
6	Kamis, 24 Maret 2022	Evaluasi Kinerja BSI Februari 2022
7	Kamis, 21 April 2022	Evaluasi Kinerja BSI Maret 2022
8	Rabu, 25 Mei 2022	Evaluasi Kinerja BSI April 2022
9	Selasa, 31 Mei 2022	Usulan Perubahan Struktur Organisasi
10	Kamis, 28 Juli 2022	Evalusasi Kinerja BSI Juni 2022 Corporate Action (RUPSLB & Right Issue)
11	Kamis, 25 Agustus 2022	Evalusasi Kinerja BSI Juli 2022
12	Kamis, 22 September 2022	Evalusasi Kinerja BSI Agustus 2022
13	Kamis, 27 Oktober 2022	Evalusasi Kinerja BSI September 2022
14	Kamis, 17 November 2022	1. Evalusasi Kinerja BSI Oktober 2022 2. Update PMO Aceh dan Isu-isu terkini 3. Persetujuan RAKB
15	Kamis, 29 Desember 2022	Evaluasi Kinerja BSI November 2022

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam rapat, maupun secara informal.

Rapat dimaksud dalam mekanisme pemberian nasihat tersebut, yakni:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Rapat Dewan Komisaris, yang terdiri atas:
   a. Rapat Dewan Komisaris yaitu rapat internal Dewan Komisaris dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
   b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi yaitu Rapat Dewan Komisaris bersama – sama dengan Direksi.
   c. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Pemberian nasihat kepada Direksi juga dilakukan melalui surat disposisi ke Direksi, melakukan evaluasi dan pemberian arahan kepada Direksi baik triwulan maupun tahunan atas Laporan Kepatuhan dan hasil assessment GCG. Sedangkan untuk pengawasan, Dewan Komisaris dapat secara rutin melakukan kunjungan ke cabang.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang Perseroan, rencana kerja Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

No.	Tema	Saran/Masukan Dewan Komisaris
1	Pertumbuhan Bisnis	Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja BSI sampai Oktober 2022 yang tumbuh dengan baik, yang diindikasikan dengan capaian Laba bersih sebesar Rp3,55 T, yang meningkat 41,17% secara yoy, dan telah melampaui target laba per Oktober 2022 (111% dari target) serta kenaikan rasio FDR dari 73,39% (Desember 2021) menjadi 82,81% (Oktober 2022) menunjukkan bahwa fungsi intermediasi BSI semakin baik namun terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama antara lain:
		a Pembiayaan Segmen Commercial Pembiayaan Bankwide tumbuh baik secara ytd, yoy, mtm dan telah melampui target di Oktober 2022 dengan capaian sebesar 108,23% namun di segmen Commercial masih tumbuh secara negatif baik secara ytd dan yoy. Pencairan secara kumulatif di Oktober 2022 segmen Commercial mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Oktober 2021. Di Oktober 2021 pencairan secara kumulatif sebesar Rp5,67 T sedangkan di Oktober 2022 pencairan secara kumulatif sebesar Rp4,61 T atau selisih Rp1,07 T. Dengan perluasan sektor fokus dari 2 sektor (kesehatan dan pendidikan) menjadi 18 fokus sektor, serta perbaikan bisnis proses, maka diharapkan segmen Commercial dapat tumbuh secara sustain dan sehat.
		b FBI BSI Mobile & User Aktif Tingkat pertumbuhan FBI BSI Mobile secara mtm mengalami pelambatan dari Rp15 M (September 2022) menjadi Rp13 M (Oktober 2022) sedangkan tingkat pertumbuhan User Aktif secara mtm mengalami peningkatan dari 25.368 User Aktif (September 2022) menjadi 82.244 User Aktif (Oktober 2022)
		c FBI Gadai Tingkat pertumbuhan (*growth*) FBI Gadai secara mtm mengalami percepatan dari tumbuh Rp53,7 M (September 2022) menjadi Rp57,1 M (Oktober 2022) sedangkan tingkat pertumbuhan (*growth*). Dengan rencana pembukaan 1.040 Kantor Layanan Gadai yang baru diharapkan akan bisa meningkatkan OS dan meningkatkan kontribusi Fee Based Income dari pembiayaan Gadai ini. Selain itu FBI Gadai secara yoy tumbuh 6,6% sedangkan O/S pembiayan Gadai Emas tumbuh secara yoy sebesar 16,47%
2	Kinerja dan Pencapaian Target RBB	Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:
		a 1) Untuk beberapa pos yang belum mencapai ditarget (terutama pada Aset, Penempatan BI & SB, Total DPK, Total Dana Murah & Total Ekuitas) perlu diantisipasi gap terhadap target Desember 2022, kedepan agar diupayakan dapat mencapai sesuai target RBB 2022 dan diharapkan dapat melampuinya.
		b Serta kenaikan rasio FDR yang menunjukkan fungsi intermediasi BSI semakin baik, namun pertumbuhan pembiayaan yang lebih cepat dibandingkan DPK, perlu diantisipasi dampak dan mitigasi risiko yang perlu dilakukan mengingat terdapat potensi kenaikan CoF, inflasi dan BI7DRR.
3	CASA dan DPK	Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:
		a Menimbang capaian Tabungan dan Total Dana Murah dan bahwa pasar simpanan ke depan akan lebih kompetitif seiring dengan tren makro ekonomi (the Fed, BI7DRR dst) maka strategi pertumbuhan DPK perlu dipertajam kembali sehingga kedepan BSI mencapai pertumbuhkan DPK yang sustain dengan persentase Dana Murah (CASA) makin besar.
		b Produk Tabungan Payroll (Tabungan Wadiah) perlu dioptimalkan mengingat *payroll* masih belum diikuti dengan demand pembiayaan pegawai ybs, disertai dengan pengembangan produk Tabungan Bisnis.
		c Khusus penetrasi produk Giro di Perguruan Tinggi, perlu ada layanan/kegiatan yang bisa diberikan untuk mahasiswa. Untuk hal ini perlu ada layanan yang bisa bersaing dengan bank lain, misal pemberian bantuan yang bersumber dari dana CSR, zakat, dll.
		d Terkait pertumbuhan Pembiayaan dan DPK, s.d Oktober Pembiayaan tumbuh sebesar 22,8% (menjadi Rp202,2 T Oktober 2022), sementara DPK hanya tumbuh sebesar 11,9%.
4	Pembiayaan	Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:
		a Ekspansi pembiayaan *wholesale* agar dibarengi dengan pengembangan produk dan layanan transaksionalnya sehingga pertumbuhan aset dari *wholesale* diiringi dengan tingkat produktivitas.
		b Pembiayaan SME yang mulai tumbuh bagus agar dapat diidentifikasi faktor pendorongnya baik dari sisi internal (*policy stop & go*, peningkatan kompetensi SDM atas model bisnis SME/*local champion*) ataupun faktor lain serta dibarengi dengan kolaborasi *Corporate*-SME sebagai *Value Chain*.

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

No.	Tema	Saran/Masukan Dewan Komisaris
5	*Laba/Rugi*	Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:
		a Dekom apresiasi kenaikan laba sebesar 41% namun ada potensi tumbuh yang lebih tinggi lagi.
		b Kecenderungan menaiknya *Cost of Fund* dan resesi berlarut agar dapat diantisipasi dampaknya terhadap pencapaian profitabilitas dan pemenuhan target RBB dengan ekpektasi ROA lebih dari 2% dan Laba bersih lebih dari Rp5T.
		c BSI perlu dapat secara akurat mengukur *Return on Marketing Investment* disamping kinerja operasional *marketing communication* lainnya untuk unit kerja terkait. Agar kinerja *marketing communication* baik terkait *product* atau *corporate brand* agar di laporkan kepada Dekom.
6	*BSI Mobile Banking*	Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:
		a RO dengan USAK tinggi (misalnya USAK di RO I Aceh mencapai 67,05%) dapat menjadi referensi bagi peningkatan USAK/UREG bagi RO lain dengan mempertimbangkan konteks wilayah setempat.
		b Agar dapat di intensifkan beberapa upaya peningkatan user/usage BSI Mobile Banking dengan a.l: a) Kampanye *Above the Line Marketing* secara lebih masif baik untuk maksud mengenalkan ataupun mengingatkan (*recall/reminder*) produk; b) *Special Program* untuk cabang dan *Reward* bagi Top Kontributor.
		c Mengingat aktivasi BSI *Mobile* bisa dilakukan sendiri oleh nasabah ,sehingga perlu ada edukasi bagi nasabah utk menghindari terjadi antrian di kantor cabang.
7	*Lain-Lain*	Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direksi dan SEVP sebagai berikut:
		a Agar me-manage kembali terhadap ekspansi pembiayaan yang mengakibatkan ATMR meningkat khususnya pembiayaan yang tidak ada agunan mengingat CAR BSI saat ini (sebelum *right issue*) masih berada di 17,10% (dibawah target Okt-22 sebesar 20,88% dan RBB 2022 sebesar 21,02%).
		b Potensi *Islamic Ecosystem* perlu direviu dengan menggarap secara fokus dan mendalam pada beberapa area, misalnya potensi zakat korporat dan pegawai yang sangat besar di Indonesia.
		c Agar dipastikan bahwa BSI sudah memiliki *dashboard* kinerja yang terintegrasi menyeluruh hingga level cabang.
		d Dari hasil pembahasan G20 di prediksikan pada tahun 2024 nanti Indonesia akan menjadi Top 5 *Economic Country*. Agar hal ini menjadi pendorong semangat untuk perkembangan BSI secara khususnya.
		e Tren pertumbuhan Pembiayaan dan DPK tidak seimbang baik secara ytd dan yoy,dimana pertumbuhan Pembiayaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan DPK.
		f Perlu dipersiapkan strategi untuk penetrasi pondok pesantren hinggal di level eksekusi (*front line*), seperti halnya menjadikan alumni dari pondok pesatren tersebut direkrut dan dilatih menjadi tenaga pemasar BSI.

Rekapitulasi Pengawasan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan dan jalannya pengurusan Bank yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan awal tahun, yang antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan fungsi pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB), antara lain:
   a. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2022 antara lain evaluasi terhadap *Corporate Plan* dan RBB serta kinerja keuangan tahun 2022 setiap bulan;
   b. Melakukan pengawasan terhadap upaya pencapaian RBB, khususnya terhadap pencapaian beberapa aspek penting rencana bisnis seperti penyaluran kredit, perbaikan kualitas aset, penghimpunan dana pihak ketiga, produktivitas dan efisiensi;
   c. Melakukan penelaahan Revisi RBB Tahun 2022-2024;
   d. Melakukan evaluasi atas realisasi RBB yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester serta menyampaikan laporan pengawasan RBB kepada Otoritas Jasa Keuangan;
   e. Melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan RBB Tahun 2023-2025.
2. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak eksternal lainnya;
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal di BSI, antara lain dengan:
   a. Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal di BSI telah berjalan dengan baik;
   b. Memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
4. Melakukan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank per Semester dan mendukung Direksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
5. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.
6. Melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan di BSI antara lain dengan:
   a. Melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan di BSI, memastikan bahwa fungsi kepatuhan di BSI telah dilaksanakan dengan baik serta memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan;
   b. Melakukan reviu atas laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan yang disampaikan Direksi secara berkala;
   c. Melakukan pemantauan terhadap implementasi Strategi *Anti Fraud*, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta Prinsip Mengenal Nasabah.
7. Memastikan terselenggaranya penerapan prinsip dan praktek GCG pada seluruh tingkatan dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan GCG, reviu terhadap laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan Direksi dan pemantauan terhadap hasil *self assessment* GCG
8. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau rencana strategis, pelaksanaan Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait Teknologi Informasi BSI.
9. Memantau serta mengevaluasi perkembangan pengembangan serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya berkenaan dengan fungsi strategis Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Bank;
10. Memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah, Kantor Cabang dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan

Pendidikan Berkelanjutan sesuai dengan tata tertib Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah:

1. Rencana pendidikan berkelanjutan untuk seluruh Komisaris dan anggota Komite-Komite penunjang tertuang dalam Rencana Program Kerja Dewan Komisaris;
2. Dalam hal pendidikan berkelanjutan dilakukan di luar program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya agar disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat;
3. Komisaris dan anggota Komite Penunjang yang telah melakukan pendidikan berkelanjutan harus menyampaikan laporan hasil pendidikannya di dalam Rapat Dewan Komisaris atau di dalam rapat Komite penunjang.
4. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi/fasilitas dan protokoler selama pendidikan berkelanjutan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi Pengembangan Kompetensi

Disampaikan secara rinci pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

A. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan RUPS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self assessment*. Hasilnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam dalam RUPS.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilaksanakan melalui RUPS adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
2. Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas serta kewajiban Dewan Komisaris.
3. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara *self assessment* menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2022 secara mandiri (*self assessment*).

Kriteria dan Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Indikator	Bobot Penilaian	Pencapaian
1	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala berjalan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
2	Dewan Komlsarls menyelenggarakan Rapat bersama Direksi secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
3	Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat Komisaris bersama Dewan Pengawas (DPS) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
4	Dewan Komisaris melaksanakan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan melalui keikutsertaan dalam seminar/pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	10%	100%
5	Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke cabang/wilayah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
6	Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
7	Dewan Komisaris menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Regulator secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	10%	100%
8	Dewan Komisaris mereviu, mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap hal-hal yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan	10%	100%
9	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya prinsip dan praktik *Good Corporate Governance* pada seluruh jenjang organisasi	10%	100%
10	Dewan Komisaris memastikan Komite-komite di bawahnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dna fungsinya dengan baik dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa indikator yang diukur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : • Pelaksanaan Rapat Komite dan Rencana Kerja Komite. • Tingkat kehadiran dan partisipasi dalam Rapat Komite • Penyampaian Hasil Reviu kepada Dewan Komisaris • Pembuatan dan Penyampaian Laporan Komite yang tepat waktu	10%	100%

B. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian kinerja Dewan Komisaris ini merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Metode penilaian dilakukan secara mandiri (*self assessment*)

secara periodik, yaitu setiap semester dan hasilnya dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian
Pelaksanaan *assessment* kinerja Dewan Komisaris termasuk dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Kriteria *self assessment* Dewan Komisaris terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* ada 17 indikator sedangkan *governance outcome* mencapai 6 (enam) indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Pihak yang melakukan *self assessment* GCG (di dalamnya termasuk penilaian Dewan Komisaris) adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Hasil penilaian *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2022 adalah peringkat 2 ("Baik").

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya
Hingga berakhirnya tahun buku 2022, Dewan Komisaris memiliki 3 (tiga) komite sebagai penunjang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite-komite tersebut adalah:
1. Komite Audit
2. Komite Nominasi dan Remunerasi
3. Komite Pemantau Risiko

Kriteria dan Hasil Penilaian

Komite Audit
Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Bank, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*Internal Control System*), serta efektivitas pemeriksaan oleh internal dan auditor eksternal. Sepanjang tahun 2022, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 25 kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:
1. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2022.

Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:
1. Pengusulan Remunerasi Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Usulan Perubahan Pengurus PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab jawab melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait manajemen risiko Bank. Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 29 kali dan menjalankan tugasnya yang antara lain:
1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasional Bank harus sejalan dengan prinsip syariah. DPS juga memastikan implementasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional di Bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan (SKKP) dan Satuan

Kerja Audit Intenal (SKAI) untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi antara lain:
   a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
   b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
   c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
   d. Melakukan reviu secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
2. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan

Pada tahun 2022, Dewan Pengawas Syariah BSI berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Akta No. 42 tanggal 31 Mei 2021	6 Mei 2021	2021-2024
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Akta No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Akta No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024

Mekanisme Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bagian Keempat Dewan Pengawas Syariah Paragraf 1 Persyaratan Dewan Pengawas Syariah, Pasal 45 (1) disebutkan "Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi."

Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Kebijakan

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rekapitulasi Rangkap Jabatan

Nama	Jabatan	Jabatan pada Peruahaan/ Instansi Lain	Nama Instansi
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Danamon Indonesia
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Toyota Astra Finance Services
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Trimegah Asset Management
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Sarana Multigriya Finansial (Perssero)
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
		Anggota Dewan Pengawas Syariah	Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT BNP Paribas Investment Partners
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) BPRSyariah
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	BPRS Amanah Ummah Bogor
		Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Hasanudin	Ketua	34	34	100%
Mohamad Hidayat	Anggota	34	34	100%
Oni Sahroni	Anggota	34	34	100%
Didin Hafidhuddin	Anggota	34	34	100%

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
1	Rabu, 5 Januari 2022	1. Kerjasama Sementara Pemanfaatan Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) dan Aset Tetap Bergerak (ATB) 2. Proses Bisnis dan Mock Up Gadai emas atas Rekening E-Mas BSI Mobile
2	Rabu, 12 Januari 2022	1. Penggunaan Kata Credit Card pada Hasanah Card 2. Dana Tanazul BPJS Ketenagakerjaan 3. Penambahan Ruang Data Center (DC) Bank Syariah Indonesia di Mandiri Rempoa
3	Rabu, 19 Januari 2022	1. Ta'zir 2. MMQ Refinancing Aset Pihak Terkait 3. Perumusan Program Kerja DPS Tahun 2022
4	Rabu, 26 Januari 2022	Kerjasama Penjaminan Konvensional
5	Jumat, 11 Februari 2022	Pengambilalihan Perusahaan Aset Manajemen Syariah oleh BSI
6	Rabu, 16 Februari 2022	Usulan Produk Pembiayaan Koperasi Karyawan untuk Tujuan Produktif

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
7	Rabu, 2 Maret 2022	1. Layanan Syariah Bank (LSB): Customer Online Onboarding (COO) Melalui Platform Non Bank 2. Landing Page Online Onboarding dengan Mitra Non Bank 3. Cardless Withdrawal Dompet Elektronik
8	Rabu, 16 Maret 2022	1. Tindak Lanjut Opini DPS atas Asuransi Kesehatan Pegawai 2. Tindak Lanjut Mengenai Pemanfaatan Sementara Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB) 3. Pengesahan Template Akad Layanan Digital Value Chain
9	Rabu, 30 Maret 2022	Empat Kasus Pengaduan Nasabah kepada DSN-MUI
10	Rabu, 6 April 2022	Audiensi Rencana Usulan SCO di Setiap Region
11	Rabu, 13 April 2022	1. Usulan Biaya Program Smart Fund Hasanah Card 2. Standarisasi Media Promosi 3. Mekanisme Penerbitan Opini DPS untuk Laporan Keuangan Triwulan PT BSI Tbk 4. Pengesahan Template Akad Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)
12	Rabu, 20 April 2022	Reksa Dana Online Melalui BSI Mobile
13	Rabu, 27 April 2022	Pembahasan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)
14	Rabu, 25 Mei 2022	Penggunaan Distribusi Dana Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan (TBDSP)
15	Rabu, 8 Juni 2022	Sumber Pendanaan Pembiayaan Pegawai BSI
16	Rabu, 15 Juni 2022	Usulan Revitalisasi Produk Pembiayaan BSI Mitra Kopkar
17	Rabu, 22 Juni 2022	1. Aktivitas/Produk Layanan Bank Sponsor Transaksi BI Fast 2. Layanan Perpanjangan Gadai Emas Via BSI Mobile
18	Rabu, 6 Juli 2022	1. Pembiayaan Skema *Channeling* Nasabah an PT Amartha Fintech 2. Transfer Valas melalui BSI Mobile
19	Kamis, 14 Juli 2022	1. Concern OJK atas BI Fast Individual Transfer 2. Revitalisasi Fitur Emas (*Murabahah* Emas) 3. Revitalisasi Produk *Qardh* Beragun Emas
20	Rabu, 20 Juli 2022	1. Produk Laku Pandai BSI Smart 2. Kartu Tani Digital
21	Rabu, 27 Juli 2022	1. BSI Project Financing 2. CMS BSI Hasanah Card (*Manage Service*)
22	Kamis, 4 Agustus 2022	1. Rencana Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum 2. Usulan Proses Akad Pembiayaan secara Online melalui Chatbot Aisyah 3. Penggunaan Dana Infaq untuk Biaya Renovasi Masjid Ar-Rayyan
23	Rabu, 31 Agustus 2022	1. Aktivitas Pelaksanaan Bisnis untuk Pembiayaan BSI Griya Easy Top Up melalui BSI Mobile 2. Pembiayaan BSI OTO Melalui BSI Mobile
24	Rabu, 7 September 2022	Aplikasi *Customer Portofolio Management* (CPM) sebagai Layanan Perbankan Digital Non Transaksional pada RPPB Bank Tahun 2022
25	Jumat, 16 September 2022	Rapat DPS terkait Sekuritisasi Aset - Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP)
26	Jumat, 30 September 2022	Rapat DPS terkait Sinergi Perbankan Pinjam Pakai ATM Bank Mandiri di Aceh oleh BSI
27	Rabu, 5 Oktober 2022	1. *Project Acquiring* Visa dan Mastercard di ATM dan CRM BSI 2. Program Plasticpay BSI Tahun 2022
28	Rabu, 12 Oktober 2022	1. Revamp BSI Mobile 2. Digitalisasi Pembukaan Tabungan Anak 3. Digitalisasi Rekening Dana Nasabah (RDN)

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
29	Rabu, 2 November 2022	1. Struktur Pembiayaan SME (*Take Over*) MP Mitra Plasma Sawit 2. Struktur Pembiayaan SME (MDC) MP Mitra Plasma Sawit
30	Rabu, 9 November 2022	1. Usulan Produk BSI Daily Kafalah 2. Usulan Revamp *Cash Management System* (CMS)
31	Rabu, 16 November 2022	*Annual Audit Plan*
32	Rabu, 23 November 2022	Rencana Pengalihan Portofolio Aset & *Liabilities* UUS BTN (Project Nusantra)
33	Rabu, 30 November 2022	Layanan *Application Programming Interface* (API) Versi SNAP
34	Rabu, 21 Desember 2022	1. Update Materi *Exit Meeting* Pemeriksaan OJK 2. Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) BSI Hasanah KKPD Melalui QRIS BSI Mobile

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan cara antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank; dalam bentuk:
   a. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
   b. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
      1) Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
      2) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
   c. Mereviu sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
   d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

2. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank.
   a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
   b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
   c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
      1) ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli murabahah;
      2) ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musyarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
   d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
   e. Melakukan reviu terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
   f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
   g. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
1	Gadai Emas Atas Rekening E-Mas	02/BSI/DPS/OPINI/I/2022	12 Januari 2022
2	Penambahan Ruang Data Center (DC) Bank Syariah Indonesia di Mandiri Rempoa	03/BSI/DPS/OPINI/I/2022	12 Januari 2022
3	Kesesuaian Prinsip Syariah pada Laporan Keuangan BSI Prioritas Posisi 31 Desember 2021	04/BSI/DPS/OPINI/I/2022	13 Januari 2022
4	Mekaniske Tanazul Haq BPJS Ketenagakerjaan	05/BSI/DPS/OPINI/I/2022	17 Januari 2022
5	Ta'zir (Perhitungan Dalam Bentuk Prosentase)	06/BSI/DPS/OPINI/I/2022	19 Januari 2022
6	Obyek *Refinancing* dalam Skema Akad Musyarakah Mutanaqishah *Refinancing* yang Dimiliki oleh Pihak Terkait (Pengurus Yayasan/ Pemilik Perusahaan)	07/BSI/DPS/OPINI/I/2022	19 Januari 2022
7	Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Konvensional	08/BSI/DPS/OPINI/I/2022	26 Januari 2022
8	Jenis Koperasi Produktif dan Batasan Kegiatan Usaha yang Dapat Dibiayai BSI	09/BSI/DPS/OPINI/III/2022	2 Maret 2022
9	Layanan Syariah Banking Digital dengan Singeri Bank Himbara	10/BSI/DPS/OPINI/III/2022	11 Maret 2022
10	*Landing Page Online Onboarding* dengan Mitra Non Bank	11/BSI/DPS/OPINI/III/2022	11 Maret 2022
11	*Cardless Withdrawal* Pihak Ketiga di ATM BSI	12/BSI/DPS/OPINI/III/2022	14 Maret 2022
12	Pengesahan Template Akad Layanan *Digital Value Chain*	13/BSI/DPS/OPINI/III/2022	16 Maret 2022
13	Tindak Lanjut mengenai Pemanfaatan Sementara Aset Tetap Tidak Bergerak (ATTB)	14/BSI/DPS/OPINI/III/2022	16 Maret 2022
14	BSI sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana Syariah	16/BSI/DPS/OPINI/V/2022	9 Maret 2022
15	Pengesahan Template Akad Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIPA)	15/BSI/DPS/OPINI/IV/2022	14 April 2022
16	Sumber Pendanaan Pembiayaan Pegawai BSI	16A/BSI/DPS/OPINI/VI/2022	8 Juni 2022
17	Perpanjangan Gadai Emas melalui BSI Mobile	18/BSI/DPS/OPINI/VI/2022	22 Juni 2022
18	Layanan Transaksi BI Fast BSI sebagai Bank Sponsor dengan Bank Peserta Tidak Langsung	19/BSI/DPS/OPINI/VI/2022	22 Juni 2022
19	Transfer Valas melalui BSI Mobile dan BSI NET Banking	20/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	22 Juni 2022
20	Revitalisasi Fitur Produk Cicil Emas	21/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	13 Juli 2022
21	Revitalisasi Pembiayaan Pola Executing dan *Chaneling* Koperasi Karyawan	22/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	18 Juli 2022
22	Penambahan Akad pada Layanan Transaksi BI Fast (Individual Transfer)	23/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	18 Juli 2022
23	Penyesuaian Limit Qardh pada Akad Qardh Beragun Emas (Gadai Emas)	24/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	18 Juli 2022
24	Laku Pandai BSI Smart	25/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	21 Juli 2022
25	Perubahan Pengelola *Card Management System* (CMS) BSI Hasanah Card	26/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	27 Juli 2022
26	Kartu Tani Digital dalam Program Pupuk Bersubsidi	27/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	27 Juli 2022
27	BSI *Project Financing*	28/BSI/DPS/OPINI/VII/2022	27 Juli 2022
28	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Periode 30 Juni 2022	29/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	30 Juni 2022
29	KPR Syariah Tapera dan Penerbitan Sukuk BSI Tanpa Penawaran Umum untuk BP Tapera	30/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	15 Agustus 2022
30	Akad Pembiayaan Melalui *Whatsapp Chatbot*	31/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	4 Agustus 2022
31	Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG)	17/BSI/DPS/OPINI/IV/2022	27 Agustus 2022
32	Pembiayaan BSI OTO Melalui BSI Mobile	32/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	31 Agustus 2022
33	BSI Griya Online Top Up melalui BSI Mobile	33/BSI/DPS/OPINI/VIII/2022	31 Agustus 2022

Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

No.	Judul Opini DPS	No. Register	Tanggal
34	Aplikasi *Customer Portfolio Management* (CPM) Sebagai Layanan Perbankan Digital Non Transaksional	34/BSI/DPS/OPINI/IX/2022	7 September 2022
35	Peran Bank sebagai Originator, *Servicing Agent*, dan Investor Kelas B (Junior) dalam Transaksi Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi (EBAS-SP)	35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022	16 September 2022
36	Sinergi BSI - Bank Mandiri Penempatan dan Pemanfaatan ATM Bank Mandiri oleh BSI di Aceh	36/BSI/DPS/OPINI/IX/2022	30 September 2022
37	ATM *Acquiring Visa & Mastercard* di BSI	37/BSI/DPS/OPINI/X/2022	5 Oktober 2022
38	Pengesahan Template Akad MMQ Pengadaan Barang	38/BSI/DPS/OPINI/IX/2022	29 September 2022
39	Akta Akad Jual Beli, Wakalah Bil Ujrah dan Berita Acara Serah Terima Kumpulan Aset Syariah berbentuk Bukan Dain (ASBBD) PPR dalam rangka Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi (EBAS SP) PT Sarana Multigriya Finansial - PT Bank Syariah Indonesia Tbk	39A/BSI/DPS/OPINI/X/2022	13 Oktober 2022
40	*Revamp* Mobile Banking BSI	40/BSI/DPS/OPINI/X/2022	12 Oktober 2022
41	Digitalisasi Tabungan Anak (BSI Tabungan Junior dan BSI Tabungan Haji Muda)	41/BSI/DPS/OPINI/X/2022	12 Oktober 2022
42	Digitalisasi Rekening Dana Nasabah (BSI Tabungan Efek Syariah)	42/BSI/DPS/OPINI/X/2022	12 Oktober 2022
43	Struktur Pembiayaan SME (*Take Over*) MP Mitra Plasma Sawit	43/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	2 November 2022
44	Struktur Pembiayaan SME (Skema Refinancing) MP Mitra Plasma Sawit	44/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	2 November 2022
45	Struktur Pembiayaan SME (MDC) MP Mitra Plasma Sawit	45/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	2 November 2022
46	Pengesahan Template Akad Murabahah Pembiayaan Kepemilikan Emas (Beserta Akad Gadai Atas Agunan Pembiayaan), Surat Bukti Kepemilikan Emas, Dan Formulir Pembiayaan Cicil Emas (Melalui Offline dan Sistem Elektronik)	46/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	30 November 2022
47	BSI Daily Kafalah	47/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	9 November 2022
48	*Revamp Cash Management System* (CMS)	48/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	9 November 2022
49	Layanan *Application Programming Interface* (API) Berbasis SNAP	49/BSI/DPS/OPINI/XI/2022	30 November 2022
50	Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) BSI Hasanah KKPD Melalui QRIS BSI Mobile	50/BSI/DPS/OPINI/XII/2022	22 Desember 2022

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kinerja DPS BSI sepanjang tahun 2022 tidak terlepas dari dukungan luar biasa manajemen BSI dan semua pihak terkait. Sehingga DPS BSI dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan Opini DPS dan pelaksanaan Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui Self Assesment GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Serta pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Departemen Perbankan Syariah OJK dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

DIREKSI

Direksi adalah organ utama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Bank Syariah Indonesia, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi dapat mewakili BSI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi secara umum bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS. Pelaksanaan tugas tersebut dipertanggungjawabkan pada RUPS.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Bagi Direksi

BSI memiliki dan menjalankan kebijakan pemberian pinjaman bagi Direksi yang dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak berelasi dengan Bank. Pinjaman oleh Direksi akan diperhitungkan sebagai Batas Maksimum Pemberian Dana sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun Direksi wajib menyusun dan memastikan pelaksanaan RJP, RKAP, RBB BSI setiap tahunnya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk No 01/006/KEP/DIR tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pembidangan Tugas

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Hery Gunardi	Direktur Utama	-
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	-
Ngatari	Direktur Retail Banking	Retail Banking
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Sales & Distribution
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	Information Technology
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Risk Management
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Compliance & Human Capital
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Finance & Strategy
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Wholesale & Transaction Banking
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Treasury & International Banking

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang antara lain:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa pekerja Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain.
5. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan.
7. Tidak menagih lagi pokok, margin, ujrah, dan bagi hasil lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian bagi hasil Perseroan, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasanpembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatannya. Namun, tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebut alasannya.

Pemberhentian seperti itu berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS. Setelah masa jabatannya berakhir anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Kriteria Direksi

Persyaratan anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan:
1. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
3. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang yerkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pihak yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai Anggota Direksi;
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Tata Tertib Kerja (*Charter*) Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi Bank Syariah Indonesia berpedoman pada Tata Tertib Direksi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 01/006-KEP/DIR tanggal 1 Februari 2021 tentang Tata Tertib Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Adapun isi dari Tata Tertib Direksi antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Bertindak
2. Organisasi dan Pembidangan Tugas
3. Kebijakan Umum
4. Etika dan Waktu Kerja
5. Pengaturan Rapat
6. Komite
7. Senior Executive Vice President
8. Korespondensi
9. Lain-lain
10. Perubahan
11. Penutup

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Guna memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi Bank harus memiliki akhlak dan moral yang baik, komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank.

Untuk memenuhi persyaratan kompetensi, anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif	Periode Jabatan
Hery Gunardi	Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Akta Berita Acara RUPSLB No.155 tanggal 27 Mei 2022	23 September 2022	2022 - 2025
Ngatari	Direktur Retail Banking	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021 - 2024
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Akta Berita Acara RUPSLB No. 92 tanggal 15 Desember 2020	1 Februari 2021	2021-2024
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Akta Berita Acara RUPSLB No.155 tanggal 27 Mei 2022	31 Januari 2023	2023-2025
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Akta Berita Acara RUPSLB No.155 tanggal 27 Mei 2022	23 September 2022	2022 - 2025

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Direksi yang telah diangkat dalam RUPS wajib mengikuti program orientasi. Program orientasi dilakukan dengan menyampaikan materi-materi terkait Bank (tata kelola perusahaan, strategi dan kinerja bank, manajemen risiko dan materi lainnya) yang dikoordinasikan oleh *Corporate Secretary*.

Program orientasi Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun materi yang disampaikan adalah:

- Pelatihan Perbankan Syariah
- Pelatihan Manajemen Risiko
- Pengenalan Visi, Misi, *Corporate Plan*, RKAP
- Pelaksanaan Rapat Direksi
- *Workshop Good Corporate Governance*

Hubungan Afiliasi Direksi

Kriteria hubungan afiliasi anggota Direksi meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris; dan
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN:			HUBUNGAN KELUARGA DENGAN:		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/ Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/ Pengendali
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ngatari	Direktur Retail Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN:			HUBUNGAN KELUARGA DENGAN:		
		Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/ Pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	Pemegang Saham Utama/ Pengendali
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rangkap Jabatan Direksi

Kebijakan

Kebijakan rangkap jabatan Direksi telah diatur dalam pedoman Direksi. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:

1. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
2. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba; dan/atau
3. Perangkapan jabatan Direksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Selama tahun 2022 tidak ada anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Jabatan pada Perusahaan Publik Lain	Nama Instansi
Hery Gunardi	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
Ngatari	Direktur Retail Banking	Nihil	Nihil	Nihil
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	Nihil	Nihil	Nihil
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	Nihil	Nihil	Nihil
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	Nihil	Nihil	Nihil
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Jabatan pada Perusahaan Publik Lain	Nama Instansi
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	Nihil	Nihil	Nihil
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	Nihil	Nihil	Nihil
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	Nihil	Nihil	Nihil

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangan 90 hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif;
2. Meninggal dunia;
3. Masa jabatannya berakhir;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga; atau
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Bank bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam menjalankan tugas tersebut.

Rapat Direksi

Kebijakan

Rapat Direksi merupakan forum untuk membahas, mengoordinasikan dan menyelesaikan agenda-agenda Bank. Rapat Direksi dihadiri oleh Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan atau setiap waktu bilamana diperlukan oleh seorang atau atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh peserta lainnya sesuai kebutuhan Bank.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Hery Gunardi	Direktur Utama	47	46	97%	15	14	93%	2	2	100%
Bob Tyasika Ananta**	Wakil Direktur Utama	31	29	93%	8	6	75%	2	2	100%
Ngatari	Direktur Retail Banking	47	45	95%	15	10	66%	2	2	100%
Abdullah Firman Wibowo*	Wakil Direktur Utama 2	16	16	100%	7	5	71%	2	2	100%

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Internal Direksi			Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris			Kehadiran di RUPS		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Kusman Yandi*	Direktur Wholesale & Transaction Banking	14	16	87%	7	4	57%	2	2	100%
Kokok Alun Akbar*	Direktur Retail Banking	16	16	100%	7	5	71%	2	2	100%
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	47	44	93%	15	9	60%	2	2	100%
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	47	44	93%	15	11	73%	2	2	100%
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	47	44	93%	15	14	93%	2	2	100%
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	47	43	91%	15	14	93%	2	2	100%
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	47	43	91%	15	15	100%	2	2	100%
Zaidan Novari	Direktur Wholesale Transaction Banking	31	28	90%	8	7	87%	2	2	100%
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	31	30	96%	8	7	87%	2	2	100%

*)Menjabat hingga putusan RUPST tanggal 27 Mei 2022

Agenda Rapat Internal Direksi

Rincian agenda dan keputusan/rekomendasi rapat internal Direksi disampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tanggal	Agenda	Keputusan/Rekomendasi
4 Januari 2022	1. Distribusi Target Direktorat & Regional 2. Pertumbuhan Micro 3. Branding Cabang/*Wallsign/Signage/* LED	1. Terhadap target pembiayaan, *baseline* diganti dengan realisasi Desember 2021. 2. Data laporan pertumbuhan Mikro Bank Mandiri agar disiapkan untuk dapat dibandingkan dengan data trend mikro BSI. 3. Renovasi outlet diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2022. Penambahan jumlah vendor dapat dipertimbangkan dalam rangka mempercepat proses renovasi outlet.
10 Januari 2022	1. Arahan Khusus 2. KPI Direksi & SEVP 3. *Corporate Plan* BSI	1. Seluruh Direksi perlu membaca dan mengingat tanggung jawab Direksi di Undang-Undang PT. 2. KPI disusun perlu memperhatikan prinsip *measurement* (terukur) dan *under control* (*responsibility* & *accountability*). 3. *Draft Corporate Plan* BSI agar di*share softcopy*-nya ke seluruh Direksi dan SEVP untuk direviu.

Tanggal	Agenda	Keputusan/Rekomendasi
18 Januari 2022	1. Laporan Kinerja BSI Desember 2021 2. Target RKAP BSI 2022 3. Peraturan Disiplin Pegawai 4. Rencana Pembelian Gedung Kantor Pusat 5. *Update Annual Report* 2021	1. Menyetujui sesuai usulan perubahan Direktur Supervisi yang disampaikan oleh Direktur Sales & Distributions 2. Trade Finance agar dapat dioptimalkan kembali kinerjanya sehingga dapat mendorong *Fee Based Income*. 3. Sebaran penetapan target SME agar lebih terbagi secara baik alokasinya. 4. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui usulan peraturan disiplin pegawai dengan memperhatikan arahan dan masukan Rapat Direksi. 5. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui rencana pembelian Gedung Kantor Pusat BSI dengan memperhatikan arahan dan masukan Rapat Direksi. 6. Rapat Direksi menyetujui tema Annual Report BSI 2021 "Energi Baru Untuk Indonesia".
25 Januari 2022	1. Update BSI Excellence Award 2. Update Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) atas Temuan OJK Tahun 2021 3. Update *Workplan* dan *Kick Off* Penyusunan *Corporate Plan* BSI oleh McKinsey	1. Kriteria penilaian berdasarkan SPM dapat diterima, namun perlu dipastikan bahwa unit-unit terbaik berdasarkan hasil penilaian dipastikan tidak ada catatan *Fraud* sebagai the best 1 dan 2 nya. 2. KPI 2021 agar segera disampaikan kepada Direksi untuk selanjutnya disampaikan kepada OJK. 3. *Counterpart* BSI agar lebih dispesifikasi per masing-masing bidang kerja.
31 Januari 2022	*Corporate Action* BSI	1. Direksi menyetujui penyertaan modal dan pengambilalihan terhadap Perusahaan Target *Asset Management* dengan rincian biaya sesuai materi yang disampaikan.
8 Februari 2022	1. *Analyst Review* BSI (CGS-CIMB Securities) 2. Update & Langkah Penanganan Cabang Rugi 3. Portofolio & *Quality Review* Mitraguna & Griya 4. Annual *Strategic Supporting Plan* 2022	1. Tingkatkan pertumbuhan tidak hanya dari organik namun juga anorganik. 2. Bentuk tim *taskforce* yang berfungsi memperbaiki cabang rugi dengan melibatkan unit kerja risk. 3. Lakukan *review* pada portofolio griya mengingat banyaknya NPF dari produk tersebut. 4. Program Pendidikan literasi syariah agar dikolaborasikan dengan program dari UMKM center.
15 Februari 2022	1. *Card Management System* BSI HasanahCard (Secondary License) 2. Update Daftar Monitoring Tindak Lanjut atas Temuan OJK Tahun 2021 yang Jatuh Tempo Februari 2022	1. Radir secara prinsip menyetujui usulan pembayaran Secon*dary License* penggunaan layanan Cardlink. 2. Direksi dan SEVP beserta unit terkait untuk membantu dalam pelengkapan data DMTL.
22 Februari 2022	1. Laporan Kinerja Januari 2022 2. Proyeksi Kinerja Februari 2022 3. Pipeline Maret 2022 Semua Segmen Bisnis	1. Agar ditentukan apa yang menjadi *root cause* dari SME dan bagaimana solusinya. 2. Awal Maret akan dilakukan ALCO untuk membahas *pricing* pendanaan terutama deposito. 3. *Wholesale* untuk mulai menyebar ke group-group perusahaan besar untuk memperluas portofolio.
1 Maret 2022	Pembahasan SME *Strategy*	1. Radir memutuskan agar SMG beserta CTO untuk segera membentuk tim PMO SME.
18 Maret 2022	Laporan Kinerja Februari 2022	1. Konsentrasikan strategi untuk pencapaian target di bulan Maret 2022.
23 Maret 2022	1. KPI Jaringan BSI 2022 2. Update Strategi *Pawning* 3. Laporan Program Internal & Eksternal BSI Mobile 2021 4. Update Hasil Pengukuran ACHI (AKHLAK *Culture Health Index*)	1. Secara prinsip, Direksi menyetujui usulan dari KPI Jaringan sesuai dengan masukan dan arahan dari Rapat Direksi. 2. Alat taksir emas agar diupdate/diperbaharui untuk menghindari risiko salah taksir. 3. Direksi menyetujui sesuai usulan yang diajukan terkait penyerahan hadiah dari program Hujan Rezeki BSI Mobile sesuai arahan dan masukan. 4. Secara prinsip, Direksi menyetujui *action plan* untuk peningkatan implementasi AKHLAK di BSI sesuai dengan *timeline* yang diusulkan.

Tanggal	Agenda	Keputusan/Rekomendasi
5 April 2022	1. Update RUPST 2022 2. Pengelolaan Akun Sosial Media 3. *Analyst Coverage* BSI (Mansek, Bahana, CGS, dan Update Hasil NDR Dubai) 4. Rencana Pembangunan Gedung Landmark BSI Aceh	1. Secara prinsip, Direksi menyetujui usulan jadwal dan agenda terkait RUPS 2022 sesuai dengan masukan dan arahan dari Rapat Direksi. 2. CCG diarahkan untuk tidak membuat Sosial Media sendiri, gunakan yang sudah ada. 3. Secara prinsip, Direksi menyetujui usulan untuk proses perolehan International Rating BSI. 4. Direksi setuju untuk proses groundbreaking dijalankan, namun desain pembangunan Gedung untuk dipertimbangkan kembali sesuai usulan.
12 April 2022	1. Implikasi BSI Sebagai Bank Sistemik 2. Update Pengelolaan Akun Sosial Media 3. Update *Officer Development Program* (ODP) 4. Update Teknologi Metaverse	1. Secara prinsip, Direksi menyetujui action plan terkait Implikasi BSI Sebagai Bank Sistemik sesuai dengan masukan dan arahan dari Rapat Direksi. 2. Secara prinsip, Direksi menyetujui usulan (termasuk penambahan pada angka 9 di atas) terkait Pengelolaan Akun Sosial Media sesuai dengan masukan dan arahan dari Rapat Direksi. 3. Untuk ODP BSI yang baru berjalan, agar dipastikan tracknya sudah benar. 4. Apabila terdapat update terkait metaverse BSI, pemateri dapat mengajukan masuk radir kembali.
19 April 2022	1. Laporan Kinerja Maret 2022 2. Update Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) atas Temuan Pemeriksaan Eksternal yang Jatuh Tempo 30 April 2022	1. Data NPF net dan NPF gross tidak selaras, agar di cek dan diselaraskan datanya 2. Unit Audit agar menghubungi/meeting langsung dengan unit kerja/PIC terkait untuk dapat segera menyelesaikan komitmen DMTL.
28 April 2022	1. Persiapan Operasional Libur Lebaran 2. Update Penyusunan *Corporate Plan* Oleh McKinsey 3. Update IT Trouble	1. Pastikan kecukupan uang fisik yang ada di ATM. 2. Terkait strategi ekosistem masjid dan ziswaf agar lebih diperdalam. 3. Pastikan adanya *troubleshooter* untuk meng*handle* IT *trouble* sebelum menjadi masalah yang lebih besar pada system.
24 Mei 2022	1. Laporan Kinerja April 2022 & Proyeksi Mei 2022 2. Strategi Perbaikan *Cost Efficiency Ratio* (CER) 3. Progress Pemenuhan DMTL Audit Eksternal Jatuh Tempo Mei Tahun 2022 4. Update *Progress The Magnificent* 7	1. Deposito special rate untuk terus dikurangi secara gradual dan bertahap dengan terus meningkatkan tabungan dan giro. 2. Pastikan cabang rugi untuk terus berkurang, tidak tetap apalagi bertambah. 3. Pertimbangkan untuk dilakukan Rapat Kerja (Raker) untuk Internal Audit BSI. 4. Proyek yang bisa segera diselesaikan agar segera diselesaikan, tidak perlu menunggu *timelime* SLA.
31 Mei 2022	1. Usulan Perubahan Struktur Organisasi BSI	1. Direksi menyetujui usulan Struktur Organisasi sesuai dengan arahan yang disampaikan dalam Rapat Direksi.
7 Juni 2022	1. Update Inisiatif Pengembangan Super Apps 2. Update Inisiatif Pengembangan *Islamic Ecosystem*	1. Pastikan kelancaran sistem Super Apss terkait dengan *Islamic Ecosystem*. 2. Data manajemen *Islamic Ecosystem* agar diperbaiki untuk memudahkan *flaging & tracking* data.
14 Juni 2022	1. Laporan Kinerja Mei 2022 2. Update Project *Right Issue*, UUS BTN, dan Strategic Partnership 3. Update Inisiatif Pengembangan Magnificent 7 Plus: Retail Financing 4. Aspirasi Satuan Kerja Audit Internal	1. Due diligent dari pemantauan NPF agar selalu diperhatikan per akun. 2. Audit mungkin dapat mulai bisa masuk sebagai *reviewer* di tahap awal. 3. Pastikan bahwa proses dari front-end hingga back-end bisa selaras mengalir dari awal hingga akhir. 4. Buat program Audit Internal secara tahunan dan secara tematik.
15 Juni 2022	1. Pemutusan RKP Restru PT. Waskita Beton Precast	1. Menyetujui usulan restrukturisasi modal kerja sesuai usulan dalam NAP.
21 Juni 2022	1. Update Peningkatan Nilai PT Bank Syariah Indonesia Tbk melalui Aksi Korporasi (Integrasi UUS dan Right Issue) 2. Update Perkembangan Cabang Rugi 3. Persetujuan Bantuan Hewan Potong Dalam Rangka Idul Adha 2022	1. Tim internal BSI perlu lebih detail melihat potensi pembiayaan bermasalah. 2. Pertimbangkan untuk diadakan workshop untuk pembahasan strategi perbaikan cabang rugi. 3. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui alokasi anggaran hewan potong sesuai usulan yang diajukan.

Tanggal	Agenda	Keputusan/Rekomendasi
24 Juni 2022	1. Pemutusan RKP Restru PT Cimanggis Cibitung Tollways	1. Rapat Direksi menyetujui usulan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah PT. Cimanggis Cibitung Tollways sesuai dengan arahan.
28 Juni 2022	1. Pemutusan RKP Restru PT Angkasa Pura Supports	1. Rapat Direksi menyetujui usulan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah PT. Angkasa Pura Support sesuai dengan arahan.
5 Juli 2022	1. Penyampaian Progress Pemenuhan DMTL Audit Eksternal Jatuh Tempo Juni Tahun 2022 2. Proposal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BSI 2022	1. Pemenuhan DMTL untuk segera berkoordinasi dengan PIC terkait dan diselesaikan tanpa menunggu hingga tanggal jatuh tempo. 2. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui Proposal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BSI 2022 sesuai usulan yang diajukan.
19 Juli 2022	1. Kinerja Juni 2022 & Proyeksi Desember 2022 2. Diskusi Umum (Kasus Barata)	1. Pertimbangkan untuk pengalihan (*redeployment*) pegawai dari fungsi support ke fungsi bisnis untuk mendorong produktivitas. 2. Sarana untuk negosiasi adalah kerjasama bisnis dengan BSI kedepannya.
26 Juli 2022	1. Update RUPSLB BSI 2022 2. *Stress Test* Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas BSI Posisi 30 Juni 2022	1. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui usulan jadwal dan agenda, RUPSLB BSI 2022 sesuai usulan dan arahan 2. Terkait resiko surat berharga yang available for sales agar dilakukan reviu sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang berlaku untuk ada tiering limitnya.
2 Agustus 2022	1. Pemaparan Hasil *Coverage Analyst* Dari BNI Sekuritas, BRI Danareksa & UOB Kayhian	1. Right Issue ini diharapkan untuk meningkatkan *Free Float*, bukan menambah porsi kepemilikan *existing stakeholder*.
9 Agustus 2022	1. Update RUPSLB 2022 2. Laporan Kinerja Juli 2022	1. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui jadwal dan agenda RUPSLB BSI 2022 sesuai usulan dan arahan. 2. Untuk giro agar terus didorong pertumbuhannya, terutama dari dana instansi pemerintah.
16 Agustus 2022	1. Rencana Pembelian Tanah & Bangunan Kantor Pusat BSI	1. Rapat Direksi secara prinsip menyetujui Rencana Pembelian Tanah & Bangunan Kantor Pusat BSI sesuai usulan dan arahan.
23 Agustus 2022	1. Portfolio Quality Reviu per 31 Juli 2022 & Simulasi Dampak Pencabutan Stimulus POJK terkait Covid-19	1. Portofolio pembiayaan BUMN jangan hanya terlalu banyak pada infrastruktur, agar di *mix* juga dengan portofolio proyek yang lain.
31 Agustus 2022	1. Peningkatan Efisiensi serta Produktivitas Kantor Pusat dan Cabang	1. Percepat alokasi karyawan dari unit support ke unit bisnis.
7 September 2022	1. *Update* SME Business Group 2. *Update Project* ATM & EDC *Acquiring* dan *Project Visa MasterCard* 3. Implementasi New Hardware T24	1. RM SME agar di kelompokkan berdasarkan produktifitasnya untuk bisa dipantau perkembangan dari RM yang produktif dan yang tidak. 2. Pastikan ATM dan EDC BSI bisa melayani transaksi internasional seperti Visa dan MasterCard, termasuk JCB dan UnionPay. 3. Proses perpindahan server untuk dipercepat untuk menjaga kelancaran layanan BSI terutama untuk layanan online.
12 September 2022	1. Mitigasi Risiko Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Jamdatun Atas Pembelian Gedung Wisma Antara	1. Rapat Direksi menyetujui Proses Pembelian Gedung Wisma Antara sesuai usulan dan arahan.
20 September 2022	1. Update Progress Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 2. Usulan RBB 2023-2025 dan Laporan Kinerja Agustus 2022	1. Pastikan seluruh pemegang saham BSI diundang RUPSLB, KBUMN agar diposisikan paling atas dalam urutan *list* undangan. 2. Usulan RBB 2023 untuk angkanya dirapikan lagi dan masuk lagi ke radir awal Oktober.
4 Oktober 2022	1. *Update Project* Nusantara 1 2. *Update Progress* The Magnificent 7 3. *Productivity Enhancement Program* 4. Strategi Peningkatan Giro BSI	1. Perlunya dilakukan pendalaman dan mapping UUS BTN dari Project Nusantara 1 terlebih dahulu. 2. Agar dibuat *list* bank pembanding bagi BSI terkait pertumbuhan in-organik. 3. Menyetujui usulan *redeployment service* dan *operation* ke *sales* sesuai usulan. 4. Dana BP Migas Aceh agar terus dikejar untuk rekening khususnya masuk BSI.

Tanggal	Agenda	Keputusan/Rekomendasi
10 Oktober 2022	1. Laporan Kinerja September dan Usulan RBB 2023	1. Komposisi *portofolio mix* dari retail, wholesale dan consumer untuk RBB 2023 agar ditetapkan.
25 Oktober 2022	1. Update Progress & Analyst Marketing Feedback Project Alexandria (*Rights Issue*) BSI 2. Update Peningkatan Kinerja Gold & Pawning Business 3. Rencana Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum dalam Rangka Kerjasama BSI dengan BP Tapera	1. Arahan terkait *project* perlu dibangun strategi komunikasi yang baik ke investor. 2. Pertimbangkan pengadaan magnet untuk menjadi bagian alat testing keaslian emas. 3. Materi untuk di-*smoothing* dan kembali masuk ke Rapat Direksi.
1 November 2022	1. Usulan *Crash* Program Akhir Tahun Peningkatan CASA Jaringan 2. Transaksi Sekuritisasi Aset Syariah 3. Usulan Rakernas & *Leadership Forum* Desember 2022	1. Untuk penempatan dana Rp5 s.d. 200Miliar nilai hadiah 0,9% s.d. 1,7% pa (include pajak, kecuali dalam bentuk sponsorship). 2. Pertimbangkan untuk tawarkan produk EBAS-SP tersebut ke BPKH. 3. Update Rakernas untuk kembali masuk di Rapat Direksi berikut.
15 November 2022	1. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2023 2. Laporan Kinerja Oktober 2022 3. Update Rakernas RKAP 2023 & *Leadership Forum* 4. *Annual Audit Plan* 2023 5. Super app Internal Launching Program 6. *Update Task Force* Aceh	1. Ijin Prinsip penyusunan Dokumen RAKB Tahun 2023. 2. Jaga terus pertumbuhan pembiayaan untuk berimbang dengan COF. 3. Informasikan jadwal Rakernas ke sekretaris pengurus (BOC, DPS, BOD dan SEVP) langsung, tidak perlu menunggu menyampaikan via surat undangan. 4. Terkait denda regulator agar didata apa root cause-nya dan bagaimana upaya perbaikannya. 5. Persetujuan atas list fitur MVP 1 yang akan deploy saat internal launching beserta timeline. 6. Proses AMDAL untuk pembangunan Gedung landmark BSI agar segera diselesaikan.
22 November 2022	1. Update Tabungan Bisnis	1. Pertimbangkan fitur tabungan bisnis sedekat mungkin dengan fitur rekening giro.
29 November 2022	1. Prognosis Desember 2022 2. Update Rakernas RKAP 2023 & Leadership Forum	1. *Cost Income Ratio* (CIR) agar ditargetkan dibawah 50% di akhir tahun. 2. Terkait logo Rakernas diplih yang alternatif 3 dengan catatan, tema dan logo BSI ditake-out.
30 November 2022	1. Perubahan Struktur Organisasi BSI	1. Rapat Direksi menyetujui Usulan Perubahan Struktur Organisasi BSI sesuai dengan arahan yang disampaikan dalam Radir.
6 Desember 2022	1. Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) 2. IT Operation Update & Persetujuan *Disaster Recovery Protocol* (DRP) Terkait *Performance Tuning* T24	1. Rapat Direksi menyetujui Usulan Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) sesuai dengan yang disampaikan dalam Radir. 2. IT untuk kembali masuk ke Radir untuk update laporan IT operations. 3. Rapat Direksi menerima usulan terkait Ketentuan Terhadap Pegawai yang ditetapkan sebagai anggota Direksi BUMN lain dan untuk diimplementasikan dalam SPO HC BSI.
9 Desember 2022	1. Presentasi Kandidat Vendor Annual Report & Sustainability Report BSI Tahun Buku 2022	1. Rapat Direksi menerima rekomendasi CSG untuk menggunakan jasa dari PT Maksimedia Satyamitra sebagai Vendor *Annual Report & Sustainability Report* BSI Tahun Buku 2022.
12 Desember 2022	1. Update Proses DRP, Finetune T24 Dan Persetujuan *Swingback* DRC to DC	1. Unit kerja IT agar menjadikan proses update DRP, finetune T24 dan *swingback* DRC to DC tersebut sebagai prioritas.
20 Desember 2022	1. Update Hasil Mediasi PT Jamsyar 2. Update Laporan Kinerja November 2022 dan Posisi 18 Desember 2022 3. Update Hasil Putusan ALCO 4. Update Financing Factory	1. Proses penyelesaian pembiayaan PT Barata Indonesia agar dijalankan sesuai dengan *timeline* yang telah disampaikan dalam Radir. 2. Pastikan SPM setiap bulan mengirim surat ke setiap cabang BSI berisi informasi terkait pencapaian *Cost to Income Ratio* (CIR) sebagai indikator pencapaian cabang. 3. Jaga Aset untuk tidak drop di tanggal 31 Desember 2022 dan di Maret 2023 karena bulan pelaporan. 4. SLA pembiayaan pensiunan seharusnya bisa lebih cepat, mininimal sama dengan SLA pembiayaan mitraguna.

Tanggal	Agenda	Keputusan/Rekomendasi
27 Desember 2022	1. *Update* Tabungan Bisnis 2. *Update Core Banking* 3. *Update Customer Relationship Management* (CRM) *Tools* 4. *Update Financing Factory*	1. Rapat Direksi setuju untuk dijalankan action plan optimalisasi pertumbuhan tabungan bisnis. 2. Pertimbangkan dibentuknya internet banking untuk bisnis (Net-Bisnis). 3. Terkait *product owner* RM Tools agar ada di unit kerja yang mengurus sesuai dengan segmennya. 4. Usahakan untuk target waktu dari *Transformation Initiative Financing factory* (FF) jangan terlalu lama, yang bisa parallel untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Agenda rapat Direksi bersama Dewan Komisaris disajikan pada bagian "Rapat Gabungan Dewan Komisaris" dalam Laporan Tahunan ini.

Pengembangan Kompetensi Direksi

Kebijakan

Direksi melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan dapat menyampaikan dimateri hasil pendidikannya didalam rapat dan/atau sarana penyampaian lain. Hal-hal lain yang menyangkut akomodasi atau fasilitas dan protokoler selama pendidikan berjalan mengacu kepada peraturan internal Bank yang berlaku.

Realisasi

Realisasi pengembangan kompetensi Direksi disajikan secara lengkap pada bab "Profil Perusahaan" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas dan Keputusan Direksi

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

1. Menyusun dan mengimplementasikan *Corporate Plan*.
2. Menggelar Rapat Direksi.
3. Menggelar Rapat persetujuan Komite Pembiayaan, menyalurkan pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
4. Menyusun RAKP Bisnis Perseroan Tahun 2023.
5. Menyusun RAKP Sustainability Perseroan Tahun Buku 2023.
6. Menggelar Rapat dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
7. Melakukan hapus buku piutang pokok yang macet, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya, dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
8. Mewakili Bank melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis dan support.
9. Melaksanakan kegiatan edukasi, literasi dan inklusi dalam rangka peningkatan produk dan layanan Bank Syariah (Literasi Keuangan Syariah).
10. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan lainnya.
11. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
12. Melakukan kegiatan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada penjelasan diatas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direksi selama tahun 2022, antara lain:

1. Struktur Organisasi *Corporate Business Project Team*
2. Struktur Organisasi Corporate Risk Group
3. Struktur Organisasi Financial Institute Group
4. Sruktur Organisasi Retail Collection Restructuring & Recovery Group
5. Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
6. Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit
7. Persetujuan Struktur Organisasi Group Di Bawah Supervisi SEVP Digital & Transaction Banking
8. Struktur Organisasi IT Development Group
9. Struktur Organisasi Regional Office, Area Office, Branch Office, Cash Outlet, Pawning Outlet, Micro Outlet
10. Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remonerasi dan Nominasi
11. Struktur Organisasi SME Business Group
12. Struktur Organisasi Investor Relation Group
13. Struktur Organisasi Transaction Banking Group
14. Struktur Organisasi Commercial Business Group
15. Struktur Organisasi Consumer Business 1 consumer Business 2
16. Struktur Organisasi Card Business Group
17. Struktur Organisasi Retail Deposit & Payroll Group, Islamic Ecosytem Group, Senior Operational Risk Head dan Sales & Distribution Directorate.

Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham diselenggarakan di dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian indikator kinerja kunci (KPI) yang telah disetujui sebelumnya oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

A. Penilaian Berdasarkan KPI

Prosedur Penilaian

Pencapaian kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI), yaitu:

1. PBV (*Price to Book Value*)
2. Laba Bersih BSI
3. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank
4. Aset
5. Jumlah *Customer Digital*
6. Pelaksanaan Inisiatif Strategis Proses Merger
7. *Employee Productivity*

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris serta RUPS. Dasar penilaian kinerja mengacu kepada indicator kinerja kunci (KPI). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta pencapaian kinerja pada periode 2022 akan disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam RUPS yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Hasil penilaian kinerja Direksi BSI tahun 2022 sebesar 109,34 dengan rincian sebagai berikut:

No.	KPI	Bobot (%)	Target	Keterangan	Sifat	Desember 2022			
						Real	Target	Pencapaian	Skor
1	ROE (Return on Equity)	15%	14,04%	Return on Equity Desember 2022	Max	16,84%	14,04%	199,94%	17,99
2	Laba Bersih BSI	20%	Rp 4.004 M	Laba setelah dikurangi pajak dan zakat	Max	4.260	4.004	106,41%	21,28
3	Peringkat Tingkat Kesehatan Bank	20%	2	Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	Min	2	2	100,00%	20,00
4	Pembiayaan	15%	Rp 201,43 triliun	Pembiayaan BSI Desember 2022	Max	207,70	201,43	103,12%	15,47
5	Inisiatif Strategis BSI Tahun 2022	15%	100%	Deliverables sesuai dengan timeline 2022	Max	120%	100%	120,00%	18,00
6	Employee Productivity	15%	Rp 207 Juta	Laba Bersih/ pegawai	Max	229	207	110,68%	16,60
Total		**100%**							109,34

B. Penilaian Kinerja Direksi Melalui *Self Assessment* GCG Sesuai Ketentuan OJK

Penilaian Direksi terkait dengan GCG mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Hasil penilaian disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penilaian penerapan GCG Bank.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan assessment kinerja Direksi termasuk dalam pelaksanaan *self assessment* GCG Bank yang dilakukan secara berkala setiap semester. Dengan demikian, prosedurnya mengikuti penilaian GCG Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi
Kriteria *Self Assessment* Direksi terkait pelaksanaan GCG dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok: *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*. *Governance structure* terdiri dari 14 indikator, *Governance Process* terdiri dari 25 indikator sedangkan *governance outcome* terdiri dari 14 indikator.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi
Pihak yang melakukan *Self Assessment* GCG adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi dan Dasar Penilaiannya
Dalam melaksanaan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh komite di bawah Direksi atau disebut juga Komite Eksekutif sebanyak 7 (tujuh) Komite, yaitu:
1. Komite Manajemen Risiko
2. *IT Steering Committeee*
3. Komite *Policy and Procedure*
4. Komite Bisnis
5. Komite Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
6. Komite *Human Capital*
7. Komite *Asset* dan *Liabilities/Asset and Liability Committee* (ALCO)

Prosedur Penilaian
Selama tahun 2022, Direksi menilai bahwa komitekomite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Kriteria dan Hasil Penilaian

Komite Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

IT *Steering Committeee*
IT *Steering Committee* (ISC) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan IT *strategic plan* dan IT *budgeting*, penetapan proyek IT *strategic* dan pengamanan IT, dengan susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selama tahun 2022, IT *Steering Committee* telah melaksanakan tugasnya dengan baik

Komite *Policy and Procedure*
Komite Policy and Procedure merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur di luar kebijakan manajemen risiko dan pemutakhirannya yang akan diterbitkan. Selama tahun 2022, Komite *Policy and Procedure* telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Kebijakan Pembiayaan/Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam membahas penyusunan Kebijakan Pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan. Selama tahun 2022, Komite Kebijakan Pembiayaan/ Penanganan Pembiayaan Bermasalah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Bisnis
Komite Bisnis merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam fungsi bisnis termasuk marketing, *relationship management* berdasarkan target market/target *customer* yang telah ditetapkan dan melakukan analisa serta pemutusan. Selama tahun 2022, telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite *Human Capital*
Komite *Human Capital* merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan penerapan Kebijakan Human Capital dilaksanakan secara optimal serta sesuai dengan arah dan strategi perusahaan. Selama tahun 2022, Komite *Human Capital* telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Komite Asset dan *Liabilities/Asset and Liability Committee* (ALCO)
Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam memastikan pencapaian tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali, melalui penetapan kebijakan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*). Selama tahun 2022, *Asset and Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keberagaman Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/ Keahlian	Pengalaman
Adiwarman Azwar Karim	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	2021-2024	59 tahun	L	• Master of Arts in Economics and Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	• Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Veritra Sentosa Internasional • *Founder*, KARIM Consulting Indonesia • *Founder*, KARIM Business Consulting • Komisaris Independen Bank Sahabat Sampoerna • Dewan Penasihat Muslim Excellent Centre Unilever Indonesia • Chairman, Sharia Expert in Sukuk Issuance, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) • Dewan Pengawas Syariah, PT. UFO BKB Syariah • Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multi Infrastruktur • Dewan Pengawas Syariah PT. Prudential Life Assurance • Dewan Pengawas Syariah BNP Paribas Investment Partners • Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Danamon Syariah
Suyanto	Komisaris	2021-2024	60 Tahun	L	• Doktor Ekonomi • Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta • Sarjana Ekonomi Pembangunan	• Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelijen Negara • Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri • Agen Madya, pada Staf Ahli, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara • Staf Ahli Kepala BIN bidang SDA-LH • Direktur Asia Timur Tengah Pasifik pada Deputi I Badan Intelijen Negara
Masduki Baidlowi	Komisaris	2021-2024	64 Tahun	L	• Sarjana Tarbiyah • Sarjana Sastra Arab	• Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden) • Komisaris PT Bank Syariah Mandiri • Anggota DPR RI anggota Komisi IV Bidang Pertanian dan Kelautan • Anggota Komisi I Bidang politik Luar Negeri • Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X bidang Pendidikan
Imam Budi Sarjito	Komisaris	2021-2024	63 Tahun	L	• Doktor Ekonomi • Master Ekonomi • Sarjana Ekonomi	• Komisaris PT Bank BNI Syariah • Direktur Kepatuhan dan Risiko Perusahaan BNI • Komisaris PT Bank BNI Syariah • Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management • Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI • Wakil Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis BNI
Sutanto	Komisaris	2021-2024	59 Tahun	L	• Sarjana Administrasi Niaga	• Komisaris PT Bank BRI Syariah • Kepala Audit Intern, Audit Intern Wilayah Bandung • Inspektur, Kantor Inspeksi Semarang • Inspektur, Kantor Inspeksi Banda Aceh • Wakil Inspektur, Bidang Audit KP , KCK, UKLN & PA Audit Intern Kantor Pusat

Keberagaman Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/ Keahlian	Pengalaman
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	2021-2024	69 Tahun	L	• Post-Doctorate Research Program • Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Ushuluddin	• Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) • Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah • Pengawas Yayasan Pendidikan Madania • Anggota Timsel dan Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI • Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	2021-2024	36 Tahun	L	• Magister Kesehatan • Sarjana Kedokteran Gigi	• Komisaris Independen PT Bank Syariah Mandiri • Tim Koordinator Relawan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 • Kelompok Kerja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora RI • Komisaris Merial Health • Chairman/Co-founder MilenialFest
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	2022-2025	62 tahun	L	• Doctor of Philosophy (Ph.D) in Accounting • Magister Sains (M.Si) in Accounting • Sarjana Accounting (Drs)	• Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi • Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Menteri Kemenristekdikti • Rektor Universitas Diponegoro • Dekan Universitas Diponegoto
Nizar Ali*	Komisaris	-	58 tahun	L	• Doktor Studi Islam (Ilmu Hadis) • Magister Pemikiran Pendidikan Islam • Sarjana Bahasa dan Sastra Arab	• Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI • Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI • Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI • Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam • Penguji Ujian Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta

* Yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Keberagaman Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/Keahlian	Pengalaman
Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	Ketua	2021-2024	61 Tahun	L	• Doktor Syariah • Magister Syariah • Sarjana Syariah	• Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Perssero) • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services • Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia
Dr. H. Mohamad Hidayat	Anggota	2021-2024	55 tahun	L	• Doktor Islamic Economics and Finance • Magister Ilmu Hukum • Magister Bussiness Administration • Sarjana Syariah	• Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia • Ketua Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri • Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk
Dr. H. Oni Sahroni, MA	Anggota	2021-2024	47 tahun	L	• Doktor bidang Fiqh Muqaran • Magister bidang Fiqh Muqaran • Sarjana bidang Syariah Islamiyah	• Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BNP Paribas Investment Partners • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk • Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc	Anggota	2021-2024	70 Tahun	L	• Doktor Ilmu Agama/ Pengkajian Islam (Zakat) • Diploma Bidang Bahasa Arab • Magister Penyuluhan Pembangunan • Sarjana Syariah	• Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Amanah Ummah Bogor • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) • Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah • Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRI Syariah Tbk

Keberagaman Direksi

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/ Keahlian	Pengalaman
Hery Gunardi	Direktur Utama	2021-2024	60 Tahun	L	• Doktor Manajemen Bisnis • Master Finance and Accounting • Sarjana Administrasi Niaga	• Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri • Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri • Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN • Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Consumer & Retail Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Distributions PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Consumer Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Direktur Micro & Business Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Presiden Komisaris PT.AXA Mandiri Financial Services • Direktur Micro & Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	2022-2025	59 tahun	L	• Magister Business Administration • Sarjana Akuntansi	• Direktur Human Capital & Kepatuhan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020-2022) • Direktur Treasuri & Internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019-2020) • Direktur Manajemen Risiko, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018-2019) • Direktur Perencanaan & Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016-2018) • Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Ngatari	Direktur Retail Banking	2021-2024	56 Tahun	L	• Sarjana Ilmu Pertanian, Bidang Studi Pertanian/ Pengolahan Hasil Pertanian	• Direktur Utama PT Bank BRIsyariah, Tbk periode • Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jakarta 1 • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar • Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Banjarmasin
Anton Sukarna	Direktur Sales & Distribution	2021-2024	51 Thun	L	• Sarjana Teknologi Produksi Ternak	• Direktur Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri • SEVP Distribution & Sales PT Bank Syariah Mandiri (2019-2020) • Regional Head – Region III/Jakarta PT Bank Syariah Mandiri • Regional Head – Region VII/Indonesia Timur PT Bank Syariah Mandiri • Group Head Commercial Banking Group PT Bank Syariah Mandiri

Nama	Jabatan	Periode	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan/ Keahlian	Pengalaman
Achmad Syafii	Direktur Information Technology	2021-2024	56 Tahun	L	• Magister Manajemen Informatika • Sarjana Teknik Informatika & Komputer	• Direktur IT, Operation & Digital Banking PT Bank Syariah Mandiri • Direktur IT & Operation PT Bank Syariah Mandiri (2017-2020) • Group Head IT Application Support PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • E4 -Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • DH Integration Hub & Common Application Services PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tiwul Widyastuti	Direktur Risk Management	2021-2024	56 Tahun	P	• Magister Manajemen International • Sarjana Pertanian	• Direktur Risk Management PT Bank Syariah Mandiri • Group Head Commercial Risk 2 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Komisaris PT Usaha Gedung Mandiri • Group Head Corporate Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Departement Head Multi Industri I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Tribuana Tunggadewi	Direktur Compliance & Human Capital	2021-2024	55 Tahun	P	• Magister Ilmu Hukum • Spesialis Kenotariatan • Sarjana Hukum	• Direktur Kepatuhan & Risiko PT Bank BNI Syariah • Senior Executive Vice President (SEVP) Risiko & Komunikasi PT Bank BNI Syariah • Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk • Vice President (VP) Wakil Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009-2011) • VP Wakil Pemimpin 2 Divisi Bidang GCG dan Biro Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Ade Cahyo Nugroho	Direktur Finance & Strategy	2021-2024	44 Thun	L	• Magister Bisnis Administrasi • Sarjana Akuntansi	• Direktur Finance, Strategy & Treasury PT Bank Syariah Mandiri • Direktur Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri • SEVP Finance & Strategy PT Bank Syariah Mandiri • Direktur Finance & Strategy PT Mandiri Tunas Finance PT Mandiri Tunas Finance • SEVP/Deputy Director PT Mandiri Tunas Finance
Zaidan Novari	Direktur Wholesale & Transaction Banking	2023-2025	55 tahun	L	• Magister Manajemen Keuangan • Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan	• Group Head Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Pj. Group Head Commercial Banking 3, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Dept. Head Sector Automotive & Heavy Equipment, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Regional Wholesale Head III/Jakarta 1, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk • Pj. Regional Wholesale Head III/Jakarta 1, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Moh. Adib	Direktur Treasury & International Banking	2022-2025	58 tahun		• Magister Manajemen Agrobisnis • Sarjana Ilmu Agronomi	• Direktur Keuangan, IT dan Operasional PT BRI Danareksa Sekuritas • SEVP Retail Capital Market, PT BRI Danareksa Sekuritas • Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk • Wakil Kepala Divisi Bisnis Treasury, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk • Kepala Bagian Credit Line Management Divisi Bisnis Internasional, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia menerapkan prosedur dan kebijakan yang mengacu pada:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan kegiatan usaha Bank.

Prosedur Nominasi

Dewan Komisaris

Pengangkatan Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Dewan Komisaris yang baru.

Direksi

Pengangkatan Direksi Bank Syariah Indonesia wajib memenuhi persyaratan pada saat diangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan melalui usulan pemegang saham kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sebelum pembahasan tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam RUPS, disediakan informasi tentang profil calon Direksi yang baru.

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Kebijakan

Kebijakan Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris mengacu/berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Prosedur Penetapan

Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
2. Selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyampaikan usulan rekomendasi remunerasi berupa gaji/honorarium dan tantiem kepada Pemegang Saham Pengendali untuk mendapat persetujuan RUPS.

Struktur Remunerasi

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya (*remuneration package*) yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS antara lain meliputi:

1. Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (net), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Purna Jabatan
- Tunjangan Perumahan dan *Utilities*
- Fasilitas kendaraan dan tunjangan transportasi
- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Club Membership dan Anggota Perkumpulan Profesi
- Fasilitas Biaya Komunikasi
- Fasilitas Kantor Non Inventaris
- Fasilitas Perjalanan Dinas
- Fasilitas Bantuan Hukum
- Izin Cuti

3. fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura) bagi Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
   - Tunjangan Hari Raya
   - Tunjangan Purna Jabatan
   - Fasilitas Kesehatan
   - Fasilitas Perjalanan Dinas

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah Dalam penetapan remuneration package tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan:

1. Kinerja keuangan.
2. Pemenuhan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva.
3. Kewajaran dengan *peer group*.
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BUS.

Jumlah nominal remunerasi yang diterima Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi selama tahun 2022, adalah sebagai berikut.

Rincian Remunerasi

Jenis Remunerasi	Jumlah Penerima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
	Orang	Nominal (Rp Juta)	Orang	Nominal (Rp Juta)	Orang	Nominal (Rp Juta)
Honorarium	9	12.276.420.000	10	28.344.900.000	4	2.248.160.000
Tunjangan Perumahan		-	10	2.034.000.000		-
Tunjangan Transportasi	9	2.442.000.000	-	-	-	-
Tunjngan Hari Raya	9	1.020.250.000	10	2.337.500.000	4	186.000.000
Tantiem	9	14.577.230.770	10	34.440.000.000	4	3.150.000.000
Fasilitas Lain dalam Bentuk Natura						
Transportasi	-	-	-	-	-	-
Asuransi Purna Jabatan	9	1.247.701.950	10	2.796.908.228	4	231.681.600
Kesehatan	9	432.192.412	10	434.714.099	4	128.558.927

Kelompok Jumlah Remunerasi

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah DPS
Di atas Rp2 miliar	-	10	-
Di atas Rp1 miliar-Rp2 miliar	9	-	-
Di atas Rp500 juta-Rp1 miliar	-	-	4
Rp500 juta ke bawah	-	-	-

Keterangan: Diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian	Rasio 2022
Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah	61,2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,18 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,11 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	2,1 : 1

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas mengelola kesekretariatan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan undangan rapat kepada seluruh peserta untuk ditandatangani oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;
2. Menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam rapat;
3. Mendistribusikan bahan rapat kepada seluruh peserta rapat;
4. Mencatat dan mengadministrasikan keputusan rapat;
5. Menyimpan konsep risalah rapat;
6. Menjaga kerahasiaan keputusan rapat sampai dengan keputusan diumumkan;
7. Menyampaikan risalah rapat kepada seluruh anggota rapat dan pejabat lain yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris;
8. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut perkembangan pelaksanaan keputusan-keputusan rapat serta melaporkan tindak lanjutnya kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menjaga agar pelaksanaan tata tertib Komisaris secara teknis dapat dilakukan secara tertib;
2. Menyiapkan risalah rapat untuk disahkan dalam rapat berikutnya;
3. Menyiapkan Laporan tentang pelaksanaan keputusan rapat untuk dikaji dalam rapat berikutnya

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris. Pembentukannya bertujuan membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko (bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Komite dibentuk melalui keputusan Direksi Nomor KEP:02/351-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022.

Sedangkan regulasi yang menjadi acuan, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Komite Audit.
3. Peraturan perundang–undangan dan regulasi terkait lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan komite audit untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, di antaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
   1) Menentukan rencana kerja tahunan.
   2) Menentukan jadwal rapat tahunan. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite audit serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.

3) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
4) Membuat *Self Assesment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite.
5) Menunjuk anggota Komite Audit non Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite dan membuat Risalah Rapat Komite.

2. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
   1) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan sistem pengendalian intern (*internal control system*), termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
   2) Efektivitas kinerja internal dan eksternal auditor.
   3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
   6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan maupun pemberhentian akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
   7) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
   8) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   9) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

3. Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi komite audit dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris, yang meliputi:
   1) Laporan Keuangan
      a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Syariah Indonesia Tbk., seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
      b) Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Bank Syariah Indonesia Tbk.
      c) Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang diaudit maupun yang tidak diaudit.
      d) Mempelajari secara mendalam perubahan angka/niiai yang signifikan pada pos-pos Neraca dan Rugi/laba.
      e) Mempelajari secara mendalam pos-pos Aktiva Lain dan Pasiva Lain.
      f) Mempelajari secara mendalam iaporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan.
      g) Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk meminta tambahan informasi dan klarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan.
      h) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

2) *Internal Control*
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern atas penerapan sistem pengendalian intern *(Internal control system)*.
   a) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. telah memiliki sistem pengendalian intern *(internal control system)* yang baku sesuai dengan praktek yang berlaku.
   b) Mempelajari secara mendalam laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern dan Auditor Ekstern yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk. guna memastikan bahwa pengendalian intern *(internal control)* sudah dilaksanakan dengan benar.
   c) Melakukan pertemuan berkala dengan unit - unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern *(internal control system)* dan pelaksanaannya.
   d) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Satuan Kerja Audit Intern, Dewan Pengawas Syariah, dan Auditor Ekstern.
   e) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

3) *Internal Audit*.
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
   a) Mengevaluasi rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
   b) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan internal auditor.
   c) Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
   d) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit oieh Satuan Kerja Audit intern untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
   e) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern guna membahas temuan-temuan audit yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
   f) Meminta bantuan Satuan Kerja Audit Intern untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi khusus apabila terdapat temuan audit dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   g) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.

4) *External Audit*
   a) Mempelajari secara mendalam semua temuan yang signifikan dari hasil pemeriksaan eksternal auditor serta institusi pemeriksa lainnya.
   b) Mempelajari nama dan atau reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diundang untuk mengikuti tender.
   c) Mempelajari kemungkinan keterkaitan KAP yang akan diundang mengikuti tender, termasuk para pejabat dan staf Kantor Akuntan Publik tersebut dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang meliputi:
      (1) Hubungan sebagai rekanan jasa non-audit bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
      (2) Hubungan sebagai pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk dalam jumlah material/menentukan.
      (3) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
      (4) Salah seorang pejabat dan atau auditor Kantor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
      (5) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. adalah mantan pejabat/auditor Akuntan Publik yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.

d) Mempelajari dan memastikan bahwa PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik.
e) Mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan Kantor Akuntan Publik sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku.
f) Mempelajari *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* yang dikirimkan kepada Kantor Akuntan Publik yang sudah ditetapkan sebagai calon eksternal auditor PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
g) Mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan Kantor Akuntan Publik yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan *Request for Proposal* dan *Terms of Reference* serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.
h) Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
i) Melakukan komunikasi secara berkala dengan Kantor Akuntan Publik yang sedang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
   (1) Progres pelaksanaan pemeriksaan.
   (2) Temuan-temuan penting.
   (3) Perubahan peraturan/ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
   (4) Penyesuaian-penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan.
   (5) Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pemeriksaan.
j) Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris,

Wewenang

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah:

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan keuangan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi.
2. Melakukan komunikasi dengan Kepala Unit Kerja dan pihak-pihak lain di PT Bank Syariah Indonesia Tbk serta Kantor Akuntan Publik yang memeriksa PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Meminta laporan hasil pemeriksaan internal auditor dan eksternal auditor serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya.
4. Meminta internal auditor dan atau eksternal auditor untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Audit yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI Nomor 01/003-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Isi Piagam Komite Audit, secara umum meliputi:

1. Visi, Misi dan Fungsi
2. Kedudukan & Ruang Lingkup
3. Kewenangan, Tugas, Tanggung Jawab dan Komunikasi serta hubungan internal audit dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian
4. Persyaratan Internal Auditor
5. Kode Etik Auditor
6. Aktivitas Internal Audit
7. Risiko Audit dan Perlindungan Hukum

Komposisi Komite Audit
Anggota Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/351-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 19 Oktober 2022.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Anggota	2022-Selesai	Komisaris Independen
M. Zacky Thayib	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen
M. Gunawan Yasni	Anggota	2022-Selesai	Pihak Independen

Profil Komite Audit

Mohamad Nasir
Ketua

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Arief Rosyid Hasan
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Komaruddin Hidayat
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Zacky Thayib
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	59 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 31 Oktober 1963
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/351-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 19 Oktober 2022.

Riwayat Pendidikan	• Magister Management dari Universitas Gajah Mada (1998) • Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Padjajaran (1986)
Sertifikasi	• Sertifikasi Kompetensi Auditor Level Manager (LSPP) • Sertifikasi Kepatuhan & AML Level II (LSPP) Divisi Kepatuhan • Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiner (ACFA) • Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan
Riwayat Pekerjaan	• Learning Consultant (LC) Mandiri University Group (2018-2019) • Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region 4 Jakarta Thamrin (2017-2018) • Regional Business Control Head (RBCH) Bank Mandiri Region 1 Medan (2015-2017) • Department Head Internal Audit Bank Mandiri (2010-2015) • Regional Internal Control Head (RICH) Bank Mandiri Region 9 Banjarmasin (2008-2010)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Muhammad Gunawan Yasni
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	54 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 17 September 1969
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/351-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berlaku efektif per 19 Oktober 2022.
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen Bidang Keuangan dari Prasetya Mulya Graduate School (1994-1995) • Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia (1988 – 1993)
Rangkap Jabatan	• Penasihat Syariah Lembaga & Penerbitan Instrumen Keuangan Syariah • Bendahara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank BRISyariah Tbk (2008-2021) • Anggota Dewan Pengawas Syariah, Divisi Syariah Bank Tabungan Negara (2018-2020) • Penasihat/Ahli Syariah di Pasar Modal, Manulife Asset Management Indonesia (2015-2020) • Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) (2015-2020) • Penasihat Deutsche Bank Kustodian & Investasi Perbankan Syariah (2009-2017)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	• Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Usuludin	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Master of Arts in Economics and • Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Magister bidang Kebijakan Kesehatan • Kedokteran Gigi	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Doktor Akuntansi • Magister Akuntansi • Sarjana Akuntansi	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
M. Zacky Thayib	Anggota	• Magister Manajemen • Sarjana Ekonomi	Bidang pengawasan bank syariah.
M. Gunawan Yasni	Anggota	• Magister Manajemen • Sarjana Akuntansi	Bidang pengawasan bank syariah dan organisasi.

Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Adiwarman A Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Mohamad Nasir	M.Zacky Thayib	M. Gunawan Yasni
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√

* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
Mohamad Nasir	Ketua merangkap anggota	• Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia.
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	-
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Komisaris Independen	• Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah • Ketua Komite Pemuda PP Masyarakat Ekonomi Syariah • Wakil Sekertaris Jendral Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Komisaris Independen	Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi.
M. Zacky Thayib	Anggota	-	-
M. Gunawan Yasni	Anggota		Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Penasihat Syariah Lembaga & Penerbitan Instrumen Keuangan Syariah

Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2022, Komite Audit menyelenggarakan 25 kali rapat. Rinciannya diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	Kamis, 13 Januari 2022	PwC-Laporan Keuangan PT BSI Tbk, 31 Desember 2021	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris; 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.
2	Kamis, 13 Januari 2022	Laporan Realisasi Audit bulan Oktober-Desember 2021	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris; 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.
3	Kamis, 20 Januari 2022	Progres Pengembangan Informasi Teknologi BSI Triwulan IV/2021	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
4	Kamis, 20 Januari 2022	*Update Burning Issues* di Region Aceh	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.
5	Kamis, 17 Februari 2022	Pengelolaan IT *Security Customer Complain Handling* dan *Phising*	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen.
6	Kamis, 17 Maret 2022	Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2021	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen. 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
7	Kamis, 17 Maret 2022	Inisiatif Strategi Treasury Tahun 2022	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen. 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
8	Kamis, 17 Maret 2022	PwC: Laporan Hasil Reviu Region Aceh	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen. 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
9	Kamis, 7 April 2022	Laporan Realisasi Audit bulan Januari - Maret 2022	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen. 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
10	Kamis, 17 April 2022	Progress laporan Managemen terkait Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrasturktur Pembayaran ke BI	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
11	Kamis, 17 April 2022	Progres Pengembangan Informasi Teknologi BSI Triwulan I/2022	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
12	Kamis, 21 April 2022	Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2022	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
13	Kamis, 9 Juni 2022	Progress Implementasi Strategi "Islamic Ecosystem"(The Mangnificent 7 Strategic), mencakup: - Platform & Solution Mosque & Ziswaf - Platform & Solution Hajj-Umrah & Islamic School (Pesantren dan Sekolah Islam) - Acquisition & Implementation	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 5) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 6) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 7) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
14	Kamis, 7 Juli 2022	Laporan Realisasi Audit bulan Triwulan II/2022	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 5) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 6) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 7) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
15	Kamis, 14 Juli 2022	Realisasi Rencana Aksi Berkelanjutan (RAKB) Semester 1 2022	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
16	Kamis, 21-22 Juli 2022	Pelaksanaan Fungsi Pengarahan dan Pengawasan Dewan Komisaris BSI terhadap aspek IT dan penanganan keluhan nasabah terkait aspek IT Semester 1 Tahun 2022	**Komite Audit** **Ketua** : M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Suyanto, Komisaris 4) Imam Budi Sarjito, Komisaris 5) Widuri Meintari Kusumawati, Pihak Independen; 6) Djoko Seno Adji, Pihak Independen; 7) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
17	Kamis, 4 Agustus 2022	Update Penanganan Nasabah BSI Temuan BPK	**Komite Audit** **Ketua** : Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen **Anggota :** 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
18	Kamis, 11 Agustus 2022	PwC: *Close Meeting* - Pemeriksaaan Audit Laporan Keuangan posisi 30 Juni 2022	**Komite Audit** **Ketua** : Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama Independen **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 5) Bp. M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 8) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
19	Kamis, 25 Agustus 2022	Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2022	**Komite Audit** **Ketua** : Bp. Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen **Anggota :** 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen
20	Kamis, 22 September 2022	*Update Progress IT Stabilisation* (Ciawi)	**Komite Audit** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen
21	Kamis, 6 Oktober 2022	valuasi Hasil *Stress Test* - Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi COVID - Penerapan PSAK 71	**Komite Audit** **Ketua** : Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen **Anggota :** 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 3) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 4) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
22	Kamis, 20 Oktober 2022	Laporan Realisasi Audit Bulan Triwulan III 2022	**Komite Audit** **Ketua:** Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota:** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
23	Kamis, 27 Oktober 2022	Persiapan Publikasi Laporan Keuangan BSI Triwulan III 2022	**Komite Audit** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
24	Kamis, 8 Desember 2022	Usulan *Progress* Super App, Hasil Health *Check Corebanking* dan Progress Perkembangan IT Triwulan III/2022	**Komite Audit** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.
25	Kamis, 22 Desember 2022	PwC *Hardclose Meeting*	**Komite Audit** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) M. Zacky Thayib, Pihak Independen; 5) M. Gunawan Yasni, Pihak Independen.

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	25	24	96
Adiwarman A. Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	25	25	100
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	25	25	100
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	13	13	100
M. Zacky Thayib	Pihak Independen	25	25	100
M. Gunawan Yasni	Pihak Independen	25	23	92

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi
Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1	Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor.
2	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP untuk audit tahun buku 2022 .

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite tersebut berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris, terutama yang berkenaan dengan kebijakan remunerasi dan nominasi Bank.

Dasar Pembentukan
Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada sejumlah regulasi. Komite dibentuk melalui keputusan Direksi Nomor KEP:02/353-KEP/DIR tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selain itu, pembentukannya juga mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:
1. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi & Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. serta peraturan perundang – undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab
Komite wajib bertindak independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

A. Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi remunerasi
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi;
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah;
2. Terkait dengan fungsi nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      I. Komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
      II. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi.
      III. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.
   d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah, kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah.

3. Menyusun konsep dan analisa yang berhubungan dengan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam penetapan kebijakan umum Sumber Daya Insani.
5. Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon Direksi dari *talent pool* pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
6. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
7. Memiliki *data base* dan *talent pool* calon-calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

B. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Komite dan mengusulkan agenda serta materi rapat.

C. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab dalam:
1. Menyelenggarakan rapat secara teratur;
2. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu;
3. Menghadiri rapat;
4. Memberikan kontribusi dan berperan aktif;
5. Membuat risalah rapat (sekretaris).

Wewenang

1. Meminta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melakukan *survey* sesuai kebutuhan Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Meminta informasi hal-hal yang diperlukan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank Syariah Indonesia telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi dan Dewan Komisaris BSI No. 01/001-SKB/Dirkom tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Syariah Indonesia..

Piagam tersebut menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab audit secara transparan, kompeten, objektif dan independen, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

Komposisi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/353-KEP/DIR tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
Komaruddin Hidayat	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Masduki Baidlowi	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Mohamad Nasir	Anggota	2022-Selesai	Komisaris Independen
Nizar Ali*	Anggota	*yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK	Komisaris
Teszy Mira Ekakusuma	Anggota	2022-Selesai	Grup Head yang membawahi Human Capital

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

M. Arief Rosyid Hasan
Ketua merangkap anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Komaruddin Hidayat
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Masduki Baidlowi
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mohamad Nasir
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Nizar Ali
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Teszy Mira Ekakusuma
Sekretaris dan *Non Voting Member*

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	43 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 7 Agustus 1979
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi Nomor KEP. DIR No.01/179-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Riwayat Pendidikan	• Magister Ilmu Psikologi dari Universitas Padjajaran (2005) • Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia (2002)
Riwayat Pekerjaan	• Department Head Talent Analytics, Human Capital Strategy & Talent Management Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2022) • Human Capital Business Partner Head Retail Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2019) • Human Capital Business Partner Head Consumer Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016) • Human Capital Business Partner Head Transaction Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015) • Sr. Professional Staff Human Capital Business Partner, Micro & Retail Banking, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2014)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	• Magister bidang Kebijakan • Kesehatan Kedokteran Gigi	Bidang kebijakan kesehatan dan organisasi.
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Master of Arts in Economics and • Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Usuludin	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Masduki Baidlowi	Anggota	• Sarjana Pendidikan Agama Islam • Sarjana Muda Sastra Arab	Bidang pemerintahan, politik, dan pengawasan perbankan syariah.
Mohamad Nasir	Anggota	• Doktor Akuntansi • Magister Akuntansi • Sarjana Akuntansi	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
Nizar Ali	Anggota	• Doktor Studi Islam • Magister Pemikiran Pendidikan Islam • Sarjana Bahasa dan Sastra Arab	Bidang birokrasi dan pemerintahan dan pendidikan
Teszy Mira Ekakusuma	Sekretaris dan *Non Member Voting*	• Magister Ilmu Psikologi • Sarjana Psikologi	Bidang Sumber Daya Manusia

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	M. Arief Rosyid Hasan	Adiwarman A Karim	Komaruddin Hidayat	Masduki Baidlowi	Mohamad Nasir	Nizar Ali*	Teszy Mira Ekakusuma
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Rangkap Jabatan Anggota Komite

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan	
		Bank Syariah Indonesia	Perusahaan/Lembaga Lain
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua merangkap anggota	• Komisaris Independen	• Ketua Ekonomi Masjid PP DMI • Wakil Kepala Badan Ekonomi Syariah • KADIN • Ketua Komite Pemuda PP MES • Ketua Dewan Pembina ISYEF • Wakil Sekjen DPP HIPMI
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	-
Komaruddin Hidayat	Anggota	• Komisaris Independen	Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia.
Masduki Baidlowi	Anggota	• Komisaris	Ketua Bidang Informasi & Komunikasi (Juru Bicara Wakil Presiden)
Mohamad Nasir	Anggota	• Komisaris Independen	Sekretariat Wakil Presiden RI, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi
Nizar Ali*	Anggota	• Komisaris	-
Teszy Mira Ekakusuma	Sekretaris dan *Non Member Voting*	Human Capital Strategy & Policy Group Head	-

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Agenda Rapat

Sepanjang tahun 2022, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat, dengan agenda seperti diuraikan di bawah ini:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	Kamis, 13 Januari 2022	Permohonan Persetujuan Usulan Tantiem Kinerja Tahun 2021 dan Penyesuaian Gaji/Honorarium Pengurus Tahun 2022	**Komite Remunerasi & Nominasi** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Bangun S. Kusmulyono, Komisaris; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris.
2	Jumat, 27 Mei 2022	Rekomendasi Calon Pengurus dan/atau Pengawas Perseroan	Komite Remunerasi & Nominasi **Ketua:** Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota:** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Bangun S. Kusmulyono, Komisaris; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
3	Kamis, 22 September 2022	Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan	Komite Remunerasi & Nominasi **Ketua:** M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; **Anggota:** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Suyanto, Komisaris; 6) Imam Budi Sarjito, Komisaris.

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
M. Arief Rosyid Hasan	Ketua	3	3	100
Komaruddin Hidayat	Anggota	3	3	100
Adiwarman A Karim	Anggota	3	3	100
Masduki Baidlowi	Anggota	3	3	100
Mohamad Nasir	Anggota	1	1	100
Nizar Ali*	Anggota	1	1	100

* yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Kebijakan Sukses Direksi

Salah satu tugas dari Komite Nominasi dan Remunerasi adalah menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan menjadi bagian dari kebijakan GCG dari Bank serta akan menjadi pedoman Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Prinsip Dasar

1. Persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencalonan dan Pengajuan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah.
   Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diajukan melalui seleksi dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan.

Prosedur Seleksi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi calon yang memenuhi kriteria.
2. Dewan Komisaris atas dasar saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan usulan calon Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan pengawas Syariah kepada RUPS.
3. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir atau diminta Dewan Komisaris atau bila ada kekosongan jabatan.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1	Pelaksanaan tugas nominasi
2	Pelaksanaan tugas remunerasi
3	Pelaksanaan Rapat KRN

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Dasar Pembentukan

Pembentukan Komite Pemantau Risiko melalui keputusan Direksi Nomor KEP:02/352-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022. Selain itu, pembentukannya juga mengacu pada sejumlah regulasi. Di antaranya adalah:

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab

1) Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat.
2) Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam:
   a) Menyelenggarakan rapat secara teratur.
   b) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
   c) Menghadiri rapat
   d) Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat.
3) Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, pembiayaan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
   b) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya periu atau sedang dibahas.
   c) Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   d) Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.
   e) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   f) Melakukan pembahasan laporan triwulanan profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   g) Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
   h) Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   i) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   j) *Monitoring* adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

Wewenang

1) Ketua dan Anggota Komite dapat menghadiri Rapat *Risk Management Committee* sebagai undangan.
2) Ketua dan Anggota Komite dapat meminta laporan-laporan internal yang berkaitan dengan pengendalian risiko di bidang pengelolaan *'asset & liability'*, pembiayaan, *treasury* dan operasional, antara lain menyangkut:
   a) *Exposure* risiko.
   b) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit-limit.
   c) Realisasi pelaksanaan pengendalian risiko dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
   d) Laporan berkala profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
3) Bekerja sama dengan Komite Audit secara umum dan secara khusus untuk meminta Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang-bidang tertentu yang *exposure* risikonya memburuk.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Perseroan telah memiliki piagam yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 01/002-SKB/Dirkom tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Piagam Komite Pemantau Risiko mengatur sejumlah hal yang meliputi:

1. Latar Belakang
2. Pemantau Risiko
3. Definisi, Visi dan Misi, Tanggung Jawab dan Wewenang
4. Struktur Keanggotaan
5. Kerahasiaan
6. Imbal Jasa Anggota Komite
7. Rapat Komite
8. Perubahan
9. Penutup

Komposisi

Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/352-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022. Komposisinya adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Keterangan
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
Adiwarman A. Karim	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Utama/Komisaris Independen
M. Zainul Majdi*	Anggota	2021-Selesai	Komisaris Independen
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Mohamad Nasir	Anggota	2023-Selesai	Komisaris Independen
Sutanto	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Suyanto	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Imam Budi Sarjito	Anggota	2021-Selesai	Komisaris
Saifuddin Latief	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen
Bowo Setyono	Anggota	2021-Selesai	Pihak Independen

* Mengajukan pengunduran diri pada tanggal 5 Agustus 2022 dan sudah tidak efektif menjabat berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 23 September 2022

Profil Komite Pemantau Risiko

Komaruddin Hidayat
Ketua merangkap anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Adiwarman A. Karim
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

M. Arief Rosyid Hasan
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Mohmad Nasir
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Sutanto
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Suyanto
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Imam Budi Sarjito
Anggota

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Dewan Komisaris" yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Saifuddin Latief
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Bekasi, Jawa Barat
Usia	64 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Kudus, 17 Maret 1958
Dasar Penunjukan	Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP:02/352-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022.
Riwayat Pendidikan	• Magister Manajemen dari STIE – IPWI, Jakarta (1997) • Sarjana Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (1981)
Rangkap Jabatan	• Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Syariah Indonesia Tbk • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) • Yayasan Kesejahteraan Bumi Daya
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris PT Estika Yasakelola (2015 – 2021) • Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Syariah Mandiri (2019 - 2020) • Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), (2015-2019) • Konsultan PT Primakelola Agrobisnis Agroindustri, Bogor (2014) • *Department Head of Wholesale & Treasury Banking School, Learning Center Group, Directorate Compliance & Human Capital*, PT Bank Mandiri (Persero), (2009-2014)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Bowo Setiyono
Anggota

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Yogyakarta
Usia	46
Tempat, Tanggal Lahir	Purworejo, 5 November 1975
Dasar Penunjukan	KEP:02/352-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan komite Pemantau Risiko PT bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 19 Oktober 2022.
Riwayat Pendidikan	• Doktor Perbankan/Ekonomi dari Université de Limoges, Perancis (2015) • Magister Keuangan dari University of New South Wales (2004) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1999)
Riwayat Pekerjaan	• Komite Pemantau Risiko PT BRI Syariah Tbk (2020-2021) • Deputi Direktur MBA FEB UGM Kampus Jakarta (2016-2024) • Dosen Tetap FEB UGM, kelas *Financial Management*, *Portfolio Management*, *Risk Management*, *Bank/Financial Institution Management*, *Financial Planning*, *Credit/Loans Management* (2005-sekarang)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman/Keahlian
Komaruddin Hidayat	Ketua merangkap anggota	• Doktor Filsafat • Magister Filsafat • Sarjana Usuludin	Bidang pengawasan perbankan syariah dan pendidikan.
Adiwarman A. Karim	Anggota	• Master of Arts in Economics and Economics Policy • Master of Business Administration in General Management • Sarjana Ekonomi • Sarjana Ekonomi Agrikultur	Bidang pengawasan bank syariah dan regulasi di bidang syariah.
M. Arief Rosyid Hasan	Anggota	• Magister bidang Kebijakan Kesehatan • Kedokteran Gigi	Bidang pemerintahan dan perbankan.
Mohamad Nasir	Anggota	• Doktor Akuntansi • Magister Akuntansi • Sarjana Akuntansi	Bidang birokrasi dan pemerintahan, pendidikan dan pengawasan bank.
Sutanto	Anggota	Sarjana Administrasi	Bidang audit perbankan.
Suyanto	Anggota	• Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi • Magister Strategi Pertahanan Perang Semesta • Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangungan	Bidang Intelijen
Imam Budi Sarjito	Anggota	• Doktor Ekonomi • Master Ekonomi • Sarjana Ekonomi	Bidang pengawasan perbankan syariah dan kepatuhan perbankan
Saifuddin Latief	Anggota	• Magister Manajemen • Sarjana Kehutanan	Bidang perbankan dan birokrasi
Bowo Setyono	Anggota	• Doktor Ekonomi • Magister Keuangan • Sarjana Ekonomi	Bidang ekonomi dan pendidikan

* Yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Komaruddin Hidayat	Adiwarman A Karim	M. Arief Rosyid Hasan	Sutanto	Suyanto	Imam Budi Sarjito	Mohamad Nasir	Saifuddin Latief	Bowo Setyono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√	√	√

* Yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2022, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 29 kali rapat. Rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
1	Kamis, 13 Januari 2022	Laporan *Progress* Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan IV/2021 dan *Strategy* HC Tahun 2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
2	Kamis, 20 Januari 2022	Laporan APU PPT & *Progress* MER (*Mutual Evaluation Review*) Triwulan IV 2021	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
3	Kamis, 20 Januari 2022	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Triwulan IV 2021	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
4	Kamis, 27 Januari 2022	Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2021	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
5	Kamis, 17 Februari 2022	Permohonan Izin Prinsip Pembelian Gedung Kantor	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
6	Kamis, 17 Februari 2022	Evaluasi Marketing Communication BSI Tahun 2021 dan Strategi Marketing Communication BSI Tahun 2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen 2) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen 3) Sutanto, Komisaris; 4) Masduki Baidlowi, Komisaris; 5) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 8) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
7	Kamis, 10 Maret 2022	Kegiatan Komite Manajemen Risiko BSI dan Satuan Kerja Manajemen tahun 2021 s.d Februari 2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
8	Kamis, 17 Maret 2022	*Progress* Implementasi "*Distribution of The Future*": - *Network Remapping & Branding* - *People productivity (Reskilling & Mapping) - Shifting transaction into digital platform/ branch* - BSI Smart (Agen Banking)	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
9	Jumat, 25 Maret 2022	*Corporate Plan*/ Rencana Jangka Panjang BSI 2025	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
10	Jumat, 01 April 2022	Strategi *Corporate Communication & Marketing Communication* Persiapan Ramadhan Tahun 2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
11	Kamis, 07 April 2022	Laporan Progres Pemenuhan & Pengembangan SDM Triwulan I/2022 & Progress Implementasi 1 Culture	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
12	Kamis, 07 April 2022	Persiapan Menjelang Lebaran Memitigasi Risiko Operasional	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
13	Kamis, 21 April 2022	Progres Pertumbuhan Pembiayaan dan Pengendalian FaR Segmen Wholesale Posisi Maret 2022: 1. Perkembangan Portfolio Pembiayaan 2. Perkembangan Kualitas Pembiayaan (Kualitas Pembiayaan Ex Restru Covid ditampilkan tersendiri). 3. Perkembangan nasabah kategori Watchlist 4. Perkembangan Pembentukan CKPN dan Cash Coverage 5. Perkembangan Recovery Ex WO 6. Progres Implementasi Strategi Wholesale & Transaction (sesuai 7 Magnificent plus)	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
14	Kamis, 28 April 2022	Persiapan Menjelang H-4 Lebaran untuk Memitigasi Risiko Operasional	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
15	Kamis, 19 Mei 2022	Laporan APU PPT, Progress MER (Mutual Evaluation Review) Triwulan I 2022 dan Aplikasi BISA	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono ,Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
16	Kamis, 19 Mei 2022	Laporan pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan)	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
17	Kamis, 16 Juni 2022	Progress Implementasi Strategi "Retail & Consumer" (The Magnificent 7 Strategic)	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
18	Kamis, 30 Juni 2022	*Research & Development*, mencakup: - Survey/Riset terkait: *Corporate* dan *Product* - Tren Pertumbuhan Ekonomi Global dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Indonesia (Paska meredanya Covid dan kondisi geopolitik di Eropa saat ini)	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
19	Kamis, 7 Juli 2022	Laporan Progres Pemenuhan dan Pengembangan SDM Triwulan II/2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; 4) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
20	Kamis, 14 Juli 2022	Laporan APU PPT & *Progres* MER (*Mutual Evaluation Review*) Triwulan II/2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 4) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 9) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 10) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 11) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
21	Kamis, 14 Juli 2022	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK (Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan) Triwulan II/2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 4) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 9) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 10) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 11) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
22	Kamis, 28 Juli 2022	Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Zainul Majdi, Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen; 3) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 4) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 5) Sutanto, Komisaris; 6) Masduki Baidlowi, Komisaris; 7) Suyanto, Komisaris; 8) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 9) Kayim Hanuri, Pihak Independen; 10) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 11) Delyuzar Syamsi, Pihak Independen; 12) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
23	Kamis, 4 Agustus 2022	*Update Full Branch* BSI Dubai	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) Sutanto, Komisaris; 5) Masduki Baidlowi, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 9) Bowo Setiyono, Pihak Independen.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
24	Kamis, 11 Agustus 2022	Permohonan Persetujuan *Recovery Plan* BSI	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) Sutanto, Komisaris; 5) Masduki Baidlowi, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 9) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
25	Kamis, 20 Oktober 2022	Laporan *Progres* Pemenuhan dan Pengembangan SDM TW III 2022 dan Inisiatif Strategis 7 *Magnificent* Plus	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) Sutanto, Komisaris; 5) Masduki Baidlowi, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 9) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
26	Kamis, 27 Oktober 2022	Persetujuan Project Sekuritisasi Aset	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) Sutanto, Komisaris; 5) Masduki Baidlowi, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 9) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
27	Kamis, 17 November 2022	*Account Strategy* Kualitas Pembiayaan Nasabah-Nasabah *High Risk* (Restru Covid & Non Covid)	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen; **Anggota :** 1) Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; 2) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 3) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 4) Sutanto, Komisaris; 5) Masduki Baidlowi, Komisaris; 6) Suyanto, Komisaris; 7) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 8) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 9) Bowo Setiyono, Pihak Independen.
28	Kamis, 29 Desember 2022	Laporan APU PPT & Progress MER	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen ; **Anggota :** 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 3) Sutanto, Komisaris; 4) Bp. Suyanto, Komisaris; 5) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Bowo Setiyono, Pihak Independen

No.	Tanggal	Agenda	Peserta
29	Kamis, 29 Desember 2022	Laporan Pelaksanaan Kepatuhan DymFK triwulan III/2022	**Komite Pemantau Risiko** **Ketua** : Adiwarman A. Karim, Komisaris Utama/Komisaris Independen; **Anggota :** 1) M. Arief Rosyid Hasan, Komisaris Independen; 2) Mohamad Nasir, Komisaris Independen*; 3) Sutanto, Komisaris; 4) Suyanto, Komisaris; 5) Imam Budi Sarjito, Komisaris; 6) Saifuddin Latief, Pihak Independen; 7) Bowo Setiyono, Pihak Independen

Frekuensi dan Tingkat kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen	29	29	100
Adiwarman A. Karim	Komisaris Utama/Komisaris Independen	29	29	100
M. Arief Rosyid Hasan	Komisaris Independen	29	29	100
Mohamad Nasir	Komisaris Independen	12	12	100
Sutanto	Komisaris	29	29	100
Suyanto	Komisaris	29	29	100
Imam Budi Sarjito	Komisaris	29	29	100
Masduki Baidlowi	Komisaris	24	20	83
Saifuddin Latief	Pihak Independen	29	29	100
Bowo Setyono	Pihak Independen	29	29	100

* Dapat menjalankan tugasnya setelah mendapat persetujuan OJK

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas

No.	Realisasi Kegiatan (Tugas)
1	Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Peran tersebut terutama bertujuan menciptakan komunikasi yang baik, serta menjaga persepsi terhadap citra BSI.

Karena itu, Bank telah membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang merupakan mandat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Mengacu pada regulasi tersebut, fungsi utamanya antara lain memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal serta menjadi penghubung Bank dengan pemangku kepentingan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Gunawan Arif Hartoyo
Sekretaris Perusahaan

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Tangerang
Usia	52 Tahun pada akhir tahun Buku
Tempat, Tanggal Lahir	Sukoharjo, 26 Maret 1971
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi Nomor 01/185-KEP/DIR tanggal 31 Agustus 2021
Riwayat Pendidikan	• Magister Management dari Universitas Gadjah Mada (2018) • Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga (1995)
Rangkap Jabatan	Tidak memiliki rangkap jabatan, sejalan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014.
Riwayat Pekerjaan	• Group Head Corporate Secretary & Communication PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang) • Project Leader Roll Out Branch PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021-sekarang) • Region Head RO VI/Jakarta 1 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021) • Region Head RO V/Jawa 2 PT Bank Syariah Mandiri (2018-2021) • Group Head Distribution Strategy PT Bank Syariah Mandiri (2016-2018)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam hal keuangan maupun kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham Utama maupun Pemegang Saham Pengendali, baik langsung maupun tidak langsung.

Struktur Organisasi

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Compliance & Human Capital. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, organisasi Sekretaris Perusahaan terbagi ke dalam 6 (enam) bidang aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas Bank sebagai perusahaan terbuka, termasuk melaksanakan tata kelola perusahaan khususnya yang terkait dengan ketentuan pasar modal.
2. Aktivitas Komunikasi Korporasi.
3. Aktivitas Kesekretariatan.
4. Aktivitas *Stakeholder Management*.
5. Aktivitas *Corporate Social Responsibility*.
6. Aktivitas Pengurus Bank.

Untuk menjalankan aktivitas tersebut, Sekretaris Perusahaan memiliki beberapa departemen di bawahnya. Sekretaris Perusahaan tetap melakukan koordinasi dan supervisi langsung terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas masing-masing departemen.

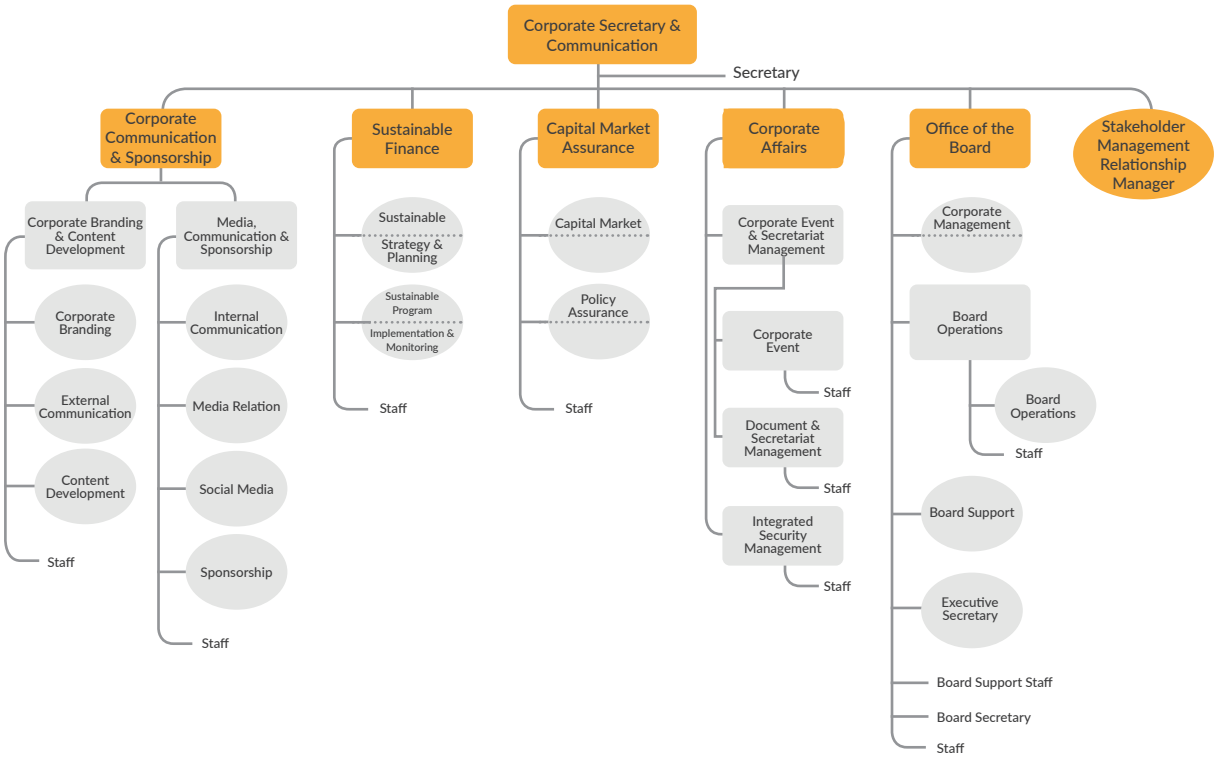

Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Sekretaris Perusahaan berpedoman pada Kebijakan dan Standar Prosedur *Corporate Secretary*. Tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Bank adalah:

Fungsi	Rincian Tugas
Tata Kelola Kepatuhan	1. Menjadi *host* penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite dan DPS serta jajaran yang mendukung di bawahnya. 3. Menyiapkan daftar pemegang saham, daftar khusus anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, serta peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan (*stakeholders management*). 4. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris. 5. Memberikan masukan kepada Direksi Bank untuk menjalankan ketentuan/undang-undang yang berlaku, antara lain tentang Perseroan, obligasi, saham perbankan syariah, pasar modal beserta peraturan pelaksanaannya. 6. Mengarahkan pemuatan publikasi transparansi sesuai ketentuan regulasi perbankan dan pasar modal. a. Mengawal korespondensi Bank dengan cara: Memberikan *advice* kebahasaan/reviu terhadap dokumen korporat Bank. b. Mengelola dokumen, khususnya dokumen korporat termasuk pengelolaan pusat arsip. c. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan dokumen kantor pusat, *regional office*, *area/branch office* ataupun *outlet* lainnya serta memberikan *advice* terkait pengelolaan dokumen dimaksud.

Fungsi	Rincian Tugas
Tata Kelola Komunikasi Korporat	1. Menetapkan strategi komunikasi dalam rangka meningkatkan reputasi positif Bank. 2. Membuat strategi penyebaran informasi kepada *stakeholders* internal dan eksternal. Termasuk menyampaikan program dan kegiatan Bank serta mengelola manajemen isu dan krisis melalui pemberitaan. 3. Menjadi penghubung antara Bank dan pihak eksternal yang mewakili masyarakat. 4. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal Bank, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang perbankan syariah ataupun isu-isu industri syariah secara umum. 5. Mengarahkan penyusunan alat dan komunikasi media *marketing* yang efektif dan tepat sasaran. 6. Mengelola *stakeholders* dan menyelenggarakan beberapa aktivitas yang bertujuan untuk keterbukaan informasi, seperti paparan publik. 7. Menjalin hubungan baik dengan media massa untuk memperoleh pemahaman publik tentang perusahaan agar tercipta citra dan reputasi positif. 8. Melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perbankan syariah kepada masyarakat.
Corporate Branding dan *Sustainable Finance*	1. Menjaga dan meningkatkan citra melalui konsistensi dan standardisasi dalam implementasi *Corporate Identity* Bank. 2. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan RAKB serta Laporan Keberlanjutan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh regulator untuk membangun, memelihara dan mengembangkan citra perusahaan. 3. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh organisasi di Bank. 4. Menyusun *monitoring* dan reviu pelaksanaan program keuangan berkelanjutan untuk dilaporkan secara berkala kepada Direksi. 5. Mempublikasikan kegiatan atau aksi keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan *awareness* dan citra positif Bank dalam berbagai saluran komunikasi, antara lain media cetak, elektronik, video, dll. 6. Menjaga dan mengkoordinasikan kegiatan CSR agar tetap sejalan dengan program *Corporate Planning* Bank sebagai bentuk tanggung jawab sosial. 7. Melaksanakan program RAKB terkait bisnis. 8. Mengelola proses dan kinerja *corporate branding* dan RAKB yang efektif dalam memberikan kontribusi optimal terhadap persepsi positif *stakeholders* dan *shareholders* untuk peningkatan *brand equity*, serta berkontribusi terhadap peningkatan *awareness* dan bisnis Bank.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun buku 2022, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas, yang rinciannya berikut ini:

1. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Menyelenggarakan dan menghadiri serta membuat risalah rapat Direksi serta rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyiapkan informasi daftar pemegang saham, daftar khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
4. Menjalankan fungsi kepatuhan Bank terhadap pasar modal.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Dokumentasi data legalitas Perusahaan, antara lain akta RUPS, akta Perubahan Anggaran Dasar, akta Perubahan Susunan Pengurus, tanda domisili perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada BSI atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.
8. Menyelenggarakan *corporate event* dan/atau berpartisipasi dalam *event* yang dilaksanakan pihak ketiga dalam bentuk *sponsorship*.

9. Menyelenggarakan *event* dengan media.
10. Menerbitkan siaran pers.
11. Menggelar kegiatan edukasi, literasi dan inklusi keuangan syariah.
12. Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2020 sesuai POJK No. 51 Tahun 2017 yang telah diserahkan kepada OJK. *Sustainable finance* terkait bisnis, yang mencakup: *product and services*, *governance*, dan *capacity building*. Sektor bisnis yang diutamakan adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (khususnya pada program-program pemerintah).

Pengembangan Kompetensi

Bank Syariah Indonesia senantiasa mendorong Sekretaris Perusahaan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan. Tujuan dari kegiatan ini, antara lain untuk meningkatkan pemahaman serta pemutakhiran terhadap perkembangan di bidang industri maupun regulasi yang relevan. Informasi lengkap mengenai hal ini disampaikan dalam bab "Profil Perusahaan".

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Strategi tersebut harus sejalan dengan visi, misi, strategi, *risk appetite* Bank, dan *contigency plan* Komite ini serta memutakhirkan dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko secara berkala/insidentil akibat perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Anggota komite adalah Direksi, SEVP, dan Kepala Unit Kerja terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab

Rincian tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah:

1. Memantau profil risiko dan pengelolaan seluruh risiko dalam rangka menetapkan *risk appetite*, strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi serta kecukupan modal.
2. Menetapkan metodologi, skenario, evaluasi, termasuk kondisi stress dalam pengukuran risiko dan *contigency plan*.
3. Melakukan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidentil sebagai tindak lanjut perubahan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank.
4. Melakukan pembahasan strategis dalam lingkup manajemen risiko termasuk memastikan integrasinya dengan perusahaan induk.
5. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang memiliki kondisi khusus (seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan).
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Finance & Strategy Director
Sekretaris 1	Group Head Operational, Portfolio & Market Risk
Sekretaris 2	Group Head Commercial Risk

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. Risk Management Director 2. Finance & Strategy Director 3. WholesaleTransaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. Sales & Distribution Director 6. Information Technology Director 7. Treasury & International Banking Director 8. Consumer Banking SEVP 9. Operations SEVP 10. Financing Risk SEVP
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Pejabat Compliance Group
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contributing Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Risk Management Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member

Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Treasury & International Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Consumer Banking SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Operations SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Financing Risk SEVP

Group Head Operational, Portfolio & Market Risk
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Commercial Risk
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan pembahasan mengenai evaluasi portfolio *guideline*, *control testing*, tingkat kesehatan Bank serta profil risiko Bank

IT STEERING COMMITTEE

IT Streering Committee dibentuk untuk membantu Direksi dalam penetapan rencana strategis di bidang teknologi informasi atau *information technology* (IT), penganggaran IT, penetapan proyek strategis IT dan pengamanan IT. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab
IT Steering Committee adalah komite yang beranggotakan Direksi/SEVP bertugas dan bertanggungjawab untuk:

1. Menetapkan rencana strategis IT (IT Strategic Plan) yang searah dan sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Menetapkan kerangka acuan strategis untuk mengelola sumber daya IT.
3. Menetapkan strategi dan rencana tindakan atas proyek-proyek beserta anggarannya.
4. Menetapkan strategi pengamanan IT dan manajemen risiko penggunaan IT.
5. Memastikan dan memonitor pelaksanaan proyek IT sesuai dengan rencana strategis IT, anggaran IT dan *delivery project* IT.
6. Menetapkan prioritas dan alokasi anggaran IT yang telah diputuskan oleh Direksi.
7. Memutus atau memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dalam ruang lingkup IT dan arahan investasi bidang IT.
9. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang bersifat operasional di bidang IT.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Information Technology Director
Sekretaris 1	Group Head IT Strategic Planning
Sekretaris 2	Group Head IT Development

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Information Technology Director 4. Finance & Strategy Director 5. Risk Management
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice Pesident Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head IT Strategic Planning
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head IT Development
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2022, IT *Steering Committee* telah melaksanakan tugasnya melalui rapat dengan membahas progress inisiatif IT strategis serta memberikan arahan terkait perencanaan, pengembangan dan penambahan sistem IT yang bersifat strategis

KOMITE POLICY & PROCEDURE

Komite Policy & Procedure beranggotakan Direksi/SEVP. Komite ini berwenang merekomendasikan/menetapkan kebijakan dan prosedur, termasuk ketentuan produk dan/atau ketentuan lain yang tidak menjadi ruang lingkup komite di bawah Direksi lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas dan tanggung jawab Komite Policy & Procedure adalah:
1. Membahas dan merekomendasikan penyesuaian/ penyempurnaan kebijakan.
2. Menetapkan pemutakhiran prosedur Perseroan di luar kebijakan dan standar prosedur *human capital* dan kebijakan manajemen risiko, dan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Komite lain di bawah Direksi.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Risk Management Director
Wakil Ketua	Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Policy & Procedure
Sekretaris 2	Group Head Operational, Portfolio & Market Risk

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. Risk Management Director 2. Compliance & Human Capital Director
Permanent Non Voting Member	Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait Materi
Contribution Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait Pemateri
Invitee	1. SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

Risk Management Director
Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Compliance & Human Capital Director
Ketua Komite merangkap Permanet Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Policy & Procedure
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Operational, Portfolio & Market Risk
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Selama tahun 2022, Komite *Policy & Procedure* telah melaksanakan tugasnya antara lain melakukan pembuatan, penyesuaian atau penyempurnaan kebijakan-kebijakan serta standar prosedur yang berlaku di Bank.

KOMITE BISNIS

Komite Bisnis dibentuk untuk membantu Direksi/SEVP dalam menjalankan fungsi untuk menetapkan strategi dan pengembangan bisnis Bank secara terintegrasi, menetapkan produk dan jasa/aktivitas andalan serta strategi dan efektivitas *marketing communication*.

Tugas dan Tanggung Jawab
Komite Bisnis bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Mengevaluasi dan menetapkan strategi bisnis Bank.
2. Membahas dan menetapkan pengembangan bisnis secara terintegrasi, termasuk pengembangan produk, tarif, prosedur terkait, limit eksposure risiko, infrastruktur sarana dan prasarana serta teknologi pendukung bisnis.
3. Membahas dan menetapkan strategi bisnis yang menjadi fokus Bank, antara lain melalui *anchor client* Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja inisiatif strategi bisnis/proyek.
5. Membahas dan menyelesaikan permasalahan bisnis yang bersifat strategis termasuk aliansi antara unit kerja Bank dan aliansi dengan perusahaan induk serta *sister company*.
6. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutusdan melaksanakan hal-hal yang bersifat bisnis opersional.
7. Mengomunikasikan dan memastikan seluruh ketetapan/keputusan komite dilaksanakan sesuai keputusan kepada seluruh jajaran internal Perseroan yang terkait.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Vice President Director
Sekretaris 1	Group Head Corporate Finance & Solution
Sekretaris 2	Group Head Consumer Business 1

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Wholesale Transaction Banking Director 4. Retail Banking Director 5. SEVP Consumer Banking 6. Sales & Distribution Director 7. Risk Management Director 8. SEVP Financing Risk
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

SEVP Consumer Banking
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

SEVP Financing Risk
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Corporate Finance & Solution
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Consumer Business 1
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2022, Komite Bisnis telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan membahas antara lain pengembangan bisnis secara terintegrasi, permasalahan bisnis yang bersifat strategis, kebijakan strategi bisnis, serta mengevaluasi implementasi atas strategi bisnis yang telah ditetapkan

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan, pengembangan dan Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sejalan dengan visi, misi dan strategi Bank, serta penanganan kasus kepegawaian.

Tugas dan Tanggung Jawab
Komite SDM bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yaitu:
1. Menyusun strategi dan kebijakan *human capital* termasuk budaya perusahaan, kompensasi dan *benefit*.
2. Menetapkan alokasi anggaran pembelajaran.
3. Membahas/merekomendasikan kebijakan dan menetapkan prosedur dan sistem operasional pengelolaan *human capital*.
4. Menetapkan arahan strategis dan kebijakan *system* operasional pengelolaan *human capital*, termasuk budaya dan nilai perusahaan.
5. Menetapkan arah strategis pengembangan *system* informasi *human capital*.
6. Menetapkan dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan bisnis Bank.
7. Menetapkan *individual performance management & rewards, talent & succession management* serta *employee relations*.
8. Membahas dan menyelesaikan permasalahan pengelolaan *human capital* yang bersifat strategis.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	1. Vice President Director 2. Compliance & Human Capital Director
Sekretaris 1	Group Head Human Capital Strategy & Policy
Sekretaris 2	Group Head Human Capital Business Partner 1 dan 2

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Vice President Director 3. Compliance & Human Capital Director 4. Finance & Strategy Director 5. Sales & Distribution Director 6. Risk Management Director 7. Human Capital SEVP
Non Permanent Voting Member	Director/SEVP Pemateri Director/SEVP terkait materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Compliance & Human Capital Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Vice President Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Human Capital SEVP
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Pejabat SEVP" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Strategy & Policy
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Business Partner
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku
Selama tahun 2022, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan agenda pengambilan keputusan. Di antaranya berkenaan dengan rotasi dan mutasi pejabat eksekutif Bank, promosi pejabat eksekutif Bank dan pegawai secara umum.

KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Komite Aset dan Liabilitas atau *Assets & Liabilities Committee* (ALCO) adalah komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi pengendalian melalui penetapan strategi atas hal-hal yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank.

Tugas dan Tanggung Jawab
Asset & Liabilities Commitee bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Menetapkan, mengembangkan dan mengkaji ulang strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities*.
2. Mengevaluasi posisi *assets & liabilities* Bank sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, suku bunga dan nilai tukar.

3. Melakukan evaluasi posisi Bank dan strategi *Assets & Liabilities Management* guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko pasar, risiko imbal hasil, risiko investasi, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
4. Melakukan kaji ulang *pricing* aktiva dan pasiva untuk memastikan *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALM Bank.
5. Melakukan kaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
6. Melakukan batasan *liquidity management*, *gap management*, *pricing management*, *FX management*.
7. Menetapkan metodologi *fund transfer pricing*.
8. Melakukan pembahasan bersifat lingkup ALM termasuk perusahaan anak/entitas yang berada di bawah pengendalian Bank.

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	President Director
Wakil Ketua	Treasury & International Banking Director
Sekretaris 1	Group Head Asset & Liabilities Management
Sekretaris 2	Group Head Strategic Planning & Performance Management

Fungsi	Pejabat
Permanent Voting Member	1. President Director 2. Finance & Strategy Director 3. Treasury & International Banking Director 4. Risk Management Director 5. Wholesale & Transaction Banking Director 6. Retail Banking Director 7. Sales & Distribution Director
Permanent Non Voting Member	Compliance & Human Capital Director/ Group Head Compliance Group
Non Permanent Voting Member	1. Director/SEVP Pemateri 2. Director/SEVP terkait materi
Contribution Non Voting Member	Group Head/Pejabat Setara Pemateri dan Group Head/Pejabat Setara terkait materi
Invitee	SEVP/Group Head Internal Audit

Profil Anggota Komite

President Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Treasury & International Banking Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Finance & Strategy Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Risk Management Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Wholesale Transaction Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Retail Banking Banking Director
Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Sales & Distribution Director
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Asset & Liabilities Management
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Strategic Planning & Performance Management
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun 2022, ALCO telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui rapat dengan agenda pengambilan keputusan terkait Kebijakan Nisbah Deposito dan Tabungan Rupiah, Kebijakan Special Rate Pembiayaan Consumer dan Retail Banking, Kebijakan pengelolaan investasi Bank (Surat Berharga dan Penempatan BI), Kebijakan terkait Pengelolaan Dana BPKH, Kebijakan Pendanaan tengah tahun dan menjelang akhir tahun, serta kebijakan lainnya

KOMITE STEERING COMMITTEE CRISIS MANAGEMENT – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Tugas dan tanggung jawab Komite *Steering Committee Crisis Management – Business Continuity Management*

1. Menetapkan strategi pencegahan, penanganan, pemulihan, strategi komunikasi untuk penanganan dampak bencana termasuk pandemik Covid-19 di Bank.
2. Membahas dan menetapkan strategi operasional Bank selama periode bencana termasuk pandemik Covid-19, antara lain aktivasi BCM, penetapan unit kerja *critical*, mekanisme kerja unit kerja (WFH/WFO), jam kerja operasional, dan hal-hal lain diperlukan dalam kondisi darurat bencana termasuk pandemi Covid-19.
3. Membahas dan menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis termasuk aliansi antar unit kerja dan aliansi dengan perusahaan induk dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Bank.
4. Membahas dan menetapkan benefit dan/atau tunjangan sementara bagi pegawai terkait dengan dampak bencana termasuk pandemi Covid-19.
5. Mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memutus dan melaksanakan hal-hal yang terkait pencegahan dan penanganan kondisi darurat bencana termasuk Covid-19.
6. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi operasional yang telah disetujui *Steering Commiitee*.
7. Melaksanakan tugas lainnya yang memerlukan penanganan *Crisis Management Team* (CMT).

Struktur Keanggotaan

Fungsi	Pejabat
Ketua	Vice President Director
Wakil Ketua	Information Technology Director
Sekretaris 1	Group Head Operations Development
Sekretaris 2	Group Head IT Operations
Sekretaris 3	Group Head Human Capital Strategy and Policy
Permanent Voting Member	1. Vice President Director 2. Information Technology Director 3. Sales & Distribution Director 4. Compliance & Human Capital Director 5. Risk Management Director 6. Finance & Strategy Director 7. Operations SEVP 8. Human Capital SEVP
Contribution Non Voting Member	1. Group Head/Pejabat Setara Pemateri 2. Group Head/Pejabat Setara terkait materi

Profil Anggota Komite

Vice President Director
Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Information Technology Director
Wakil Ketua Komite merangkap Permanent Voting Member
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Direksi" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Operations Development
Sekretaris 1
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head IT Operations
Sekretaris 2
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

Group Head Human Capital Strategy and Policy
Sekretaris 3
Profil lengkap disajikan pada bagian "Profil Pejabat Eksekutif" yang terdapat dalam bab "Profil Perusahaan" di Laporan Tahunan ini.

INTERNAL AUDIT

Unit Kerja Internal Audit (IA) adalah Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang melaksanakan fungsi Internal Audit. Tanggung jawab utama SKAI yaitu membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.

Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan Internal Audit dalam Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Internal Audit yang membawahi 3 (tiga) Group dan 1 (satu) Department dengan spesialisasi tugas pada:

1. Internal Audit 1 Group (IA1)
   a. Wholesale Transaction Banking Audit
   b. Finance, Strategy & Treasury Audit
   c. Risk, Compliance & Human Capital Audit
2. Internal Audit 2 Group (IA2)
   a. Retail Banking Audit
   b. Distribution, Strategy & Funding Audit
   c. Digital Transaction Banking Audit
   d. IT Strategy & Governance Audit
   e. IT Operation, Infrastructure & Security Audit
3. Audit Policy & Counterpart Group (APG)
   a. Audit Policy & Development
   b. Counterpart & Audit Support
   c. MIS & Data Analytic
   d. Quality Assurance
4. Investigation Audit Department (IVA)

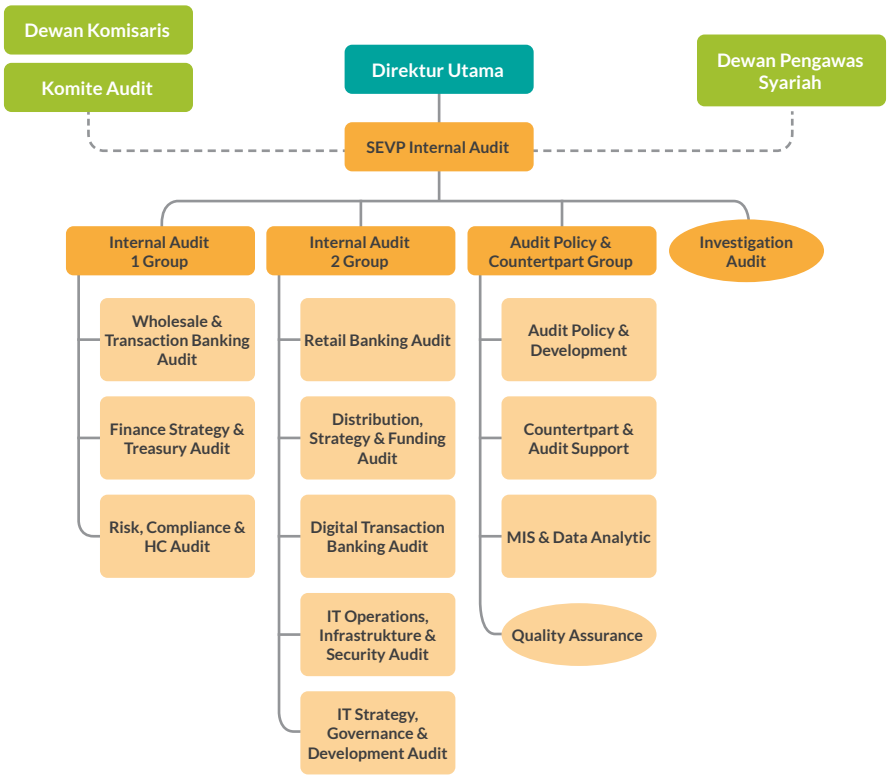

Komunikasi SKAI dengan SKAI Terintegrasi

1. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkomunikasi dengan SKAI Terintegrasi secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
2. SKAI PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.

Kedudukan Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Kedudukan SKAI dalam Struktur Organisasi Bank adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya, SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan salinannya disampaikan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
3. Memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Memiliki hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) Bank Induk.

Profil Kepala Internal Audit

Herry Rukmana
Senior Executive Vice President (SEVP) Internal Audit

Warga Negara	Indonesia
Domisili	Jakarta
Usia	55 tahun
Tempat, Tanggal Lahir	Lampung, 16 Februari 1967
Dasar Penunjukan	Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Nomor : 02/096-KEP/DIR tanggal 1 April 2022
Riwayat Pendidikan	• Magister Business Administration, Jakarta Institute of Management • Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Riwayat Pekerjaan	**PT PLN (Persero)** • Chief Audit Executive (1 Maret 2020-28 Februari 2022) **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk** • Senior Investigator Head PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2022) • Regional CEO X Sulawesi & Maluku PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016-2018) • Group Head Credit Operation PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012-2016) • Group Head Central Operations PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2009-2012)
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala SKAI

Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, SKAI secara organisasi berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama.

Piagam Audit

Bank memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas:

1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas PT Bank Syariah Indonesia Tbk
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen.

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) ditinjau ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun yang mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dan penetapan dari Direktur Utama dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit dan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*).
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajamen.
5. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.
6. Melakukan koordinasi kegiatan SKAI dengan kegiatan Eksternal Audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.
7. SKAI wajib melakukan komunikasi dengan regulator paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
8. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

Kewenangan SKAI

SKAI memiliki kewenangan yaitu:

1. Melakukan aktivitas audit intern terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi Bank serta pihak terafiliasi sesuai *governance* yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Mengakses seluruh data dan informasi Bank yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Internal Audit, yaitu data cetak dan elektronik, catatan, karyawan, dana, aset, lokasi atau area, maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan sumber daya Bank.
5. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi *fraud* dan atau pelanggaran *Code of Conduct* (CoC).
6. Menetapkan jadwal, objek audit, personal, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksaan aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Eksternal Auditor.
8. Menggunakan jasa pihak ekstern atau non-Audit Intern dalam pelaksanaan audit, baik lingkup Bank maupun di luar Bank, apabila dipandang perlu.
9. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas audit intern seusai Kode Etik Audit Intern.
10. Melakukan proses verifikasi, wawancara, konfirmasi, dan/atau teknik audit lainnya kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Internal Audit.
11. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (dikecualikan rapat pembahasan persetujuan pembiayaan) tanpa mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
12. Melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari Entitas Utama bagi Konglomerasi Keuangan.

Kode Etik Audit Intern

Kode etik Satuan Kerja Audit Internal dijabarkan sebagai berikut:

1. Integritas
   Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan, dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap penilaian yang dilakukannya.

   Aturan perilaku:
   a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan bertanggung jawab;
   b. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesinya;
   c. Tidak secara sadar/sengaja terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, atau kegiatan yang dapat merusak kredibilitas profesi audit internal atau reputasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan
   d. Mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak.

2. Objektivitas
   Auditor Internal menunjukkan objektivitas profesional pada tingkatan tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang ditinjau.

   Auditor Internal melakukan penilaian secara berimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Aturan Perilaku:
a. Tidak diperkenankan berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat menghalangi penilaian Auditor Internal secara proporsional. Termasuk dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan.
b. Dilarang menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
c. Harus mengungkapkan semua fakta penting yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam laporan atas kegiatan yang ditinjau.

3. Kerahasiaan
Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan secara hukum atau profesi.

Aturan Perilaku:
a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
b. Tidak diperkenankan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang sah dan layak

4. Kompetensi
Auditor Internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit internal.

Aturan Perilaku:
a. Hanya terlibat dalam pelaksanaan tugas yang membutuhkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman sesuai dengan yang dimilikinya.
b. Melaksanakan penugasan sesuai dengan Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal.
c. Senantiasa meningkatkan keahlian, serta efektivitas dan kualitas hasil kerjanya secara berkelanjutan.

Komposisi Pegawai

Hingga berakhirnya tahun buku 2022, SKAI memiliki 121 pegawai yang terdiri dari SEVP sebanyak 1 pegawai, APG sebanyak 32 pegawai, IA 1 sebanyak 26 pegawai, IA 2 sebanyak 48 pegawai dan Investigasi sebanyak 14 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah
SEVP Internal Audit	1
Group Head	3
Department Head	12
Auditor	97
Staff	8
Total	121

Sertifikasi Profesi Internal Audit

Pengembangan kompetensi Auditor dilakukan melalui Program Sertifikasi Audit baik untuk Level Nasional maupun Level Internasional. Rincian jumlah pegawai yang telah memperoleh sertifikasi Level Nasional dan Level Internasional sampai periode 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	3	Level 1
	3	Level 2
	3	Level 3
	3	Level 4
	1	Level 5
Department Head	12	Level 1
	12	Level 2
	12	Level 3
	1	Level 4
Team Leader	46	Level 1
	46	Level 2
	5	Level 3
Officer	51	Level 1
	34	Level 2
Staff	2	Level 1
	1	Level 2

Certified Fraud Examiner (CFE)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	CFE
Department Head	2	CFE

Ceritified Qualified Internal Auditor (QIA)

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	QIA Level Manajerial

Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Supervisor

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Department Head	12	Level Supervisor
Team Leader	45	Level Supervisor

Certified Bank Internal Auditor (CBIA) Level Auditor

Jabatan	Jumlah	Sertifikasi
Group Head	1	Level Auditor
Department Head	12	Level Auditor
Team Leader	46	Level Auditor
Officer	51	Level Auditor
Staf	1	Level Auditor

Certified Internal Audit Executive (CIAE)

Jabatan	Jumlah
Group Head	2

Pelatihan/Pengembangan Kompetensi

Rincian pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Satuan Kerja Audit Internal, baik pimpinan maupun anggota, diuraikan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelatihan
Technical Competency	
1	Pembiayaan 3 Pilar Segmen Griya dan SME
2	*Sharia Combined Assurance* Bagi Auditor
3	*Improving Corporate Risk Management And Governance In Banking Throught Digital Transformation*
4	*Risk Based Auditing: The Best Approach For Aligning*
5	Kerangka Konseptual & Praktik terbaik Audit Syariah
6	*Big Data Fundamental*
7	*MCSA: SQL Database Administration*
8	*Fraud & Investigation in Operations & Credit*
9	*Finance and Accounting for Non Finance and Accounting*
10	*Financial Auditing for Internal Auditor*
11	*Data Analitic* untuk *Auditor Internal*
12	*Root Cause Analysis*
13	*Sharia Combined Assurance* Bagi Auditor *Batch 2*
14	*Sharia Combined Assurance* Bagi Auditor *Batch 3*
15	*Sharing Session Contribution Margin*
16	Bank Mandiri *Audit Course (BMAC)*
17	*Quality Assurance of Internal Audit Function*
Softskill Competency	
1	Pelatihan *Awareness* ISO 37301:2011 Sistem Manajemen Kepatuhan
2	*How To Communicate Audit Result Effectively*
3	Webinar Peluang dan Tantangan Implementasi *Blockchain* di Industri Jasa Keuangan
4	*Sharing Session* Dokumen Rahasia Bank
5	Pelatihan *Job Description*
6	*Evaluating Organizational Ethics*
7	Seminar Nasional Internal Audit dan FKSPI
8	*Refreshment* SMR *Batch* 1
9	Pelatihan ISO 27001:2005 Information Security Management System
10	*Building a Sustainable Program*
11	*Refreshment* SMR *Batch* 4 & 5
12	*Cybersecurity Auditing in An Unsecure World*
13	*Digitalization of Risk Management*
14	*Refreshment SMR Batch 6*
15	IIA *National Conference*
16	*National Conference Anti Fraud*
17	Teknik Investigasi bersama Bank Mandiri
18	*Stress Management to Optimize Performance*

Rapat Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.03/2019, Unit Kerja Internal Audit memiliki kewenangan:

1. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
2. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Frekuensi Rapat periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2022

Rincian rapat SKAI, baik dengan pihak eksternal maupun internal diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Internal Audit dengan Audit Eksternal (Regulator dan KAP) sebanyak 18 kali dengan melibatkan peserta rapat dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.
2. Rapat Internal Audit dengan Direktur Utama sebanyak 10 kali.
3. Rapat Internal Audit dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit sebanyak 4 kali.
4. Rapat Internal Audit dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 4 kali.
5. Rapat Internal Audit dengan SEVP Internal Audit 21 kali.

Kinerja Internal Audit

1. Pelaksanaan Audit

Berdasarkan *Annual Audit Plan* dan Strategi Audit Tahun 2022 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, rencana audit tahun 2022 ditetapkan sebanyak 45 penugasan.

Realisasi pelaksanaan kegiatan audit tahun 2022 hingga 31 Desember 2022 sebanyak 65 penugasan atau 144% dari target, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Jenis Audit	Target AAP '22	Realisasi Non AAP	Realisasi AAP & Non AAP sd Des'22	Persentase
1	Audit Umum	45	20	65	144%
2	Audit Investigasi	-	-	56	100%
Total		45	20	121	-

2. Aktivitas *Audit Support*

Aktivitas *audit support* terdiri atas:

a. Pengawalan penyelesaian *burning issue IT Stabilization* antara lain yang terkait dengan stabilitas *core banking*, penyelesaian transaksi bermasalah di *e-channel* dan di cabang, pengamanan data, dan *IT security* (a.l pengamanan *user id*, *firewall*)
b. Audit telah mengakomodir insiatif strategis bank (*corporate plan*) yaitu *magnificent* 7 Plus
c. Pelaksanaan *independent review* untuk produk baru yaitu QRIS, CPM, EDC Acquiring Mini ATM on EDC, EDC Acquiring (*Manage Service*)
d. Penyediaan 237 opini atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB)
e. Penyediaan *data analytic* dan pemenuhan 7.968 kebutuhan data untuk pemeriksaan audit eksternal dan internal

Audit Findings

Audit findings internal maupun audit eksternal didominasi risiko operasional yaitu kelemahan *monitoring portfolio* pembiayaan & kualitas pembiayaan, dengan penyebab:

a. Proses Internal, dengan detail penyebab yaitu ketidakcukupan prosedur/ketentuan, dan Infrastruktur/sarana dan prasarana.
b. *People* dengan detail penyebab yaitu kelemahan dalam reviu/pengawasan atasan dan ketidakpatuhan prosedur/ketentuan.

Daftar Monitoring Tindak Lanjut

Bank telah menyelesaikan 2.272 atau 106,11% DMTL dari target yang telah ditetapkan. Progress tindak lanjut hasil pemeriksaan Unit Kerja Internal Audit dan Eksternal Audit periode tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

No.	Auditor	Total Temuan	DMTL	Selesai Desember 2022		Dalam Proses	
				Total	%	Total	%
1	Internal	2.565	1.469	1.407	110,18%	62	4,41%
2	Eksternal	2.164	999	865	100,10%	134	15,49%
Grand Total		**4.729**	**2.468**	**2.272**	**106,11%**	**196**	**7,94%**

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Bank mencakup pengendalian keuangan, operasional dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis
   Untuk mencapai sasaran pertumbuhan bisnis Bank secara berkesinambungan sejalan dengan visi dan misi Bank.
2. Tujuan Kepatuhan
   Untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator perbankan, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan Bank.
3. Tujuan Informasi
   Untuk menjamin ketersediaan informasi keuangan yang handal kepada manajemen secara benar, lengkap dan tepat waktu, relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Tujuan Operasional
   a. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank
   b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian
5. Tujuan Budaya Risiko
   a. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.
   b. Mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) yang efektif sehingga tercipta mekanisme yang melibatkan seluruh pegawai untuk mengidentifikasi dan mencegah kelemahan dan penyimpangan secara dini dengan efisien dan efektif.
   c. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan Kerangka yang Diakui Secara Internasional (*COSO-Internal Control Framework*)

Sistem Pengendalian Internal terdiri atas 8 (delapan) komponen yang saling berkaitan satu sama lain dan diterapkan secara efektif pada seluruh level organisasi Bank Syariah Indonesia dalam rangka mengawal tercapainya tujuan Bank. Sistem Pengendalian Internal ini merupakan pengembangan 5 (lima) elemen pokok Sistem Pengendalian Internal yang diatur oleh Regulator berdasarkan POJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum.

Di BSI, Sistem Pengendalian Intern diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Sistem Pengendalian Intern yang merujuk pada COSO Model tahun 2008 sebagaimana telah dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), yang terdiri atas :

1. Lingkungan pengendalian (*Internal Environment*)
2. Penetapan tujuan (*Objective Setting*)
3. Identifikasi kejadian/peristiwa (*Event Identification*)
4. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
5. Respon atas risiko (*Risk Response*)
6. Aktivitas pengendalian (*Control Activity*)
7. Informasi dan komunikasi (*Information & Communication*)
8. Pemantauan (*Monitoring*)

Hasil Reviu Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidental terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil *review* Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan strategi anti *fraud* yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama tahun 2022, diperoleh hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern di PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara umum telah memadai.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap kecukupan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, dengan cara:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik
2. Menetapkan pejabat yang ditugaskan memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian intern
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan-laporan rutin yang diperlukan
5. Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi dari unit kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan
6. Memberikan informasi/*feedback* yang tepat kepada pihak yang berkepentingan

Kelemahan dalam pengendalian intern baik yang diidentifikasi oleh satuan unit kerja operasional (*risk taking unit)*, Unit Kerja Internal Audit maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta memiliki kewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif dan memastikan bahwa hal tersebut telah melekat di setiap level organisasi.

Internal Audit bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan terkait dengan pelaksanaan operasional Bank dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Internal Audit melakukan audit secara periodik maupun insidentil terhadap seluruh aktivitas di Unit Kerja.

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern disampaikan kepada Direksi dan Komisaris untuk ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya secara efektif. Dalam rangka memperkuat Sistem Pengendalian Intern, khususnya untuk mengendalikan kejadian *fraud*, PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah menerapkan Strategi Anti Fraud yang komprehensif dan terintegrasi sebagai bagian dari kebijakan strategis.

Audit Terintegrasi

SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk.

Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank, dengan tetap memperhatikan perundang-undangan.

MANAJEMEN RISIKO

Pembahasan tentang manajemen risiko disampaikan pada bab tersendiri yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

AKUNTAN PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, audit terhadap Laporan keuangan Bank untuk tahun buku 2022 telah dilakukan oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan obyektif sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

Pihak Bank melakukan pertemuan secara rutin dengan auditor eksternal untuk membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan. Hal itu dilakukan agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil audit dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Auditor Eksternal memiliki fungsi untuk melakukan audit laporan keuangan Bank, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan Bank serta menguji pengendalian internal, termasuk pengujian kembali *item* yang sudah diuji oleh Internal Audit dan observasi dari prosedur yang dilakukan oleh Internal Audit.

Pertimbangan perlunya Audit Eksternal bagi sebuah Bank antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan tata kelola yang baik membutuhkan fungsi audit internal yang independen serta memiliki kewenangan, sumber daya kompeten, dan akses informasi yang memadai.
2. Pelaksanaan audit intern yang efektif memberikan jaminan independen kepada Bank terkait kualitas dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi Bank;
3. Praktik internal audit bank mencakup penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal;

Tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit Pihak Kedua dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (Standar Auditing Indonesia). Standar tersebut mengharuskan Pihak Kedua mematuhi ketentuan etika, merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pihak Pertama untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Pihak Pertama.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah, Pasal 3 menegaskan bahwa Bank harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan: c. RUPS Bank yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Sementara Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pasal 6: Laporan keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1): Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Auntan Publik (KAP) yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Penunjukan Akuntan Publik

1. Penunjukan KAP dan AP serta penetapan biaya/honorariumnya untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan dilakukan berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai rekomendasi Komite Audit.
2. KAP dan/atau AP yang telah melaksanakan pekerjaan audit dengan baik, dapat diusulkan kembali guna melakukan audit laporan keuangan tahunan tahun buku berikutnya setelah mempertimbangkan persyaratan dalam ketentuan yang berlaku. Syarat untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan evaluasi Dewan Komisaris sebagai berikut:
   a. Kantor Akuntan Publik mempunyai izin usaha dari Kementerian Keuangan yang masih berlaku.
   b. Kantor Akuntan Publik terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
   c. Akuntan Publik yang menjadi *Signing Partner* terdaftar aktif pada pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
   d. Berafiliasi sebagai *member* (bukan korespondensi) dari KAP yang berskala Internasional.
   e. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank umum yang *breast* lebih dari Rp 10 Triliun
   f. Berpengalaman melakukan audit laporan keuangan tahunan bank Syariah atau unit usaha Syariah.

Kantor Akuntan Publik

Tahun	KAP	Periode KAP	Nama Akuntan	Periode Akuntan	Biaya Jasa Audit (Rp)
2022	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasan	5.400.000.000 (termasuk: PPN & OPE)
2021	Kantor Akuntan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	1 tahun penugasan	M. Jusuf Wibisana	1 tahun penugasan	5.100.000.000 (termasuk: PPN & OPE)

Jasa Lain yang Diberikan

Tidak ada jasa lain yang diberikan, kecuali laporan keuangan dan penerapan prosedur yang disepakati mengenai laporan hasil evaluasi kinerja dan audit PSA 62

Opini Audit Tahun Buku

Hasil audit memberikan opini "Wajar", dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Bank Syariah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Internal Audit untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan yang membahas beberapa permasalahan penting yang signifikan.

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORSIME (APU & PPT)

Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan transaksi pencucian uang sebagai aktivitas yang berkenaan dengan menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pindah buku, transfer, pembayaran berupa sejumlah uang. Termasuk di dalamnya adalah hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Sedangkan pendanaan terorisme seperti ditegaskan dalam Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan bagi kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Kebijakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") terkait dengan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), antara lain mengacu pada regulasi tersebut. Hingga saat ini, kebijakan terkait dengan APU & PPT telah berjalan di Bank dan akan terus dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan, khususnya yang terjadi di industri keuangan dan perbankan.

Dasar Hukum Pelaksanaan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI", "Bank") senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian terkait dengan upaya mitigasi terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Berikut Ketentuan yang menjadi dasar acuan dalam implementasi APU PPT.

A. Ketentuan Eksternal:
   1. Undang-undang RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
   2. Undang-undang RI No 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
   3. Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
   4. Undang-undang RI No. 3 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal Transfer Dana, berikut segala perubahannya
   5. POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme
   6. POJK No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahaan Pendanaan Terorisme
   7. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan

8. SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, berikut segala perubahannya.
9. SEOJK No 29/SEOJK.01/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 31/SEOJK.01/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
10. Peraturan Kepala PPATK No. PER-09/1.02.2/PPATK/09/12, perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
11. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09/2012, perihal Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan, berikut segala perubahannya.
12. Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
13. Peraturan Kepala PPATK No. PER-12/1.02/PPATK/06/13, perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
14. Peraturan Kepala PPATK No. PER-21/1.02/PPATK/11/2013, perihal Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan, berikut segala perubahannya.
15. Peraturan Kepala PPATK No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014, perihal Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
16. Peraturan Kepala PPATK No. Per-02/1.02/PPATK/02/15, perihal Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, berikut segala perubahannya.
17. Peraturan Kepala PPATK No.18 Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan
18. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person*
19. Peraturan Kepala PPATK No. 1 Tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GoAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
20. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme
21. Surat Edaran PPATK No.SE-01/1.02/PPATK/02/14, perihal Contoh Penggunaan Pendekatan Pelaku dan Pendekatan Rekening Dalam Pelaksanaan Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai, berikut segala perubahannya.
22. Surat Edaran PPATK No.SE-02/1.02/PPATK/03/14, perihal Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu, berikut segala perubahannya.
23. Surat Edaran PPATK No 1 tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Biro/Agen Perjalanan Ibadah Umrah.
24. Surat Edaran PPATK No 08 tahun 2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Narkotika.

B. Ketentuan Internal:
   1. Kebijakan Hukum, Kepatuhan dan APU PPT PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021.
   2. Standar Prosedur Pengendalian Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Juni 2022.
   3. Petunjuk Teknis Operasional *Individual Risk Assessment*, Juni 2022.
   4. Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi BISA (BSI Integrated System of AML CFT), tahun 2021.

Pengelola APU PPT

Bank telah memiliki kebijakan dalam menerapkan program-program APU PPT yang disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaannya diawasi secara aktif oleh Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan penerapan APU PPT PT Bank Syariah Indonesia Tbk dikelola oleh Unit kerja AML/APU PPT Group (AMG).

Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola APU PPT

Tugas, tanggung jawab, kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi/SEVP terkait dengan pengawasan dan penerapan program APU dan PPT antara lain:

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
Dewan Komisaris	Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup: a. Menyetujui kebijakan APU dan PPT. b. Mengawasi pelaksanaan atas tanggung jawab Direksi/SEVP melalui Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern Bank terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator. c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. d. Memberikan pengarahan/saran-saran kepada Direksi/SEVP mengenai penerapan program APU dan PPT.
Direksi/SEVP	Pengawasan aktif Direksi/SEVP paling kurang mencakup: a. Memastikan Bank memiliki Kebijakan dan Prosedur program APU dan PPT; b. Mengusulkan kebijakan tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris; c. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. d. Membentuk Unit Kerja khusus yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT. e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan Unit Kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT. f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank, serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.
Direktur Kepatuhan	a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan regulator tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan berlaku. b. Memastikan cakupan Pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai. c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator, antara lain komitmen dalam *Action Plan*, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil Pengawasan Regulator yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT. d. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT. e. Memberikan persetujuan terhadap pelaporan kepada regulator terkait: 1) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 2) Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data kepada Regulator 3) Penundaan dan penghentian sementara transaksi. 4) Penutupan hubungan usaha dan penolakan transaksi. 5) Transaksi Keuangan Tunai yang dikecualikan. 6) Penutupan hubungan usaha dengan pengembalian dana sesuai melalui instansi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 7) Penetapan petugas pendaftar, pelapor administrator, dan penghubung dalam rangka pelaporan kepada PPATK.

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
Unit Kerja Khusus APU dan PPT	1. Pembentukan Unit Kerja Khusus APU PPT/(AML/APU PPT Group) Dalam rangka melaksanakan Program APU dan PPT, Bank wajib didukung oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang menangani dan mengelola Program APU dan PPT Bank. UKK Bank disebut dengan Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dalam hal ini berada di AML/APU PPT Group (AMG). Pembentukan tersebut memperhatikan sebagai berikut: a. Unit kerja AML/APU PPT Group (AMG) wajib *independent*. b. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. c. Pejabat dan staf di unit kerja AML/APU PPT Group dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 2. Kepala unit kerja AML/APU PPT Grup (AMG) wajib memenuhi kriteria paling sedikit: a. Memenuhi persyaratan independensi; b. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Tidak melaksanakan tugas lain di luar Fungsi APU PPT. d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan APU PPT. e. Memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas. f. Mewujudkan terlaksananya APU PPT pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. g. Mengelola Risiko APU PPT yang dihadapi oleh Bank. h. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan i. Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan PPATK dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF). 3. Tugas dan Fungsi Unit Kerja AML/APU PPT: a. Unit Kerja APU PPT dipimpin oleh Kepala unit kerja APU PPT yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan terkait APU PPT. b. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Unit Kerja APU PPT: 1) Membuat langkah untuk mendukung terciptanya penguatan pemahaman penerapan APU PPT pada seluruh kegiatan usaha dan jaringan BSI. 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap potensi risiko APU PPT dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan peraturan lainnya. 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BSI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*). Penilaian risiko tersebut wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak Pidana Pendanaan Terorisme secara Nasional (*National Risk Asessment*) dan secara sectoral (*Sectoral Risk Asessment).*

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab

5) Menyusun, melakukan pengkinian dan mengusulkan pedoman penerapan Program APU PPT kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
6) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).
8) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur agar telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, volume transaksi Bank, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
9) Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah.
10) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
11) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
12) Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Keluar Negeri.
13) Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU PPT bagi pejabat dan/atau pegawai bank.
14) Memastikan penerapan APU PPT diantaranya terkait dengan:
    a. Adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi dan profil yang dilakukan oleh Nasabah.
    b. Adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi.
    c. Adanya identifikasi area dan usaha yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai.
    d. Formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU PPT.
    e. Telah dilaksanakan pengkinian data nasabah oleh unit kerja terkait.
    f. Seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT terlaksana dengan baik.
15) Menjaga kerahasiaan informasi dengan memperhatikan ketentuan *Anti Tipping Off*.
16) Melakukan pengawasan maupun tugas lain yang terkait dengan penerapan pemenuhan APU PPT.
17) Menerima laporan indikasi TKM dari unit kerja terkait dan melakukan analisis atas laporan tersebut.

c. AML Officer (AMLO) Region
Tugas dan Tanggung Jawab Petugas AML Officer (AMLO) Region:
1) Memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah.
2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan ke Unit Kerja AMG Kantor Pusat.
3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
4) Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK.
5) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT terhadap satuan kerja terkait.
6) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur).
7) Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU PPT di Region.
8) Memberikan masukan terkait penerapan APU PPT kepada pegawai di Outlet/Unit Kerja AMG di Kantor Pusat.

Unit Kerja AMG Kantor Pusat dapat mempertimbangkan jumlah pegawai AML Officer di masing-masing Region berdasarkan *risk-based*. Hal-hal yang mempengaruhi tingkat risiko secara regional tersebut antara lain:
1) Penggunaan produk dan jasa yang ditawarkan memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan/regulator terkait lainnya dan/atau Lembaga Pengatur dan Pengawas.
2) Jumlah nasabah berisiko tinggi yang dimiliki.
3) Volume usaha outlet.
4) Aktivitas transaksi dengan luar negeri.
5) Lokasi Outlet berada pada wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai *cash society*.

Pelaksana	Tugas dan Tanggung Jawab
	d. Petugas APU dan PPT Kustodi Tugas dan tanggung jawab Petugas APU PPT Kustodi. 1) Memantau transaksi nasabah kustodi 2) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, serta melaporkan transaksi mencurigakan 3) Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah 4) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU PPT terhadap satuan kerja terkait. 5) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT terlaksana dengan baik (antara lain memastikan kegiatan pembukaan rekening telah dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur) Melakukan sosialisasi program dan penerapan APU PPT. e. AML/APU PPT Group, AML Officer dan AML Kustodi mempunyai wewenang paling kurang meliputi: 1) Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK. 2) Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait. 3) Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK. 4) Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT (untuk level Group Head). f. Struktur Organisasi pada unit kerja AML/APU PPT Grup terdiri dari: 1) Group Head AML/APU PPT sebanyak 1 (satu) pegawai. 2) Department AML/APU PPT terdiri dari: a. Strategic Alliance Department terdiri dari: i. Manager & Officer di KP sebanyak 8 (delapan) pegawai. ii. AML Officer (AMLO) Region sebanyak 21 (dua puluh satu) pegawai. b. Policy & Advisory Department i. Manager & Officer di KP sebanyak 11 (sebelas) pegawai. c. Analyst & Monitoring Department i. Team Leader & Officer sebanyak 10 (sepuluh) pegawai.

Implementasi APU PPT Tahun 2022

Sesuai dengan ketentuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017, POJK No. 23/POJK.01/2019, SEOJK No. 32/SEOJK.03/2013, SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 dan SEOJK No. 29/SEOJK.01/2019 serta peraturan PPATK maka telah diterapkan program APU dan PPT melalui:

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Peran aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris sangat diperlukan untuk menciptakan penerapan Program APU dan PPT yang efektif. Manajemen selalu berkomitmen untuk menerapkan program APU PPT dengan bentuk komitmen tersebut terdapat pada pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris di antaranya:

a. Pemenuhan laporan bulanan APU PPT kepada Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC).
b. Terdapat kewenangan Direktur *Compliance and Human Capital* (CHC) dalam menyetujui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang dilakukan secara independen.
c. Pembahasan materi APU PPT dalam komite dibawah Direksi.
d. Pemenuhan Laporan secara Triwulan kepada Dewan Komisaris.
e. *Tone From The Top* dipahami dan diintegrasikan di seluruh lini bisnis serta konsistensi dalam penerapan APU PPT.
f. *Engagement Leadership* terkait urgensi penerapan APU PPT dalam rangka peran Direksi dalam menunjang efektivitas penerapan APU PPT.
g. Efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dalam menjaga Kepatuhan Bank dalam menuju Era pengaturan *principle based*.

Sebagai komitmen lain dari Direksi dan Komisaris terkait APU PPT dilakukan hal-hal lain sebagai berikut:

a. BSI ikut berperan aktif sebagai bank *sampling* pada agenda *Mutual Evaluation Review* (MER) dalam rangka Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) pada bulan Juli 2022.
b. BSI telah mendapatkan sertifikasi ISO 37301: 2021 terkait Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) dengan Ruang lingkup Implementasi APU PPT pada bulan Desember 2022

Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan serta Prosedur Penerapan Program APU PPT yang telah disusun selalu dilakukan *review/updating* secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan terkait APU PPT di antaranya :

a. Kebijakan Kepatuhan, Hukum dan APU PPT tahun 2021
b. Standard Prosedur Pengendalian (SPP) APU PPT edisi bulan Juni 2022, yang berisi:
   1) Organisasi dan Kewenangan
   2) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bank;
   3) Penatausahaan,Proses CDD dan EDD;
   4) Pengkinian dan Pemantauan;
   5) Pemutusan, Penundaan, dan Penolakan Hubungan Usaha/Transaksi
   6) Tahapan Pencucian Uang;
   7) *Cross Border Corresponden Banking*;
   8) Transfer Dana;
   9) Sistem Informasi Manajemen
   10) Sumber Daya Manusia dan *Know Your Employee* (KYE)
   11) Pelaporan
c. Petunjuk Teknis Operasional *Individual Risk Assessment* (IRA) APU PPT edisi Juni 2022, terdiri dari:
   1) Metodologi Penilaian
   2) Hasil *Individual Risk Assessment* (IRA) TPPU
   3) Hasil *Individual Risk Assessment* (IRA) TPPT
d. Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi BISA (BSI Integrated of AML CFT) edisi Desember 2021

Selain hal tersebut diatas juga pemberian opini APU PPT untuk aktivitas dan produk baru sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pengkinian Kebijakan internal APU PPT	3
2	Opini terkait APU PPT: a. Opini terhadap Produk & Aktivitas baru b. Opini terhadap Produk dan Aktivitas Eksisting	 27 31
3	Reviu terhadap ketentuan eksisting	8

Pengendalian Intern

Dalam rangka memastikan implementasi Program APU PPT telah berjalan sebagaimana mestinya telah dilakukan proses pengendalian internal yang dilakukan oleh internal AMG, Audit Internal, maupun Pengawas OJK, dengan aktivitas sebagai berikut:

a. Pengendalian internal yang dilakukan oleh AMG melalui uji petik dengan cara mendatangi outlet (*on the spot*) maupun dengan cara *online* (*ondesk*) oleh AML Officer (AMLO) untuk melihat dokumen transaksi maupun dokumen pembukaan rekening terkait dengan pemenuhan implementasi program APU PPT sesuai dengan ketentuan eksternal baik dari regulasi OJK maupun Undang-Undang serta ketentuan internal. Setelah proses Uji Petik, AMLO akan melakukan sosialisasi terkait implementasi program AML CFT di Outlet/Cabang.

Uji Petik yang dilakukan oleh AML Officer (AMLO) terhadap seluruh outlet di 10 (sepuluh) Region dengan rincian sebagai berikut:

No.	Region	Jumlah Cabang	Pelaksanaan	
			Onsite	Online
1	Aceh	162	84	78
2	Medan	100	66	34
3	Palembang	115	92	23
4	Jakarta 1	145	145	0
5	Jakarta 2	109	94	15
6	Bandung	91	77	14
7	Semarang	114	62	52
8	Surabaya	178	66	112
9	Banjarmasin	75	1	74
10	Makassar	90	60	30
Total		1.179 (100%)	747 (63%)	432 (37%)

Selain Uji Petik oleh AMLO juga dilakukan validasi atas hasil Uji Petik AMLO oleh AMG KP yang dilakukan secara *onsite* terhadap *sampling* beberapa Region, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Region	Jumlah Area	Jumlah Cabang
1	Makassar	2	11
2	Aceh	3	17
3	Semarang	5	42
4	Medan	5	47

Proses validasi uji petik oleh AMG KP diakhiri dengan agenda sosialisasi dan *sharing* diskusi terhadap pegawai di region dengan cara *hybrid* yaitu offline dan online.

b. Pengendalian internal juga dilakukan oleh Internal Audit sebagai *third line of defense* untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program APU PPT dengan jumlah temuan hasil audit selama tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) *audit findings* dan 100 % sudah diselesaikan, beberapa *concern* audit diantaranya terkait dengan Perbaikan pelaporan, aspek SDM dan kompetensi SDM serta pengembangan aplikasi BISA.
c. Pengendalian internal dilakukan oleh OJK Pengawas Perbankan Syariah maupun OJK Pasar Modal dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerapan program APU PPT di BSI dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Pemeriksaan	OJK Pengawas		OJK Pasar Modal	
	Jumlah Temuan	Status	Jumlah Temuan	Status
2021	18	Done 18	-	-
2022 :				
a. KP AMG	9	Done 1	10	Done 10
b. Region/Cabang	19	Done 18	-	-
c. Dubai	1	Done 1	-	-

Beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait dengan Pengkinian Kebijakan & Prosedur APU PPT, Pemenuhan Karyawan AML Officer, Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan Karyawan terkait APU PPT, Pengembangan Aplikasi APU PPT, Efektivitas Pelaporan LTKM, Penyesuaian Profil Risiko Nasabah, dan Pengkinian Data Nasabah.

Sistem Informasi Manajemen

Bahwa saat ini peningkatan risiko yang dihadapi oleh Bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program APU PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (RBA). Hal ini juga sejalan dengan semakin berkembangnya kompleksitas produk, dan jasa serta semakin meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi sehingga bank wajib memiliki sistem informasi untuk dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan Nasabah.

Aplikasi **BSI Integrated System of AML CFT** (BISA) adalah aplikasi perangkat lunak berbasis *web* yang berfungsi untuk melakukan *screening* terhadap calon nasabah, penetapan/pengukuran tingkat risiko calon nasabah/nasabah, mendeteksi transaksi tidak wajar, menganalisis dan menghasilkan laporan transaksi yang mencurigakan. Aplikasi ini memiliki modul terintegrasi yang diperlukan untuk penerapan APU PPT yang dioperasikan oleh Petugas di Kantor Cabang dan Kantor Pusat.

Dalam hal implementasi aplikasi BISA di Kantor Cabang, Petugas wajib memanfaatkan aplikasi dimaksud untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pekerjaan guna memitigasi risiko terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Berikut ini merupakan *role* kewenangan Petugas cabang dalam mengakses aplikasi BISA sebagai alat bantu melaksanakan penerapan program APU PPT, antara lain:

a. Menu *Onboarding Customer* Individu dan Non Individu
b. Menu Pemantauan *Alert*
c. Menu *Link Analysis*
d. Menu Identifikasi Dokumen Kadaluarsa
e. Menu Penolakan/Pemutusan Hubungan Usaha
f. Menu *Safe Deposit Box*
g. Menu Detil Nasabah

Tahun 2022 telah dilakukan insisasi pengembangan *system* bekerjasama dengan group-group terkait untuk implementasi APU PPT di BSI, antara lain:

a. *Enhancement* Data Pelaporan GoAML PPATK atas Penerapan Skema Super CIF.
b. *Update* Data PEP pada aplikasi BISA.
c. Pengembangan Integrasi Aplikasi Layanan Syariah Bank (LSB) Bank Mandiri maupun Kantor Layanan Syariah (KLS) Bank BRI dengan Aplikasi BISA.
d. Penambahan menu *Risk Rating* & *Screening* APU PPT pada aplikasi Medalion saat proses pembukaan rekening terhadap calon nasabah Bank Kustodian.
e. Pengembangan fungsi *Risk Rating* & *Screening* APU PPT aplikasi BSI Smart Agent Laku Pandai pada proses pembukaan rekening *Basic Saving Account* (BSA).
f. Penambahan fungsi untuk menentukan *Risk Rating*, *Screening*, dan *Monitoring* APU PPT pada aplikasi T24 saat proses pembukaan rekening terhadap calon nasabah/nasabah/WIC.
g. Penambahan fungsi untuk menentukan *Risk Rating* dan *Screening* APU PPT pada aplikasi mobile banking saat proses pembukaan rekening terhadap calon nasabah.
h. Inisiasi kajian pengembangan aplikasi *monitoring* implementasi APU PPT BSI.

SDM dan Pelatihan

Upaya yang dilakukan AML/APU PPT Group (AMG) adalah meletakan fondasi pemahaman APU PPT untuk seluruh pegawai PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara lain:

a. Pelatihan Kelas Terstruktur
   Pelaksanaan kelas terstruktur bekerjasama dengan BSI University (BSU) untuk teknis pelaksanaan pelatihan mulai dari pemilihan vendor, matrikulasi pelatihan, peserta pelatihan sampai dengan pembuatan anggaran serta persetujuan dari Direktur Kepatuhan.
   Kelas terstruktur dibagi menjadi 3 (tiga) modul, dengan waktu pelaksanaan *training* mulai bulan April 2022 s/d November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kelas	Peserta	Jumlah Batch	Jumlah Peserta
1	Basic	• Customer Service • Teller • Petugas Kustodi	50	2.040
2	Intermediate	• CS Supervisor • Cash Outlet Supervisor • Pawning Outlet Supervisor • Branch Operation & Service Manager • Petugas Kustodi	14	608
3	Advance	• Branch Manager • Petugas Kustodi	11	474
Total			**75**	3.122

b. Sosialisasi Internal

Sosialisasi terkait dengan implementasi penerapan APU PPT dan *Individual Risk Assessment* (IRA) juga dilakukan ke grup-grup yang ada di Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi di tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Nama Sosialisasi	Jumlah Group	Jumlah Peserta
1	Individual Risk Assessment (IRA) tahun 2022	17	310
2	Implementasi APU PPT	17	310

Penguatan penerapan program APU PPT melalui *Awareness*

Dalam rangka penguatan penerapan program APU PPT juga dilakukan *awareness* dalam bentuk video dan komik yang dapat diakses melalui aplikasi internal BSI serta korespondensi dengan tema sebagai berikut:

No.	Bentuk Program	Uraian
	Video APU PPT	1. Penginian Data 2. *Business E-mail Compromise* (BEC)
	Video Tutorial	1. *Customer Risk Rating* 2. *On Boarding Customer* 3. *Enhanced Due Diligence* (EDD) 4. Pembukaan Rekening Massal 5. *Alert* 6. Pengkinian Data Nasabah 7. Layanan *Safe Deposit Box* (SDB) 8. *Link Analysis*
	Komik APU PPT	1. Pengkinian Data 2. Pemblokiran Transaksi
	Korespondensi	1. Penyampaian *Awareness* Kewajiban Tindak Lanjut *Alert* pada Aplikasi BISA. 2. *Awareness* Kedisplinan dalam Pengisian KYC dan AML *Checklist* Analisa Pembiayaan dan KYC & AML *Checklist Monitoring* Pembiayaan. 3. *Awareness* Pembukaan Rekening Dana Kampanye Partai Politik dalam rangka Kegiatan Pemilihan Umum. 4. *Awareness* Penyampaian Publikasi Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yuridiksi lain yang dipantau oleh FATF. 5. *Awareness* Kewajiban Pemblokiran Serta Merta terhadap DTTOT. 6. *Awareness* Kewajiban Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan NPO. 7. *Awareness* Penyampaian Publikasi Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yuridiksi lain yang dipantau oleh FATF. 8. *Awareness* terkait Pembukaan Hubungan Usaha dengan Nasabah dan Kewajiban Single CIF (*Single Customer Identification File*) di Outlet BSI. 9. Penyampaian *Awareness* AML CFT Himbauan untuk Mengakses Video Pengkinian Data dan Komik Pengkinian Data dalam rangka pada Learning Management System (LMS). 10. *Awareness* Kewajiban Penerapan EDD (*Enhanced Due Diligence*) Untuk Nasabah PEP dan/atau *High Risk*.

No.	Bentuk Program	Uraian
		11. *Awareness* Penyampaian Aset Kripto. 12. *Awareness* Kewajiban Tindaklanjut Alert pada Aplikasi BISA (BSI *Integrated System* of AML CFT). 13. *Awareness* Penyampaian Publikasi Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yuridiksi Lain yang Dipantau oleh *Financial Action Task Force* (FATF). 14. *Awareness* Penolakan Hubungan Usaha, Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha. 15. *Awareness* Penerapan *Know Your Customer* dan *Know Your Employee* pada Seluruh Unit Kerja. 16. *Awareness* Penyampaian Kewajiban dan Progress Pengkinian Data di Seluruh Region. 17. *Awareness* Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang. 18. Awareness terkait Penerapan APU PPT terkait TPA Narkotika. 19. *Awareness* Video *Business E-mail Compromise* (BEC) dan Komik Pemblokiran Transaksi. 20. *Awareness* Kewajiban Pemantauan *Alert* oleh Cabang. 21. *Awareness* Penguatan Program APU PPT dalam Identifikasi Pemilik Manfaat/*Beneficial Owner* (BO). 22. *Awareness* Penyampaian Publikasi Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yuridikasi Lain yang Dipantau oleh FATF Periode Oktober 2022. 23. *Awareness* Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 24. Penyampaian Imbauan untuk Mengakses Video Sosialisasi SRA TPPU TPPT dan PPSPM Di Sektor Jasa Keuangan Pada *Learning Management System* (LMS).

Awareness

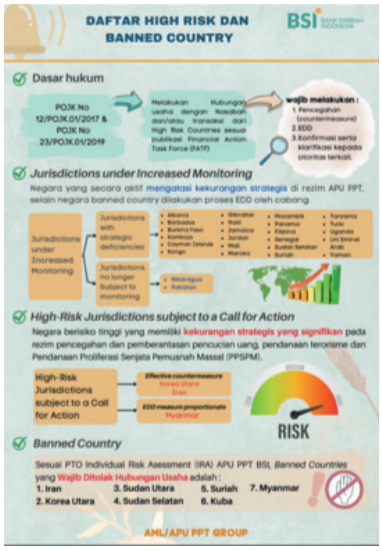

Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) FATF

Dalam rangka Indonesia menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF) dilakukan penilaian terkait terhadap penerapan APU PPT di sektor jasa keuangan. Dari sisi perbankan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk menjadi salah satu bank *sampling* untuk dilakukan penilaian oleh FATF.

Pelaksanaan *Interview Mutual Evaluation Review* (MER) FATF BSI pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 16.00 sd 17.00 WIB di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

Berbagai persiapan yang dilakukan BSI untuk pelaksanaan MER FATF, antara lain:

a. Pengisian jawaban FATF *Recommendations Immediate Outcome* (IO4) untuk *mock up interview* no 4.1 s/d 4.6 beserta dengan kelengkapan *evidence*.
b. *Mockup* internal AMG bersama dengan Direktur Kepatuhan secara rutin
c. *Mockup* MER simulasi *onsite visit* MER bersama dengan Bank Mandiri.
d. *Mockup* dan *Forum Group Discussion* (FGD) Tindak Pidana Asal Bersama dengan Bank Mandiri.
e. Konsinyering Bersama Group Penanganan APU PPT (GPUT) OJK.
f. *Refreshment* Persiapan *On-site Visit Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia Oleh FATF bersama OJK GPUT
g. *Mock Up Interview* Persiapan MER FATF Bersama OJK GPUT dan PPATK
h. *Forum Group Discussion* (FGD) MER oleh OJK Pengawas.
i. *Mockup* bersama Direktur Kepatuhan dan Tim AML Bank Mandiri dengan Direktur Kepatuhan dan Tim AML BSI dan Tim AML Mandiri sekuritas.
j. *Forum Grup Discussion* bersama PPATK maupun OJK terkait dengan persiapan pelaksanaan *assessment* interview MER oleh PJK.

Sertifikasi ISO 37301 : 2021 – Sistem Manajemen Kepatuhan

- Sistem Manajemen Kepatuhan merupakan serangkaian proses untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan semua undang-undang dan kode etik yang berlaku. Berdasarkan arahan Direktur Kepatuhan, BSI melakukan Sertifikasi Standar ISO 37301: 2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dengan Ruang lingkup Penerapan APU PPT di BSI.
- Adapun tahapan pelaksanaan ISO 37301: 2021 sebagai berikut:
  a. Persetujuan Direktur Compliance & Human Capital terkait dengan usulan Pelaksanaan ISO 37301.
  b. Penunjukan Tim ISO 37301.
  c. Pelaksanaan Pelatihan *Awareness* ISO 37301.
  d. *Training* Dokumentasi ISO oleh Chesna.
  e. Pengumpulan Dokumen ISO.
  f. Verifikasi Kelengkapan Dokumen ISO.
  g. Diskusi Kertas Kerja.
  h. Reviu dan Evaluasi Dokumentasi.
  i. Pemaparan Hasil Reviu dan Evaluasi dari Pengumpulan Dokumen.
  j. *Training* Internal Audit ISO 37301.
  k. Pelaksanaan Audit Internal ISO 37301.
  l. Exit Audit Internal
  m. Tinjauan Manajemen Puncak ke Dewan Pengarah.
  n. Eksternal Audit tahap 1 dan tahap 2
- Pelaksanaan Sertifikasi ISO 37301: 2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk terkait ruang lingkup Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
- Setelah melalui proses eksternal audit tahap 1 pada tanggal 09 Desember 2022 dan tahap 2 pada tanggal 12 – 13 Desember 2022 oleh Lembaga Sertifikasi (PT Chesna) yang dilakukan secara online, PT Bank Syariah Indonesia Tbk direkomendasikan diberikan Sertifikat Manajemen Kepatuhan ISO 37301:2021

Realisasi Pelaporan APU PPT dan Pemenuhan Permintaan Data
Realisasi laporan APU PPT kepada PPATK dan Pemenuhan Permintaan Data/ Informasi dari Regulator/Aparat Penegak Hukum Tahun 2022:

a. Realisasi Pelaporan ke PPATK selama tahun 2022, yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	Jumlah Laporan
1	LTKT/CTR	62.392
2	LTKM/STR	784
3	LTKL/IFTI Incoming	22.570
4	LTKL/IFTI Outgoing	18.479
5	LTKL/IFTI Non SWIFT Ougtoing	1.872.195
6	Sipesat	2.069.271
7	Penundaan Transaksi	28
8	Penghentian Sementara Transaksi	350

b. Pemenuhan Permintaan Data/Informasi dari Regulator/Aparat Penegak Hukum selama tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Jenis Laporan	Jumlah Surat Permintaan
1	DJP	15.050
2	PPATK	501
3	KPK	105
	• Pedal = 80	
	• Surat = 25	
4	POLRI	68
5	Bea Cukai	50
6	BNN	20
7	Kejagung	8
8	Tim Kurator	5
9	Kementrian	1
10	BPK	1
11	MMI	1
Total		15.810

c. Khusus untuk Pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) periode Januari 2022 s/d Desember 2022 sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat) LTKM/STR yang didominasi 5 (lima) indikasi tindak pidana asal (TPA) yaitu TPA Penipuan sebesar 34%, TPA Narkotika 18 %, TPA Korupsi 14%, TPA Perjudian 12 % dan TPA Penggelapan sebesar 8%.

FUNGSI KEPATUHAN

Bank Syariah Indonesia berkomitmen bahwa kepatuhan terhadap peraturan baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundangan-undangan lain, wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai dalam organisasi Bank. Karena itu, setiap kegagalan pelaksanaan kepatuhan dapat menyebabkan risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko lainnya. Hal itu mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.

Upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan adalah bersifat ex-ante yang sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Untuk menerapkan fungsi kepatuhan maka perseroan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.

Fungsi kepatuhan terdiri dari serangkaian strategi yang digunakan Bank dalam memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penerapan fungsi Kepatuhan Bank Syariah Indonesia berlandaskan pada POJK No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Struktur Organisasi

BSI telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan POJK No.46 POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Satuan Kerja Kepatuhan dikepalai oleh Compliance Group Head yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan. Hingga 31 Desember 2021, jumlah personil Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebanyak 40 orang.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

BSI telah menunjuk Direktur Kepatuhan yang membawahi jajaran kepatuhan sesuai dengan POJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Saat ini Direktur Kepatuhan dijabat oleh Tribuana Tunggadewi. Direktur Kepatuhan telah lulus *Fit and Proper Test* dari OJK, hal ini membuktikan bahwa independensi telah terpenuhi. Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi serta kriteria lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Satuan Kerja Kepatuhan

Tidak terdapat hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dengan Anggota Dewan Komisaris, dengan Dewan Pengawas Syariah dan antar anggota Direksi serta dengan Pemegang Saham Pengendali. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mampu bertindak secara independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
5. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan,ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

Pelaksanaan Tugas Tahun Buku

Sepanjang tahun buku 2022, Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas dengan uraian sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Tindak Lanjut Regulasi Baru
   a. Melakukan sosialisasi regulasi dengan menggunakan media seperti memo, e-mail atau aplikasi GRC Compas. Jika terdapat regulasi eksternal baru, maka regulasi tersebut akan diumumkan dan disosialisasikan melalui *compliance news* ke seluruh karyawan BSI.

b. Melakukan analisis dan menyusun *resume* atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (dhi. BI, OJK, OJK-Pasar Modal, LPS atau Peraturan eksternal lainnya yang terkait dengan Perbankan) dan disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head terkait.
c. Melakukan sosialisasi regulasi secara online/ virtual terhadap unit kerja terkait jika terdapat regulasi/ketentuan yang baru.
d. Menyampaikan opini kepatuhan pada setiap permintaan advis/opini kepatuhan *Working Group Policy & Procedure* (WPP).

2. Produk dan Aktivitas Baru Bank
Melaksanakan pendampingan/klinik atas Produk dan Aktivitas Baru (PAB) Bank dengan Unit Kerja terkait yang termasuk dalam kriteria PAB ke dalam RBB.
3. *Compliance Testing*
Melakukan analisa, evaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian, serta pengujian kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan Direksi yang terkait dengan pembiayaan maupun non pembiayaan, serta memberikan reviu, opini dan tanggapan kepatuhan terhadap kebijakan yang berjalan dan akad yang akan dipergunakan guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.
4. *Compliance Monitoring*
a. Melaksanakan pengkinian sistem *reminder* kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga, serta penguatan dan *enhancement* Sistem Informasi Kepatuhan (SIK);
b. Unit Kerja Kepatuhan melakukan *monitoring* terhadap *prudential banking* ratio diantaranya rasio NPF, BMPD, GWM, PDN, dan KPMM;
c. Unit Kerja Kepatuhan memastikan pemenuhan seluruh komitmen BSI atas hasil temuan OJK, BPK, Auditor Eksternal dan pihak regulator lainnya.
5. *Good Corporate Governance* (GCG)
a. Melakukan pemenuhan terhadap ketentuan/ kebijakan dan prosedur yang wajib dimiliki Bank sesuai ketentuan peraturan yang terdapat pada Peraturan OJK, Peraturan BI dan Surat Edaran BI tentang Penerapan GCG di Bank Umum Syariah (BUS) & Unit Usaha Syariah (UUS).
b. Pemenuhan *Governance Structure* dan GCG *policy* sesuai dengan peraturan yang terdapat pada OJK melalui PBI No. 11/33/PBI/2009 mengenai Penerapan GCG di BUS dan UUS.
c. GCG *Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG sesuai dengan peraturan yang terdapat pada OJK melalui PBI No. 11/33/PBI/2009, POJK No. 8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
d. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* di BSI
6. Syariah *Compliance*
a. Memastikan seluruh produk dan jasa Bank, Pedoman Operasional produk dan jasa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) dan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
b. Melakukan asistensi terhadap penyusunan produk dan aktivitas baru.
c. Melakukan asistensi terhadap pembiayaan dalam jumlah besar yang menjadi keputusan direksi.
d. Memastikan terhadap usulan pengajuan kebijakan dan putusan Direksi terhadap kesesuaian dengan prinsip syariah yang berlaku.
e. Memastikan pelaksanaan prinsip syariah dalam tahapan *ex-post* (kerjasama dengan SKAI)
f. Melakukan uji petik ke kantor cabang secara *sampling* untuk memastikan pelaksanaan aktivitas di kantor cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.
7. Melaksanakan *Compliance Assurance* terhadap aktifitas Operasional Bank. *Compliance assurance* dilaksanakan dalam upaya menjaga agar keputusan yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
a. Pembiayaan
1) Melakukan reviu kepatuhan pembiayaan, pelaksanaan rapat teknis dan pemberian opini kepatuhan pembiayaan pada Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.
2) Melakukan kaji ulang kepatuhan terhadap pembiayaan debitur besar yang telah cair dalam rangka memastikan kepatuhan proses pencairan dan pemenuhan perjanjian nasabah dengan Bank.
b. Jaringan Kantor Bank
1) Memastikan persiapan operasional atas pembukaan, pemindahan alamat lokasi, peningkatan status kantor bank telah memenuhi persyaratan melalui penerbitan *compliance checklist* yang ditetapkan regulator
2) Me*monitoring* pemenuhan RBB terkait realisasi pengembangan jaringan kantor
c. Pengendalian Biaya
1) Memastikan kepatuhan pengadaan barang dan jasa (*procurement*) melalui reviu dan opini pelaksanaan rencana pengadaan barang dan jasa
2) Memastikan pengeluaran biaya-biaya lain dalam operasional bank yang dapat meningkatkan pengendalian biaya yang efisien

3) Melaksanakan kaji ulang kepatuhan dalam rangka pengendalian biaya yang dilakukan melalui uji *sampling*

d. Aktifitas Operasional Lain
   1) Melakukan *compliance testing* terhadap pelaksanaan proses aktifitas operasional
   2) Memberikan opini kepatuhan terhadap kegiatan/aktifitas operasional yang memerlukan pendapat dari SKK.

Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas usaha dan operasional bank telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, seluruh komitmen kepada pihak lain telah dilaksanakan.

- Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.
- Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.
- Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

8. Penerapan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan yang bertujuan untuk menciptakan manajemen kepatuhan yang lebih efektif berdasarkan standar internasional. Sertifikasi ini dilaksanakan pada lingkup proses *Anti Money Laundering* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Group (AMG).

Corporate Governance and Compliance Support

Memastikan pelaporan kepada pihak terkait dipenuhi secara tepat waktu, di antaranya:

1. Laporan Fungsi Kepatuhan triwulanan kepada Direktur Utama.
2. Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK.
3. Laporan Pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4. Laporan *self assessment* pelaksanaan GCG setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada OJK.
5. Laporan *self assessment* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi setiap semester sebagai bentuk evaluasi yang dilaporkan kepada Entitas Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
6. Laporan Pelaksanaan GCG tahunan kepada *stakeholders*.

Memastikan optimalisasi implementasi GCG yang dilakukan melalui:

1. Melakukan sosialisasi penerapan GCG secara *continue* kepada jajaran Bank melalui:
   a. *E-mail blast* kepada jajaran Bank terkait implementasi GCG.
   b. Pemberian materi dasar implementasi GCG dalam kelas-kelas *training*.
2. Melaksanakan pengkinian ketentuan internal terkait penerapan GCG dan CoC.
3. Konsolidasi dengan perusahaan induk dalam implementasi GCG.
4. Mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh pihak independen guna memberikan masukan positif untuk peningkatan pelaksanaan GCG.
5. Melakukan pengawalan pelaksanaan Rencana Bisnis Kepatuhan Bank tahun 2022 dan pemenuhan Daftar *Monitoring* Tindak lanjut Kepatuhan.
6. Melakukan pengawalan terhadap proses *fit and proper test* Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, penyelenggaraan RUPS dan penyusunan Laporan Tahunan.
7. Melakukan *monitoring* terhadap denda Bank Syariah Indonesia agar jumlah denda dapat diminimalisir tiap tahunnya.
8. *Review* pelaksanaan RUPS.

Pengendalian Gratifikasi

Dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari Bank perlu menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan nasabah, vendor, rekanan, mitra kerja dan seluruh *stakeholders*. Kerja sama tersebut didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab.

Pengendalian gratifikasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjaga proses bisnis berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi melalui Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta pengenalan Sistem Pengendalian Gratifikasi. Dengan demikian, kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari dengan nasabah, vendor, rekanan dan seluruh *stakeholders*.

Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Bank berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Ketentuan Internal dan Surat OJK No. S-11/PB.3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Implementasi Standar Nasional Indonesia (ISO) 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Bank.

Kebijakan itu menginstruksikan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah melakukan inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi melalui penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dalam Inpres tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditunjuk menjadi penanggung jawab dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyelesaikan Standar Internasional ISO 37001 tentang *Anti-Bribery Management System* untuk sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung tata kelola BUMN dan Swasta.

Pada tahun 2021 BSI telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Bank juga telah menyusun Kebijakan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dengan implementasi pengendalian gratifikasi, seluruh jajaran pegawai diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
2. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
3. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit *Anti Bribery*.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit *Anti Bribery* adalah:
1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait pengendalian gratifikasi.
2. Menerima laporan gratifikasi berikut kelengkapan dokumennya dari pelapor.
3. Melakukan *review* atas laporan gratifikasi untuk menentukan kategori gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank Syariah Indonesia dan jika diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait mengenai laporan gratifikasi tersebut.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal dan internal.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi secara triwulanan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
6. Melakukan penyimpanan barang gratifikasi.

Compliance Risk Management

Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan aturan regulator dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Upaya yang dilakukan diantaranya:
1. Menganalisis dan menyusun exsum atas regulasi baru yang diterbitkan oleh Regulator (BI, OJK, Peraturan ekstenal lainnya yang terkait dengan Perbankan) yang disampaikan kepada Komisaris, Direksi, SEVP serta Group Head.
2. Menganalisis dan membuat Nota Kajian atas regulasi baru yang berdampak langsung kepada BSI, yang disampaikan kepada Direksi dan SEVP yang selanjutnya disampaikan kepada Group terkait/yang berkepentingan.
3. Menyampaikan opini/note kepatuhan pada setiap permintaan advise/opini kepatuhan terkait Working Group Policy & Procedure (WPP).
4. Menganalisa dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi masukan, tanggapan atas ketentuan internal dalam Working Group Policy & Procedure (WPP).
5. Melaksanakan pengkinian sistem reminder kewajiban laporan kepada pihak ketiga dan PIC laporan kepada pihak ketiga pada Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
6. Melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Bank Mandiri terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
7. Menyusun laporan profil risiko kepatuhan secara bulanan, triwulanan, semesteran kepada regulator, integrasi dengan induk perusahaan dan kepada manajemen Bank serta laporan *support* lainnya ke unit kerja terkait.
8. Memastikan terlaksananya proses pengelolaan (identifikasi pengukuran *monitoring* dan pengendalian) risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan OJK mengenai penerapan manajemen risiko.
9. Melaksanakan rapat koordinasi (*prudential meeting*) dengan unit kerja yang mendapatkan denda dari regulator untuk mencari solusi dan *monitoring*nya.
10. Menyampaikan dan *monitoring action plan* atas sanksi dari regulator yang terkena denda untuk melakukan identifikasi dan mitigasi agar tidak terulang kembali.
11. Menyusun dan memantau *action plan* atas ketentuan ekternal untuk disampaikan kepada unit kerja terkait serta melaksanakan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Terintegrasi dengan Entitas Induk terkait regulasi yang berdampak kepada Bank.
12. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Melakukan sosialisasi atas ketentuan eksternal kepada unit kerja terkait serta koordinasi (*doted line*) atas *Regional Business Control* (RBC) dan *Descentralize Compliance & Operation Risk* (DCOR).
14. Memastikan berjalan sosialisasi kebijakan, pedoman dan ketentuan yang diterbitkan kepada unit kerja terkait dan mewakili bank atas kegiatan sosialisasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta *liaison officer* ke Bank Indonesia berikut Otoritas Jasa Keuangan.

Syariah Compliance

Memastikan dan melakukan pengawalan berjalannya prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank, melalui:

1. Memastikan tersedianya kajian syariah atas permintaan unit kerja.
2. Memastikan tersedianya opini DPS atas permintaan unit kerja.
3. Memastikan tindak lanjut hasil audit syariah, baik internal maupun eksternal.
4. Memastikan tersusunnya laporan hasil pengawasan DPS dan penyampaiannya kepada OJK secara periodik (semester).
5. Memastikan terlaksananya pengawalan aspek syariah pada forum komite pembiayaan level Direksi.
6. Memastikan terlaksananya *People Development* khususnya aspek syariah.
7. Memastikan pelaksanaan uji petik DPS berjalan dengan baik dan Compliance Group (CPG) melakukan pendampingan kepada DPS dalam pelaksanaan uji petik, yang telah dilaksanakan kepada area/cabang.

Uji Petik Dewan Pengawas Syariah Periode 1 Januari-31 Desember 2022

No.	Tanggal	Lokasi/Kantor Cabang BSI
1	25 – 26 Januari 2022	Bekasi 2 Jakarta Thamrin
2	20 – 24 Februari 2022 20 – 24 Februari 2022 7 – 11 Februari 2022 8 – 11 Februari 2022 9 – 11 Februari 2022 7 – 11 Februari 2022	Balikpapan Sudirman 1 Balikpapan Sudirman 2 Depok Margonda 2 Padang Imam Bonjol Palembang Sudirman Tangerang BSD ITC
3	6 – 9 Maret 2022 21 – 25 Maret 2022 21 – 25 Maret 2022 7 – 11 Maret 2022 28 – 30 Maret 2022 28 – 30 Maret 2022	Batam Windsor Central Makassar 2 Manado Mega Mas Medan Gajah Mada Palu Gajah Mada Palu Wolter Monginsidi
4	30 Maret – 2 April 2022 30 Maret – 2 April 2022 17 – 21 April 2022 17 – 21 April 2022 20 – 23 April 2022 20 – 23 April 2022	Cirebon dr Cipto Cirebon Siliwangi Semarang MT Haryono Solo Slamet Riyadi 1 Surabaya Darmo Surabaya Jemur Handayani
5	6 – 8 Juni 2022 13 – 14 Juni 2022 13 – 14 Juni 2022 23 Juni 2022 23 Juni 2022 20 – 22 Juni 2022 20 – 22 Juni 2022	Banda Aceh Daud Beureueh 2 Cirebon Tirtayasa 1 Serang Jakarta Pondok Indah Jakarta Saharjo Ternate Hasan Esa Ternate Jatiland
6	10 – 13 Juli 2022	Denpasar Mahendradata
7	9 – 14 Agustus 2022 9 – 14 Agustus 2022 22 – 26 Agustus 2022 22 – 26 Agustus 2022 21- 24 Agustus 2022 22 – 24 Agustus 2022	Ambon Ambon Diponegoro Jakarta Kebon Jeruk 1 Jakarta Kelapa Gading 1 Pekalongan Pemuda Purwokerto Sudirman 1
8	5 – 11 September 2022 5 – 11 September 2022	Langsa Darussalam Takengon
9	16 – 19 Oktober 2022	Malang Soetta
10	4 – 7 Desember 2022	Tanjung Pinang

8. Memastikan terlaksananya *sharia clinic* bagi unit bisnis Kantor Pusat.
9. *Sharing session* aspek syariah dengan RO/Area/*Branch* seluruh Indonesia.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah.
    a. Koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2022 antara CPG dengan Dewan Pengawas Syariah terlaksana melalui kegiatan uji petik yang telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali.
    b. Cakupan pengawasan aspek syariah: Cakupan pengawasan aspek syariah yang dilaksanakan antara lain:
        - Pendampingan DPS pada Uji Petik, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen pembiayaan kepada unit kerja yang menjadi obyek Uji Petik DPS diantaranya pembiayaan dan pendanaan dengan basis akad:
            a) Murabahah
            b) Mudharabah
            c) Musyarakah, termasuk Musyarakah Mutanaqisah
            d) Ijarah, termasuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik
            e) Pembiayaan *Take Over*, baik dari Lembaga Keuangan Konvensional maupun Lembaga Keuangan Syariah
            f) Pembiayaan dengan tujuan *refinancing*
            g) Pembiayaan kepada koperasi
            h) Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Giro, dan Deposito
        - Metode pemeriksaan dilakukan secara *on desk* dan *on site* dengan pemeriksaan melalui dokumen serta wawancara kepada Unit Kerja (Area/Cabang) terkait.

- Memastikan terpenuhinya aspek Syariah dalam forum komite pembiayaan level Direksi dengan menghadiri Rapat Teknis dan Rapat Komite Pembiayaan Level Direksi.

Business Compliance

Pelaksanaan *Compliance Review* atas aktivitas strategis Bank diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian kepatuhan (*compliance review*) terhadap usulan rencana penyaluran pembiayaan yang akan diputus oleh Komite Pembiayaan level Direksi. Pengujian melalui keikutsertaan Unit Kerja Kepatuhan dalam proses Rapat Teknis (Ratek) dan Rapat Komite Pembiayaan (RKP) dengan *tools Compliance Note Independent* (CNI) yang dilakukan oleh Unit Kerja *Compliance* untuk memastikan proses pembiayaan telah sesuai terhadap ketentuan eksternal dan internal.
2. Memastikan kesiapan operasional atas rencana pembukaan/pemindahan alamat/perubahan status jaringan kantor bank melalui pemenuhan daftar persyaratan yang tertuang dalam *compliance check list* yang ditetapkan oleh regulator.
3. Melaksanakan *Compliance on Visit* (CoV) di Unit Kerja yang mensupervisi proses penataan jaringan kantor Bank pada tahun 2021, untuk memastikan proses penataan terlaksana sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal Bank.
4. Melakukan *review* proses pengadaan barang dan jasa komite level Direksi guna memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang akan diputus oleh komite level Direksi telah dilakukan secara tertib, efisien, transparan dan sesuai dengan prinsip GCG yang berlaku.
5. Memberikan masukan/opini terhadap materi rencana penerbitan ketentuan internal Bank berupa *draft* Kebijakan, Surat Edaran, SOP telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
6. Melakukan *review* penyaluran dana sosial dalam rangka kegitan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Sosiobisnis yang dilaksanakan oleh BSI bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSMU).

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk peningkatan/pengawalan kepatuhan unit kerja/ pengembangan manajemen:

1. Menyelenggarakan Forum Evaluasi *Review* Pembiayaan yang melibatkan *business unit*, *risk assessment unit* dan *support unit* dalam melakukan koordinasi antar unit kerja untuk meminimalisir/ mencegah *non compliance procedure* dalam proses pembiayaan. Forum evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap triwulanan.
2. Menyusun Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan Bank yang digunakan sebagai pedoman oleh jajaran Bank dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Melakukan koordinasi dengan *Decentralize Compliance and Operational Risk* (DCOR) dalam melaksanakan efektivitas pengawalan kepatuhan sesuai peran dan tugas masing-masing.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Uraian terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan disampaikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2022 Bank Syariah Indonesia tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

PERKARA PENTING

Sepanjang tahun 2022, Bank Syariah Indonesia menghadapi sejumlah perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya masih dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap.

Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini. Berikut rinciannya:

Perkara Penting Tahun 2022

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian	247	38	5
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai dan/atau *inkracht*	125	24	0
	Jumlah	372	62	5
	TOTAL			**439**

Informasi terkait kasus – kasus di pengadilan dengan nilai gugatan materiil atau putusan ≥ Rp 5 Milyar dan sanksi yang diterima serta pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha Bank:

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
1	Perkara gugatan No. 404/ Pdt.G/2013/PN.Jkt. Pst antara PT Atriumasta Sakti selaku Penggugat dan BSI selalu Tergugat terkait dengan pelaksanaan putusan arbitase yang telah dimenangkan oleh Penggugat. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp9.441.701.946,- • Immateril sebesar Rp300.000.000.000,-	• PN menyatakan tidak dapat menerima dengan alasan bahwa putusan tersebut telah dimohonkan eksekusinya kepada PN sehingga diminta menunggu pelaksanaanya. • PT DKI Jakarta menguatkan putusan PN.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	PA Jakarta Pusat telah memanggil/*aanmaning* kepada BSI untuk melaksanakan amar putusan dimaksud. BSI telah menghadiri panggilan sidang *annmaning*, namun Penggugat tidak hadir. Sampai dengan saat ini BSI belum menerima *relaas* Panggilan/ *aanmaning* kembali.	Membayar ganti rugi
2	Perkara gugatan No. 647/ Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Othniel Wirata Purbowo selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat dan OJK selaku Turut Tergugat terkait dengan penyerahan cek senilai Rp 10 Milyar rupiah kepada Sdr. Oktavianti Budhi Nugroho yang menjabat sebagai kepala cabang BSI KCP Sultan Iskandar Muda namun nasabah belum menerima bukti bilyet deposito atas penempatan data tersebut. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp13.916.000.000,- • Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,-	PN menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Membayar ganti rugi

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
3	Perkara gugatan No. 360/ Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst antara Firhat Esfandiari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat II terkait dengan lelang yang akan dilakukan oleh BSI terhadap jaminan milik nasabah an PT Mitra Kosasih. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp31.645.822.960,- • Immateriil sebesar Rp100.000.000.000,-	PN menyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding dan masih proses pemeriksaan di PT DKI Jakarta.	Risiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI tidak mengajukan kontra memori Banding karena Penggugat tidak mengajukan Memori Banding. Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi.	Membayar ganti rugi
4	Perkara gugatan No. 410/ Pdt.G/2022/PA.Gsg antara KSPPS BTM Amanah Bina Insan selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat I terkait dengan pelaporan melalui SLIK kepada OJK yang menyatakan bahwa Penggugat telah Pailit sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank lain. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp10.843.187.328,- • Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,-	PA menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. PTA telah memutus perkara dimaksud yang pada intinya menguatkan putusan PA(dhi. BSI menang). Namun sampai dengan saat ini BSI belum menerima secara resmi pemberitahuan isi putusan dimaksud.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. Monitoring terhadap pemberitahuan putusan Banding PTA serta upaya hukum selanjutnya	Membayar ganti rugi
5	Perkara gugatan No. 84/ Pdt.G/2022/PN.Skt antara Andy Pramono selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat I terkait dengan BSI tidak pernah mengirimkan surat peringatan dan melakukan blokir terhadap rekening Penggugat sehingga menyulitkan penggugat untuk melakukan pembayaran dan terdaftar di BI sebagai nasabah tidak baik dan sulit untuk mendapatkan pembiayaan lain. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar 7.181.550.000,- • Immateriil sebesar Rp50.000.000,-	PN menyatakan bahwa PN tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. PT Jawa Tengah telah menguatkan putusan PN. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi dan masih proses di MA.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Sampai dengan saat ini masih proses pemeriksaan di MA.	Membayar ganti rugi
6	Perkara gugatan No. 7181/ Pdt.G/2022/PA.Cbn antara PT Nusa Raya Propertindo selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan gugatan PKPU yang diajukan oleh BSI. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp320.863.858.471,- • Immateriil sebesar Rp2.500.000.000,-	Masih proses pemeriksaan di PA	Resiko ganti rugi	BSI mengikuti seluruh proses persidangan	Membayar ganti rugi

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi
7	Perkara gugatan No.1136/ Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel antara Dr. Adhari selaku Penggugat dan BSI selaku Tergugat terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh ex BRIS KC Tanjung Priok atas penjanjian sewa gedung kantor tersebut. Nilai gugatan: • Materiil sebesar Rp21.925.000.000,- • Immateriil sebesar Rp20.000.000.000,-	Masih proses pemeriksaan di PN.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI mengikuti seluruh proses persidangan	Membayar ganti rugi

Selain perkara hukum di atas, BSI juga menghadapi perkara hubungan industrial yang rinciannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
1	Perkara Hubungan Industrial No.268/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Jkt.Pst antara (Sdr. Alam Sani dkk) para pensiunan karyawan BSI (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) selaku Para Penggugat dengan BSI (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) selaku Tergugat. Nilai Gugatan: Materiil sebesar Rp833.357.637,-	PHI pada PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. MA telah menguatkan putusan PHI pada PN Jakarta Pusat (dhi. BSI menang).	Resiko reputasi	BSI telah melakukan upaya maksimal dengan menunjuk pengacara eksternal (Dewansyam & Partner) untuk membela kepentingan hukum BSI. Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat dan putusan MA telah memenangkan BSI. Terhadap putusan tersebut, BSI monitoring upaya hukum PK.	Membayar ganti rugi

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
2	Perkara Hubungan Industrial No.62/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Jkt.Pst antara (Sdr. Muhamad Yazid) ex pegawai BSI (dahulu BRIsyariah) selaku Penggugat dengan BSI selaku Tergugat. Nilai Gugatan: Materiil sebesar Rp193.948.163,-	PHI pada PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa BSI dihukum untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang Pesangon, Uang penghargaan masa kerja , uang penggantian hak, DPLK dan JHT Jamsostek secara tunai dan sekaligus yang keseluruhannya sebesar **Rp80.885.525,88 (delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah koma delapan puluh delapan sen)**; Terhadap putusan tersebut, BSI telah mengajukan upaya hukum Kasasi. MA menyatakan bahwa menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (ex BRIS).	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI akan melakukan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan amar putusan MA dimaksud.	Membayar ganti rugi
3	Perkara Hubungan Industrial No.105/Pdt.Sus-PHI/2020/ PN.Jkt.Pst antara Sdr. Adhi Murmansyah (ex pegawai BSI/ dahulu BRIsyariah) selaku Penggugat dengan BSI (dahulu BRIsyariah) selaku Tergugat. Nilai Gugatan: • Materiil sebesar Rp219.238.764,- • Immateriil sebesar Rp300.000.000,-	PHI pada PN Jakarta Pusat menyatakan bahwa BSI dihukum untuk membayar uang Kompensasi PHK kepada Penggugat berupa uang Pesangon, Uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak, dan DPLK secara tunai dan sekaligus yang keseluruhanya sebesar **Rp 93.708.041,62 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh satu rupiah koma enam puluh dua sen)** Terhadap putusan tersebut, BSI telah mengajukan upaya hukum Kasasi. MA menyatakan bahwa menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (ex BRIS).	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	BSI akan melakukan pembayaran kepada Penggugat berdasarkan amar putusan MA dimaksud.	Membayar ganti rugi

No.	Pokok Perkara/Gugatan dan Para Pihak	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan
4	Perkara Hubungan Industrial No. 234/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN.Mdn antara Hj. Zuraida Hanum (*ex* pegawai BSI/ dahulu BSM) selaku Penggugat melawan Pimpinan Kepala Kantor Cabang Utama Medan BSI selaku Tergugat I dan Direktur BSI selaku Tergugat II. Nilai gugatan: • Materiil sebesar Rp142.757.550,-	PHI pada PN Medan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi. BSI akan melakukan monitoring terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Penggugat.	Membayar ganti rugi
5.	Perkara Hubungan Industrial No. 236/Pdt.Sus-PHI/2022/ PN.Mdn antara Hj. Zuraida Hanum (*ex* pegawai BSI/ dahulu BSM) selaku Penggugat melawan Pimpinan Kepala Kantor Cabang Utama Medan BSI selaku Tergugat I dan Direktur BSI selaku Tergugat II. Nilai gugatan: • Materiil sebesar Rp47.464.379,- • Immateriil sebesar Rp50.000.000,-	PHI pada PN Medan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi.	Resiko ganti rugi namun tidak bersifat material terhadap usaha BSI	Terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi. BSI akan melakukan monitoring terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Penggugat.	Membayar ganti rugi

Sanksi Administratif dan Lainnya dari Regulator

Rincian sanksi administratif yang diterima sepanjang tahun 2022 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

	Kesalahan Pelaporan		
1	Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda Kesalahan Penggunaan Kode Transaksi TSA	
	Otoritas	Bank Indonesia	
	Tanggal Pengenaan	25 Mei 2022	
	Nominal	Rp100,000.00	
	Unit Kerja Terkait	1. KCP Tanah Abang 2. KCP Bener Meriah 3	
	Keterangan	Kesalahan Penggunaan Kode Transaksi SKN Outgoing Kredit untuk transaksi bulan April 2022 sebanyak 1 (satu) item. Harusnya menggunakan kode TSA-50 namun cabang menggunakan kode TSA-51 (kode khusus untuk transaksi pemerintah) vide Surat BI Nomor 24/35/DPSP-GOSP-KIM/Srt/B tanggal 25 Mei 2022	
2	Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda Kesalahan Laporan LSMK	
	Otoritas	OJK	
	Tanggal Pengenaan	13 September 2022	
	Nominal	Rp20,100,000.00	
	Unit Kerja Terkait	1. KP - CF1	5. KCP Jakarta Bidakara
		2. KP - CFA	6. KP - MBG
		3. KP - IDG	7. KP - SMG
		4. KC Jakarta Sudirman	
	Keterangan	Kesalahan Pelaporan LSMK Form 10 dengan total kesalahan sebanyak 203 (dua ratus tiga) items vide Surat OJK Nomor SR-10/PB.3401/2022 tanggal 13 September 2022	

Kesalahan Pelaporan		
3	Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda Kesalahan Laporan SLIK
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	13 September 2022
	Nominal	Rp550,000.00
	Unit Kerja Terkait	1. KP - FOG
		2. KP - SMG
	Keterangan	Kesalahan Pelaporan Data Debitur melalui SLIK untuk 11 (sebelas) Debitur vide Surat OJK Nomor SR-10/PB.3401/2022 tanggal 13 September 2022
Keterlambatan Pelaporan		
1	Jenis Pelanggaran	Sanksi Denda Keterlambatan Penyampaian Penjelasan dan/atau Dokumen terkait Pengaduan Nasabah
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	10 Februari 2022
	Nominal	Rp2,500,000.00
	Unit Kerja Terkait	1. CCG 2. KC Gorontalo 3. KC Meulaboh Nasional
	Keterangan	Keterlambatan penyampaian penjelasan dan dokumen ke OJK untuk 2 (dua) nasabah vide Surat OJK Nomor S-181/EP.121/2022 tanggal 10 Februari 2022
2	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Penyampaian Laporan Terstruktur (*Condensed Report*) Bulanan
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	09 Maret 2022
	Nominal	Rp52,000,000.00
	Unit Kerja Terkait	-
	Keterangan	Keterlambatan penyampaian laporan terstruktur (*condensed report*) posisi data November 2021 melalui APOLO, dengan rincian: 1. Laporan Pemantauan 15 Debitur NPF Terbesar (terlambat 26 (dua puluh enam) hari) 2. Laporan Pemantauan 10 Debitur Hapus Buku Terbesar (terlambat 26 (dua puluh enam) hari) (Total Keterlambatan 2 (dua) jenis laporan dengan total keterlambatan 52 hari @Rp1jt/hari) vide Surat OJK Nomor SR-4/PB.3401/2022 tanggal 09 Maret 2022
3	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Penyampaian Laporan Realisasi Pembawaan Uang Kertas Asing Periode III Tahun 2021 (Teguran Tertulis I)
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	31 Maret 2022
	Nominal	Rp0
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Bank tidak melakukan konfirmasi kepada BI bahwa setiap badan berizin wajib menyampaikan Laporan Realisasi 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode berakhir walaupun tidak ada aktifitas pengajuan kuota maupun pembawaan UKA itu sendiri vide Surat BI Nomor 24/82/Jkt/Srt/Rhs tanggal 31 Maret 2022

Keterlambatan Pelaporan		
4	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Penyampaian Laporan PPE EBUS
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	01 April 2022
	Nominal	Rp76,800,000.00
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Keterlambatan Penyampaian Laporan Kegiatan Berkala Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) Periode Bulan Maret sd. Juni 2020 dengan total hari keterlambatan 768 hari vide Surat OJK Nomor S-360/PM.112/2022 tanggal 01 April 2022
5	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Penyampaian Laporan PPE EBUS
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	14 April 2022
	Nominal	Rp2,400,000.00
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala Perantara Pedagang Efek untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS) Periode Bulan Oktober 2020 dengan total hari keterlambatan 24 (dua puluh empat) hari vide Surat OJK Nomor S-476/PM.112/2022 tanggal 14 April 2022
6	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Laporan Rencana Kegiatan Operasional Outlet BSI di Luar Hari Kerja
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	27 Mei 2022
	Nominal	Rp2,000,000,00
	Unit Kerja Terkait	DSG
	Keterangan	Keterlambatan Laporan Rencana Kegiatan Operasional Outlet BSI Di Luar Hari Kerja vide Surat OJK Nomor S-5/PB.3401/2022, 27 Mei 2022
7	Jenis Pelanggaran	Koreksi LBUT Diluar Batas Waktu
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	20 Juli 2022
	Nominal	Rp5,000,000,00
	Unit Kerja Terkait	SDG
	Keterangan	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan LBUT Bulanan Periode Data Januari 2022 (Kelompok Informasi Sistem Pembayaran dan Jasa Keuangan, Informasi Transaksi Kartu ATM/ Debet) vide Surat BI Nomor 24/225/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B, 20 Juli 2022
8	Jenis Pelanggaran	Koreksi LBUT Diluar Batas Waktu
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	16 Agustus 2022
	Nominal	Rp150,000,00
	Unit Kerja Terkait	SDG
	Keterangan	Keterlambatan Penyampaian Koreksi Laporan LBUT Bulanan Periode Data Juni 2022 vide Surat BI Nomor 24/278/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 16 Agustus 2022

Keterlambatan Pelaporan		
9	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Laporan Transaksi Efek
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	15 September 2022
	Nominal	Rp20,000,00
	Unit Kerja Terkait	TGM
	Keterangan	Keterlambatan Laporan Transaksi Efek Periode Laporan Juni 2022 (Bank bertindak sebagai Partisipan Seller) selama 2 jam vide Surat OJK Nomor S-1131/PM.112/2022, 15 September 2022
10	Jenis Pelanggaran	Keterlambatan Koreksi Laporan LBUT
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	10 November 2022
	Nominal	Rp100,000,00
	Unit Kerja Terkait	SDG
	Keterangan	Keterlambatan Koreksi Laporan LBUT untuk Bulan Data September 2022 vide Surat BI Nomor 24/557/DPKL-GPLB/Srt/B tanggal 10 November 2022
Denda Lainnya		
1	Jenis Pelanggaran	Pembatalan transaksi TD Valas Syariah
	Otoritas	Bank Indonesia
	Tanggal Pengenaan	14 Maret 2022
	Nominal	Rp20,667,699.00
	Unit Kerja Terkait	CTG
	Keterangan	Pembatalan Transaksi Term Deposit Valas Syariah Bank Indonesia (dhi. Bank tidak memenuhi kewajiban setelmen sampai dengan batas waktu setelmen) vide Surat BI Nomor 24/76/DPM/Srt/B tanggal 14 Maret 2022
2	Jenis Pelanggaran	Laporan Data Pokok SDM
	Otoritas	OJK
	Tanggal Pengenaan	07 September 2022
	Nominal	Rp4,300,000.00
	Unit Kerja Terkait	1. CSG 2. HCS
	Keterangan	Kesalahan Pelaporan Data Pokok SDM dan Riwayat Jabatan untuk Periode Mei 2021 sd. Mei 2022 dengan total 43 (empat puluh tiga) items vide Surat OJK Nomor SR-21/PB.341/2022 tanggal 07 September 2022

HUBUNGAN INVESTOR

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. telah membentuk unit kerja, yang bernama Investor Relation Group, yang khusus: (i) menangani hubungan, baik dengan regulator maupun para pemegang saham (*Shareholder*) dan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) di Perseroan; (ii) menyediakan informasi yang tepat mengenai Perseroan. Informasi yang disediakan terkait dengan strategi, kinerja operasional maupun kinerja keuangan yang disajikan secara regular dan tersedia di *website* Perseroan. Kedua hal ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai gambaran penuh atas kinerja Perseroan yang berguna bagi pemegang saham eksisting maupun calon pemegang saham dalam berinvestasi di saham Perseroan maupun bagi para pemangku kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab Investor Relation dalam organisasi Perseroan meliputi:

1. Menjaga hubungan dengan regulator, pemegang saham serta entitas pasar modal diantaranya *fund managers*, *buy-side* & *sell-side analyst*, *stock broker*, perusahaan asuransi, *rating agency* dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga kepercayaan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan di Pasar Modal.
2. Membangun strategi komunikasi dan informasi yang menghasilkan *positive awareness* kepada pemegang saham secara umum mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan dengan tujuan menjalinan hubungan keuangan (*financial relation*) yang erat antara Perseroan dan pemegang saham.
3. Secara proaktif mengkomunikasikan strategi dan kinerja perusahaan guna membentuk valuasi jangka panjang saham Perseroan melalui beberapa kegiatan komunikasi seperti *Quarterly Earnings Call/Analyst Meeting*, *one on one meetings*, *Annual Public Expose*, *Investor Conference*, *Roadshow* & *Non-Deal Roadshow* ataupun kegiatan komunikasi lainnya baik lokal maupun internasional.
4. Memenuhi kewajiban *feeding* informasi yang akurat serta valid kepada pihak investor dan pihak terkait lainnya dalam rangka menumbuhkan persepsi Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang memiliki reputasi baik, kredibel, dan menarik bagi investor.
5. Melakukan analisa terhadap kondisi pasar beserta pergerakan saham yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka memberikan *update* mengenai valuasi perusahaan terkini.
6. Menjaga pemenuhanan seluruh ketentuan pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan & pemenuhan data/informasi yang dibutuhkan investor, regulator serta *stakeholder* lainnya.
7. Meningkatkan literasi/pemahaman mengenai pasar modal kepada seluruh pegawai Perseroan melalui *sharing session* dengan mengundang pembicara yang ahli di bidangnya.

Saluran Komunikasi

Perseroan telah menyediakan saluran komunikasi bagi investor dan entitas pasar modal untuk dapat terhubung dengan *Investor Relation* dengan detail sebagai berikut:

Investor Relation Group
Gd. The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27
Kel. Karet Kuningan
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
Jakarta 12930 Indonesia
Website Hubungan Investor: ir.bankbsi.co.id
E-mail: investor-relations@bankbsi.co.id

Realisasi Kegiatan Tahun Buku

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham/pemangku kepentingan Perseroan yang telah dilakukan oleh *Investor Relation Group* sepanjang tahun 2022 meliputi:

1. Penyelenggaran *Analyst Meeting* yang rutin dilaksanakan setelah penerbitan laporan keungan kuartal. Sepanjang tahun 2022 telah dilakukan *Analyst Meeting* sebaganyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
   - *Analyst Meeting* untuk pemaparan kinerja Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022
   - *Analyst Meeting* untuk pemaparan kinerja TW I Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022
   - *Analyst Meeting* untuk pemaparan kinerja TW II Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022
   - *Analyst Meeting* untuk pemaparan kinerja TW III Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022
2. Kegiatan komunikasi baik melalui *one on one meetings*, *Non-Deal Roadshow*, *Investor Conference* dan 8 *Collaboration Events* bekerja sama dengan perusahaan Sekuritas.
3. Penyelenggaraan *IR Talks* (edukasi kepada pegawai BSI).
4. Penyelenggaraan *Annual Rating Review* Perseroan oleh Fitch Ratings dan PEFINDO.
5. Penyelenggaraan *Annual Public Expose* secara virtual bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia.

6. Melakukan komunikasi kepada pemegang saham:
   a. Pengendali
      - Pembahasan kinerja triwulanan dengan Bank Mandiri melalui *Board Forum* dan juga BNI dan BRI
   b. Non Pengendali
      - Penyampaian informasi terkait aksi korporasi beserta tata caranya kepada pemegang saham.
7. Pemenuhan informasi / data yang diperlukan oleh regulator seperti BEI, OJK dan lainnya.
8. Pengelolaan informasi terkini pada *website investor relations* (ir.bankbsi.co.id).
9. Pengelolaan email *investor relation* BSI investor-relations@bankbsi.co.id.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Syariah Indonesia senantiasa menyampaikan informasi terkini secara akurat berkenaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan Bank kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan merupakan hasil rangkuman dan pengolahan internal, yang kemudian menjadi sebuah laporan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti regulasi di pasar modal tentang keterbukaan informasi.

Transparansi informasi yang disampaikan oleh Bank berupa posisi, kondisi, kinerja, serta prospek keuangan yang tersedia laporan tahunan, laporan keuangan berkala, laporan interim hingga siaran pers dan pengungkapan informasi lainnya kepada publik. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan seluruh materi informasi tersebut untuk menganalisis kinerja Bank.

Seluruh informasi diperbarui secara berkala untuk selanjutnya disampaikan juga kepada Pemegang Saham dan otoritas pasar modal melalui beragam saluran komunikasi. Penyampaian informasi berkala ini merupakan bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang efektif dan merata antara Bank dengan seluruh pemangku kepentingan.

Siaran Pers

Berikut adalah siaran pers yang diterbitkan oleh BSI sepanjang tahun 2022.

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
1	3 Januari 2022	BSI Siap Fasilitasi Transaksi Syariah di Lingkungan TNI AL
2	4 Januari 2022	Transfer Via BSI Mobile dengan BI Fast Hanya 2500
3	7 Januari 2022	BSI Siap Menyalurkan KPR FLPP Tahun 2022
4	11 Januari 2022	Jadi Mitra Strategis Kemenkeu, BSI Layani Transaksi
5	12 Januari 2022	BSI Resmikan *Outlet* Prioritas untuk Nasabah Beraset Mulai Rp 500 Juta
6	19 Januari 2022	BSI *Launching* Talenta Wirausaha BSI
7	20 Januari 2022	BSI Siapkan 7 Kunci Akselerasi Perbankan Syariah
8	27 Januari 2022	BSI Dukung Halal *Lifestyle* Lewat Industri Fesyen
9	2 Februari 2022	Di Usia Satu Tahun, Laba BSI Lampaui Target & Tumbuh 38%
10	3 Februari 2022	Milad ke 1, BSI Gelar Promo *Special* Serba Satu untuk Rumah Impian
11	7 Februari 2022	Tingkatkan Akses Bagi Nasabah, BSI Resmikan *Call Site* Semarang
12	7 Februari 2022	BSI Gandeng Indonesia Hijab Fest Guna Maksimalkan Potensi Fesyen
13	14 Februari 2022	Talenta Wirausaha BSI Mendarat di Malang, Ajak Wirausaha Muda Naik Kelas
14	15 Februari 2022	BSI Kolaborasi Bersama Addie MS & Twilite Orchestra Persembahkan Energi Baru untuk Indonesia
15	16 Februari 2022	BPKH Sinergi dengan BSI Tambahkan Pengelolaan Kustodian Rp50 Triliun
16	17 Februari 2022	BSI Sabet 5 Penghargaan di Ajang *5th Satisfaction, Loyalty Award* 2022
17	24 Februari 2022	BSI, LAZ, BSMU dan OJK Kolaborasi Bantu Program Klaster Usaha Peternak Kambing Pesantren
18	25 Februari 2022	Dorong Pertumbuhan Bisnis Perumahan, BSI Kenalkan BSI Griya Mabrur
19	26 Februari 2022	BSI Dukung SMM PTN, Permudah Calon Mahasiswa Lakukan Pembayaran
20	27 Februari 2022	Kerjasama Telkomsel & Bank Syariah Indonesia Hadirkan KUR Syariah untuk Pembiayaan Mitra Reseller

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
21	10 Maret 2022	BSI Perkuat Bisnis Griya dan Otomotif di Wilayah Timur Indonesia
22	11 Maret 2022	Talenta Wirausaha Hadir di Makassar, BSI Siap Cetak *Entrepreneur* Muda
23	13 Maret 2022	Talenta Wirausaha Siap Cetak Wirausaha Muda di Solo
24	14 Maret 2022	BSI Siap Garap Jakarta Auto Week 2022
25	17 Maret 2022	Tingkatkan Layanan Kepada Nasabah Prioritas, BSI Berikan Layanan Konsultasi Pajak
26	17 Maret 2022	BSI Siap Garap Sektor Pendidikan, BSI Tandatangani PKS dengan UNSRI
27	18 Maret 2022	Dukung Kontribusi Pajak Negara, BSI Luncurkan Pembayaran Pajak Via Online
28	18 Maret 2022	Raih Animo Tinggi di Berbagai Kota, Bogor Siap Jadi Target Pengembangan Talenta Wirausaha BSI
29	24 Maret 2022	Permudah Nasabah, BSI Luncurkan Program Sobat Gadai Online Via BSI Mobile
30	24 Maret 2022	BSI Siapkan Pembiayaan KUR Syariah Agar Petani Go Digital
31	24 Maret 2022	OJK & BSI Bersinergi Kembangkan UMKM Lewat Bank Wakaf Mikro
32	25 Maret 2022	Go Global, BSI Berkolaborasi dengan Bank-Bank di Uni Emirat Arab
33	25 Maret 2022	Talenta Wirausaha Siap Cetak Wirausaha Muda di Bandung
34	26 Maret 2022	Talenta Wirausaha Siap Cetak Wirausaha Muda di Yogyakarta
35	26 Maret 2022	BSI Gandeng Kerjasama dengan Rumah Sakit Palembang
36	26 Maret 2022	Talenta Wirausaha Siap Cetak Wirausaha Muda di Aceh
37	30 Maret 2022	BSI Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi di Universitas Hasanuddin
38	30 Maret 2022	BSI Siap Cetak *Entrepreneur* di Lampung
39	30 Maret 2022	Mandiri Group Tanam 1000 Pohon di Kawasan Katulampa
40	31 Maret 2022	Dukung Ekspor Nasional, BSI Sinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
41	5 April 2022	BSI Sinergi dengan Startup Pajakind Bantu Layanan Prioritas
42	7 April 2022	Terus Bertransformasi Digital, BSI Raih Penghargaan Mobile Banking Syariah
43	8 April 2022	BSI, Muamalat & BJB Syariah Bersinergi Perkuat Pasar Uang Antar Bank Syariah
44	12 April 2022	Fokus Kembangkan *Islamic Ecosystem*, Pembayaran Zakat Perusahaan BSI Mencapai Lebih dari 122,5 Miliar
45	13 April 2022	Dorong UMKM Go Global, BSI Dukung Gernas BBI Melalui Global Halal Hub dan Zona Khas di Sumatera Barat
46	14 April 2022	BSI & Fintech Alami Berkolaborasi Perkuat Segmen SME dan Mikro
47	15 April 2022	Forbes Tempatkan BSI Kedalam Jajaran 5 Bank Terbaik Indonesia
48	19 April 2022	Sasar Anak Muda, BSI Fokus Perkuat Layanan Digital
49	19 April 2022	BSI Siap Layani Masyarakat Menyambut Idul Fitri 1443 H
50	22 April 2022	Bank Syariah Indonesia Bangun 15 Solar Panel untuk Desa Tertinggal di NTT
51	27 April 2022	BSI Pimpin Pembiayaan Sindikasi Pembangkit EBT Medco Senilai Rp 750 Miliar
52	28 April 2022	Laba Naik 33,18%, BSI Siap Berlari Raih Pertumbuhan Berkelanjutan
53	10 Mei 2022	BSI Gandeng Bpn Tingkatkan Literasi Nasabah Terkait Perubahan Nama Kreditur pada Sertifikat Jaminan Hak Tanggungan
54	11 Mei 2022	Tingkatkan Solusi Finansial, BSI dan Ayoconnect Jajaki Kerjasama Open Banking
55	12 Mei 2022	Penerapan Perda Qonun, Iuran BPJS Kesehatan di Aceh Bisa Autodebet di BSI
56	13 Mei 2022	Go Global, BSI Mulai Tancapkan Bisnis & Penetrasi Layanan di Timur Tengah
57	17 Mei 022	Tingkatkan Kerjasama Bisnis, BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga
58	25 Mei 2022	Ribuan UMKM Siap Berkompetisi dalam Program Talenta Wirausaha BSI
59	26 Mei 2022	Promosikan Produk Lebih Gencar, BSI Adakan Life With BSI Expo di Surabaya
60	27 Mei 2022	RUPST BSI, Bagikan Deviden Rp757 Miliar
61	30 Mei 2022	BSI Dorong Transaksi Bi-Fast untuk Bank Riau Kepri
62	4 Juni 2022	BSI Siap Layani Lebih dari 80 Persen Jamaah Haji Indonesia
63	9 Juni 2022	BSI Resmikan UMKM *Centre* di Yogyakarta
64	13 Juni 2022	BSI Siapkan Lebih dari 50% SDM Milenial untuk Literasi Keuangan Syariah
65	16 Juni 2022	BSI Siap Layani 3.600 Nasabah Hasil Konversi Bank Mantap di Aceh
66	22 Juni 2022	BSI Gelar Akad Massal 2.500 Nasabah KPR Sejahtera, Targetkan Pembiayaan 1,5 Triliun

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
67	23 Juni 2022	BSI Berikan Apresiasi 300 Nasabah Pengguna BSI Mobile
68	24 Juni 2022	Dukung Ekonomi Berkelanjutan, BSI Bersama IJK dan OJK Tanam 20.000 Pohon Bakau di Pesisir Pantai di Bali
69	27 Juni 2022	Resmikan *Payment Point*, BSI & DMI Perkuat Sinergi Perluas Layanan Keuangan Syariah
70	28 Juni 2022	BSI Pimpin Pembiayaan Sindikasi Syariah Rp 1,34 Triliun di Proyek Jalan Tol Semarang-Demak
71	29 Juni 2022	BSI Targetkan Lebih dari 3.000 Pembelian Hewan Kurban Secara Online
72	29 Juni 2022	BSI Dorong Investasi di Timur Tengah
73	01 Juli 2022	Digital Banking Terus Dikembangkan, BSI Kebanjiran Penghargaan di Tahun 2022
74	02 Juli 2022	Buka *Representative Office* di Dubai, BSI Didaulat sebagai *Progressive International Market Expansion*
75	04 Juli 2022	BSI Semakin Fokus Garap Pusat Keuangan Syariah di Dubai
76	06 Juli 2022	Dorong Investasi Emas di Masyarakat, BSI Lakukan Program Hujan Emas
77	10 Juli 2022	BSI Salurkan 3.691 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia
78	13 Juli 2022	Dorong Pertumbuhan Program FLPP, BSI Apresiasi Pengembang Terbaik
79	15 Juli 2022	Sinergi dengan Perum Jasa Tirta II, BSI Dorong Layanan Perbankan Syariah
80	16 Juli 2022	BSI Konsisten Dukung Usaha Lokal Via Pasar UMKM BUMN di Langsa Aceh
81	19 Juli 2022	Gelar *Life With* BSI Expo di Palembang, BSI Tawarkan Berbagai Promo
82	20 Juli 2022	BSI Sinergi dengan LPEI Dukung Layanan Ekspor
83	21 Juli 2022	Perkuat Geliat *Grassroot Economy*, BSI Resmikan UMKM *Centre* di Surabaya
84	22 Juli 2022	Dukung Pemulihan Pariwisata & Penguatan Ekonomi Umat, BSI Resmikan Masjid di Bromo
85	28 Juli 2022	BSI Targetkan Pembiayaan Tumbuh *Double* Digit dalam Gelaran *Life With* BSI Expo di Jakarta
86	4 Agustus 2022	BSI Perkuat Layanan untuk Jamaah Haji
87	7 Agustus 2022	Gencarkan Literasi, BSI Kenalkan Program 100% Kebaikan Tabungan Wadiah
88	10 Agustus 2022	BSI Gandeng PP Muhammadiyah untuk Perkuat Inklusi & Penetrasi Keuangan Syariah Nasional
89	14 Agustus 2022	BSI Kampanyekan Gerakan Kurangi Sampah Plastik di Ajang Mandiri Jogja Marathon
90	15 Agustus 2022	Pimpin Pasar Keuangan Syariah, BSI Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2022
91	18 Agustus 2022	BSI (BRIS) Akan *Rights Issue* Terbitkan 6 Miliar Saham Baru
92	19 Agustus 2022`	Kinerja Pembiayaan Emas Tumbuh Positif, BSI Perkuat Produk Cicil Emas
93	24 Agustus 2022	Melalui UMKM *Centre*, BSI Bina 1037 UMKM di 3 Provinsi
94	25 Agustus 2022	Ekonomi Nasional Terus Menggeliat, Perbankan Syariah Mainkan Peranan Penting
95	25 Agustus 2022	Semester I 2022, Laba Bersih BSI Naik 41,31%
96	31 Agustus 2022	Konsisten Kembangkan Layanan Digital, Qris BSI Sudah Bisa Digunakan di Thailand
97	5 September 2022	Hari Pelanggan Nasional, BSI Transformasi Digital untuk Bangun *Customer Engagement*
98	6 September 2022	Berkonsep *Green Building*, BSI Bangun Gedung Landmark Aceh
99	6 September 2022	Desa Binaan BSI di Meunasah Asan Aceh, Ekspor Perdana 60 Ton Bandeng ke Korsel & Jepang
100	6 September 2022	BSI Dorong Kesejahteraan Masyarakat Aceh Lewat KUR dan BSI Smart
101	7 September 2022	Pimpin Pembiayaan Rumah Syariah, BSI Raih Indonesia Property Award
102	9 September 2022	Terdepan dalam Keuangan Syariah, BSI Raih Dua Penghargaan di Islamic Finance Award 2022
103	12 September 2022	Optimalkan Layanan, BSI Buka Outlet Prioritas di Fatmawati
104	13 September 2022	Sehari Sebelum Penutupan, BSI Lampaui Target Penjualan SR017 Capai Rp 2,06 Triliun
105	14 September 2022	BSI Jalin Sinergi dengan UNJ, Tingkatkan Literasi dan Layanan di Kampus
106	15 September 2022	Unggul di Industri, BSI Dinobatkan Sebagai Bank Syariah Terbaik Versi Best Syariah 2022
107	16 September 2022	Pimpin Pasar Perbankan Syariah, BSI Kembali Sabet Gifa Market Leadership Award 2022
108	19 September 2022	Pembiayaan Pertanian Tembus Rp 12,6 Triliun, BSI Beri Akses Permodalan Distribusi Pupuk
109	20 September 2022	BSI Gandeng 2 PTN di Semarang dalam Upaya Bangun *Islamic Ecosystem* dari Kampus
110	21 September 2022	BSI & PBNU Bersinergi Jajaki Bangun *Islamic Ecosystem*
111	22 September 2022	BSI Jadi *Best Islamic* Bank di Indonesia Versi Asiamoney
112	22 September 2022	Biaya Dana BSI Lebih Rendah Ketimbang Rata-Rata Industri Perbankan
113	27 September 2022	BSI Raih Penghargaan pada Ajang Islamic Finance Summit 2022

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
114	23 September 2022	BSI dapat Persetujuan Terbitkan 6 Miliar Saham Baru Lewat *Rights Issue*
115	26 September 2022	BSI Kembangan Industri Makanan Minuman Halal Lewat Pembiayaan Tepat Guna & Tepat Sasaran
116	29 September 2022	Sukses Merger di Tengah Pandemi, Hery Gunardi Dinobatkan Sebagai Tokoh Transformasi Ekosistem Perbankan Syariah
117	3 Oktober 2022	BSI Mendukung Ekosistem Halal Melalui Sektor Muslim Fesyen
118	3 Oktober 2022	BSI Bidik Banten Sebagai Area Potensial Bisnis Griya
119	4 Oktober 2022	BSI dan BSI Maslahat Berikan Bantuan untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Malang
120	4 Oktober 2022	BSI Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani Aceh Via Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang
121	5 Oktober 2022	BSI Terus Dorong Aktivitas Digital Transaksi Via BSI Mobile Lebih Masif
122	6 Oktober 2022	Teken Kerjasama, ATM Tunai Saldo Linkaja Syariah Bisa Lewat ATM BSI
123	7 Oktober 2022	BSI Dukung Program Keumatan Melalui MUI
124	7 Oktober 2022	BSI Bersama 8 Bank Perkuat Pasar Uang Antar Bank Syariah
125	9 Oktober 2022	Komisaris Independen BSI Terima Penghargaan Sebagai Salah Satu Pemuda Inspiratif Indonesia
126	10 Oktober 2022	BSI Dukung Penguatan Global Halal Hub
127	11 Oktober 2022	BSI Gandeng Adhi Commuter Property Tingkatkan Layanan Relokasi Cabang di Kawasan Integrasi
128	13 Oktober 2022	Buka KCP di BEI, Strategi BSI untuk Permudah Masyarakat Dapatkan Akses Layanan dan Produk Syariah
129	13 Oktober 2022	Kembangkan *Islamic Ecosystem*, BSI Raih Penghargaan Sebagai Bank Syariah Terbaik
130	14 Oktober 2022	Terus Bertransformasi dan Perkuat Inklusi Perbankan Syariah, Buka Rekening Online BSI Bisa Via Aplikasi Fast Pay
131	19 Oktober 2022	Aceh Jadi Fokus BSI dalam Penyaluran Tapera Syariah
132	19 Oktober 2022	SOE International Conference, Transformasi Digital Jadi Kunci
133	21 Oktober 2022	BSI dan Kemenkeu Dorong Penguatan Literasi Keuangan Syariah
134	25 Oktober 2022	Kinerja Makin Solid, Laba BSI di Kuartal III Tumbuh 42%
135	27 Oktober 2022	Jaga Pembiayaan Sehat dan Suistain, BSI Raih ESG Disclosure Award 2022
136	31 Oktober 2022	Permudah Akses Pembiayaan Bagi Bisnis Mikro, BSI Luncurkan Portal Salam Digital
137	31 Oktober 2022	BSI Luncurkan Digitalisasi Tabungan Anak dalam Event BIK
138	1 November 2022	Percepat Penetrasi Digital Banking, Buka Rekening Online BSI Lewat Aplikasi Grab
139	1 November 2022	Kolaborasi BSI dan Pelindo Percepat Pertumbuhan Ekosistem Syariah
140	2 November 2022	Perkuat Bisnis Global, BSI Gandeng Riyadh Bank
141	7 November 2022	Percepat Proses Digitalisasi di Aceh, BSI Gandeng Perusahaan PLN
142	7 November 2022	BSI dan Pelni Kolaborasi Tingkatkan Efisiensi
143	7 November 2022	Sinergi BSI dan Kementerian ATR BPN Bantu Percepat Pengurusan SHT
144	7 November 2022	Wapres: Pemerintah Dukung BSI Masuk Top 10 Global Islamic Bank
145	10 November 2022	School Visit To BSI, Program Unggulan BSI Dekatkan Perbankan Syariah ke Siswa dan Santri
146	14 November 2022	Perkuat Layanan Syariah, BSI Siap Layani 1.052 Mitra Pertamina di Sumatera
147	16 November 2022	Dukung Transisi Energi Berkelanjutan, BSI Ajak Masyarakat Kurangi Sampah
148	17 November 2022	BSI Edukasi Mahasiswa UBB untuk Melek Perbankan Syariah
149	21 November 2022	Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, BSI Terus Genjot Transformasi Digital di Aceh
150	23 November 2022	BSI Optimalkan Layanan Gerak & Kerahkan Tim *Rescue* untuk Masyarakat Terkena Dampak di Cianjur
151	28 November 2022	Bank Syariah Indonesia Gandeng DJKN untuk Optimalisasi Lelang
152	29 November 2022	Percepat Penetrasi Bisnis Retail, BSI Luncurkan Fitur Top Up Gadai Emas di BSI Mobile
153	29 November 2022	Pembayaran PNBP Polri Kini Bisa Melalui BSI
154	29 November 2022	BSI Dorong 6 Penghargaan, Salah Satunya Sebagai Bank Teraktif dalam Praktik *Green Banking*
155	1 Desember 2022	BSI Berangkatkan Umroh 120 Guru, Dai, Relawan dan Tenaga Medis
156	2 Desember 2022	BSI Gandeng BPD untuk Dukung Pembangunan *Islamic Ecosystem*
157	7 Desember 2022	Perkuat & Mudahkan Akses Perbankan Syariah, BSI Buka KCP di Pelindo Tower
158	8 Desember 2022	BSI Dorong Desa Binaan di Bogor Jadi Desa Sentra Padi

No.	Tanggal	Judul Siaran Pers
159	8 Desember 2022	BSI dan UI Berkomitmen untuk Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah Diatas 10%
160	10 Desember 2022	Dukung Layanan Kesehatan Masyarakat, BSI Beri Bantuan Ambulans untuk Kampus UI
161	12 Desember 2022	Optimalisasi Layanan Syariah, BSI Buka Cabang di Grha Pertamina
162	13 Desember 2022	*Leadership* Kuat dan Solidaritas Tim Kunci Keberhasilan Merger BSI
163	13 Desember 2022	BSI & Kemenkeu Siapkan Program Penerima KUR Syariah Agar Naik Kelas
164	13 Desember 2022	Desa BSI, Gali Potensi & Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga
165	14 Desember 2022	Ukir Prestasi Lagi, BSI Dinobatkan Sebagai The Strongest Islamic Retail Bank oleh CIF
166	19 Desember 2022	Akselerasi Infrastruktur Telekomunikasi, BSI Pimpin Pembiayaan Sindikasi 2,5 Triliun untuk Mitratel
167	20 Desember 2022	Tingkatkan Akses Permodalan UMKM, BSI Ekspansi KUR Klaster
168	20 Desember 2022	BSI Borong 3 Penghargaan BPKH Banking Awards 2022
169	21 Desember 2022	Kenalkan Mina Wisata *Technopark*, Desa Binaan BSI di Yogyakarta
170	22 Desember 2022	Pacu Digitalisasi, BSI Genjot Pembiayaan Oto Via Digital
171	23 Desember 2022	Hadapi Moment Libur Akhir Tahun, BSI Siapkan Kas 15,57 Triliun
172	26 Desember 2022	Semakin Dipercaya Investor dalam & Luar Negeri, *Rights Issue* BSI *Oversubscribed* 1,4 Kali
173	28 Desember 2022	BSI Siap Salurkan Rp 1,2 Triliun KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera di Tahun 2023

Analyst Meeting

No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	Topik Pembahasan
1	Earning Call FY2021	02 Februari 2022	Zoom Meeting	- Macro Economy - Key Investment Thesis - Financial Highlight - BSI Growth Strategy - Financial Guidelines
2	Earning Call Q12022	28 April 2022	Zoom Meeting	- Key Investment Thesis - Financial Highlight - BSI Growth Strategy - Financial Guidelines
3	Earning Call 1H2022	25 Agustus 2022	Zoom Meeting	- Macro Economy - Financial Highlight - Digital Strategy - Islamic Ecosystem - Financial Guidelines
4	Earning Call 3Q2022	28 Oktober 2022	Zoom Meeting	- Macro Economy - The Merger Benefit - Financial Highlight - Digital Strategy - Islamic Ecosystem - Financial Guidelines

Transparansi Penyampaian Laporan

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
1	7 Januari 2022	02/016-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
2	7 Januari 2022	02/017-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
3	14 Januari 2022	02/086-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Per 31 Desember 2021
4	19 Januari 2022	02/088-3/CSG	BEI	Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa
5	28 Januari 2022	02/124-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Tahunan 2021 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
6	2 Februari 2022	02/156-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Efektif Operasional Kantor Perwakilan PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Dunia International Financial Center, Dubai, Uni Arab Emirates
7	7 Februari 2022	02/239-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Laporan Pengangkatan Komisaris Utama Independen dan Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk
8	7 Februari 2022	02/161-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
9	8 Februari 2022	02/162-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk
10	8 Februari 2022	02/166-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
11	18 Februari 2022	02/181-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Hasil Pemeringkatan Tahunan Sukuk
12	1 Maret 2022	02/207-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Keterbukaan Informasi Transaksi dan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi
13	1 Maret 2022	02/208-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
14	4 Maret 2022	02/214-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Permintaan Informasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik mengenai Lainnya
15	2 Maret 2022	02/366-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Audit
16	9 Maret 2022	02/217-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
17	9 Maret 2022	02/218-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
18	4 April 2022	02/684-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Perubahan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
19	6 April 2022	02/663-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
20	8 April 2022	02/762-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penjelasan atas Pemberitaan Media Masa
21	8 April 2022	02/298-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
22	8 April 2022	02/303-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
23	12 April 2022	02/769-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & OJK Pengawas Bank	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
24	20 April 2022	02/389-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Pengumuman RUPS
25	20 April 2022	02/389-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
26	26 April 2022	02/415-3/CSG	OJK Pengawas Bank	Laporan Pengangkatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk
27	27 April 2022	02/848-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021 dan Laporan Tahunan Entitas Induk
28	27 April 2022	02/850-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021
29	27 April 2022	02/858-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Penyampaian Laporan Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
30	28 April 2022	02/860-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & OJK Pengawas Bank	Penyampaian Perubahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
31	28 April 2022	02/859-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Laporan Keberlanjutan
32	28 April 2022	02/850-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Laporan Tahunan
33	28 April 2022	02/424-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
34	28 April 2022	02/415-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Perubahan Internal Audit
35	5 Mei 2022	02/426-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
36	5 Mei 2022	02/427-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS
37	9 Mei 2022	02/429-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
38	9 Mei 2022	02/430-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
39	24 Mei 2022	01/937-3/DIR-CSG	Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II B	Pemegang Saham yang Terdampak atas Masuknya Saham Seri A Dwiwarna Milik Negara di BSI
40	25 Mei 2022	01/937-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Permintaan penjelasan emiten dan perusahaan publik lainnya
41	31 Mei 2022	02/467-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi Dividen Tunai
42	31 Mei 2022	02/467-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
43	31 Mei 2022	02/960-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Penyampaian Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021
44	2 Juni 2022	02/471-3/CSG	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
45	9 Juni 2022	02/487-3/CSG	OJK & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
46	9 Juni 2022	02/488-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
47	16 Juni 2022	02/1067-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
48	20 Juni 2022	02/1066-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Audit Emiten
49	20 Juni 2022	02/1066-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi
50	23 Juni 2022	02/514-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal, OJK Pengawas Bank, BEI	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
51	27 Juni 2022	02/1102-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun Buku 2021 Oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
52	29 Juni 2022	01/569-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dalam Rangka Program MESOP Tahun 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
53	7 Juli 2022	02/583-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
54	5 Juli 2022	02/581-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
55	15 Juli 2022	02/617-3/CSG	BEI	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi
56	25 Juli 2022	02/633-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
57	28 Juli 2022	02/639-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Rencana Penyampaian Laporan Keuangan Kuartal II 2022 Diaudit
58	3 Agustus 2022	02/1265-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Audit
59	3 Agustus 2022	02/1265-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi
60	3 Agustus 2022	02/1266-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
61	9 Agustus 2022	02/1504-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Wakil Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk
62	9 Agustus 2022	02/1313-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & OJK Pengawas Bank	Penyampaian Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
63	5 Agustus 2022	02/667-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
64	5 Agustus 2022	02/666-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
65	16 Agustus 2022	02/719-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
66	16 Agustus 2022	02/719-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS
67	16 Agustus 2022	02/731-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
68	16 Agustus 2022	02/733-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD I)
69	29 Agustus 2022	02/746-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan Interim
70	31 Agustus 2022	02/797-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
71	01 September 2022	02/799-3/CSG	BEI	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan
72	01 September 2022	02/798-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan RUPS
73	12 September 2022	02/810-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
74	12 September 2022	02/811-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
75	12 September 2022	02/815-3/CSG	BEI	Penyampaian Materi Public Expose Tahunan
76	20 September 2022	02/836-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Pembelian Aset Tanah dan Bangunan
77	20 September 2022	02/834-3/CSG	BEI	Laporan Hasil Public Expose Tahunan
78	27 September 2022	02/856-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
79	27 September 2022	02/857-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
80	27 September 2022	02/847-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Persetujuan OJK atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk
81	28 September 2022	02/859-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Prospektus Ringkas Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I)
82	28 September 2022	02/861-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS
83	29 September 2022	02/864-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Prospektus Ringkas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I
84	3 Oktober 2022	02/862-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
85	7 Oktober 2022	02/875-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
86	7 Oktober 2022	02/876-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
87	11 Oktober 2022	02/1717-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Permintaan Penjelasan Emiten dan Perusahaan Publik Lainnya
88	21 Oktober 2022	02/1759-3/DIR CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
89	21 Oktober 2022	02/1759-3/DIR CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Perubahan Komite Audit
90	21 Oktober 2022	02/1760-3/DIR CSG	OJK Pengawas Bank	Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi
91	28 Oktober 2022	02/946-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Informasi Laporan Keuangan Interim
92	7 November 2022	02/976-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
93	7 November 2022	02/975-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
94	14 November 2022	02/993-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pemeringkatan Tahunan Sukuk Mudharabah Subordinasi 2016

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
95	18 November 2022	02/1875-3/DIR-CSG	OJK Pengawas Bank	Pemenuhan Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
96	6 Desember 2022	02/1082-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
97	7 Desember 2022	02/1096-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi HMETD
98	7 Desember 2022	02/1083-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal	Laporan Utang Valas
99	7 Desember 2022	02/1942-3/DIR-CSG	BEI	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Hasil PMHMETD I BSI kepada Para Pemegang Saham Perseroan
100	7 Desember 2022	02/1098-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Prospektus
101	8 Desember 2022	02/1102-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Prospektur PMHMETD I
102	8 Desember 2022	02/1101-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Tambahan dan/atau Perubahan Informasi Prospektus Ringkas PMHMETD I

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan Surat	Perihal
103	20 Desember 2022	02/1127-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Hasil Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dalam Rangka Program MESOP Tahun 2022 PT Bank Syariah Indonesia Tbk
104	29 Desember 2022	02/1163-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
105	29 Desember 2022	02/1162-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
106	29 Desember 2022	02/1164-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
107	30 Desember 2022	02/1168-3/CSG	OJK Pengawas Pasar Modal & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Informasi Ringkasan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI

Sesuai ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 20/2002, tindakan korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang/pihak lain melalui perbuatan melanggar hukum.

Gratifikasi merupakan salah satu tindakan yang dilarang yang dapat mengarahkan seseorang melakukan pelanggaran *Fraud* dan Korupsi. Untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memiliki ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi yang terus disosialisasikan di lingkungan organisasi Bank.

Dengan Implementasi pengendalian gratifikasi, maka diharapkan seluruh jajaran pegawai dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Membangun nilai-nilai *Good Corporate Governance* dan menanamkan *value integrity*.
b. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
c. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada Unit Pengendali Gratifikasi yang berada di bawah koordinasi Unit Kerja *Compliance*.

Prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa, fraud suap dan/atau gratifikasi

1. Jajaran Bank wajib melakukan penolakan atas gratifikasi pada kesempatan pertama yang terkait dengan jabatan penerima atau benturan kepentingan.
2. Apabila penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, maka penerima gratifikasi wajib mengembalikan penerimaan gratifikasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 jam sejak penerimaan.
3. Pengembalian tersebut di atas wajib disertai dengan bukti otentik pengembalian gratifikasi, antara lain berita acara serah terima pengembalian barang gratifikasi yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi atau bukti setoran/transfer jika penerimaan dalam bentuk uang.
4. Pelapor wajib mengisi formulir gratifikasi secara lengkap dan benar, serta melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi disertai formulir yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung melalui e-mail dengan alamat antibribery@bankbsi.co.id dan subjek "Pelaporan Gratifikasi" atau melalui aplikasi GRC Compas.
5. Penyampaian pelaporan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Pelapor.
6. Unit Pengendali Gratifikasi melakukan reviu atas pelaporan penerimaan gratifikasi dari Pelapor dan memutuskan jenis gratifikasi tersebut (menjadi kelolaan Bank atau dapat dimiliki oleh Pelapor) dengan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan penerimaan gratifikasi dan dokumen pendukung lengkap diterima.
7. Pelapor wajib mengambalikan barang/uang yang menjadi milik Bank kepada UPG paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keluarnya Surat Keputusan Penetapan Gratifikasi.

Program Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman organisasi Bank terhadap Pengendalian Gratifikasi sehingga tercipta budaya *Awareness Anti Fraud* yang mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi. Pada tahun 2022, program yang telah direalisasikan adalah:

1. Program *Risk Awareness* dan *Anti Fraud Campaign* kepada seluruh pegawai melalui Sosialisasi Online dan Offline, *e-mail blast*, *desktop* komputer, poster, info grafis, video, *social media* dan *monitoring* onsite. Rincian pelaksanaan kegiatannya adalah:
   - Sosialisasi konten/poster anti gratifikasi bekerja sama dengan Corporate Secretary & Communication Group (CSG) melalui *e-mail blast*, *whatsapp blast*, media sosial dan *website* perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal	Media
1	*Awareness* reminder (Poster terkait edukasi gratifikasi)	13 Februari 2022	*e-mail Blast*
2	Poster *Awareness* terkait Larangan Gratifikasi hari Raya Idul Fitri via Screen Monitor dan e-mail pegawai	18 April 2022	*E-mail Blast*, *Screen Monitor PC* Pegawai, *Website* BSI, *Instagram*, *Twitter*
3	*Awareness* "Gratifikasi bukan Rezeki"	30 Mei 2022	*Screen* Monitor dan *e-mail Blast* pegawai
4	*Awareness* Pengendalian Gratifikasi pembelajaran melalui Smile.bankbsi.co.id	24 Juni 2022	*e-mail Blast*
5	*Awareness* dalam bentuk Memo terkait himbauan untuk akses *E-Learning* Modul Gratifikasi	5 Juli 2022	*e-mail Blast*
6	*Awareness* Larangan Gratifikasi dalam rangka REMINDER HARI IDUL ADHA	08 Juli 2022	*Website* BSI
7	*Awareness* "Apa Yang dilakukan ketika saya menerima Gratifikasi"	15 & 27 Juli 2022	*e-mail Blast & Broadcast Message Whatsapp*
8	*Awareness* terkait Media Pelaporan Gratifikasi	28 Juli 2022	*E-mail Blast – Employee Care*
9	*Awareness* "Jujur itu Sebuah Kebaikan dan Jalan Menuju Surga"	31 Agustus 2022	*E-mail Blast – Employee Care*
10	*Awareness "SAY NO TO GRATIFICATION"*	23 Agustus 2022	*E-mail Blast – Employee Care*

No.	Kegiatan	Tanggal	Media
11	Poster " Media Pelaporan Gratifikasi" pada ruang terbuka Area Fatmawati dan Kantor Region V Jakarta 2	23 & 29 Agustus 2022	Poster
12	*Awareness* "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan"	30 September 2022	*Screen* Monitor dan *e-mail Blast* pegawai
13	Compliance *Awareness* mengenai 17 Negative List "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan"	26 September 2022	Memo dan Surat Internal BSI
14	*Awareness* mengenai "Larangan Penerimaan/Pemberian Hadiah dan Bingkisan Untuk Unit Kerja Lain Dalam Perjalanan Dinas"	01 September 2022	Memo dan Surat Internal BSI
15	*Awareness* "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, Oktober 2022 Vol.1 : Karangan Bunga"	18 & 19 Oktober 2022	*E-mail Blast – Employee Care*
16	*Awareness* "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, Oktober 2022 Vol.2 : Penerimaan Sesama Rekan Kerja Karena Kegiatan"	27 Oktober 2022	*E-mail Blast – Employee Care*
17	*Awareness* "Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan, Oktober 2022 Vol.3"	23 November 2022	*E-mail Blast – Employee Care*
18	*Awareness* terkait Larangan Pemberian Hadiah/Parsel/ Bingkisan kepada Seluruh Jajaran PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjelang Natal dan Tahun Baru 2023.	23 dan 28 Desember 2022	*E-mail Blast*, *Website* BSI, *Instagram*, *Twitter*

2. Sosialisasi Anti Gratifikasi *(Laa Risywah)* kepada seluruh pegawai Bank untuk mengimplementasikan *Code of Conduct* dan komitmen *Good Corporate Governance* (GCG) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Sosialisasi Gratifikasi melalui Tatap muka baik media Offline dan Online:
      - Pihak Internal
        - Forum diskusi seluruh pegawai RBC Seluruh Indonesia
        - Forum Diskusi Seluruh pegawai DCORD di Kantor Pusat
        - Forum Diskusi Seluruh Pegawai BSU, CF 1, CF 2, CBG, CRG, PFA, IBG
        - *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi pada RADIR Directorate Wholesale
        - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi seluruh pegawai RO X Makassar
        - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi seluruh pegawai pada Area Balikpapan, Area Depok, Area Bogor, Area Saharjo, Area Pondok Indah, Area Rawamangun, Area Kebon Jeruk, Area Tangerang Selatan, Area Kelapa Gading, Area Banten, Area Bekasi, dan Area Jakarta Fatmawati
        - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi seluruh pegawai TAD (SFE,CSE, SF) Seluruh Region
      - Pihak Eksternal
        - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi kepada rekanan Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, dan Pialang Saham sejabodetabek Cilser.
        - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi kepada Rekanan Notaris dan PPAT
        - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi kepada Rekanan KAP, KJPP, Advokat, Balai Lelang
        - Forum *Sharing Knowledge* Pengendalian Gratifikasi kepada Vendor kelolaan PFA Group
   b. Kunjungan (*Onsite*) ke Unit kerja dalam rangka *monitoring* atas sosialisasi yang dilakukan, dengan rincian sebagai berikut:
      - Kunjungan *Monitoring* ke RO IV Jakarta I, RO V Jakarta I, RO X Makassar
      - Kunjungan *Monitoring* ke Area Balikpapan, Area depok, Area Kelapa Gading, Area Saharjo, Area Bogor
      - Kunjungan *Monitoring* ke 37 Kantor Cabang BSI Seluruh Indonesia
      - Kunjungan *Monitoring* ke 20 Kantor Cabang Pembantu Seluruh Indonesia

Realisasi Kegiatan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, BSI telah melaksanakan sejumlah kegiatan berkenaan dengan penerapan kebijakan anti korupsi di lingkungan Bank. Rincian program/kegiatan serta realisasinya disajikan melalui tabel di bawah ini:

<table>
<tr><th>Program/Kegiatan</th><th>Realisasi/Hasil</th></tr>
<tr><td>Usulan Revisi atas Pakta Integritas tahun 2021 oleh Audit Investigation (IVA)</td><td>Penandatanganan Pakta Integritas tahun 2022 dengan format baru oleh seluruh pegawai organik PT Bank Syariah Indonesia Tbk bekerja sama dengan Human Capital Services (HCS) dimulai dari bulan November 2022</td></tr>
<tr><td>Sosialisasi dan pemasangan Poster Komitmen GCG di setiap Unit Kerja bekerja sama dengan Corporate Secretary Group (CSG) dan Distribution Strategy Group (DSG).</td><td>Seluruh Unit Kerja Jaringan baik Region Office, Area, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu telah memasang Poster Komitmen GCG pada area yang dapat dilihat oleh nasabah dan rekanan.</td></tr>
<tr><td>Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan</td><td>Standar ISO 37001:2016 telah diimplementasikan di ruang lingkup unit kerja:
1. Procurement Group Kantor Pusat khususnya Department Procurement & Policy, Planning & Control (PPC)
2. Procurement Management 1
3. Procurement Management 2
4. Procurement Management 3</td></tr>
<tr><td>Penanganan atas Laporan Gratifikasi</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Keterangan</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Penetapan Oleh unit Anti Bribery</td><td>23 Laporan</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Penetapan Oleh KPK</td><td>7 Laporan</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Tidak dapat ditindaklanjuti</td><td>3 Laporan</td></tr>
<tr><td>Total</td><td></td><td>33 Laporan</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

KODE ETIK

Di lingkungan Bank Syariah Indonesia, kode etik atau "*Code of Conduct*" merupakan pedoman internal Bank yang berisi tentang sistem, nilai, etika bisnis, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*. Kode etik menjadi standar etika dan perilaku yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta saat hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja.

Sasaran umum pedoman perilaku adalah menyusun suatu petunjuk agar setiap pelanggaran *code of conduct* dan etika bisnis oleh seluruh jajaran Bank dapat secara cepat terdeteksi. Industri perbankan merupakan bisnis yang berlandaskan asas saling percaya dan kepercayaan *public* serta dijalankan secara beretika dan bertanggung jawab.

Perilaku dan etika bisnis diharapkan dapat mencegah berkembangnya hubungan yang tidak wajar dengan para nasabah, atau antara sesama jajaran Bank. Ketentuan mendorong terwujudnya *Good Corporate Governance* yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi Bank.

Code of Conduct (Pedoman Perilaku)

a. Tujuan
   Penyusunan *Code of Conduct* bertujuan untuk memberikan pedoman perilaku secara syariah, profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi Jajaran Bank, dalam melakukan hubungan bisnis baik dengan nasabah/calon nasabah, rekanan/calon rekanan, rekan sekerja maupun *stakeholders* lainnya.
b. Fundamental BSI
   Dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*, jajaran Bank harus berlandaskan kepada fundamental Bank. Saat ini, fundamental dimaksud adalah The 7 (*Seven*) *Fundamentals of BSI* yang terdiri atas: *Spiritual Foundation*, *Vision*, *Mission*, *Shared Value*, *Employee Value Proposition*, *Leadership Characteristic*, *and Tagline* yang diatur dalam ketentuan internal BSI.
c. Budaya Perusahaan
   Budaya perusahaan merupakan nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terwujudnya visi, misi, dan fondasi spiritual perusahaan. Nilai-nilai perusahaan dapat diartikan sebagai *shared values*, sedangkan perilaku dan tindakan adalah aktivitas dan interaksi dengan *stakeholders* yang sesuai dengan *shared values* tersebut.

Adapun hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

1. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
   Pelaksanaan terhadap benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
   a. Jajaran Bank wajib menghindarkan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang wajib dihindari.
   b. Jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan/atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus lainnya untuk:
      - dirinya sendiri;
      - keluarga/kerabat sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal;
      - perusahaan dimana yang bersangkutan dan/atau keluarganya mempunyai kepentingan.
   c. Hubungan keluarga/kerabat dengan Jajaran Bank sampai derajat kedua baik vertikal maupun horizontal.
   d. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif Bank termasuk keluarga/kerabat sampai dengan derajat kedua dengan Pejabat Eksekutif Bank, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai regulasi yang berlaku yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan internal Bank.
   e. Jajaran Bank harus menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan/atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
   f. Jajaran Bank tidak diperkenankan mengambil atau memanfaatkan Fasilitas Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga, ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
   g. Jajaran Bank hanya dapat melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derivatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri diluar jam kerja apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan *insider trading* dari regulator, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Larangan *Risywah*
   Jajaran Bank harus mengambil langkah tegas atas setiap bentuk pemberian hadiah atau bingkisan dari nasabah, rekanan atau pihak ketiga lainnya.
3. Kerahasiaan
   Jajaran Bank harus menjaga kerahasiaan data Bank, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penyalahgunaan Jabatan
   Jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan informasi yang dimilikinya dari kegiatan bisnis Bank.
5. Perilaku *Insiders*
   Insiders yang memiliki informasi rahasia tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau keluarganya atau pihak ketiga lainnya.
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
   Bank adalah industri yang sarat dengan peraturan (*highly regulated industry*) sehingga akurasi data yang disajikan sesuai.
7. Integritas Sistem Perbankan
   Jajaran Bank harus memastikan dirinya tidak terlibat tindakan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya yang dapat menggangu sistem perbankan, seperti pembiayaan fiktif, penggelapan dana nasabah, penipuan transaksi, pemalsuan data dan sebagainya.
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
   Bank harus memastikan seluruh rekening atas nama Jajaran Bank pada Bank wajar dan sesuai dengan segala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Bank. Unit Kerja *Human Capital* memastikan penggunaan rekening tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan Bank.
9. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
   Berkaitan dengan pelaksanaan *Code of Conduct* Bank, Jajaran Bank wajib membuat pernyataan tahunan dengan jujur dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai formulir yang telah ditentukan (lampiran).
10. Pengawasan, Pelaksanaan dan Pemutakhiran
    Direktur/SEVP Human Capital bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* tanpa kecuali oleh Jajaran Bank.
11. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
    Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini, maka pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pokok-pokok Kode Etik

Kode etik yang diberlakukan di lingkungan BSI, antara lain mengatur tentang:

1. Benturan Kepentingan
2. Larangan *Risywah*
3. Kerahasiaan
4. Penyalahgunaan Jabatan
5. Perilaku *Insiders*
6. Integrasi dan Akurasi Data Bank
7. Integritas Sistem Perbankan
8. Pengelolaan Rekening Pegawai
9. Pernyataan Tahunan
10. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan
11. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran

Penyebarluasan Kode Etik

Kode etik Bank telah diatur dan dituangkan dalam ketentuan internal Bank, seperti Peraturan Perusahaan (PP) PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023 (PP BSI) serta ketentuan turunannya. PP BSI dapat diakses oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank melalui jaringan intranet (sebagai salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas dan dukungan atas program *sustainable finance*).

Penyebarluasan atau sosialisasi kode etik bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BSI serta pelaksanaannya. Dengan demikian, seluruh jajaran manajemen dan pegawai taat dan patuh terhadap ketentuan tersebut. Sosialisasi dilaksanakan oleh manajemen dan unit kerja terkait.

Program sosialisasi yang telah berjalan secara berkala adalah "Taujih Pekanan". Program tersebut menjadi sarana bagi manajemen Bank dalam menyampaikan nilai-nilai perusahaan, yakni AKHLAK sebagai *core values* bagi pegawai BSI. Melalui kegiatan ini, pegawai BSI diharapkan selalu berada di koridor yang benar, sejalan dengan kode etik Bank. Kode etik juga disebarkan dalam bentuk lain, seperti infografis dan surat.

Pernyataan bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Komitmen penerapan kode etik, terutama dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas secara tahunan. Penandatanganan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta pejabat eksekutif Bank sebagai bentuk preventif atas upaya pengendalian gratifikasi dan/atau perbuatan yang melanggar kode etik BSI, dan/atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pembinaan disiplin kepada pegawai yang tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan/peraturan perusahaan, antara lain melalui sanksi yang berjenjang:

1. Sanksi jenis pelanggaran disiplin ringan:
   a. Surat Teguran Satu (ST 1)
   b. Surat Teguran Dua (ST 2)
2. Sanksi jenis pelanggaran disiplin sedang:
   a. Surat Peringatan Pertama (SP 1)
   b. Surat Peringatan Dua (SP 2)
   c. Surat Peringatan Tiga (SP 3)
3. Sanksi jenis pelanggaran disiplin berat:
   a. Surat Peringatan Pertama dan Terakhir (SPT)
   b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Bank selalu menindaklanjuti peristiwa yang termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank, seperti pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tindak lanjut ditetapkan dari hasil investigasi yang merupakan peristiwa yang dilakukan oleh pegawai yang melanggar kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menindak pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank melakukannya secara tegas dan obyektif. Adapun jenis kasus atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai terdiri dari 2 (dua) jenis kasus, yaitu kasus audit dan kasus non-audit.

Adapun data pelanggaran kode etik baik dalam ketentuan internal Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sanksi	Kategori Sanksi	Jumlah Sanksi	
			2021	2022
1	SPNS	Ringan	3	8
2	ST 1		7	37
3	ST 2	Sedang	29	17
4	SP 1		32	118
5	SP 1 Setara SP 2		0	27
6	SP 1 Setara SP 3		0	11
7	SP 2		25	2
8	SP 3		11	0
9	SPT	Berat	0	20
10	PHK		62	68
Total			**169**	**308**

PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Whistleblowing system merupakan sistem pelaporan yang memungkinkan setiap pihak untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan pendeteksian dini tindakan penyimpangan di Bank.

Kewajiban Bank dalam menerima dan menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan adalah:

a. Wajib menerima laporan dugaan tindakan penyimpangan dari pihak internal atau eksternal dan dari pelapor yang mencantumkan identitas maupun tidak.
b. Wajib menyelesaikan laporan dugaan tindakan penyimpangan yang telah menyertakan bukti-bukti permulaan yang cukup.
c. Wajib menyediakan informasi status proses penyelesaian laporan dugaan tindakan penyimpangan pada aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau *fraud*.

Prinsip Pelaporan

Penyampaian laporan dugaan tindakan penyimpangan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan informasi awal, yaitu:
   a. Bentuk penyimpangan/permasalahan yang dilaporkan;
   b. Pihak-pihak yang terlibat;
   c. Lokasi/Unit Kerja terjadinya penyimpangan;
   d. Perkiraan waktu terjadinya penyimpangan;
   e. Perkiraan nilai kerugian (jika ada); dan
   f. Kronologis penyimpangan.

2. Untuk mempercepat proses audit, Pelapor menyertakan bukti-bukti awal dugaan tindakan penyimpangan, yaitu:
   a. Bukti tertulis, antara lain dokumen pembiayaan, surat-surat, akta notariil.
   b. Keterangan tertulis saksi.
   c. Keterangan tertulis pelaku.
   d. Bukti petunjuk, antara lain dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, CCTV, rekaman suara, SMS, dll.
   e. Bukti-bukti dugaan tindakan penyimpangan yang diserahkan Pelapor tidak diperoleh dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk memudahkan komunikasi, Pelapor dapat memberikan informasi mengenai identitas diri, yaitu:
   a. Nama Pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim).
   b. Nomor telepon atau alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.

Hak dan Kewajiban Pelaporan

1. Hak Pelapor
   a. Melaporkan dugaan tindakan penyimpangan atau *fraud* yang diketahui melalui sarana pelaporan yang disediakan.
   b. Memberikan informasi atau dokumen-dokumen tanpa tekanan.
   c. Mendapat jaminan atas kerahasiaan identitas pribadi.
   d. Memberikan kesaksian tanpa harus bertatap muka dengan Terlapor pada saat pemeriksaan perkara.
   e. Memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya melalui aplikasi pelaporan tindakan penyimpangan atau fraud.
2. Kewajiban Pelapor
   a. Menyampaikan informasi sesuai fakta.
   b. Beritikad baik.
   c. Kooperatif.
   d. Bertanggung jawab atas laporan yang tidak sesuai fakta atau bersifat fitnah.
3. Saluran Pelaporan
   Bank menyediakan beberapa saluran pelaporan penyimpangan yaitu:
   a. Whatsapp/telepon/SMS: 08119146146
   b. E-mail: pengaduan@bankbsi.co.id & antibribery@bankbsi.co.id
   c. Aplikasi GRC Compas

Perlindungan Bank tidak berlaku bila laporan Pelapor berdasarkan audit terbukti tidak benar atau memfitnah atau Pelapor merupakan pihak yang terlibat dalam tindakan penyimpangan dan/atau *fraud* untuk permasalahan yang sama atau berbeda.

Lingkup Tindakan Penyimpangan

Lingkup tindakan penyimpangan yang dilaporkan dalam *Whistleblowing System* adalah:

1. Tindakan penyimpangan yang tergolong *fraud*, antara lain:
   a. Kecurangan
   b. Penipuan
   c. Penggelapan aset.
   d. Pembocoran informasi
   e. Tindak Pidana Perbankan
   f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
2. Tindakan pembiaran yang tergolong *fraud*, antara lain:
   a. Pegawai Bank sengaja memberikan tanda tangan atas laporan atau dokumen yang diketahui rekayasa.
   b. Pegawai Bank sengaja memberikan persetujuan pembiayaan yang diketahui merupakan fiktif.
   c. Pegawai Bank sengaja melakukan otorisasi atau *override* atas suatu transaksi atau pencarian yang diketahui fiktif.
3. Tindakan penyimpangan khusus antara lain:
   a. Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain: penggunaan narkotika/zat adiktif/psikotropika, minuman keras, pencucian uang, judi.
   b. Tindakan asusila/amoral, seperti penyimpangan seksual, perselingkuhan, pelecehan seksual, dll.
   c. Pelanggaran *code of conduct* (benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, perilaku *insiders*).
   d. Pelanggaran norma sosial.
   e. Penyalahgunaan asset perusahaan.
   f. Tindakan lain yang dapat menimbulkan risiko materi maupun non materi.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi media pelaporan *whistleblowing system* dan Anti Gratifikasi kepada seluruh pegawai melalui *Desktop* computer pegawai, *website* Bank, penyampaian pada kegiatan *training*, *sharing session*, dan Taujih Pekanan, serta pemberitahuan kepada nasabah, mitra/rekanan Bank dan masyarakat.

Jumlah Pengaduan

Pengaduan atas *Whistleblowing system* per 30 Desember 2022 sebanyak 127 pengaduan dengan komposisi pengaduan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah
1	Pembiayaan	34
2	Operasional	81
3	*Code Of Conduct*	12
Total		**127**

Sanksi/Tindak Lanjut Pengaduan

Selama tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan atas pengaduan dari *Whistleblowing system* yang diterima sampai dengan 30 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pengaduan	Status			
	Sudah Ditindaklanjuti	Sedang Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Layak DItindaklanjuti
127	15	14	7	91

Jumlah Penyimpangan (Internal *Fraud*) dan Upaya Penyelesaiannya

Internal *fraud* adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank Syariah Indonesia maupun pegawai tidak tetap (*outsourcing*) untuk kepentingan pribadi yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Sepanjang tahun 2022, jumlah internal *fraud* yang terjadi sebanyak 14 kasus.

Perkembangan penanganan internal *fraud* yang terjadi pada tahun 2022 diuraikan melalui tabel di bawah ini:

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total *fraud*	-	-	6	14	1	-
Telah diselesaikan	-	-	6	14	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	2	-	-

Adapun upaya penyelesaian kejadian *fraud* yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan segera memberikan sanksi kepada para pelaku, pegawai terlibat dan terkait. Para pelaku juga diminta untuk mengembalikan kerugian Bank sebagai bentuk *recovery*. Untuk menimbulkan efek jera, Bank Syariah Indonesia juga telah memproses para pelaku ke jalur hukum. Mitigasi yang dilakukan Bank guna mencegah terulangnya kejadian *fraud* dengan perbaikan *design control* dan penguatan internal *control* agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak dari Mandiri Group aktif ikut serta dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKT) yang dibentuk Entitas Utama (Bank Mandiri) dan ditetapkan keanggotaannya sesuai ketentuan berdasarkan SK Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. KEP. DIR/136/2015 tentang Perubahan Keanggotaan Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terwakili dari beberapa Perusahaan Anak sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank Syariah Indonesia sebagai perusahaan anak telah mengikuti arahan sesuai rekomendasi dari rapat Tata Kelola Terintegrasi. Komite TKT memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya persamaan persepsi antara dan seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri terkait peningkatan kualitas tata kelola yang baik dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara seluruh Perusahaan Anak dengan Bank Mandiri untuk menciptakan nilai tambah bagi Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Bank Syariah Indonesia mengirimkan Perwakilan Komite TKT yaitu Bapak M. Arief Rosyid Hasan dan Bapak KH. DR. Mohammad Hidayat sebagai sebagai anggota Komite TKT sesuai dengan SK Nomor: 01/053-KEP/DIR tanggal 19 Maret 2021.

Adapun hubungan Entitas Utama dengan Perusahaan Anak dilakukan melalui forum-forum diskusi melalui:
1. *Integrated Risk Committee* (IRC)
   IRC adalah Komite Eksekutif yang bertanggung jawab dalam penyusunan antara lain kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
   a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab IRC
      Komite IRC memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain mengenai:
      - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko secara terintegrasi, dan system informasi Manajemen Risiko Terintegrasi;
      - Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
      - Penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
   b. Rapat IRC
      Rapat IRC diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite dengan hak suara (*Voting Member*) atau atas permintaan Direksi atau atas usulan tertulis dari unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.
2. Board Forum
   Bank Syariah Indonesia sebagai Perusahaan Anak (PA) secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai *board forum* yang diadakan oleh Entitas Utama (Bank Mandiri) baik yang dilaksanakan secara Triwulan dan Semesteran.

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi

Aspek dan hasil penilaian Tata Kelola Terintegrasi BSI tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

No	Aspek	Hasil	
		Semester I	Semester II
1	Direksi	1.33	1.22
2	Dewan Komisaris	1.50	1.40
3	Dewan Pengawas Syariah	1.00	1.00
4	Komite Tata Kelola Terintegrasi	1.00	1.00
5	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT)	1.50	1.25
6	Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT)	1.00	1.00
7	Penerapan Manajemen Risko Terintegrasi	1.40	1.40
8	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	1.33	1.33
9	Benturan Kepentingan	1.00	1.00
10	Kebijakan Remunerasi	1.00	1.00
	Total	**1.21**	**1.16**

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintergasi

Semester 1 tahun 2022

Peringkat	Definisi Peringkat
1(1.21)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
1. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS; dan 2. Jumlah, komposisi dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.	1. Terdapat 3 (tiga) orang anggota Direksi dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test)* di OJK.
Kriteria: Proses Tata Kelola	
Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu : a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yag baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. b) Seluruh organ dan infrasruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	Penyelesaian penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS).
Kriteria: Hasil Tata Kelola	
1. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu 2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah 3. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik	Masih terdapat denda dan temuan yang perlu ditindaklanjuti

Semester 2 tahun 2022

Peringkat	Definisi Peringkat
1(1.16)	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
1. Jumlah Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan rangkap jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS; dan 2. Jumlah, komposisi dan persyaratan yang ditetapkan bagi seluruh organ dan infrastruktur penunjang/pendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memadai untuk mendukung penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik.	Pada posisi tanggal 31 Desember 2022 terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi dan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test)* di OJK.
Kriteria: Proses Tata Kelola	

Faktor Positif	Area Pengembangan
1. Seperti halnya aspek struktur tata kelola, hampir seluruh kriteria penilaian pada aspek proses tata kelola merupakan faktor positif bagi implementasi penerapan tata kelola Perusahaan, yaitu : 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Kerja yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yag baik, termasuk penyelenggaraan Rapat Direksi, Dewan Komisaris dan DPS serta Rapat Gabungan yang dilaksanakan senantiasa terdokumentasi dengan baik dan menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penguatan implementasi tata kelola perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan. 3. Seluruh organ dan infrasruktur penunjang/ pendukung penerapan tata kelola perusahaan telah berfungsi dengan baik dalam mengawal implementasi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	Penyelesaian penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS).
Kriteria: Hasil Tata Kelola	
1. Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada induk telah dilakukan secara tepat waktu 2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan kepada Direksi Perusahaan, yang meliputi pengawasan penerapan prinsip – prinsip Tata kelola Perusahaan dan prinsip – prinsip Syariah 3. Satuan kerja Audit Intern telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang secara lengkap, rutin dan tepat waktu yang didokumentasikan dengan baik	Masih terdapat denda dan temuan yang perlu ditindaklanjuti

PENDAPATAN NON-HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Pelaporan terkait dengan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Berikut laporan penggunaan pendapatan dan penggunaan dana sosial/kebajikan Bank Syariah Indonesia tahun 2022.

Rekapitulasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Uraian	2022	2021	Perubahan	
			Rp	%
Sumber dana kebajikan	89,902	72.606	17.296	24
Infak dan sedekah	73,857	50.280	23.577	47
Denda	12,877	14.329	(1.452)	(10)
Pendapatan non-halal	3,168	7.898	(4.730)	(60)
Sumbangan/hibah	-	99	(99)	(100)
Penggunaan dana kebajikan				
Sumbangan	(108,831)	(59.529)	(49.302)	(83)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(18,929)	13.077	(32.006)	(245)
Saldo awal dana kebajikan	25,977	12.900	13.077	101
Saldo akhir dana kebajikan	7,048	25.977	(18.929)	(73)

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG KEPADA KARYAWAN DAN/ ATAU MANAJEMEN

BSI memiliki program *Employee Stock Option Program* (ESOP) adalah program pemberian saham Bank kepada pegawai terpilih sebagai salah satu bentuk apresiasi serta program retensi kepada pegawai.

Untuk Manajemen, BSI memiliki program *Management Stock Option Plan* adalah skema kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen perusahaan yang umumnya digunakan sebagai apresiasi terhadap kinerja atau langkah untuk mendorong kinerja manajemen perusahaan.

BUY BACK SAHAM DAN *BUYBACK* OBLIGASI

Sepanjang tahun 2022, Bank melakukan *buy back* saham maupun obligasi yang telah diterbitkan Bank. Merujuk pada SE BI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan *buy back shares* dan *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Bank Syariah Indonesia telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga lainnya sesuai aturan regulasi. Selain itu, Bank telah memenuhi kewajibannya untuk mempublikasikan laporan kepada *stakeholders* berdasarkan standar akuntansi yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

TRANSAKSI MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan manajemen BSI yang menimbulkan kerugian pada Bank. Sementara upaya yang dilakukan oleh Bank untuk mencegah terjadinya benturang kepentingan, antara lain melalui:

A. *e-Poster*
   Berikut beberapa e-poster yang di-*blast* ke segenap Karyawan Bank untuk sosialisasi terkait benturan kepentingan.
B. Pakta Integritas
   Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan dengan cara memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dikalangan pegawai maka seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank wajib mengisi pernyataan tahunan (*annual disclosure*) terkait bentuan kepentingan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pakta yang dinyatakan setiap tahun itu berkaitan erat dengan dokumen kepegawaian. Saat ini, penyelenggaraan *annual disclosure* dikelola oleh unit kerja *Human Capital* dan *annual disclosure* tersebut telah diintegrasikan dengan aplikasi sistem kepegawaian Bank.
C. *E-mail Blast*
   Sepanjang tahun 2022, Bank tidak melakukan buyback saham maupun obligasi yang telah diterbitkan Bank. Merujuk pada SE BI No.12/13/DPbS tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 30 April 2010 yang dimaksud dengan buy back shares dan buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSI telah secara rutin melaksanakan *self-assessment* pelaksanaan GCG. Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan kajian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan regulator.

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di lingkungan BSI dilaksanakan setiap semester, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember. Hasil *self assessment* GCG dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5.

Pelaksana Penilaian

Penilaian penerapan GCG dilaksanakan melalui *self assessment* yang dilaksanakan oleh Compliance Group.

Kriteria Penilaian

Pelaksanaan *self assessment* terhaap penerapan GCG mengacu pada Surat Edaran OJK yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure, governance process* dan *governance outcome*. Penilaian ketiga aspek *governance* tersebut dilakukan terhadap:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
5. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.
6. Penanganan benturan kepentingan.
7. Penerapan fungsi kepatuhan.
8. Penerapan fungsi audit intern.
9. Penerapan fungsi audit ekstern.
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Hasil Penilaian

Secara keseluruhan, hasil penilaian GCG untuk semester 1 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik). Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank	1. Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris yang telah efektif melebihi jumlah anggota Direksi yang telah efektif, yaitu 8 (delapan) orang Dewan Komisaris dan 7 (tujuh) orang Direksi. 2. Dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPST tanggal 27 Mei 2022 masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu : a. Nizar Ali (Komisaris) b. Mohamad Nasir (Komisaris Independen). 3. Tiga orang anggota Direksi yang diangkat dalam RUPST tanggal 27 Mei 2022 masih dalam proses persiapan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu : a. Bob Tyasika Ananta (Wakil Direktur Utama) b. Zaidan Novari (Direktur Wholesale Transaction Banking) c. Moh. Adib (Direktur Treasury & International Banking) 4. Komposisi Komisaris Independen pada keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi masih belum menjadi mayoritas.
Kriteria: Proses Tata Kelola	
Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*	Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui penyusunan alat Uji Kepatuhan (*Sharia Checklist Activity*), *launching sharia module digital*, pelaksanaan *sharia combined assurance* dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi.
Kriteria: Hasil Tata Kelola	
Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Juni 2022 pada tabel berikut :	Masih terdapat sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya. Meski masih terdapat sanksi denda, namun sudah secara signifikan menurun dari sisi nilai dendanya.

Pos	Jun-22
Laba Perusahaan	2.125
Jumlah Asset	277.408
OHC	4.494
Pembiayaan	191.294
Dana Pihak Ketiga	244.664
a. Giro	38.869
b. Tabungan	106.532
c. Deposito	99.263
CASA	145.400

Sementara secara non finansial selama Semester I Tahun 2022 Bank mendapatkan total 50 (lima puluh) penghargaan diantaranya BAZNAS Award 2022, 5th Infobank SLE Award, The Best CSR in MSMS Program-Indonesia CSR Excellence, Top CSR 2022 dan The World Best Bank-Forbes

Sementara itu, hasil penilaian GCG untuk semester 2 tahun 2022 mendapatkan skor 2 (baik) stabil dibanding penilaian Semester I tahun 2022. Faktor positif yang mendukung serta peluang pengembangan ke depan, diuraikan melalui tabel di bawah ini.

Faktor Positif	Area Pengembangan
Kriteria: Struktur Tata Kelola	
Secara umum Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang lengkap dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mendukung proses pelaksanaan prinsip GCG di setiap lini kerja dan operasional dan bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Kedua orang Direksi yang diangkat di RUPST telah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dan efektif dalam jabatannya.	1. Pada posisi 31 Desember 2022 masih terdapat dua orang anggota Dewan Komisaris yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2022 yang masih dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu : a. Mohamad Nasir (Komisaris Independen). Bpk. Mohamad Nasir pada periode Semester 2 tahun 2022 belum efektif sebagai angggota Dewan Komisaris namun telah mendapatkan Surat Keputusan Lulus dari OJK atas hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan, berdasarkan: 1) Surat OJK No.SR-1/PB.101/2023 Tanggal 5 Januari 2023 Perihal Keputusan atas Pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk ; dan 2) Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No.KEP-3/D.03/2023 Tanggal 3 Januari 2022 perihal Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Mohamad Nasir Selaku Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk. b. Nizar Ali (Komisaris) Sehubungan dengan pengunduran diri Wakomut (merangkap Komisaris Independen) pada bulan Agustus 2022 yang telah disetujui pada pelaksanaan RUPSLB Bank tanggal 23 September 2022 yang belum diikuti dengan pengangkatan pengganti Wakomut, sehingga menyebabkan komposisi dari Komisaris Independen BSI menjadi kurang dari 50%. Dengan demikian pengajuan fit & proper Test untuk Bpk Nizar Ali (Komisaris) untuk sementara belum dapat dilakukan, karena sesuai ketentuan yang berlaku pengajuan *fit & proper test* mensyaratkan pemenuhan komposisi Komisaris Independen minimal sebesar 50%. Dalam pelaksanaan RUPS mendatang akan diagendakan pengajuan usulan penambahan Komisaris Independen untuk memenuhi komposisi minimal 50% Komisaris Independen. Pada posisi tanggal 31 Desember 2022 masih terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2022 dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) OJK, yaitu Bpk. Zaidan Novari (Direktur Wholesale Transaction Banking). Bpk. Zaidan Novari saat ini telah mengikuti wawancara Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK pada tanggal 9 Januari 2023 dan saat ini masih menunggu hasil wawancara *fit & proper test* dari OJK
Kriteria: Proses Tata Kelola	
Secara umum pelaksanaan implementasi GCG telah sesuai dengan ketentuan yang tercermin dari pemenuhan serta pelaksanaan kewajiban Bank kepada pihak regulator serta pemenuhan pelaksanaan kewajiban kepada segenap *stakeholders*. Pada tahun 2022 BSI juga telah berinisiatif menerapkan *standard* ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk ruang lingkup *Anti Money Laundering* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	Masih terdapat pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah, meski seluruh produk bank telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan Opini DPS serta seluruh SOP terkait disusun melalui mekanisme yang memadai. Terhadap masih terdapatnya kondisi ini, Bank telah melakukan program peningkatan budaya kepatuhan syariah melalui penyusunan alat Uji Kepatuhan (*Sharia Checklist Activity*), *launching sharia module digital*, pelaksanaan *sharia combined assurance* dan terus melakukan edukasi terkait implementasi prinsip Syariah dalam setiap produk dan aktivitas Bank ke seluruh jenjang organisasi

Faktor Positif	Area Pengembangan
Kriteria: Hasil Tata Kelola	
Outcome penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia dapat dilihat dari pencapaian-pencapaian Bank baik secara finansial maupun non finansial. Secara finansial, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator utama kinerja keuangan Bank sampai dengan bulan Desember 2022 pada tabel berikut :	Masih terdapat sanksi denda dari regulator yang memerlukan perhatian dari manajemen untuk melaksanakan mitigasi agar tidak terjadi lagi pada periode selanjutnya

Pos	Desember 2022
Laba Perusahaan	4,260
Jumlah Asset	305,727
OHC	9,884
Pembiayaan	207,705
Dana Pihak Ketiga	261,491
a. Giro	44,521
b. Tabungan	116,484
c. Deposito	100,486
CASA	161,005

Sementara secara non finansial selama Semester 2 Tahun 2022 Bank mendapatkan total 68 (enam puluh delapan) penghargaan diantaranya :
1) Indonesia Best Bank Awards 2022 (The Prominence Sharia Financial Solutions).
2) 27th Infobank Awards 2022 (Kinerja Sangat Bagus Kelompok KBMI 3).
3) Best Islamic Finance Award 2022, Alpha South East Asia (Best Islamic Finance Retail).
4) Good Corporate Gorvernance Award (CGPI) 2022 (Indonesia The Most Trusted Companies).
5) Penghargaan Kementerian Keuangan (Penghargaan Dealer Utama SBSN Terbaik Tahun 2021).

Selain itu Bank telah berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan untuk ruang lingkup *Anti Money Laundering* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme setelah proses audit eksternal pada tanggal 22 Desember 2022

Penilaian Penerapan GCG oleh Pihak Eksternal

***Corporate Governance Perception Index* (CGPI)**

Pada tahun 2022, BSI mengikuti penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan GCG untuk melakukan penilaian kualitas *corporate governance* suatu perusahaan. CGPI diikuti oleh perusahaan publik (*emiten*), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya.

Program CGPI dilaksanakan dengan tujuan mengajak seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam ekosistem bisnis, yang terdiri dari Pemerintah, Pelaku Bisnis, Masyarakat Bisnis dan Pihak Pendukung Bisnis melakukan praktik terbaik GCG dalam dunia bisnis dan perekonomian guna mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya memperhatikan proses penciptaan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Dengan demikian, program CGPI diharapkan mampu memotivasi dunia bisnis untuk melaksanakan konsep *Corporate Governance* (CG) dan menumbuhkan partisipasi masyarakat luas agar secara bersama-sama aktif dalam mengembangkan dan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu program CGPI juga bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas GCG melalui perbaikan yang berkesinambungan sehingga program CGPI dapat menjadi sarana yang strategis dalam menyusun *database*, melakukan pemetaan (*mapping*) kondisi CG di Indonesia, dan menjadi *benchmark* implementasi GCG pada Perusahaan Publik, BUMN dan Perusahaan Swasta di Indonesia. Bagi pihak Perusahaan peserta Program CGPI dapat memberikan manfaat yang antara lain menjadi landasan dalam pengelolaan perusahaan melalui tinjauan terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hasil CGPI menunjukkan perilaku kesungguhan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan peserta CGPI antara lain pada gambar berikut;

Prosedur Pelaksanaan Penilaian

Kriteria yang Digunakan
Dalam CGPI 2021 dengan tema Membangun Ketangguhan Perusahaan dalam kerangka GCG menggunakan aspek penilaian sebagai berikut:

Aspek Struktur Tata Kelola, dimaknakan sebagai **Kelengkapan organ, struktur dan infrastruktur** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etika dan bermartabat.

Aspek Proses Tata Kelola, dimaknakan sebagai **Sistem dan Mekanisme operasional yang efektif dan efisien** untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Aspek Hasil Tata Kelola, dimaknakan sebagai Kualitas capaian dan manfaat yang berhasil guna dan berdaya guna untuk membangun sistem ketangguhan perusahaan terhadap dinamika perubahan sesuai tata nilai, prinsip dan aturan tata kelola dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

Pihak yang Melakukan Penilaian
IICG – The Indonesian Institute for Corporate Governance

Hasil Penilaian

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

90,00
(Sangat Terpercaya)

Struktur Tata Kelola (25,22)
Proses Tata Kelola (34,35)
Hasil Tata Kelola (30,43)

ASEAN Corporate Governance Scorecard
Dalam rangka melanjutkan proses penyempurnaan Tata Kelola serta wujud komitmen dan konsistensi atas penerapannya, Bank Syariah Indonesia melakukan penyelarasan praktik Tata Kelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) serta telah disepakati oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF), yang disebut *ASEAN Corporate Governance* (CG) *Scorecard*.

Kriteria yang Digunakan
ASEAN CG Scorecard digunakan untuk menilai praktik Tata Kelola Perusahaan terbuka di negara ASEAN. Penilaian didasarkan pada informasi publik yang tersedia antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan *Audited*, *Sustainability Report*, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, *Website* Perusahaan serta informasi-informasi publik lainnya. Adapun komponen penilaian *ASEAN CG Scorecard* adalah sebagai berikut:

a. Hak-hak Pemegang Saham
b. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham
c. Peran Pemangku Kepentingan
d. Pengungkapan dan Transparansi
e. Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Pihak yang Melakukan Penilaian
Penilaian dilakukan oleh ACMF melalui *Domestic Ranking Body* (DRB) yang ditunjuk oleh regulator masing-masing negara sebagai perwakilan di setiap negara peserta. DRB melakukan penilaian di skala nasional, untuk selanjutnya dilakukan *peer review* oleh DRB negara anggota ASEAN yang lain. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk PT RSM Indonesia Konsultan (RSM) sebagai DRB untuk melakukan penilaian di Indonesia.

Hasil Penilaian
Bank Syariah Indonesia termasuk dalam *Top* 50 *Big Capitalization Public Listed Company* dalam 13th IICD *Corporate Governance Conference and Award* 2022, di mana penilaian yang digunakan berdasarkan ASEAN *CG Scorecard* (ACGS)

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, berikut adalah rincian penerapannya di BSI:

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham			
Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi.	Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan maupun RUPS Luar Biasa, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melaksanakan proses pemungutan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata tertib RUPS, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik melalu melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pada RUPS Tahunan Tahun 2022, mekanisme pemungutan suara dilakukan dengan cara pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya, yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan. Pada RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan tahun 2022 dilakukan secara elektronik sehingga pemungutan suara dilakukan pula secara elektronik (*e-voting*) bagi pemegang saham yang tidak hadir fisik atau yang memberikan kuasanya secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh pihak independen yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. Dengan demikian independensi dan kepentingan pemegang saham dapat terjaga dalam proses pemungutan suara tersebut. Perseroan telah membuat Tata Tertib RUPS yang dapat diunduh dalam *website* Perseroan bersamaan saat Pemanggilan RUPS hingga pelaksanaan RUPS, tersedia pula bagi Pemegang saham saat RUPS melalui QR *code* yang disediakan dan pokok-pokok tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.	Terpenuhi (*comply*)
	1.2 Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Pada RUPS Tahunan 2022 seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BSI hadir.	Terpenuhi (*comply*)
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selama tahun 2021, baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS telah diunggah pada Situs Web BSI, Web BEI, dan eASY KSEI.	Terpenuhi (*comply*)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	BSI telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary & Communication pada Bab V. Komunikasi yang dilakukan oleh BSI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS, Paparan Publik (*Public Expose*), Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*), Laporan Keuangan, dan Laporan Tahunan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, BSI juga menyediakan informasi yang dapat diakses melalui web BSI. Pada *web* tersebut terdapat pula informasi alamat kantor pusat dan kantor cabang BSI, alamat e-mail, akses media sosial serta *contact center* sebagai sarana bagi pemegang saham maupun investor agar dapat melakukan komunikasi dengan Bank secara mudah.	Terpenuhi (*comply*)
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	BSI senantiasa mengelola informasi dalam situs web sehingga pemegang saham atau investor Perusahaan dapat memperoleh informasi terbaru terkait BSI.	Terpenuhi (*comply*)
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	BSI telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Per 31 Desember 2022 jumlah anggota Dewan Komisaris BSI berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris Independen dan 5 (lima) orang Komisaris non Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BSI tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Terpenuhi (*comply*)
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Dewan Komisaris BSI memiliki keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis BSI. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Dewan Komisaris pada *web* Perseroan.	Terpenuhi (*comply*)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Prinsip 4: Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang diatur dalam Tata Tertib Dewan Komisaris.	Terpenuhi (*comply*)
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (*comply*)
	4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (*comply*)
	4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	Kebijakan suksesi telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi BSI.	Terpenuhi (*comply*)
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi			
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	BSI telah memenuhi ketentuan pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2021, jumlah Direksi BSI sebanyak 10 (sepuluh) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BSI.	Terpenuhi (*comply*)
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Direksi BSI memiliki latar belakang keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut dapat dilihat dari profil masing-masing Direksi pada web Perseroan. Keberagaman dan jumlah Direksi tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah terbaik bagi Bank, sesuai dengan kebutuhan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank.	Terpenuhi (*comply*)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BSI adalah Direktur Finance & Strategy yaitu Bapak Ade Cahyo Nugroho dengan pendidikan, pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan hal tersebut dapat dilihat pada profil beliau pada web Perseroan.	Terpenuhi (*comply*)
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Direksi telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri (*self-assessment*). Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme self-assessment untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi sebagaimana diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (*comply*)
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (*comply*)
	6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Direksi telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata Kelola Perusahaan BSI.	Terpenuhi (*comply*)
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan			
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	Untuk mencegah terjadinya *insider trading*, BSI telah memiliki kebijakan yang mengatur hal tersebut di dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Corporate Secretary & Communication.	Terpenuhi (comply)
	7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.	BSI telah memiliki kebijakan anti *fraud*. Kebijakan anti *fraud* BSI merupakan landasan pokok penerapan strategi anti *fraud* melalui 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud*, yaitu: 1. Pencegahan *Fraud*; 2. Deteksi *Fraud*; 3. Investigasi, Pelaporan dan Pengenaan Sanksi *Fraud*; dan 4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*. Kebijakan Anti *Fraud* BSI dapat diakses pada web BSI. BSI juga memiliki Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifikasi.	Terpenuhi (*comply*)
	7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	BSI telah memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu SPO *Procurement* dan PTO *Procurement* pengadaan barang dan jasa.	Terpenuhi (*comply*)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
	7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur diatur dalam Kebijakan, Standar Prosedur, dan Manual Produk Bank Syariah Indonesia, dengan pokok-pokok sebagai berikut: Bank Syariah Indonesia berkomitmen memenuhi hak-hak Nasabah dan memastikan bahwa apa yang diperjanjikan Bank kepada Nasabah dapat terpenuhi. Transparansi informasi mengenai produk dan jasa diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan. Dalam setiap pemasaran produk dan jasa layanan Bank, Hak-hak Nasabah menjadi perhatian penting yang meliputi: 1. Hak untuk mendapatkan penjelasan dari Bank mengenai istilah, frasa, dan/atau kalimat yang mudah dimengerti mengenai produk dan layanan Bank. 2. Hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai produk dan jasa yang diterbitkan Bank maupun produk dan jasa pihak lain yang dipasarkan melalui Bank. 3. Hak untuk mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan, penambahan dan atau pengurangan yang dilakukan pada fitur produk dan jasa layanan Bank maupun pihak lain yang dipasarkan melalui Bank. 4. Hak untuk mengetahui karakteristik produk dan jasa Bank atau pihak lain secara memadai terutama mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya serta perhitungan nisbah/bagi hasil yang melekat pada produk dan jasa tersebut; serta Hak untuk mengetahui jaminan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Bank.	Terpenuhi (*comply*)
	7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *system whistleblowing*.	BSI telah memiliki kebijakan *whistleblowing system* yang merujuk pada Kebijakan Tata Kelola Perusahaan & SPO Internal Audit BSI dan telah diunggah dalam web BSI (www.bankbsi.co.id)	Terpenuhi (*comply*)
	7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	BSI telah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi, yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi & Nominasi dan kebijakan terkait remunerasi karyawan.	Terpenuhi (*comply*)

Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan di Bank	Realisasi
Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	BSI selalu mengelola Web Perseroan seoptimal mungkin sehingga informasi yang diperoleh pemegang saham atau investor atau publik merupakan informasi yang terbaru dan akurat. Selain Situs web, BSI juga memanfaatkan teknologi seperti SMS Banking dan Mobile Banking. Memanfaatkan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Twitter untuk media keterbukaan Informasi.	Terpenuhi (*comply*)
	8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	BSI telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi (*comply*)

07

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

"Pada tahun 2022, total pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp51,15 triliun"

Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank") menyampaikan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam buku terpisah. Laporan TJSL tersebut telah mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Adapun yang ditampilkan pada bagian ini merupakan "Ikhtisar Keberlanjutan" yang dikutip dari buku "Laporan Keberlanjutan" yang dibuat terpisah.

ASPEK EKONOMI

Rp4,26 triliun
Laba bersih tahun 2022, naik 40,7% dari tahun sebelumnya

Rp207,7 triliun
Total pembiayaan

Rp41,91 triliun
Pembiayaan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau 24,70% dari total pembiayaan

17,78 Juta
Total nasabah

99%
Pemasok BSI adalah pemasok dalam negeri

ASPEK LINGKUNGAN

5.155.191 KWh
Total energi listrik

97.672 liter
Total pemakaian BBM

4.385,65 Ton CO2-eq
Total emisi yang dihasilkan dari energi listrik dan BBM

100%
Lampu LED digunakan di seluruh kantor BSI

2.376,84 Kg
Total sampah botol plastik yang dikumpulkan Collection Point pada program kolaborasi dengan PlasticPay, membantu mereduksi jejak karbon sebesar 9,26 juta gram CO2-eq

33.500
Total penanaman pohon yang dilakukan tahun 2022 di berbagai lokasi

ASPEK SOSIAL

4,57%
Tingkat turnover karyawan

2.274.326 Jam
total jam pelatihan sepanjang tahun 2022 dengan rata-rata jam pelatihan per karyawan mencapai 122,40 jam per karyawan per tahun.

Rp41,82 triliun
Penyaluran dana pembiayaan ke pelaku UMKM, atau 20,19% dari total pembiayaan

1.517 UMKM
UMKM binaan mencakup 3 UMKM Center di 3 provinsi yang terdiri dari Aceh (1.030 UMKM), Yogyakarta (302 UMKM), dan Surabaya (185 UMKM)

147.556
Total penerima manfaat dari BSI Maslahat yang terdiri dari 145.962 penerima individu dan 1.594 penerima lembaga

Rp187,57 miliar
Total pencairan kepada penerima manfaat BSI Maslahat

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

08

Laporan Keuangan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Laporan Keuangan
Pada tanggal dan untuk tahun yang Berakhir
31 Desember 2022

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hery Gunardi
   Alamat kantor : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
   Alamat rumah : Jl. Taman Mpu Sendok no. 31 & 33, kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021 - 3040 5999
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Ade Cahyo Nugroho
   Alamat kantor : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
   Alamat rumah : Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
   Nomor telepon : 021 - 3040 5999
   Jabatan : Direktur Keuangan dan Strategi

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

We, the undersigned:

Name : Hery Gunardi
Office address : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
Domiciled address : Jl. Taman Mpu Sendok no. 31 & 33, kel. Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telephone number : 021 - 3040 5999
Title : *President Director*

Name : Ade Cahyo Nugroho
Office address : Gedung The Tower Jl Gatot Subroto No. 27
Domiciled address : Jl. Madrasah Al Husna No. 37 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan
Telephone number : 021 - 3040 5999
Title : *Finance and Strategy Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank");*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Bank's financial statements have been fully and correctly disclosed;*
   b. *The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*
4. *We are responsible for the Bank's internal control systems.*

The statement has been made truthfully.

Jakarta, 30 Januari/*January* 2023

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of Board of Directors;*

Hery Gunardi
Direktur Utama/
President Director

METERAI TEMPEL
EAEDAKX260977826

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Keuangan dan Strategi/
Finance and Strategy Director

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of reconciliation of income and revenue sharing, statement of sources and distribution of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audits of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan di bawah ini.

1. **Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan**

   Lihat Catatan 2f (Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif), 3a (Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan), 9 (Piutang), 10 (Pinjaman *qardh*), 11 (Pembiayaan *mudharabah*), dan 12 (Pembiayaan *musyarakah*) atas laporan keuangan.

   Pada tanggal 31 Desember 2022, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan (terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*) adalah sebesar Rp9.198 miliar. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* ditentukan oleh Bank berdasarkan kerangka *Incurred Loss* sesuai PSAK No. 102 "Akuntansi *Murabahah*". Untuk piutang *non-murabahah*, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan, Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku dan kebijakan akuntansi Bank pada Catatan 2f atas laporan keuangan.

   Kami fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat bruto atas piutang, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan yang mewakili 67% dari jumlah aset Bank, dan nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas piutang, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan yang signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. ***Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing***

   Refer to Note 2f (Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets), 3a (Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing), 9 (Receivables), 10 (Funds of qardh), 11 (Mudharabah financing), and 12 (Musyarakah financing) to the financial statements.

   As at 31 December 2022, the allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh and financing (which consists of mudharabah and musyarakah financing) of the Bank amounted to Rp9,198 billion. The allowance for impairment losses of murabahah receivables was determined by the Bank based on the Incurred Loss framework under SFAS No. 102 "Accounting of Murabahah". For non-murabahah receivables, funds of qardh and financing, the Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from the uncollectible amount of earning assets as stipulated in the applicable SFAS and the Bank's accounting policies in Note 2f to the financial statements.

   We focused on this area due to the size of the gross carrying value of receivables, funds of qardh and financing, which represented 67% of the total assets of the Bank, and the significant amount of allowance for impairment losses provided against receivables, funds of qardh and financing to the Bank's financial statements. In addition, determining allowance for impairment losses involves significant management judgement.

Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Untuk piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan bermasalah dan tidak bermasalah yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter risiko dengan menggunakan parameter-parameter utama yaitu *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD"), dan *Days Past Due* ("DPD"). Untuk piutang *murabahah*, parameter-parameter utama yang digunakan adalah PD dan LGD, sedangkan untuk piutang *non-murabahah*, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan, parameter utama yang digunakan adalah DPD. Untuk piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan yang bermasalah, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari piutang, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan.

The Bank calculates the allowance for impairment losses for both performing and non-performing receivables, funds of qardh and financing. For non-performing and performing receivables, funds of qardh and financing which are not considered individually significant, the Bank assesses its collective allowance for impairment losses by using the risk parameter modelling approach that incorporates key parameters such as Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), and Days Past Due ("DPD"). For murabahah receivables, the key parameters used are PD and LGD, while for non-murabahah receivables, funds of qardh and financing, the key parameter used is DPD. For non-performing receivables, funds of qardh and financing, which are considered individually significant, the Bank assesses individual allowances for impairment losses by estimating the expected cash flows obtained from the receivables, funds of qardh and financing.

Pertimbangan manajemen yang signifikan dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai meliputi:

- Mengembangkan model penilaian kolektif yang tepat untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai. Model yang dikembangkan secara inheren kompleks dan melibatkan pertimbangan manajemen dalam menyusun model tersebut;
- Mengidentifikasi piutang, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan; dan
- Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model cadangan kerugian penurunan nilai seperti proyeksi arus kas masa depan yang diharapkan, dan penyesuaian *overlay* penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai, mengingat ketidakpastian ekonomi yang timbul sebagai dampak dari COVID-19.

The significant management judgements in determining the allowance for impairment losses include the following:

- *Developing appropriate collective assessment models to calculate the allowance for impairment losses. The developed model is inherently complex and involves management's judgement in developing the model;*
- *Identifying receivables, funds of qardh and financing that have experienced a significant increase in credit risk; and*
- *The assumptions used in the allowance for impairment losses models such as projected future cash flows and adjustments to the overlay allowance for impairment losses made, given the economic uncertainty that has arisen as a result of COVID-19.*

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit berikut ini atas hal audit utama tersebut:

- Kami melakukan pemahaman dan menguji pengendalian yang relevan atas identifikasi piutang, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan atau menunjukkan bukti objektif penurunan nilai.

- Kami memeriksa sampel atas piutang, pinjaman *qardh,* dan pembiayaan yang diidentifikasi oleh Bank memiliki peningkatan risiko kredit, pernah direstrukturisasi atau debitur di industri berisiko tinggi yang terkena dampak COVID-19, dan membuat penilaian independen kami apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan atau terdapat bukti objektif penurunan nilai dan membandingkan hasilnya dengan penilaian manajemen.

- Ketika bukti objektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan melakukan pengecekan baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai dan mempertimbangkan bukti eksternal jika tersedia. Berdasarkan sampel, kami membandingkan jadwal pembayaran kembali dan *effective rate of return* yang digunakan pada perhitungan dengan informasi yang tertera pada perjanjian piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan.

- Kami menilai metodologi dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan model cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menilai PD dan LGD terhadap persyaratan PSAK No. 102, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan sebagai basis untuk penentuan tingkat PD dan LGD, dengan melibatkan spesialis Teknologi Informasi ("TI") kami.

- Kami menilai asumsi yang digunakan atas *overlay* manajemen dan melakukan perhitungan matematis ulang atas keakuratan perhitungan *overlay*.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- *We performed understanding and tested the relevant controls over the identification of the receivables, funds of qardh and financing that have experienced a significant increase in credit risk or demonstrated objective evidence of impairment.*
- *We examined a sample of the receivables, funds of qardh and financing identified by the Bank as having increased credit risk, have been restructured or debtors in high-risk industries impacted by COVID-19, and formed our independent assessment as to whether there was a significant increase in credit risk or any objective evidence of impairment and compared the results with management's assessment.*

- *When objective evidence of impairment was identified by the Bank and an impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of the impairment allowance by checking both the amount and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation and considering external evidence where available. On a sample basis, we compared the schedule of repayment and the effective rate of return used in the calculation with the information as stipulated in the agreements over the receivables, funds of qardh and financing.*

- *We assessed the methodology and significant assumptions used in determining the allowance for impairment losses model. We assessed the PD and LGD against the requirements of SFAS No. 102, which involved (i) evaluating the model and methodology used in quantitative calculation; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used as the basis to determine the PD and LGD rates, with the involvement of our Information Technology ("IT") specialists.*

- *We assessed the assumptions used for the management overlay and performed a mathematical recalculation of the accuracy of the overlay calculation.*

- Kami memeriksa keakuratan cadangan kerugian penurunan nilai, dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilai yang dinilai secara individual berdasarkan sampel. Kami juga melibatkan spesialis TI kami untuk melakukan pengujian tertentu atas cadangan kerugian penurunan nilai, seperti perhitungan kembali cadangan kerugian penurunan nilai kolektif secara independen. Kami memeriksa keandalan rincian data piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai dengan menguji kelengkapan dan akurasi data.

- *We checked the accuracy of the allowance for impairment losses, by recalculating the collective impairment assessment for the entire portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis. We also involved our IT specialists in performing certain testing over the allowance for impairment losses, such as independently recalculating the collective allowance for impairment losses. We checked the reliability of the receivables, funds of qardh and financing listing data used to calculate the allowance of impairment losses by testing the completeness and accuracy of data.*

2. Pengoperasian dan pengendalian atas sistem teknologi informasi (TI) pelaporan keuangan

Bank sangat bergantung pada infrastruktur TI, sistem dan pengendalian untuk kegiatan operasional sehari-hari dan proses pelaporan keuangan dari bisnis Bank. Lingkungan TI Bank dianggap kompleks dengan mempertimbangkan jumlah sistem pelaporan keuangan utama dan integrasi antar sistem. Oleh karena itu, kami menganggap pengoperasian dan pengendalian atas sistem TI pelaporan keuangan Bank sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami melibatkan spesialis TI dalam memahami lingkungan TI dan pengendalian TI yang mendukung proses pelaporan keuangan. Kami menilai efektivitas desain, implementasi, dan pengoperasian pengendalian atas integritas sistem yang relevan.

Kami mengevaluasi dan menilai hal-hal berikut:

1. Pengendalian manajemen perubahan: Proses dan pengendalian yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan melakukan otorisasi perubahan pada fungsionalitas dan konfigurasi dalam sistem;
2. Pengendalian atas keamanan akses pengguna: Pengendalian akses yang dirancang untuk memberlakukan pemisahan tugas, mengatur penggunaan akun dengan hak akses istimewa dan data hanya diubah melalui mekanisme yang terotorisasi;

2. Operation and controls of financial reporting Information Technology (IT) systems

The Bank is heavily reliant on its IT infrastructure, systems and controls for its daily operations and the financial reporting processes of its business. The IT environment of the Bank is considered complex due to the number of key financial reporting systems and the interfaces between systems. Given these factors, we consider the operation and controls of the financial reporting IT systems of the Bank to be a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

We involved IT specialists to understand the IT environment and IT controls supporting the financial reporting process. We assessed the effectiveness of the design, implementation and operation of the controls over the integrity of the relevant systems.

We evaluated and assessed the following:

1. *Change management controls: The processes and controls used to develop, test and authorise changes to the functionality and configurations within systems;*
2. *User access security controls: The access controls designed to enforce segregation of duties, govern the use of high privileged accounts and the data is only changed through authorised means;*

3. Pengendalian atas operasional TI: Pengendalian atas operasional yang mengidentifikasi dan mengelola masalah operasi TI yang timbul; dan
4. Pengendalian pengembangan sistem: Pengendalian atas pengembangan, konfigurasi dan implementasi dari sistem baru atau yang sudah ada.

Kami menguji pengendalian utama yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, seperti perhitungan otomatis di sistem, pemrosesan transaksi, pembuatan laporan oleh sistem, dan perpindahan data antar sistem. Kami melakukan inspeksi atas konfigurasi sistem yang relevan dan menguji hasil keluaran sistem berdasarkan sampel.

3. IT operation related controls: The controls over operations that identify and manage IT operation issues that arise; and

4. System development controls: The controls relating to the development, configuration and implementation of new or existing systems.

We evaluated relevant IT dependent controls that supported the financial reporting process, which included automated system calculations, transaction processing, generation of reports by systems and the data interfaces between systems. We inspected the relevant system configurations and tested system outputs on a sample basis.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than*

penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate to them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated to those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless laws or regulations preclude public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

JAKARTA,
30 Januari/*January* 2023

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
Izin Akuntan Publik/*Licence of Public Accountant* No. AP.0222

Bank Syariah Indonesia
00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022

FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan	1 - 4	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	6	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7 - 8	*Statement of Cash Flows*
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9	*Statement of Reconciliation of Income and Revenue Sharing*
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10	*Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds*
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11	*Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds*
Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 148	*Notes to the Financial Statements*

****

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
ASET				***ASSETS***
KAS	4	4,951,469	4,119,903	***CASH***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	5	31,778,458	20,563,580	***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA***
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	6,42			***CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS***
Pihak ketiga		2,340,977	1,389,347	*Third parties*
Pihak berelasi		150,515	469,442	*Related parties*
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain		2,491,492	1,858,789	*Total current accounts and placements with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(15,575)	(17,238)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		2,475,917	1,841,551	*Net*
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	7,42			***INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES***
Pihak ketiga		9,343,718	29,166,103	*Third parties*
Pihak berelasi		48,508,187	38,431,042	*Related parties*
Jumlah investasi pada surat berharga		57,851,905	67,597,145	*Total investments in marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(10,634)	(18,075)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		57,841,271	67,579,070	*Net*
TAGIHAN AKSEPTASI	8,42			***ACCEPTANCE RECEIVABLES***
Pihak ketiga		374,791	53,823	*Third parties*
Pihak berelasi		106,612	107,672	*Related parties*
Jumlah tagihan akseptasi		481,403	161,495	*Total acceptance receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,814)	(1,615)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		476,589	159,880	*Net*
PIUTANG	9,42			***RECEIVABLES***
Murabahah				*Murabahah*
Pihak ketiga		124,648,183	101,184,932	*Third parties*
Pihak berelasi		225,173	500,628	*Related parties*
Jumlah *murabahah*		124,873,356	101,685,560	*Total murabahah*
Istishna				*Istishna*
Pihak ketiga		132	359	*Third parties*
Ijarah				*Ijarah*
Pihak ketiga		13,278	101,570	*Third parties*
Jumlah piutang		124,886,766	101,787,489	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,184,787)	(3,450,506)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		120,701,979	98,336,983	*Net*
PINJAMAN *QARDH*	10,42			***FUNDS OF QARDH***
Pihak ketiga		8,000,432	8,133,403	*Third parties*
Pihak berelasi		1,701,177	1,285,828	*Related parties*
Jumlah pinjaman *qardh*		9,701,609	9,419,231	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(834,596)	(337,831)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		8,867,013	9,081,400	*Net*
Dipindahkan		227,092,696	201,682,367	*Carried forward*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
ASET (lanjutan)				***ASSETS** (continued)*
Pindahan		227,092,696	201,682,367	*Brought forward*
PEMBIAYAAN				***FINANCING***
Mudharabah	11,42			*Mudharabah*
Pihak ketiga		816,175	1,154,595	*Third parties*
Pihak berelasi		225,222	473,842	*Related parties*
Jumlah *mudharabah*		1,041,397	1,628,437	*Total mudharabah*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(39,440)	(36,123)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		1,001,957	1,592,314	*Net*
Musyarakah	12,42			*Musyarakah*
Pihak ketiga		48,707,593	37,198,108	*Third parties*
Pihak berelasi		21,882,918	20,356,328	*Related parties*
Jumlah *musyarakah*		70,590,511	57,554,436	*Total musyarakah*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,139,565)	(3,651,313)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		66,450,946	53,903,123	*Net*
Jumlah pembiayaan		71,631,908	59,182,873	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(4,179,005)	(3,687,436)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		67,452,903	55,495,437	*Net*
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH	13	1,484,573	901,565	***ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET***
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	14	5,654,698	4,055,953	***FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET***
ASET PAJAK TANGGUHAN	21c	1,675,103	1,445,324	***DEFERRED TAX ASSETS***
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	15	2,367,465	1,708,435	***OTHER ASSETS - NET***
JUMLAH ASET		305,727,438	265,289,081	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS SEGERA	16,42			***OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY***
Pihak ketiga		885,175	539,143	*Third parties*
Pihak berelasi		124,327	69,411	*Related parties*
		1,009,502	608,554	
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	17	192,775	158,478	***UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING***
SIMPANAN *WADIAH*				***WADIAH DEPOSITS***
Giro *wadiah*	18,42			*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		19,387,696	19,756,951	*Third parties*
Pihak berelasi		2,410,156	1,333,744	*Related parties*
		21,797,852	21,090,695	
Tabungan *wadiah*	19,42			*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		44,201,658	36,146,019	*Third parties*
Pihak berelasi		12,747	11,176	*Related parties*
		44,214,405	36,157,195	
Jumlah simpanan *wadiah*		66,012,257	57,247,890	*Total wadiah deposits*
SIMPANAN DARI BANK LAIN	20,42			***DEPOSITS FROM OTHER BANKS***
Giro *wadiah*				*Wadiah demand deposits*
Pihak ketiga		140,089	109,121	*Third parties*
Pihak berelasi		2,299	1,737	*Related parties*
		142,388	110,858	
Tabungan *wadiah*				*Wadiah savings deposits*
Pihak ketiga		1,309	5,080	*Third parties*
Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank ("SIMA")				*Interbank mudharabah investment certificate ("SIMA")*
Pihak ketiga		1,475,000	-	*Third parties*
Pihak berelasi		600,000	-	*Related parties*
		2,075,000	-	
Jumlah simpanan dari bank lain		2,218,697	115,938	*Total deposits from other banks*
LIABILITAS AKSEPTASI	8,42			***ACCEPTANCE LIABILITIES***
Pihak ketiga		401,061	76,027	*Third parties*
Pihak berelasi		80,342	85,468	*Related parties*
Jumlah liabilitas akseptasi		481,403	161,495	*Total acceptance liabilities*
UTANG PAJAK	21a	667,485	504,078	***TAXES PAYABLE***
LIABILITAS IMBALAN KERJA	40,42	689,018	836,491	***EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES***
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	39d	28,873	17,194	***ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES***
LIABILITAS LAIN-LAIN	22	2,355,781	2,236,358	***OTHER LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		73,655,791	61,886,476	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY*** *(continued)*
DANA *SYIRKAH* TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Giro *mudharabah*	23,42			*Mudharabah demand deposits*
Pihak ketiga		9,012,699	9,126,027	*Third parties*
Pihak berelasi		13,742,269	4,192,600	*Related parties*
		22,754,968	13,318,627	
Tabungan *mudharabah*	24,42			*Mudharabah savings deposits*
Pihak ketiga		72,811,278	64,810,191	*Third parties*
Pihak berelasi		86,074	292,300	*Related parties*
		72,897,352	65,102,491	
Deposito *mudharabah*	25,42			*Mudharabah time deposits*
Pihak ketiga		82,623,832	91,699,966	*Third parties*
Pihak berelasi		18,136,510	6,892,587	*Related parties*
		100,760,342	98,592,553	
Jumlah giro, tabungan dan deposito *mudharabah*		196,412,662	177,013,671	*Total mudharabah demand deposits, savings and time deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	26,42	1,375,000	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	27	778,375	-	*Mudharabah term financing*
JUMLAH DANA *SYIRKAH* TEMPORER		198,566,037	178,388,671	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.129.260.138 saham (31 Desember 2021: 41.129.307.343) saham	28	23,064,630	20,564,654	*Share capital - Rp500 (full amount) par value per share* *Authorised share capital - 80,000,000,000 shares* *Issued and fully paid-up capital - 46,129,260,138 shares (31 December 2021: 41,129,307,343) shares*
Tambahan modal disetor	28	(3,929,100)	(6,366,776)	*Additional paid-in capital*
Keuntungan revaluasi aset tetap		444,530	444,530	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak		268,904	140,271	*Remeasurement of defined benefit plan - net of tax*
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		(55,477)	22,263	*Unrealised (loss)/gain on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		1,384,677	779,036	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		12,327,446	9,429,956	*Unappropriated*
JUMLAH EKUITAS		33,505,610	25,013,934	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA *SYIRKAH* TEMPORER DAN EKUITAS		305,727,438	265,289,081	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI *MUDHARIB*				***REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB***
Pendapatan dari jual beli	29	11,354,885	10,184,236	*Income from sales and purchases*
Pendapatan dari bagi hasil	30	4,864,264	4,455,685	*Income from profit sharing*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih	31	122,221	75,219	*Income from ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya	32	3,281,495	3,093,292	*Other main operating income*
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	33	(4,032,169)	(4,378,807)	***THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN***
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		15,590,696	13,429,625	***BANK'S SHARE IN PROFIT***
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	34	3,701,111	3,012,246	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	35	(4,948,942)	(4,491,775)	*Salaries and benefits*
Umum dan administrasi	36	(4,856,436)	(3,970,211)	*General and administrative*
Bonus *wadiah*		(11,180)	(120,238)	*Wadiah bonus*
Lain-lain		(78,778)	(200,549)	*Others*
		(9,895,336)	(8,782,773)	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih	37	(3,748,797)	(3,551,249)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
LABA USAHA		5,647,674	4,107,849	***INCOME FROM OPERATION***
PENDAPATAN/(BEBAN) NON-USAHA - BERSIH		8,534	(45,641)	***NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET***
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK		5,656,208	4,062,208	***INCOME BEFORE ZAKAT AND TAX EXPENSE***
ZAKAT		(141,405)	(101,684)	***ZAKAT***
BEBAN PAJAK	21b	(1,254,621)	(932,319)	***TAX EXPENSE***
LABA BERSIH		4,260,182	3,028,205	***NET INCOME***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Keuntungan revaluasi aset tetap		-	119,719	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	40	164,914	64,695	*Remeasurement of employee benefit liabilities*
Pajak penghasilan terkait		(36,281)	(14,233)	*Related income tax*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will be reclassified to profit or loss:*
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(77,740)	19,410	*Unrealised (loss)/gain on securities measured at fair value through other comprehensive income*
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		50,893	189,591	*Total other comprehensive income net of tax*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		4,311,075	3,217,796	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah penuh)	38	102.54	73.69	***BASIC EARNINGS PER SHARE (full Rupiah)***
LABA PER SAHAM DILUSIAN (Rupiah penuh)	38	102.54	73.66	***DILUTED EARNINGS PER SHARE (full Rupiah)***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid in capital*	Ekuitas *merging entities*/ *Merging entities equity*	Keuntungan revaluasi aset tetap/ *Gain on revaluation of fixed assets*	Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak/ *Remeasurement of defined benefit plan - net of tax*	(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain /*Unrealised (loss)/gain on securities measured at fair value through other comprehensive income*	Saldo laba/*Retained earnings*		Ekuitas/ *Equity*	
								Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 1 Januari 2021		3,142,019	-	10,903,586	395,725	53,998	-	597,804	6,650,013	21,743,145	***Balance as at 1 January 2021***
Laba bersih		-	-	67,030	-	-	-	-	2,961,175	3,028,205	*Net income*
Penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		-	-	32,250	48,805	86,273	22,263	-	-	189,591	*Other comprehensive income net of tax*
Penambahan modal saham	28	49,049	3,237	-	-	-	-	-	-	52,286	*Additional share capital*
Opsi saham		-	-	707	-	-	-	-	-	707	*Stock option*
Penambahan cadangan umum		-	-	-	-	-	-	181,232	(181,232)	-	*Additional to general reserve*
Restrukturisasi entitas sepengendali	52	17,373,586	(6,370,013)	(11,003,573)	-	-	-	-	-	-	*Restructuring of entities under common control*
Saldo 31 Desember 2021		20,564,654	(6,366,776)	-	444,530	140,271	22,263	779,036	9,429,956	25,013,934	***Balance as at 31 December 2021***
Laba bersih		-	-	-	-	-	-	-	4,260,182	4,260,182	*Net income*
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain bersih setelah pajak		-	-	-	-	128,633	(77,740)	-	-	50,893	*Other comprehensive income/(loss) net of tax*
Penambahan modal saham	28	2,499,976	2,437,676	-	-	-	-	-	-	4,937,652	*Additional share capital*
Pembagian dividen		-	-	-	-	-	-	-	(757,051)	(757,051)	*Dividend payment*
Penambahan cadangan umum		-	-	-	-	-	-	605,641	(605,641)	-	*Additional to general reserve*
Saldo per 31 Desember 2022		23,064,630	(3,929,100)	-	444,530	268,904	(55,477)	1,384,677	12,327,446	33,505,610	***Balance as at 31 December 2022***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan jual beli, bagi hasil, *ijarah* dan usaha utama lainnya		19,343,529	17,729,782	*Proceeds of margin, profit sharing, ijarah and other main operating*
Pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer		(3,997,872)	(4,390,339)	*Payment of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	9,10,11, 12,34	1,377,882	998,496	*Receipts from recovery of financing and receivable written off*
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		2,723,083	2,249,710	*Receipt of other operating income*
Pembayaran tantiem		(75,784)	(51,660)	*Payment tantiem*
Pembayaran beban usaha		(11,781,973)	(10,191,040)	*Payment operating expenses*
Penerimaan atas pendapatan non-usaha - bersih		24,903	65,766	*Receipt from non-operating income - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(1,446,720)	(1,344,080)	*Payment of corporate income tax*
Pembayaran zakat		(170,771)	(127,611)	*Payment of zakat*
Penyaluran dana kebajikan		(108,831)	(59,529)	*Distribution of qardhul hasan funds*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		5,887,446	4,879,495	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in operating assets and liabilities:*
Penurunan/(kenaikan) aset operasi:				*Decrease/(increase) in operating assets:*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia		-	6,958,439	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		1,663,206	(2,546,249)	*Marketable securities - measured at fair value*
Surat berharga jangka pendek lainnya		45,529	(116,881)	*Other short-term securities*
Piutang		(23,099,277)	(11,903,595)	*Receivables*
Pinjaman *qardh*		(282,378)	(138,376)	*Funds of qardh*
Pembiayaan		(12,449,035)	(3,163,358)	*Financing*
Tagihan akseptasi		(319,908)	133,842	*Acceptance receivables*
Aset yang diperoleh untuk *ijarah*		(583,008)	607,896	*Assets acquired for ijarah*
Aset lain-lain		(208,881)	(708,132)	*Other assets*
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				*Increase/(decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		430,314	(384,081)	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah		8,764,367	(3,155,693)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain		2,102,759	(690,622)	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi		319,908	(133,842)	*Acceptance liabilities*
Utang pajak		89,446	28,050	*Taxes payable*
Liabilitas lain-lain		126,051	439,248	*Other liabilities*
Kenaikan dana *syirkah* temporer		19,398,991	26,590,653	*Increase in temporary syirkah funds*
Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi		1,885,530	16,696,794	*Net cash generated by operating activities*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penjualan/pelepasan investasi pada surat berharga		464,041,150	466,832,322	*Sale/disposal of investment in marketable securities*
Perolehan surat berharga		(456,004,645)	(482,635,842)	*Acquisition of marketable securities*
Perolehan aset tetap		(2,041,797)	(787,504)	*Acquisition of fixed assets*
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas investasi		5,994,708	(16,591,024)	*Net cash provided by/(used in) investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa		(124,192)	(130,215)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen		(757,051)	-	*Payments of dividend*
Penerimaan pembiayaan berjangka *mudharabah*		742,500	-	*Receipts from mudharabah term financing*
Hasil penerbitan saham baru	28	4,999,952	52,286	*Proceeds from issuance of new shares*
Biaya emisi penerbitan saham	28	(62,300)	-	*Share issuance costs*
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		4,798,909	(77,929)	*Net cash provided by/(used in) financing activities*
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		12,679,147	27,841	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		26,542,272	26,514,431	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE		39,221,419	26,542,272	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD***
Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:				*Cash and cash equivalents at the end of the period consist of:*
Kas	4	4,951,469	4,119,903	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	31,778,458	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	6	2,491,492	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
JUMLAH		39,221,419	26,542,272	***TOTAL***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*	29,30,31,32	19,622,865	17,808,432	*Revenue from fund management as mudharib*
Pengurangan				*Deduction*
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				*Current year income in which its cash and cash equivalents have not been received:*
Pendapatan dari jual beli		(588,556)	(493,885)	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil		(25,972)	(16,043)	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(43,778)	(242,077)	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		(20,093)	(11,806)	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		(898,140)	(665,978)	*Other main operating income*
		(1,576,539)	(1,429,789)	
Penambahan				*Addition*
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Previous year income in which its cash and cash equivalent were received during current year:*
Pendapatan dari jual beli		493,885	394,311	*Income from sales and purchase*
Pendapatan bagi hasil		16,043	56,298	*Income from profit sharing*
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		242,077	90,339	*Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities*
Pendapatan dari *ijarah* - bersih		11,806	22,455	*Income from Ijarah - net*
Pendapatan usaha utama lainnya		665,978	559,009	*Other main operating income*
		1,429,789	1,122,412	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		19,476,115	17,501,055	*Available income for profit sharing*
Hak bagi hasil milik Bank		(15,443,946)	(13,122,248)	*Bank's share in profit sharing*
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	33	4,032,169	4,378,807	*Third parties' share on return*
Dirinci atas:				*Details to:*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		3,839,394	4,220,329	*Fund owners' share on distributed profit sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	17	192,775	158,478	*Fund owners' share on undistributed profit sharing*
Jumlah		4,032,169	4,378,807	***Total***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
Sumber dana zakat				***Sources of zakat funds***
Internal bank		141,405	101,684	*Internal bank*
Eksternal bank				*External bank*
Pegawai		31,661	32,594	*Employees*
Nasabah dan umum		38,656	24,624	*Customers and public*
		211,722	158,902	
Penyaluran dana zakat				***Distribution of zakat funds***
Disalurkan ke lembaga lain		(170,771)	(127,611)	*Distributed to other institutions*
Kenaikan dana zakat		40,951	31,291	*Increase in zakat funds*
Saldo awal dana zakat		104,202	72,911	***Beginning balance of zakat funds***
Saldo akhir dana zakat		145,153	104,202	***Ending balance of zakat funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2022	2021	
Sumber dana kebajikan				***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*		73,857	50,280	*Infaq and shadaqah*
Denda		12,877	14,329	*Penalty*
Pendapatan non-halal		3,168	7,898	*Non-halal income*
Sumbangan/hibah		-	99	*Donation/grant*
		89,902	72,606	
Penggunaan dana kebajikan				***Uses of qardhul hasan funds***
Sumbangan		(108,831)	(59,529)	*Donation*
(Penurunan)/kenaikan dana kebajikan		(18,929)	13,077	*(Decrease)/increase qardhul hasan funds*
Saldo awal dana kebajikan		25,977	12,900	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Saldo akhir dana kebajikan	22	7,048	25,977	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank BRIsyariah Tbk ("Bank") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., notaris di Jakarta.

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008. Pada tahun 2009, BSBRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Pemegang Saham BSBRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

PT Bank BRISyariah berubah nama menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada bulan Mei 2018, Bank melakukan penawaran umum perdana saham meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (Rupiah penuh) per lembar saham kepada masyarakat di Indonesia. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018.

Pada bulan Januari 2021, telah terjadi penggabungan antara PT Bank BRIsyariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRIsyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

1. GENERAL

a. Bank establishment and general information

PT Bank BRIsyariah Tbk (the "Bank") is located in Jakarta, Indonesia, and initially established under the name of PT Bank Jasa Arta ("BJA") based on the Deed of Establishment No. 4 dated 3 April 1969 made before Liem Toeng Kie, S.H., notary in Jakarta.

BJA changed its name to PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") based on BJA Shareholders' Decision Statement, as stated in the Deed No. 45 dated 22 April 2008 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta and obtained a license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional Bank into a commercial bank based on sharia principles effective from 16 October 2008. In 2009, BSBRI changed its name to PT Bank BRISyariah based on BSBRI Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 18 dated 14 April 2009 made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta.

PT Bank BRISyariah changed its name to PT Bank BRIsyariah Tbk as approved, accepted and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 year 2018 dated 10 January 2018.

In May 2018, the Bank undertook the initial public offering of PT Bank BRIsyariah Tbk shares included 2,623,350,600 new shares with a nominal value of Rp500 (full Rupiah) per share at a selling price of Rp510 (full Rupiah) per share to the public in Indonesia. The offered shares began to be listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on 9 May 2018.

In January 2021, there was a merger of PT Bank BRIsyariah Tbk with PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah. The merger has received approval from Financial Services Authority ("OJK") of Capital Market through its letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and OJK Board of Commissioners Number 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021 concerning the Granting of Permit to Merge PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRIsyariah Tbk and a Name Change Permit Using a Business License from PT Bank BRIsyariah Tbk to become a Business License on behalf of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the Merged Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan informasi umum (lanjutan)

Pada bulan Juni 2022, terjadi perubahan klasifikasi saham pada anggaran dasar sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta sehubungan dengan:

- Penerapan klasifikasi saham pada Bank menjadi saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan saham biasa Seri B yang merupakan saham biasa atas nama.
- Reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Bank menjadi 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi saham biasa Seri B.

Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022.

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir terkait penambahan modal disetor dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Bank establishment and general information** (continued)*

In June 2022, there was change in the shares classification in the Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 dated 24 June 2022 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with:

- *The implementation of the classification of shares in the Bank into Series A Dwiwarna share which is share with special rights and Series B common share which is ordinary share.*
- *Reclassification of 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia in the Bank into 1 (one) Series A Dwiwarna share and all shares owned by other shareholders into Series B common shares.*

This change has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 dated 22 July 2022.

The latest amendment to the Bank's Articles of Association in relation to the additional paid-up capital was stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendment to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 dated 29 December 2022 made before Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., as Substitute Notary of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. This change has been accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 dated 29 December 2022.

According to Article 3 of the Bank's latest Articles of Association, the Bank's scope of business is to conduct banking activities based on Sharia principles.

The Bank's head office is located in The Tower Building, Jalan Gatot Subroto No. 27, Karet Semanggi Village, Setiabudi District, South Jakarta 12930.

As at 31 December 2022 and 2021, the Bank has network business unit with details as follows (unaudited):

	2022	2021	
Kantor Cabang	153	272	*Branch Offices*
Kantor Cabang Pembantu	1,019	985	*Sub-Branch Offices*
Kantor Kas	-	74	*Cash Offices*
Kantor Layanan Syariah	3,065	4,667	*Sharia Service Offices*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

b. Struktur dan manajemen

b. Structure and management

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as at 31 December 2022 is determined based on the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 dated 23 September 2022 made before the Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2022	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Imam Budi Sarjito	*Commissioner*
Komisaris	Sutanto	*Commissioner*
Komisaris	Nizar Ali[1)]	*Commissioner*
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Mohamad Nasir[2)]	*Independent Commissioner*

1) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)*.
2) Telah mendapat persetujuan OJK sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-3/D.03/2023 tanggal 3 Januari 2023.

1) Effective after obtaining approval from Financial Services Authority ("OJK") for a fit and proper test.
2) Has received OJK approval in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No.KEP-3/D.03/2023 dated 3 January 2023.

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 26 Tanggal 8 September 2021 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank No. 38 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Commissioners as at 31 December 2021 is determined based on the Deed of Statement of Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 26 dated 8 September 2021 and Deed of Minutes of the Bank's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 38 dated 24 August 2021 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2021	
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Adiwarman Azwar Karim[1)]	*President Commissioner/ Independent Commissioner*
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Muhammad Zainul Majdi[2)]	*Vice President Commissioner/ Independent Commissioner*
Komisaris	Suyanto	*Commissioner*
Komisaris	Masduki Baidlowi	*Commissioner*
Komisaris	Imam Budi Sarjito	*Commissioner*
Komisaris	Sutanto	*Commissioner*
Komisaris Independen	Bangun Sarwito Kusmulyono[3)]	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	*Independent Commissioner*

1) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
2) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 23 September 2022.
3) Diberhentikan dengan hormat dalam RUPS Tahunan tanggal 27 Mei 2022.

1) Effective after obtaining approval from Financial Services Authority ("OJK") for a fit and proper test.
2) Effective resign on 23 September 2022.
3) Dismissed honorably at the Annual GMS on 27 May 2022.

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 December 2022 is determined based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 dated 23 September 2022 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2022	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta[1)]	*Vice President Director*
Direktur	Ngatari	*Director*
Direktur	Zaidan Novari[2)]	*Director*
Direktur	Anton Sukarna	*Director*
Direktur	Achmad Syafii	*Director*
Direktur	Tiwul Widyastuti	*Director*
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi	*Compliance Director*
Direktur	Ade Cahyo Nugroho	*Director*
Direktur	Moh. Adib[1)]	*Director*

1) Telah mendapatkan persetujuan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.145/D.03/2022 dan No.146/D.03/2022 tanggal 22 September 2022.

2) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penilaian kemampuan dan kepatutan *(fit and proper test)*.

1) Has obtained approval in accordance with the Decrees of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.145/D.03/2022 and No.146/D.03/2022 dated 22 September 2022.

2) Effective after obtaining approval from Financial Services Authority ("OJK") for a fit and proper test.

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk No. 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 December 2021 is determined based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendment to Articles of Association Change of Name of PT Bank BRIsyariah Tbk No. 38 dated 14 January 2021 which was made before the Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2021	
Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hery Gunardi	*President Director*
Wakil Direktur Utama 1	Ngatari	*Vice President Director 1*
Wakil Direktur Utama 2	Abdullah Firman Wibowo	*Vice President Director 2*
Direktur	Kusman Yandi	*Director*
Direktur	Kokok Alun Akbar	*Director*
Direktur	Anton Sukarna	*Director*
Direktur	Achmad Syafii	*Director*
Direktur	Tiwul Widyastuti	*Director*
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi	*Compliance Director*
Direktur	Ade Cahyo Nugroho	*Director*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as at 31 December 2022 and 2021 is determined based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 dated 31 May 2021 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

	31 Desember/*December* 2022 dan/*and* 2021	
Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Hasanudin	*Chairman*
Anggota	Mohamad Hidayat	*Member*
Anggota	Oni Sahroni	*Member*
Anggota	Didin Hafidhuddin	*Member*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2022 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 02/351-KEP/DIR tanggal 19 Oktober 2022 dan Surat Dewan Komisaris No. 02/050-3/KOM tanggal 19 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***b. Structure and management** (continued)*

The composition of the Bank's Audit Committee as of 31 December 2022 is determined based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 02/351-KEP/DIR dated 19 October 2022 and the Letter of the Board of Commissioners No. 02/050-3/KOM dated 19 October 2022 as follows:

	31 Desember/*December* 2022	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Komaruddin Hidayat	*Chairman*
Anggota	Adiwarman Azwar Karim	*Member*
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan	*Member*
Anggota	Mohamad Nasir[1)]	*Member*
Anggota	M. Zacky Thayib	*Member*
Anggota	M. Gunawan Yasni	*Member*

1) Telah mendapat persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-3/D.03/2023 tanggal 3 Januari 2023.

1) Has received OJK approval as the Company's Independent Commissioner in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No.KEP-3/D.03/2023 dated 3 January 2023

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 01/178-KEP/DIR tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Dewan Komisaris No. 01/036-3/KOM tanggal 26 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2021 is determined based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 01/178-KEP/DIR dated 30 August 2021 and the Letter of the Board of Commissioners No. 01/036-3/KOM dated 26 August 2021 as follows:

	31 Desember/*December* 2021	
Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Muhammad Zainul Majdi	*Chairman*
Anggota	Adiwarman Azwar Karim	*Member*
Anggota	Imam Budi Sarjito	*Member*
Anggota	Suyanto	*Member*
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan	*Member*
Anggota	Widuri Meintari Kusumawati	*Member*
Anggota	Djoko Seno Adji	*Member*
Anggota	M. Zacky Thayib	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Gunawan Arief Hartoyo.

On 31 December 2022 and 2021, Corporate Secretary of the Bank is Gunawan Arief Hartoyo.

Berdasarkan kebijakan Bank, manajemen kunci Bank mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Based on the Bank's policies, key management of the Bank consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp100.303 dan Rp58.829.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year ended 31 December 2022 and 2021 are Rp100,303 and Rp58,829.

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar 17.636 dan 17.462 orang (tidak diaudit).

As of 31 December 2022 and 2021, the Bank has 17,636 and 17,462 employees, respectively (unaudited).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penggabungan usaha

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM"), PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS") dan PT Bank BNI Syariah ("BNIS") menandatangani *Conditional Merger Agreement* ("CMA") atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS") akan menjadi entitas yang menerima penggabungan secara hukum atau *surviving legal entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah ("BNIS") dan PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Penggabungan BSM, BNIS dan BRIS ("Merger"), telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan OJK Perbankan melalui Surat Keputusan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk dan perubahan izin usaha PT Bank BRIsyariah Tbk menjadi izin usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") sebagai bank hasil merger. Selanjutnya telah diperoleh surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-0011384 tanggal 28 Januari 2021 perihal penerimaan pemberitahuan penggabungan BNIS dan BSM menjadi BRIS terkait dengan pengumuman penggabungan BNIS dan BSM menjadi BRIS. Penggabungan efektif pada 1 Februari 2021.

***1. GENERAL** (continued)*

c. Merger

On 12 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI"), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), PT Bank Syariah Mandiri ("BSM"), PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS") and PT Bank BNI Syariah ("BNIS") signed a Conditional Merger Agreement ("CMA") for the merger of BSM, BRIS and BNIS (Merger Participating Banks).

According to the CMA, after the effective date of the merger, PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS") will become the surviving legal entity and all shareholders of PT Bank BNI Syariah ("BNIS") dan PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") will become shareholders of the surviving entity based on the merger ratio.

The merger of BSM, BNIS and BRIS ("Merger"), has been approved by Financial Services Authority ("OJK") of Capital Market through its letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and OJK of Banking through its Decision Letter No. 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021 regarding the Granting Permit for merger of PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRIsyariah Tbk and change of PT Bank BRIsyariah Tbk's business license into business license of PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI") as the merged bank. Furthermore, the letter from the Ministry of Law and Human Rights Letter No. AHU-AH.01.10-0011384 dated 28 January 2021 has been obtained regarding acceptance for notification of merger of BNIS and BSM into BRIS which related to the merger announcement of BNIS and BSM into BRIS. The merger is effective on 1 February 2021.

1. UMUM (lanjutan)

c. Penggabungan usaha (lanjutan)

Pada tanggal efektif penggabungan, yaitu 1 Februari 2021, komposisi pemegang saham BSI adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Merger** (continued)*

On the effective date of the merger, which is 1 February 2021, the shareholders composition of BSI are as follows:

	Jumlah saham/ *Number of shares*	Nilai nominal (Rupiah penuh)/ *Nominal value (full Rupiah)*	*Persentase/ Percentage*	
Modal dasar	80,000,000,000	40,000,000,000,000		***Authorised capital***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,905,219,379	10,452,609,689,500	50.95%	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,220,230,418	5,110,115,209,000	24.91%	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	3,546,380,827,500	17.29%	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
DPLK BRI - Saham Syariah	751,340,000	375,670,000,000	1.83%	*DPLK BRI - Saham Syariah*
PT BNI Life Insurance	5,250,415	2,625,207,500	0.01%	*PT BNI Life Insurance*
PT Mandiri Sekuritas	33	16,500	0.00%	*PT Mandiri Sekuritas*
Publik	2,056,407,043	1,028,203,521,500	5.01%	*Public*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	41,031,208,943	20,515,604,471,500	100.00%	***Issued and fully paid capital***
Saham dalam portofolio	38,968,791,057	19,484,395,528,500		***Shares in portfolio***

Akuisisi tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis di antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK No. 38 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", sehingga akuisisi bisnis tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Jumlah selisih yang timbul antara biaya perolehan dan bagian proporsional atas nilai tercatat aset bersih seluruhnya diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian "Tambahan modal disetor" di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

The above acquisitions fulfil the category of business combination among entities under common control entities described in SFAS No. 38 on "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore such acquisitions were accounted for using the pooling of interest method. The amount of the difference between the cost of acquisition and the proportionate portion of the carrying amount of the net assets entirely recognised as "Difference in Value of Transactions of Business Combinations of Entities under Common Control" and recognised as part of "Additional paid-in capital" and presented in the equity section of the statement of financial position.

d. Penawaran Umum Saham Terbatas

Pada bulan Desember 2022, Bank meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD" I), sesuai hasil keputusan RUPSLB tanggal 23 September 2022.

Dalam PMHMETD I tersebut, Bank menawarkan sebanyak-banyaknya 4.999.952.795 saham baru Seri B (nilai penuh) dengan nilai nominal per lembar saham Rp500 (nilai penuh) dalam bentuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan harga pelaksanaan per lembar saham Rp1.000 (nilai penuh). Tanggal perdagangan dan eksekusi HMETD tersebut mulai dari 19 Desember sampai dengan 23 Desember 2022.

d. Limited Public Offering

In December 2022, the Bank increased additional paid in capital through Right Issue with Pre-Emptive Rights I ("PMHMETD" I), in accordance with the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholder dated 23 September 2022.

In PMHMETD I, the Bank offered for as many as 4,999,952,795 new Series B shares (full amount) with a nominal value of Rp500 per share in the form of Pre-Emptive Rights ("HMETD") with exercised price of Rp1,000 (full amount). The trading and exercise date of HMETD was from 19 December to 23 December 2022.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Terbatas (lanjutan)

Dari penawaran umum terbatas ini, Bank telah meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.999.952.795 lembar saham (nilai penuh) dari Rp20.564.654 menjadi Rp23.064.630, sebagaimana tercantum pada Akta no. 191 tanggal 29 Desember 2022, Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta.

***1. GENERAL** (continued)*

***d. Limited Public Offering** (continued)*

From this limited public offering, the Bank has increased its share capital by 4,999,952,795 shares (full amount) from Rp20,564,434 to Rp23,064,630, as stated in Notarial Deed No. 191 dated 29 December 2022 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Bank diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 30 Januari 2023.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 101 “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
(iii) Laporan perubahan ekuitas;
(iv) Laporan arus kas;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank are completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 30 January 2023.

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank’s financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the consolidated financial statements of the Group in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013) and the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAMLK")’s Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of Listed Entity, enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

The financial statements are prepared in accordance with SFAS No. 101, “Presentation of Sharia Financial Statements”. Based on SFAS No. 101 (Revised 2019), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Statement of financial position;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
(iii) Statement of changes in equity;
(iv) Statement of cash flows;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK No. 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut: (lanjutan)

(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***a. Basis of preparation of financial statements** (continued)*

The financial statements are prepared in accordance with SFAS No. 101, "Presentation of Sharia Financial Statements". Based on SFAS No. 101 (Revised 2019), a complete sharia bank financial statements consist of the following components: (continued)

(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
(viii) Notes to the financial statements.

The statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flow and statement of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except statement of cash flow and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

The statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statement of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to fund owners under cash basis.

The statement of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022.

- Amendemen PSAK No. 22 "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"; dan
- Penyesuain tahunan PSAK No. 73: "Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of preparation of financial statements *(continued)*

The statement of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds on a particular date.

The statement of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance on a particular date.

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah ("Rp") which is also the Bank's functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

b. Changes to statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards

The followings are financial accounting standards, amendments and interpretations of financial accounting standards which become effective starting 1 January 2022.

- *Amendment of SFAS No. 22: "Business Combination for Reference to Conceptual Framework";*
- *Amendment of SFAS No. 57: "Provision, Contingent Liabilities, and Contingent Assets Related to Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contract";*
- *Annual improvement of SFAS No. 71: "Financial Instrument"; and*
- *Annual improvement of SFAS No. 73: "Leases".*

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial periods.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali

Dalam PSAK No. 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam grup tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan modal disetor".

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

c. Restructuring transaction of entities under common control

Under SFAS No. 38, transfer of business within entities under common control does not result in a change of the economic substance of ownership of the business being transferred and would not result in a gain or loss to the group or to the individual entity within the group. Since the transfer of business of entities under common control does not result in a change of the economic substance, the business being exchanged is recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interests method.

In applying the pooling-of-interests method, the components of the financial statements when the business combination occurred and for other periods which presented for comparison purposes, are presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the period during which the entities were under common control. The difference between the carrying amounts of the business combination transaction and the consideration transferred is recognised under the account "Additional paid-in capital".

d. Akuisisi terbalik

Sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis", akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek (pihak yang menerima bisnis secara hukum) diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Entitas yang kepentingan ekuitasnya diperoleh (pihak yang diakuisisi secara hukum) harus menjadi pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi dalam transaksi yang merupakan akuisisi terbalik.

Kondisi berikut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, termasuk:

1) Bagian hak suara dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis;
2) Keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil penggabungan jika tidak ada pemilik lain yang mempunyai kepentingan suara signifikan;
3) Komposisi organ pengatur entitas hasil penggabungan;
4) Komposisi manajemen senior entitas hasil penggabungan;
5) Ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas; dan
6) Ukuran relatif (contoh aset, penghasilan atau laba) secara signifikan lebih besar dari ukuran entitas yang bergabung lainnya.

d. Reverse acquisition

As described in SFAS No. 22: "Business Combination", reverse acquisition occur when the entity that issues securities (the legal acquirer) is identified as the acquiree for accounting purpose. The entity whose equity interests are acquired (the legal acquiree) must be the acquirer for accounting purposes for the transaction to be considered a reverse acquisition.

The following circumstances were considered in identifying the acquirer in a business combination, including:

1) The relative voting rights in the combined entity after the business combination;
2) The existence of a large minority voting interest in the combined entity if no other owner has a significant voting interest;
3) The composition of the governing body of the combined entity;
4) The composition of the senior management of the combined entity;
5) The terms of the exchange of equity interests; and
6) The relative size (e.g., total asset, revenue, or profit) is significantly bigger than the size of the combined entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Akuisisi terbalik (lanjutan)

Laporan keuangan yang disusun setelah akuisisi terbalik diterbitkan dengan menggunakan nama entitas hukum (pihak yang diakuisisi secara akuntansi), tetapi dideskripsikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai keberlanjutan laporan keuangan pihak pengakuisisi secara akuntansi, dengan satu penyesuaian untuk menyesuaikan secara retroaktif atas modal menurut hukum dari pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk mencerminkan modal menurut hukum dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi. Penyesuaian tersebut disyaratkan untuk mencerminkan modal dari entitas pengakuisisi secara hukum (pihak yang diakuisisi secara akuntansi). Informasi komparatif yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut juga disesuaikan secara retroaktif untuk mencerminkan modal menurut hukum dari entitas pengakuisisi secara hukum (pihak yang diakuisisi secara akuntansi). Dengan demikian, modal saham disesuaikan untuk mencerminkan modal saham dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi dengan penyesuaian terkait ke dalam akun “Tambahan modal disetor”.

Terkait dengan penerapan akuisisi terbalik dan penerapan PSAK No. 38, laporan keuangan Bank disusun dengan basis sebagai berikut:

(a) aset dan liabilitas dari pihak pengakuisisi secara akuntansi yang diakui dan diukur dalam laporan posisi keuangan pada nilai tercatatnya sebelum akuisisi;

(b) aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi secara akuntansi yang diakui dan diukur dalam laporan posisi keuangan Bank menggunakan nilai tercatat pada tanggal akuisisi;

(c) saldo laba dan komponen ekuitas lainnya diakui dalam laporan keuangan adalah laba ditahan dan komponen ekuitas lainnya atas pihak pengakuisisi secara akuntansi sesaat sebelum akuisisi terbalik;

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Reverse acquisition** (continued)*

Financial statements prepared following a reverse acquisition shall be issued under the name of the legal parent (the accounting acquiree), but is described in the notes to the financial statements as an accounting continuity of the acquirer's financial statements, with one adjustment to retroactively adjust the acquirer's statutory accounting capital to reflect the acquiree's statutory accounting capital. That adjustment is required to reflect the capital of the legal parent (the accounting acquiree). Comparative information presented in the financial statements is retroactively adjusted to reflect the legal capital of the legal parent (the accounting acquiree). Accordingly, the capital stock is adjusted to reflect the share capital of the accounting acquiree with corresponding adjustment to “Additional paid-in capital” account.

In relation to reverse acquisition and the application of SFAS No. 38, the financial statements of the Bank are prepared on the following basis:

(a) the assets and liabilities of the accounting acquirer are recognised and measured in the statement of financial position of the Bank at their pre-acquisition carrying amounts;

(b) the assets and liabilities of the accounting acquiree are recognised and measured in the statement of financial position of the Bank at carrying value at the acquisition date;

(c) the retained earnings and other equity balances recognised in the financial statements are the retained earnings and other equity balances of the accounting acquirer immediately before the reverse acquisition;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Akuisisi terbalik (lanjutan)

Laporan keuangan disusun dengan basis sebagai berikut: (lanjutan)

(d) jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan yang ditentukan dengan menambahkan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas anak secara hukum sesaat sebelum akuisisi terbalik ke nilai wajar dari imbalan yang secara efektif dialihkan. Namun, struktur ekuitas yang muncul dalam laporan keuangan (yaitu jumlah dan jenis kepentingan ekuitas yang diterbitkan) menggambarkan struktur ekuitas dari pihak pengakuisisi secara hukum; dan

(e) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir merupakan hasil laba rugi setahun penuh pihak pengakuisisi secara akuntansi dan hasil laba rugi pihak yang diakuisisi secara akuntansi dari tanggal akuisisi sampai dengan tanggal pelaporan.

Jumlah selisih yang timbul antara biaya perolehan dan bagian proporsional atas nilai tercatat aset neto seluruhnya pada transaksi kombinasi bisnis di antara entitas sepengendali diakui sebagai “Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali” dan disajikan sebagai bagian "Tambahan modal disetor" di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***d. Reverse acquisition** (continued)*

The financial statements are prepared on the following basis: (continued)

(d) the amount recognised as issued equity interests in the financial statements is determined by adding the equity interests issued of the legal subsidiary immediately before the reverse acquisition to the fair value of the consideration effectively transferred. However, the equity structure appearing in the financial statements (i.e., the number and type of equity interests issued) reflects the equity structure of the legal entity, including the equity interests issued by the legal entity to effect the acquisition; and

(e) the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year comprises of the full year profit or loss of the accounting acquirer and profit or loss of the accounting acquiree from the date of acquisition until the reporting date.

The amount of the difference between the cost of acquisition and the proportionate portion of the carrying amount of the net assets in the business combination among entities under common control entities entirely recognised as "Difference in value of transactions of business combinations of entities under common control" and recognised as part of “Additional paid-in capital” and presented in the equity section of the statement of financial position.

e. Transactions with related parties

The Bank enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2015) regarding “Related Party Disclosures” and Regulation of Bapepam and LK No. KEP-347/BL/2012, dated 25 June 2012 regarding “Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies”.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

(1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
(2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
(3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
(4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
(5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
(6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
(7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 42 atas laporan keuangan.

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan rekening penampungan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transactions with related parties *(continued)*

A party is considered as a related party of the Bank if:

(1) directly or indirectly through one or more intermediaries, is party (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank, or (iii) has joint control over the Bank;
(2) it is a member of the same group as the Bank;
(3) it is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;
(4) it is a member of the key management personnel of the Bank;
(5) it is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);
(6) it is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5); and
(7) it is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 42 of the financial statements.

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed collaterals and suspense accounts.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK No. 102 "Akuntansi *Murabahah*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK No. 102 "Penurunan Nilai Piutang *Murabahah*".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

(1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
(2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
(3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
(4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
(5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
(6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
(7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
(8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

In accordance with SFAS No. 102 "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS No. 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

(1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
(2) a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payment in margin or principal payments;
(3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;
(4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;
(5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;
(6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio;
(7) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
(8) national or local conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) Piutang *murabahah* memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, dan memiliki saldo nilai piutang secara individual di atas atau sama dengan Rp10.000; dan
(2) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki saldo nilai piutang di atas Rp10.000.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

(1) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
(2) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; dan
(3) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets** (continued)*

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

(1) Murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful and loss, and have an individual receivables balance of above or equal to Rp10,000; and
(2) Murabahah receivables that are restructured or have been restructured and which individually have a balance of receivables above or equal Rp10,000.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

(1) Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
(2) Murabahah receivables which individually have insignificant value; and
(3) Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD").

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan margin.

Aset produktif atas piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") adalah sebagai berikut:

1) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets** (continued)*

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the Probability of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD").

Impairment losses on financial assets recorded at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

Earning assets such as istishna receivables, funds of qardh, mudharabah financing, musyarakah financing, assets acquired for ijarah, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. In addition, the Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 dated 31 January 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as at 7 February 2022.

The minimum allowance to be provided in accordance with Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") is as follows:

1) General reserve, shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
   a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
   b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
   c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
   d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK").

Bank melakukan pengkajian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dibentuk berdasarkan POJK No. 02/POJK.03/2022 dan mempertimbangkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), rekening perantara, *temporary account*, dan properti terbengkalai.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar nilai realisasi bersih:
a) Pada saat pengambilalihan agunan; dan
b) Pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.

Penetapan nilai realisasi bersih wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000 (lima milyar Rupiah) atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000 (lima milyar Rupiah) dapat menggunakan penilai internal Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The minimum allowance to be provided in accordance with Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") is as follows: (continued)

2) Special reserves, shall be at least:

   a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
   b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
   c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
   d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Regulation of the Financial Services Authority ("POJK").

The Bank conducts assessment upon the adequacy of the allowance for impairment losses on earning assets established based on POJK No. 02/POJK.03/2022 and consider the estimated loss of earning assets that is uncollectible.

Non-earning assets represent the Bank's assets other than earning assets which have potential loss such as foreclosed collaterals ("AYDA"), inter-branches account, temporary account and abandoned property .

AYDA is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting their liabilities to the Bank.

The Bank is required to settle its AYDA and prepare documentation of its effort to settle the assets. The Bank is required to re-evaluate the AYDA to determine net realisable value:

a) At the time the collateral is foreclosed; and
b) In the subsequent period after the acquisition of foreclosed collaterals.

The determination of net realisable value is required to be carried out by an independent appraiser for AYDA in the amount equivalent or more than Rp5,000 (five billion Rupiah). Internal appraiser of the Bank may be used for AYDA below Rp5,000 (five billion Rupiah).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:
a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

AYDA sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account*.

Kualitas rekening perantara dan *temporary account* ditetapkan sebagai berikut:
1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

The quality of AYDA is determined as:

a) Current, if owned within 1 (one) year.

b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

AYDA acquired in relation to settlement of financing (presented in other assets account) are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, AYDA are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

Inter-branch account is receivable or payable arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Temporary account is an account containing unidentified transactions or transactions which are unable to be classified to the proper account due to the lack of adequate supporting documents.

The Bank is required to settle its inter-branch account and temporary account.

The quality of inter-branch account and temporary account are determined as:
1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

Abandoned property is a fixed asset in the form of property owned by the Bank but not used for normal the Bank business activities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian properti terbengkalai.

Kualitas properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:
a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

g. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS").

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah *wadiah* dan *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

h. Giro dan penempatan pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank non-syariah dikategorikan sebagai dana non-halal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

i. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets *(continued)*

The Bank is required to settle its abandoned property.

The quality of abandoned property are determined as:
a) Current, if owned within 1 (one) year.
b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

g. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS").

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as evidence of short-term deposit of funds with the principles of wadiah and jualah, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are presented at the outstanding balance.

h. Current accounts and placements with other banks

Current accounts with other Banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from Sharia Commercial Banks are recognised as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognised as the Bank's income.

The received current account service funds that come from non-sharia bank are categorised as non-halal funds, so Sharia Bank then distributed as qardhul hasan funds. Before the qardhul hasan funds are distributed, it is recorded in liabilities.

i. Investments in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi; dan

- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Investments in marketable securities *(continued)*

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

a. Measured at amortised cost

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost; and*
- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.*

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost;*
- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and is recognised in profit or loss; and*
- *Gain or loss from changes of fair value is recognised in other comprehensive income after considering unamortised difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognised in other comprehensive income. When sukuk is derecognised, the accumulated gain or loss which has been previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

j. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* ("L/C") dan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri ("SKBDN") yang diterima oleh bank penerima.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasi sebagai kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

k. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, dan piutang *ijarah.*

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***i. Investments in marketable securities** (continued)*

c. Measured at fair value through profit or loss

- *Sukuk acquisition cost excludes transaction cost; and*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognised in profit or loss.*

j. Acceptance receivables and liabilities

Acceptance receivables and liabilities represent Letters of Credit ("L/C") and Domestic Documentary Letters of Credit ("SKBDN") transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptance receivables and liabilities are stated at amortised cost. Acceptances receivable are stated at net of allowance for impairment losses.

Acceptance receivables are classified as financing and receivables. Acceptance liabilities are classified as financial liabilities at amortised cost.

k. Receivables

Receivables consist of murabahah receivables, istishna receivables and ijarah receivables.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortised cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Istishna is a sale and purchase contract between al-mustashni (buyer) and al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Piutang (lanjutan)

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Piutang *ijarah* adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *ijarah*.

l. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn.* Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Akad *rahn* merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Receivables** (continued)*

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred istishna margin is presented as a contra account of istishna receivables.

Ijarah is the contract of transferring the rights (benefits) of an asset within a certain period of time with the payment of rent (ujrah) without the transfer of ownership of the asset itself.

Ijarah receivables are stated at the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on Ijarah receivables is presented as a contra account of Ijarah receivables.

l. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh contract.

Qardh contract is a borrowing contract with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Funds of qardh includes hawalah and rahn financing contract. Hawalah is a transfer of debts from debtors to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain an ujrah (fee) from this transaction, which is recognised as income when received.

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets ujrah (fee) in return which are recognised on an accrual basis.

Funds of qardh are recognised at the same amount of funds lent when these occur. On the statement of financial position date, funds of qardh is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah *(predetermined ratio)* yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

n. Aset yang diperoleh untuk *ijarah*

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

m. Financing

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of mudharabah and musyarakah contract.

Mudharabah financing is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (shahibul maal) and the customer as a business executor (mudharib) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (predetermined ratio). On the statement of financial position date, mudharabah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah financing is a partnership contract among fund's owners (musyarakah partners) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, musyarakah financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

n. Assets acquired for ijarah

Assets acquired for ijarah represent object of leased assets and are recorded in the statement of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in ijarah transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in ijarah muntahiyah bittamlik transaction is depreciated based on leased term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

n. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* (lanjutan)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:
(i) hibah;
(ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
(iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
(iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

o. Aset tetap dan aset hak guna

Aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga tahun untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	*Buildings*
Instalasi, kendaraan bermotor, inventaris kantor dan renovasi atas aset sewa	5	*Installation, vehicles, office equipment and leasehold improvement*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Assets acquired for ijarah *(continued)*

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in ijarah muntahiyah bittamlik can be conducted through:
(i) a grant;
(ii) sale prior to the end of contract for an amount equivalent to the remaining lease installments;
(iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the contract; and
(iv) installment sales at a specific price as agreed in the contract.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

o. Fixed assets and right-of-use assets

Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset. The land is stated at fair value, based on the assessment performed by external independent appraisers which are registered with OJK. Valuation are performed regularly every three years to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. Land is not depreciated.

Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “selisih revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada “pendapatan dan beban non-usaha” dalam laporan laba rugi. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset hak guna

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Bank tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:
- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli; dan
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Fixed assets and right-of-use assets *(continued)*

Fixed assets *(continued)*

The assets’ residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

Costs after initial recognition are recognised as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only when the Bank is likely to benefit economically in the future with respect to these assets and the acquisition cost can be reliably measured. The carrying value of the replaced part are removed from the accounts. All other repairs and maintenance are charged to the income statement in the financial period when these costs occur.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income.

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income, other decrease is charged to the profit or loss.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in “non-operating income and expenses” in the income statement. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

Right-of-use assets

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Bank does not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:
- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option; and*
- *Leases of low value assets.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
  2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Fixed assets and right-of-use assets *(continued)*

Right-of-use assets *(continued)*

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- *The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Bank has the right to direct the use of the identified asset. The Bank has the right when it has a relevant decision-making right on how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
  1. *The Bank has the right to operate the asset; and*
  2. *The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.*

The Bank recognises a right-of-use assets and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use assets is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Aset tetap dan aset hak guna (lanjutan)

Aset hak guna (lanjutan)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

p. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih akan diterima dan Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA").

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus *(straight-line method)*. Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

q. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

r. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***o. Fixed assets and right-of-use assets** (continued)*

***Right-of-use assets** (continued)*

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the leases term.

p. Other assets

Other assets among other consist of prepaid expense and income receivables and foreclosed collaterals ("AYDA").

Prepaid expenses are amortised over the useful life using the straight-line method. Foreclosed collaterals acquired in relation to settlement of financing are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, foreclosed collaterals are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

q. Obligations due immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

r. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments, available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors in the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

r. Simpanan dari nasabah dan bank lain (lanjutan)

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

s. Dana *syirkah* temporer

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqoh, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah*, dan akun lain yang sejenis, misalnya: giro *mudharabah,* tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***r. Deposits from customers and other banks** (continued)*

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

s. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. An example of temporary syirkah funds is the receipt of funds from a mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, mudharabah musytarokah and other similar accounts. For example: mudharabah demand deposits, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary syirkah funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realise gain from current assets and other non-investment assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

s. Dana *syirkah* temporer (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

t. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna,* pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***s. Temporary syirkah funds** (continued)*

Temporary syirkah funds represent one of the statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

The owners of temporary syirkah funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary syirkah funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

t. Revenue from fund management as mudharib

Revenue from fund management as mudharib consists of income from murabahah receivables transactions, istishna receivables, income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and other main operating income.

Income from murabahah receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables.

When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income from istishna is recognised at the date of transfer of assets.

Income from Ijarah is recognised proportionately over the contract period.

Musyarakah revenue which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while musyarakah revenue which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

t. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* (lanjutan)

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari SBIS, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

u. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima *(cash basis)*.

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Revenue from fund management as mudharib *(continued)*

Revenue from mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah investment.

Other main operating income consists of income derived from funds of qardh, SBIS, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

u. Third parties' share on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds by the Bank under mudharabah mutlaqah principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as shahibul maal and to the Bank as mudharib in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under wadiah contract might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of the Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

v. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan diakui pada periode akuntansi dimana jasa diberikan, dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dan dinilai berdasarkan jasa aktual yang telah diberikan sebagai proporsi atas total jasa yang harus diberikan.

w. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset); dan
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

v. Fee based income from banking services

Fee based income from banking services is recognised in the accounting period in which the services are rendered, by reference to the stage of completion of the specific transaction and assessed on the basis of the actual service provided as a proportion of the total service to be provided.

w. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognised during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves are recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on Bank regulations and Labor Law No. 11 of 2020 dated 2 November 2021.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the Projected Unit Credit method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognised as other comprehensive income consist of:

(i) Actuarial gain and losses;
(ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets); and
(iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

w. Imbalan kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti bersih langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

x. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

w. Employee benefits *(continued)*

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognised as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets) and re-measurement of liabilities (assets) is recognised immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognised as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

x. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses will be utilised in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

x. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***x. Taxation** (continued)*

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognised as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

y. Transaksi dan saldo mata uang asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah Indonesia. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

y. Transaction and balance in foreign currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statement of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time).

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	2022	2021	
1 Dolar Amerika Serikat	15,567.50	14,252.50	*1 United States Dollar*
1 Riyal Arab Saudi	4,139.00	3,796.00	*1 Saudi Arabian Riyal*
1 Euro Eropa	16,581.72	16,112.46	*1 Euro Europe*
1 Dolar Singapura	11,592.88	10,554.67	*1 Singapore Dollar*
1 Dolar Australia	10,557.88	10,346.61	*1 Australian Dollar*
1 Dolar Hong Kong	1,996.55	1,828.03	*1 Hong Kong Dollar*
1 Pound Sterling Inggris	18,786.09	19,250.86	*1 Great Britain Pound Sterling*
1 Yen Jepang	117.81	123.77	*1 Japan Yen*
1 Dolar Kanada	11,486.39	11,192.92	*1 Canadian Dollar*
1 Franc Swiss	16,827.00	15,585.02	*1 Swiss Franc*
1 Yuan China	2,234.50	2,235.72	*1 Chinese Yuan*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

z. Pembiayaan berjangka *mudharabah*

Pembiayaan berjangka *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dengan bank lain sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) selama jangka waktu tertentu. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas yang diterima. Pada tanggal laporan posisi keuangan, dana *syariah* temporer diukur dan disajikan sebesar nilai tercatat.

Hak pemilik dana atas bagi hasil usaha yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas.

aa. Sukuk *mudharabah* subordinasi

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi.

ab. Laba per saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Efek dilutif yang mempengaruhi laba per saham dasar Perseroan sebagai akibat dari *Management Employee Stock Option Program* ("MESOP") pada Catatan 28 atas laporan keuangan Bank. Perhitungan laba per saham dilusian telah diungkapkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan pada Catatan 38 atas laporan keuangan Bank.

ac. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

z. Mudharabah term financing

Mudharabah term financing is a joint financing made between the Bank as the business executor (mudharib) and the other bank as the owner of the funds (shahibul maal) during a certain period. The funds received from thefund owners are recognised as temporary syirkah funds amounting to the cash received. On the statement of financial position date, temporary sharia funds are measured and presented at the carrying amount.

The right of the fund owner to the profit sharing that has been calculated but has not yet been distributed to the fund owner is recognised as a liability.

aa. Subordinated sukuk mudharabah

Subordinated Sukuk Mudharabah is initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using a straight-line method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium associated to the initial recognition and transaction cost.

ab. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the related year.

The dilutive effect that affect Company earnings per share was the impact of Management Employee Stock Option Program ("MESOP") in Note 28 of the Bank's financial statements. The calculation of dilutive earnings per share has been disclosed at statement of profit and loss and other comprehensive income and in Note 38 of the Bank's financial statements.

ac. Provisions

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

ad. Sumber dana kebajikan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Sumber Dana Kebajikan yang didapat berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) apabila berasal dari:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

ae. Segmen operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dan keuangan.

Pada tahun 2021, Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi *Wholesale*, SME, Konsumer, Mikro, dan Lainnya.

Di tahun 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian Segmen Operasi yang digunakan dalam laporan kinerja manajemen internal. Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok *Corporate Banking, Commercial Banking,* Hubungan Kelembagaan, Ritel, dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat.

***2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

ad. Source of qardhul hasan funds

Based on Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, source of Qardhul Hasan Funds is acquired from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), if the funds come from:

1. *The transaction that is not accordance with sharia principle and cannot be avoided include interest revenue (riba).*
2. *The sharia transaction does not fulfilling the term and condition (principle and/or requirement.*
3. *Penalty funds (fines) because of not fulfilling the obligation on initial contract.*
4. *Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.*

ae. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank presents operating segment based on the Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the Chief Operating Decision Maker ("CODM").

In 2021, the Bank discloses its operating segments based on business segments divisions that consist of Wholesale, SME, Consumer, Micro and Others.

In 2022, the Bank implements some changes in presentation of its operational segments for the internal management performance report. The Bank has identified and disclosed financial information based on main business (business segment) classified into Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Relation, Retail and Treasury Banking & Head Office.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

af. Prinsip konsolidasian

Pada 31 Desember 2021, Bank memiliki investasi pada beberapa reksa dana dengan kepemilikan 100% atas unit penyertaan yang diterbitkan dan memiliki kendali atas reksa dana tersebut. Reksa dana tersebut telah dikonsolidasi dalam laporan keuangan.

Pada tanggal pelaporan, Bank menyajikan reksa dana yang dikonsolidasikan berdasarkan *underlying* aset dan liabilitas atas reksa dana yang dimiliki Bank dan sebagai investasi pada reksa dana untuk bagian yang dimiliki oleh pihak ketiga.

Bank mengendalikan suatu reksa dana ketika Bank terekspos terhadap, atau memiliki hak atas, pengembalian variabel dari keterlibatannya terhadap reksa dana dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara Bank dan reksa dana yang dikonsolidasi telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan.

Bila pengendalian atas suatu reksa dana diperoleh dalam periode berjalan, hasil usaha reksa dana tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi sejak tanggal pengendalian diperoleh. Bila pengendalian berakhir dalam periode berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan untuk periode dimana pengendalian masih berlangsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

af. Principles of consolidation

As at 31 December 2021, the Bank has investments in several mutual funds with percentage of unit holding being 100% of investment units issued with the ability to exercise controls on those mutual funds. These mutual funds have been consolidated into the financial statements.

At the reporting date, the Bank presents the consolidated mutual funds based on the mutual funds' underlying assets and liabilities for mutual funds directly held by the Bank and as investment in mutual funds for portion owned by third parties.

The Bank controls a mutual fund when the Bank is exposed to, or has right to, variable returns from its involvement with the mutual fund and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

All material transactions and balances between the Bank and consolidated mutual funds have been eliminated in the financial statements.

Where control of a mutual fund is obtained during a financial period, its results are included in the statement of profit or loss from the date on which control commences. Where control ceases during a financial period, its results are included in the financial statements for the part of the period during which control existed.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing

The Bank examines the quality of assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised in the profit or loss, the Bank makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment.

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing is evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the expected cash in flows. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and/or the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif (Catatan 2f,9,10,11,12,43a).

b. Kewajiban imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing *(continued)*

Collectively assessed impairment allowances cover financing losses inherent in portfolios of receivables, funds of qardh, and financing with similar economic characteristics when there is objective evidence of impairment, yet the individual impaired items cannot be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as financing quality and product segmentation. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances (Note 2f,9,10,11,12,43a).

b. Employee benefit liabilities

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liabilities.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

d. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

e. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Bank sebagai *lessee*

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah *lessee* cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

c. Taxation

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

d. Fixed asset revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

e. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Penyisihan kerugian aset non-produktif

Bank menelaah potensi kerugian aset non-produktif pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat penyisihan penurunan nilai yang harus dibentuk dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah penyisihan penurunan nilai harus dibentuk, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai dari aset non-produktif. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda (Catatan 15).

***3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS** (continued)*

f. Allowance for impairment losses on non-earning assets

The Bank evaluates the potential loss of non-earning assets at each reporting date to assess whether provision for impairment losses should be recognised in the statement profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised, the Bank makes estimate on whether there is any indication of impairment of non-earning assets. These estimates are based on consideration of a number of factors and the end results may be different (Note 15).

4. KAS / ***4. CASH***

	2022	2021	
Rupiah	4,809,425	4,032,230	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Riyal Arab Saudi	72,892	42,783	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Amerika Serikat	66,390	43,267	*United States Dollar*
Dolar Singapura	2,154	1,391	*Singapore Dollar*
Dolar Australia	274	89	*Australia Dollar*
Euro Eropa	324	142	*Europe Euro*
Yen Jepang	10	1	*Japanese Yen*
	4,951,469	4,119,903	

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp824.326 dan Rp756.987.

As of 31 December 2022 and 2021, the Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounting to Rp824,326 and Rp756,987, respectively.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / ***5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA***

a. Berdasarkan mata uang / ***a. By currency***

	2022	2021	
Rupiah	27,898,748	19,997,471	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	3,879,710	566,109	*United States Dollar*
	31,778,458	20,563,580	

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

b. Berdasarkan jenis / *b. By type*

	2022	2021	
Rupiah			*Rupiah*
Giro pada Bank Indonesia	20,047,548	11,547,471	*Current accounts with Bank Indonesia*
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	7,851,200	8,450,000	*Bank Indonesia Sharia Certificates Facilities ("FASBIS")*
	27,898,748	19,997,471	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	3,814,038	498,837	*Bank Indonesia Sharia Term Deposits*
Giro pada Bank Indonesia	65,672	67,272	*Current accounts with Bank Indonesia*
	3,879,710	566,109	
	31,778,458	20,563,580	

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By time period*

	2022	2021	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	27,898,748	19,997,471	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	27,898,748	19,997,471	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	3,179,172	423,584	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	700,538	142,525	*> 1 - ≤ 3 months*
	3,879,710	566,109	
	31,778,458	20,563,580	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2022	2021	
Rupiah			*Rupiah*
≤ 1 bulan	27,898,748	19,997,471	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
	27,898,748	19,997,471	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
≤ 1 bulan	3,179,172	423,584	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	700,538	142,525	*> 1 - ≤ 3 months*
	3,879,710	566,109	
	31,778,458	20,563,580	

e. Berdasarkan kolektibilitas / *e. By collectibility*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, seluruh giro dan penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan "Lancar".

As of 31 December 2022 and 2021, all current accounts and placements with Bank Indonesia is classified as "Current".

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

f. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM")

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(continued)*

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM")

	2022	2021	
Rasio GWM			*GWM Ratio*
Rupiah			*Rupiah*
Kewajiban Pemenuhan GWM:			*Fulfillment of Statutory Reserves:*
GWM Harian	0.00%	0.50%	*GWM Daily*
GWM Rata-Rata	7.50%	3.00%	*GWM Average*
Insentif GWM	(1.80%)	(0.00%)	*GWM Incentives*
Disinsentif RIM	0.08%	1.45%	*RIM Disincentives*
Total Kewajiban Pemenuhan GWM	5.78%	4.95%	*Total of Fulfillment of Statutory Reserves*
Realisasi Pemenuhan GWM	8.30%	5.05%	*Realisation Fulfillment of Statutory Reserves*
Realisasi Pemenuhan PLM (d/h GWM Sekunder)	23.89%	30.01%	*Realisation Fulfillment of PLM (previously GWM Secondary)*
Valuta asing			*Foreign currencies*
Kewajiban Pemenuhan GWM	1.00%	1.00%	*Fulfillment of Statutory Reserves*
Realisasi Pemenuhan GWM	1.18%	1.03%	*Realisation Fulfillment of Statutory Reserves*

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

The GWM ratio as of 31 December 2022 is calculated based on Member of the Board of Governors Regulation ("PADG") No. 24/8/PADG/2022 dated 30 June 2022 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" came into force on 1 July 2022, and regulates that each bank is required to maintain a Statutory Reserves ("GWM") in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of third party funds ("DPK") in Rupiah and foreign exchange.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2021 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang "Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 3,5% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

The GWM ratio as at 31 December 2021 are calculated based on Member of the Board of Governors Regulation ("PADG") No. 22/10/PADG/2020 dated 30 April 2020 concerning "Minimum Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units" came into force on 1 May 2020, and regulates that each bank is required to maintain a Statutory Reserves ("GWM") in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 3.5% and 1% of third party funds ("DPK") in Rupiah and foreign exchange.

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah, terdapat komponen insentif GWM sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Perubahan PADG Insentif, serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

In calculating the fulfillment of Rupiah statutory reserves, there is a GWM incentive component which is in accordance with the Member of the Board of Governors Regulation ("PADG") No. 24/12/PADG/2022 dated 20 July 2022 concerning "Amendment to the Member of the Board of Governors Regulation Number 24/4/PADG/2022 concerning Regulations for Implementation of Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities (Changes to PADG Incentives, as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation Number 21/12/PBI/2019 dated 25 November 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Islamic Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

f. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM") (lanjutan)

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM"). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target BI sebesar 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum ("GWM") dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum ("GWM") pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA *(continued)*

f. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") *(continued)*

In addition, based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 which is effective from 1 May 2021 and Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 which is effective from 28 November 2019, there are changes in the calculation of GWM Financing to Deposit Ratios ("FDR") to the Macroprudential Intermediation Ratio ("RIM"). Banks must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the BI target of 94%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the Minimum Statutory Reserve Requirements ("GWM") of Bank Indonesia.

As at 31 December 2022 and 2021, the Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the Minimum Statutory Reserve Requirements ("GWM") with Bank Indonesia.

g. Rata-rata tingkat bonus tahunan / ***g. The average annual bonus rate***

	2022	2021	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	2.75% - 4.75%	2.75% - 3.25%	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
Term Deposit Valas Syariah Bank Indonesia	0.00% - 4.72%	0.01% - 0.19%	*Bank Indonesia Sharia Foreign Currency Term Deposit*
Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS")	0.00% - 0.00%	3.34% - 4.57%	*Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS")*

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang / ***a. By currency***

	2022	2021	
Rupiah	1,967,271	696,799	***Rupiah***
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Dolar Amerika Serikat	433,290	833,687	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	55,367	299,355	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	16,136	11,436	*Singapore Dollar*
Euro Eropa	13,900	5,961	*Europe Euro*
Yen Jepang	2,632	894	*Japanese Yen*
Dolar Australia	1,689	933	*Australian Dollar*
Pound Sterling Inggris	951	6,747	*Great Britain Pound Sterling*
Dolar Hong Kong	256	2,977	*Hong Kong Dollar*
	524,221	1,161,990	
Jumlah	2,491,492	1,858,789	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15,575)	(17,238)	*Allowance for impairment losses*
	2,475,917	1,841,551	

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS *(continued)*

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	2022	2021	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	130,276	405,629	*Current accounts*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	20,239	63,813	*Current accounts*
	150,515	469,442	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank ("SIPA")	934,000	-	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank ("SIMA")	690,000	135,000	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
Giro	212,995	156,170	*Current accounts*
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro	503,982	1,098,177	*Current accounts*
	2,340,977	1,389,347	
Jumlah	2,491,492	1,858,789	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15,575)	(17,238)	*Allowance for impairment losses*
	2,475,917	1,841,551	

c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diklasifikasikan lancar.

c. By Bank Indonesia collectibility

All current accounts with other banks as of 31 December 2022 and 2021 are classified as current.

d. Berdasarkan jatuh tempo

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

d. By maturity

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro dan penempatan pada bank lain

e. The movements of allowance for losses on current accounts and placements with other banks

	2022	2021	
Saldo awal	17,238	68,393	*Beginning balance*
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 37)	(2,662)	(52,029)	*Reversal during the year (Note 37)*
Selisih kurs	999	874	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	15,575	17,238	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover impairment losses from uncollectible current accounts with other banks.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

As at 31 December 2022 and 2021, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

Seluruh jasa giro yang diterima dari giro pada bank non-syariah dicatat sebagai dana kebajikan (Catatan 22).

All income received from current accounts with non-sharia banks are recorded as qardhul hasan funds (Note 22).

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	31 Desember/*December* 2022		31 Desember/*December* 2021		
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
Nilai wajar melalui laba rugi					***Fair value through profit or loss***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	909,966	921,324	108,984	111,415	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Sukuk Bank Indonesia	-	-	2,000,000	2,000,000	*Sukuk Bank Indonesia*
Surat Perbendaharaan Negara Syariah ("SPNS")	-	-	474,000	473,115	*Sharia State Treasury Certificate ("SPNS")*
Total nilai wajar melalui laba rugi	909,966	921,324	2,582,984	2,584,530	***Total fair value through profit or loss***
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					***Fair value through other comprehensive income***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	3,173,558	3,051,045	2,992,032	3,007,756	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3,173,558	3,051,045	2,992,032	3,007,756	***Total fair value through other comprehensive income***
Biaya perolehan diamortisasi					***Amortised cost***
Rupiah					***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	43,362,582	43,717,378	32,230,617	32,820,250	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Sukuk Bank Indonesia	8,602,984	8,602,984	26,935,010	26,935,010	*Sukuk Bank Indonesia*
Sukuk korporasi	902,800	902,800	1,271,600	1,271,600	*Corporate sukuk*
Wesel ekspor	160,571	160,571	204,786	204,786	*Export bills*
	53,028,937	53,383,733	60,642,013	61,231,646	
Mata uang asing					***Foreign currencies***
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	483,371	495,803	753,245	771,899	*Government Islamic Securities ("SBSN")*
Wesel ekspor	-	-	1,314	1,314	*Export bills*
	483,371	495,803	754,559	773,213	
Total biaya perolehan diamortisasi	53,512,308	53,879,536	61,396,572	62,004,859	***Total amortised cost***
Total investasi pada surat berharga		57,851,905		67,597,145	***Total investments in marketable securities***
Cadangan kerugian penurunan nilai		(10,634)		(18,075)	*Allowance for impairment losses*
Bersih		57,841,271		67,579,070	*Net*

b. Berdasarkan penerbit / *b. By issuer*

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating*		Nilai tercatat/ *Carrying value*	
		31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Measured at fair value through profit or loss*					
Rupiah					
Bank Indonesia	-	-	-	-	2,000,000
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	3,602	-
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	588	1,948
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	-	19,033
Seri SBSN PBS011	8.75	-	-	165,882	-
Seri SBSN PBS015	8.00	-	-	26,296	-
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	52,396	-
Seri SBSN PBS019	8.25	-	-	174,574	-
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	27,901	-
Seri SBSN PBS022	8.63	-	-	1,704	-
Seri SBSN PBS023	8.13	-	-	16,071	-
Seri SBSN PBS025	8.38	-	-	166	-
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	10,087	-
Seri SBSN PBS027	6.50	-	-	93,970	51,778
Seri SBSN PBS029	6.38	-	-	5,450	8,537
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	-	350
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	18,204	-
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	2,530	-
Seri SBSN PBS033	6.75	-	-	9,779	-
Seri SBSN SR011	8.05	-	-	-	2,644
Seri SBSN SR012	6.30	-	-	197,103	2,855
Seri SBSN SR013	6.05	-	-	104,730	4,897
Seri SBSN SR014	5.47	-	-	2,279	7,806
Seri SBSN SR015	5.10	-	-	3,488	11,567
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	4,444	-
Seri SBSN SR017	5.90	-	-	80	-
SPN-S 08032022	-	-	-	-	34,954
SPN-S 12022022	-	-	-	-	88,559
SPN-S 14012022	-	-	-	-	349,602
				921,324	2,584,530

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan)

b. By issuer (continued)

Penerbit/*Issuer*	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ *Annual revenue sharing rate (%)*	Peringkat/ *Rating*		Nilai tercatat/ *Carrying value*	
		31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021	31 Desember/ *December* 2022	31 Desember/ *December* 2021
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ ***Measured at fair value through other comprehensive income***					
Rupiah					
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	144,853	30,766
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	180,948	194,783
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	-	78,201
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	-	55,847
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	615,901	25,109
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	947,419	1,434,262
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	825,050	1,188,788
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	336,874	-
				3,051,045	3,007,756
Diukur pada biaya perolehan/ ***Measured at acquisition cost***					
Rupiah					
Bank Indonesia	3.50	-	-	8,602,984	26,935,010
Korporasi/*Corporation*					
BPD Kalsel 2022	8.00	idA(sy)	-	35,000	-
CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 Seri B	7.55	-	idAAA(sy)	-	2,000
Eximbank I Tahap III Tahun 2019 Seri B	7.50	-	idAAA(sy)	-	90,000
Inka Tahun Tahun 2020	9.35	idBBB+(sy)	idBBB+(sy)	75,000	75,000
ISAP Tahap I 2022	7.00	idAAA(sy)	-	213,800	-
Medco Power Indonesia II Tahun 2019 Seri A	10.00	-	idA(sy)	-	140,600
MPI Tahap I 22 Seri A	9.00	idA(sy)	-	150,000	-
PT Global Mediacom Tbk Tahun 2017 Seri A	11.50	-	idA(sy)	-	25,000
PT Global Mediacom Tbk Tahun 2022	10.00	idA+(sy)	-	50,000	-
PT Kimia Farma Tahun 2019	8.75	-	idAA-(sy)	-	240,000
PT XL Axiata I Tahun 2022 Seri A	6.75	idAAA(sy)	-	195,000	-
PTPN III Tahun 2018	11.00	idBBB+(sy)	idBBB(sy)	85,000	85,000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Th 2018 Seri B	8.50	-	idAAA(sy)	-	200,000
Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Th 2019 Seri B	7.75	-	idAAA(sy)	-	315,000
Wijaya Karya I Tahun 2020 Seri A	8.60	idA(sy)	idA(sy)	99,000	99,000
Pemerintah/*Government*					
Seri SBSN IFR0006	10.25	-	-	51,278	52,150
Seri SBSN IFR0010	10.00	-	-	101,166	102,559
Seri SBSN PBS002	5.45	-	-	-	1,966,663
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	1,357,981	1,330,510
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	708,790	706,990
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	156,374	156,190
Seri SBSN PBS011	8.75	-	-	2,609,033	2,666,067
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	7,649,749	6,359,691
Seri SBSN PBS019	8.25	-	-	3,513,940	3,579,881
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	111,723	-
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	7,928,534	7,890,707
Seri SBSN PBS027	6.50	-	-	4,639,620	4,712,716
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	3,359,089	390,080
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	3,065,272	546,416
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	6,621,368	324,652
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	48,893	-
Seri SBSN PBSG001	6.63	-	-	365,188	-
Seri SBSN SR011	8.05	-	-	-	637,354
Seri SBSN SR012	6.30	-	-	5,452	5,485
Seri SBSN SR013	6.05	-	-	361,997	368,619
Seri SBSN SR014	5.47	-	-	508,147	514,998
Seri SBSN SR015	5.10	-	-	505,358	508,522
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	48,426	-
Wesel Ekspor	8.50	-	-	160,571	204,786
				53,383,733	61,231,646
Dolar Amerika Serikat/*United States Dollar*					
Pemerintah/*Government*					
Seri INDOIS22	3.30	-	-	-	246,647
Seri INDOIS22 *NEW*	3.40	-	-	-	207,214
Seri INDOIS23	3.75	-	-	35,135	32,786
Seri INDOIS24	4.35	-	-	163,859	154,458
Seri INDOIS25	4.33	-	-	63,200	59,408
Seri INDOIS25 *NEW*	2.30	-	-	77,934	71,386
Seri INDOIS27	4.40	-	-	155,675	-
Wesel Ekspor	3.29	-	-	-	1,314
				495,803	773,213
				53,879,536	62,004,859
				57,851,905	67,597,145
Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*				(10,634)	(18,075)
				57,841,271	67,579,070

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan)

Jumlah nosional atas INDOIS23, INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 *NEW* dan INDOIS27 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD31.848.585 (nilai penuh).

Jumlah nosional atas INDOIS22, INDOIS22 *NEW*, INDOIS23, INDOIS24, INDOIS25 dan INDOIS25 *NEW* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD54.158.840 (nilai penuh).

Bank mengakui kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan "Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain" masing-masing sebesar Rp77.740 dan (Rp19.410) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

b. By issuer *(continued)*

The notional amount of INDOIS23, INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 NEW and INDOIS27 which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2022 amounted to USD31,848,585 (full amount).

The notional amount of INDOIS22, INDOIS22 NEW, INDOIS23, INDOIS24, INDOIS 25 and INDOIS25 NEW which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2021 amounted to USD54,158,840 (full amount).

The Bank recognised unrealised loss/(gain) on changes in the value of "Measured at fair value through other comprehensive income" securities amounting to Rp77,740 and (Rp19,410) for the years ended 31 December 2022 and 2021 which are recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

c. Berdasarkan jangka waktu / ***c. By period***

	2022	2021	
≤ 1 tahun	8,763,555	29,090,712	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 3 tahun	669,281	1,421,854	*> 1 - ≤ 3 years*
> 3 - ≤ 5 tahun	11,040,275	11,092,129	*> 3 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	37,378,794	25,992,450	*> 5 years*
	57,851,905	67,597,145	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10,634)	(18,075)	*Allowance for impairment losses*
	57,841,271	67,579,070	

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2022	2021	
≤ 1 bulan	8,052,606	24,740,791	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	957,995	6,611,482	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	11,828,390	2,296,562	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 tahun	37,012,914	33,948,310	*> 1 year*
	57,851,905	67,597,145	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10,634)	(18,075)	*Allowance for impairment losses*
	57,841,271	67,579,070	

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

e. Berdasarkan keterkaitan

e. By relationship

	2022	2021	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	9,343,718	29,164,789	*Rupiah*
Mata uang asing	-	1,314	*Foreign currencies*
	9,343,718	29,166,103	
Pihak berelasi (Catatan 42)			*Related parties (Note 42)*
Rupiah	48,012,384	37,659,143	*Rupiah*
Mata uang asing	495,803	771,899	*Foreign currencies*
	48,508,187	38,431,042	
	57,851,905	67,597,145	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10,634)	(18,075)	*Allowance for impairment losses*
	57,841,271	67,579,070	

f. Berdasarkan kolektibilitas

f. By collectibility

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 seluruh investasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

As at 31 December 2022 and 2021, all investments in marketable securities are classified as "Current".

g. Informasi penting lainnya

g. Other significant information

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai investasi surat berharga secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed the impairment on investments in marketable securities individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat surat berharga yang dijadikan jaminan.

As at 31 December 2022 and 2021, no marketable securities are pledged as collaterals.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for losses on investments in marketable securities are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	18,075	24,858	*Beginning balance*
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 37)	(7,498)	(6,783)	*Reversal during the year (Note 37)*
Selisih kurs	57	-	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	10,634	18,075	*Ending balance*

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI / *8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2022	2021	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	11,480	52,545	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	50,816	1,278	*Export L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Pihak ketiga			*Third parties*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	312,495	-	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	374,791	53,823	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 42)			*Related parties (Note 42)*
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	41,924	22,811	*Import L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	64,688	84,861	*Export L/C and Local Letter of Credit ("SKBDN")*
	106,612	107,672	
	481,403	161,495	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,814)	(1,615)	*Allowance for impairment losses*
	476,589	159,880	

b. Berdasarkan kolektibilitas / *b. By collectibility*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, semua tagihan akseptasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

As at 31 December 2022 and 2021, all acceptance receivables are classified as "Current".

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity*

	2022	2021	
≤ 1 bulan	34,170	13,265	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	75,330	74,396	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	371,903	73,834	*> 3 - ≤ 12 months*
	481,403	161,495	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,814)	(1,615)	*Allowance for impairment losses*
	476,589	159,880	

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover impairment losses from uncollectible acceptance receivables.

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan) / *8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES (continued)*

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan dan liabilitas akseptasi / *d. The movements of allowance for losses on acceptance receivables and liabilities*

	2022	2021	
Saldo awal	1,615	2,548	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 37)	3,199	(933)	*Provision/(reversal) during the year (Note 37)*
Saldo akhir	4,814	1,615	*Ending balance*

9. PIUTANG / *9. RECEIVABLES*

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas / *a. By currency, type and collectibility*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *murabahah*			*Murabahah receivables*
Lancar	119,929,638	97,075,510	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,998,740	1,859,833	*Special mention*
Kurang lancar	826,383	934,838	*Substandard*
Diragukan	536,273	516,328	*Doubtful*
Macet	1,458,670	1,167,904	*Loss*
	124,749,704	101,554,413	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Piutang *murabahah*			*Murabahah receivables*
Lancar	-	-	*Current*
Dalam perhatian khusus	123,652	131,147	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	-	-	*Loss*
	123,652	131,147	
	124,873,356	101,685,560	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,173,161)	(3,351,703)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	120,700,195	98,333,857	*Net*
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *istishna*			*Istishna receivables*
Lancar	129	321	*Current*
Dalam perhatian khusus	3	38	*Special mention*
Kurang lancar	-	-	*Substandard*
Diragukan	-	-	*Doubtful*
Macet	-	-	*Loss*
	132	359	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	(3)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	131	356	*Net*

9. PIUTANG (lanjutan) / *9. RECEIVABLES (continued)*

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas (lanjutan) / *a. By currency, type and collectibility (continued)*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
Piutang *ijarah*			*Ijarah receivables*
Lancar	-	-	*Current*
Dalam perhatian khusus	643	1,221	*Special mention*
Kurang lancar	693	85,193	*Substandard*
Diragukan	906	920	*Doubtful*
Macet	11,036	14,236	*Loss*
	13,278	101,570	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11,625)	(98,800)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,653	2,770	*Net*
	120,701,979	98,336,983	

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / *b. By currency, economic sector and collectibility*

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	1,403,122	46,071	25,907	14,031	595,313	2,084,444	*Manufacturing*
Jasa usaha	4,515,442	90,207	76,551	29,385	48,481	4,760,066	*Business services*
Konstruksi	273,828	10,387	2,173	5,275	6,897	298,560	*Construction*
Konsumer	93,188,053	1,286,816	462,770	323,660	580,079	95,841,378	*Consumer*
Listrik, gas dan air	58,964	2,285	4,538	98	539	66,424	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	821,468	54,123	8,265	5,372	7,519	896,747	*Transportation*
Perdagangan	11,359,721	327,790	197,652	119,079	175,495	12,179,737	*Trading*
Pertambangan	54,493	1,069	606	2,240	6,870	65,278	*Mining*
Pertanian	7,330,563	180,297	47,457	37,951	47,966	7,644,234	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	45,320	341	342	88	263	46,354	*Social/public*
Lainnya	878,793	-	815	-	284	879,892	*Others*
	119,929,767	1,999,386	827,076	537,179	1,469,706	124,763,114	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Pengangkutan	-	123,652	-	-	-	123,652	*Transportation*
	-	123,652	-	-	-	123,652	
Jumlah piutang	119,929,767	2,123,038	827,076	537,179	1,469,706	124,886,766	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,790,062)	(407,751)	(361,808)	(243,150)	(1,382,016)	(4,184,787)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	118,139,705	1,715,287	465,268	294,029	87,690	120,701,979	*Net*

	31 Desember/*December* 2021						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	1,423,265	42,463	204,202	32,393	498,729	2,201,052	*Manufacturing*
Jasa usaha	4,457,631	118,175	48,768	30,342	44,177	4,699,093	*Business services*
Konstruksi	276,330	11,564	4,908	5,829	5,498	304,129	*Construction*
Konsumer	73,635,857	1,164,230	408,390	287,674	417,645	75,913,796	*Consumer*
Listrik, gas dan air	68,757	4,941	257	222	8,342	82,519	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	962,241	57,182	7,571	5,037	6,044	1,038,075	*Transportation*
Perdagangan	9,039,330	337,834	232,158	119,612	149,804	9,878,738	*Trading*
Pertambangan	91,092	5,249	2,476	3,267	1,856	103,940	*Mining*
Pertanian	5,410,257	118,939	110,062	31,692	47,930	5,718,880	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	28,871	515	237	115	127	29,865	*Social/public*
Lainnya	1,682,200	-	1,002	1,065	1,988	1,686,255	*Others*
	97,075,831	1,861,092	1,020,031	517,248	1,182,140	101,656,342	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Pengangkutan	-	128,722	-	-	-	128,722	*Transportation*
Pertambangan	-	2,425	-	-	-	2,425	*Mining*
	-	131,147	-	-	-	131,147	
Jumlah piutang	97,075,831	1,992,239	1,020,031	517,248	1,182,140	101,787,489	*Total receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,276,171)	(351,173)	(490,466)	(284,455)	(1,048,241)	(3,450,506)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	95,799,660	1,641,066	529,565	232,793	133,899	98,336,983	*Net*

9. PIUTANG (lanjutan) / ***9. RECEIVABLES*** *(continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu (sesuai dengan perjanjian) / ***c. By period (based on agreement)***

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	287,642	450,174	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	1,266,989	1,404,091	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	19,211,176	17,039,524	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	103,997,307	82,762,553	*> 5 years*
	124,763,114	101,656,342	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	-	-	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	-	-	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	123,652	131,147	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	123,652	131,147	
Jumlah	124,886,766	101,787,489	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,184,787)	(3,450,506)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	120,701,979	98,336,983	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***d. By remaining period to maturity***

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	215,567	364,903	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	220,941	259,978	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,565,000	2,386,389	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	36,526,036	30,039,571	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	85,235,570	68,605,501	*> 5 years*
	124,763,114	101,656,342	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	-	-	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	123,652	131,147	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	123,652	131,147	
Jumlah	124,886,766	101,787,489	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,184,787)	(3,450,506)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	120,701,979	98,336,983	*Net*

e. Berdasarkan keterkaitan / ***e. By relationship***

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	124,537,941	101,155,714	*Rupiah*
Mata uang asing	123,652	131,147	*Foreign currencies*
	124,661,593	101,286,861	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	225,173	500,628	*Rupiah*
Jumlah	124,886,766	101,787,489	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,184,787)	(3,450,506)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	120,701,979	98,336,983	*Net*

9. PIUTANG (lanjutan)

***9. RECEIVABLES** (continued)*

f. Berdasarkan kolektibilitas

f. By collectibility

	31 Desember/*December* 2022		31 Desember/*December* 2021		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	119,929,767	1,790,062	97,075,831	1,276,171	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,123,038	407,751	1,992,239	351,173	*Special mention*
Kurang lancar	827,076	361,808	1,020,031	490,466	*Substandard*
Diragukan	537,179	243,150	517,248	284,455	*Doubtful*
Macet	1,469,706	1,382,016	1,182,140	1,048,241	*Loss*
	124,886,766	4,184,787	101,787,489	3,450,506	

g. Informasi penting lainnya

g. Other significant information

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

1) Employee loans that used murabahah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 25 (twenty five) years period and paid through monthly salary deductions.

2) Efektif *yield* margin piutang murabahah untuk Rupiah berkisar antara 10,15% sampai dengan 11,58% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 9,51% sampai dengan 13,77% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan untuk mata uang asing berkisar antara 0,03% sampai dengan 2,14% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 1,56% sampai dengan 2,62% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

2) Effective margin yield murabahah receivables for Rupiah ranges from 10.15% to 11.58% per annum for the year ended 31 December 2022 and 9.51% to 13.77% per annum for the year ended 31 December 2021 and for foreign currencies ranges from 0.03% to 2.14% per annum for the year ended 31 December 2022 and 1.56% to 2.62% per annum for the year ended 31 December 2021.

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

3) The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	3,450,506	3,294,706	*Beginning balance*
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 37)	1,880,435	1,397,845	*Provision during the year (Note 37)*
Penerimaan kembali hapus buku	255,382	180,655	*Recoveries of write-off*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,409,512)	(1,423,484)	*Write-off during the year*
Selisih kurs	7,976	784	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	4,184,787	3,450,506	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on murabahah receivables is adequate to cover impairment losses from uncollectible receivables.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Receivables are collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

9. PIUTANG (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

4) Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.970.744 (2021: Rp14.404.822), termasuk piutang restrukturisasi terkait COVID-19 sebesar Rp8.036.421 (2021: Rp11.130.173). Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.

Berikut ini adalah jumlah piutang yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

***9. RECEIVABLES** (continued)*

***g. Other significant information** (continued)*

4) Total restructured receivables as at 31 December 2022 amounting to Rp10,970,744 (2021: Rp14,404,822), including restructured receivables related to COVID-19 amounting to Rp8,036,421 (2021: Rp11,130,173). Receivables were being restructured by extending the period, rescheduling and additional receivable facility for debtors.

The following is the amount of receivables that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2022 and 2021 as follows:

	2022	2021	
Lancar	7,862,535	11,445,478	*Current*
Dalam perhatian khusus	1,143,149	1,080,806	*Special mention*
Kurang lancar	541,984	638,686	*Substandard*
Diragukan	355,426	365,251	*Doubtful*
Macet	1,067,650	874,601	*Loss*
	10,970,744	14,404,822	

5) Rasio *Non-Performing Financing* ("*NPF*") bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

5) The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on receivables are as follows:

	2022	2021	
Jumlah piutang*)	124,886,633	101,787,248	*Total receivables*)
NPF - Bruto*)	2,833,961	2,719,419	*NPF - Gross*)
Persentase NPF - Bruto	2.27%	2.67%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF- Neto*)	846,987	896,257	*NPF - Net*)
Persentase NPF - Neto	0.68%	0.88%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar piutang kepada bank lain

) Exclude receivables to other banks

10. PINJAMAN *QARDH*

10. FUNDS OF QARDH

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
Rahn	4,496,408	3,737,737	*Rahn*
Qardh	3,016,141	3,820,787	*Qardh*
Kartu Hasanah	545,098	392,593	*Hasanah Card*
	8,057,647	7,951,117	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Qardh	1,643,962	1,468,114	*Qardh*
Jumlah	9,701,609	9,419,231	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(834,596)	(337,831)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	8,867,013	9,081,400	*Net*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / *b. By currency, economic sector and collectibility*

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	3,077	7,955	-	1,297	230,816	243,145	*Manufacturing*
Jasa usaha	131,724	-	-	-	-	131,724	*Business services*
Konstruksi	1,891,949	23,102	-	15,566	24,344	1,954,961	*Construction*
Konsumer	5,203,596	30,239	7,417	6,504	9,306	5,257,062	*Consumer*
Pengangkutan	-	-	6,013	-	3,500	9,513	*Transportation*
Perdagangan	259,977	-	20	3,000	1,900	264,897	*Trading*
Pertanian	139,978	-	-	-	-	139,978	*Agriculture*
Lainnya	56,367	-	-	-	-	56,367	*Others*
	7,686,668	61,296	13,450	26,367	269,866	8,057,647	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Industri	1,552,772	-	-	-	-	1,552,772	*Manufacturing*
Pengangkutan	16,626	-	-	-	-	16,626	*Transportation*
Perdagangan	15,639	-	-	-	-	15,639	*Trading*
Pertambangan	54,097	-	-	-	-	54,097	*Mining*
Pertanian	4,828	-	-	-	-	4,828	*Agriculture*
	1,643,962	-	-	-	-	1,643,962	
Jumlah pinjaman *qardh*	9,330,630	61,296	13,450	26,367	269,866	9,701,609	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(516,085)	(21,335)	(6,956)	(20,354)	(269,866)	(834,596)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	8,814,545	39,961	6,494	6,013	-	8,867,013	*Net*

	31 Desember/*December* 2021						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	11,934	-	-	89	1,836	13,859	*Manufacturing*
Jasa usaha	609,180	-	-	403	6,043	615,626	*Business services*
Konstruksi	2,134,367	-	-	241,943	19,883	2,396,193	*Construction*
Konsumer	4,458,025	30,429	5,868	7,207	9,510	4,511,039	*Consumer*
Pengangkutan	-	3,500	6,013	-	-	9,513	*Transportation*
Perdagangan	235,623	4	-	-	708	236,335	*Trading*
Pertambangan	-	-	8,967	-	-	8,967	*Mining*
Pertanian	26,108	-	-	-	-	26,108	*Agriculture*
Lainnya	130,536	-	-	2,941	-	133,477	*Others*
	7,605,773	33,933	20,848	252,583	37,980	7,951,117	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Industri	1,424,924	-	-	-	-	1,424,924	*Manufacturing*
Pengangkutan	37,740	-	-	-	-	37,740	*Transportation*
Perdagangan	2,714	-	-	-	-	2,714	*Trading*
Sosial/masyarakat	2,736	-	-	-	-	2,736	*Social/public*
	1,468,114	-	-	-	-	1,468,114	
Jumlah pinjaman *qardh*	9,073,887	33,933	20,848	252,583	37,980	9,419,231	*Total funds of qardh*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(181,484)	(1,152)	(3,054)	(127,779)	(24,362)	(337,831)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	8,892,403	32,781	17,794	124,804	13,618	9,081,400	*Net*

c. Berdasarkan jangka waktu (sesuai dengan perjanjian) / *c. By period (based on agreement)*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	5,943,594	6,711,559	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	644,726	227,289	*>1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	47,135	53,954	*>2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1,422,192	958,315	*> 5 years*
	8,057,647	7,951,117	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	1,621,449	1,429,234	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	22,513	38,880	*>1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	-	-	*>2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	1,643,962	1,468,114	
Jumlah	9,701,609	9,419,231	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(834,596)	(337,831)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	8,867,013	9,081,400	*Net*

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	1,067,343	1,460,225	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	2,834,400	2,712,592	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	2,299,952	2,774,938	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	1,071,676	453,078	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	784,276	550,284	*> 5 years*
	8,057,647	7,951,117	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	584,312	136,707	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	889,384	522,108	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	170,266	809,299	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	-	-	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	-	-	*> 5 years*
	1,643,962	1,468,114	
Jumlah	9,701,609	9,419,231	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(834,596)	(337,831)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	8,867,013	9,081,400	*Net*

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	6,356,470	6,665,289	*Rupiah*
Mata uang asing	1,643,962	1,468,114	*Foreign currency*
	8,000,432	8,133,403	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	1,701,177	1,285,828	*Rupiah*
Jumlah	9,701,609	9,419,231	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(834,596)	(337,831)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	8,867,013	9,081,400	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

	31 Desember/*December* 2022		31 Desember/*December* 2021		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	9,330,630	516,085	9,073,887	181,484	*Current*
Dalam perhatian khusus	61,296	21,335	33,933	1,152	*Special mention*
Kurang lancar	13,450	6,956	20,848	3,054	*Substandard*
Diragukan	26,367	20,354	252,583	127,779	*Doubtful*
Macet	269,866	269,866	37,980	24,362	*Loss*
	9,701,609	834,596	9,419,231	337,831	

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya

1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

	2022	2021	
Saldo awal	337,831	226,482	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 37)	576,774	251,313	Provisions during the year (Note 37)
Penerimaan kembali hapus buku	2,293	1,515	Recoveries of written-off
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(83,813)	(141,608)	Write-off during the year
Selisih kurs	1,511	129	Exchange rate differences
Saldo akhir	834,596	337,831	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh*.

2) Pinjaman *qardh* dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

3) Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp740.730 (2021: Rp1.101.870), termasuk piutang restrukturisasi terkait COVID-19 sebesar Rp703.675 (2021: Rp780.487). Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan ulang dan penambahan fasilitas pinjaman *qardh* bagi debitur.

Berikut ini adalah jumlah pinjaman *qardh* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	2022	2021	
Lancar	657,100	814,861	Current
Dalam perhatian khusus	32,384	5,628	Special mention
Kurang lancar	6,608	15,544	Substandard
Diragukan	15,815	244,958	Doubtful
Macet	28,823	20,879	Loss
	740,730	1,101,870	

10. *FUNDS OF QARDH* (continued)

g. Other significant information

1) The movements of allowance for impairment losses on funds of qardh are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on funds of qardh is adequate to cover impairment losses from uncollectible funds of qardh.

2) Funds of qardh are collateralised by pawning, registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, or by other guarantees generally accepted by the Bank.

3) Total restructured funds of qardh as at 31 December 2022 amounting to Rp740,730 (2021: Rp1,101,870), including restructured receivables related to COVID-19 amounting to Rp703,675 (2021: Rp780,487). Receivables were being restructured by extending the period, rescheduling and additional funds of qardh facility for debtors.

The following is the amount of funds of qardh that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2022 and 2021 as follows:

10. PINJAMAN *QARDH* (lanjutan) / *10. FUNDS OF QARDH (continued)*

g. Informasi penting lainnya (lanjutan) / *g. Other significant information (continued)*

4) Rasio *Non-Performing Financing* ("*NPF*") bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

4) The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on funds of qardh are as follows:

	2022	2021	
Jumlah pinjaman *qardh*[*)]	9,701,609	9,419,231	*Total funds of qardh*[*)]
NPF - Bruto[*)]	309,683	311,411	*NPF - Gross*[*)]
Persentase NPF - Bruto	3.19%	3.31%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto[*)]	12,507	156,216	*NPF - Net*[*)]
Persentase NPF - Neto	0.13%	1.66%	*Percentage of NPF - Net*

[*)] Diluar pinjaman *qardh* kepada bank lain / *Exclude funds of qardh to other banks*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* / *11. MUDHARABAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	1,028,305	1,616,063	*Working capital*
Investasi	13,092	12,374	*Investment*
Jumlah	1,041,397	1,628,437	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39,440)	(36,123)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,001,957	1,592,314	*Net*

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / *b. By economic currency, sector and collectibility*

	31 Desember/*December* 2022						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	6,720	-	-	-	149	6,869	*Manufacturing*
Jasa usaha	16,116	-	-	-	-	16,116	*Business services*
Konstruksi	6,584	-	-	-	-	6,584	*Construction*
Perdagangan	19,929	-	-	-	-	19,929	*Trading*
Pertanian	1,803	-	-	-	-	1,803	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	1,516	-	-	-	-	1,516	*Social/public*
Lainnya	959,053	10,208	685	1,363	17,271	988,580	*Others*
Jumlah pembiayaan	1,011,721	10,208	685	1,363	17,420	1,041,397	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9,764)	(10,208)	(685)	(1,363)	(17,420)	(39,440)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,001,957	-	-	-	-	1,001,957	*Net*

	31 Desember/*December* 2021						
	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	4,916	-	-	-	-	4,916	*Manufacturing*
Jasa usaha	36,449	-	-	-	221	36,670	*Business services*
Konstruksi	3,129	-	-	-	-	3,129	*Construction*
Perdagangan	366,073	-	-	-	-	366,073	*Trading*
Pertanian	3,588	-	-	-	-	3,588	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	-	-	-	-	215	215	*Social/public*
Lainnya	1,192,713	234	3,864	71	16,964	1,213,846	*Others*
Jumlah pembiayaan	1,606,868	234	3,864	71	17,400	1,628,437	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17,683)	(34)	(970)	(36)	(17,400)	(36,123)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,589,185	200	2,894	35	-	1,592,314	*Net*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	93,706	511,224	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	183,177	310,855	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	287,915	332,152	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	476,599	474,206	*> 5 years*
Jumlah	1,041,397	1,628,437	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39,440)	(36,123)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,001,957	1,592,314	*Net*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan) / *11. MUDHARABAH FINANCING (continued)*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	9,809	12,173	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	98,222	113,569	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	176,926	778,672	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	537,883	504,210	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	218,557	219,813	*> 5 years*
Jumlah	1,041,397	1,628,437	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39,440)	(36,123)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,001,957	1,592,314	*Net*

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	816,175	1,154,595	*Rupiah*
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	225,222	473,842	*Rupiah*
Jumlah	1,041,397	1,628,437	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39,440)	(36,123)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	1,001,957	1,592,314	*Net*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *f. By collectibility*

	31 Desember/*December* 2022		31 Desember/*December* 2021		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	1,011,721	9,764	1,606,868	17,683	*Current*
Dalam perhatian khusus	10,208	10,208	234	34	*Special mention*
Kurang lancar	685	685	3,864	970	*Substandard*
Diragukan	1,363	1,363	71	36	*Doubtful*
Macet	17,420	17,420	17,400	17,400	*Loss*
	1,041,397	39,440	1,628,437	36,123	

g. Informasi penting lainnya / *g. Other significant information*

1) Efektif *yield* margin pembiayaan *mudharabah* untuk Rupiah berkisar antara 7,94% sampai dengan 10,59% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan berkisar antara 7,09% sampai dengan 14,35% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

1) Effective margin yield mudharabah financing for Rupiah ranges from 7.94% to 10.59% per annum for the year ended 31 December 2022 and ranges from 7.09% to 14.35% per annum for the year ended 31 December 2021.

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

2) The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	36,123	72,195	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 37)	9,043	(1,954)	*Provisions/(reversals) during the year (Note 37)*
Penerimaan kembali hapus buku	2,845	131	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama periode berjalan	(8,571)	(34,249)	*Write-off during the period*
Saldo akhir	39,440	36,123	*Ending balance*

11. PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

3) Pembiayaan *mudharabah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

4) Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.116 (2021: Rp121.192), termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait COVID-19 sebesar Rp42.075 (2021: Rp107.082). Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan ulang dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

11. MUDHARABAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

3) Mudharabah financing is collateralised by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

4) Total restructured mudharabah financing of qardh as at 31 December 2022 amounting to Rp47,116 (2021: Rp121,192), including restructured mudharabah financing related to COVID-19 amounting to Rp42,075 (2021: Rp107,082). Mudharabah financing were being restructured by extending the period, rescheduling and additional facility for debtors.

The following is the amount of mudharabah financing that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2022 and 2021 as follows:

	2022	2021	
Lancar	20,801	103,290	*Current*
Dalam perhatian khusus	10,208	224	*Special mention*
Kurang lancar	685	3,864	*Substandard*
Diragukan	1,363	-	*Doubtful*
Macet	14,059	13,814	*Loss*
	47,116	121,192	

5) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

5) The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on mudharabah financing are as follows:

	2022	2021	
Jumlah pembiayaan *mudharabah*[*)]	895,458	1,519,729	*Total mudharabah financing*[*)]
NPF - Bruto[*)]	17,682	21,335	*NPF - Gross*[*)]
Persentase NPF - Bruto	1.97%	1.40%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto[*)]	-	2,929	*NPF - Net*[*)]
Persentase NPF - Neto	0.00%	0.19%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar pembiayaan *mudharabah* kepada bank lain

**) Exclude mudharabah financing to other banks*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *mudharabah*.

Management believes that the allowance for impairment losses on mudharabah financing is adequate to cover impairment losses from uncollectible mudharabah financing.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* / *12. MUSYARAKAH FINANCING*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / *a. By type and currency*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
Modal kerja	28,624,475	25,899,951	*Working capital*
Investasi	28,603,520	21,174,154	*Investment*
Konsumsi	11,253,168	7,302,971	*Consumption*
	68,481,163	54,377,076	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Modal kerja	495,523	1,794,235	*Working capital*
Investasi	1,613,825	1,383,125	*Investment*
	2,109,348	3,177,360	
Jumlah	70,590,511	57,554,436	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,139,565)	(3,651,313)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	66,450,946	53,903,123	*Net*

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas / *b. By economic currency, sector and collectibility*

31 Desember/*December* 2022

	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	6,117,878	13,721	179,318	17,395	536,111	6,864,423	*Manufacturing*
Jasa usaha	10,355,976	40,017	24,233	10,300	63,374	10,493,900	*Business services*
Konstruksi	13,435,953	474,656	62,651	12,150	47,047	14,032,457	*Construction*
Konsumer	11,086,276	70,698	51,531	19,406	25,257	11,253,168	*Consumer*
Listrik, gas, dan air	2,982,048	606	8,778	-	-	2,991,432	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	4,445,028	3,067	26,467	-	11,029	4,485,591	*Transportation*
Perdagangan	6,003,387	338,935	75,844	55,919	75,089	6,549,174	*Trading*
Pertambangan	1,860,700	5,840	4,244	-	3,730	1,874,514	*Mining*
Pertanian	6,345,769	46,907	60,108	13,259	23,886	6,489,929	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	281,320	-	-	-	-	281,320	*Social/public*
Lainnya	3,153,636	1,702	-	294	9,623	3,165,255	*Others*
	66,067,971	996,149	493,174	128,723	795,146	68,481,163	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Industri	11,983	-	-	-	-	11,983	*Manufacturing*
Listrik, gas, dan air	587,571	-	388,533	-	-	976,104	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	60,652	-	-	-	-	60,652	*Transportation*
Perdagangan	10,679	-	-	-	-	10,679	*Trading*
Pertambangan	1,049,930	-	-	-	-	1,049,930	*Mining*
	1,720,815	-	388,533	-	-	2,109,348	
Jumlah pembiayaan	67,788,786	996,149	881,707	128,723	795,146	70,590,511	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,045,521)	(561,540)	(665,525)	(71,833)	(795,146)	(4,139,565)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	65,743,265	434,609	216,182	56,890	-	66,450,946	*Net*

31 Desember/*December* 2021

	Lancar/ *Current*	Perhatian khusus/*Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Rupiah							***Rupiah***
Industri	5,194,504	73,601	263,039	8,953	533,903	6,074,000	*Manufacturing*
Jasa usaha	8,843,528	93,821	19,381	15,167	20,409	8,992,306	*Business services*
Konstruksi	11,645,298	417,713	37,902	43,338	20,779	12,165,030	*Construction*
Konsumer	7,199,046	49,896	21,232	12,218	20,579	7,302,971	*Consumer*
Listrik, gas, dan air	2,984,992	1,777	677	-	391	2,987,837	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	3,843,288	6,949	2,399	6,064	984	3,859,684	*Transportation*
Perdagangan	5,251,649	324,176	119,246	59,755	109,868	5,864,694	*Trading*
Pertambangan	280,941	2,515	4,898	1,207	4,661	294,222	*Mining*
Pertanian	4,732,136	29,124	45,857	29,475	27,912	4,864,504	*Agriculture*
Sosial/masyarakat	150,673	-	-	-	-	150,673	*Social/public*
Lainnya	1,812,890	-	-	-	8,265	1,821,155	*Others*
	51,938,945	999,572	514,631	176,177	747,751	54,377,076	
Mata uang asing							***Foreign currencies***
Industri	13,591	-	-	-	-	13,591	*Manufacturing*
Listrik, gas, dan air	685,894	-	164,192	231,307	-	1,081,393	*Electricity, gas and water*
Pengangkutan	65,707	-	-	-	-	65,707	*Transportation*
Pertambangan	2,016,669	-	-	-	-	2,016,669	*Mining*
	2,781,861	-	164,192	231,307	-	3,177,360	
Jumlah pembiayaan	54,720,806	999,572	678,823	407,484	747,751	57,554,436	*Total financing*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,877,190)	(235,041)	(455,229)	(336,102)	(747,751)	(3,651,313)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	52,843,616	764,531	223,594	71,382	-	53,903,123	*Net*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

c. Berdasarkan jangka waktu / *c. By period*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 tahun	6,549,788	6,258,719	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	7,004,338	7,488,362	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	11,338,883	8,181,089	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	43,588,154	32,448,906	*> 5 years*
	68,481,163	54,377,076	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 tahun	301,119	1,500,421	*≤ 1 year*
> 1 - ≤ 2 tahun	2,501	-	*> 1 - ≤ 2 years*
> 2 - ≤ 5 tahun	152,562	177,913	*> 2 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	1,653,166	1,499,026	*> 5 years*
	2,109,348	3,177,360	
Jumlah	70,590,511	57,554,436	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,139,565)	(3,651,313)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	66,450,946	53,903,123	*Net*

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *d. By remaining period to maturity*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	2,925,305	2,270,215	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	4,041,830	4,111,033	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	8,126,567	8,668,811	*> 3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	18,682,558	12,201,420	*> 1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	34,704,903	27,125,597	*> 5 years*
	68,481,163	54,377,076	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
≤ 1 bulan	-	1,027,459	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	215,103	267,483	*>1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	88,517	206,661	*>3 - ≤ 12 months*
> 1 - ≤ 5 tahun	1,468,587	988,811	*>1 - ≤ 5 years*
> 5 tahun	337,141	686,946	*> 5 years*
	2,109,348	3,177,360	
Jumlah	70,590,511	57,554,436	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,139,565)	(3,651,313)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	66,450,946	53,903,123	*Net*

e. Berdasarkan keterkaitan / *e. By relationship*

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	46,598,245	35,351,739	*Rupiah*
Mata uang asing	2,109,348	1,846,369	*Foreign currencies*
	48,707,593	37,198,108	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	21,882,918	19,025,337	*Rupiah*
Mata uang asing	-	1,330,991	*Foreign currencies*
	21,882,918	20,356,328	
Jumlah	70,590,511	57,554,436	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,139,565)	(3,651,313)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	66,450,946	53,903,123	*Net*

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan) / *MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

f. Berdasarkan kolektibilitas / *By collectibility*

	31 Desember/*December* 2022		31 Desember/*December* 2021		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/*Allowance for impairment losses*	
Lancar	67,788,786	2,045,521	54,720,806	1,877,190	*Current*
Dalam perhatian khusus	996,149	561,540	999,572	235,041	*Special mention*
Kurang lancar	881,707	665,525	678,823	455,229	*Substandard*
Diragukan	128,723	71,833	407,484	336,102	*Doubtful*
Macet	795,146	795,146	747,751	747,751	*Loss*
	70,590,511	4,139,565	57,554,436	3,651,313	

g. Informasi penting lainnya / *Other significant information*

1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *musyarakah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

1) Employee loans that used musyarakah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 25 (twenty five) years period and paid through monthly salary deductions.

2) Efektif *yield* margin pembiayaan musyarakah untuk Rupiah berkisar antara 7,10% sampai dengan 8,08% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan berkisar antara 7,66% sampai dengan 10,55% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan untuk mata uang asing berkisar antara 2,10% sampai dengan 7,31% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan berkisar antara 2,34% sampai dengan 8,95% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.

2) Effective margin yield musyarakah financing for Rupiah ranges from 7.10% to 8.08% per annum for the year ended 31 December 2022 and ranges from 7.66% to 10.55% per annum for the year ended 31 December 2021 and for foreign currencies ranging from 2.10% to 7.31% per annum for the year ended 31 December 2022 and ranges from 2.34% to 8.95% per annum for the year ended 31 December 2021.

3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

3) The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	3,651,313	2,452,358	*Beginning balance*
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 37)	1,230,474	2,057,965	*Provisions during the year (Note 37)*
Penerimaan kembali hapus buku	103,459	53,659	*Recoveries of written-off*
Penghapusbukuan selama periode berjalan	(882,126)	(916,723)	*Write-off during the period*
Selisih kurs	36,445	4,054	*Exchange rate difference*
Saldo akhir	4,139,565	3,651,313	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah*.

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate to cover impairment losses from uncollectible musyarakah financing.

12. PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

4) Pembiayaan *musyarakah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

5) Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.471.188 (2021: Rp12.116.295), termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait COVID-19 sebesar Rp5.841.847 (2021: Rp5.717.217). Restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

Berikut ini adalah jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

12. MUSYARAKAH FINANCING *(continued)*

g. Other significant information *(continued)*

4) Musyarakah financing is collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 25) or by other collaterals generally acceptable by the Bank.

5) Total restructured musyarakah financing as at 31 December 2022 amounting to Rp11,471,188 (2021: Rp12,116,295), including restructured musyarakah financing related to COVID-19 amounting to Rp5,841,847 (2021: Rp5,717,217). Musyarakah financing were being restructured by extending the period, rescheduling and additional facility for debtors.

The following is the amount of musyarakah financing that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2022 and 2021 as follows:

	2022	2021	
Lancar	8,988,007	9,720,756	*Current*
Dalam perhatian khusus	877,781	869,755	*Special mention*
Kurang lancar	821,339	605,669	*Substandard*
Diragukan	79,321	335,762	*Doubtful*
Macet	704,740	584,353	*Loss*
	11,471,188	12,116,295	

6) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

6) The ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") gross and net on musyarakah financing are as follows:

	2022	2021	
Jumlah pembiayaan *musyarakah*[*)]	70,574,309	57,553,103	*Total musyarakah financing*[*)]
NPF - Bruto[*)]	1,805,576	1,834,058	*NPF - Gross*[*)]
Persentase NPF - Bruto	2,56%	3.19%	*Percentage of NPF - Gross*
NPF - Neto[*)]	273,072	294,976	*NPF - Net*[*)]
Persentase NPF - Neto	0,39%	0.51%	*Percentage of NPF - Net*

*) Diluar pembiayaan *musyarakah* kepada bank lain

) Exclude musyarakah financing to other banks

13. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK *IJARAH* - BERSIH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah, ijarah multijasa*, dan *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") dengan rincian sebagai berikut:

13. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET

This account represents lease object transactions from ijarah, ijarah multi-services and ijarah muntahiyah bittamlik ("IMBT") with details are as follows:

	2022	2021	
Properti	1,002,832	1,440,580	*Property*
Mesin dan instalasi	937,403	539,692	*Machinery and installations*
Multijasa	117,351	151,477	*Multi-services*
Lainnya	195,748	197,722	*Others*
Jumlah	2,253,334	2,329,471	*Total*
Akumulasi penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai	(768,761)	(1,427,906)	*Accumulated depreciation, amortisation, and impairment*
Bersih	1,484,573	901,565	*Net*

Beban penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai yang dibebankan pada laporan laba rugi masing-masing sebesar Rp599.581 dan Rp556.345 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 31).

Depreciation, amortisation expenses and impairment charged to the statement of profit or loss amounting to Rp599,581 and Rp556,345, respectively, for the years ended 31 December 2022 and 2021, respectively (Note 31).

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH

Aset tetap dan aset hak guna - bersih terdiri dari:

14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET

Fixed assets and right-of-use assets - net consist of:

	2022	2021	
Aset tetap - bersih	5,014,409	3,340,648	*Fixed assets - net*
Aset hak guna - bersih	640,289	715,305	*Right-of-use assets - net*
	5,654,698	4,055,953	

Aset tetap / *Fixed assets*

	31 Desember/*December* 2022						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset Tetap							***Fixed Assets***
Nilai revaluasi							***Revaluation cost***
Tanah	1,691,932	724,673	-	-	-	2,416,605	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	503,683	327,544	-	-	26,180	857,407	*Buildings*
Instalasi	246,173	22,062	-	-	23,716	291,951	*Installation*
Kendaraan bermotor	68,711	5,304	-	-	-	74,015	*Vehicles*
Inventaris kantor	3,000,464	260,487	-	-	278,950	3,539,901	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	106,628	27,861	-	-	242,862	377,351	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	432,853	673,866	-	-	(571,708)	535,011	*Construction in progress*
	6,050,444	2,041,797	-	-	-	8,092,241	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(114,333)	(29,956)	-	-	-	(144,289)	*Buildings*
Instalasi	(206,781)	(13,534)	-	-	-	(220,315)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(61,601)	(2,893)	-	-	-	(64,494)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(2,260,315)	(282,491)	-	-	-	(2,542,806)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(20,787)	(39,162)	-	-	-	(59,949)	*Leasehold improvement*
	(2,663,817)	(368,036)	-	-	-	(3,031,853)	
Akumulasi penurunan nilai							***Accumulated impairment***
Tanah	(45,979)	-	-	-	-	(45,979)	*Land*
Nilai buku	3,340,648					5,014,409	***Book value***

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET (continued)

Aset tetap (lanjutan)

***Fixed assets** (continued)*

	31 Desember/*December* 2021						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Penilaian kembali/ *Revaluation*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset Tetap							***Fixed Assets***
Nilai revaluasi							***Revaluation cost***
Tanah	1,578,336	-	-	113,596	-	1,691,932	*Land*
Nilai perolehan							***Acquisition cost***
Bangunan	424,885	17,577	-	-	61,221	503,683	*Buildings*
Instalasi	203,701	23,883	-	-	18,589	246,173	*Installation*
Kendaraan bermotor	65,912	2,799	-	-	-	68,711	*Vehicles*
Inventaris kantor	2,626,625	334,699	-	-	39,140	3,000,464	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	42,787	11,268	-	-	52,573	106,628	*Leasehold improvement*
Aset dalam penyelesaian	207,098	397,278	-	-	(171,523)	432,853	*Construction in progress*
	5,149,344	787,504	-	113,596	-	6,050,444	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Bangunan	(88,588)	(25,745)	-	-	-	(114,333)	*Buildings*
Instalasi	(187,680)	(19,101)	-	-	-	(206,781)	*Installation*
Kendaraan bermotor	(59,692)	(1,909)	-	-	-	(61,601)	*Vehicles*
Inventaris kantor	(2,071,524)	(188,791)	-	-	-	(2,260,315)	*Office equipment*
Renovasi atas aset sewa	(6,468)	(14,319)	-	-	-	(20,787)	*Leasehold improvement*
	(2,413,952)	(249,865)	-	-	-	(2,663,817)	
Akumulasi penurunan nilai							***Accumulated impairment***
Tanah	-	(45,979)	-	-	-	(45,979)	*Land*
Nilai buku	2,735,392					3,340,648	***Book value***

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Bangunan	384,335	259,291	*Buildings*
Inventaris kantor	150,676	173,562	*Office equipment*
	535,011	432,853	

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2022 adalah berkisar antara 10,00% - 95,00% dan 31 Desember 2021 adalah berkisar antara 17,02% - 93,91%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2023 sampai dengan 2024.

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2022 is between 10.00% - 95.00% and 31 December 2021 is between 17.02% - 93.91%. Those construction in progress as at 31 December 2022 are estimated to be completed in 2023 until 2024.

Jumlah penyusutan aset tetap dan aset hak guna yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah masing-masing sebesar Rp701.792 dan Rp610.595 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 36).

Depreciation expenses of fixed assets and right-of-use assets charged in the statement of profit or loss is amounting to Rp701,792 and Rp610,595 for the years ended 31 December 2022 and 2021, respectively (Note 36).

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, kecurian, dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah, PT Asuransi Tripakarta Unit Syariah, dan PT Zurich General Takaful Indonesia, keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah, PT BRI Asuransi Indonesia, dan PT Mandiri AXA General Insurance Unit Syariah, keseluruhannya adalah pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp6.095.006 dan Rp5.559.731 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

The Bank has insured the fixed assets (except land rights) to cover for losses against fire, theft and other risks to PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, PT Asuransi Wahana Tata, PT Asuransi Staco Mandiri Syariah Unit, PT Asuransi Tripakarta Unit Syariah and PT Zurich General Takaful Indonesia, all of which are third parties, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah, PT BRI Asuransi Indonesia and PT Mandiri AXA General Insurance Unit Syariah, all of which are related parties, with total insurance coverage amounting to Rp6,095,006 and Rp5,559,731 as at 31 December 2022 and 2021, respectively.

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp2.203.639 dan Rp2.099.998.

Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, adalah sebagai berikut:

***14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET** (continued)*

***Fixed assets** (continued)*

The Bank's management believes the amount is adequate to cover possible losses which may arise from insured assets.

As at 31 December 2022 and 2021, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp2,203,639 and Rp2,099,998 respectively.

Taxable value ("NJOP") of land rights and buildings owned by the Bank as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Tanah	985,156	937,982	*Land rights*
Bangunan	186,564	163,979	*Buildings*
	1,171,720	1,101,961	

Selain tanah dan bangunan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset dan nilai tercatatnya.

Nilai tanah Bank berdasarkan model biaya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.842.097 dan Rp1.117.424.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikator penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Other than land and building, there is no significant difference between the fair value of the asset and its carrying value

The Bank's land value based on the cost model as at 31 December 2022 and 2021 is Rp1,842,097 and Rp1,117,424.

Management believes that there are no indicators of impairment of fixed assets as at 31 December 2022 and 2021.

Revaluasi aset tetap

Penilaian atas aset tetap dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

a) Jenis dan hak yang melekat pada properti,
b) Kondisi pasar,
c) Lokasi,
d) Karakteristik fisik,
e) Karakteristik tanah.

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset non-keuangan:

- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

Revaluation of fixed assets

The valuations of fixed assets are performed based on Indonesian Valuation Standards. The valuation methods used are market data approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

a) Type and right on property,
b) Market condition,
c) Location,
d) Physical characteristic,
e) Land characteristic.

Fair value was determined by hierarchy and input used on technical valuation of non-financial assets:

- *Level 1: Input quoted (unadjusted) prices in active market for identical assets;*
- *Level 2: Input other than quoted market price in level 1 that are observable either directly or indirectly;*
- *Level 3: Input that are not observable.*

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

Revaluasi aset tetap (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar tanah dikategorikan sebagai nilai wajar level 2 berdasarkan input dari teknik penilaian yang digunakan.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan persetujuan OJK melalui surat No. S-159/PB.31/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penambahan penyertaan modal melalui *inbreng* Aset Tetap Tidak Bergerak ("ATTB") milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp152.997 yang terdiri dari tanah senilai Rp127.750 dan bangunan senilai Rp25.247 (tidak termasuk pajak). Revaluasi atas ATTB dengan nilai pasar sebesar Rp152.997 dilakukan oleh KJPP Rizki Djunaedy & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Maret 2020. Penambahan ATTB selama tahun 2020 sejumlah Rp175.876 terdiri dari tanah senilai Rp144.527 (termasuk pajak sejumlah Rp16.777) dan bangunan senilai Rp31.349 (termasuk pajak senilai Rp6.102) yang berasal dari *inbreng* ATTB terkait penambahan modal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BRIS melakukan penyesuaian kebijakan revaluasi aset tetap sesuai ketentuan dengan BSI atas pencatatan tanah dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi menggunakan model revaluasi. Secara total pada tahun 2021, kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp80.276 dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.892. Penilaian atas tanah dilakukan oleh independen eksternal yaitu KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan.

***14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET** (continued)*

***Revaluation of fixed assets** (continued)*

The fair value measurement for the land is categorised as level 2 fair value based on the inputs of the valuation technique used.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Based on the letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 dated 26 August 2020 and approval OJK by the letter No. S-159/PB.31/2020 dated 9 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has obtain additional share by inbreng Non-movable Fixed Assets ("ATTB") of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Syariah Mandiri amounting Rp152,997 which consists of land amounting Rp127,750 and buildings amounting Rp25,247 (exclude tax). Revaluation of ATTB with market value amounting Rp152,997 was performed by KJPP Rizki Djunaedy & Partners, external independent appraisal registered in OJK, based on their report dated 2 March 2020. Addition of ATTB in 2020 amounting Rp175,876 was consists of land amounting Rp144,527 (include tax amounting Rp16,777) and building amounting Rp31,349 (include tax amounting Rp6,102) from inbreng ATTB related to additional capital from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BRIsyariah Tbk ("BRIS")

On 31 January 2021, the ex-legacy BRIS made a policy adjustment of asset revaluation to be in line with BSI of land from cost model to revaluation model. In total in 2021, the increases in the carrying amount of land revaluation are recorded as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp80,276 and the decrease of carrying amount from revaluation is recorded as expenses in 2021 amounting to Rp12,892. The valuations of land was performed by KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan, an external independent appraisal.

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

Revaluasi aset tetap - *ex-legacy* PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BNIS melakukan penyesuaian kebijakan dengan BSI atas pencatatan bangunan dari sebelumnya menggunakan model revaluasi menjadi menggunakan model biaya. Atas hal ini, Bank melakukan pembalikan atas penilaian kembali bangunan yang sebelumnya sudah dicatat di "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp9.361.

Revaluasi atas tanah - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluasi atas tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp67.617, dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Abdullah Fitriantoro & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 25 November 2021. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2021 sebesar Rp113.596 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah sebesar Rp45.979 diakui dalam laba rugi tahun 2021 sebagai beban usaha lainnya.

Perubahan cadangan revaluasi aset bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

***14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET** (continued)*

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

On 31 January 2021, ex-legacy BNIS made a policy adjustment to be in line with BSI of building from revaluation model to cost model. In this regard, the Bank reversed the revaluation of the building which had previously been recorded in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp9,361.

Revaluation on land - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Revaluation on land with carrying amount on revaluation amounting Rp67,617, performed by Public Appraisal Service Office ("KJPP") Abdullah Fitriantoro & Rekan, an external independent appraisal registered on OJK, on their report dated 25 November 2021. Difference on land revaluation in 2021 amounting Rp113,596 was recorded as "Surplus on Revaluation of Fixed Asset" and expressed on other comprehensive income. Impairment of carrying value amounting Rp45,979 was recognised in the profit or loss of the year 2021 as other operating expense.

The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	444,530	395,725	*Beginning year balance*
Kenaikan nilai tanah	-	48,805	*Gain on land value*
Saldo akhir tahun	444,530	444,530	*Ending year balance*

Aset hak guna / ***Right-of-use assets***

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan kantor	1,104,110	258,740	(222,196)	1,140,654	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	188,061	-	(55,185)	132,876	*Vehicles and technology system*
	1,292,171	258,740	(277,381)	1,273,530	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(506,910)	(280,243)	222,196	(564,957)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(69,956)	(53,513)	55,185	(68,284)	*Vehicles and technology system*
	(576,866)	(333,756)	277,381	(633,241)	
Nilai buku	715,305			640,289	***Book value***

14. ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH (lanjutan)

14. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET (continued)

Aset hak guna (lanjutan)

***Right-of-use assets** (continued)*

	31 Desember/*December* 2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Nilai perolehan					***Acquisition cost***
Bangunan kantor	860,417	448,554	(204,861)	1,104,110	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	110,492	136,847	(59,278)	188,061	*Vehicles and technology system*
	970,909	585,401	(264,139)	1,292,171	
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Bangunan kantor	(257,040)	(321,153)	71,283	(506,910)	*Office buildings*
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	(52,186)	(39,577)	21,807	(69,956)	*Vehicles and technology system*
	(309,226)	(360,730)	93,090	(576,866)	
Nilai buku	661,683			715,305	***Book value***

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk semua sewa dengan kontrak jangka waktu tertentu, dibayar bulanan atau periodik. Terdapat pengecualian untuk sewa dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 12 bulan serta tidak ada opsi beli dan memiliki aset pendasar bernilai rendah, yaitu lebih kecil atau sama dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) dalam nilai penuh.

The Bank recognises the right-of-use assets and lease liabilities for all leases with time contracts, payable monthly or periodically. There are exceptions to the lease with a short term, which is less or equal to 12 months and there is no call option and has a low value underlying asset, which is less than or equal to Rp70,000,000 (seventy million Rupiah) in full amount.

15. ASET LAIN-LAIN

15. OTHER ASSETS

Aset lain-lain terdiri dari:

Other assets consist of:

	2022	2021	
Piutang pendapatan surat berharga	900,484	655,070	*Income receivables from securities*
Agunan yang diambil alih	859,007	875,376	*Foreclosed collaterals*
Biaya dibayar dimuka	759,473	483,399	*Prepaid expense*
Tagihan ATM	194,189	138,254	*ATM receivables*
Pendapatan pembiayaan yang akan diterima	158,240	128,837	*Income receivables from financing*
Tagihan SKBDN kepada nasabah	134,423	81,253	*SKBDN receivables to customers*
Persediaan alat tulis kantor dan materai	95,180	116,654	*Office supplies and stamps*
Setoran jaminan	54,226	51,864	*Guarantee deposit*
Lain-lain	343,543	329,678	*Others*
	3,498,765	2,860,385	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,131,300)	(1,151,950)	*Allowance for impairment losses*
Bersih	2,367,465	1,708,435	*Net*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

15. ASET LAIN-LAIN (lanjutan) / *15. OTHER ASSETS (continued)*

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Movement of the foreclosed collaterals as at of 31 December 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal	875,376	986,833	*Beginning balance*
Penjualan	(16,369)	(111,457)	*Sales*
Saldo akhir	859,007	875,376	*Ending balance*

16. LIABILITAS SEGERA / *16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY*

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Liabilitas ATM Jalin	258,988	224,901	*Liabilities to ATM Jalin*
Zakat Bank	141,405	101,555	*Zakat on the Bank*
Liabilitas ATM Prima	60,539	25,075	*Liabilities to ATM Prima*
Titipan tagihan pembayaran	45,111	47,958	*Remittance of bills payment*
Liabilitas pihak ketiga	36,295	8,377	*Liabilities to third parties*
Liabilitas ATM Bersama	30,185	14,980	*Liabilities to ATM Bersama*
Titipan dana nasabah	19,133	22,452	*Deposit of customer funds*
Liabilitas terkait pembiayaan	11,347	8,852	*Liabilities related financing*
Titipan ATM	7,071	2,175	*ATM remittance*
Zakat pegawai, nasabah dan umum	3,748	2,647	*Zakat of employees, customers and public*
Titipan lainnya	271,353	80,171	*Other remittances*
	885,175	539,143	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Titipan ATM	124,327	69,411	*ATM remittance*
	1,009,502	608,554	

Liabilitas ATM Jalin, ATM Prima dan ATM Bersama, merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* ("ATM") Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Jalin, jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Liabilities to ATM Jalin, ATM Prima and ATM Bersama represent liabilities arising from using the Bank's network of Automated Teller Machine ("ATM") by customers of using ATM Jalin network, ATM Prima and ATM Bersama.

Titipan lainnya merupakan titipan *direct* terhadap mitra Bank, titipan bagi hasil deposito jatuh tempo dan lain-lain.

Other remittances are direct remittances to the Bank's partners, remittances of time deposits profit sharing and others.

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui *platform E-Channel* Bank dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.

Zakat of employees, customers and publics are zakat paid individually through the Bank's E-Channel platform and will be distributed to zakat management institutions.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah *(shahibul maal)* atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah.*

This account represents the undistributed share of the customers (shahibul maal) on income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN (lanjutan)

17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING (continued)

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The Bank's undistributed profit sharing as at 31 December 2022 and 2021, are as follows:

	2022	2021	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	128,247	113,806	*Time deposits*
Giro	36,280	29,005	*Current accounts*
Subnotes	14,820	15,029	*Subnotes*
Tabungan	-	1	*Savings deposits*
	179,347	157,841	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	12,655	-	*Mudharabah term financing*
Deposito	484	278	*Time deposits*
	192,486	158,119	
Bank			***Bank***
Rupiah			***Rupiah***
Deposito	289	354	*Time deposits*
Giro	-	5	*Current accounts*
	289	359	
	192,775	158,478	

18. GIRO *WADIAH*

18. WADIAH DEMAND DEPOSITS

Giro *wadiah* terdiri dari:

Wadiah demand deposits consist of:

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	18,439,514	18,757,585	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	911,262	976,310	*United States Dollar*
Dolar Singapura	10,504	12,719	*Singapore Dollar*
Euro Europa	12,432	6,170	*Euro Europe*
Riyal Arab Saudi	13,984	4,167	*Saudi Arabian Riyal*
	19,387,696	19,756,951	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	2,404,787	1,301,454	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	5,369	32,290	*United States Dollar*
	2,410,156	1,333,744	
	21,797,852	21,090,695	

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which the third party funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	0.01% - 0.03%	0.00% - 0.38%	*Rupiah*
Mata uang asing	0.00% - 0.00%	0.00% - 0.09%	*Foreign currencies*

19. TABUNGAN *WADIAH*

19. WADIAH SAVINGS DEPOSITS

Tabungan *wadiah* terdiri dari:

Wadiah savings deposits consist of:

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	42,804,765	34,815,161	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,396,893	1,330,858	*United States Dollar*
	44,201,658	36,146,019	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	11,970	9,616	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	777	1,560	*United States Dollar*
	12,747	11,176	
	44,214,405	36,157,195	

Kisaran bonus tabungan *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate of bonus from wadiah savings deposits given by customers are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	0.00% - 0.00%	0.00% - 0.04%	*Rupiah*

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank ("SIMA")	2,075,000	-	*Interbank mudharabah investment certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	142,352	110,858	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	1,309	5,080	*Wadiah savings deposits*
	2,218,661	115,938	
Mata uang asing			***Foreign currencies***
Giro *wadiah*	36	-	*Wadiah demand deposits*
	2,218,697	115,938	

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank ("SIMA")	1,475,000	-	*Interbank mudharabah investment certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	140,053	109,121	*Wadiah demand deposits*
Tabungan *wadiah*	1,309	5,080	*Wadiah savings deposits*
	1,616,362	114,201	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Giro *wadiah*	36	-	*Wadiah demand deposits*
	1,616,398	114,201	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank ("SIMA")	600,000	-	*Interbank mudharabah investment certificate ("SIMA")*
Giro *wadiah*	2,299	1,737	*Wadiah demand deposits*
	602,299	1,737	
	2,218,697	115,938	

Kisaran bonus giro *wadiah* yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	0.72% - 0.75%	0.75% - 0.79%	*Rupiah*

21. PERPAJAKAN / *21. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut: / *The details of taxes payable are as follows:*

	2022	2021	
Utang pajak penghasilan			*Income tax payables*
Pasal 29	401,083	327,121	*Article 29*
Utang pajak lainnya			*Other tax payables*
Pasal 4 (2)	59,775	51,628	*Article 4 (2)*
Pasal 21	160,807	80,872	*Article 21*
Pasal 22	293	1,927	*Article 22*
Pasal 23	6,256	3,543	*Article 23*
Pasal 26	709	408	*Article 26*
PPN dan PPh Lainnya	38,562	38,579	*Value added tax and others*
	266,402	176,957	
	667,485	504,078	

b. Beban pajak / *b. Tax expense*

Sehubungan dengan penggabungan BRIS, BSM, dan BNIS, dimana BRIS adalah badan hukum yang menerima penggabungan, kewajiban perpajakan BSI merupakan kelanjutan dari kewajiban perpajakan BRIS. Sebagai entitas yang dibubarkan, kewajiban perpajakan BSM dan BNIS per 31 Januari 2021 telah dipenuhi pada bulan Mei 2021. BSM dan BNIS telah mengajukan permohonan pencabutan NPWP, dan efektif pada 1 Februari 2021 NPWP BSM dan BNIS tidak lagi digunakan.

In connection with the merger of BRIS, BSM and BNIS, where BRIS is the legal surviving entity, BSI's tax obligations are a continuation of BRIS' tax obligations. As dissolving entity, the tax liability of BSM and BNIS as at 31 January 2021 have been fulfilled in May 2021. BSM and BNIS has submitted request for tax ID number revocation, and effective on 1 February 2021, the tax ID number of BSM and BNIS are no longer used.

Dasar penghitungan PPh Badan atas laba BSI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah total laba BSI selama periode/tahun tersebut, yang merupakan gabungan laba ketiga bank dikurangi laba BSM dan BNIS untuk periode satu bulan yang berakhir pada 31 Januari 2021.

The basis for calculating the corporate income tax for BSI's profit of the year ended 31 December 2021 is BSI's total profit during the period/year, which represents combined profit of the three banks minus BSM and BNIS profits for one month period ended 31 January 2021.

	2022	2021	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			***PT Bank Syariah Indonesia Tbk***
Beban pajak kini	1,520,681	1,252,975	*Current tax expense*
Manfaat pajak tangguhan	(266,060)	(388,205)	*Deferred tax benefit*
Dampak atas perubahan tarif pajak	-	(41,622)	*Impact on tax rate adjustment*
	1,254,621	823,148	
Bank *ex-legacy* (Bank Syariah Mandiri, Bank BRIsyariah, Bank BNI Syariah)			***Bank ex-legacy (Bank Syariah Mandiri, Bank BRIsyariah, Bank BNI Syariah)***
Beban pajak kini	-	29,620	*Current tax expense*
Beban pajak tangguhan	-	79,551	*Deferred tax expense*
	-	109,171	
	1,254,621	932,319	

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

***21. TAXATION** (continued)*

***b. Tax expense** (continued)*

Reconciliation between income before income tax as stated in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable income are as follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak BSI	5,514,803	3,960,524	*Income before tax BSI*
Laba sebelum pajak bank *ex-legacy* (BNIS dan BSM) (1 Januari - 31 Januari 2021)	-	(298,816)	*Income before tax ex-legacy bank (BNIS and BSM) (1 January - 31 January 2021)*
Laba sebelum pajak penghasilan BSI	5,514,803	3,661,708	*Income before tax BSI*
Beda temporer			*Temporary differences*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penyisihan kerugian atas aset produktif	1,136,606	955,579	*Provision for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	(63,883)	(9,767)	*Provision for impairment losses on non-earning assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	11,679	(2,991)	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	(23,450)	(33,229)	*Provision for impairment losses on operational risk*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	17,441	9,199	*Provision for employee benefit liabilities*
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	(37,593)	95,833	*Depreciation of fixed assets and right-of-used assets*
Cadangan bonus	79,458	675,634	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	89,105	98,072	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Lainnya	-	(482)	*Others*
Jumlah beda temporer	1,209,363	1,787,848	*Total temporary differences*
Beda tetap			*Permanent differences*
Natura karyawan	74,615	65,694	*Benefit-in-kind*
Representasi dan sumbangan	9,555	13,178	*Representation and donation*
Keanggotaan non-asosiasi	880	3,937	*Non-association membership*
Kerugian revaluasi aset tetap	-	45,979	*Loss on revaluation of fixed assets*
Biaya lain-lain	102,970	116,996	*Others*
Total beda tetap	188,020	245,784	*Total permanent differences*
Total koreksi fiskal	1,397,383	2,033,632	*Total fiscal corrections*
Penghasilan kena pajak	6,912,186	5,695,340	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan badan	1,520,681	1,252,975	*Corporate income tax expense*
Pajak dibayar dimuka - pasal 25	(1,119,055)	(925,361)	*Prepaid tax - article 25*
Pajak yang dipotong pihak lain - pasal 22	(543)	(493)	*Tax withheld by other party - article 22*
Utang pajak penghasilan - pasal 29	401,083	327,121	***Income tax payable - article 29***

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan ("SPT") Tahunan tahun 2022.

The calculation of income tax for the period ended 31 December 2022 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return ("SPT") for the year 2022.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

***21. TAXATION** (continued)*

b. Beban pajak (lanjutan)

***b. Tax expense** (continued)*

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense by multiplying income before income tax to the applicable tax rate are as follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak BSI	5,514,803	3,960,524	*Income before tax BSI*
Laba sebelum pajak bank *ex-legacy* (BNIS dan BSM) (1 Januari - 31 Januari 2021)	-	(298,816)	*Income before tax ex-legacy bank (BNIS and BSM) (1 January - 31 January 2021)*
Laba sebelum pajak penghasilan BSI	5,514,803	3,661,708	*Income before tax BSI*
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	1,213,257	805,576	*Income tax expense calculated from income before tax*
Pengaruh pajak atas beda permanen	41,364	54,072	*Tax impact of permanent differences*
Dampak atas perubahan tarif pajak	-	(41,623)	*Impact on tax rate adjustment*
Lainnya	-	5,123	*Others*
Beban pajak	1,254,621	823,148	*Tax expenses*

c. Aset pajak tangguhan - bersih

c. Deferred tax assets - net

	31 Desember/*December* 2022				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi / *Credited/ (charged) to statement of profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to OCI*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penyisihan kerugian atas aset produktif	756,647	250,053	-	1,006,700	*Provision for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	230,708	(14,054)	-	216,654	*Allowance for impairment losses on non-productive assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	3,783	2,569	-	6,352	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	25,659	(5,159)	-	20,500	*Provision for losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	184,028	3,837	(36,281)	151,584	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	176,018	17,481	-	193,499	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	45,570	19,603	-	65,173	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	23,657	(8,270)	-	15,387	*Depreciation expenses of fixed assets and right-of-use assets*
Lainnya	(746)	-	-	(746)	*Others*
	1,445,324	266,060	(36,281)	1,675,103	

	31 Desember/*December* 2021					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak perubahan tarif pajak yang ditangguhkan/ *Effect of changes in tax rate - deferred*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi / *Credited/ (charged) to statement of profit or loss*	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ *Charged to OCI*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan penyisihan kerugian atas aset produktif	516,126	15,264	225,257	-	756,647	*Provision for impairment losses on financial assets and earning assets*
Penyisihan kerugian atas aset non-produktif	229,632	17,081	(16,005)	-	230,708	*Allowance for impairment losses on non-productive assets*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	4,087	-	(304)	-	3,783	*Estimated losses on commitments and contingencies*
Cadangan kerugian risiko operasional	31,971	-	(6,312)	-	25,659	*Provision for losses on operational risks*
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	191,440	9,277	(2,456)	(14,233)	184,028	*Provision employee benefit liabilities*
Cadangan bonus	108,713	-	67,305	-	176,018	*Provision for bonus*
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	25,263	-	20,307	-	45,570	*Provision for tantiem and personnel expenses*
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	2,995	-	20,662	-	23,657	*Depreciation expenses of fixed assets and right-of-use assets*
Lainnya	(946)	-	200	-	(746)	*Others*
	1,109,281	41,622	308,654	(14,233)	1,445,324	

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset pajak tangguhan - bersih (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Pada 29 Oktober 2021, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya menetapkan tarif PPh Badan untuk tahun 2022 adalah sebesar 22%. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

d. Surat ketetapan pajak

Penutupan NPWP - *ex-legacy* BSM dan BNIS

Sehubungan dengan penggabungan BSM, BNIS, dan BRIS pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi BSI, Bank telah mengajukan permohonan penutupan NPWP *ex-legacy* BSM dan BNIS. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses penutupan NPWP masih berlanjut.

Pemeriksaan tahun pajak 2021 - *ex-legacy* BSM

Pada bulan Agustus 2021 Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar 31 Januari 2021 kepada PT Bank Syariah Mandiri. Pada bulan Juni 2022, Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") yang menyatakan kelebihan bayar pajak penghasilan 31 Januari 2022 sebesar Rp53.717 sesuai nilai yang diklaim oleh Bank. Selain itu, Kantor Pajak menilai bahwa Bank masih memiliki kurang bayar PPh 21, PPh 23 dan PPN Barang dan Jasa sebesar Rp4.053. Nilai restitusi kelebihan bayar pajak sebesar Rp49.664 yang diterima oleh Bank pada tanggal 4 Juli 2022 telah dikurangkan dengan utang PPh 21, PPh 23 dan PPN Barang dan Jasa sebesar Rp4.053.

Pemeriksaan tahun pajak 2021 - BSI

Pada bulan Juli 2022, Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas Masa Pajak 31 Januari 2021 dan Tahun Pajak 2021 untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses pemeriksaan pajak masih berlanjut.

***21. TAXATION** (continued)*

***c. Deferred tax assets - net** (continued)*

Management believes that it is most likely that future taxable income will be available against the temporary difference which creates deferred tax assets.

On 29 October 2021, the Government has ratified Law No. 7 Year 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates that the corporate income tax rate for 2022 is 22%. Hence, the previously tax rate determination of 20% will be invalid after the ratification of this Law.

d. Tax assessment letters

Revocation of the tax ID - ex-legacy BSM and BNIS

In connection with the merger of BSM, BNIS and BRIS on 1 February 2021 into BSI, the Bank has submitted the request for revocation of the tax ID ex-legacy BSM and BNIS. Until the date of this financial statements, the tax ID revocation process is still in progress.

Assessment for fiscal year 2021 - ex-legacy BSM

On August 2021, the Bank received an Inspection Order for the Overpayment Tax Return period 31 January 2021 addressed to PT Bank Syariah Mandiri. In June 2022, the Bank received Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") which stated overpayment of corporate income tax 31 January 2022 amounting to Rp53,717 from the amount of tax overpayment claimed by the Bank. In addition, the Tax Office noted that the Bank still has an underpayment of PPh 21, PPh 23 and VAT on Goods and Services amounting to Rp4,053. On 4 July 2022, the Bank received refund on the tax overpayment amounting to Rp49,664, which was deducted by PPh 21, PPh 23 and VAT on Goods and Services amounting to Rp4,053.

Assessment for fiscal year 2021 - BSI

In July 2022, the Bank received an Inspection Order for the Tax Period 31 January 2021 and Fiscal Year 2021 addressed to PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Until the date of this financial statements, the tax audit is still in progress.

21. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Informasi lain

Sehubungan dengan penggabungan BSM, BNIS dan BRIS pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi BSI, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Bank yang menggabungkan diri dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada bulan Agustus 2021, Bank menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-145/WPJ.10/2021 tentang persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha. Atas hal tersebut, Bank mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ("SKB") PPh Final atas pengalihan aset BSM dan BNIS ke BSI. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses tersebut masih berlanjut.

***21. TAXATION** (continued)*

e. Other information

In connection with the merger of BSM, BNIS and BRIS on 1 February 2021 into BSI, based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, the merging Banks may use the book value of the transfer of assets in the context of a business merger after obtaining approval from the Directorate General of Taxes.

In August 2021, the Bank received the Decree of the Director General of Taxes number Kep-145/WPJ.10/2021 concerning the approval of the use of book value for the transfer of assets in the context of merger. For this matter, the Bank has submitted the request for Exemption Certificate ("SKB") PPh Final for the transfer of BSM and BNIS assets to BSI. As of the date of these financial statements, the process is still ongoing.

22. LIABILITAS LAIN-LAIN

22. OTHER LIABILITIES

	2022	2021	
Cadangan bonus dan tantiem	1,037,406	920,080	*Provision of bonus and tantiem*
Biaya notaris	279,939	189,498	*Notary fees*
Biaya yang masih harus dibayar	261,630	220,275	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	166,002	289,101	*Lease liabilities*
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	138,401	91,858	*Provision of THR and other employee expenses*
Rekening angsuran pinjaman	24,457	25,471	*Receivable installment accounts*
Setoran jaminan	20,755	22,672	*Guarantee deposits*
Pendapatan diterima dimuka	20,336	27,899	*Deferred income*
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	13,122	22,057	*Deferred financing administration income*
Premi asuransi pembiayaan	10,382	10,635	*Loan insurance premium*
Dana kebajikan	7,048	25,977	*Qardhul hasan funds*
Lain-lain	376,303	390,835	*Others*
	2,355,781	2,236,358	

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Accrued expenses consist of reserves on network, ATM maintenance fees and Financial Services Authority's fee.

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari *ujrah* diterima dimuka atas *supply chain financing* dan *buyer chain financing*.

Deferred income consists of deferred ujrah income of supply chain financing and buyer chain financing.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta *infaq* dan *shadaqah* yang berasal dari *E-Channel*. *Infaq* dan *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Qardhul hasan funds consists of social funds originating from fines/penalties, transactions that are not in accordance with sharia principles and infaq and shadaqah originating from E-Channel. Infaq and shadaqah are assets that are given voluntarily by the owners, whether the use is limited (determined) or not.

Lain-lain terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Others consist of account for financing installment, liability to third parties, administrative accounts, clearance intermediaries and others.

23. GIRO *MUDHARABAH* / *23. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS*

	2022	2021	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	8,078,552	8,749,993	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	902,267	338,726	*United States Dollar*
	8,980,819	9,088,719	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	12,496,418	4,192,313	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	1,245,851	287	*United States Dollar*
	13,742,269	4,192,600	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	31,880	37,308	*Rupiah*
	22,754,968	13,318,627	

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Mudharabah demand deposits is a current accounts product in which investor's fund can be withdrawn by check, bank guarantee and other payment instruction method.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah demand deposits are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	1.95% - 3.40%	1.85% - 4.64%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.05% - 0.19%	0.00% - 0.29%	*United States Dollar*

24. TABUNGAN *MUDHARABAH* / *24. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

	2022	2021	
Pihak ketiga - Bukan Bank			***Third parties - Non-Bank***
Rupiah	71,634,077	63,991,710	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	549,555	254,357	*United States Dollar*
	72,183,632	64,246,067	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	86,008	292,300	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	66	-	*United States Dollar*
	86,074	292,300	
Pihak ketiga - Bank			***Third parties - Bank***
Rupiah	627,646	564,124	*Rupiah*
	72,897,352	65,102,491	

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah savings deposits are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	0.68% - 0.91%	1.03% - 1.11%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0.23% - 0.24%	0.00% - 0.39%	*United States Dollar*

25. DEPOSITO *MUDHARABAH* / *25. MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan mata uang: / *a. By currency:*

	2022	2021	
Bukan Bank			***Non-Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	80,018,589	87,492,358	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	2,324,983	3,506,335	*United States Dollar*
Riyal Arab Saudi	5,848	292,475	*Saudi Arabian Riyal*
	82,349,420	91,291,168	
Pihak berelasi (Catatan 42)			***Related parties (Note 42)***
Rupiah	18,014,180	6,870,878	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	122,330	21,709	*United States Dollar*
	18,136,510	6,892,587	
Bank			***Bank***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah	274,412	408,798	*Rupiah*
	100,760,342	98,592,553	

b. Berdasarkan jangka waktu: / *b. By period:*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	64,552,121	53,388,394	*1 month*
3 bulan	19,821,582	22,390,615	*3 months*
6 bulan	4,250,650	6,811,178	*6 months*
12 bulan	9,682,828	12,181,847	*12 months*
	98,307,181	94,772,034	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
1 bulan	1,898,216	2,952,617	*1 month*
3 bulan	256,852	246,225	*3 months*
6 bulan	97,899	119,010	*6 months*
12 bulan	194,346	210,192	*12 months*
	2,447,313	3,528,044	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
1 bulan	5,848	292,475	*1 month*
	100,760,342	98,592,553	

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *c. By remaining period to maturity:*

	2022	2021	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	72,621,978	58,385,322	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	15,301,697	23,301,648	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	10,383,506	13,085,064	*> 3 - ≤ 12 months*
	98,307,181	94,772,034	
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
≤ 1 bulan	1,954,750	3,015,020	*≤ 1 month*
> 1 - ≤ 3 bulan	300,290	286,078	*> 1 - ≤ 3 months*
> 3 - ≤ 12 bulan	192,273	226,946	*> 3 - ≤ 12 months*
	2,447,313	3,528,044	
Riyal Arab Saudi			***Saudi Arabian Riyal***
≤ 1 bulan	5,848	292,475	*≤ 1 month*
	100,760,342	98,592,553	

25. DEPOSITO *MUDHARABAH* (lanjutan)

d. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp944.097 dan Rp919.584, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 (Catatan 9, 10, 11, dan 12).

e. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

f. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

25. MUDHARABAH TIME DEPOSITS *(continued)*

d. Mudharabah time deposits that are used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp944,097 and Rp919,584, as at 31 December 2022 and 2021, respectively (Note 9, 10, 11, and 12).

e. Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah.

f. The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits are as follows:

	2022	2021	
Rupiah	2.51% - 3.23%	3.05% - 4.63%	*Rupiah*
Valuta asing	0.22% - 0.27%	0.25% - 0.74%	*Foreign currencies*

26. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI

26. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH

	2022	2021	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga	775,000	782,000	*Third Parties*
Pihak Berelasi	600,000	593,000	*Related Parties*
	1,375,000	1,375,000	

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank BRIsyariah Tbk

Pada tanggal 17 November 2016, PT Bank BRIsyariah Tbk menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil pada Bursa Efek Indonesia. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,20% yang dihitung dari pendapatan kotor tunai, yang diindikasikan sebesar 11,85%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat A+(idn) dari *Fitch.*

Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank BRIsyariah Tbk

On 17 November 2016, PT Bank BRIsyariah Tbk issued Rp1,000,000 Subordinated Sukuk Mudharabah I Year 2016 which is issued at 100.00% of its nominal value using profit sharing method in Indonesia Stock Exchange. The amount of Sukuk holder's nisbah is 80.20% which was calculated from liquid gross revenue, which was indicated at 11.85%. Profit sharing will be paid quarterly and will be due on 16 November 2023.

The Subordinated Sukuk Mudharabah I is not guaranteed by special collateral nor guaranteed by the Republic of Indonesia or other third parties and is not included in the bank guarantee program implemented by the Deposit Insurance Agency ("LPS") or the other insurance corporation.

As at 31 December 2022 and 2021, the Bank's Subordinated Sukuk Mudharabah I obtained a rating of A+(idn) from Fitch.

The trustee of this Subordinated Sukuk Mudharabah I is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

26. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank BRIsyariah Tbk (lanjutan)

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Bank, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.

Pembatasan dan kewajiban Bank tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Bank kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidak-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Atas penggabungan usaha merger Bank Syariah dimana BRIS menjadi Bank yang menerima penggabungan, telah diinformasikan kepada wali amanat dengan surat No. S.B.06-MDB/01-2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal “Informasi Mengenai Rencana Penggabungan Usaha PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri”.

Manajemen Bank berpendapat bahwa semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Berdasarkan Surat No. SR-32/PB.13/2016 tertanggal 29 November 2016, telah disetujui permohonan Bank oleh OJK untuk memperhitungkan hasil penjualan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I sebesar Rp1.000.000 sebagai komponen modal pelengkap Bank (setinggi-tingginya 100% dari modal inti).

26. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank BRIsyariah Tbk *(continued)*

The trustee agreement covers several covenants affecting the Bank and requires a written approval from the trustee before conducting the following:

- *Issuing another Sukuk or MTN which has higher position and priority payment over Subordinated Sukuk Mudharabah.*
- *Changing the main business.*
- *Reducing authorised, issued and paid-in capital stock.*
- *Conducting merger, consolidation, acquisition with other parties which causes dissolution of the Bank, or would have negative impact on business continuity.*

Several covenants affecting the Bank without written approval from the trustee that the Bank will not do the following:

- *Selling or transferring fixed assets of the Bank to other parties, either all or most of fixed assets (over 50%) based on the latest audited financial statements.*
- *Conducting transactions with affiliated parties, unless either the transaction is performed under favourable terms or at least equal to the requirements obtained by the Bank from independent third parties in ordinary transactions.*
- *Providing financing or investment in stock shares to other parties.*

Regarding the merger of Sharia Bank where BRIS will become the surviving entity, the trustee has been informed by letter No. S.B.06-MDB/01-2021 dated 6 January 2021 about “Information Regarding the Planned Merger of PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri".

Management of the Bank has complied with the above covenants contained on the trustee agreement.

Based on the letter No. SR-32/PB.13/2016 dated 29 November 2016, the Financial Service Authority (“OJK”) has agreed with the Bank’s request to make the proceeds of Subordinated Sukuk Mudharabah I amounting to Rp1,000,000 as a complementary capital component of the Bank (maximum 100% of core capital).

26. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal tanggal 22 Desember 2016, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Tahun 2016 sebesar Rp375.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR *(Capital Adequacy Ratio)* tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2016 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan (*audited*) selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan Bagi Hasil, dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri *(self assessment)* pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Syarat dan ketentuan:
- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang *subnotes* Bank dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) Bank senilai 7 (tujuh) kali Dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.
- Nisbah yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagihasilkan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

26. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri

On 22 December 2016, the Bank issued Sukuk Mudharabah Tahun 2016 amounting to Rp375,000 and is due on 22 December 2023.

During the validity period of the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah and prior to repayment of all principal and profit sharing, the Bank is obliged to: (i) maintain a CAR (Capital Adequacy Ratio) ratio of not less than 12% (twelve percent); (ii) ensure that the 2016 Subordinated Sukuk Mudharabah will not be owned by more than 50 (fifty) investors; (iii) submit to the monitoring agency as follows: annual financial statements (audited) not later than the end of the 4th month after the date of the reporting book, quarterly financial statements not later than the end of the 1st month after the date of the reporting book, financial statements used as the basis for calculating Revenue Sharing, and the bank's soundness level assessment report and self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance to OJK.

The proceeds from the issuance of the Subordinated Sukuk Mudharabah I are intended to strengthen the capital structure in order to support business development activities such as financing expansion.

Terms and Conditions:
- *Profit sharing income is calculated based on the multiplication between the ratio of the Bank's subnotes holder and the revenue shared, which is the amount listed in the unaudited last quarter of the Bank's financial report, which is available and approved by the Bank's Board of Directors no later than 10 (ten) working days before the date of payment of the relevant revenue sharing.*
- *The income that is shared is obtained from the income of the Rupiah financing portfolio (blended) Bank amounting to 7 (seven) times the Subordinated Sukuk Mudharabah Fund in Rupiah currency owned by the Issuer, which is obtained for 1 (one) quarter as stated in each unaudited Bank financial report.*
- *The ratio given to subnotes holders is 27.07% of the shared revenue which is paid every 3 (three) months.*

26. SUKUK *MUDHARABAH* SUBORDINASI (lanjutan)

26. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH *(continued)*

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

Subnotes ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014. *Subnotes* merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi.

Bank tanpa persetujuan tertulis Agen Pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi, kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; (iv) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank.

DPS Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan opini melalui surat No. 18/13/DPS/X/2016 tanggal 1 November 2016 menyatakan bahwa *subordinated notes* syariah *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah *mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 dan No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Bagi hasil yang diberikan kepada pemegang *subordinated notes* diambil dari porsi Bank.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2022 dan 2021, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 memiliki peringkat idAA (*Double A Sharia*) dari agen pemeringkat efek PT Pefindo.

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri *(continued)*

These subnotes are not guaranteed by any special guarantees and are not guaranteed by third parties. Including not guaranteed by the Republic of Indonesia and not included in the Bank Guarantee Program which is carried out by the Deposit Insurance Corporation or its replacement in accordance with the applicable laws and regulations and following the provisions of Article 17 paragraph (1) letter f of OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014. Subnotes are subordinated obligations of the Bank.

Banks without written approval from the Monitoring Agent will not do the following: (i) reduce the issued and paid-up capital; (ii) make changes in business fields; (iii) carry out a merger or consolidation or reorganisation, except because of the provisions of the Government or Bank Indonesia; (iv) enter into mergers, consolidations, acquisitions with other entities which will result in the dissolution of the Bank.

Bank Syariah Mandiri's Sharia Supervisory Board has issued an opinion by letter No. 18/13/DPS/X/2016 dated 1 November 2016 stated that the subordinated notes for sharia mudharabah are in accordance with the DSN fatwa regarding Islamic bonds and Islamic mudharabah bonds (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 and No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Profit sharing given to holders of subordinated notes is taken from the Bank's portion.

Acting as trustee of the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Based on the last rating report published in November 2022 and 2021, the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah has an idAA (Double A Sharia) rating from the securities rating agency PT Pefindo.

27. PEMBIAYAAN BERJANGKA MUDHARABAH

27. MUDHARABAH TERM FINANCING

	2022	2021	
Pihak ketiga			***Third parties***
Dolar Amerika Serikat	778,375	-	*United States Dollar*

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Bank mendapatkan fasilitas *line* pembiayaan *mudharabah* sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Bank telah melakukan penarikan sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,93% - 0,94% dan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2023. Tidak terdapat agunan yang dijaminkan untuk fasilitas ini.

On 29 August 2022, the Bank obtained a mudharabah financing line facility of USD100,000,000 (full amount) from PT Bank Maybank Indonesia Tbk. The Bank has withdrawn the facility amounting to USD50,000,000 (full amount) on 30 August 2022 with profit sharing ratio of 0.93% - 0.94% and will mature on 30 August 2023. There is no collateral guaranteed for this facility.

28. EKUITAS / *28. EQUITY*

Modal Saham / *Share Capital*

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's shareholders are as follows:

Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ *Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal (nilai penuh)/ *Amount of capital (full amount)*	*Shareholders*
31 Desember/*December* 2022				
Modal Dasar				***Authorised Capital***
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00%	500	*Series A Dwiwarna share*
Saham biasa Seri B	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500	*Series B common shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid Capital***
Saham Seri A Dwiwarna				***Series A Dwiwarna share***
Negara Republik Indonesia	1	0.00%	500	*Republic of Indonesia*
Saham biasa Seri B				***Series B common shares***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dewan Komisaris:				*Board of Commissioners:*
Sutanto	1,687,400	0.00%	843,700,000	*Sutanto*
Direksi:				*Board of Directors:*
Ngatari	16,823,500	0.04%	8,411,750,000	*Ngatari*
Moh. Adib	9,500	0.00%	4,750,000	*Moh. Adib*
Masyarakat	4,557,139,228	9.87%	2,278,569,614,000	*Public*
	46,129,260,138	100.00%	23,064,630,069,000	

Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ *Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)*	Persentase pemilikan/ *Ownership percentage*	Jumlah modal (nilai penuh)/ *Amount of capital (full amount)*	*Shareholders*
31 Desember/*December* 2021				
Modal Dasar	80,000,000,000	100.00%	40,000,000,000,000	***Authorised Capital***
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid Capital***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,905,219,379	50.83%	10,452,609,689,500	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,220,230,418	24.85%	5,110,115,209,000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	17.25%	3,546,380,827,500	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Dewan Komisaris:				*Board of Commissioners:*
Sutanto	1,500,000	0.00%	750,000,000	*Sutanto*
Direksi:				*Board of Directors:*
Ngatari	15,000,000	0.04%	7,500,000,000	*Ngatari*
Kokok Alun Akbar	19,294,400	0.05%	9,647,200,000	*Kokok Alun Akbar*
Masyarakat	2,875,301,491	6.98%	1,437,650,745,500	*Public*
	41,129,307,343	100.00%	20,564,653,671,500	

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa sebagai berikut:

- menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai perubahan Anggaran Dasar, perubahan permodalan, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengambilalihan Bank oleh perusahaan lain;
- menetapkan pedoman terkait pengembangan strategis Bank secara organik maupun non-organik;
- mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS; dan
- meminta dan mengakses data dan dokumen Bank.

Series A Dwiwarna share is share that is specially owned by the Republic of Indonesia which grants the following special rights:

- *approve in the General Meeting of Shareholders ("GMS") regarding changes to the Articles of Association, changes in capital, mergers, consolidations, separations, dissolution and acquisitions of the Bank by other companies;*
- *establish guidelines related to the Bank's organic and non-organic strategic development;*
- *propose the arrangement of the GMS and agenda of the GMS; and*
- *request and access data and documents of the Bank.*

28. EKUITAS (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pelaksanaan hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat dikuasakan kepada pemegang saham pengendali Seri B terbanyak, kecuali pelaksanaan hak terkait persetujuan atas penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran serta pengambilalihan Bank oleh perusahaan lain.

Saham biasa Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. Pemegang Saham Seri B mempunyai hak memberikan suara dimana setiap satu saham berhak memberikan satu hak suara.

Pada tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 18 Juni 2021 telah berlangsung periode pelaksanaan program MESOP Tahap I tahun 2021 dengan total jumlah saham yang dieksekusi oleh karyawan dan manajemen sebanyak 97.659.800 lembar saham (nilai penuh) atau senilai Rp48.830. Perubahan peningkatan modal ditempatkan berdasarkan program MESOP ini dicatat di Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0434796 tanggal 5 Agustus 2021 dari Rp20.515.604 menjadi Rp20.564.434.

Pada tanggal 1 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 telah berlangsung periode pelaksanaan program MESOP Tahap II tahun 2021 dengan total jumlah saham yang dieksekusi oleh karyawan sebanyak 438.600 lembar saham (nilai penuh) atau senilai Rp219. Perubahan peningkatan modal ditempatkan berdasarkan program MESOP ini dicatat di Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0494300 tanggal 30 Desember 2021 dari Rp20.564.434 menjadi Rp20.564.654.

Penerbitan saham baru

Melalui PMHMETD I yang dilakukan pada bulan Desember 2022, Bank meningkatkan modal dan disetor penuh sebanyak 4.999.952.795 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp2.499.976, yang mengakibatkan kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp2.437.676 (setelah dikurangi oleh biaya emisi) (lihat Catatan 1d).

Cadangan Umum

Cadangan umum pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

***28. EQUITY** (continued)*

***Share Capital** (continued)*

The exercise of the special rights of Series A Dwiwarna shareholders can be delegated to the majority controlling shareholder of Series B, except for the exercise of rights related to the approval for mergers, consolidations, separations, dissolution and acquisitions of the Bank by other companies.

Series B common shares are ordinary shares which can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public. Series B Shareholders have the right to vote in which each one share has the right to give one voting right.

As at 1 May 2021 to 18 June 2021, the MESOP Phase I program implementation period in 2021 has taken place with a total number of shares executed by employees and management of 97,659,800 shares (full amount) or Rp48,830. Changes in the increase in issued capital based on the MESOP program are recorded in the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0434796 dated 5 August 2021 from Rp20,515,604 to Rp20,564,434.

As at 1 November 2021 to 10 December 2021, the MESOP Phase II program implementation period in 2021 has taken place with a total number of shares executed by employees of 438,600 shares (full amount) or a value of Rp219. Changes in the increase in issued capital based on the MESOP program are recorded in the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0494300 dated 30 December 2021 from Rp20,564,434 to Rp20,564,654.

Issuance of new shares

Through PMHMETD I which was exercised in December 2022, the Bank increased the issued and fully paid capital of 4,999,952,795 shares (full amount) or Rp2,499,976, which resulted in an increase in additional paid-in capital of Rp2,437,676 (after deducting issuance costs) (see Note 1d).

General Reserve

The general reserves are originally provided in accordance with Law No. 1/1995 article 61 (1) on Limited Liability Company (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-in capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

28. EKUITAS (lanjutan) / *28. EQUITY (continued)*

Tambahan Modal Disetor / *Additional Paid-in Capital*

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

The movements in additional paid-in capital are as follows:

Agio saham dari penggabungan usaha	3,237	*Agio shares from merger*
Imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dalam akuisisi terbalik	(5,374,061)	*Net consideration effectively transferred in reverse acquisition*
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum	(995,952)	*Adjustment arising from reverse acquisition to reflect the Bank's legal capital*
Tambahan modal disetor per 31 Desember 2021	(6,366,776)	*Additional paid-in capital as at 31 December 2021*
Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas pada tahun 2022	2,499,976	*Additional paid-in capital due to Limited Public Offering in 2022*
Biaya emisi penerbitan saham	(62,300)	*Share issuance costs*
Tambahan modal disetor per 31 Desember 2022	(3,929,100)	*Additional paid-in capital as at 31 December 2022*

Efektif pada tanggal 1 Februari 2021, BRIS melakukan penggabungan usaha dengan BSM dan BNIS dimana BRIS menjadi entitas yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS bubar demi hukum. Penggabungan usaha antara BRIS, BSM, dan BNIS ini menimbulkan saldo SNTRES sebesar Rp6.370.013 yang dihitung sebagai berikut:

The merger between BRIS, BSM and BNIS was effective on 1 February 2021, with BRIS as the surviving entity, BSM and BNIS being dissolved by the law. The merger between BRIS, BSM and BNIS has resulted in a DUCC balance amounting to Rp6,370,013 which was calculated as follows:

	Februari/ *February* 2021	
Nilai buku bersih BRIS	5,509,267	*BRIS' net book value*
Nilai buku bersih BNIS	5,494,306	*BNIS' net book value*
Nilai pasar saham baru yang dikeluarkan (nilai imbalan bersih)	(16,377,634)	*Market price of new shared issued (net consideration costs)*
Penyesuaian untuk mencerminkan modal menurut hukum	(995,952)	*Adjustment to reflect the Bank's legal capital*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali ("SNTRES")	(6,370,013)	*Restructuring transactions of entities under common control ("DUCC")*

29. PENDAPATAN DARI JUAL BELI / *29. INCOME FROM SALES AND PURCHASES*

	2022	2021	
Murabahah	11,354,553	10,184,021	*Murabahah*
Istishna	332	215	*Istishna*
	11,354,885	10,184,236	

30. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL / *30. INCOME FROM PROFIT SHARING*

	2022	2021	
Musyarakah	4,722,224	4,237,160	*Musyarakah*
Mudharabah	142,040	218,525	*Mudharabah*
	4,864,264	4,455,685	

31. PENDAPATAN DARI *IJARAH* - BERSIH / *31. INCOME FROM IJARAH - NET*

	2022	2021	
Ijarah muntahiyah bittamlik	624,919	499,177	*Ijarah muntahiyah bittamlik*
Ijarah dan *ijarah* multijasa	96,883	132,387	*Ijarah and ijarah multi-services*
	721,802	631,564	
Beban penyusutan dan amortisasi aset ijarah	(599,581)	(556,345)	*Depreciation and amortisation expense ijarah assets*
Bersih	122,221	75,219	*Net*

32. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA / *32. OTHER MAIN OPERATING INCOME*

	2022	2021	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	3,098,061	2,683,489	*Income from investments in marketable securities*
Bonus dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	73,982	318,264	*Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")*
Lain-lain	109,452	91,539	*Others*
	3,281,495	3,093,292	

33. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL / *33. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN*

	2022	2021	
Deposito *mudharabah*	2,874,964	3,473,405	*Mudharabah time deposits*
Tabungan *mudharabah*	564,411	620,849	*Mudharabah savings deposits*
Giro *mudharabah*	367,948	93,672	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	129,791	133,723	*Subordinated sukuk mudharabah*
Investasi terikat	59,848	50,902	*Restricted investment*
Musyarakah-mudharabah musytarakah	19,459	5,158	*Musyarakah-mudharabah musytarakah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	12,604	-	*Mudharabah term financing*
Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank ("SIMA")	3,144	1,098	*Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")*
	4,032,169	4,378,807	

34. PENDAPATAN USAHA LAINNYA / *34. OTHER OPERATING INCOME*

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari: / *Other operating income consists of:*

	2022	2021	
Pendapatan imbalan jasa perbankan			*Fee based income from banking services*
Pendapatan *rahn*	638,934	590,574	*Income from rahn*
Pendapatan administrasi tabungan dan giro	353,919	300,317	*Income from saving deposits administration*
Pendapatan administrasi pembiayaan	334,823	265,808	*Income from financing administration*
Pendapatan layanan *internet banking*	256,394	180,420	*Income from internet banking services*
Pendapatan transaksi ATM	202,503	262,428	*Income from ATM transactions*
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	125,046	61,074	*Income from administration and commission other than financing*
Pendapatan komisi asuransi	117,738	94,055	*Income from insurance commission*
Pendapatan jasa pembayaran	112,536	73,008	*Income from payment services*
Pendapatan kartu Hasanah	96,225	81,149	*Income from Hasanah Card*
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	80,785	40,198	*Income from foreign exchange transaction - net*
Pendapatan pembiayaan sindikasi	64,737	25,578	*Syndicated financing fee*
Pendapatan jasa ekspor impor	43,766	43,473	*Income from export import services*
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (*ta'widh*)	35,200	36,891	*Income from restructuring compensation (ta'widh)*
Pendapatan transaksi *remittance*	33,410	25,307	*Income from remittance transactions*
Pendapatan jasa penjualan sukuk dan reksa dana	26,117	13,556	*Income from service of sale of sukuk and mutual funds*
Lainnya	63,244	93,797	*Others*
	2,585,377	2,187,633	
Pendapatan lainnya			*Other income*
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	1,013,903	762,536	*Subsequent recoveries of receivables and financing written-off*
Keuntungan pelepasan surat berharga	101,831	62,077	*Gain on sale of marketable securities*
	1,115,734	824,613	
	3,701,111	3,012,246	

35. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *35. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari: / *Salaries and benefits consist of:*

	2022	2021	
Gaji dan upah	3,701,231	3,420,083	*Salaries and wages*
Tunjangan karyawan	952,961	815,363	*Employee allowances*
Pendidikan dan pelatihan	114,720	99,992	*Education and training*
Lainnya	180,030	156,337	*Others*
	4,948,942	4,491,775	

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *36. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Beban umum dan administrasi terdiri dari: / *General and administrative expenses consist of:*

	2022	2021	
Beban *outsourcing*	804,945	651,917	*Outsourcing expenses*
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 14)	701,792	610,595	*Depreciation of fixed assets and right-of use assets (Note 14)*
Beban promosi	502,527	271,172	*Promotion expenses*
Beban penjaminan	502,466	438,727	*Underwriting expenses*
Beban sewa	308,771	287,234	*Rent expenses*
Beban komunikasi	299,260	178,971	*Communication expenses*
Beban transportasi	217,140	108,379	*Transportation expenses*
Beban perlengkapan	203,514	189,747	*Supplies expenses*
Beban pemeliharaan dan perbaikan	196,224	226,434	*Service and maintenance expenses*
Beban jasa tenaga ahli	176,592	99,406	*Professional fees*
Beban pungutan OJK	137,997	135,874	*OJK fees*
Beban barang dan jasa lain	124,985	157,876	*Other goods & services*
Beban listrik, air dan gas	115,063	102,610	*Electricity, water and gas expenses*
Beban kantor	102,300	79,769	*Office stationery*
Beban lisensi *software*	88,593	36,362	*Software license expenses*
Ujrah administrasi	84,038	125,558	*Administrative ujrah*
Beban barang cetak	64,485	103,046	*Printing expenses*
Lain-lain	225,744	166,534	*Others*
	4,856,436	3,970,211	

37. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF - BERSIH / *37. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS - NET*

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - bersih terdiri dari: / *Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:*

	2022	2021	
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)	(2,662)	(52,029)	*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	(7,498)	(6,783)	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Tagihan akseptasi (Catatan 8)	3,199	(933)	*Acceptances receivables (Note 8)*
Piutang (Catatan 9)	1,880,435	1,397,845	*Receivables (Note 9)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)	576,774	251,313	*Funds of qardh (Note 10)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)	9,043	(1,954)	*Mudharabah financing (Note 11)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)	1,230,474	2,057,965	*Musyarakah financing (Note 12)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 39)	11,283	(3,173)	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 39)*
Aset lainnya	47,749	(91,002)	*Other assets*
	3,748,797	3,551,249	

38. LABA PER SAHAM / *38. EARNINGS PER SHARE*

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut: / *The computation of earnings per share, are as follows:*

	2022	2021	
Laba tahun berjalan	4,260,182	3,028,205	*Income for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (nilai penuh)	41,545,970,076	41,096,058,485	*Weighted average number of shares outstanding (full amount)*
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	102.54	73.69	*Basic earnings per share (full Rupiah)*
Saham yang akan diterbitkan jika MESOP dieksekusi (nilai penuh)	-	890,800	*Shares to be issued if MESOP is exercised (full amount)*
Jumlah rata-rata tertimbang saham dilusian (nilai penuh)	41,545,970,076	41,109,280,978	*Weighted average number of diluted shares (full amount)*
Laba bersih per saham dilusian (Rupiah penuh)	102.54	73.66	*Diluted earnings per share (full Rupiah)*

39. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *39. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut: / *The Bank's receivables and payables from commitments and contingencies are as follows:*

	2022	2021	
Liabilitas komitmen			***Commitments payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,662,836	2,686,540	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	115,163	6,549	*Irrevocable L/C*
	1,777,999	2,693,089	
Pihak berelasi			***Related parties***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	198,972	252,777	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	67,068	57,630	*Irrevocable L/C*
	266,040	310,407	
Liabilitas komitmen	2,044,039	3,003,496	***Commitments payables***
Tagihan kontinjensi			***Contingencies receivables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Pendapatan dari pembiayaan bermasalah	288,960	247,100	*Revenue from non-performing financing*
Bank garansi (*kafalah*) yang diterima	237,015	202,029	*Bank guarantees (kafalah) received*
	525,975	449,129	
Liabilitas kontinjensi			***Contingencies payables***
Pihak ketiga			***Third parties***
Garansi yang diterbitkan	2,008,915	1,631,088	*Bank guarantees issued*
Kewajiban subrogasi	129,443	116,405	*Subrogation payables*
Lainnya	26,567	23,819	*Others*
	2,164,925	1,771,312	
Pihak berelasi			***Related parties***
Garansi yang diterbitkan	699,873	29,341	*Bank guarantees issued*
	2,864,798	1,800,653	
Liabilitas kontinjensi	2,338,823	1,351,524	***Contingencies payables***

39. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

39. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

b. The transactions of commitments and contingencies in the normal course of the Bank's activities that have financing risks are as follows:

	2022	2021	
Garansi yang diterbitkan	2,708,788	1,660,429	*Bank guarantees issued*
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,861,808	2,939,317	*Unused financing facilities*
L/C yang tidak dapat dibatalkan	182,231	64,179	*Irrevocable L/C*
	4,752,827	4,663,925	

c. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

c. The collectibility of commitments and contingencies with financing risk on administrative accounts are as follows:

	2022	2021	
Lancar	4,724,770	4,627,938	*Current*
Dalam perhatian khusus	2,777	17,768	*Special mention*
Kurang lancar	14,326	18,219	*Substandard*
Diragukan	132	-	*Doubtful*
Macet	10,822	-	*Loss*
	4,752,827	4,663,925	

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontijensi adalah sebagai berikut:

d. The movements of allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies are as follows:

	2022	2021	
Saldo awal tahun	17,194	20,323	*Beginning balance*
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 37)	11,283	(3,173)	*Provisions/(reversal) during the year (Note 37)*
Selisih kurs	396	44	*Exchange rate difference*
Saldo akhir tahun	28,873	17,194	*Ending balance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontijensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Management believes that the allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies is adequate and in compliance with OJK regulations.

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA

40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	2022	2021	
Imbalan pasca kerja jangka panjang	510,868	644,221	*Long-term post-employment benefits*
Cuti besar	178,150	192,270	*Grand leaves*
	689,018	836,491	

Bank mempunyai Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") sebagai berikut:

1. DPLK BRI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/NB.1/2022 tanggal 21 Maret 2022.

Bank has a defined contribution plan ("PPIP") for all permanent employees which managed by the pension funds ("DPLK") as follows:

1. DPLK BRI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-19/NB.1/2022 dated 21 March 2022.

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Bank mempunyai Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") sebagai berikut: (lanjutan)

2. DPLK AXA Mandiri yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/NB.01/2022 tanggal 18 April 2022.
3. DPLK BNI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-31/NB.01/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Jumlah iuran yang dibayarkan Bank sebesar Rp171.920 dan Rp152.145 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 and 2021.

Selain itu, Bank memiliki Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ("PPUKP") untuk pegawai *ex-legacy* BRIS yang dikelola oleh DPLK BRI.

Perhitungan aktuaria per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dilakukan oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 9 Januari 2023 dan 10 Januari 2022.

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Bank has a defined contribution plan ("PPIP") for all permanent employees which managed by the pension funds ("DPLK") as follows: (continued)

2. *DPLK AXA Mandiri which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-29/NB.01/2022 dated 18 April 2022.*
3. *DPLK BNI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-31/NB.01/2022 dated 13 May 2022.*

The total contributions paid by the Bank amounting to Rp171,920 and Rp152,145 for the years ended 31 December 2022 and 2021.

In addition, the Bank has a defined benefit plan ("PPUKP") for ex-legacy BRIS employees which managed by DPLK BRI.

The actuarial calculations as at 31 December 2022 and 2021 were prepared by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, in its reports dated 9 January 2023 and 10 January 2022, respectively.

The above actuarial calculations were using the Projected Unit Credit Method with the following key assumptions:

	2022	2021	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	7.00%	6.80%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	6.50%	7.00%	*Rate of salary increases*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	36 - 56 tahun/*years*	36 - 56 tahun/*years*	*Normal retirement age*
Tingkat kematian	Modifikasi Tabel Mortalitas/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	Modifikasi Tabel Mortalitas/ *Adjusted Mortality Table* Indonesia TMI-IV-2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	10% dari tingkat kematian/*10% from mortality rate*	*Disability rate*

Imbalan pasca kerja jangka panjang

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun disajikan sebagai berikut:

Long-term post-employment benefits

A reconciliation of the funding status of the pension plan are as follows:

	2022	2021	
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	626,386	757,010	*Present value of funded defined benefit obligations*
Nilai wajar aset dana pensiun	(115,518)	(112,789)	*Fair value of pension plan assets*
Nilai bersih kewajiban	510,868	644,221	*Net liability*

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan) / ***Long-term post-employment benefits** (continued)*

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of funded defined benefit obligations for the year are as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	757,010	723,092	*At the beginning of the year*
Biaya jasa kini	83,994	89,345	*Current service cost*
Biaya bunga	44,016	47,160	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	-	29,542	*Past service cost*
Keuntungan pengukuran kembali aktuarial	(170,248)	(69,163)	*Actuarial gain on remeasurement*
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	(36,002)	-	*Adjustment due to change in benefit attribution method*
	678,770	819,976	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(52,384)	(62,966)	*Payment of post-employment benefits during the year*
	626,386	757,010	

Rekonsiliasi atas mutasi liabilitas bersih selama tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net liabilities for the year ended 31 December 2022 and 2021 is as follows:

	2022	2021	
Kewajiban bersih pada awal tahun	644,221	605,742	*Net liabilities at the beginning of the year*
Beban tahun berjalan	107,719	162,000	*Current year expenses*
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya akibat:			*Remeasurement recognised as other comprehensive income due to:*
Perubahan asumsi demografi	-	6,251	*Changes in demographic assumptions*
Perubahan asumsi ekonomis	(117,307)	(37,408)	*Changes in financial assumptions*
Perubahan dari penyesuaian historis	(47,607)	(33,538)	*Changes from experience adjustment*
	(164,914)	(64,695)	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(52,384)	(54,307)	*Payment of post-employment benefits during the year*
Kelebihan pembayaran imbalan	(23,774)	(4,519)	*Excess benefits payment*
Kewajiban bersih pada akhir tahun	510,868	644,221	*Net liabilities at the end of the year*

Mutasi nilai wajar aset program untuk tahun yang berakhir adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets for the year ended are as follows:

	2022	2021	
Pada awal tahun	112,789	117,350	*At the beginning of the year*
Hasil dari aset program	(5,333)	(4,468)	*Return on plan assets*
Keuntungan aktuarial	8,062	8,566	*Actuarial gains*
Imbalan yang dibayar dan beban administrasi	-	(8,659)	*Benefits paid and administrative expenses paid*
	115,518	112,789	

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan)

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Long-term post-employment benefits *(continued)*

Pension expenses recognised in the statement of profit or loss, are as follows:

	2022	2021	
Biaya jasa kini	83,994	89,345	*Current service cost*
Biaya jasa lalu		29,542	*Past service cost*
Bunga bersih	35,953	38,594	*Net Interest*
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	(36,002)	-	*Adjustment due to change in benefit attribution method*
Kelebihan pembayaran imbalan	23,774	4,519	*Excess benefits payment*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	107,719	162,000	*Expense recognised in profit or loss*
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	107,719	162,000	*Expense recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(164,914)	(64,695)	*Remeasurement effect recognised in other comprehensive income*
Biaya imbalan pasti	(57,195)	97,305	*Defined benefit cost*

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, aset program diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang syariah masing-masing sebesar Rp115.518 dan Rp112.789.

As at 31 December 2022 and 2021, plan assets invested to sharia money market each amounting to Rp115,518 and Rp112,789.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected return available on the assets in accordance with the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date. Expected return on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

Bank terekspos beberapa risiko atas program imbalan kerja seperti risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi di bawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun.

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans such as the exposed risks in the defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to pension fund.

Untuk memastikan bahwa posisi investasi telah sesuai dengan kerangka *Asset Liability Matching* ("ALMA"), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

To ensure that the position of investments is consistent with the Asset Liability Management ("ALMA") framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefits with its realisation.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 8,27 tahun (2021: 9,29 tahun).

The average duration of the defined benefit obligations as at 31 December 2022 is 8.27 years (2021: 9.29 years).

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Cuti besar

Grand leaves

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for grand leaves as at 31 December 2022 and 2021, respectively, are as follows:

	2022	2021	
Liabilitas pada awal tahun	192,270	303,009	*Liabilities at beginning of the year*
Beban/(pembalikan) cuti besar pada tahun berjalan	52,701	(66,232)	*Grand leaves expense/(reversal) during the year*
Pembayaran cuti besar selama tahun berjalan	(66,821)	(44,507)	*Payment of grand leaves during the year*
	178,150	192,270	

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

Grand leaves expense for the years ended 31 December 2022 and 2021 based on actuarial calculation are as follows:

	2022	2021	
Biaya jasa kini	63,642	68,468	*Current service cost*
Biaya bunga	11,213	19,228	*Interest cost*
Keuntungan aktuarial	(21,187)	(34,469)	*Actuarial gain*
Biaya jasa lalu	(967)	(119,459)	*Past service costs*
Jumlah	52,701	(66,232)	*Total*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligations to changes in the weighted assumptions is as follows:

	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities*		
31 Desember 2022	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ *(Increase)/decrease benefit obligation***	***31 December 2022***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(39,262)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	43,378	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	107,817	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(85,544)	

	Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ *Impact on employee benefit liabilities*		
31 Desember 2021	**Perubahan asumsi/ *Change in assumption***	**(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ *(Increase)/decrease benefit obligation***	***31 December 2021***
Tingkat diskonto	Kenaikan/*increase* 1%	(50,993)	*Discount rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	67,204	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*increase* 1%	146,341	*Salary increase rate*
	Penurunan/*decrease* 1%	(114,106)	

40. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

***40. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES** (continued)*

Expected maturity analysis of undiscounted pension is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	2 sampai 5 tahun/ *Between 2 to 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2022					***31 December 2022***
Pensiun	63,350	403,838	1,483,153	1,950,341	*Pension*
Cuti besar	73,138	331,853	1,269,728	1,674,719	*Grand leaves*
Jumlah	136,488	735,691	2,752,881	3,625,060	*Total*
31 Desember 2021					***31 December 2021***
Pensiun	63,864	407,745	2,418,249	2,889,858	*Pension*
Cuti besar	80,867	282,517	1,274,117	1,637,501	*Grand leaves*
Jumlah	144,731	690,262	3,692,366	4,527,359	*Total*

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Bank mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK No. 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Bank, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan pada periode berjalan.

Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Bank changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in SFAS No. 24 for the general fact pattern of pension programs based on the UU Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Bank, therefore the impact of the changes is recorded entirety in the financial statements for the current period.

41. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan peraturan LPS No. 2 tanggal 22 September 2014 tentang perubahan peraturan lembaga penjamin simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang program penjaminan simpanan dimana simpanan yang dijamin meliputi giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan simpanan dari bank lain.

41. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004 effective on 22 September 2005, as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No. 3 dated 13 October 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution ("LPS") to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated 22 September 2014 regarding amendment of LPS Regulation No. 2/PLPS/2010 regarding the Deposit Guarantee Program, the deposits guaranteed included wadiah demand deposits, mudharabah demand deposits, wadiah savings deposits, mudharabah savings deposits, mudharabah time deposits and deposits from other banks.

41. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijaminkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") adalah Rp502.448 dan Rp438.723 masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

41. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS *(continued)*

Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008, regarding "the Amount of Public Deposits Guaranteed by the Government Established Deposit Insurance Institution", as at 31 December 2022 and 2021 the amount of deposits that are guaranteed by LPS amounted to Rp2,000,000,000 (full amount) for each customer of each bank.

As at 31 December 2022 and 2021, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to the Deposit Insurance Institution ("LPS") amounted to Rp502,448 and Rp438,723 for the years ended 31 December 2022 and 2021, respectively.

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. Jenis hubungan

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham pengendali
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah

a. Type of relationships

Related parties from the entity level and/or management are:

Related party relationship as the ultimate shareholder
The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance

Related party relationship as the controlling shareholder
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Related party relationship as the shareholder
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah

BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perum BULOG
Perum DAMRI
Perum Jasa Tirta II
Perum LPPNPI
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Perum Perhutani
Perum Perumnas
Perum Peruri
Perum Produksi Film Negara
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
PT Adhi Commuter Properti Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Persada Beton
PT Adhi Persada Gedung
PT Adhi Persada Properti
PT Aero Globe Indonesia
PT Aerofood Indonesia
PT Agro Sinergi Nusantara
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Amarta Karya (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk
PT Angkasa Pura Hotel
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura Kargo
PT Angkasa Pura Logistik
PT Angkasa Pura Solusi
PT Angkasa Pura Supports
PT Antam Resourcindo
PT ASABRI (Persero)
PT Asuransi Asei Indonesia
PT Asuransi BRI Life
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PT Asuransi Jiwa Taspen
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT AXA Mandiri Financial Services
PT Bahana Artha Ventura
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Bahana TCW Investment Management
PT Bakti Timah Medika
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Baturaja Multi Usaha
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bina Karya (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT Brantas Abipraya (Persero)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions

BPJS Kesehatan
BPJS Ketenagakerjaan
DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perum BULOG
Perum DAMRI
Perum Jasa Tirta II
Perum LPPNPI
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Perum Perhutani
Perum Perumnas
Perum Peruri
Perum Produksi Film Negara
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
PT Adhi Commuter Properti Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Persada Beton
PT Adhi Persada Gedung
PT Adhi Persada Properti
PT Aero Globe Indonesia
PT Aerofood Indonesia
PT Agro Sinergi Nusantara
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
PT Amarta Karya (Persero)
PT Aneka Tambang Tbk
PT Angkasa Pura Hotel
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura Kargo
PT Angkasa Pura Logistik
PT Angkasa Pura Solusi
PT Angkasa Pura Supports
PT Antam Resourcindo
PT ASABRI (Persero)
PT Asuransi Asei Indonesia
PT Asuransi BRI Life
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
PT Asuransi Jasa Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
PT Asuransi Jiwa Taspen
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT AXA Mandiri Financial Services
PT Bahana Artha Ventura
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Bahana TCW Investment Management
PT Bakti Timah Medika
PT Bank Mandiri Taspen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Barata Indonesia (Persero)
PT Baturaja Multi Usaha
PT Berdikari Logistik Indonesia
PT Berlian Manyar Sejahtera
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
PT Bina Karya (Persero)
PT Bio Farma (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Asset Management
PT Brantas Abipraya (Persero)

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT BNI Sekuritas
PT BRI Asuransi Indonesia
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Prima Bahari
PT Celebes Railway Indonesia
PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Danareksa Investment Management
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Elnusa Tbk
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Equiport Inti Indonesia
PT Finnet Indonesia
PT Fintek Karya Nusantara
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Griyaton Indonesia
PT Hakaaston
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Indofarma Global Medika
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Comnets Plus
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
PT Indonesia Power
PT Indopelita Aircraft Services
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Inhutani IV
PT Inka Multi Solusi
PT Inka Multi Solusi Service
PT Inka Multi Solusi Trading
PT Inti Konten Indonesia
PT Istaka Karya (Persero)
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
PT Jalin Pembayaran Nusantara
PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jamsostek (Persero)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasa Tirta Energi
PT KA Properti Manajemen
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Logistik
PT Kereta Commuter Indonesia

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT BNI Sekuritas
PT BRI Asuransi Indonesia
PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Bukit Asam Tbk
PT Bukit Prima Bahari
PT Celebes Railway Indonesia
PT Cimanggis Cibitung Tollways
PT Citilink Indonesia
PT Citra Lautan Teduh
PT Cut Meutia Medika Nusantara
PT Danareksa (Persero)
PT Danareksa Investment Management
PT Djakarta Lloyd (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Elnusa Tbk
PT Energy Management Indonesia (Persero)
PT Equiport Inti Indonesia
PT Finnet Indonesia
PT Fintek Karya Nusantara
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
PT Graha Niaga Tata Utama
PT Griyaton Indonesia
PT Hakaaston
PT HK Realtindo
PT Hutama Karya (Persero)
PT Indofarma Global Medika
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
PT Indonesia Comnets Plus
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
PT Indonesia Power
PT Indopelita Aircraft Services
PT Indra Karya (Persero)
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Inhutani IV
PT Inka Multi Solusi
PT Inka Multi Solusi Service
PT Inka Multi Solusi Trading
PT Inti Konten Indonesia
PT Istaka Karya (Persero)
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
PT Jalin Pembayaran Nusantara
PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
PT Jamsostek (Persero)
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Jasa Prima Logistik Bulog
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasa Tirta Energi
PT KA Properti Manajemen
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Api Logistik
PT Kereta Commuter Indonesia

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Tbk
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Wajatama
PT Laras Astra Kartika
PT Mandiri AXA General Insurance
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Service
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Service
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)
PT Patra Badak Arun Solusi
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pembangunan PP Tirta Riau
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara V

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia FarmaTbk
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Wajatama
PT Laras Astra Kartika
PT Mandiri AXA General Insurance
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Service
PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Service
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)
PT Patra Badak Arun Solusi
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pembangunan PP Tirta Riau
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara V

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Urban
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekaindo Global Jasa
PT Reska Multi Usaha

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Urban
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekaindo Global Jasa
PT Reska Multi Usaha

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Jenis hubungan (lanjutan)

Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Padang (Persero)
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo Episi
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Terminal Petikemas Indonesia
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT United Tractors Semen Gresik
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Pengendalian kegiatan Perusahaan

Karyawan kunci

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

a. Type of relationships *(continued)*

Government entities and institutions *(continued)*

PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Padang (Persero)
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo Episi
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Terminal Petikemas Indonesia
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT United Tractors Semen Gresik
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Control on Company's activities

Key employees

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi

b. Transactions with related parties

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows:

	2022	2021	
Aset			*Assets*
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)			*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Pemegang saham pengendali	81,770	335,261	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	68,745	134,181	*Shareholders*
	150,515	469,442	
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)			*Investments in marketable securities (Note 7)*
Pemegang saham utama	48,185,551	36,989,653	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham pengendali	41,377	47,711	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	22,259	94,895	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	259,000	1,298,783	*Government entities and institutions*
	48,508,187	38,431,042	
Tagihan akseptasi (Catatan 8)			*Acceptance receivables (Note 8)*
Pemegang saham pengendali	51,741	75,059	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	12,946	9,801	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	41,925	22,812	*Government entities and institutions*
	106,612	107,672	
Piutang *murabahah* (Catatan 9)			*Murabahah receivables (Note 9)*
Entitas dan lembaga pemerintah	207,153	487,968	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	18,020	12,660	*Key employees*
	225,173	500,628	
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)			*Funds of qardh (Note 10)*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,699,879	1,285,008	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	1,298	820	*Key employees*
	1,701,177	1,285,828	
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)			*Mudharabah financing (Note 11)*
Entitas dan lembaga pemerintah	225,222	473,842	*Government entities and institutions*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)			*Musyarakah financing (Note 12)*
Entitas dan lembaga pemerintah	21,854,092	20,334,972	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	28,826	21,356	*Key employees*
	21,882,918	20,356,328	
Jumlah aset dari pihak-pihak berelasi	72,799,804	61,624,782	***Total assets from related parties***
Jumlah aset	305,727,438	265,289,081	*Total assets*
Persentase jumlah aset dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset	23.81%	23.23%	***Percentage of total assets from related parties to total assets***

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties *(continued)*

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	2022	2021	
Liabilitas			*Liabilities*
Liabilitas segera (Catatan 16)			*Obligations due immediately (Note 16)*
Pemegang saham pengendali	124,327	69,411	*Controlling shareholders*
Simpanan *wadiah*			*Wadiah deposits*
Giro *wadiah* (Catatan 18)			*Wadiah demand deposits (Note 18)*
Pemegang saham utama	775,353	14	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	164	214	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,634,538	1,333,323	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	101	193	*Key employees*
	2,410,156	1,333,744	
Tabungan *wadiah* (Catatan 19)			*Wadiah savings deposits (Note 19)*
Entitas dan lembaga pemerintah	1,572	848	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	11,175	10,328	*Key employees*
	12,747	11,176	
Jumlah simpanan *wadiah*	2,422,903	1,344,920	*Total wadiah deposits*
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)			*Deposits from other banks (Note 20)*
Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank ("SIMA")			*Interbank mudharabah investment certificate ("SIMA")*
Pemegang saham pengendali	200,000	-	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	400,000	-	*Shareholders*
	600,000	-	
Giro *wadiah*			*Wadiah demand deposits*
Pemegang saham pengendali	22	22	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	7	5	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	2,270	1,710	*Government entities and institutions*
	2,299	1,737	
Jumlah simpanan bank lain	602,299	1,737	*Total deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi			*Acceptance liabilities*
Pemegang saham pengendali	5,959	44,827	*Controlling shareholders*
Pemegang saham	23,012	4,253	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	51,371	36,388	*Government entities and institutions*
	80,342	85,468	
Liabilitas imbalan kerja			*Employee benefit liabilities*
Karyawan kunci	20,596	11,946	*Key employees*
Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi	3,250,467	1,513,482	***Total liabilities from related parties***
Jumlah liabilitas	73,655,791	61,886,476	*Total liabilities*
Persentase jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	4.41%	2.45%	***Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities***

42. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties *(continued)*

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	2022	2021	
Dana *syirkah* temporer			*Temporary syirkah funds*
Giro *mudharabah* (Catatan 23)			*Mudharabah demand deposits (Note 23)*
Pemegang saham utama	4,834,703	1,730,383	*Ultimate shareholders*
Pemegang saham	43,064	8,672	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	8,864,502	2,453,545	*Government entities and institutions*
	13,742,269	4,192,600	
Tabungan *mudharabah* (Catatan 24)			*Mudharabah savings deposits (Note 24)*
Pemegang saham	75	77	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	57,174	272,630	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	28,825	19,593	*Key employees*
	86,074	292,300	
Deposito *mudharabah* (Catatan 25)			*Mudharabah time deposits (Note 25)*
Pemegang saham	123,150	42,950	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	17,960,128	6,788,527	*Government entities and institutions*
Karyawan kunci	53,232	61,110	*Key employees*
	18,136,510	6,892,587	
Sukuk *mudharabah* subordinasi (Catatan 26)			*Subordinated sukuk mudharabah (Note 26)*
Pemegang saham	56,000	54,000	*Shareholders*
Entitas dan lembaga pemerintah	544,000	539,000	*Government entities and institutions*
	600,000	593,000	
Jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak-pihak berelasi	32,564,853	11,970,487	***Total temporary syirkah funds from related parties***
Jumlah dana *syirkah* temporer	198,566,037	178,388,671	*Total temporary syirkah funds*
Persentase jumlah dana *syirkah* temporer dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah dana *syirkah* temporer	16.40%	6.71%	***Percentage of total temporary syirkah funds from related parties to total temporary syirkah funds***

Gaji dan tunjangan, bonus dan tantiem, imbalan jangka panjang untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp116.106 dan Rp63.783 atau 1,17% dan 0,73% dari jumlah beban operasional.

Salaries and allowances, bonuses and tantiem, long-term benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the years ended 31 December 2022 and 2021 are Rp116,106 and Rp63,783 or 1.17% and 0.73% of total operating expenses.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Bank juga menyebabkan risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pengelolaan risiko kredit yang dilakukan Bank antara lain dengan meningkatkan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip prudensialitas agar terhindar dari penurunan kualitas pembiayaan. Selain itu, Bank juga berupaya untuk mengurangi eksposur risiko kredit, di antaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko kredit dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko kredit memungkinkan Bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas kredit.

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

a. Pembiayaan *Wholesale*
   1. Perencanaan Pembiayaan
      a) *Setting risk* koridor
      b) Fokus sektor industri
      c) *Targeted Customer* dan *Client Tiering*
      d) Manajemen limit dan manajemen *pipeline*
      e) *Rating Wholesale*
   2. Proses Akuisisi
      a) Proses analisa nasabah yang komprehensif
      b) Proses keputusan dengan *four eyes principle*
      c) Pemahaman dan penguasan proses bisnis
      d) *Risk mitigation* melalui *term & condition* dan *covenant*
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
      a) *Monitoring portfolio mix*
      b) *Account mapping* dan klasifikasi risiko
      c) Reviu tahunan

43. RISK MANAGEMENT

In running its business, the Bank is always faced with various risks. Rapid developments in the Bank's external and internal environment have also caused the risks faced by the Bank to become increasingly complex. Therefore, in order to be able to adapt and be able to compete in the business environment, the Bank is required to be able to implement reliable and systematic risk management. The applied risk management principles must be able to support the Bank in being more prudent in line with the increasingly advanced developments in business activities and banking operations.

a. Credit Risk

Credit risk is the risk due to the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Bank in accordance with the agreed contract.

The credit risk management carried out by the Bank are by improving the balance between healthy financing expansion and financing management by taking into account the principle of prudentiality to avoid a decrease in the quality of financing. In addition, the Bank also seeks to reduce credit risk exposure through various credit risk mitigation by using a number of techniques, such as collateral and third party guarantees to reduce the impact of risk. Credit risk mitigation techniques allow the Bank to be protected from deteriorating financing quality.

The Bank manages credit risk by:

a. Wholesale Financing
   1. Financing Planning
      a) Setting risk corridor
      b) Industry sector focus
      c) Targeted Customer and Client Tiering
      d) Limit and Pipeline Management
      e) Wholesale rating
   2. Acquisition Process
      a) Comprehensive customer's due diligence
      b) The four eyes principle implementation
      c) Understanding and mastery of business process
      d) Risk mitigation by term & condition and covenant
   3. Maintenance & Intensive Monitoring
      a) Portfolio mix monitoring
      b) Mapping account and risk classification
      c) Annual review

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui: (lanjutan)

a. Pembiayaan *Wholesale* (lanjutan)
   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif (lanjutan)
      d) *Watchlist alert*
      e) Evaluasi *Financing Risk Rating*
      f) Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
      g) Pemantauan pemenuhan *covenant*
      h) Pemantauan *second way out*

   4. *Optimal Collection & Recovery*
      a) Restrukturisasi
      b) Pemetaan nasabah sesuai kuadran dan penetapan strategi serta *action plan*
      c) Penyiapan infrastruktur & sistem *Collection & Recovery*
      d) Pemantauan *NPF* dan *Write Off*
      e) Program *Booster*

b. Pembiayaan Ritel
   1. Perencanaan Pembiayaan
      a) Fokus sektor, khusus untuk SME
      b) Fokus segmen & *targeted customer*
      c) Penetapan RAC & fitur produk
      d) Program produk
      e) *Credit Scoring model*

   2. Proses Akuisisi
      a) Memastikan akuisisi nasabah sesuai target pasar, fitur produk dan RAC
      b) Implementasi *four eyes principle*
      c) Proses verifikasi*:* pendapatan*,* dokumen dan nasabah
      d) Implementasi *scoring model*

   3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
      a) Pemantauan portofolio dan kualitas
      b) Reviu *Watchlist* dan reviu tahunan (batas SME > Rp 5M)
      c) Pemeliharaan *Scoring System*
      d) Pemantauan *post transaction*: *covenant, second way out, committed to payroll*, Perjanjian Kerjasama Non *Payroll*, hasil *welcoming call*

   4. *Optimal Collection & Recovery*
      a) Restrukturisasi
      b) *Mobile Collection*
      c) Peningkatan sistem *collection*
      d) Pemantauan NPF dan WO
      e) Program *Booster Collection & Recovery*
      f) Pemantauan Sistem Klaim & Subrogasi

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

The Bank manages credit risk by: (continued)

a. Wholesale Financing (continued)
   3. Maintenance & *Intensive* Monitoring (*continued*)
      d) Watchlist alert
      e) Financing Risk Rating Evaluation
      f) Allowance for Impairment Losses Evaluation
      g) Covenant fulfillment monitoring
      h) Second way out monitoring

   4. Optimal Collection & Recovery
      a) Restructuring
      b) Customer mapping based on quadrants and setting strategy as well as action plan
      c) Preparation of Collection & Recovery infrastructure & systems
      d) NPF and Write Off monitoring
      e) Booster Program

b. Retail Financing
   1. Financing Planning
      a) Sector focus, especially for SME
      b) Segment focus & targeted customer
      c) RAC & product features setting
      d) Product program
      e) Credit Scoring model

   2. Acquisition Process
      a) Ensuring customer acquisition based on target market, product features and RAC
      b) The four eyes principle implementation
      c) Verification process: income, document and customer
      d) Scoring model implementation

   3. Maintenance & Intensive Monitoring
      a) Portfolio and quality monitoring
      b) Watchlist review and annual review (SME limit > Rp 5B)
      c) Scoring System Maintenance
      d) Post transaction monitoring: covenant, second way out, committed to payroll, Non Payroll Cooperation Agreement, welcoming call result

   4. Optimal Collection & Recovery
      a) Restructuring
      b) Mobile Collection
      c) Enhancement collection system
      d) NPF and WO monitoring
      e) Booster Collection & Recovery program
      f) Claim & Subrogation Monitoring System

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan)

***a. Credit risk** (continued)*

(i) Kualitas aset keuangan

(i) Financial assets quality

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

The following tables show the quality of financial assets by asset class for all financial assets exposed by credit risk (excluding allowance for impairment losses):

	31 Desember/*December* 2022					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,491,492	-	-	-	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	57,851,905	-	-	-	57,851,905	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	481,403	-	-	-	481,403	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	112,067,103	7,862,535	2,122,392	2,821,326	124,873,356	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	129	-	3	-	132	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	643	12,635	13,278	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	8,673,530	657,100	61,296	309,683	9,701,609	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	990,919	20,801	10,208	19,469	1,041,397	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	58,800,779	8,988,006	996,149	1,805,577	70,590,511	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	1,039,679	11,551	7,494	-	1,058,724	*Other assets*)
	274,175,397	17,539,993	3,198,185	4,968,690	299,882,265	

	31 Desember/*December* 2021					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but not impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
	Tingkat tinggi/ *High grade*	Tingkat standar/ *Standard grade*				
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	20,563,580	-	-	-	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	1,858,789	-	-	-	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	67,597,145	-	-	-	67,597,145	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	161,495	-	-	-	161,495	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	85,630,031	11,445,478	1,990,981	2,619,070	101,685,560	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	321	-	38	-	359	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	1,221	100,349	101,570	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	8,259,026	814,861	33,933	311,411	9,419,231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	1,503,578	103,290	234	21,335	1,628,437	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	45,000,050	9,720,756	999,571	1,834,059	57,554,436	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	775,278	3,572	5,057	-	783,907	*Other assets*)
	231,349,293	22,087,957	3,031,035	4,886,224	261,354,509	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

(a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.

(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan dan debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi.
(d) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

(a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
(b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan rating minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).
(c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi.
(d) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

Financial assets quality are defined as follows:

High grade

(a) Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the Government institutions, Local Government institutions, banks listed on the stock exchange and transactions with reputable banks with low probability of default on liabilities.
(b) Investments in marketable securities are securities issued by Government, securities and bonds that are included in investment grade with rating at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with excellent payments history and never being in arrears throughout the financing period and debtors whose accounts has never been restructured.
(d) Other assets are receivables from Government (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.

Standard grade

(a) Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with non-listed banks.
(b) Investments in marketable securities are non-investment grade securities with a minimum rating of idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).
(c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with a good payment history and debtors whose accounts have been restructured.
(d) Other assets are financial assets other than income receivables from Government or Local Government such as other receivables to third parties.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap aset keuangan yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(i) Financial assets quality** (continued)*

According to SFAS No. 60, past due financial assets are determined when the debtor fails to make payments on schedule. The table below shows aging analysis of past due but not impaired of financial assets:

	31 Desember/*December* 2022				
	≤ 30 hari/ *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	1,238,672	499,989	383,731	2,122,392	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	3	-	3	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	155	180	308	643	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	52,786	6,877	1,633	61,296	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	10,208	-	-	10,208	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	477,172	36,502	482,475	996,149	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	5,104	1,314	1,076	7,494	*Other assets**)
	1,784,097	544,865	869,223	3,198,185	

	31 Desember/*December* 2021				
	≤ 30 hari/ *days*	31 - 60 hari/ *days*	61 - 90 hari/ *days*	Jumlah/ *Total*	
Piutang *murabahah*	1,074,729	540,058	376,194	1,990,981	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	10	28	38	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	352	291	578	1,221	*Ijarah receivables*
Pinjaman *qardh*	24,605	7,902	1,426	33,933	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	10	224	-	234	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	946,231	37,961	15,379	999,571	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	3,241	983	833	5,057	*Other assets**)
	2,049,168	587,429	394,438	3,031,035	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

(ii) Analisis konsentrasi risiko

(ii) Risk concentration analysis

(a) Sektor geografis

(a) Geographical sectors

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

The following tables show the details of credit exposures categorised by geographical area as at 31 December 2022 and 2021. The geographical area grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region:

	31 Desember/*December* 2022						
	Jabodetabek	Jawa/*Java*	Sumatera	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	-	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,490,753	2	13	1	723	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	57,788,176	52,147	11,582	-	-	57,851,905	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	400,926	80,265	212	-	-	481,403	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	32,854,830	28,464,404	38,535,064	11,473,145	13,545,913	124,873,356	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	89	43	-	-	-	132	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	4,139	2,583	5,871	208	477	13,278	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	5,020,282	1,728,258	1,148,026	557,172	1,247,871	9,701,609	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	164,623	596,759	267,013	732	12,270	1,041,397	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	46,087,227	10,887,839	8,795,121	2,799,858	2,020,466	70,590,511	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	940,830	39,425	26,441	9,490	42,538	1,058,724	*Other assets*)
	177,530,333	41,851,725	48,789,343	14,840,606	16,870,258	299,882,265	
Cadangan kerugian penurunan nilai						(9,229,411)	*Allowance for impairment losses*
Neto						290,652,854	***Net***
Rekening Administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,534,261	121,925	182,605	19,391	3,626	1,861,808	*Unused financing facility*
Letter of Credit	157,620	24,611	-	-	-	182,231	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	1,790,588	303,550	527,341	43,760	43,549	2,708,788	*Bank guarantees issued*
	3,482,469	450,086	709,946	63,151	47,175	4,752,827	

	31 Desember/*December* 2021						
	Jabodetabek	Jawa/*Java*	Sumatera	Kalimantan/ *Borneo*	Indonesia Timur dan Bali/ *East Indonesia and Bali*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	20,563,580	-	-	-	-	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	1,856,775	43	19	1	1,951	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	67,545,904	51,241	-	-	-	67,597,145	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	104,588	56,907	-	-	-	161,495	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	24,779,015	24,757,523	32,132,888	8,830,800	11,185,334	101,685,560	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	255	104	-	-	-	359	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	4,918	89,375	5,855	497	925	101,570	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	4,873,127	1,925,283	1,076,312	443,117	1,101,392	9,419,231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	755,085	546,500	310,368	1,708	14,776	1,628,437	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	37,800,078	9,494,156	6,891,281	1,947,146	1,421,775	57,554,436	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	679,595	33,697	24,206	8,382	38,027	783,907	*Other assets*)
	158,962,920	36,954,829	40,440,929	11,231,651	13,764,180	261,354,509	
Cadangan kerugian penurunan nilai						(7,512,701)	*Allowance for impairment losses*
Neto						253,841,808	***Net***
Rekening Administratif							***Administrative accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	2,503,815	125,087	275,844	24,994	9,397	2,939,137	*Unused financing facility*
Letter of Credit	49,158	15,021	-	-	-	64,179	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	918,492	331,910	335,448	24,501	50,078	1,660,429	*Bank guarantees issued*
	3,471,465	472,018	611,292	49,495	59,475	4,663,745	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(b) Sektor industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(ii) Risk concentration analysis** (continued)*

(b) Industrial sector

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2022 and 2021:

	31 Desember/*December* 2022					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	2,491,492	-	-	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	55,423,534	1,819,571	608,800	-	57,851,905	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	-	115,504	365,899	-	481,403	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	84,992	16,304	8,657,193	116,114,867	124,873,356	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	132	132	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	381	12,897	13,278	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	1,398,963	-	2,996,207	5,306,439	9,701,609	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	225,222	405,198	404,132	6,845	1,041,397	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	15,610,929	756,815	38,560,120	15,662,647	70,590,511	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	896,690	2	22,843	139,189	1,058,724	*Other assets*)
	105,418,788	5,604,886	51,615,575	137,243,016	299,882,265	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(9,229,411)	*Allowance for impairment losses*
Neto					290,652,854	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	162,774	50,956	386,327	1,261,751	1,861,808	*Unused financing facility*
Letter of Credit	-	-	182,231	-	182,231	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	183,166	65,110	2,428,540	31,972	2,708,788	*Bank guarantees issued*
	345,940	116,066	2,997,098	1,293,723	4,752,827	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT *(continued)*

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk *(continued)*

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(ii) Risk concentration analysis *(continued)*

(b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021: (lanjutan)

(b) Industrial sector (continued)

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2022 and 2021: (continued)

	31 Desember/*December* 2021					
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ *Government (including Bank Indonesia)*	**Bank dan lembaga keuangan lainnya/ *Banks and other financial institutions***	**Perusahaan lainnya/ *Other companies***	**Perseorangan/ *Individuals***	**Jumlah/ *Total***	
Aset						***Assets***
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	20,563,580	-	-	-	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	-	1,858,789	-	-	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	67,028,663	402,882	165,600	-	67,597,145	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	-	86,139	75,356	-	161,495	*Acceptance receivables*
Piutang *murabahah*	114,464	260,346	8,264,512	93,046,238	101,685,560	*Murabahah receivables*
Piutang *istishna*	-	-	-	359	359	*Istishna receivables*
Piutang *ijarah*	-	-	83,955	17,615	101,570	*Ijarah financing*
Pinjaman *qardh*	1,198,600	200,000	3,476,920	4,543,711	9,419,231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	473,842	318,289	832,657	3,649	1,628,437	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	13,515,157	538,437	31,166,350	12,334,492	57,554,436	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	658,027	127	6,947	118,806	783,907	*Other assets*)
	103,552,333	3,665,009	44,072,297	110,064,870	261,354,509	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(7,512,701)	*Allowance for impairment losses*
Neto					253,841,808	***Net***
Rekening Administratif						***Administrative Accounts***
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	186,110	52,436	518,310	2,182,461	2,939,317	*Unused financing facility*
Letter of Credit	-	-	64,179	-	64,179	*Letter of Credit*
Bank garansi yang diterbitkan	9,927	54,052	1,580,925	15,525	1,660,429	*Bank guarantees issued*
	196,037	106,488	2,163,414	2,197,986	4,663,925	

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) *Other assets consist of income receivables*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Analisis eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya

1. *Secured financing*
2. *Partially secured financing*

Untuk *secured financing*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan adalah sebagai berikut:

a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kendaraan bermotor dan properti.

b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumer lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

(iii) Analysis of maximum exposure to credit risk after considering the impact of collateral and other credit mitigation

1. Secured financing
2. Partially secured financing

For secured financing, the Bank determined the type and value of collateral according to the financing scheme. Types of collateral are as follows:

a. Physical collateral, such as land and buildings, proof of vehicle ownership and properties.

b. Financial collateral, such as deposits (savings, current accounts, time deposits), securities and gold.

In case of default, the Bank will use the collateral as the last resort to recover counterparty obligations.

Partially secured financing consists of financing for fixed income employees, financing for retirees and other consumer financing. In their payment obligations, partially secured financing are generally made through automatic payroll deduction. Hence, the risk level of partially secured financing is not as big as the carrying value.

Financing risk mitigations for partially secured financing consists of employee recruitment decision letter and certificate of retirement.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19

Dalam kaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung, Bank menyiapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19 antara lain mengatur kriteria debitur terdampak, sektor usaha yang terdampak COVID-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas pembiayaan, pemantauan, pelaporan kepada regulator serta jurnal akuntansi. Kebijakan disusun mengacu pada POJK No. 02/POJK.03/2022, POJK No. 17/POJK.03/2021, POJK No. 48/POJK.03/2020, dan POJK No. 11/POJK.03/2020 serta ketentuan internal Bank lainnya.

Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada mekanisme pemantauan pembiayaan, baik terhadap debitur secara entitas maupun portofolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil pemantauan senantiasa dapat memberikan sinyal peringatan dini sehingga penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas pembiayaan selama masa pandemi.

Penyesuaian mekanisme *monitoring* pembiayaan dilakukan melalui:

1. Analisis *watchlist* terhadap seluruh debitur, terutama entitas debitur yang berada pada sektor usaha terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 02/POJK.03/2022, POJK No. 17/POJK.03/2021, dan POJK No. 48/POJK.03/2020 (sebagai penyesuaian atas POJK No. 11/POJK.03/2020) dan ketentuan internal Bank. *Output watchlist* untuk debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan *action plan* yang dipantau pelaksanaannya secara berkelanjutan.

2. Pengendalian pencairan/ penambahan/perpanjangan plafon pembiayaan terhadap debitur yang dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK No. 02/POJK.03/2022, POJK No. 17/POJK.03/2021 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 (sebagai penyesuaian atas POJK No. 11/POJK.03/2020), sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

(iv) Credit risk management during COVID-19 Pandemic

In the relevance of COVID-19 pandemic situation, the Bank has prepared a financing restructuring policy for debtors affected by COVID-19, such as regulating the criteria of affected debtors, industrial sector affected by COVID-19, mechanism and restructuring scheme, decision making, collectibility ratio, monitoring, reporting to the regulator and accounting journal entries. This policy refers to POJK No. 02/POJK.03/2022, POJK No. 17/POJK.03/2021, POJK No. 48/POJK.03/2020 and POJK No. 11/POJK.03/2020 and other Bank's internal regulations.

The Bank has made several adjustments on the financing monitoring mechanism, both by entity and portfolio of debtors. The adjustments are being taken into consideration to give monitoring results that provide an early warning signal for effective risk mitigation in maintaining the quality of financing during the pandemic.

The several monitoring adjustments are explained as below:

1. Watchlist analysis of all debtors, particularly for the debtors entities that the industrial sector is affected by COVID-19 referring to POJK No. 02/POJK.03/2022, POJK No. 17/POJK.03/2021 and POJK No. 48/POJK.03/2020 (as the adjustment for POJK No. 11/POJK.03/2020) and internal Bank's policy. The watchlist output is related to the debtors with the potential to experience declining performance followed by the continuous supervised action plan.

2. The financing disbursement/ addition/extension controls of the restructuring debtors (especially from the National Economic Stimulus POJK No. 02/POJK.03/2022, POJK No. 17/POJK.03/2021 and POJK No. 48/POJK.03/2020 scheme (for the adjustment of POJK No.11/POJK.03/2020), to address the restructuring objectives to be achieved effectively.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Manajemen risiko kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19 (lanjutan)

Penyesuaian mekanisme *monitoring* pembiayaan dilakukan melalui: (lanjutan)

3. Melakukan stress testing secara berkala dengan skenario melibatkan aspek kondisi pandemi COVID-19 sebagai pendukung judgmental decision making.

4. Melaksanakan *post facto review* debitur restrukturisasi terdampak COVID-19 untuk menghindari *moral hazard* dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta memantau keberlangsungan usaha/kemampuan debitur.

Bank senantiasa melakukan reviu atas pelaksanaan mekanisme pemantauan pembiayaan di tengah kondisi pandemi COVID-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan kondisi pandemi COVID-19 dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku.

Selanjutnya Bank melakukan reviu terhadap kecukupan cadangan kerugian/CKPN atas pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi COVID-19 untuk mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***a. Credit risk** (continued)*

***(iv) Credit risk management during COVID-19 Pandemic** (continued)*

The several monitoring adjustments are explained as below: (continued)

3. Perform periodical stress testing with considering the scenario of COVID-19 pandemic as the judgmental decision making support.

4. Executing the post facto review of the restructuring debtors affected by COVID-19 to avoid moral hazard and minimise the risk of inappropriate restructuring grants and monitor the debtor's business continuity.

The Bank constantly reviews the implementation of of the financing monitoring in the midst of the COVID-19 pandemic, so the adjustments can be made at the first opportunity when there is a change in the COVID-19 pandemic conditions by referring to the applicable government and authority's regulation.

Furthermore, the Bank conducts a review of the adequacy of the allowance for losses on the financing of the COVID-19 restructuring to anticipate potential credit risks in the future.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko pergerakan harga sukuk yang diklasifikasikan pada nilai wajar.

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui:
- Menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office, middle office,* dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing.
- Menerapkan *segregation of duty* dalam pelaksanaan transaksi *treasury* antara *dealer* dan *supervisor*.
- Melakukan *cut loss* posisi terbuka sukuk apabila terdapat penurunan harga pasar.

b. Market risk

Market risk is the risk due to changes in market prices, such as risks of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risk consists of two types of risk: exchange rate risk and the risk of price movement of sukuk that are classified at fair value.

The Bank manages market risk through:

- *Applying the principle of segregation of duty by separating the functions of the front office, middle office, and back office in the carrying out securities and foreign exchange transactions.*
- *Applying segregation of duty in carrying out treasury transaction between dealer and supervisor.*
- *Perform cut loss the sukuk open position if market price decline.*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui (lanjutan):

- Melakukan reviu terhadap kebijakan dan standar prosedur operasi yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- Menetapkan batas risiko pasar mencakup Posisi Devisa Neto ("PDN"), *Value at Risk* ("VaR"), Posisi Terbuka, *Stop Loss,* Transaksi Perbendaharaan, dan *Cut Loss*.
- Memantau pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, *yield,* surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR"), dan informasi pasar terkini.
- Melakukan *mark to market* surat berharga dan revaluasi kurs secara harian.

Risiko *benchmark* suku bunga

Risiko *benchmark* suku bunga merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book*. Risiko benchmark suku bunga yang terdiri atas risiko spesifik dan risiko umum diperhitungkan dalam penilaian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar.

Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya perbedaan posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto ("PDN") baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan Posisi Devisa Neto ("PDN") didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

The Bank manages market risk through (continued):

- *Perform conducting a review of policies and standard operating procedures related to market risk management.*
- *Setting market risk limits include Net Open Position ("NOP"), Value at Risk ("VaR"), Open Position, Stop Loss, Treasury Transactions, and Cut Loss.*
- *Monitoring the movement of external indicators including the USD/IDR exchange rate, yield, government securities, market yields, gold prices, Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") and the latest market information.*
- *Conducting mark to market toward marketable securities and daily foreign exchange rate revaluation.*

Benchmark rate risk

Benchmark rate risk is the risk due to changes in financial instrument prices from trading book positions. Benchmark rate risk which consists of specific risk and general risk is taken into account in the Risk Weighted Assets valuation for Market Risk.

Exchange rate risk

Exchange rate risk is the risk due to the gap of foreign exchange positions owned by the Bank which is reflected in the Net Open Position ("NOP") either individually or as a whole. Included in the foreign exchange position are the trading book positions carried out with the aim of gaining short-term foreign exchange transaction benefits as well as banking book positions in the framework of PDN control.

The Net Open Position ("NOP") is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated 1 July 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

***Exchange rate risk** (continued)*

The NOP of Bank as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

Mata uang	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currencies*
		31 Desember/*December* 2022		
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statement of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	8,659,320	8,593,063	66,257	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	127,706	20,025	107,681	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	18,130	10,577	7,553	*Singapore Dollar*
Pound Sterling Inggris	941	-	941	*Great Britain Pound Sterling*
Euro Eropa	14,085	12,479	1,606	*Euro Europe*
Dolar Hong Kong	254	-	254	*Hong Kong Dollar*
Dolar Australia	1,948	-	1,948	*Australian Dollar*
Yen Jepang	2,615	-	2,615	*Japanese Yen*
			188,855	
Modal (Catatan 45a)			33,109,949	*Capital (Note 45a)*
Rasio PDN			**0.57%**	***NOP Ratio***

Mata uang	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Posisi devisa neto/ *Net open position*	*Currencies*
		31 Desember/*December* 2021		
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				***Statement of Financial Position and Administrative Accounts***
Dolar Amerika Serikat	6,479,373	6,491,705	12,332	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	339,143	296,644	42,499	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	12,772	12,843	71	*Singapore Dollar*
Pound Sterling Inggris	6,680	-	6,680	*Great Britain Pound Sterling*
Euro Eropa	6,043	6,215	172	*Euro Europe*
Dolar Hong Kong	2,947	-	2,947	*Hong Kong Dollar*
Dolar Australia	1,014	-	1,014	*Australian Dollar*
Yen Jepang	886	-	886	*Japanese Yen*
			66,601	
Modal (Catatan 45a)			25,122,769	*Capital (Note 45a)*
Rasio PDN			**0.27%**	***NOP Ratio***

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021:

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in exchange rate, assuming all other variables are constant for the years ended 31 December 2022 and 2021:

	Perubahan persentase/ *Change in percentage*	Dampak terhadap laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ *Impact to profit or (loss) and other comprehensive income before tax*	
	31 Desember/*December* 2022		
Mata uang asing	+1%	1,889	*Foreign currencies*
	-1%	(1,889)	
	31 Desember/*December* 2021		
Mata uang asing	+1%	666	*Foreign currencies*
	-1%	(666)	

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021, dampak atas perubahan nilai tukar dari mata uang selain Dolar Amerika Serikat tidak material.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan Bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalisir risiko likuiditas antara lain sebagai berikut:

1) Pemisahan fungsi antara unit perbendaharaan sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit operasional sebagai *back office*.

2) Penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.

3) Memelihara akses ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.

4) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.

5) Pemantauan terhadap kondisi likuiditas Bank secara berkala melalui beberapa rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* (“FDR”), rasio kewajiban antar bank, arus kas, dan perbedaan likuiditas.

6) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (“GWM”) dan *secondary reserve*.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***b. Market risk** (continued)*

***Exchange rate risk** (continued)*

For the year ended 31 December 2022 and 2021, the effect of fluctuations in exchange rates of currency other than United States Dollar is not material.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk due to the Bank’s inability to meet its maturing obligations. Along with the development of the Bank’s business, liquidity risk is one of the risk that become the major concerns of the Bank. It may result from the growth of the Bank’s financing which greater than the growth of third party funds. The difference between the availability of source of funds and the maturity of receivable and financing can lead to difficulty in fulfilling bank obligations to customers and other parties.

The actions taken by the Bank to minimise the liquidity risk include the following:

1) Separating the functions between the treasury unit as the front office, the risk management unit as the middle office, and the operations unit as the back office.

2) Placement funds in high quality liquid assets as liquidity reserves.

3) Maintaining access to the money market through placements and financing between banks.

4) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of liquidity risk.

5) Monitoring the liquidity conditions periodically through some liquidity ratios such Financing to Deposit Ratio (“FDR”), the ratio of inter-bank liabilities, cash flow and liquidity gaps.

6) Setting the liquidity risk limit such as limit of Statutory Reserve Requirement (“GWM”) and secondary reserve.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

43. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

Berikut adalah tabel analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

The following are the tables of assets and liabilities maturity analysis as at 31 December 2022 and 2021, based on the remaining time until the maturity date:

	31 Desember/*December* 2022						
Keterangan	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months***	**Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year***	**Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year***	**Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities***	**Jumlah/ *Total***	***Descriptions***
Aset							***Assets***
Kas	4,951,469	-	-	-	-	4,951,469	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,077,920	700,538	-	-	-	31,778,458	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	2,491,295	197	-	-	-	2,491,492	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	8,052,606	957,995	11,828,390	37,012,914	-	57,851,905	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	34,170	75,330	371,903	-	-	481,403	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istishna*, dan *ijarah*	215,567	220,941	2,565,000	121,885,258	-	124,886,766	*Receivables – murabahah, istishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	1,651,654	3,723,784	2,470,218	1,855,953	-	9,701,609	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	9,809	98,222	176,926	756,440	-	1,041,397	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	2,925,305	4,256,933	8,215,084	55,193,189	-	70,590,511	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	54,018	56,016	236,725	711,965	-	1,058,724	*Other assets*)
Jumlah aset	51,463,813	10,089,956	25,864,246	217,415,719	-	304,833,734	***Total asset***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	1,009,502	-	-	-	-	1,009,502	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	192,775	-	-	-	-	192,775	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan dari nasabah	66,012,257	-	-	-	-	66,012,257	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	2,218,697	-	-	-	-	2,218,697	*Deposits from other banks*
Kewajiban akseptasi	34,170	75,330	371,903	-	-	481,403	*Acceptance liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	689,018	-	689,018	*Estimated liabilities for employee benefits*
Liabilitas sewa	-	-	-	166,002	-	166,002	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain**)	651,902	-	-	-	-	651,902	*Other liabilities*)
Jumlah liabilitas	70,119,303	75,330	371,903	855,020	-	71,421,556	***Total liabilities***
Dana *syirkah* temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	72,897,352	-	-	-	-	72,897,352	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	74,582,576	15,601,987	10,575,779	-	-	100,760,342	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	22,754,968	-		-	-	22,754,968	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	-	1,375,000	-	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	-	-	778,375	-	-	778,375	*Mudharabah term financing*
Jumlah dana *syirkah* temporer	170,234,896	15,601,987	12,729,154	-	-	198,556,037	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(188,890,386)	(5,587,361)	12,763,189	216,560,699	-	34,846,141	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) *Other assets consist of income receivables*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo: (lanjutan)

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***c. Liquidity risk** (continued)*

Table of asset and liabilities maturity analysis as at 31 December 2022 and 2021, based on the remaining maturity are as follows: (continued)

Keterangan	31 Desember/*December* 2021						*Descriptions*
	Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ *Others that have no maturities*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Kas	4,119,903	-	-	-	-	4,119,903	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	20,421,055	142,525	-	-	-	20,563,580	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro dan penempatan pada bank lain	1,846,596	12,193	-	-	-	1,858,789	*Current accounts and placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	24,935,573	6,611,482	2,296,562	33,753,528	-	67,597,145	*Investments in marketable securities*
Tagihan akseptasi	13,265	74,396	73,834	-	-	161,495	*Acceptance receivables*
Piutang - *murabahah, istishna* dan *ijarah*	364,903	259,978	2,386,389	98,776,219	-	101,787,489	*Receivables - murabahah, istishna and ijarah*
Pinjaman *qardh*	1,596,932	3,234,700	3,584,237	1,003,362	-	9,419,231	*Funds of qardh*
Pembiayaan *mudharabah*	12,173	113,569	778,672	724,023	-	1,628,437	*Mudharabah financing*
Pembiayaan *musyarakah*	3,297,674	4,378,516	8,875,472	41,002,774	-	57,554,436	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain*)	110,538	67,268	26,995	579,106	-	783,907	*Other assets*)
Jumlah aset	56,718,612	14,894,627	18,022,161	175,839,012	-	265,474,412	***Total asset***
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	608,554	-	-	-	-	608,554	*Obligations due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	158,478	-	-	-	-	158,478	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan dari nasabah	57,247,890	-	-	-	-	57,247,890	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	115,938	-	-	-	-	115,938	*Deposits from other banks*
Liabilitas akseptasi	13,265	74,396	73,834	-	-	161,495	*Acceptance liabilities*
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	836,491	-	836,491	*Estimated liabilities for employee benefits*
Liabilitas sewa	6,036	2,018	31,186	249,861	-	289,101	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain**)	619,917	-	-	-	-	619,917	*Other liabilities***)
Jumlah liabilitas	58,770,078	76,414	105,020	1,086,352	-	60,037,864	***Total liabilities***
Dana *syirkah* temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan *mudharabah*	65,102,491	-	-	-	-	65,102,491	*Mudharabah savings deposits*
Deposito *mudharabah*	61,692,817	23,587,726	13,312,010	-	-	98,592,553	*Mudharabah time deposits*
Giro *mudharabah*	13,318,627	-	-	-	-	13,318,627	*Mudharabah demand deposits*
Sukuk *mudharabah* subordinasi	-	-	-	1,375,000	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Jumlah dana *syirkah* temporer	140,113,935	23,587,726	13,312,010	1,375,000	-	178,388,671	***Total temporary syirkah funds***
Perbedaan jatuh tempo	(142,165,401)	(8,769,513)	4,605,131	173,377,660	-	27,047,877	***Maturity gap***

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima
**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) *Other assets consist of income receivables*
**) *Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts*

Bank senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem operasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dengan melakukan *monitoring* terhadap kondisi likuiditas bank melalui beberapa rasio likuiditas. Bank meyakini bahwa jumlah angsuran yang didapat dari pembiayaan kepada nasabah yang belum jatuh tempo masih cukup untuk mengatasi *maturity gap* negatif yang ada.

The Bank continually evaluates the effectiveness of the operating system to ensure that sufficient funds are available to meet all needs by monitoring the condition of the bank's liquidity through several liquidity ratios. The Bank believes that the amount of installments obtained from financing to customers that have not matured is still sufficient to cover the negative maturity gap.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian/insiden eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional selaras dengan pengembangan upaya pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan internal kontrol di cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, dan pelaksanaan audit internal.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut:

1) Menyusun manual produk, kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis operasional sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas operasional Bank dan mensosialisasikannya secara memadai.

2) Membentuk *Senior Operasional Risk Head* yang mengkoordinir fungsi DCOR dan RBC dalam rangka pengelolaan risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan unit jaringan.

3) Menyiapkan *tools* yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko operasional, antara lain *Risk & Control Self Assessment, Key Risk Indicator, Loss Event Database*, Laporan Profil Risiko Operasional, dan *Control Testing.*

4) Melakukan kajian & analisis risiko operasional atas produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.

5) Menerapkan *Business Continuity Management* (“BCM”) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

d. Operational risk

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, internal processes failures, human errors, system failures and/or external events/incidents that affect the Bank’s operations.

Operational risk management is aligned with the development of internal control efforts. One of the efforts made is the implementation of internal control at the branch through the separation of duties and responsibilities, dual control mechanism in the implementation of the transaction function, deviation/ authorisation, restrictions on access to the system authority, increasing employee’s competence and the implementation of internal audit.

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following:

1) Prepare product manuals, policies, procedures and operational technical instructions as a guidance in carrying out the Bank operational activities and socialise them adequately.

2) Establish a Senior Operational Risk Head who coordinates DCOR and RBC functions in the framework of operational risk management in the Head Office work units and network units.

3) Preparing tools used in implementing operational risk management, including Risk & Control Self Assessment, Key Risk Indicators, Loss Event Database, Operational Risk Profile Reports and Control Testing.

4) Performing operational risk review & analysis for proposed new products or activities which will be launched by the Bank.

5) Applying a Business Continuity Management (“BCM”) to ensure the continuity of operations of the Bank despite the disturbance (disaster) and to protect the interests of stakeholders.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko operasional (lanjutan)

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut: (lanjutan)

6) Menerapkan tata kelola IT secara baik dan memadai, antara lain melalui pembentukan IT *Steering Committee*, penerapan mekanisme *System Development Life Cycle,* penerapan standar keamanan IT dan manajemen akses, penerapan standar perangkat IT, dan penerapan *Disaster Recovery Plan.*

e. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian materil ataupun immateril apabila Bank tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Bank dalam jumlah yang cukup signifikan, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
3) Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***d. Operational risk** (continued)*

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following: (continued)

6) Implement good and adequate IT governance, including through the establishment of an IT Steering Committee, implementation of the System Development Life Cycle mechanism, implementation of IT security standards and access management, implementation of standard IT tools and implementation of a Disaster Recovery Plan.

e. Legal risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects. The emergence of legal risk can be caused by the absence of supporting laws and regulations or the weakness of the agreement, such as non-compliance with the legal terms of the contract or imperfect binding of collateral. As a company governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank must comply with all applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia/Financial Service Authority ("OJK") as a regulator in the banking industry in Indonesia as well as other regulations relating to business activities carried out by the Bank.

Legal risks that arise can be in the form of claims for material or immaterial losses if the Bank does not comply with the applicable rules and regulations. If there is a claim for losses against the Bank in a significant amount, it can directly affect the Bank's financial performance.

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of legal risk in accordance with applicable regulations.
2) Developing a strong legal organisation.
3) Standardising contract and cooperation agreement for a specific financing program in accordance with applicable regulations.

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Syariah. Dalam industri perbankan, Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan, yang mengatur Bank, seperti:

1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM");
2) Kualitas Aset Produktif;
3) Penyisihan Penghapusan Aset ("PPA");
4) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
5) *Good Corporate Governance* ("GCG"); dan
6) Rencana Bisnis Bank ("RBB").

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan di antaranya:

1) Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola perusahaan yang baik ("GCG") dan kode etik.
2) Penguatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik ("GCG") dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
3) Menyusun dan menyampaikan laporan tata kelola perusahaan yang baik ("GCG") kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4) Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* ("KYC"), Anti Pencucian Uang ("APU"), dan Pencegahan Pendanaan Teroris ("PPT").
5) Meningkatkan pelaksanaan *compliance certification*.
6) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.
7) Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereviu dan menganalisis kepatuhan dari produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

f. Compliance risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank failures in complying and/or applying applicable laws and regulations and Sharia principles. In the banking industry, the Bank is required to comply with regulations issued by the Government, Bank Indonesia, Financial Services Authority ("OJK") and the National Sharia Boards. In general, this risk is closely related to compliance with applicable laws and regulations, which governs the Bank, such as:

1) Capital Adequacy Ratio ("CAR");
2) Quality of Earning Assets;
3) Allowance of Earning Assets ("PPA");
4) Legal Lending Limit;
5) Good Corporate Governance ("GCG"); and
6) Bank Business Plan ("RBB").

The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to banking activities may affect the continuity of the Bank.

In managing the compliance risks, the Bank performs actions such as:

1) Improving understanding of Good Corporate Governance ("GCG") and the code of conduct.
2) Strengthening Good Corporate Governance ("GCG") implementation and ensuring that all financing debtors meet all financing needs.
3) Preparing and submitting Good Corporate Governance ("GCG") to Financial Services Authority.
4) Increasing the implementation of the Know Your Customer ("KYC"), Anti Money Laundering ("APU") and the Prevention of Financing for Terrorism ("PPT").
5) Improving the implementation of compliance certification.
6) Working closely with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank with Sharia principles.
7) Empowering Sharia Compliance to review and analyse the compliance of the Bank's products/activities with Sharia principles.

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as at 31 December 2022 and 2021 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

As at 31 December 2022 and 2021, the carrying value of the Bank's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

	31 Desember/*December* 2022		31 Desember/*December* 2021		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Investasi pada surat berharga	57,851,905	56,622,082	67,597,145	68,281,642	*Investments in marketable securities*

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

(i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
(ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
(iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

The tables below show the financial instruments recognised at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

(i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
(ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
(iii) Level 3: Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for asset and liability that are not based on observable market data.

Nilai wajar tingkat 1 dinilai menggunakan data dari *Bloomberg*.

The fair value level 1 is valued by using data from Bloomberg.

Nilai wajar tingkat 2 dinilai menggunakan data dari *Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA")* dan *Net Asset Value report* dimana dihitung dengan model diskonto arus kas dengan kurva yield (diambil dari data pasar) terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

The fair value level 2 is valued by using data from Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA") and Net Asset Value report which is calculated using a discounted cash flow model based on current yield curve (derived from market data) appropriated with the remaining term of maturity.

	31 Desember/*December* 2022				
	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Investasi pada surat berharga	56,622,082	-	56,622,082	-	*Investments in marketable securities*

	31 Desember/*December* 2021				
	Nilai wajar/ *Fair value*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Investasi pada surat berharga	68,281,642	-	68,281,642	-	*Investments in marketable securities*

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang, dan pembiayaan yang diberikan dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

a. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b. Investasi pada surat berharga

Nilai wajar untuk investasi pada surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik risiko kredit, jatuh tempo, dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

c. Liabilitas segera, simpanan *wadiah*, simpanan dari bank lain, liabilitas lain-lain, dan dana *syirkah* temporer.

Estimasi nilai wajar dari liabilitas segera, simpanan *mudharabah*, dan liabilitas lain-lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan *wadiah* dan simpanan dari bank lain dengan tingkat margin tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

d. Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap. Piutang dan pembiayaan yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortised cost.*

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government sukuk classified as held to maturity, receivables and financing and marketable securities issued approximate their carrying values due to their short-term maturities.

a. Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks, acceptance receivables and other assets.

The carrying amount of current accounts and placements with Bank Indonesia and other banks, acceptance receivables and other assets are a reasonable approximations of fair value.

b. Investments in marketable securities

The fair value for amortised cost investments in marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit risk, maturity and yield characteristics or using Internal valuation models.

c. Obligations due immediately, wadiah deposits, deposits from other banks, other liabilities and temporary syirkah funds.

The estimated fair value of obligations due immediately, mudharabah deposits and other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of wadiah deposits and deposits from other banks with fixed rate margin and acceptance liabilities are determined based on discounted cash flows using money market margin rates for with similar remaining maturities.

d. Receivables and financing

Generally, the Bank's receivables and financing portfolio consists of receivables and financing with variable margin rate and short-term receivables and financing with fixed margin rate. Receivables and financing are stated at amortised cost.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

d. Piutang dan pembiayaan (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap piutang dan pembiayaan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin yang berlaku untuk piutang dan pembiayaan dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat margin pasar saat ini. Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dan pembiayaan jangka pendek dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

44. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

d. Receivables and financing (continued)

The estimated fair values of receivables and financing are determined based on discounted cash flows using margin rates applied for receivables and financing with similar credit risk and remaining maturities.

The carrying amount of receivables and financing with variable margin rate and short-term receivables and financing with fixed margin rate are the reasonable approximations of their fair values.

The estimated fair value of loans represent the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates. The carrying amounts of variable rate receivables and financing and short-term fixed rate receivables and financing are the reasonable approximation of their fair values.

45. INFORMASI PENTING LAINNYA

a. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

45. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

a. As at 31 December 2022 and 2021, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio ("CAR") are calculated based on Financial Service Authority ("OJK") No. 21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014, as amended in previous regulation. The CARs are as follows:

	2022	2021	
Modal inti	31,232,293	23,173,019	*Core capital*
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	252,083	527,083	*Supplementary capital (maximum 100% over core capital)*
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	1,625,573	1,422,667	*General reserves of allowance for impairment losses on earning assets (maximum 1.25% of ATMR)*
	33,109,949	25,122,769	
Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Risiko Kredit	129,730,824	113,643,146	*Risk Weighted Assets ("RWA") for Financing Risk*
ATMR Risiko Pasar	306,184	103,913	*RWA for Market Risk*
ATMR Risiko Operasional	33,120,795	-	*RWA for Operational Risk*
	163,157,803	113,747,059	
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	20.33%	22.11%*)	*Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	20.29%	22.09%*)	*Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk*
Rasio KPMM yang diwajibkan	9.95%	9.98%	*Minimum CAR*

*) Sesuai POJK No. 21/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015, KPMM 31 Desember 2021 sebagai Bank hasil penggabungan tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR Risiko Operasional sampai dengan akhir bulan Desember tahun penggabungan.

*) *According to POJK No. 21/POJK.03/2014 and SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015, CAR as at 31 December 2021 as the Bank resulting from the merger is not required to calculate the RWA for Operational Risk until the end of December of the year of the merger.*

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Based on the risk profile as at 31 December 2022 and 2021, which is satisfactory, the minimum CAR as at 31 December 2022 and 2021, was determined at 9% to less than 10%.

45. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Bank wajib untuk memenuhi *Countercyclical Buffer* yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Hasil penilaian menunjukan bahwa Bank mampu untuk memenuhi KPMM sesuai dengan profil risiko dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

***45. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION** (continued)*

In addition to provide core capital and supplementary capital, the Bank is required to provide Countercyclical Buffer ranging from 0% to 2.5% of RWA based on POJK regulation No. 21/POJK.03/2014 regarding the Minimum Required Capital Adequacy Ratio of Sharia Bank.

The assessment result shows that the Bank has met the Minimum CAR in accordance with its risk profile and met additional capital buffer requirement.

b. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan bersih masing-masing adalah sebagai berikut:

b. As at 31 December 2022 and 2021, ratio of Non-Performing Financing ("NPF") gross and net, respectively, are as follows:

	2022	2021	
NPF - Bruto	2.42%	2.93%	*NPF - Gross*
NPF - Bersih	0.57%	0.87%	*NPF - Net*

c. Rasio piutang, pembiayaan dan pinjaman usaha kecil terhadap jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman syariah yang diberikan Bank adalah sebesar 20,19% dan 23,11% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

c. The ratio of small business receivables, financing and funds to total sharia receivables, financing and funds are 20.19% and 23.11% as at 31 December 2022 and 2021, respectively.

d. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp23.229.777 dan Rp27.744.179.

d. Receivables, financing and funds that have been restructured by the Bank 31 December 2022 and 2021 which are reported to the Financial Service Authority amounted to Rp23,229,777 *and Rp27,744,179, respectively.*

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat COVID-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar:

Total amount of restructured financing related COVID-19 based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 until 31 December 2022 and 2021 amounted to:

	2022	2021	
Lancar	12,352,835	15,785,699	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	834,982	871,531	*Special Mention*
Kurang Lancar	608,694	454,182	*Substandard*
Diragukan	357,398	340,995	*Doubtful*
Macet	470,109	282,552	*Loss*
Jumlah	14,624,018	17,734,959	*Total*

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

Restructuring scheme involves extension of receivables/financing maturity date, rescheduling and additional plafond of debtor's receivables/financing.

e. Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar ("BMPD") kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat piutang, pembiayaan dan pinjaman pihak terkait yang melampaui ketentuan BMPD dan pada tanggal 31 Desember 2021 terdapat piutang, pembiayaan dan pinjaman pihak terkait yang melampaui ketentuan sebesar 0,51% yang melampaui ketentuan BMPD.

e. Based on the Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds ("BMPD") to the Financial Services Authority as at 31 December 2022 there are no receivables, financing and funds related parties which exceeded the BMPD Regulation and as at 31 December 2021 there are receivables, financing and funds related parties which exceeded the regulation of 0.51% which violated or exceeded the BMPD Regulation.

45. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

Pelampauan terjadi karena pembentukan *Holding* BUMN Ultra Mikro dimana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") yang merupakan salah satu pemegang saham BSI, ditetapkan oleh Pemerintah sebagai induk dari *Holding* tersebut dan mengakibatkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian yang merupakan nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi pihak terkait BSI. Atas pelampauan tersebut, aksi yang dilakukan Bank adalah dengan menjaga portofolio penempatan dana dan pembiayaan kepada pihak terkait sehingga pada tanggal 31 Desember 2022 sudah tidak terdapat pelampauan BMPD.

***45. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION** (continued)*

The excess occurred due to the formation of the Ultra Micro BUMN Holding where PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BRI") which is one of the shareholders of BSI, which was determined by the Government as the Parent of the Holding and resulted in PT Permodalan Nasional Madani (Persero) and PT Pegadaian which is a customer of PT Bank Syariah Indonesia Tbk becomes a related party to BSI. For this excess, the action taken by the Bank is to maintain the placement of funds and financing portfolios to related parties so that as at 31 December 2022, there is no BMPD exceedance.

46. INFORMASI SEGMEN

Pada tahun 2021, segmen operasi Bank dibagi berdasarkan beberapa segmen operasi sebagai berikut: *Wholesale*, SME, Konsumer, Mikro dan Lainnya.

Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif. Segmen operasi Bank dibagi berdasarkan beberapa segmen operasi sebagai berikut: *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat. Dalam menentukan hasil segmen operasi, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Komponen *Internal Transfer Pricing Model* diterapkan dalam perhitungan kinerja laba rugi masing-masing segmen.

Perubahan pada penyajian segmen operasi antara lain:

- Pemisahan segmen *Wholesale* menjadi segmen *Corporate Banking* dan *Commercial Banking*.
- Pengelolaan dana nasabah Kementerian, Lembaga Pemerintah, yayasan dan universitas dipindahkan ke segmen Hubungan Kelembagaan yang sebelumnya tercatat di segmen Lainnya dimigrasikan pada segmen Hubungan Kelembagaan.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank per 31 Desember 2022:

- Corporate Banking: melayani badan usaha seperti BUMN dan anak perusahaannya, lembaga negara, perusahaan multinasional, bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura non-*linkage*), pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, dan perusahaan sekuritas.

46. SEGMENT INFORMATION

In 2021, the Bank's operating segment is divided into several operating segments as follows: Wholesale, SME, Consumer, Micro and Others.

As at and for the year ended 31 December 2022, the Bank implemented changes to the presentation of operating segments in order to provide more comprehensive information. The Bank's operating segment is divided based on the following operating segments: Corporate Banking, Commercial Banking, Institutional Relation, Retail and Treasury Banking & Head Office. In determining the results of operating segments, certain asset and liability accounts and revenues and expenses are attributed to each segment based on management's internal reporting policies. The components of Internal Transfer Pricing Model are applied in the calculation of profit or loss performance of each segments.

The changes in presentation of operating segments, including:

- *Separation of the Wholesale segment into Corporate Banking and Commercial Banking segments.*
- *The management of customer funds from Ministries, Government Institutions, foundations and universities was transferred to the Institutional Relations segment, which was previously listed in the Others segment, migrating to the Institutional Relation segment.*

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting as at 31 December 2022:

- *Corporate Banking: serves business entities such as SOEs and their subsidiaries, state institutions, multinational companies, banks and non-bank financial institutions (including non-linkage venture capital), syndicated financing, public companies and securities companies.*

46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank per 31 Desember 2022 (lanjutan):

- *Commercial Banking*: melayani badan usaha seperti BUMD dan anak perusahaannya, pemerintah daerah, rumah sakit (kecuali diatur dalam produk khusus), perguruan tinggi negeri dan swasta (yayasan yang memiliki perguruan tinggi).

- Hubungan Kelembagaan: saat ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah lembaga pemerintah dan dana pensiun BUMN.

- Ritel: saat ini meliputi antara lain:
  - Ritel SME: melayani badan usaha swasta berbentuk badan hukum dan non badan hukum untuk tujuan produktif, pendidikan dasar & menengah, klinik, koperasi, pola *linkage*, inti plasma, dan perorangan.
  - Ritel Mikro: ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat.
  - Ritel Konsumer: melayani perorangan untuk tujuan konsumtif/multiguna (antara lain produk Griya, Multiguna, Kendaraan, Pensiunan, Kartu Pembiayaan, Cicil emas dan Gadai Emas, pembiayaan program pemerintah).

- Lainnya: saat ini meliputi antara lain:
  - Treasuri: segmen *treasury* terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing*, money market, fixed income*, bisnis perbankan internasional, pasar modal, supervisi Kantor Luar Negeri.
  - Kantor Pusat: terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direviu oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

***46. SEGMENT INFORMATION** (continued)*

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting as at 31 December 2022 (continued):

- *Commercial Banking: serves business entities such as BUMD and its subsidiaries, regional governments, hospitals (unless regulated in special products), state and private universities (foundations with tertiary institutions).*

- *Institutional Relation: currently focused on the management of customer funds and other transactions belonging to customers of government institutions and BUMN pension funds.*

- *Retail: currently includes, among others:*
  - *SME Retail: serving private business entities in the form of legal entities and non-legal entities for productive purposes, primary & secondary education, clinics, cooperatives, linkage patterns, plasma core and individuals.*
  - *Micro Retail: aimed at serving individual customers and micro entrepreneurs, including the distribution of subsidised financing to support government programs in empowering community businesses.*
  - *Consumer Retail: serving individuals for consumptive/multipurpose purposes (among others Griya products, Multipurpose, Vehicles, Pensioners, Financing Cards, Gold Installments and Pawn Gold, government program financing).*

- *Others: currently include, among others:*
  - *Treasury: treasury segment related to the Bank's treasury activities including foreign exchange transactions, money market, fixed income, international banking business, capital market, supervision of Foreign Office.*
  - *Head Office: related to the management of assets and liabilities other than those already managed by other operating segments, including receiving cost allocation for centralised service provision to other segments as well as revenues/costs that are not allocated to other segment reporting.*

Performance is measured based on segment profit before income tax, as reported in an internal management report reviewed by the Bank Management. Segment profit is used to measure performance where management believes that the information is most relevant in evaluating the results of the segment relative to other entities operating in the industry.

46. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

46. SEGMENT INFORMATION (continued)

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi:

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows:

Keterangan	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan/ Institutional Relation	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat/ Treasury Banking & Head Office	Penyesuaian & Eliminasi/ Adjustment & Elimination*)	Jumlah/ Total	Descriptions
31 Desember/*December* 2022								
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*)	3,028,731	995,601	2,770,467	19,841,444	2,180,414	(9,193,792)	19,622,865	*Revenue from fund management as mudharib*)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil)	(1,929,202)	(575,465)	(2,272,436)	(8,899,486)	(134,359)	9,778,779	(4,032,169)	*Third parties' share on return*)
Hak bagi hasil milik Bank	1,099,529	420,136	498,031	10,941,958	2,046,055	584,987	15,590,696	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan usaha lainnya	235,198	25,350	-	686,723	2,753,840	-	3,701,111	*Other operating income*
Beban usaha	(96,186)	(106,097)	(67,091)	(4,606,877)	(5,019,085)	-	(9,895,336)	*Operating expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif bersih	(500,333)	(407,703)	-	(2,112,972)	(727,789)	-	(3,748,797)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
Total beban	(596,519)	(513,800)	(67,091)	(6,719,849)	(5,746,874)	-	(13,644,133)	*Total expenses*
Pendapatan non-operasional	-	-	-	-	8,534	-	8,534	*Non-operating income*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	738,208	(68,314)	430,940	4,908,832	(938,445)	584,987	5,656,208	*Income before zakat and income tax expenses*
Zakat	(17,175)	-	(10,026)	(114,204)	-	-	(141,405)	*Zakat*
Beban pajak	(152,381)	-	(88,955)	(1,013,285)	-	-	(1,254,621)	*Tax expense*
Laba bersih	568,652	(68,314)	331,959	3,781,343	(938,445)	584,987	4,260,182	*Net income*
Aset segmen								***Segment of assets***
Pembiayaan *Wholesale*	46,139,198	11,044,987	-	-	-	-	57,184,185	*Wholesale Financing*
Pembiayaan Ritel								*Retail FInancing*
SME	-	-	-	18,904,947	-	-	18,904,947	*SME*
Mikro	-	-	-	18,740,411	-	-	18,740,411	*Micro*
Konsumer***)	-	-	-	112,875,313	-	-	112,875,313	*Consumer***)
Cadangan kerugian penurunan Nilai pembiayaan	(4,060,934)	(1,064,139)	-	(4,226,235)	152,920	-	(9,198,388)	*Provision for impairment losses for financing*
Non pembiayaan - bersih	859,122	-	-	-	106,361,848	-	107,220,970	*Non financing - net*
	42,937,386	9,980,848	-	146,294,436	106,514,768	-	305,727,438	
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen								***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***
Pendanaan	10,197,506	4,543,448	77,370,904	170,456,759	4,228,374	-	266,796,991	*Funding*
Non-pendanaan	-	-	-	-	38,930,447	-	38,930,447	*Non-funding*
	10,197,506	4,543,448	77,370,904	170,456,759	43,158,821	-	305,727,438	

Keterangan	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan/ Institutional Relation	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat/ Treasury Banking & Head Office	Penyesuaian & Eliminasi/ Adjustment & Elimination*)	Jumlah/ Total	Descriptions
31 Desember/*December* 2021								
Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*)	2,808,091	951,158	2,691,166	18,578,835	1,799,790	(9,020,608)	17,808,432	*Revenue from fund management as mudharib*)
Hak pihak ketiga atas bagi hasil)	(2,161,852)	(655,636)	(2,220,079)	(9,411,079)	(14,583)	10,084,422	(4,378,807)	*Third parties' share on return*)
Hak bagi hasil milik Bank	646,239	295,522	471,087	9,167,756	1,785,207	1,063,814	13,429,625	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan usaha lainnya	155,853	15,094	-	423,230	2,418,069	-	3,012,246	*Other operating income*
Beban usaha	(98,426)	(36,481)	(75,559)	(4,709,241)	(3,863,066)	-	(8,782,773)	*Operating expenses*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif bersih	(866,975)	(114,814)	-	(1,710,027)	(859,433)	-	(3,551,249)	*Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net*
Total beban	(965,401)	(151,295)	(75,559)	(6,419,268)	(4,722,499)	-	(12,334,022)	*Total expenses*
Pendapatan non-operasional	-	-	-	-	45,641	-	45,641	*Non-operating income*
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	(163,309)	159,321	395,528	3,171,718	(564,864)	1,063,814	4,062,208	*Income before zakat and income tax expenses*
Zakat	-	(3,983)	(9,888)	(79,293)	-	(8,520)	(101,684)	*Zakat*
Beban pajak	-	(38,834)	(96,410)	(773,106)	-	(23,969)	(932,319)	*Tax expense*
Laba bersih	(163,309)	116,504	289,230	2,319,319	(564,864)	1,031,325	3,028,205	*Net income*
Aset segmen								***Segment of assets***
Pembiayaan *Wholesale*	38,946,234	10,434,016	-	-	-	-	49,380,250	*Wholesale Financing*
Pembiayaan Ritel								*Retail FInancing*
SME	-	-	-	18,330,923	-	-	18,330,923	*SME*
Mikro	-	-	-	16,275,013	-	-	16,275,013	*Micro*
Konsumer***)	-	-	-	87,304,972	-	-	87,304,972	*Consumer***)
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(3,323,040)	(610,220)	-	(3,278,752)	(263,761)	-	(7,475,773)	*Provision for impairment losses for financing*
Non pembiayaan - bersih	723,294	-	-	-	100,750,402	-	101,473,696	*Non financing - net*
	36,346,488	9,823,796	-	118,632,156	100,486,641	-	265,289,081	
Liabilitas, dana *syirkah* temporer dan ekuitas segmen								***Segment of liabilities, temporary syirkah funds and equity***
Pendanaan	5,732,478	7,074,696	70,662,382	150,907,943	1,375,000	-	235,752,499	*Funding*
Non-pendanaan	-	-	-	-	29,536,582	-	29,536,582	*Non-funding*
	5,732,478	7,074,696	70,662,382	150,907,943	30,911,582	-	265,289,081	

*) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi
**) Termasuk eliminasi komponen *internal transfer pricing*
***) Termasuk segmen *pawning* dan hasanah *card*

*) *Include component of internal transfer pricing among operating segments*
**) *Include elimination of internal transfer pricing components*
***) *Include pawning and hasanah card segment*

47. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

Liabilitas kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp2.928 dan Rp9.167. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

47. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Contingent liabilities

In the conduct of its business, the Bank is a defendant in various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of the Bank.

As at 31 December 2022 and 2021, the Bank has established a provision (included in "Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against the Bank amounted to Rp2,928 and Rp9,167, respectively. Management believes that the provision is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

48. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

48. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statements are as follows:

Keterangan	1 Januari/ *1 January 2022*	Aktivitas non-kas/ *Non-cash activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	*Descriptions*
			31 Desember/*December* 2022				
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,375,000	-	-	-	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Pembiayaan berjangka *mudharabah*	-	-	742,500	35,875	-	778,375	*Mudharabah term financing*
Liabilitas sewa	289,101	1,093	(124,192)	-	-	166,002	*Lease liabilities*

Keterangan	1 Januari/ *1 January 2021*	Aktivitas non-kas/ *Non-cash activity*	Arus kas/ *Cash flow*	Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/ *Total*	*Descriptions*
			31 Desember/*December* 2021				
Sukuk *mudharabah* subordinasi	1,375,000	-	-	-	-	1,375,000	*Subordinated sukuk mudharabah*
Liabilitas sewa	180,927	238,389	(130,215)	-	-	289,101	*Lease liabilities*

49. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 03/BSI/DPS/OPINI/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), serta opini syariah dari DPS.

Berdasarkan surat No. 04/BSI/DPS/OPINI/I/2022 tanggal 13 Januari 2022, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), serta opini syariah dari DPS.

49. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letter No. 03/BSI/DPS/OPINI/I/2023 dated 18 January 2023, the Sharia Supervisory Board ("DPS") of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2022, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council ("DSN-MUI"), and sharia opinion of DPS.

Based on letter No. 04/BSI/DPS/OPINI/I/2022 dated 13 January 2022, the Sharia Supervisory Board ("DPS") of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2021, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council ("DSN-MUI"), and sharia opinion of DPS.

50. RENCANA BARANG MODAL

Bank memiliki komitmen barang modal terkait dengan renovasi bangunan, pengadaan kendaraan dinas, perlengkapan komputer, ATM dan jasa lisensi sistem adalah sebesar Rp576.702 dan Rp668.040, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

50. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS

The Bank has capital expenditure plans in relation to the building renovations, procurement of office vehicles, computer equipments, ATMs and system license services amounting to Rp576,702 and Rp668,040 as at 31 December 2022 and 2021, respectively.

51. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK No. 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS No. 12 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Amendemen PSAK No. 107: "Akuntansi *Ijarah*".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka Panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

51. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2022 are as follows:

- *Amendment of SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";*
- *Amendment of SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;*
- *Amendment of SFAS No. 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;*
- *Amendment of SFAS No. 16: "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;*
- *Amendment of SFAS No. 46: "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS No. 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Amendment of SFAS No. 107: "Accounting for Ijarah".*

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- *Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant; and*
- *Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.*

The above standards will be effective on 1 January 2024 and early adoption is permitted.

51. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

- PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK No. 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

51. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE *(continued)*

- *SFAS No. 74: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment of SFAS No. 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information.*

The above standards will be effective on 1 January 2025.

As at the authorisation date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

52. AKUISISI TERBALIK

Seperti diungkapkan dalam Catatan 1c, efektif pada tanggal 1 Februari 2021, BRIS melakukan penggabungan usaha dengan BSM dan BNIS dimana BRIS menjadi entitas yang menerima penggabungan sedangkan BSM dan BNIS bubar demi hukum.

Transaksi merger Bank diperlakukan seperti akuisisi terbalik untuk tujuan akuntansi dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait kontrol atas Bank setelah penggabungan usaha, termasuk salah satunya yaitu pemegang saham BSM menjadi pemegang saham pengendali Bank.

Transaksi merger Bank diperlakukan seperti akuisisi terbalik untuk tujuan akuntansi dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- Pemegang saham BSM menjadi pemegang saham pengendali Bank pada saat penyelesaian transaksi;
- Komposisi organ pengatur Bank didominasi oleh ex-*legacy* BSM;
- Komposisi manajemen senior Bank didominasi oleh ex-*legacy* BSM;
- Komposisi total aset, total pendapatan dan laba pada saat penggabungan didominasi oleh ex-*legacy* BSM.

Dengan demikian, BSM dianggap sebagai pihak yang menerima bisnis, dan BRIS (sebagai pihak yang mengakuisisi secara hukum) dianggap sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Laporan keuangan Bank merupakan keberlanjutan dari laporan keuangan BSM.

Pada 1 Februari 2021, BRIS menerbitkan 31.130.700.245 saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) kepada pemegang saham BSM dan BNIS (setara dengan Rp15.565.350). Saham baru yang diterbitkan tersebut menghasilkan 51,18% kepemilikan pemegang saham BSM, 25,03% kepemilikan pemegang saham BNIS di entitas setelah penggabungan. Jumlah saham BRIS yang beredar per 1 Februari 2021 sebanyak 41.031.208.943 saham atau setara dengan Rp20.515.604.

52. REVERSE ACQUISITION

As disclosed in Note 1c, the merger between BRIS, BSM and BNIS was effective on 1 February 2021, with BRIS as the surviving entity, BSM and BNIS being dissolved by the law.

The Bank's merger transactions are accounted as reverse acquisitions for accounting purposes considering several factors related to the control over the Bank after the merger, one of them is the BSM's controlling shareholder as the controlling shareholder of the Bank.

The Bank's merger transactions are treated as reverse acquisitions for accounting purposes for the following reasons:

- *The shareholders of BSM become the controlling shareholders of the Bank at the time of transaction settlement;*
- *The composition of the Bank's regulatory organs is dominated by ex-legacy BSM;*
- *The composition of the Bank's senior management is dominated by ex-legacy BSM.*
- *The composition of total asset, total revenue and profit at the merger date is dominated by ex-legacy BSM.*

Thus, BSM is considered the acquirer in accounting terms, and BRIS (as the legal acquirer) is considered the acquiree for accounting purposes. The Bank's financial statements is a continuation of the BSM financial statements.

On 1 February 2021, BRIS issued 31,130,700,245 shares with a nominal value of Rp500 (full Rupiah) to BSM and BNIS shareholders (equivalent to Rp15,565,350). The newly issued shares resulted in 51.18% ownership of BSM's shareholder, 25.03% ownership of BNIS's shareholder in the entity after the merger. The number of outstanding BRIS shares as at 1 February 2021 was 41,031,208,943 shares or equivalent to Rp20,515,604.

52. AKUISISI TERBALIK (lanjutan)

Imbalan bersih yang dialihkan secara efektif yang timbul dari akuisisi terbalik sebesar Rp16.377.633 ditentukan dengan menggunakan nilai wajar saham BSM sebelum akuisisi, yaitu 599.437.496 saham dengan harga nilai wajar saham BSM sebesar Rp27.322 (Rupiah penuh) per saham. Imbalan bersih dihitung berdasarkan jumlah saham yang harus dikeluarkan BSM kepada entitas induk yang sah untuk memberi pemilik entitas induk yang sah persentase kepemilikan yang sama dalam entitas gabungan (BSI).

Selisih antara imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dengan aset bersih yang diperoleh sebesar Rp11.003.573 sebesar Rp5.374.061 diakui sebagai "Selisih Nilai Transaksi Penggabungan Bisnis Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" di bagian ekuitas laporan posisi keuangan.

Terkait dengan penggabungan usaha, berikut adalah rangkuman nilai buku bersih atas jumlah aset dan jumlah liabilitas yang diserahkan oleh BRIS dan BNIS kepada BSM per tanggal 1 Februari 2021 :

***52. REVERSE ACQUISITION** (continued)*

The net consideration effectively transferred arising from the reverse acquisition amounting to Rp16,377,633 was determined using the fair value of BSM shares before the acquisition, which was 599,437,496 shares at a fair value price of BSM shares amounting to Rp27,322 (full Rupiah) per share. The net consideration was calculated based on number of shares BSM would have had to have issued to the legal parent to give the owners of the legal parent the same percentage ownership in the combined entity (BSI).

The difference between net consideration effectively transferred and the net assets acquired of Rp11,003,573 amounting to Rp5,374,061 is recognised as "Difference in Value from Business Combination Transactions of Entities Under Common Control" and presented as part of "Additional Paid-in Capital" in the equity section of the statement of financial position.

In relation to the merger, below is a summary of the net book value of total assets and total liabilities transferred by BRIS and BNIS to the Bank as at 1 February 2021:

	1 Februari 2021/ *1 February 2021*	
Total aset	114,463,592	*Total assets*
Total liabilitas	(33,553,129)	*Total liabilities*
Total dana *syirkah* temporer	(69,906,890)	*Total temporary syirkah funds*
Nilai buku bersih	11,003,573	*Net book value*
Imbalan bersih yang secara efektif dialihkan	(16,377,634)	*Net consideration effectively transferred*
Selisih	(5,374,061)	*Difference*
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum dari Bank	(995,952)	*Adjustment arising from reverse acquisition to reflect the Company's legal capital*
Total tambahan modal disetor yang timbul dari akuisisi terbalik	(6,370,013)	*Total additional paid-in capital arising from reverse acquisition*

Sebagai akibat dari akuisisi terbalik, modal saham Bank disesuaikan untuk mencerminkan modal saham dari pihak yang melepas bisnis secara akuntansi sebesar Rp995.952 dengan penyesuaian terkait ke dalam akun "Tambahan modal disetor".

Total tambahan modal disetor yang timbul dari akuisisi terbalik senilai Rp6.370.013 merupakan penjumlahan antara selisih imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dengan nilai buku bersih BNIS dan BRIS, ditambah dengan penyesuaian untuk mencerminkan modal Bank menurut hukum pada tanggal 1 Februari 2021.

As a result of the reverse acquisition, the Bank's share capital was adjusted to reflect the share capital of the acquiree on an accounting basis amounting to Rp995,952 with a related adjustment to the "Additional paid-in capital" account.

The total additional paid-in capital arising from the reverse acquisition of Rp6,370,013 is the sum of the difference between the net consideration effectively transferred and the net book value of BNIS and BRIS, plus adjustments to reflect the Bank's legal capital as at 1 February 2021.

REFERENSI SEOJK

Nomor 10/SEOJK.03/2020: Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Keterangan					Halaman
PERIODE TAHUNAN					
I.	**Ruang Lingkup**				
	a.	Laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan BUS tahunan meliputi:			√
		1.	Informasi umum;		√
		2.	Informasi kinerja keuangan;		√
		3.	Eksposur risiko dan permodalan;		√
		4.	Tata kelola;		√
		5.	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan		√
		6.	Informasi terkait dengan kelompok usaha BUS.		
	b.	Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:			
		1.	Informasi Umum		
			Informasi umum dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling sedikit meliputi:		
			a)	Ikhtisar Data Keuangan Penting	12-15
				Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) Tahun Buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit meliputi:	12-15
				(1) net pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;	14
				(2) Laba/rugi operasional;	14
				(3) Laba/rugi sebelum pajak;	14
				(4) Laba/rugi bersih;	14
				(5) Total laba/rugi komprehensif;	14
				(6) Laba bersih per saham;	14
				(7) Jumlah aset;	12
				(8) Jumlah liabilitas;	12
				(9) Jumlah ekuitas;	13
				(10) Aset produktif;	-
				(11) Dana pihak ketiga;	12
				(12) Pembiayaan yang diterima;	12
				(13) Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:	15
				i. Rasio KPPM;	15
				ii. Rasio ROA;	15
				iii. Rasio ROE;	15
				iv. Rasio BOPO;	15
				v. Rasio CIR;	15
				vi. Persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD;	15
				vii. GWM;	15
				viii. Rasio PDN;	15

Keterangan					Halaman
			ix.	Rasio MPF gross dan net, dan	15
			x.	Rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan	-
		(14)		informasi lain yang relevan	16-19
	b)	Profil BUS			
		Profil BUS paling sedikit meliputi:			
		(1)		nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada Tahun Buku;	72
		(2)		informasi mengenai kantor pusat BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:	75
			i.	Alamat;	√
			ii.	Nomor telepon;	√
			iii.	Nomor facsimile;	√
			iv.	Alamat surat elektronik; dan	√
			v.	Alamat situs web.	√
		(3)		Riwayat singkat BUS;	76-77
		(4)		Visi dan misi BUS	80
		(5)		kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada Tahun Buku, serta jenis produk dan aktivitas;	82-92
		(6)		struktur organisasi BUS, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi yang disertai dengan nama dan jabatan;	102
		(7)		susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:	173-176
			I.	pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;	173
			ii.	anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang memiliki saham BUS;	174
			iii.	kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing- masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan	174
			iv.	informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	177
		(8)		profil direksi, dewan komisaris, dan DPS, paling sedikit meliputi:	105-127
			i.	susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.	√
				Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah Tahun Buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan direksi, dewan komisaris, dan/ atau DPS sebelum dan setelah perubahan;	√
			ii.	Foto terbaru;	√
			iii.	usia	√
			iv.	Kewarganegaraan;	√
			v.	Riwayat pendidikan;	√
			vi.	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	√
				a. nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;	√

Keterangan					Halaman
			b.	rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS (jika ada); dan	√
			c.	pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS;	√
		vii.		pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selama Tahun Buku (jika ada); dan	√
		viii.		hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali (jika ada) dan nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali tersebut;	√
	(9)			profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;	128-134
	(10)			jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia pegawai dalam Tahun Buku;	136-137
	(11)			nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	179-182
				Dalam hal terdapat lembaga dan/ atau profesi penunjang yang memberikan jasa secara berkala kepada BUS, misalnya kantor akuntan publik dan notaris, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	√
	(12)			penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam Tahun Buku terakhir (jika ada), yang meliputi:	20-25
		i.		nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√
		ii.		badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/ atau sertifikasi; dan	√
		iii		masa berlaku penghargaandan/ atau sertifikasi (jika ada).	√
c)	Laporan Direksi				52-61
	Laporan direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang terdiri atas:				
	(1)			strategi dan kebijakan yang ditetapkan;	55
	(2)			perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;	56
	(3)			kendala yang dihadapi BUS;	56
	(4)			gambaran tentang prospek usaha;	57
	(5)			penerapan tata kelola BUS;	58
	(6)			perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	60
	(7)			aktivitas utama;	-
	(8)			teknologi informasi;	59
	(9)			penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;	56
	(10)			persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;	56
	(11)			perkembangan perekonomian dan target pasar;	54
	(12)			jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	93
	(13)			jumlah, jenis, dan lokasi jaringan kantor BUS;	96-101
	(14)			kepemilikan direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;	183
	(15)			perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;	56
	(16)			hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan	56
	(17)			sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	59

Keterangan				Halaman
		d)	Laporan dewan komisaris	40-49
			Laporan dewan komisaris paling sedikit meliputi:	
			(1) penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan BUS;	42
			(2) hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;	44
			(3) tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;	45
			(4) tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;	45
			(5) perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	48
			(6) frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi.	47
	2	Informasi Kinerja Keuangan		184-241
		Informasi kinerja keuangan meliputi analisis dan pembahasan manajemen yang memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam Tahun Buku, yang paling sedikit meliputi:		
		a)	tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumer, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai:	192-205
			(1) Pendapatan; dan	√
			(2) Profitabilitas;	√
		b)	tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit meliputi:	206-214
			(1) penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;	207
			(2) dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;	210
			(3) ekuitas;	216
			(4) pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan	211
			(5) arus kas;	212
		c)	analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan;	212
		d)	struktur permodalan;	219
		e)	informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);	220
		f)	aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	223-226
		g)	uraian mengenai dividen selama 2 (dua) Tahun Buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	227
			(1) kebijakan dividen;	227
			(2) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen nonkas;	227
			(3) jumlah dividen per saham, baik berupa kas maupun nonkas;	227
			(4) jumlah pembayaran dividen per tahun;	227
		h)	perubahan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berpengaruh signifikan terhadap BUS dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	239
		i)	perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	241
		j)	Laporan distribusi bagi hasil;	213
		k)	Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan	214
		l)	Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.	214

Keterangan				Halaman
3)	Eskposur Risiko dan Permodalan			256-315
	Ruang lingkup eksposur risiko dan permodalan mengacu pada Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.			
4)	Tata Kelola			316-499
	a)	Informasi tata kelola		√
		Dalam hal BUS mengungkapkan informasi tata kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup informasi tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.		
	b)	Laporan Keberlanjutan		√
		(1)	Laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√
			Dalam hal BUS menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, ruang lingkup laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.	√
		(2)	Laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	500-502
			(a) Lingkungan hidup;	-
			(b) Praktik ketenagakerjaan;	-
			(c) Praktik kegiatan institusi yang sehat;	-
			(d) Konsumen; dan	-
			(e) Pengembangan masyarakat.	-
			Dalam hal BUS menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), BUS dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.	
5)	Laporan Keuangan yang Telah Diaudit			504
	Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi:			√
	(a)	Laporan posisi keuangan;		√
	(b)	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;		√
	(c)	Laporan perubahan ekuitas;		√
	(d)	Laporan arus kas; dan		√
	(e)	catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.		

Keterangan	Halaman
6) Informasi Terkait dengan Kelompok Usaha BUS	177
Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, menambahkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:	
a) Struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:	
(1) Struktur kelompok usaha BUS, yang antara lain terdiri dari BUS, Entitas Anak, perusahaan terelasi, Entitas Induk sampai dengan ultimate shareholder;	√
(2) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan	√
(3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholders acting in concert).	√
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;	√
b) transaksi antara BUS dengan pihak berelasi dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:	230-237
(1) informasi transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	230-237
(2) pihak berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;	230-237
(3) jenis transaksi dengan pihak berelasi, antara lain:	
(a) kepemilikan silang (cross shareholding);	√
(b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha lain;	√
(c) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;	√
(d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;	√
(e) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan	√
(f) pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement (repo);	√
c) transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;	230-237
d) penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/ atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;	-
e) adanya larangan, batasan, dan/ atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (regulatory capital) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan	-
f) nama dan alamat Entitas Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi BUS tersebut (jika ada).	-
c) BUS yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.	√

Referensi SEOJK NOMOR 16-SEOJK.04-2021: Laporan Tahunan Emiten Dan Perusahaan Publik

KETERANGAN			HAL
I.	**Ketentuan Umum**		
1.	Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:		√
	a.	Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik.	√
	b.	Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.	√
	c.	Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	√
	d.	Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	√
	e.	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	√
	f.	Direksi	√
		1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√
		2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	√
	g.	Dewan Komisaris:	√
		1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√
		2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai badan hukum tersebut.	√
	h.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:	√
		1) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan	√
		2) Bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.	√
2.	Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		√
3.	Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.		√
4.	Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.		√
5.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.		√

KETERANGAN		HAL
II.	**Bentuk Laporan Tahunan**	
1.	Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√
2.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√
3.	Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.	√
4.	Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√
III.	**Isi Laporan Tahunan**	
1.	Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:	
a.	Ikhtisar data keuangan penting;	12
b.	Informasi saham (jika ada);	16
c.	Laporan Direksi;	52
d.	Laporan Dewan Komisaris;	40
e.	Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	72
f.	Analisis dan pembahasan manajemen;	184
g.	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	316
h.	Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	500
i.	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	504
j.	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	70-71
2.	Uraian Isi Laporan Tahunan	
a.	Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	12-15
1)	pendapatan/penjualan;	14
2)	laba bruto;	14
3)	laba (rugi);	14
4)	jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	14
5)	total laba (rugi) komprehensif;	14
6)	jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	-
7)	laba (rugi) per saham;	14
8)	jumlah aset;	12
9)	jumlah liabilitas;	12
10)	jumlah ekuitas;	13
11)	rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	15
12)	rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	15
13)	rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	15
14)	rasio lancar;	15
15)	rasio liabilitas terhadap ekuitas;	15
16)	rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	15
17)	informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	15
b.	Informasi Saham Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	16-17

KETERANGAN			HAL
	1)	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	16
		a) Jumlah saham yang beredar;	16
		b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	16
		c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	16
		d) Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	16
		Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;	16
		Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;	16
	2)	Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	18
		a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	18
		b) Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham	18
		c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan	18
		d) Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	18
		e) Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	18
	3)	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	18
	4)	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;	18
c.		Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat:	52-61
	1)	Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	55-57
		a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	55
		b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	56
		c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	56
		d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	56
		e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	56
	2)	Gambaran tentang prospek usaha;	57
	3)	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	58
	4)	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	60
d.		Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	40-49
	1)	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	42
	2)	Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	44
	3)	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	45
	4)	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	45
	5)	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	48
	6)	Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	47
e.		Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	72-183

KETERANGAN	HAL
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	74
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	75
a) Alamat;	75
b) Nomor telepon;	75
c) Nomor faksimile;	75
d) Alamat surat elektronik; dan	75
e) Alamat Situs Web;	75
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	76
4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	80
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	82
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik;	93
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	102
8) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	104
9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:	118-127
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	118-127
b) Foto terbaru;	118-127
c) Usia;	118-127
d) Kewarganegaraan;	118-127
e) Riwayat pendidikan;	118-127
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	118-127
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	118-127
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	118-127
(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	118-127
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi;	118-127
h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	118-127
10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	105-113
a) Nama;	105-113
b) Foto terbaru;	105-113
c) Usia;	105-113
d) Kewarganegaraan;	105-113
e) Riwayat pendidikan;	105-113
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:	105-113
(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	105-113
(2) Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	105-113
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	105-113

KETERANGAN	HAL
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	105-113
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafilias	105-113
h) Pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	105-113
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	105-113
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	105-113
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;	136
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	173-176
a) Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	173
b) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	174
c) Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik;	174
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	175
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	
a) Kepemilikan institusi lokal;	176
b) Kepemilikan institusi asing;	176
c) Kepemilikan individu lokal; dan	176
d) Kepemilikan individu asing;	176
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	177
17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama di mana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	178
18) Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	178
19) Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	179
20) Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya meliputi:	179
a) Nama dan alamat;	179
b) Periode penugasan;	179
c) Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	179
d) Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	179
e) Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	179
21) Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP;	180-181

KETERANGAN			HAL
f.	Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:		184-241
	1)	Tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	192-205
		a) Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	192-205
		b) Pendapatan/penjualan; dan	192-205
		c) Profitabilitas;	192-205
	2)	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	206-214
		a) Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	207
		b) Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	209
		c) Ekuitas;	210
		d) Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	211
		e) Arus kas	212
	3)	Kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	215
	4)	Tingkat Kolektibilitas Piutang Emiten Atau Perusahaan Publik Dengan Menyajikan Perhitungan Rasio Yang Relevan;	217
	5)	Struktur Modal (Capital Structure) Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal (Capital Structure) Tersebut Disertai Dasar Penentuan Kebijakan Dimaksud;	219
	6)	Bahasan Mengenai Ikatan Yang Material Untuk Investasi Barang Modal Dengan Penjelasan Paling Sedikit Meliputi:	220
		a) Tujuan Dari Ikatan Tersebut;	-
		b) Sumber Dana Yang Diharapkan Untuk Memenuhi Ikatan Tersebut;	-
		c) Mata Uang Yang Menjadi Denominasi; Dan	-
		d) Langkah Yang Direncanakan Emiten Atau Perusahaan Publik Untuk Melindungi Risiko Dari Posisi Mata Uang Asing Yang Terkait;	-
	7)	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	220
		a) Jenis Investasi Barang Modal;	220
		b) Tujuan Investasi Barang Modal; Dan	220
		c) Nilai Investasi Barang Modal Yang Dikeluarkan;	220
	8)	informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	220
	9)	Prospek Usaha Dari Emiten Atau Perusahaan Publik Dikaitkan Dengan Kondisi Industri, Ekonomi Secara Umum Dan Pasar Internasional Disertai Data Pendukung Kuantitatif Dari Sumber Data Yang Layak Dipercaya;	221
	10)	Perbandingan Antara Target/Proyeksi Pada Awal Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai (Realisasi), Mengenai:	222
		a) Pendapatan/penjualan;	222
		b) Laba (rugi);	222
		c) Struktur modal (capital structure);	222
		d) Kebijakan dividen; atau	222
		e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	222
	11)	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	223
		a) Pendapatan/penjualan;	223
		b) Laba (rugi);	223
		c) Struktur modal (capital structure);	223

KETERANGAN		HAL
	d) Kebijakan dividen; atau	223
	e) Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	223
	12) Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	223-226
	13) Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	227
	a) Kebijakan dividen;	227
	b) Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	227
	c) Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	227
	d) Jumlah dividen per tahun yang dibayar;	227
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	-
	14) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	228
	a) Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	228
	b) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	228
	15) Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	230
	a) Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	230-237
	b) Nama pihak yang melakukan transaksi;	230-237
	c) Sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	230-237
	d) Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	238
	e) Pemenuhan ketentuan terkait;	238
	f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	
	(1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara laindilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle); dan	238
	(2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (arms- length principle);	238
	g) Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	239
	h) Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	-
	i) Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	-
	16) Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	239
	17) Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	241
g.	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	316-499
	1) RUPS, paling sedikit memuat:	322-343
	a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	322-343

KETERANGAN			HAL
		(1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan	322-343
		(2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	322-343
	b)	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	322-343
2)		Direksi, mencakup antara lain:	366-
	a)	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	367
	b)	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	369
	c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;	372
	d)	Delatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	378
		(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan	378
		(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	156-164
	e)	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	380
		(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	380
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	380
	f)	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	-
3)		Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	344-360
	a)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	344
	b)	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	348
	c)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk tingkat kehadiran dalam RUPS;;	353
	d)	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	358
		(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan	358
		(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	141-152
	e)	Penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit memuat:	359
		(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	359
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	359
		(3) Pihak yang melakukan penilaian;	359
	f)	Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	360
		(1) Prosedur penilaian kinerja; dan	360
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	360
4)		Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	386-387
	a)	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; dan	386-387
	b)	prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	386-387
		(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	386-387

KETERANGAN			HAL
		(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	386-387
	(3)	Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	386-387
5)		Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	360-366
	a)	Nama;	361
	b)	Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	361
	c)	Periode penugasan dewan pengawas syariah;	361
	d)	Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	361
	e)	Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	364
6)		Komite Audit, mencakup antara lain:	388-399
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	392
	b)	Usia;	392
	c)	Kewarganegaraan;	392
	d)	Riwayat pendidikan;	392
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	392
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	392
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	392
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	392
	f)	Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	392
	g)	Pernyataan independensi Komite Audit;	394
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	168-170
	i)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	395
	j)	Pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	400
7)		Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	400
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	401
	b)	Usia;	401
	c)	Kewarganegaraan;	401
	d)	Riwayat pendidikan;	401
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	401
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	401
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	401
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	401
	f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	401
	g)	independensi komite;	403
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	405
	i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	405
	j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	401
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	404
	l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	405

KETERANGAN			HAL
	m)	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	-
		(1) Alasan tidak dibentuknya komite; dan	-
		(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	-
8)		Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	406-418
	a)	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	407
	b)	Usia;	407
	c)	Kewarganegaraan;	407
	d)	Riwayat pendidikan;	407
	e)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	407
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	407
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	407
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	407
	f)	Periode dan masa jabatan anggota komite;	407
	g)	Pernyataan independensi komite;	410
	h)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	170-171
	i)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	406
	j)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	407
	k)	Kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	411
	l)	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	418
9)		Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	418-422
	a)	Nama;	419
	b)	Domisili;	419
	c)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	419
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	419
		(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	419
	d)	Riwayat pendidikan;	419
	e)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	171
	f)	Uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	421
10)		Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	429-436
	a)	Nama kepala Unit Audit Internal;	431
	b)	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	431
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai Kepala Audit Internal; dan	431
		(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	431
	c)	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	433
	d)	Pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	172
	e)	Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	430
	f)	Uraian tugas dan tanggung jawab;	432
	g)	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	431
	h)	Uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	436

KETERANGAN	HAL
11) Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	437
a) Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	437
b) Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	438
c) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	438
12) Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	258-315
a) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	264
b) Jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	266
c) Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	265
d) Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	265
13) Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	457-462
a) Pokok perkara/gugatan;	457-462
b) Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	457-462
c) Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	457-462
14) Informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	462-465
15) Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	480-482
a) Pokok-pokok kode etik;	481
b) Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	481
c) Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	481
16) Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	-
a) Jumlah saham dan/atau opsi;	-
b) Jangka waktu pelaksanaan;	-
c) Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	-
d) Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	-
17) Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	-
a) Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	-
b) Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	-
18) Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	482-483
a) Cara penyampaian laporan pelanggaran;	482
b) Perlindungan bagi pelapor;	483
c) Penanganan pengaduan;	484
d) Pihak yang mengelola pengaduan; dan	483
e) Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	484
(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	484
(2) Tindak lanjut pengaduan;	484

KETERANGAN			HAL
	19)	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	476-478
		a) Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	476
		b) Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	477
	20)	Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	494-499
		a) Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	494-499
		b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	494-499
h.		Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	500
	1)	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	502
		a) Penjelasan strategi keberlanjutan;	-
		b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	-
		c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	-
		d) Penjelasan Direksi;	-
		e) Tata kelola keberlanjutan;	-
		f) Kinerja keberlanjutan;	-
		g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	-
		h) Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	-
		i) Anggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	-
	2)	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	-
	3)	Informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka 1) dapat:	-
		a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/ atau	-
		b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	-
	4)	Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	-
	5)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	-
		a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	-
		b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	-
	6)	Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab social dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	-
	7)	Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	-

KETERANGAN		HAL
i.	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	504
	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sector Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	
j.	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	70-71
	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	